PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026



MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MELALUI PENGUATAN KETAHANAN DAERAH
YANG BERDAYA SAING

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2025

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

PARAF

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435)

PARAF

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, program strategis provinsi dan nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah

PARAF

dengan pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. acuan dan/atau pedoman dalam penyelarasan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam wilayah Daerah untuk mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan
c. dasar penyusunan KUA dan PPAS serta sebagai bahan sinkronisasi landasan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rincian sistematika RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RKPD

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026:
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan acuan pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama DPRD; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD.

PARAF

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal,7 Agustus 2025
BUPATI BULUKUMBA,

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal,7 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA SETDA

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 22

PARAF

Daftar Isi

Daftar Tabel ..... **iii**
Daftar Gambar ..... **ix**
Daftar Grafik ..... **x**
Lampiran ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang **I-1**
1.2 Dasar Hukum Penyusunan **I-3**
1.3 Hubungan Antar Dokumen **I-7**
1.4 Maksud Dan Tujuan **I-8**
1.5 Sistematika Dokumen RKPD **I-9**
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah **II-1**
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-103
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-152
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-192
2.1.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah II-210
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD **II-282**
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah **II-448**
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-448
2.3.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah) II-449
2.4 Isu Strategis **II-455**
2.4.1 Isu Strategis Global II-456
2.4.2 Isu Straegis Nasional II-461
2.4.3 Isu Strategis Daerah II-463
2.5 Inovasi Daerah **II-471**
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah **III-1**
3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026 ..... III-13
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah **III-15**
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-15
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah KabupatenBulukumba Tahun 2023-2027 ..... III-16
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja III-19
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayan Daerah III-24
3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya III-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan **IV-1**
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... **IV-1**
4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-2

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba IV-11
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 ..... IV-5
4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba IV-21
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 .... V-1
5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... V-2
5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 ..... V-16
BAB VIKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Makro Pembangunan VI-1
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI-4
6.2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-18
6.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) VI-21
BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Kesimpulan VII-2

Daftar Tabel

Tabel II-1 Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan II-2
Tabel II-2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024 ..... II-2
Tabel II-3 Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-3
Tabel II-4 Luas Lahan Sawah Tahun 2024 (Ha) II-6
Tabel II-5 Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi Tahun 2024 (Ha) II-7
Tabel II-6 Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-7
Tabel II-7 Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2024 ..... II-8
Tabel II-8 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi Sawah (GKP) Tahun 2024 ..... II-9
Tabel II-9 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung Tahun 2024 .... II-10
Tabel II-10 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2024 II-11
Tabel II-11 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2024 II-11
Tabel II-12 Luas Lahan, Luas Panen, dan Produksi Kacang Tanah (Biji Kering) Tahun 2020—2024 ..... II-12
Tabel II-13 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kacang Hijau Tahun 2020—2024 ..... II-13
Tabel II-14 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kedelai (Biji Kering) Tahun 2020—2024 ..... II-13
Tabel II-15 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sorgum Tahun 2023—2024 ..... II-14
Tabel II-16 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Porang Tahun 2022—2024 ..... II-15
Tabel II-17 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Dalam Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-15
Tabel II-18 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Hibrida Menurut Kecamatan di Kabupaten BulukumbaTahun 2020—2024..... II-16
Tabel II-19 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Robusta Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-17
Tabel II-20 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Arabika Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 – 2024 .... II-17
Tabel II-21 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 – 2024 .... II-18
Tabel II-22 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-18
Tabel II-23 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Jambu Mete Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-19
Tabel II-24 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Pala Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-19
Tabel II-25 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Lada Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-20
Tabel II-26 Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-21
Tabel II-27 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Besar Tahun 2020—2024 ..... II-21

Tabel II-28 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Rawit Tahun 2020—2024 ..... II-22
Tabel II-29 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Keriting Tahun 2020—2024 ..... II-22
Tabel II-30 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Mentimun Tahun 2020—2024 ..... II-23
Tabel II-31 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kacang Panjang Tahun 2020—2024 ..... II-23
Tabel II-32 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Terung Tahun 2020—2024 ..... II-24
Tabel II-33 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jahe Tahun 2020—2024 II-24
Tabel II-34 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Durian Tahun 2020—2024 ..... II-25
Tabel II-35 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Manggis Tahun 2020—2024 ..... II-25
Tabel II-36 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Mangga Tahun 2020—2024 ..... II-26
Tabel II-37 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Nangka Tahun 2020—2024 ..... II-26
Tabel II-38 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sukun Tahun 2020—2024 ..... II-27
Tabel II-39 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Rambutan Tahun 2020—2024 ..... II-27
Tabel II-40 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Pisang Tahun 2020—2024 ..... II-28
Tabel II-41 Sebaran Pengembangan Bibit Unggul melalui Kebun Percontohan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-29
Tabel II-42 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ekor)..... II-30
Tabel II-43 Data Populasi Sapi Potong Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 (Ekor) II-30
Tabel II-44 Rumpun Sapi Potong Kabupaten Bulukumba Tahun 2024..... II-31
Tabel II-45 Data Populasi Kerbau Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 (Ekor)..... II-32
Tabel II-46 Data Populasi Kuda dan Kambing Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 (Ekor) II-32
Tabel II-47 Data Populasi Unggas Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-33
Tabel II-48 Jumlah Produksi Daging Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024 ..... II-33
Tabel II-49 Jumlah Produksi Telur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024II-34
Tabel II-50 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan II-35
Tabel II-51 Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya II-36
Tabel II-52 Produksi Perikanan Budidaya Air Payau per Jenis Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-37
Tabel II-53 Produksi Perikanan Budidaya Air Payau per Jenis Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-38
Tabel II-54 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar per Jenis Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-40
Tabel II-55 Unit Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024..... II-41

Tabel II-56 Produksi Hasil Perikanan Tahun 2024 ..... II-43
Tabel II-57 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-43
Tabel II-58 Distribusi Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba II-44
Tabel II-59 Jenis Flora pada Kawasan TAHURA Bonto Bahari II-45
Tabel II-60 Jenis Fauna pada Kawasan TAHURA Bonto Bahari II-46
Tabel II-61 Persentase Luas Blok TAHURA Bonto Bahari..... II-47
Tabel II-62 Distribusi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kabupaten Bulukumba II-49
Tabel II-63 Daya Tarik Wisata Alam Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 .. II-50
Tabel II-64 Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 II-56
Tabel II-65 Daya Tarik Wisata Buatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024... II-62
Tabel II-66 Daya Tarik Wisata Budaya dan Religi Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-66
Tabel II-67 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2025 ..... II-73
Tabel II-68 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2029 ..... II-73
Tabel II-69 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2025 ..... II-76
Tabel II-70 Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2029 ..... II-77
Tabel II-71 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-107
Tabel II-72 Cakupan Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-116
Tabel II-73 Persentase Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Tahun 2024... II-133
Tabel II-74 Penetapan Perda Tentang Keagamaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 ..... II-135
Tabel II-75 Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-137
Tabel II-76 ..... II-139
Tabel II-77 Perbandingan Penduduk Usia 16-30 Tahun dan Jumlah Seluruh Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-151
Tabel II-78 Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa) II-156
Tabel II-79 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Rupiah) II-157
Tabel II-80 Proyeksi Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Bulukumba tahun 2026-2030 ..... II-158
Tabel II-81 Proyeksi Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Bulukumba Tahun 2026—2030 (Rupiah) II-159
Tabel II-82 Jumlah Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba II-161
Tabel II-83 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-161
Tabel II-84 Jumlah Koperasi Sehat dan Tidak Sehat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-164
Tabel II-85 Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Kabupaten Bulukumba per Juni 2025 ..... II-165

Tabel II-86 Produktivitas Perkebunan menurut Komoditi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha) II-168
Tabel II-87 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)II-181
Tabel II-88 Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-182
Tabel II-89 Jumlah Perda yang ditetapkan dan ditegakkan di Kabupaten Bulukumba II-203
Tabel II-90 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2024 ..... II-204
Tabel II-91 Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-205
Tabel II-92 Nama Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-207
Tabel II-93 Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota Tahun 2020—2024 .... II-209
Tabel II-94..... II-212
Tabel II-95 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel II-96 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024..... II-218
Tabel II-97 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-241
Tabel II-98 Sebaran Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-243
Tabel II-99 Angka Penurunan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bulukumba II-244
Tabel II-100 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-246
Tabel II-101 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-250
Tabel II-102 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-252
Tabel II-103 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-253
Tabel II-104 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-254
Tabel II-105 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-255
Tabel II-106 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-257
Tabel II-107 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-257
Tabel II-108 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-258
Tabel II-109 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-259
Tabel II-110 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-260
Tabel II-111 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-261

Tabel II-112 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-262
Tabel II-113 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-263
Tabel II-114 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-263
Tabel II-115 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-264
Tabel II-116 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-265
Tabel II-117 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-266
Tabel II-118 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Kabupaten Bulukumba II-266
Tabel II-119 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Kabupaten Bulukumba II-267
Tabel II-120 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba II-267
Tabel II-121 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba II-268
Tabel II-122 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Bulukumba II-269
Tabel II-123 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-270
Tabel II-124 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kabupaten Bulukumba II-271
Tabel II-125 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Bulukumba II-273
Tabel II-126 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Bulukumba II-274
Tabel II-127 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Kabupaten Bulukumba II-276
Tabel II-128 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-277
Tabel II-129 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan Kabupaten Bulukumba II-278
Tabel II-130 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Kabupaten Bulukumba II-279
Tabel II-131 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Manajemen Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-281
Tabel II-132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024..... II-282
Tabel II-133 Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD II-283
Tabel II-134 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD II-287
Tabel II-135 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD..... II-290
Tabel II-136 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-293
Tabel II-137 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-295
Tabel II-138 Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD II-295
Tabel II-139 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba II-299

Tabel II-140 Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba..... II-472
Tabel III-1 Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut III-6
Tabel III-2 Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024..... III-7
Tabel III-3 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2024III-11
Tabel III-4 Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2027 ..... III-18
Tabel III-5 Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2027 ..... III-23
Tabel III-6 Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2026 ..... III-25
Tabel III-7 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024 ..... III-26
Tabel IV-1 Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 ..... IV-1
Tabel IV-2 Target Sasaran pembangunan Nasioanl, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... IV-4
Tabel IV-3 Keselarasan Prioritas Nasional dan..... IV-1
Tabel IV-4 Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional berdasarkan RKP Nasional Tahun 2026 ..... IV-1
Tabel IV-5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... IV-1
Tabel IV-6 Dukungan Program Kabupaten Bulukumba terhadap Program . IV-1
Tabel IV-7 Keselarasan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.... IV-7
Tabel IV-8 Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-8
Tabel V-1 Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2026 ..... V-1
Tabel V-2 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... V-3
Tabel V-3 Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bulukumba..... V-16
Tabel V-4 Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025..... V-18
Tabel VI-1 Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... VI-1
Tabel VI-2 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2025..... VI-2
Tabel VI-3 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... VI-5
Tabel VI-4 Capaian dan Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Bulukumba 2026-2030 ..... VI-18
Tabel VI-5 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2026..... VI-22

Daftar Gambar

Gambar I-1 Sistematika Penyusunan RKPD I-2
Gambar I-2 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 ..... I-7
Gambar II-1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba II-1
Gambar II-2 Peta Topografi Bulukumba II-3
Gambar II-3 Peta Geologi Bulukumba II-4
Gambar II-4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba..... II-4
Gambar II-5 Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bulukumba II-7
Gambar II-6 Peta Kesesuaian Rumput Laut..... II-39
Gambar II-7 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba II-45
Gambar II-8 Peta Pengembangan TAHURA Bonto Bahari II-47
Gambar II-9 Peta Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kabupaten Bulukumba II-49
Gambar II-10 Peta Sebaran Daerah Wisata Kabupaten Bulukumba II-70
Gambar II-11 Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2022..... II-71
Gambar II-12 Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022 ..... II-72
Gambar II-13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2022 II-72
Gambar II-14 Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022 ..... II-73
Gambar II-15 Peta Ketersediaan Air Tahun 2022 ..... II-74
Gambar II-16 Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2022..... II-75
Gambar II-17 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2022... II-76
Gambar II-18 Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2022 ..... II-76
Gambar II-19 Peta Sebaran ASN Kabupaten Bulukumba Per Juni 2025 .. II-280
Gambar IV-1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-3

Daftar Grafik

Grafik II-1 Persentase Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun 2024 (Persen) II-35
Grafik II-2 Komposisi Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan II-36
Grafik II-3 Proporsi Produksi Budidaya Air Payau Per Kecamatan Tahun 2024 (Persen) II-37
Grafik II-4 Persentase Produksi Rumput laut Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 (Persen) II-38
Grafik II-5 Persentase Produksi Budidaya Kolam Per Kecamatan Tahun 2024 (Persen) II-40
Grafik II-6 Persentase Produksi Budidaya Mina Padi Per Kecamatan Tahun 2024 (Persen) II-41
Grafik II-7 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (KWh/kapita) II-78
Grafik II-8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-79
Grafik II-9 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-80
Grafik II-10 Skor Pola Pangan Harapan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-81
Grafik II-11 Kapasitas Air Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (m^3/detik) II-82
Grafik II-12 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (persen) II-83
Grafik II-13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-83
Grafik II-14 Indeks Kualitas Air Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-84
Grafik II-15 Indeks Kualitas Udara Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-85
Grafik II-16 Indeks Kualitas Lahan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-85
Grafik II-17 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia II-86
Grafik II-18 Indeks Pertanaman (IP) Padi II-87
Grafik II-19 Proporsi Sawah Irigasi II-88
Grafik II-20 Jumlah Pengadaan Rumpon Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Unit) II-89
Grafik II-21 ..... II-90
Grafik II-22 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-91
Grafik II-23 Pengelolaan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024II-93
Grafik II-24 Jumlah Timbulan Sampah (Ton) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-93
Grafik II-25 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024 (Persen) II-94
Grafik II-26 Daur Ulang Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-94

Grafik II-27 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah II-95
Grafik II-28 Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-96
Grafik II-29 Emisi GRK Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Gg Co2-Eq) II-97
Grafik II-30 Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-98
Grafik II-31 Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-98
Grafik II-32 Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-99
Grafik II-33 Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-100
Grafik II-34 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba 2020—2024 ..... II-101
Grafik II-35 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-101
Grafik II-36 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-102
Grafik II-37 Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-103
Grafik II-38 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2030 ..... II-103
Grafik II-39 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-104
Grafik II-40 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen) II-105
Grafik II-41 Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-105
Grafik II-42 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen) II-106
Grafik II-43 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ribu Jiwa) II-108
Grafik II-44 Indeks Gini Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka). II-109
Grafik II-45 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-110
Grafik II-46 Perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen) II-110
Grafik II-47 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-111
Grafik II-48 Perbandingan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Angka) II-111
Grafik II-49 Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-112
Grafik II-50 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-113
Grafik II-51 PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-114

Grafik II-52 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-114
Grafik II-53 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-115
Grafik II-54 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-115
Grafik II-55 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-116
Grafik II-56 Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)..... II-117
Grafik II-57 Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun) II-117
Grafik II-58..... II-118
Grafik II-59..... II-119
Grafik II-60 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa)..... II-120
Grafik II-61 Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen) II-121
Grafik II-62 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Bulukumba 2020—2024 (Persen) II-122
Grafik II-63 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba 2020—2024 (Persen) ... II-123
Grafik II-64 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-124
Grafik II-65 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-125
Grafik II-66 Data Kasus Kusta Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Kasus) II-126
Grafik II-67 Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-127
Grafik II-68 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Persen) II-127
Grafik II-69 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Persen) II-128
Grafik II-70 Rata Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-129
Grafik II-71 Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun) II-129
Grafik II-72 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) ... II-130
Grafik II-73 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-131
Grafik II-74 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka) II-131
Grafik II-75 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen) II-133
Grafik II-76 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-134

Grafik II-77 Jumlah Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa) II-138
Grafik II-78..... II-139
Grafik II-79 Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-143
Grafik II-80 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka) II-144
Grafik II-81 Indeks Perlindungan Anak Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2023 (Angka)..... II-145
Grafik II-82 Indeks Ketimpangan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)..... II-146
Grafik II-83 Indeks Pembangunan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)..... II-148
Grafik II-84 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Angka) II-149
Grafik II-85 Capaian Lima Domain Pembentuk IPP Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2023..... II-150
Grafik II-86 Persentase Perbandingan Penduduk Usia 16-30 Tahun dan Jumlah Seluruh Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 ..... II-151
Grafik II-87 Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-152
Grafik II-88 Rasio PDRB Industri Pengolahan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan II-154
Grafik II-89 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-155
Grafik II-90 Persentase Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-157
Grafik II-91 Jumlah Industri Kecil dan Menengah..... II-160
Grafik II-92 Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-162
Grafik II-93 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-163
Grafik II-94 Presentase Koperasi Sehat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-164
Grafik II-95 *Return on Aset* (ROA) BUMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Persen) II-166
Grafik II-96 Produktivitas Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)..... II-166
Grafik II-97 Produktivitas Padi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)..... II-167
Grafik II-98 Produktivitas Jagung Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)..... II-168
Grafik II-99 Jumlah Produksi Hortikultura Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton) II-169
Grafik II-100 Jumlah Produksi Daging Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton) II-169
Grafik II-101 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (ton) II-170
Grafik II-102 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton) II-171

Grafik II-103 Produksi Perikanan Budidaya Tambak Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton) II-174
Grafik II-104 Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)..... II-175
Grafik II-105 Produksi Perikanan Budidaya Kolam Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton) II-176
Grafik II-106 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-176
Grafik II-107 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-177
Grafik II-108 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-178
Grafik II-109 Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka) II-179
Grafik II-110 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap APBD Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-179
Grafik II-111 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2022 (Angka) II-180
Grafik II-112 Pembentukan Modal Tetap Bruto II-182
Grafik II-113 Net Ekspor Barang dan Jasa II-183
Grafik II-114 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-184
Grafik II-115 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Persen) ... II-185
Grafik II-116 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka) II-185
Grafik II-117 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen)..... II-186
Grafik II-118 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)..... II-187
Grafik II-119 Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-188
Grafik II-120 Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)..... II-189
Grafik II-121 Jumlah Investasi Non UMK PMA/PMDN..... II-190
Grafik II-122 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Angka) II-191
Grafik II-123 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)..... II-192
Grafik II-124 Nilai SAKIP Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)II-193
Grafik II-125 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023—2024 (Angka) II-195
Grafik II-126 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-196
Grafik II-127 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka) II-197
Grafik II-128 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka)..... II-198
Grafik II-129 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka) II-200

Grafik II-130 Nilai MCP KPK Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka) II-200
Grafik II-131 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka) II-202
Grafik II-132 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-206
Grafik II-133 Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-206
Grafik II-134 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen) II-208
Grafik II-135 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka) II-210
Grafik II-136 Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 ..... II-242
Grafik III-1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026 ..... III-8
Grafik III-2 PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba Capaian 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026 ..... III-9
Grafik III-3 Inflasi Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan . III-10
Grafik III-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba dan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026 III-11
Grafik III-5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan III-12
Grafik III-6 Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional III-13

Lampiran

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 22 TAHUN 2025 TANGGAL 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 22 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

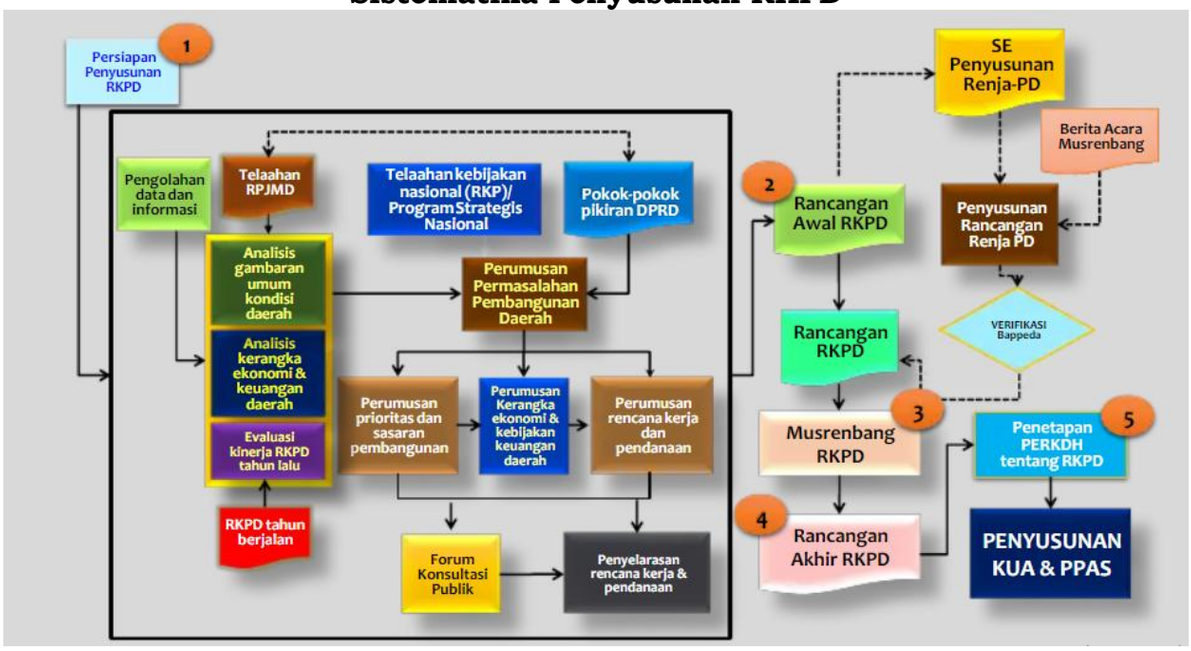
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan program kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder pembangunan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 juga berpedoman pada RKP Nasional 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat.

Sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pada Pasal 16 Ayat (1) ini mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Sistematika penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I-1
Sistematika Penyusunan RKPD



Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rembug warga, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2024 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,60 Persen, Tingkat Kemiskinan 6,71 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 2,23 Persen, Gini Ratio 0,329, Indeks Pembangunan Manusia 74,43 Angka dan PDRB Perkapita (ADHB) 44,48 Juta/Rp.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penyelenggaraan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Neara Republik Indoensia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang ResponsifGender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang PelindunganPerempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 322);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 10);

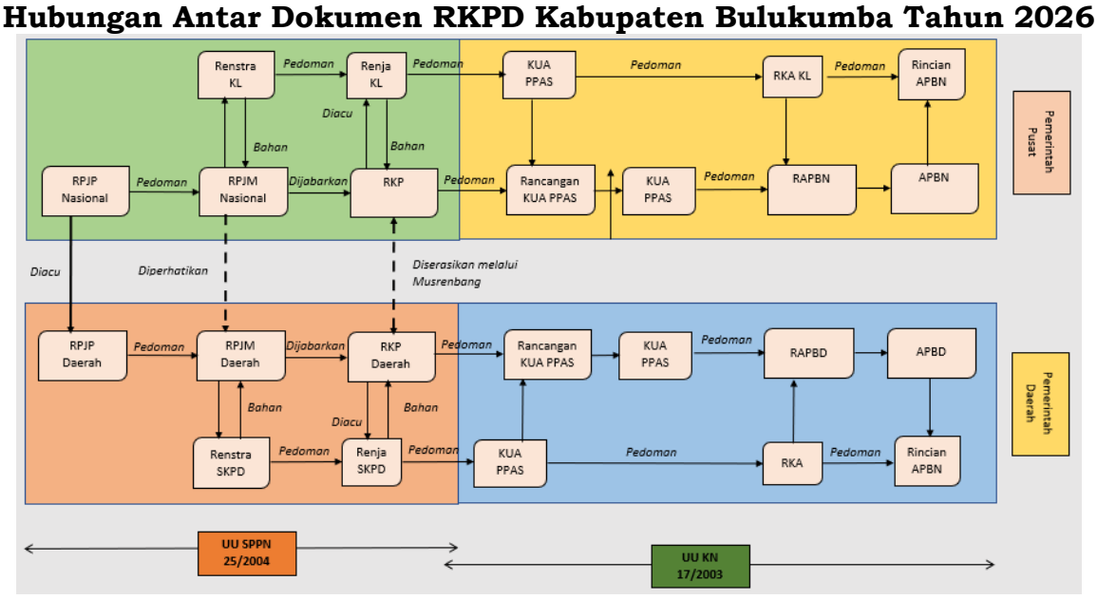
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 4);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan jangka panjang daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Gambar I-2
Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2026 mengacu berbagai substansi dalam RKP Nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP Nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026. Meskipun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya, dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2026. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Wilayah Kabupaten Bulukumba yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Bulukumba. RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran tahun keempat. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan kedalam program kegiatan RKPD, serta memuat capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029 sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa setiap arah kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya selaras dengan pembangunan provinsi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. KLHS menjadi dasar dalam mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga integrasi antara RKPD dan KLHS akan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan KUA ini merupakan langkah untuk menjawab amanat yang dimuat dalam pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai kewajiban bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS . KUA ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret. Selanjutnya KUA-PPAS menjadi landasan penyusunan rancangan APBD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda APBD setelah melalui proses pembahasan dan persetujan antara Bupati dan DPRD.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 yaitu:

1. Penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Pedoman perumusan dan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
3. Pedoman penyelerasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten;
4. Pedoman dalam memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
5. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
6. Pedoman untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
7. Sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan capaian tahun 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 yaitu:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Pada BAB ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Pada BAB ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pada BAB ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP
Pada BAB ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum mengenai kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bulukumba yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu kota terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.175,53 km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tanggal 9 November Tahun 2022.

Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada terletak diantara 5°20´-5°40´ Lintang Selatan (LS) dan 119°58´-120°28´ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Adapun dengan batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Selayar dan Laut Flores
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Gambar II-1
Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Secara administrasi Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 27 kelurahan, 109 desa, 102 lingkungan, dan 496 Dusun, untuk luas wilayah terbesar di Kecamatan Gantarang (175,84) dan luas wilayah terkecil

di Kecamatan Ujung Bulu (14,63). Adapun luas wilayah administrasi pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-1
Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingk.	Dusun	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Luas Kecamatan
1.	Gantarang	3	18	8	82	175,84	15,03
2.	Ujung Bulu	9	0	31	-	14,63	1,25
3.	Ujungloe	1	12	4	42	146,25	12,50
4.	Bonto Bahari	4	4	13	13	115,51	9,41
5.	Bonto Tiro	1	12	5	45	79,39	6,79
6.	Herlang	2	6	10	27	69,71	5,96
7.	Kajang	2	17	11	100	130,79	11,18
8.	Bulukumpa	3	14	7	76	173,63	14,84
9.	Rilauale	1	14	5	58	119,11	10,18
10.	Kindang	1	12	4	46	150,67	12,88
Kabupaten Bulukumba		**27**	**109**	**98**	**489**	**1.175,53**	**100.00**

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117

Jika dilihat dari luas wilayah, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2024 sebesar 408,90 orang per km^2 dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 480.672 jiwa. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel II-2
Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Gantarang	89.990
2.	Ujung Bulu	52.290
3.	Ujungloe	51.872
4.	Bonto Bahari	31.245
5.	Bonto Tiro	29.880
6.	Herlang	31.000
7.	Kajang	54.204
8.	Bulukumpa	57.456
9.	Rilauale	46.850
10.	Kindang	35.885
	Kabupaten Bulukumba	**480.672**

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2025

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bulukumba pada umumnya memiliki permukaan yang bervariasi. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (mdpl) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Kabupaten Bulukumba membentang dari dataran tinggi ke dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 mdpl meliputi tujuh kecamatan pesisir sepanjang 128 Km yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu, Kabupaten Bulukumba memiliki daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 mdpl, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilauale. Dan juga terdapat

daerah perbukitan yang terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut (mdpl) meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilauale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang, luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen. Untuk lebih jelasnya topografi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II-2
Peta Topografi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas Permukaan Laut (mdpl) dengan tingkat kemiringan tanah 0-400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar 62 km. Selengkapnya pada tabel berikut.

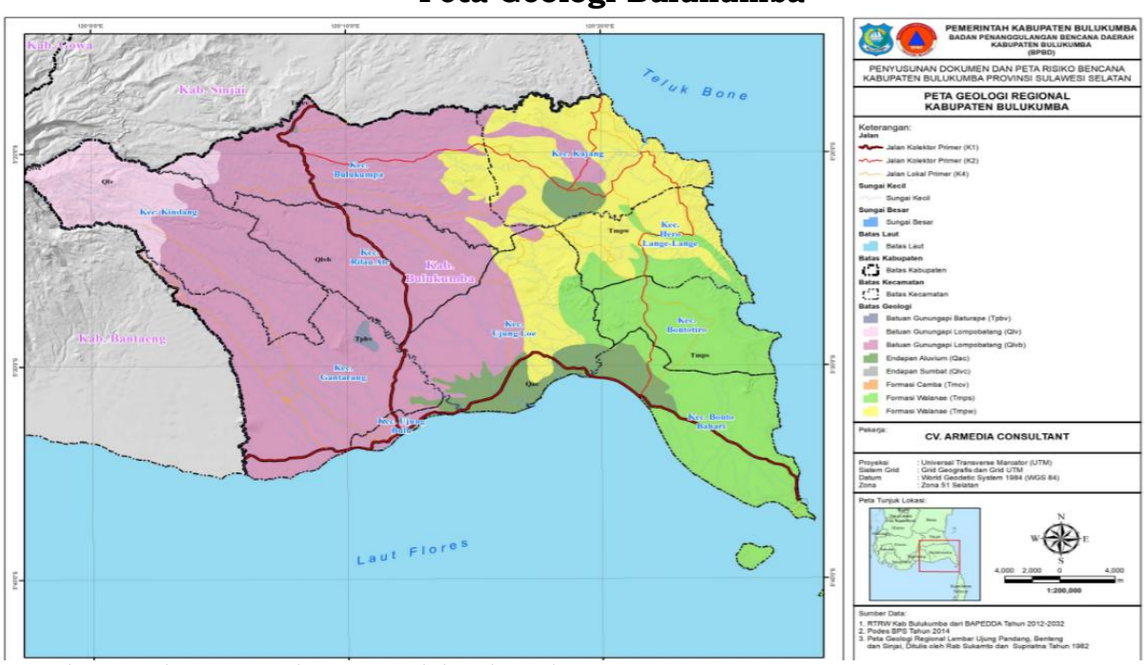
Tabel II-3
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Gantarang	25	5
2	Ujung Bulu	0	1
3	Ujungloe	26	11
4	Bonto Bahari	26	27
5	Bonto Tiro	100	35
6	Herlang	80	42
7	Kajang	80	62
8	Bulukumpa	100	31
9	Rilauale	100	24
10	Kindang	500	33

Sumber : Bulukumba dalam Angka tahun 2024

Keberadaan satuan batuan yang menyusun geomorfologi Bulukumba mempunyai dimensi yang berbeda-beda. Batuan tertua berumur Miosen tengah (*Bedrock*) berada pada pemekaran dasar laut Teluk Bone sementara batuan termuda berumur Plistosen berada pada sesar Walanae di daratan Bulukumba (Formasi Lompobattang). Hal ini menandakan sistem tektonik yang bekerja tidak selalu sama. Untuk lebih jelasnya geologi di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

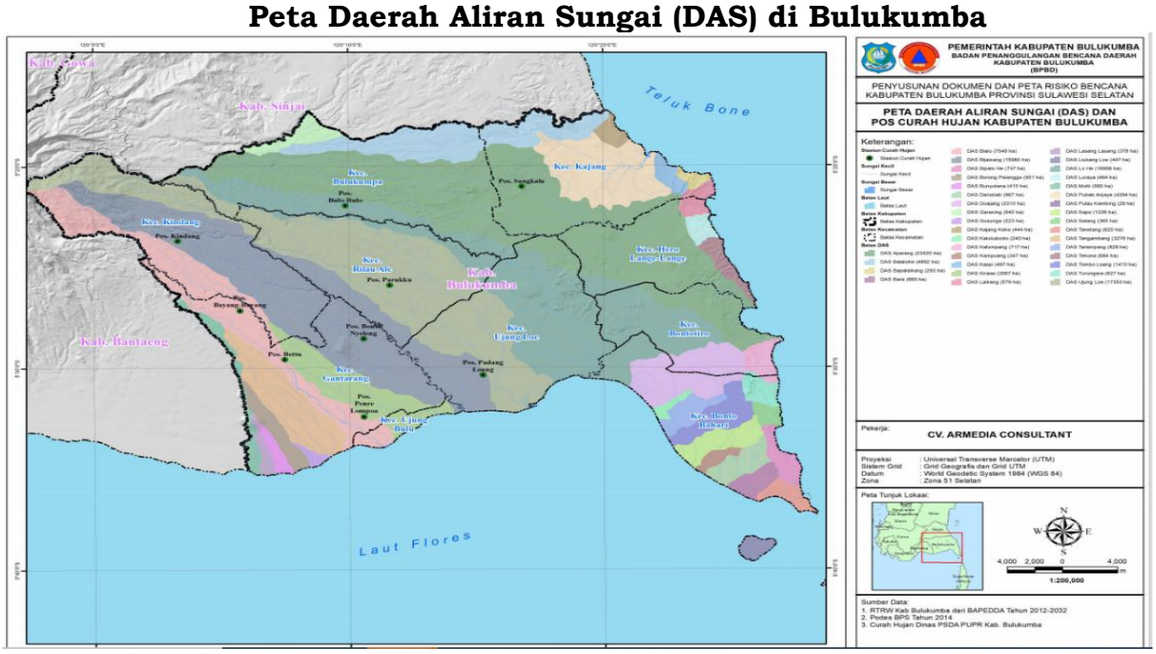
Gambar II-3
Peta Geologi Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bulukumba berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 terdapat ada 36 daerah yang mempunyai luas yakni 117.526,97 Ha. Daerah Aliran Sungai yang terluas mencapai 23.413,48 adalah DAS Aparang sedangkan yang tersempit adalah DAS Liukang Loe yakni 25,07 Ha. Untuk lebih jelasnya DAS di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dan grafik di bawah ini.

Gambar II-4
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bulukumba



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23.82 °C-27.68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 16 buah stasiun klimatologi curah hujan yang tersebar di 10 kecamatan yakni: Stasiun Bettu, Stasiun Bayang-Bayang, Stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kindang, Stasiun Borong Rappoa, Stasiun Garuntungan, Stasiun Padang Loang, Stasiun Lotong-Lotong, Stasiun Bonto Bahari, Stasiun Bonto Tiro, Stasiun Herlang, Stasiun Kajang, Stasiun Tanete, Stasiun Parukku, Stasiun Kalumeme, dan Stasiun Loka. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah. Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 800-1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujung Bulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujungloe dan sebagian besar Bonto Bahari.
- Curah hujan antara 1000-1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujungloe dan sebagian Bonto Tiro.
- Curah hujan antara 1500-2000 mm/tahun. meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilauale, sebagian Ujungloe, sebagian Kindang. sebagian Bulukumpa, sebagian Bonto Tiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilauale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Peran strategis Kabupaten Bulukumba ditinjau dari aspek ekonomi memainkan peran strategis sebagai pusat distribusi dan perdagangan, posisi Bulukumba sebagai daerah perbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar dan akses ke Teluk Bone menjadikannya titik penghubung penting antara daratan Sulawesi dengan wilayah kepulauan di sekitarnya, memperkuat fungsi Bulukumba sebagai pusat distribusi dan perdagangan di selatan provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut ditandai oleh letak geografis yang menghubungkan daratan dan wilayah kepulauan, topografi yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, serta peran penting dalam budaya dan perdagangan regional.

Peran strategis Kabupaten Bulukumba ditinjau dari aspek infrastruktur antarwilayah dapat dilihat dengan keberadaan infrastruktur transportasi laut dan darat. Infrastruktur transportasi laut ditandai dengan adanya 3 pelabuhan yaitu Pelabuhan Leppe'e, Pelabuhan Bira, dan Pelabuhan Kajang. Keberadaan infrastuktur ini menjadi peran utama dalam memperkuat konektivitas maritim dan perdagangan regional, sedangkan infrastruktur transportasi darat mendukung mobilitas dan konektivitas darat antarwilayah yang mendukung distribusi barang dan jasa serta sektor pariwisata.

Saat ini Pelabuhan Leppe'e menjadi pelabuhan singgah pada trayek kapal perintis yang menghubungkan rute penting seperti Bima – Labuan Bajo – Bonerate – Selayar – Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan, sehingga hal ini membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, penguatan distribusi barang dan penumpang, serta pengembangan pariwisata regional.

Selain itu, pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025—2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025—2045 berdasarkan kawasan pembangunan di Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa kawasan. Kawasan Bulukumba (Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar) diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Pariwisata dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Bagian Selatan, yang mana Kabupaten Bulukumba didukung dengan panjang garis pantai 128 km yang berada pada 7 kecamatan yaitu Gantarang, Ujung Bulu, Ujungloe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Herlang, dan Kajang.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Bulukumba sangat beragam dan menjadi potensi unggulan yang tercermin dalam beberapa sektor utama, antara lain sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Apabila potensi ini dikelola secara optimal dan berkelanjutan, maka akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat.

2.1.1.2.1 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan data, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 34,97% terhadap PDRB pada tahun 2024. Sektor ini tumbuh sebesar 4,43% Subsektor yang paling dominan memberikan kontribusi dalam sektor pertanian secara umum adalah subsektor perkebunan, kemudian disusul oleh subsektor perkebunan dan subsektor tanaman pangan. Hal ini didukung dengan sumberdaya lahan yang luas, iklim yang sesuai dan keanekaragaman hayati.

a) Potensi Lahan Sawah

Potensi lahan sawah yang diusahakan sampai tahun 2024 seluas **22.991,33** Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-4
Luas Lahan Sawah Tahun 2024 (Ha)

No	Kecamatan	Diusahakan untuk Pertanian	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG	7.881,52	174,17	8.055,69
2	UJUNG BULU	254,90	80,10	335,00
3	UJUNGLOE	3.088	-	3.088,00
4	BONTO BAHARI	63		63,00
5	BONTO TIRO	168	-	168,00
6	HERLANG	533	10,64	543,64
7	KAJANG	2450	0	2.450,00
8	BULUKUMPA	3.007,72	111,28	3.119,00
9	RILAUALE	3.211	0	3.211,00
10	KINDANG	1.688,75	269,25	1.958
Total		**22.345,89**	**645,44**	**22,991.33**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Dari luas lahan sawah tersebut di atas menurut jenis irigasi atau pengairannya, terdiri dari: lahan sawah Irigasi seluas 22.345 Hektar atau sekitar 97,19 persen dari total lahan sawah dan jenis lahan sawah tadah hujan sebesar 645,44 Hektar atau 2,81 persen. Mayoritas lahan sawah di Kabupaten Bulukumba mampu berproduksi 2 kali dalam setahun. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-5
Luas Lahan Sawah Menurut Irigasi Tahun 2024 (Ha)

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	GANTARANG	7.881,52	174,17	-	-	8,055.69
2.	UJUNG BULU	254,90	80,10	-	-	335.00
3.	UJUNGLOE	3.088	-	-	-	3,088.00
4.	BONTO BAHARI	63		-	-	63.00
5.	BONTO TIRO	168	-	-	-	168.00
6.	HERLANG	533	10,64	-	-	543.64
7.	KAJANG	2450	0	-	-	2,450.00
8.	BULUKUMPA	3.007,72	111,28	-	-	3,119.00
9.	RILAUALE	3.211	0	-	-	3,211.00
10.	KINDANG	1.688,75	269,25	-	-	1,958.00
		22.345,89	**645,44**			***22,991.33***

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. KP2B merupakan hasil penjumlahan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

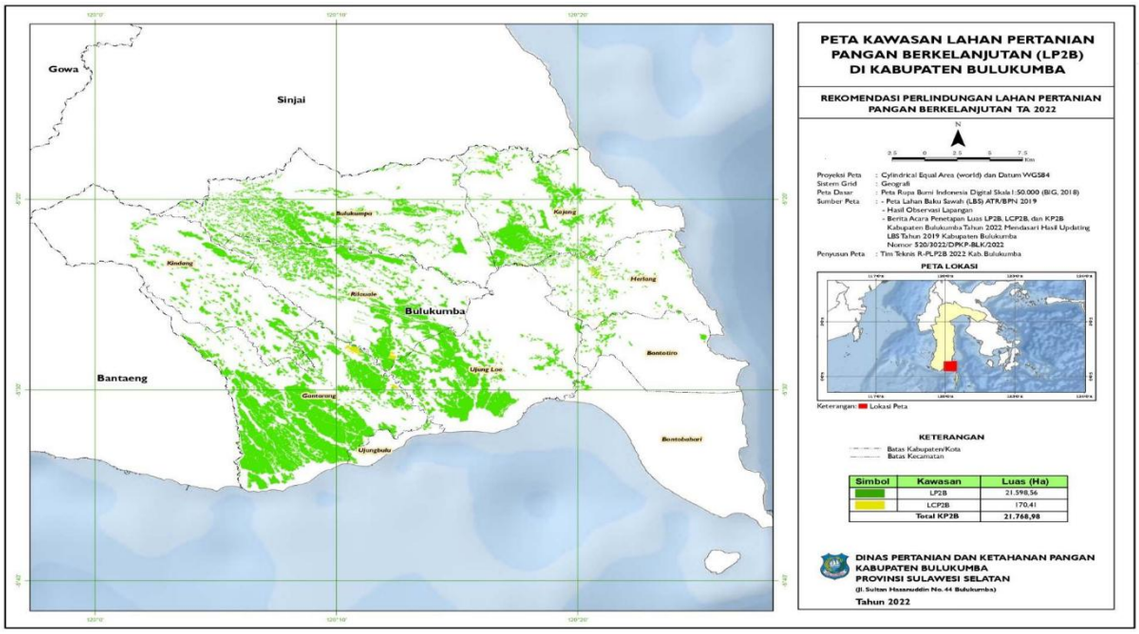
Tabel II-6
Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
1	Gantarang	6.808,06	451,20	7.259,26
2	Ujung Bulu	-	-	-
3	Ujungloe	2.927,58	901,41	3.828,99
4	Bonto Bahari	46,71	174,27	220,98
5	Bonto Tiro	166,20	182,94	349,14
6	Herlang	379,44	511,58	891,02
7	Kajang	2.249,88	186,07	2.435,95
8	Bulukumpa	2.508,78	45,04	2.553,78
9	Rilauale	2.883,14	61,99	2.945,13
10	Kindang	1.263,15	392,19	1.655,34
Jumlah		19.232,94	2.906,69	22.139,59

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Kecamatan Gantarang merupakan wilayah dengan luas KP2B terbesar, yaitu 7.259,26 Ha, yang didominasi oleh LP2B seluas 6.808,06 Ha. Ini menunjukkan peran strategis Kecamatan Gantarang dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Gambar II-5
Peta Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bulukumba



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Potensi lahan bukan sawah Tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari Tegal/ Kebun, Ladang/ Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat, Padang/ Pengembalaan/ Padang Rumput dan Tambak/ Kolam/ Empang, seluas **78,631.62 Ha**. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-7
Luas Lahan Bukan Sawah Tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAHAN BUKAN SAWAH								
		TEGAL/ KEBUN	LADANG /HUMA	PER KEBUNAN	HUTAN RAKYAT	PADANG/ PENGEMBALAAN/ PADANG RUMPUT	SEMENTARA TDK DIUSAHAKAN	HUTAN NEGARA	LAIN-LAIN	TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	GANTARANG	3.177,00	-	4.327,00	62,00	12,00	20,00	181,99	522,01	8.302,00
2	UJUNG BULU	1,00	-	-	-	-	-	-	217,00	218,00
3	UJUNGLOE	2.758,00	-	112,00	888,00	-	-	-	2.350,00	6.108,00
4	BONTO BAHARI	3.741,70	-	2.187,80	2.289,83	-	20,00	761,82	643,85	9.645,00
5	BONTO TIRO	3.950,00	-	2.060,50	1.151,50	-	-	-	27,00	7.189,00
6	HERLANG	2.555,19	-	2.805,17	500,00	-	-	-	13,29	5.873,65
7	KAJANG	4.971,00	-	2.444,09	345,55	-	-	323,45	603,00	8.687,09
8	BULUKUMPA	1.253,37	-	10.741,68	612,59	-	-	687,41	19,42	13.314,47
9	RILAUALE	3.150,00	458,00	3.150,00	471,41	-	-	509,59	182,00	7.921,00
10	KINDANG	1,802,09	-	5.758,86	-	-	-	3.795,01	17,45	11.373,41
BULUKUMBA	**2024**	**29,527.15**	**458,00**	**33.587,10**	**6.320,88**	**12,00**	**40,00**	**6.259,27**	**4.595,02**	**78.631,62**

Sumber : Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

b) Potensi Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat, disamping padi, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Hijau, dan Kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.

a) Padi

Padi merupakan bahan pangan dan bahan makananpokok masyarakat Kabupaten Bulukumba dan menjadi komoditas strategis dalam menjaga ketersediaan pangan daerah dan mendukung ketersediaan pangan nasional. Hal ini terlihat berdasarkan rata-rata produksi pertahun, kabupaten Bulukumba termasuk dalam 8 kabupaten penghasil padi terbesar di Sulawesi Selatan. Produksi Padi di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami peningkatan produksi dari 263.749,66/ha GKP pada tahun 2020 menjadi 285.974,60 ton/ha GKP pada tahun 2024, dan rata-rata produksi dari 6,01 ton/ha di tahun 2020 menjadi 6,40 ton/ha GKP tahun 2024, Peningkatan produksi ini lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten melalui penggunaan verietas benih unggul, pemberian subsidi pupuk, alat dan mesin pertanian dan pestisida serta dukungan infrastruktur pertanian seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi juga termasuk pendampingan dari petugas/penyuluh pertanian dilapangan terkait penerapan teknologi budidaya pertanian sesuai anjuran teknis.

Peningkatan produksi padi menjadi keharusan dalam rangka menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan sehingga ketersediaan pangan pokok dapat terpenuhi secara cukup dan merata dan ketergantuangan impor beras dapat ditekan. Data Produksi padi 2020 sd 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-8
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi Sawah (GKP) Tahun 2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	GANTARANG		18.646,54	15.796,54	111.541,99	7,07
2	UJUNG BULU		690,25	510,25	3.568,17	6,99
3	UJUNGLOE		7.500,00	6.534,00	45.708,88	7,00
4	BONTO BAHARI		185,00	126,00	720,16	5,72
5	BONTO TIRO		270,50	222,50	956,74	4,30
6	HERLANG		1.150,50	1.060,00	5.218,30	4,92
7	KAJANG		4.914,00	4.900,00	29.298,52	5,98
8	BULUKUMPA		6.143,44	6.015,44	35.661,23	5,93
9	RILAUALE		8.467,00	6.655,00	37.760,76	5,67
10	KINDANG		3.333,25	2.894,05	15.436,44	5,33
BULUKUMBA		***2024***	***51.300,48***	***44.713,78***	***285.974,60***	***6,40***
		2023	42.451,67	44.750,40	285.206,27	6,37
		2022	44.664,54	45.089,69	286.679,51	6,36
		2021	44.907,93	45.450,74	288.475,79	6,35
		2020	47.714,05	43.869,66	263.749,66	6,01

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

b) Jagung

Potensi jagung di Kabupaten Bulukumba sangat besar dan menjadi salah satu komoditas pertanian utama yang mendukung perekonomian daerah dan menjadi satu salah satu komoditi yang berkontribusi besar terhadap PDRB sub sektor Pertanian selain Padi. Kabupaten Bulukumba berdasarkan rata-rata produksi pertahun, termasuk 5 kabupaten penghasil jagung terbesar di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki luas lahan tanam jagung yang cukup luas, khususnya di beberapa kecamatan

penghasil utama yaitu kecamatan Ujungloe, kecamatan Bontotiro, kecamatan Kajang dan kecamatan Bontobahari yang berkontribusi dalam produksi jagung. Produksi jagung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum tren produksi menunjukkan peningkatan, untuk produksi jagung tahun 2020 sebesar 152.702,96 ton/tahun dengan rata rata produksi 5,56 ton/ha, sedangkan untuk tahun 2025 produksi jagung mencapai 155.180,56 ton/tahun dengan rata rata produksi 5,56 ton/ha. Salah satu ancaman utama dalam pengembangan budidaya jagung di Kabupaten Bulukumba adalah serangan hama babi yang sangat meresahkan para petani karena sering merusak lahan jagung, dan fenomena ini membuat banyak petani enggan menanam jagung. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kegiatan perburuan hama babi secara rutin dan kolaborasi dengan warga, Hal lain yang mempengaruhi peningkatan produksi adalah bantuan benih unggul bersertifikat, penggunaan pupuk yang sesuai anjuran, dan kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan jagung, disamping itu juga Peningkatan produksi ini didukung oleh peningkatan luas tanam dan luas panen. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-9
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jagung Tahun 2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (ton/ha)
1	GANTARANG		1.249,00	998,00	7.449,59	7,47
2	UJUNG BULU					
3	UJUNGLOE		6,368,40	5.703,40	31.178,05	5,48
4	BONTO BAHARI		3.547,00	3.448,00	16.502,53	4,79
5	BONTO TIRO		5.280,50	7.331,00	39.018,17	5,32
6	HERLANG		4.180,00	3.990,00	24.993,44	6,26
7	KAJANG		6.126,00	5.520,30	33.850,25	6,13
8	BULUKUMPA		90,00	105,00	525,80	5,01
9	RILAUALE		264,00	151,00	791,15	5,24
10	KINDANG		172,00	172,50	871,58	5,05
Bulukumba		***2024***	***27.276,90***	***27.419,20***	***155.180,56***	***5,66***
		2023	21.963,65	26.809,90	148.916,27	5,56
		2022	30.753,14	30.670,16	175.914,26	5,74
		2021	31.315,83	30.065,39	162.571,88	5,41
		2020	24.319,00	27.440,00	152.702,96	5,56

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

c) Ubi Kayu

Potensi ubi kayu di Kabupaten Bulukumba masih rendah karena pengembangannya masih di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Gantarang dan kecamatan Kajang. Penanaman ubi kayu banyak dilakukan untuk konsumsi domestik atau konsumsi keluarga sehari-hari, sehingga lahan yang digunakan juga sangat terbatas. Meskipun produksinye meningkat dari 13,26 ton ha di tahun 2020 meningkat menjadi 20,66 di tahun 2024. Produksi ubikayu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-10
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi Kayu Tahun 2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	2		3	4	5	6
1	GANTARANG		1,00	2,00	39,40	19,70
2	UJUNG BULU		-	-	-	-
3	UJUNGLOE		-	-	-	-
4	BONTO BAHARI		-	-	-	-
5	BONTO TIRO		-	-	-	-
6	HERLANG		-	-	-	-
7	KAJANG		106,00	49,00	1.014,28	20,99
8	BULUKUMPA		-	-	-	-
9	RILAUALE		-	-	-	-
10	KINDANG		-	-	-	-
Bulukumba		***2024***	***107,00***	***51,00***	***1.053,63***	***20,66***
		2023	35	56,50	1.158,61	20,51
		2022	95,75	106,75	1.419,58	13,29
		2021	82,85	51,75	698,26	13,49
		2020	245,00	244,00	3.235,48	13,26

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

d) Ubi Jalar

Produksi Ubi Jalar (Ketela Rambat) tahun 2024 sebanyak 214,05 Ton, dengan rata-rata produksi sebesar 11,89 Ton/Ha. Produksi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai sebanyak 437,90 Ton dengan rata-rata produksi sebesar 11,84 Ton/Ha. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas panen. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-11
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Ubi Jalar Tahun 2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	GANTARANG		26,50	14,50	175,30	120,90
2	UJUNG BULU		-	-	-	-
3	UJUNGLOE		-	-	-	-
4	BONTO BAHARI		-	-	-	-
5	BONTO TIRO		-	-	-	-
6	HERLANG		-	-	-	-
7	KAJANG		4,75	3,25	35,75	110,00
8	BULUKUMPA		-	-	-	-
9	RILAUALE		-	-	-	-
10	KINDANG		0,75	0,25	3	120
BULUKUMBA		***2024***	***32,00***	***18,00***	***214,05***	***11,89***
		2023	38,00	37,00	437,90	11,84
		2022	43,50	34,50	443,12	12,84
		2021	15,50	21,25	272,90	12,84
		2020	92,00	87,50	1.095,70	12,52

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

e) Kacang Tanah

Potensi kacang tanah di Kabupaten Bulukumba sangat besar dan menjadi salah satu komoditas unggulan dalam sektor pertanian. Prospek pengembangan usahatani kacang tanah cukup menjanjikan dengan peluang pasar yang luas. Namun tantangan yang dihadapi meliputi serangan hama, perubahan iklim, teknologi budidaya yang masih sederhana. Untuk pengembangan kacang tanah di Kabupaten Bulukumba tersebar di 8 Kecamatan namun yang sangat potensial dan mempunyai ciri khas secara sfesifik di Kecamatan Bontobahari dan Bontotiro. Varietas lokal yang telah dihasilkan adalah varietas BBC (Buhung Bundang Canggoreng), dan mendapatkan perhatian karena memiliki adaptasi yang baik terhadap kondisi iklim dan tanah setempat, sehingga produktivitasnya lebih optimal dibandingkan varietas lain.

Produksi Kacang Tanah di Kabupaten Bulukumba Produksi kacang tanah dari tahun 2020 sd tahun 2024 sangat variatif dan berada dikisaran 2500 ton/tahun dengan rata rata produksi 2,23 ton/ha. Secara rinci dapat diihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-12
Luas Lahan, Luas Panen, dan Produksi Kacang Tanah (Biji Kering)
Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	GANTARANG		104,30	93,30	217,85	2,34
2	UJUNG BULU		3,00	3,00	5,70	1,90
3	UJUNGLOE		155,00	155,00	303,80	1,96
4	BONTO BAHARI		60,00	55,00	121,34	2,21
5	BONTO TIRO		716,50	645,00	1.481,10	2,30
6	HERLANG		-	-	-	-
7	KAJANG		4,00	4,00	7,68	1,92
8	BULUKUMPA		-	-	-	
9	RILAUALE		95,00	69,00	143,39	2,08
10	KINDANG		26,00	10,00	18,30	1,83
BULUKUMBA		**2024**	**1.163,80**	**1.035,30**	**2.299,17**	**2,22**
		2023	570,50	1.086,00	2.514,59	2,32
		2022	1.327,80	953,30	2.207,72	2,32
		2021	620,50	1.079,50	2.464,18	2,28
		2020	2.227,75	1.621,75	3.659,98	2,26

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

f) Kacang Hijau

Potensi kacang hijau di Kabupaten Bulukumba cukup besar dan pengembangannya di dua Kecamatan yaitu Kecamatan gantarang dan Kecamatan ujungloe. Penanaman kacang hijau lebih banyak ditujukan sebagai tanaman sela. Kacang hijau sering ditanam sebagai tanaman palawija yang tumbuh optimal pada musim kering dan sebagai tanaman sela di antara masa tanam utama seperti padi. Produksi kacang hijau efektif tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sd tahun 2025, Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah luas tanam dan panen dari tahun ke tahun yang relatif sama. Untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-13
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kacang Hijau
Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	GANTARANG		58,00	36,00	65,00	1,80
2	UJUNG BULU		-	-	-	-
3	UJUNGLOE		247,00	247,00	514,00	2,08
4	BONTO BAHARI		-	-	-	-
5	BONTO TIRO		-	-	-	-
6	HERLANG		-	-	-	-
7	KAJANG		-	-	-	-
8	BULUKUMPA		-	-	-	-
9	RILAUALE		-	-	-	-
10	KINDANG		-	-	-	-
BULUKUMBA		2024	305,00	283,00	578,31	2,04
		2023	411,00	414	735,84	1,78
		2022	325,00	360,00	487,89	1,34
		2021	128,25	88,75	196,68	2,21
		2020	671,00	665,50	1.348,39	2,03

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

g) Kedelai

Produksi Kacang kedelai Tahun 2024 sebesar **99,96 Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,02 Ton/Ha**. Produksi kedelai mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023 yang hanya 2,24 **Ton** dengan rata-rata produksi sebesar **1,12 Ton/Ha**. Pertanaman Kedelai di Kabupaten Bulukumba sangat dipengaruhi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Tahun 2023 kabupaten Bulukumba memperoleh Bantuan 100 Ha sehingga mempengaruhi peningkatan luas panen di Tahun 2024 Sentra produksi kedelai di Kabupaten Bulukumba terletak di Kecamatan Bonto Bahari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-14
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kedelai (Biji Kering)
Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	GANTARANG		-	-	-	-
2	UJUNG BULU		-	-	-	-
3	UJUNGLOE		-	-	-	-
4	BONTO BAHARI		-	98	99,96	1,02
5	BONTO TIRO		-	-	-	-
6	HERLANG		-	-	-	-
7	KAJANG		-	-	-	-
8	BULUKUMPA		-	-	-	-
9	RILAUALE		-	-	-	-
10	KINDANG		-	-	-	-
Bulukumba		***2024***	**-**	***98***	***99,96***	***1,02***
		2023	100	2,00	2,24	1,12
		2022	54,00	54,00	56,09	1,04

No	Kecamatan		Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (ton/ha)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		2021	54,00	54,00	56,09	1,03
		2020	75,00	75,00	121,65	1,62

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

h. Sorgum

Budidaya sorgum di Kabupaten Bulukumba masih dalam tahap pengembangan yang masih bergantung pada bantuan Kementerian Pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, diversifikasi pangan, dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras dan gandum. Namun, pengembangan sorgum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknis budidaya dan lokasi pertanaman, serta prospek pasar yang belum sepenuhnya mendukung, khususnya di pasar lokal.

Tabel II-15
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sorgum
Tahun 2023—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Gantarang		-	-	-	-
2	Ujung Bulu		-	-	-	-
3	Ujungloe		-	-	-	-
4	Bonto Bahari		25	25	100	4,00
5	Bonto Tiro		20	20	80	4,00
6	Herlang		-	-	-	-
7	Kajang		20	20	80	4,00
8	Bulukumpa		-	-	-	-
9	Rilauale		-	-	-	-
10	Kindang		-	-	-	-
Jumlah		**2024**	65,00	65,00	260,00	4,00
		2023	65,00	65,00	260,00	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

i. Porang

Perkembangan budidaya tanaman porang di Kabupaten Bulukumba menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang ditandai dengan meningkatnya animo masyarakat untuk menanam porang. Kondisi ini dipengaruhi oleh harga porang yang kompetitif di pasar, khususnya untuk memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, keberadaan pabrik pengolahan porang di tiga lokasi—yakni Desa Polewali, Desa Dampang, dan Kelurahan Mariorennu—juga menjadi faktor pendukung utama.

Pemeliharaan tanaman porang umumnya dilakukan dengan sistem tumpang sari (polikultur), di mana porang ditanam di sela-sela tanaman perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan merica. Pola tanam ini banyak dikembangkan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gantarang, Kindang, dan Rilauale. Tanaman porang tumbuh dengan baik dibawah naungan tanaman komoditi perkebunan atau hortikultura.

Selain meningkatkan pendapatan petani, sistem tumpang sari antara porang dan tanaman lainnya juga berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan serta peningkatan kesejahteraan petani, karena porang

memberikan sumber penghasilan tambahan di antara masa panen tanaman perkebunan.

Tabel II-16
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Porang
Tahun 2022—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Gantarang		57,00	23,00	483,00	21,00
2	Ujung Bulu		-	-	-	-
3	Ujungloe		-	-	-	-
4	Bonto Bahari		-	-	-	-
5	Bonto Tiro		-	-	-	-
6	Herlang		-	-	-	-
7	Kajang		-	-	-	-
8	Bulukumpa		-	-	-	-
9	Rilauale		-	1,00	21,00	21,00
10	Kindang		-	24,20	508,20	21,00
Jumlah		**2024**	57,00	48,20	1.012,20	21,00
		2023	1,00	173,23	3.810,48	22,00
		2022	171,00	519,00	10.907,00	21,02

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

2.1.1.2.2 Sektor Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan dikabupaten Bulukumba cukup besar dan termasuk komoditi ekspor. Hal ini terlihat pada besarnya kontribusi komdotiti perkebunan terhadap PDRB Sub Sektor Pertanian. Terdapat beberapa komoditi unggulan perkebunan di Kabupaten Bulukumba antara lain : Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet Lada dan Pala.

a) Kelapa Dalam

Potensi Kelapa Dalam Tahun 2024 mencapai 2.543,61 Ton yang tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah petani mencapai 8.369 KK. Terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya yang didukung oleh iklim yang baik sehingga pertumbuhan tanaman kelapa berproduksi lebih maksmal dibanding tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-17
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Dalam
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		380	198,60	127
2	UJUNG BULU		9	14,85	110
3	UJUNGLOE		932	347,31	1.833
4	BONTO BAHARI		909	369,24	1.525
5	BONTO TIRO		959	443,94	1.328
6	HERLANG		844	205,28	1.180
7	KAJANG		1.371	918,96	1.696
8	BULUKUMPA		65	20,87	137
9	RILAUALE		113	22,29	374
10	KINDANG		39	2,26	59
BULUKUMBA		***2024***	***5.621***	***2.543,61***	***8.369***

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
		2023	5.626	1.966,66	8.393
		2022	5.623	3.580,02	8.393
		2021	5.627	3.854	9.769
		2020	3.776,50	3.757,12	6.594

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

c) Kelapa Hibrida

Produksi Kelapa Hibrida Tahun 2024 mencapai 1.622,75 Ton yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah petani 5.611 KK. Pada Tahun 2024, produksi kelapa hibrida menurun disebabkan oleh jumlah produksi kelapa hibrida lebih banyak beralih ke industri olahan gula merah. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-18
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Hibrida Menurut Kecamatan di Kabupaten BulukumbaTahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		-	-	-
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		1.263	327,06	1.503
4	BONTO BAHARI		67	14	36
5	BONTO TIRO		172	95,55	320
6	HERLANG		1.680	601,46	2.425
7	KAJANG		982	520,89	1.019
8	BULUKUMPA		43	13,26	111
9	RILAUALE		224	50,54	197
10	KINDANG		-	-	-
BULUKUMBA		***2024***	***4.432***	***1.622,75***	***5.611***
		2023	4.435,5	1.681,55	5.622
		2022	4.434,50	3.356,44	5.622
		2021	4.364,00	4.347,00	7.325
		2020	3.498,00	4.047,15	5.945

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

d) Kopi

Potensi pengembangan kopi di Kabupaten Bulukumba cukup besar dan menjadi salah satu komoditas andalan setelah kakao dan karet. Ada beberapa jenis kopi yang dikembangkan yaitu robusta dan arabika. Jenis kopi robusta sebagai kopi yang paling banyak dibudidayakan dan dipasarkan secara luas, sementara arabika pengembangannya belum massif dan pengembangannya masih terbatas di Kecamatan kindang, Salah satu Desa penghasil kopi di Kecamatan kindang adalah Desa Kahayya yang sudah menembus pasar mancanegara seperti Jerman, Belanda, Amerika, Perancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Produksi kopi di branding dengan Brand kopi Kahayya yang dikenal sebagai brand kopi lokal yang memiliki cita rasa khas berupa rasa rempah yang kuat dan aroma tajam, yang bisa menimbulkan sensasi ekstrim pada indra penciuman. Sebagian orang bisa merasakan aroma samar seperti aroma buah nangka. Rasa kopi Kahayya juga memiliki sensasi sedikit pedas yang khas, karena kopi ini tumbuh di perkebunan yang juga menanam rempah-rempah seperti cengkeh dan merica. Produksi kopi dari tahun 2020 sd 2024

relatif tidak ada peningkatan karena luas areal penanaman juga tidak meningkat secara signifikan namun lebih cenderung ke peningkatan mutu dan nilai tambah produk melalui penjualan produk olahan (kopi sangrai dan kopi bubuk). Produksi kopi (robusta dan arabika) Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-19
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Robusta Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		1.321	208,85	3.274
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		-	-	-
4	BONTO BAHARI		-	-	-
5	BONTO TIRO		-	-	-
6	HERLANG		-	-	-
7	KAJANG		47,4	5,34	370
8	BULUKUMPA		632	85,75	2.457
9	RILAUALE		210	15,74	591
10	KINDANG		1.090	17,42	3.996
BULUKUMBA		***2024***	***3.300***	***333,09***	***10.688***
		2023	3.395	317,74	10.801
		2022	3.409	230,81	10.840
		2021	2.099	372	9.558
		2020	2.632,00	1.032,43	11.385

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Tabel II-20
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Arabika Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		10	0	29
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		-	-	-
4	BONTO BAHARI		-	-	-
5	BONTO TIRO		-	-	-
6	HERLANG		-	-	-
7	KAJANG		-	-	-
8	BULUKUMPA		120	9,50	55
9	RILAUALE		-	-	-
10	KINDANG		546	97,17	1.140
BULUKUMBA		***2024***	***676***	***106,67***	***1.224***
		2023	681	100,03	1.234
		2022	669	107,66	1.234
		2021	*669*	*146*	*1.234*
		2020	365,00	323,99	1.234

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

e) Cengkeh

Produksi cengkeh di Tahun 2024 mencapai **1.665,54 Ton**. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 sebesar **435,12 Ton**, maka Produksi cengkeh tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini didukung oleh iklim yang baik dan pemeliharaan serta pemupukan oleh

petani secara aktif sehingga produksi meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-21
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Cengkeh Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		1.436	226,59	1.438
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		132	0,74	16
4	BONTO BAHARI		-	-	-
5	BONTO TIRO		45	-	25
6	HERLANG		20	-	17
7	KAJANG		101	5,93	213
8	BULUKUMPA		1.455	415,80	1.421
9	RILAUALE		809	8,48	1.567
10	KINDANG		2.911	1.008	5.449
BULUKUMBA		***2024***	***6.909***	***1.665,54***	***10.146***
		2023	6.912	435,12	10.152
		2022	6.917	486,38	10.155
		2021	7.815	702	9.719
		2020	3.766,00	718,68	10.187

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

f) Kakao

Produksi Kakao Tahun 2024 mencapai **1.557,38 Ton** yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan. Capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang didukung oleh iklim yang baik. Disamping itu, harga kakao yang tinggi juga mempengaruhi perilaku petani untuk melakukan pemeliharaan terhadap budidaya kakao. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-22
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		1.325	302,77	1.090
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		321	72,59	288
4	BONTO BAHARI		55	20,50	131
5	BONTO TIRO		343	27,12	420
6	HERLANG		1.449	41,92	1.791
7	KAJANG		1.160	748,89	1.990
8	BULUKUMPA		1.136	179,35	2.055
9	RILAUALE		761	105,12	1.804
10	KINDANG		731	59,12	1.481
BULUKUMBA		***2024***	***7.281***	***1.557,38***	***11.050***
		2023	7.310	1.130,74	11.083
		2022	7.315	2.560,99	11.087
		2021	8.193	3.007	11.231
		2020	5.340,00	4.403,31	10.659

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

g) Jambu Mete

Komoditi Jambu Mete pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak di Wilayah Bulukumba Timur seperti Bontotiro, Herlang, Kajang, Selain kecamatan Gantarang. Tetapi beberapa tahun terakhir, komoditi jambu meter tidak berproduksi seperti sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca, misalnya kemarau basah sepanjang tahun atau pada saat proses pembungaan hujan turun, sehingga produksi yang dihasilkan sangat minim bahkan tidak sama sekali. Selain ini tanaman Jambu Mete sudah banyak yang kurang berproduksi atau rusak disebabkan kondisi tanaman sudah tua. Pada tahun 2024, produksi Jambu Mete di Kecamatan Kindang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar **0,25 Ton** yang didukung oleh iklim yang baik dengan sinar matahari penuh. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-23
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Jambu Mete Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		643	-	11
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		24	-	26
4	BONTO BAHARI		33	-	30
5	BONTO TIRO		312	-	225
6	HERLANG		103	-	34
7	KAJANG		41	-	33
8	BULUKUMPA		45	-	7
9	RILAUALE		38	-	15
10	KINDANG		67	0,25	29
BULUKUMBA		***2024***	***706***	***0,25***	***410***
		2023	744	0,03	394
		2022	782	-	411
		2021	760	-	321
		2020	434,00	128,96	320

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

h) Pala

Potensi pala di Kabupaten Bulukumba cukup menonjol sebagai salah satu tanaman budidaya rempah yang berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberikan dukungan berupa bantuan sarana produksi dan revitalisasi tanaman pala di Bulukumba guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Pengembangan tanaman ini diintegrasikan dengan tanaman lain. Produksi Pala di Kabupaten Bulukumba terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Bulukumpa, Rilauale, dan Kindang. Produksi Pala Tahun 2024 mencapai **130,75 Ton** pada areal lahan seluas **791 Ha** dimana produksinya meningkat dari tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-24
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Pala Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG	16	-	15

2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		16	-	38
4	BONTO BAHARI		3	-	15
5	BONTO TIRO		6	-	5
6	HERLANG		19	-	87
7	KAJANG		51	-	250
8	BULUKUMPA		474	119,95	719
9	RILAUALE		106	3,73	88
10	KINDANG		100	7,06	240
BULUKUMBA		***2024***	***791***	***130,75***	***1.457***
		2023	779	124,69	1.453
		2022	779	179,49	1.453
		2021	46	37	1.388
		2020	148,00	29,75	1.204

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

i) Lada

Potensi tanaman lada di Kabupaten Bulukumba sangat menjanjikan dan menjadi salah satu komoditas unggulan di sektor pertanian. Komoditas ini tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dengan luas lahan mencapai **1.451 Ha**. Kecamatan terbesar penghasil lada terdapat di Kecamatan Bulukumpa. Produksi Lada **Tahun 2024** mencapai **122,80 Ton** dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan dukungan klim yang baik serta pemeliharaan yang intensif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-25
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Lada
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	GANTARANG		137	13,46	228
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		32	1,82	88
4	BONTO BAHARI		9	-	5
5	BONTO TIRO		16	-	181
6	HERLANG		10	-	24
7	KAJANG		55	2,04	428
8	BULUKUMPA		360	50,69	928
9	RILAUALE		539	36,23	879
10	KINDANG		293	18,56	236
BULUKUMBA		***2024***	***1.451***	***122,80***	***2.997***
		2023	1.455	108,64	3.016
		2022	1.459	185,50	3.016
		2021	1.530	119	3.853
		2020	976,40	168,25	3,136

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

j) Karet

Potensi karet di Bulukumba sangat besar dengan dukungan lahan yang memadai dan keberadaan PT London Sumatra Indonesia (Lonsum) yang menjadi pilar pengembangan perkebunan karet. Produksi Karet di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebesar **2.156,49 Ton**. Secara keseluruhan, luas areal produksi perkebunan Karet di Kabupaten Bulukumba mencapai **3.453 Ha**, dengan jumlah Petani sebanyak **1.786 KK**. Produksi karet meningkat dari tahun sebelumnya didukung oleh iklim yang baik serta sumber daya petani

yang juga mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-26
Luas Areal, Produksi, dan Jumlah Petani Komoditi Karet
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah Petani (KK)
1	GANTARANG		-	-	-
2	UJUNG BULU		-	-	-
3	UJUNGLOE		619	200,62	400
4	BONTO BAHARI		-	-	-
5	BONTO TIRO		3	-	3
6	HERLANG		33	16,77	69
7	KAJANG		1.182	1.429,06	555
8	BULUKUMPA		1.276	490,61	484
9	RILAUALE		340	19,45	275
10	KINDANG		-	-	-
BULUKUMBA		***2024***	***3.453***	***2.156,49***	***1.786***
		2023	3.453	1.017,86	1.786
		2022	3.453	3.453	1.786
		2021	3.453	3.732	1.784
		2020	1.619,00	1.819,77	1.776

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

2.1.1.2.3 Sektor Hortikultura

Berdasarkan data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH), pada tahun 2024 terdapat beberapa komoditi yang termasuk dalam kategori tanaman keras atau tanaman buah tahunan yang mengalami peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Komoditi tersebut diantaranya Durian, Mangga, Manggis, dan sukun. Peningkatan produksi ini disertai peningkatan jumlah tanaman produktif menghasilkan pada tahun 2024. Peningkatan produksi ataupun jumlah tanaman penghasilkan dari komoditi tersebut diantaranya disebabkan oleh peningkatan jumlah tanaman yang bibitnya bersumber dari bantuan pemerintah baik pemerintah kabupaten provinsi maupun pemerintah pusat. Selain bantuan pemerintah, peningkatan jumlah tanaman baru juga bersumber dari bantuan bibit dari CSR Perusahaan. Peningkatan produksi pada beberapa komoditi yang disebutkan diatas juga dipengaruhi oleh kondisi iklim atau cuaca yang mendukung produksi buah pada tanaman tahunan dan juga didukung oleh manajemen pemeliharaan petani yang semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

a) Cabai Besar

Produksi cabai besar pada tahun 2024 mencapai 491,90 ton, dengan luas tanam sebesar 483,65 hektare dan luas panen 416,70 hektare. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Rilauale. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-27
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Besar
Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	20,65	48,45	95,60
2	Ujung Bulu	0,00	0,00	0,00
3	Ujungloe	7,00	172,00	101,80
4	Bonto Bahari	0,00	0,00	0,00

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
5	Bonto Tiro		0,75	3,00	11,30
6	Herlang		0,00	0,00	0,00
7	Kajang		0,25	1,00	0,65
8	Bulukumpa		26,00	52,00	61,40
9	Rilauale		15,00	129,00	214,10
10	Kindang		0,75	11,25	7,05
Jumlah		**2024**	**483,65**	**416,70**	**491,90**
		2023	486,50	423,85	591,58
		2022	257,25	154,50	226,20
		2021	145,00	98,25	145,85
		2020	106,60	58,10	41,75

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

b) Cabai Rawit

Produksi cabai rawit tahun 2024 mencapai 873,19 Ton dengan luas tanam 1.071,80 Ha dan luas panen 736,70 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Gantarang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-28
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Rawit Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		62,50	123,75	292,30
2	Ujung Bulu		0,95	3,40	6,37
3	Ujungloe		17,00	184,00	169,20
4	Bonto Bahari		4,80	64,55	13,52
5	Bonto Tiro		9,00	34,50	51,70
6	Herlang		21,00	56,25	52,97
7	Kajang		2,35	5,75	4,64
8	Bulukumpa		40,50	47,50	88,50
9	Rilauale		13,00	106,00	153,80
10	Kindang		19,50	111,00	40,20
Jumlah		**2024**	**1.071,80**	**736,70**	**873,19**
		2023	727,30	565,29	950,29
		2022	542,69	379,90	546,20
		2021	476,45	359,85	303,04
		2020	679,60	489,35	271,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

c) Cabai Keriting

Produksi cabai keriting tahun 2024 mencapai 131,30 Ton dengan luas tanam 70,65 Ha dan luas panen 63,95 Ha. Produksi tersebut tersebar di 4 (empat) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Rilauale. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-29
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Cabai Keriting
Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	2,15	4,45	49,90
2	Ujung Bulu	-	-	-
3	Ujungloe	-	-	-
4	Bonto Bahari	-	-	-

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
5	Bonto Tiro		-	-	-
6	Herlang		-	-	-
7	Kajang		0,25	1,00	0,65
8	Bulukumpa		-	-	-
9	Rilauale		7,00	56,00	78,90
10	Kindang		0,25	2,50	1,85
Jumlah		**2024**	**70,65**	**63,95**	**131,30**
		2023	25,80	18,60	37,35
		2022	2,05	1,25	3,65
		2021	4,25	1,25	0,70
		2020	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

d) Mentimun

Produksi mentimun tahun 2024 mencapai 416,80 Ton dengan luas tanam 203,55 Ha dan luas panen 182,60 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Gantarang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-30
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Mentimun Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		26,05	15,70	196,30
2	Ujung Bulu		0,00	0,00	0,00
3	Ujungloe		123,00	133,00	156,20
4	Bonto Bahari		3,05	1,70	2,80
5	Bonto Tiro		4,00	1,25	5,70
6	Herlang		22,45	7,45	10,80
7	Kajang		0,00	0,00	0,00
8	Bulukumpa		0,00	0,00	0,00
9	Rilauale		18,00	18,00	38,20
10	Kindang		7,00	5,50	6,80
Jumlah		**2024**	**203,55**	**182,60**	**416,80**
		2023	152,71	128,68	229,53
		2022	116,07	85,30	206,40
		2021	94,35	74,05	182,40
		2020	126,75	87,50	302,31

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

e) Kacang Panjang

Produksi kacang panjang tahun 2024 mencapai 450,01 Ton dengan luas tanam 392,94 Ha dan luas panen 336,90 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Gantarang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-31
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Kacang Panjang Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	29,35	15,65	161,13
2	Ujung Bulu	0,00	0,00	0,00
3	Ujungloe	151,00	159,00	39,60
4	Bonto Bahari	0,84	0,00	0,00
5	Bonto Tiro	6,50	2,75	9,20

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
6	Herlang		65,00	38,00	38,88
7	Kajang		9,75	6,50	6,90
8	Bulukumpa		77,50	66,50	106,60
9	Rilauale		46,00	45,00	80,70
10	Kindang		7,00	3,50	7,00
Jumlah		**2024**	**392,94**	**336,90**	**450,01**
		2023	329,29	296,52	208,84
		2022	318,80	256,00	234,30
		2021	244,36	164,46	243,96
		2020	242,70	161,70	191,73

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

f) Terung

Produksi terung tahun 2024 mencapai 514,38 Ton dengan luas tanam 378,45 Ha dan luas panen 338,67 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Ujungloe. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-32
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Terung Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		11,70	4,15	25,35
2	Ujung Bulu		4,10	3,85	26,22
3	Ujungloe		151,00	151,00	165,00
4	Bonto Bahari		4,45	4,32	43,20
5	Bonto Tiro		30,00	20,50	25,40
6	Herlang		70,75	52,75	55,40
7	Kajang		16,70	14,10	25,11
8	Bulukumpa		33,50	34,50	44,30
9	Rilauale		54,00	52,00	102,60
10	Kindang		2,25	1,50	1,80
Jumlah		**2024**	**378,45**	**338,67**	**514,38**
		2023	422,29	380,54	792,10
		2022	338,60	269,90	559,22
		2021	244,70	175,50	328,90
		2020	233,25	152,50	162,56

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

g) Jahe

Produksi jahe tahun 2024 mencapai 39,57 Ton dengan luas tanam 13,23 Ha dan luas panen 9,95 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Ujungloe. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-33
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Jahe Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	0,23	0,06	6,00
2	Ujung Bulu	0,00	0,00	0,05
3	Ujungloe	11,77	9,13	23,78
4	Bonto Bahari	0,45	0,46	4,61
5	Bonto Tiro	0,06	0,03	0,61
6	Herlang	0,06	0,03	0,46

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
7	Kajang		0,01	0,00	0,01
8	Bulukumpa		0,11	0,09	0,95
9	Rilauale		0,45	0,10	2,82
10	Kindang		0,09	0,04	0,27
Jumlah		**2024**	13,23	**9,95**	**39,57**
		2023	11,34	9,31	38,00
		2022	11,73	6,44	25,11
		2021	18,38	10,90	86,74
		2020	17,18	6,81	77,19

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

h) Durian

Produksi durian tahun 2024 mencapai 6.971,935 Ton dengan luas tanam 6.590,85 Ha dan luas panen 3.421,87 Ha. Produksi tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Kindang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-34
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Durian Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		271	53,5	65,75
2	Ujung Bulu		0	0	0
3	Ujungloe		8,77	2,39	6,7
4	Bonto Bahari		1,2	0	0
5	Bonto Tiro		1,88	0,21	6,2
6	Herlang		31,93	0,16	1,44
7	Kajang		123,67	47,69	126,8
8	Bulukumpa		3.300,56	2347	3.250
9	Rilauale		1.494,4	753,09	3.188,3
10	Kindang		1.357,44	217,83	326,745
Jumlah		**2024**	**6.590,85**	**3.421,87**	**6.971,935**
		2023	5.973,22	3.245,43	5.147,625
		2022	5.180,39	3.095,34	3.887,15
		2021	4.643,92	1.883,61	4.862,86
		2020	4.528,93	618,94	3.833,9

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

i) Manggis

Produksi manggis tahun 2024 mencapai 1.687,97 Ton dengan luas tanam 4.848,50 Ha dan luas panen 2.646,71 Ha. Produksi tersebut tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Bulukumpa. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-35
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Manggis Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	15,44	1,56	7,00
2	Ujung Bulu	-	-	-
3	Ujungloe	1,72	0,25	6,50
4	Bonto Bahari	-	-	-
5	Bonto Tiro	-	-	-

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
6	Herlang		1,20	-	-
7	Kajang		43,01	19,68	20,50
8	Bulukumpa		3.274,76	2.099,60	1.072,70
9	Rilauale		524,61	75,24	266,00
10	Kindang		987,76	450,38	315,27
Jumlah		**2024**	**4.848,50**	**2.646,71**	**1.687,97**
		2023	4.842,23	2.778,48	1.584,18
		2022	4.807,01	2.358,63	1.514,71
		2021	4.751,50	928,90	673,70
		2020	4.691,37	499,80	411,46

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

j) Mangga

Produksi mangga tahun 2024 mencapai 9.437,61 Ton dengan luas tanam 4.268,71 Ha dan luas panen 1.604,47 Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Bonto Bahari. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-36
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Mangga Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		412,2	61,96	17,603
2	Ujung Bulu		38,52	18,62	116,4
3	Ujungloe		218,54	155,4	1.651,5
4	Bonto Bahari		465,95	197,35	4.933,7
5	Bonto Tiro		203,04	18,33	63,9
6	Herlang		469,84	108,3	86,64
7	Kajang		365,36	220,74	40,7
8	Bulukumpa		901,4	205,4	42,4
9	Rilauale		1.042,18	582,48	2474
10	Kindang		151,68	35,89	10,767
Jumlah		**2024**	**4.268,71**	**1.604,47**	**9.437,61**
		2023	4.216,78	1.616,83	8.350,683
		2022	3.920,09	1.528,53	2.532,148
		2021	4.188,75	1.967,95	5.257,2
		2020	3.717,87	496,91	1.897,15

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

k) Nangka

Produksi nangka tahun 2024 mencapai 810,71 Ton dengan luas tanam 1.086,63 Ha dan luas panen 502,77 Ha. Produksi tersebut tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Rilauale. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-37
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Nangka Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	45,12	0,00	0,00
2	Ujung Bulu	0,60	0,30	0,80
3	Ujungloe	28,06	18,78	66,60
4	Bonto Bahari	31,51	26,23	37,60
5	Bonto Tiro	76,48	11,05	28,60
6	Herlang	37,08	12,77	68,71

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
7	Kajang		151,16	85,86	67,30
8	Bulukumpa		49,32	2,60	6,80
9	Rilauale		232,14	98,43	435,60
10	Kindang		435,16	246,75	98,70
Jumlah		**2024**	**1.086,63**	**502,77**	**810,71**
		2023	997,87	548,18	854,64
		2022	815,40	574,25	832,74
		2021	764,32	555,70	1.124,70
		2020	767,42	420,23	701,50

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

l) Sukun

Produksi sukun tahun 2024 mencapai 464,91 Ton dengan luas tanam 494,33 Ha dan luas panen 117,60 Ha. Produksi tersebut tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Kindang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-38
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Sukun Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		6,00	0,76	19,00
2	Ujung Bulu		1,83	0,26	1,11
3	Ujungloe		7,68	4,78	17,40
4	Bonto Bahari		6,96	0,00	0,00
5	Bonto Tiro		25,72	1,09	18,70
6	Herlang		229,24	17,50	105,00
7	Kajang		63,04	20,14	47,20
8	Bulukumpa		8,20	0,00	0,00
9	Rilauale		110,38	46,39	123,10
10	Kindang		35,28	26,68	133,40
Jumlah		**2024**	**494,33**	**117,60**	**464,91**
		2023	444,99	56,62	276,80
		2022	352,31	62,40	403,53
		2021	337,30	49,20	311,40
		2020	335,45	75,23	324,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

m) Rambutan

Produksi rambutan tahun 2024 mencapai 3.217,41 Ton dengan luas tanam 4.622,40 Ha dan luas panen 2.346,73 Ha. Produksi tersebut tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Rilauale. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-39
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Rambutan Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang	57,40	16,92	13,60
2	Ujung Bulu	0,00	0,00	0,00
3	Ujungloe	9,62	3,78	3,50
4	Bonto Bahari	1,68	0,00	0,00
5	Bonto Tiro	6,67	1,42	13,90
6	Herlang	330,96	0,00	0,00
7	Kajang	97,27	41,31	41,50

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
8	Bulukumpa		1.943,68	1.241,53	995,20
9	Rilauale		1.205,24	799,51	1.955,90
10	Kindang		969,88	242,26	193,81
Jumlah		**2024**	**4.622,40**	**2.346,73**	**3.217,41**
		2023	4.596,66	2.107,47	3.288,99
		2022	4.553,31	1.931,85	2.836,65
		2021	4.537,78	1.934,33	7.226,20
		2020	4.533,33	811,98	3.398,20

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

n) Pisang

Produksi rambutan tahun 2024 mencapai 5780,24 Ton dengan luas tanam **484,63** Ha dan luas panen **296,23** Ha. Produksi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan kontribusi tertinggi berasal dari Kecamatan Herlang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-40
Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Pisang Tahun 2020—2024

No	Kecamatan		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Gantarang		23,29	6,37	95,62
2	Ujung Bulu		2,43	2,34	74,80
3	Ujungloe		56,32	27,52	572,00
4	Bonto Bahari		50,65	24,03	109,00
5	Bonto Tiro		15,45	8,28	82,50
6	Herlang		217,01	169,80	4.006,64
7	Kajang		66,50	21,52	89,50
8	Bulukumpa		18,63	8,10	62,00
9	Rilauale		16,93	13,97	438,00
10	Kindang		17,43	14,30	250,18
Jumlah		**2024**	**484,63**	**296,23**	**5.780,24**
		2023	496,06	290,68	2.830,87
		2022	523,10	215,19	2.205,36
		2021	414,43	316,39	3.496,60
		2020	703,83	238,74	2.634,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menyalurkan bantuan berupa bibit unggul dari beberapa varietas buah kepada para petani, serta mendukung pengolahan lahan melalui penyediaan alat berat. Lahan yang dibantu tersebut direncanakan sebagai kebun percontohan guna menunjukkan dan mendorong masyarakat Bulukumba untuk melakukan reformasi pertanian dengan mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman bibit unggul yang memiliki prospek ekonomi yang lebih menjanjikan. Berikut sebaran pengembangan bibit unggul melalui kebun percontohan tahun 2024:

Tabel II-41
Sebaran Pengembangan Bibit Unggul melalui Kebun Percontohan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Lahan Kebun Percontohan (Ha)	Jenis Komoditi
1	Gantarang	Mariorennu	1,50	- Nangka Madu 150 pohon - Sukun 50 pohon
2	Gantarang	Palambarae	1,00	- Nangka Madu 151 pohon
3	Gantarang	Bonto Masila	4,00	- Nangka Madu 450 pohon
4	Gantarang	Dampang	1,00	- Nangka Madu 151 pohon
5	Bulukumpa	Tibona	2,70	- Nangka Madu 170 pohon - Pala 226 pohon
6	Bulukumpa	Bonto Minasa	3,07	- Nangka Madu 168 pohon - Pala 266 pohon
7	Bulukumpa	Kambuno	2,00	- Pala 276 pohon
8	Bonto Bahari	Tanah Beru	3,00	- Nangka Madu 352 pohon - Sukun 50 pohon
9	Herlang	Tugondeng	2,00	- Nangka Madu 251 pohon
10	Ujungloe	Seppang	1,00	- Nangka Madu 250 pohon
11	Ujungloe	Bijawang	1,00	- Nangka Madu 151 pohon
12	Ujungloe	Garanta	4,27	- Nangka Madu 565 pohon - Sukun 65 pohon
13	Kajang	Bonto Biraeng	3,00	- Nangka Madu 151 pohon - Pala 251 pohon
14	Kajang	Bonto Baji	4,00	- Pala 476 pohon
15	Kajang	Pattiroang	2,00	- Pala 276 pohon
16	Rilauale	Bontomanai	3,00	- Pala 453 pohon
17	Rilauale	Karama	1,00	- Pala 177 pohon
18	Rilauale	Swatani	6,00	- Pala 752 pohon
19	Rilauale	Topanda	1,00	- Nangka Madu 101 pohon - Pala 127 pohon
20	Rilauale	Pangalloang	1,00	- Nangka Madu 101 pohon - Pala 127 pohon
21	Rilauale	Bonto Lohe	1,00	- Pala 177 pohon
22	Bonto Tiro	Tamalanrea	1,00	- Nangka Madu 100 pohon - Sukun 50 pohon
Jumlah			**49,54**	- Nangka Madu 3.262 pohon - Sukun 215 pohon - Pala 3.584 pohon

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

2.1.1.2.4 Sektor Peternakan

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan populasi ternak yang cukup besar. Komoditas ternak yang dipelihara adalah sapi potong, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan itik manila. Sistem pemeliharaan ternak yang dahulu hanya sebatas skala rumah tangga, mulai beralih menjadi usaha yang berorientasi bisnis yang terbukti dengan meningkatnya populasi ternak setiap tahunnya khususnya pada dua komoditas yaitu sapi potong, ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur. Untuk komoditas sapi potong, secara nasional Kabupaten

Bulukumba ditetapkan sebagai Kawasan Peternakan Sapi Potong, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/kpts/RC.040/6/2018. Perkembangan populasi dan produksi ternak di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-42
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024 (Ekor)

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	76.798	77.658	71.861	67.808	64.402
2	Kerbau	1.505	1.473	1.445	1.435	433
3	Kuda	26.306	23.337	20.208	18.248	2.322
4	Kambing	35.463	35.616	31.365	30.823	27.772
5	Ayam Buras	748.250	756.156	758.480	745.081	767.317
6	Ayam Ras Pedaging	3.669.900	3.694.020	4.384.830	4.314.880	4.482.550
7	Ayam Ras Petelur	1.129.495	1.176.858	839.661	684.048	808.411
8	Itik	21.372	21.382	21.478	21.675	17.164
9	Itik Manila	41.813	41.619	40.512	37.657	26.289

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Populasi ternak sapi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan akibat mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Anthraks, dan Penyakit Jembrana. Sedangkan untuk populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan karena adanya kerjasama antara perusahaan (inti) dengan peternak (plasma) melalui pengadaan kandang *closed house* kapasitas 5.000 hingga 12.000 ekor.

a) Sapi Potong

Secara nasional, Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan sebagai Kawasan Peternakan Sapi Potong sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/kpts/RC.040/6/2018 dan telah ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi potong melalui Surat Keputusan Bupati nomor 188.45-468 tahun 2021. Ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba menempati posisi ke 2, dari total populasi terbanyak, saat ini jumlah Populasi mencapai 64.402 ekor. Populasi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan populasi tertinggi berasal dari Kecamatan Gantarang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-43
Data Populasi Sapi Potong Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2024 (Ekor)

No.	Kecamatan	Sapi Potong		
		Jantan	Betina	Jumlah
1.	Gantarang	2.341	8.691	11.032
2.	Ujung Bulu	99	462	561
3.	Ujungloe	2.362	7.932	10.294
4.	Bonto Bahari	431	1.422	1.853
5.	Bonto Tiro	762	3.849	4.611
6.	Herlang	688	3.728	4.416

No.	Kecamatan	Sapi Potong		
		Jantan	Betina	Jumlah
7.	Kajang	1.481	7.289	8.770
8.	Bulukumpa	2.637	7.697	10.334
9.	Rilauale	2.518	8.337	10.855
10.	Kindang	287	1.389	1.676
Total		**13.606**	**50.796**	**64.402**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Dari keseluruhan total populasi ternak sapi di Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh rumpun sapi bali yang merupakan jenis sapi potong lokal, selain rumpun sapi bali juga terdapat rumpun sapi hasil persilangan antara jenis sapi bali dengan sapi eksotik melalui teknologi inseminasi buatan. Berdasarkan data identik peternakan dan kesehatan tahun 2024, berikut sebaran data rumpun sapi yang tersebar di Kabupaten Bulukumba:

Tabel II-44
Rumpun Sapi Potong Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Jenis Rumpun Sapi Potong	Jantan	Betina	Total
Bali	33.852	12.945	46.797
Simental	2.073	1.043	3.116
Brahman	761	211	972
Limousin	2.757	1.293	4.050
Peranakan Ongole/Madura	1.421	379	1.800
Angus	409	310	719
Brangus	51	55	106
Friesian Holstein(FH)	12	5	17
Glacian Blond	41	61	102
Red Brangus	2	2	4
Belgian Blue	6	4	10
Wagyu	6	12	18
Total			**57.711**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

Terdapat Perbedaan data populasi ternak tahun 2024 dengan data identik Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), karena dari keseluruhan data identik PKH yang didata umur satu tahun ke atas sehingga terdapat bias pada data tersebut**.**

b) Kerbau

Potensi kerbau di Bulukumba populasinya tidak sebesar ternak lain seperti sapi dan kambing. Rendahnya produktivitas dan lambatnya perkembangbiakan kerbau membuat peternak kurang berminat memelihara kerbau dibanding ternak lain seperti sapi. Disamping itu juga Perubahan fungsi lahan penggembalaan menjadi area pertanian dan pemukiman membuat ketersediaan lahan untuk pemeliharaan kerbau berkurang. Hal inilah yang menyebabkan populasi kerbau dari tahun ketahun semakin berkurang, sehingga kedepannya perlu dilakukan Perlindungan dan pelestarian sertan Penyediaan fasilitas dan insentif untuk peternak guna meningkatkan minat untuk memelihara ternak kerbau

Populasi kerbau tahun 2024 mencapai 433 ekor. Populasi tersebut tersebar di 4 (empat) kecamatan dengan populasi tertinggi berasal dari Kecamatan Kajang. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-45
Data Populasi Kerbau Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 (Ekor)

No.	Kecamatan	Kerbau		
		Jantan	Betina	Jumlah
1.	Gantarang	17	39	56
2.	Ujung Bulu	-	-	-
3.	Ujungloe	-	-	-
4.	Bonto Bahari	2	16	18
5.	Bonto Tiro	-	-	-
6.	Herlang	-	-	-
7.	Kajang	95	244	339
8.	Bulukumpa	4	16	20
9.	Rilauale	-	-	-
10.	Kindang	-	-	-
Total		**118**	**315**	**433**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

c) Kuda dan Kambing

Populasi kuda dan kambing tahun 2024 mencapai 2.322 ekor kuda dan 27.774 ekor kambing. Populasi tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dengan populasi kuda tertinggi berasal dari Kecamatan Gantarang dan populasi kambing tertinggi berasal dari Kecamatan Bonto Tiro. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-46
Data Populasi Kuda dan Kambing Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 (Ekor)

No.	Kecamatan	Kuda	Kambing
1.	Gantarang	524	4.482
2.	Ujung Bulu	8	549
3.	Ujungloe	467	1.653
4.	Bonto Bahari	81	4.009
5.	Bonto Tiro	398	6.503
6.	Herlang	198	4.539
7.	Kajang	378	2.739
8.	Bulukumpa	143	2.145
9.	Rilauale	73	917
10.	Kindang	52	238
Total		**2.322**	**27.774**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

d) Unggas

Potensi pengembangan populasi unggas di Kabupaten Bulukumba, khususnya ayam pedaging dan ayam petelur, cukup besar, dibandingkan dengan ayam buras, itik, dan itik manila. Ayam ras pedaging merupakan jenis unggas dengan populasi tertinggi di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024, yaitu sebanyak 4.482.550 ekor. Struktur populasi tersebut didukung oleh Sistem kemitraan dengan manajemen pakan yang sesuai standar, penerapan kandang sesuai teknis, serta manajemen kesehatan yang baik. Sementara itu, Untuk ayam ras petelur, total populasinya mencapai 808.411 ekor, dengan dominasi terbesar di Kecamatan Bonto Tiro yaitu sebanyak 317.563 ekor yang mengindikasikan potensi sentra produksi telur di wilayah tersebut. Peningkatan populasi untuk dua komoditas ini berdampak pada peningkatan produksi telur dan daging ayam yang memberikan kontribusi langsung untuk pemenuhan Program Makan Bergizi Gratis

Demikian halnya dengan populasi ayam buras juga cukup besar yaitu 767.317 ekor dengan penyebaran merata, terutama di Kecamatan Kajang, Gantarang, dan Bulukumpa. Untuk Populasi itik, meskipun secara total lebih kecil dibandingkan jenis unggas lainnya, tetap menunjukkan variasi yang menarik. Itik lokal berjumlah 17.164 ekor, sedangkan itik manila mencapai 26.289 ekor, dengan populasi tertinggi di Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa. Beberapa kecamatan seperti Kindang dan Ujung Bulu mencatat jumlah populasi unggas yang relatif rendah di semua kategori. Secara umum, distribusi unggas yang tidak merata menunjukkan adanya potensi pengembangan di kecamatan dengan populasi rendah dan penguatan produksi di wilayah dengan konsentrasi tinggi. Uraian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-47
Data Populasi Unggas Menurut Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Petelur	Itik	Itik Manila
1.	Gantarang	128.054	794.560	92.863	7.921	12.219
2.	Ujung Bulu	32.231	26.000	24.363	952	448
3.	Ujungloe	63.173	540.559	63.595	2.403	6.143
4.	Bonto Bahari	52.777	435.859	30.118	240	762
5.	Bonto Tiro	88.785	553.563	317.563	1.286	237
6.	Herlang	87.763	580.640	24.486	510	797
7.	Kajang	105.398	496.751	136.616	1.254	726
8.	Bulukumpa	86.882	322.559	30.363	1.008	2.160
9.	Rilauale	84.354	723.059	85.444	922	2.033
10.	Kindang	37.900	9.000	3.000	668	764
Total		**767.317**	**4.482.550**	**808.411**	**17.164**	**26.289**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

e) Produksi Daging

Produksi daging merupakan elemen penting untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Produksi daging ini dihitung dari hasil pemotongan sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik. Untuk produksi daging di lebih banyak disuplai dari Ayam ras Pedaging, karena daging ayam sebagai salah satu sumber protein hewani yang banyak diminati oleh masyarakat Untuk daging sapi lebih banyak digunakan untuk keperluan hajatan sebagai tambahan menu jamuan dan usaha kuliner yang berbahan dasar daging sapi. Data Produksi daging di Kabupaten Bulukumba tergambar sebagai berikut

Tabel II-48
Jumlah Produksi Daging Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	910.039	626.080	1.085.287	689.270	862.829
2	Sapi Perah	-	-	-	-	-
3	Kerbau	10.230	10.230	7.440	3.100	5.735
4	Kuda	115.075	120.000	161.250	74.125	28.125
5	Kambing	71.380	105.120	59.360	31.800	49.600

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
6	Ayam Buras	423.007	300.550	195.375	98.576	169.725
7	Ayam Ras Pedaging	928.178	1.118.003	1.130.220	1.477.703	1.298.198
8	Ayam Ras Petelur	205.741	242.787	222.700	155.104	129.857
9	Itik	7.153	5.375	2.423	3.338	3.620
10	Itik Manila	10.318	5.745	3.545	3.438	5.941
Julmlah		**2.681.121**	**2.533.890**	**2.867.600**	**2.536.454**	**2.553.630**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

f) Produksi Telur

Tren produksi telur di Kabupaten Bulukumba dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan hal ini dipengaruhi oleh populasi ayam petelur. Untuk produksi telir lebih banyak di suplai oleh komoditas ayam ras petelur sehingga Penurunan produksi telur yang signifikan biasanya terkait dengan masa afkir ayam petelur dan kondisi manajemen peternakan, sedangkan kenaikan harga yang berkelanjutan menunjukkan permintaan pasar yang kuat yang dipengaruhi oleh kondisi produksi ayam petelur. Kabupaten Bulukumba termasuk dalam jalur perdagangan telur yang strategis karena keberadaan pelabuhan Leppe"e dan Pelabuhan Bira sebagai pintu gerbang mobilitas barang dan penumpang yang menghubungkan dengan wilayah lain di Sulawesi dan pulau-pulau terdekat seperti Selayar, Kabaena, dan Buton serta mendukung pelayaran dan perdagangan di perairan Teluk Bone. Produksi telur dalam lima tahun tergambar sebagai berikut :

Tabel II-49
Jumlah Produksi Telur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024

No	Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Buras	314.265	317.586	318.562	312.934	322.273
2	Ayam Ras Petelur	7.319.128	7.626.040	5.441.003	4.432.631	5.238.503
3	Itik	100.021	100.068	100.517	101.439	80.328
4	Itik Manila	195.685	194.777	189.596	176.235	123.033
Julmlah		**7.929.099**	**8.238.471**	**6.049.678**	**5.023.239**	**5.764.137**

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tahun 2025

2.1.1.2.5 Sektor Perikanan

a. Potensi Perikanan Laut

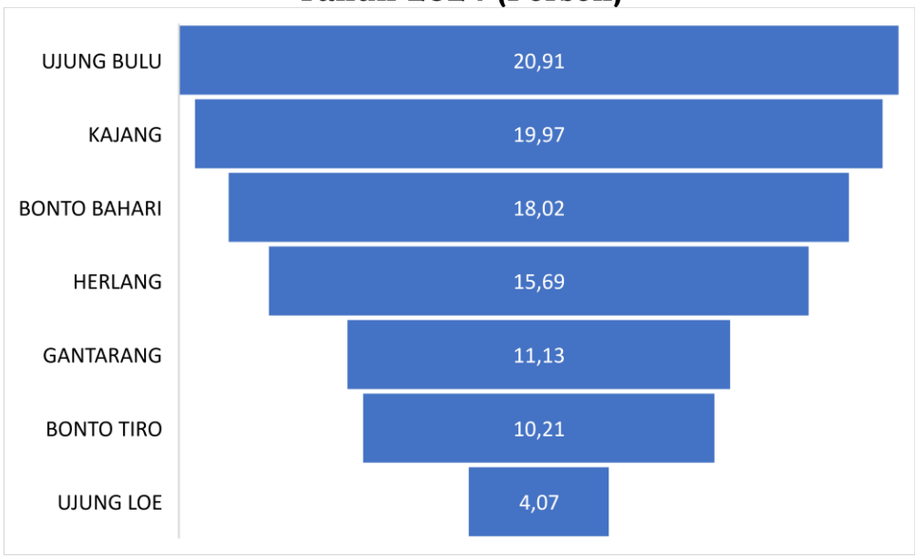
Potensi perikanan laut Kabupaten Bulukumba cukup besar karena didukung oleh panjang garis pantai ± 128 km yang meliputi 7 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Adapun 7 kecamatan yang memiliki daerah pesisir yaitu kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujungloe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang. Selain itu, posisi Bulukumba sebagai daerah perbatasan untuk wilayah Kepulauan Selayar, Teluk Bone dan Laut Flores menjadikan posisi yang sangat strategis sebagai pusat distribusi dan perdagangan.

Kabupaten Bulukumba memiliki 2 (dua) pelabuhan perikanan yang terletak di Kecamatan Bonto Bahari dan Kajang, selanjutnya terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 5 (lima) yang terletak di Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari, Kelurahan Bontokamase Kecamatan Herlang, Desa Gunturu Kecamatan Herlang, Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bonto Tiro dan Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu.

Pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba mencapai 58.965,3 ton. Produksi terbesar diperoleh dari Kecamatan Ujung

Bulu yang mencapai 12.329,2 ton, selanjutnya Kecamatan Kajang mencapai 11.776,7 ton. Produksi perikanan tangkap terbanyak berada di Kecamatan Ujung Bulu karena Kecamatan Ujung Bulu merupakan Ibu Kota Kabupaten yang menjadi pusat pemasaran. Adapun persentase produksi per kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-1
Persentase Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan
Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa Kecamatan Ujung Bulu dan Kajang menyumbang produksi perikanan tangkap sebesar 20,91 persen & 19,97 persen sementara yang terendah adalah Kecamatan Ujungloe sebesar 4,07 persen, hal ini karena Kecamatan Ujungloe lebih banyak terkonsentrasi dengan lapang usaha budidaya air payau (Tambak).

Produksi perikanan tangkap dari perairan laut yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba secara garis besar terdiri dari kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Produksi ikan ekonomis penting pada kelompok ikan pelagis didominasi oleh 6 jenis ikan, yakni: Tuna, Cakalang, Tongkol, Layang, Tembang, dan lemuru. Sementara, untuk kelompok ikan demersal, produksi ikan yang bernilai ekonomi pentingnya didominasi oleh jenis ikan: Kerapu dan Kakap.

Produksi perikanan pelagis di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 didominasi oleh jenis Ikan Tongkol, dengan produksi sebesar 13.411,1 ton (22.74 persen dari total produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba), selanjutnya adalah Ikan Tuna mencapai 20,12 persen, Ikan Layang yang mencapai 7.934,9 ton (13,46 persen), Cakalang 4.129,6 ton (7,0 persen), dan Ikan Kakap mencapai 3.527 ton (5,98 persen). Jumlah produksi dari jenis ikan pelagis utama yang didaratkan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-50
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan
Tahun 2020—2024

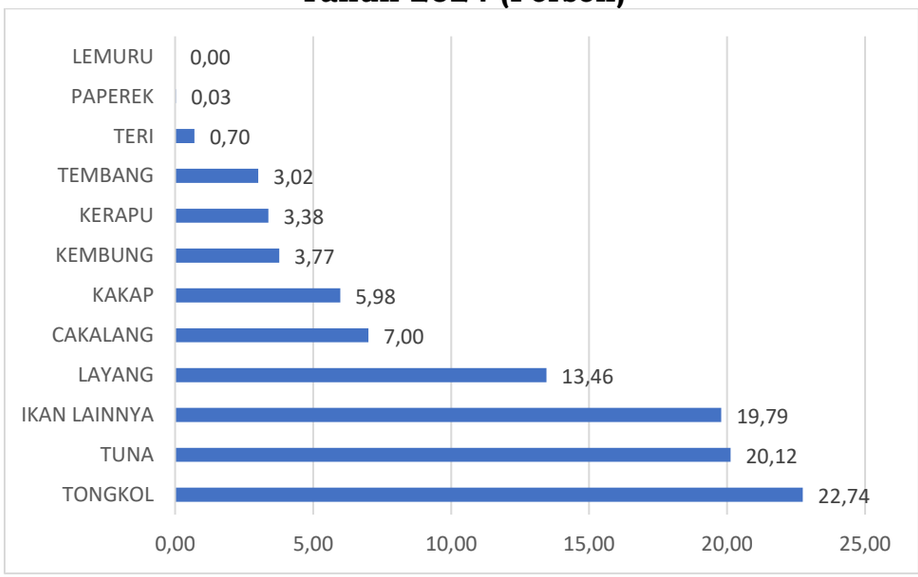
NO	JENIS IKAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	TUNA	8.482	9.502	10.027,3	12.881,1	11.866,7
2	CAKALANG	4.800	3.542	4.811,8	5.706,8	4.129,6
3	TONGKOL	11.193	4.844	5.144,8	15.851,7	13.411,1
4	LAYANG	1.809	5.986	6.398.8	9.715,2	7.934,9
5	KEMBUNG	1.324	2.630	2.935.0	1.699,0	2.224,6

NO	JENIS IKAN	2020	2021	2022	2023	2024
6	TEMBANG	1.100	1.297	1.239.9	113,1	1.778,5
7	LEMURU	534	1.926	1.428.6	1,4	0,0
8	KERAPU	2.483	2.694	2.690.7	1.373,3	1.993,4
9	TERI	224	0	247.1	96,8	414,7
10	PAPEREK	542	0	0	15,1	15,5
11	KAKAP	1.526	5.529	2.128.0	2.222,1	3.527,0
12	IKAN LAINNYA	19.843	15.880	18.470.6	5.936,4	11.669,3
JUMLAH		**53.860,1**	**53.830,3**	**55.522,6**	**55.612,0**	**58.965,3**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Sementara itu komposisi produksi berdasarkan jenis ikan dapat dilhat pada grafik berikut :

Grafik II-2
Komposisi Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

b. Potensi Budidaya Perikanan

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Bulukumba ini dilakukan di beberapa tempat yaitu laut, tambak, dan kolam. Secara umum, produksi perikanan budidaya tahun 2024 mengalami Peningkatan produksi. Selengkapnya data jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP), petani, luas bersih pemeliharaan, produksi, dan nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bulukumba tahun 2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel II-51
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Tahun	Perikanan Budidaya			
	Kolam	Tambak	Laut	Mina Padi
2020	630	1.308	3.173	60
2021	668	1.308	3.172	62
2022	668	1.308	3.172	62
2023	668	1.308	3.172	62
2024	672	1.308	3.172	62

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah RTP baik itu pembudidaya tambak dan rumput laut tidak mengalami perubahan. Perubahan pembudidaya memang biasanya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun karena usaha budidaya ini terkait langsung dengan lahan.

1. Budidaya Air Payau

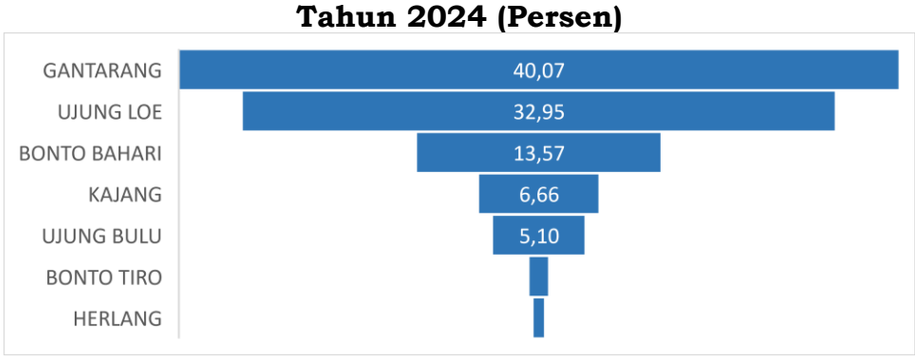
Dinas Perikanan Bulukumba telah mengidentifikasi potensi lahan tambak air payau seluas sekitar 5.277,3 ha, dengan potensi produksi mencapai 5.791,7 ton. Sentra utama budidaya air payau tersebar di Kecamatan Gantarang, Ujungloe, Bonto Bahari, Kajang, Ujung Bulu, Bonto Tiro, serta daerah Herlang. Pembagian proporsi luas dan produksi mengindikasikan Gantarang dan Ujungloe sebagai daerah paling intensif dalam budidaya payau. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi udang vanamean/windu, ikan bandeng, ikan mujair, dan rumput laut (Gracilaria) sesuai karakteristik salinitas dan ekosistem mangrove dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II-52
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau per Jenis Budidaya
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

NO	JENIS BUDIDAYA	PRODUKSI KWARTAL (TON)				TOTAL PRODUKSI (TON)
		I	II	III	IV	
1	Udang Windu	94,56	94,66	95,23	94,41	**378,9**
2	Udang Vanname	745,23	794,18	797,76	804,31	**3.141,5**
3	Udang Api Api	66,98	64,90	65,07	64,47	**261,4**
4	Udang Putih	3,28	3,11	4,79	4,77	**15,9**
5	Ikan Bandeng	396,85	404,00	421,07	431,69	**1.653,6**
6	Ikan Kakap	0,27	0,29	0,32	1,54	**2,4**
7	Ikan Mujair	49,40	53,24	49,87	48,55	**201,1**
8	Rumput Laut Tambak	9,80	9,24	9,43	9,60	**38,1**
9	Baronang	23,19	24,37	25,36	25,91	**98,8**
Jumlah						**5.791,7**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Grafik II-3
Proporsi Produksi Budidaya Air Payau Per Kecamatan
Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa Kecamatan Gantarang merupakan kontributor produksi budidaya air payau terbesar dibanding dengan kecamatan lainnya, adapun kontribusi produksinya mencapai 40,07 persen. Hal ini karena Kecamatan Gantarang merupakan pusat lokasi Tambak Intensif.

Setelah Kecamatan Gantarang, penyumbang produksi terbesar adalah Kecamatan Ujungloe dengan persentase produksi mencapai 32,95 persen, kecamatan Ujungloe merupakan wilayah tambak terluas di Kabupaten Bulukumba sekitar 2.000 Ha, namun skala usaha budidaya di Ujungloe dominan merupakan usaha budidaya tradisional sehingga produktifitasnya cukup rendah.

2. Budidaya Laut

Untuk usaha budidaya laut komoditas yang dikembangkan di Kabupaten Bulukumba hanya Rumput Laut, sementara jenis komoditas lainnya seperti ikan kerapu maupun mutiara belum berkembang. Komoditi budidaya laut selain rumput laut sebenarnya sudah diusahakan dalam pengembangannya namun sampai saat ini belum ada *success story* terhadap budidaya tersebut, biasanya mengalami kegagalan terutama pada saat pemilihan lokasi yang kurang pas.

Namun untuk budidaya rumput laut Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang sangat berkontribusi positif terhadap produksi di Sulawesi Selatan dan memiliki kualitas karagenan yang diakui oleh perusahaan eksportir. Terdata bahwa potensi lahan budidaya rumput laut mencapai 9.000 ha, dengan potensi produksi sekitar 216.252,22 ton Adapun produksi rumput laut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel II-53
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau per Jenis Budidaya
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Jenis Budidaya	Produksi Kwartal (TON)				Total Produksi (Ton)
		I	II	III	IV	
1	Rumput Laut	52.960,65	53.865,13	55.189,96	54.236,49	**216.252,2**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Grafik II-4
Persentase Produksi Rumput laut Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2024 (Persen)



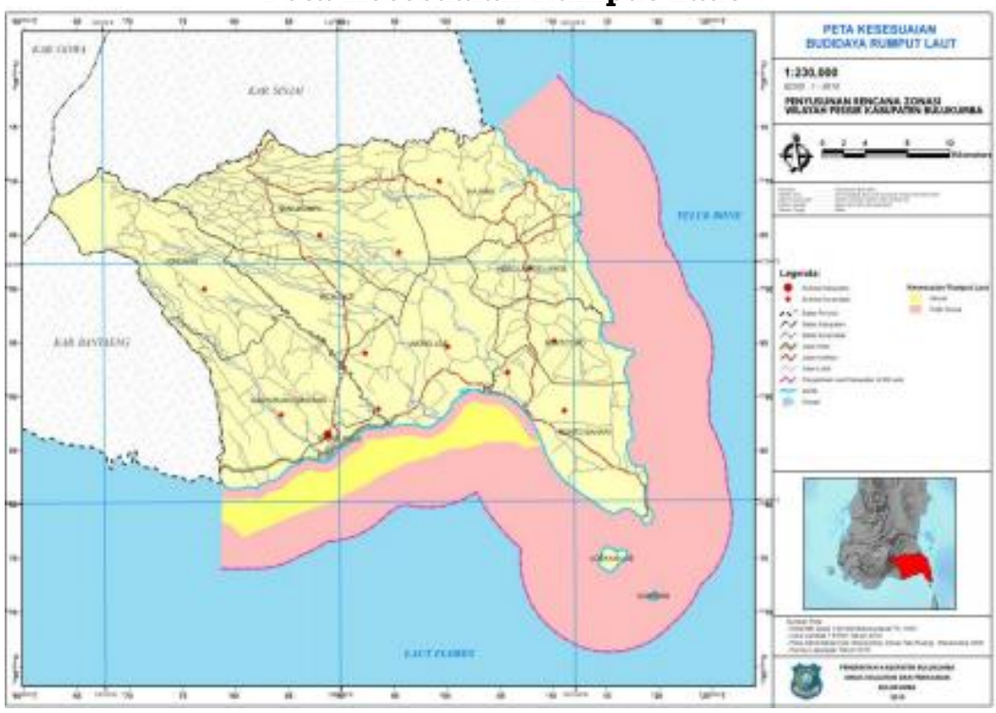
Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa daerah penghasil rumput laut hanya terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Gantarang, Ujung Bulu, Ujungloe, dan Bonto Bahari sementara 3 (tiga) kecamatan pesisir lainnya seperti Herlang, Bonto Tiro dan Kajang tidak menghasilkan rumput laut. Ketiga kecamatan pesisir yang tidak menghasilkan rumput laut ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan teluk bone (pantai timur). Wilayah pantai timur ini secara budidaya sederhana memang kurang cocok untuk budidaya laut karena topografi pantai yang berupa tebing-tebing dan perairan pantai yang umumnya berupa slope. Kondisi ini tentu menyulitkan dalam menempatkan bentangan rumput laut. Selain itu pada perairan ini masih banyak ikan-ikan demersal (ikan karang) yang merupakan predator dari rumput laut, sehingga untuk pengembangan

rumput laut di daerah ini memerlukan introduksi teknologi terapan budidaya rumput laut seperti budidaya sistem kurungan ataupun polybag.

Jika memperhatikan grafik terlihat bahwa kecamatan yang saat ini merupakan kontributor produksi utama rumput laut adalah Kecamatan Gantarang sebesar 26,72 persen, Kecamatan Ujungloe di urutan kedua yaitu sebesar 24,80 persen dari total produksi, untuk urutan ketiga ditempati oleh kecamatan ujung bulu sebesar 24,79 persen dan Bonto Bahari sebesar 23,70 persen. Untuk melihat lebih jelas mengenai potensi budidaya rumput laut (tanpa adanya introduksi teknologi terapan) dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar II-6
Peta Kesesuaian Rumput Laut



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Dari peta kesesuaian di atas dapat digambarkan bahwa pantai selatan (warna kuning) merupakan wilayah perairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut, wilayah pantai ini terdiri dari Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujungloe dan Bonto Bahari. Sementara pantai timur merupakan wilayah perairan dengan topografi bebatuan yang curam dan kondisi perairan pesisir yang slope ditambah masih banyaknya ikan predator rumput laut seperti ikan baronang semakin menyulitkan budidaya rumput laut secara tradisional.

3. Budidaya Air Tawar

Budidaya air tawar di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua jenis, yaitu budidaya kolam dengan produksi sebesar 425,65 ton dan budidaya mina padi sebesar 18,73 ton. Dinas Perikanan telah aktif mendorong kemitraan dengan masyarakat melalui dua fasilitas utama: Balai Benih Ikan (BBI) di Tanete, Kecamatan Bulukumpa, yang sejak 2003 menyediakan benih air tawar, serta Pasar Benih Ikan (PBI) di Rilauale, yang berfungsi sebagai pusat distribusi benih ke berbagai kecamatan seperti Bulukumpa, Kindang, Gantarang, dan Ujung Bulu. Komoditas utama budidaya air tawar meliputi lele, gurame, nila, ikan mas, dan patin, yang sesuai untuk dibudidayakan di kolam, sawah (minapadi), maupun sumber

air lokal lainnya. Jika dikelola secara optimal, budidaya air tawar ini memiliki potensi produksi lokal yang sangat tinggi.

Tabel II-54
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar per Jenis Budidaya
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

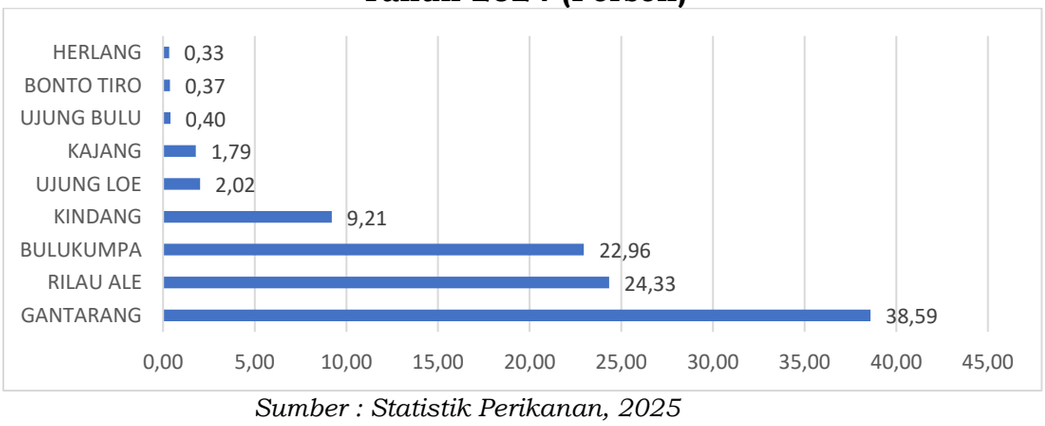
NO	JENIS BUDIDAYA	PRODUKSI KWARTAL (TON)				TOTAL PRODUKSI (TON)
		I	II	III	IV	
I	**Kolam**					
1	Ikan Mas	12,47	12,30	10,86	10,34	46,0
2	Ikan Nila	32,72	38,37	41,88	42,61	155,6
3	Ikan Mujair	13,82	12,41	11,75	11,24	49,2
4	Ikan Lele	38,87	44,79	45,32	45,88	174,9
Jumlah						**425,6**
II	**Mina Padi**					
1	Ikan Mas	0,00	1,26	1,11	1,08	3,46
2	Ikan Nila	0,00	4,48	5,16	5,62	15,26
Jumlah						**18,72**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Budidaya ikan air tawar sebenarnya belum terlalu familiar di kalangan masyarakat Kabupaten Bulukumba, mengingat sebagian besar penduduknya lebih menyukai konsumsi ikan laut dibandingkan ikan air tawar. Pola konsumsi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pengembangan budidaya air tawar, karena para pembudidaya kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Meskipun permintaan ikan air tawar di tingkat regional (Sulawesi) cukup tinggi, produksi di Bulukumba masih berskala kecil dan tersebar, sehingga sulit diserap pasar. Kondisi ini menyulitkan para pengepul untuk membeli hasil budidaya karena dari sisi ekonomi dianggap kurang menguntungkan.

Untuk wilayah kecamatan yang potensial untuk budidaya air tawar terdiri dari empat kecamatan yaitu Bulukumpa, Rilauale, Kindang, dan Gantarang. Adapun komposisi produksi di bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

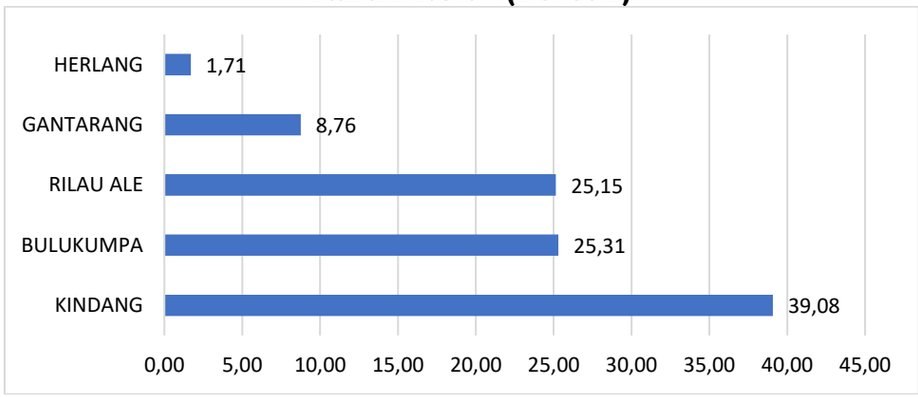
Grafik II-5
Persentase Produksi Budidaya Kolam Per Kecamatan
Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa untuk budidaya kolam produksi tertinggi adalah Kecamatan Gantarang sebesar 38,59 persen sementara di posisi berikutnya adalah Kecamatan Rilauale sebesar 24,33 persen, kecamatan Bulukumpa sebesar 22,96 persen, dan kecamatan Kindang sebesar 9,21 persen.

Grafik II-6
Persentase Produksi Budidaya Mina Padi Per Kecamatan Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Sementara itu mina padi produsen tertinggi adalah Kecamatan Kindang sebesar 39,08 persen di ikuti oleh kecamatan Rilauale 25,31 persen, hal ini karena potensi air baku di wilayah ini memadai dengan lahan yang masih cukup. Selain itu wilayah ini merupakan wilayah yang tidak berbatasan dengan laut sehingga menuntut penduduknya untuk berbudidaya ikan untuk pemenuhan konsumsi sehari-hari.

4. Kondisi Pengolahan Hasil Perikanan

Pengolahan ikan di Kabupaten Bulukumba pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk olahan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok usaha bersama. Sementara, untuk contoh produk dari hasil pengolahan ikan tradisional, antara lain adalah ikan asin, pindang, dan asap. Kemudian berdasarkan cara pengolahan, jenis pengolahan ikan dapat dikelompokkan ke dalam 7 jenis, yaitu: pengolahan ikan segar, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan, fermentasi/peragian, dan pengolahan lainnya.

Selanjutnya, aktivitas usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Bulukumba secara umum masih didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah dengan segala keterbatasannya, antara lain adalah lemah dalam permodalan, teknologi dan informasi, manajemen dan pemasaran, bersifat subsisten, dan tersebar secara parsial. Banyaknya unit pengolahan hasil perikanan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel II-55
Unit Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah UPI 2024	Tenaga Kerja 2024			Jumlah UPI 2025
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Penggaraman/Pengeringan	0	0	0	0	1
2.	Pemindangan	52	14	67	81	38
3.	Pengasapan/Pemanggangan	26	15	61	76	47
4.	Pelumatan Daging Ikan	3	0	30	30	1
5.	Pengolahan Lainnya	30	180	120	300	12
	JUMLAH	**111**	**209**	**278**	**487**	**99**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bulukumba pada tahun masih didominasi oleh kegiatan pengolahan tradisional seperti pemindangan ikan, pengasapan/ pemanggangan, pelumatan daging/surimi, pengeringan/pemanggangan,

dan pengolahan lainnya. Secara keseluruhan, jumlah UPI mengalami penurunan dari 111 unit pada tahun 2024 menjadi 99 unit pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pembekuan
   Salah satu jenis pengolahan berbasis pembekuan yang pernah ada di Kabupaten Bulukumba adalah *cold storage*. Namun, fasilitas tersebut kini sudah tidak beroperasi karena tidak ada penyewa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan cold storage serta rendahnya minat masyarakat terhadap ikan beku. Masyarakat Bulukumba cenderung lebih memilih ikan segar dibandingkan ikan beku.
2. Fermentasi/Peragian
   Hingga saat ini, kegiatan fermentasi/peragian ikan belum berkembang di Kabupaten Bulukumba. Selain karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai teknik fermentasi, kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas dan teknologi pendukung. Menanggapi hal ini, Dinas Perikanan bersama penyuluh perikanan berencana membentuk kelompok pengolah yang akan diberikan pembinaan terkait teknik fermentasi, seperti produksi terasi udang.
3. Pemindangan Ikan
   Jumlah kelompok pengolah pemindangan ikan mengalami penurunan signifikan, dari 52 menjadi 38 UPI. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peralihan profesi, kondisi kesehatan, serta usia lanjut dari anggota kelompok yang menyebabkan mereka tidak lagi mampu menjalankan kegiatan pengolahan.
4. Pengasapan/Pemanggangan
   Pengolahan ikan asap mengalami peningkatan dari 26 menjadi 47 UPI. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk ikan asap. Tingginya permintaan pasar mendorong banyak masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pengolah ikan asap secara mandiri.
5. Pelumatan Daging/Surimi
   Jumlah UPI dalam kegiatan pelumatan daging ikan mengalami penurunan, dari 3 menjadi 1 unit. Penurunan ini disebabkan oleh minat masyarakat yang masih rendah terhadap produk olahan daging ikan, terbatasnya inovasi produk, serta kurangnya sosialisasi terkait manfaat konsumsi daging ikan olahan.
6. Pengeringan/Pemanggangan
   Pada tahun 2025, terdapat penambahan 1 unit pengolahan ikan kering. Peningkatan ini terjadi karena tingginya konsumsi ikan kering oleh masyarakat. Selain itu, banyak pedagang ikan kering yang sebelumnya mengambil produk dari luar daerah kini mulai memproduksi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya ikan lokal yang melimpah.
7. Pengolahan Lainnya
   UPI dalam kategori pengolahan lainnya—termasuk pengolahan rumput laut dan abon ikan—mengalami penurunan dari 30 menjadi 12 unit. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran data Kusuka yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (PUSDATIN). Sebanyak 24 UPI rumput laut tercatat pada tahun 2024, namun hanya 7 yang masih aktif di tahun 2025. Hal ini terjadi karena

sebagian anggota kelompok yang sebelumnya tercatat sebagai pelaku utama diubah statusnya menjadi pelaku pendukung (tenaga kerja).

Meskipun struktur UPI yang ada di Kabupaten Bulukumba tergolong tradisional, namun kontribusi terhadap perekonomian cukup signifikan, dimana nilai produksi yang dihasilkan menghasilkan sekitar **Rp.18.835.284.000** dengan produksi olahan mencapai **405.821** Kg. Meskipun angka ini cukup besar namun perlu diiangat bahwa usaha pengolahan ini memerlukan modal yang besar pula dalam pengadaan bahan baku (ikan) sehingga margin yang diperoleh hanya berkisar 10 – 15% dari nilai produksi. Adapun detail produksi dan nilai pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-56
Produksi Hasil Perikanan Tahun 2024

Kode	Jenis Kegiatan Pengolahan	Produksi	
		Volume (Kg)	Nilai (Rp)
1	Pembekuan		
2	Penggaraman/Pengeringan		
3	Pemindangan	241.767	9.670.680.000
4	Pengasapan/Pemanggangan	139.192	7.237.984.000
5	Fermentasi		
6	Pereduksian/Ekstraksi		
7	Pelumatan Daging Ikan	537	48.330.000
8	Penanganan Produk Segar		
9	Pengolahan Lainnya	24.325	1.878.290.000
	JUMLAH	**405.821**	**18.835.284.000**

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

5. Sarana Perikanan Tangkap

Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung sektor perikanan tangkap melalui bantuan sarana penangkapan sejak 2020—2024. Dengan pendekatan *multifaset*, mulai dari penyediaan perahu, kapal, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan ikan hingga pelatihan teknis. Program bantuan sarana dan prasarana ini berhasil meningkatkan hasil tangkapan ikan secara signifikan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut lokal.

Program bantuan sarana dan prasarana diperkuat kembali. Bantuan mencakup bubu lipat, jaring insang, rumpon dasar dan rumpon permukaan yang ditujukan untuk optimasi penangkapan ikan. Selain itu, diadakan pula pelatihan dan inovasi teknik penangkapan.

Produksi perikanan tangkap di Bulukumba pada tahun 2024 tercatat sebesar 58.965,3 ton, menunjukkan hasil yang signifikan berkat konsistensi program bantuan sarana dan kapasitas nelayan yang ditingkatkan.

Tabel II-57
Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

JENIS PERIKANAN	2020	2021	2022	2023	2024
I. PERIKANAN LAUT					
1.1 Jumlah Perahu/Kapal	3.718	3.654	3.819	3.906	3.980
1.1.2 Perahu tak bermotor	162	0	160	160	150
1.1.3 Perahu tempel	2.304	1.548	1.548	1.688	1.688
1.1.4 Kapal motor	1.252	2.106	2.111	2.058	2.142
0 - 5 GT	432	843	843	810	894

JENIS PERIKANAN	2020	2021	2022	2023	2024
5 - 10 GT	347	894	899	899	899
10 - 15 GT	261	244	244	244	244
15 - 20 GT	50	0			
20 - 30 GT	117	88	88	88	88
30 - 50 GT	45	37	37	17	17

Sumber : Statistik Perikanan, 2025

2.1.1.2.6 Sektor Kehutanan

Pembahasan terkait sumber daya hutan dilakukan dengan mengolah informasi dari SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 Tanggal 28 Mei 2019 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6626/MENLHKPKTL/KUH/PLA. 2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2020.

Kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba yang terbagi dalam empat kategori: Area Penggunaan Lain (APL), Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Taman Hutan Raya (Tahura). Kecamatan Bulukumpa memiliki luas kawasan APL terbesar dengan 17.035,87 hektare, diikuti oleh Gantarang dengan 16.537,31 hektare dan Ujungloe dengan 14.726,31 hektare. Kecamatan dengan luas hutan lindung yang signifikan adalah Kindang dengan 3.581 hektare, sedangkan kecamatan lainnya tidak memiliki hutan lindung atau memiliki luasan yang sangat kecil seperti Bonto Bahari dengan 445,25 hektare. Hutan produksi terdapat di beberapa kecamatan dengan luasan terbesar di Gantarang (258,32 hektare), dan Kajang (336,56 hektare). TAHURA hanya terdapat di Bonto Bahari dengan luas 3.744,49 hektare.

Penting untuk memperhatikan luasan hutan di Kabupaten Bulukumba karena hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan menyediakan sumber daya alam bagi masyarakat lokal. Hutan lindung, seperti yang terdapat di Kindang, sangat penting untuk melindungi tanah dari erosi, menjaga kualitas air, dan menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, hutan produksi yang ada di beberapa kecamatan, meskipun lebih kecil luasannya, juga penting untuk mendukung ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Tahura di Bonto Bahari memiliki fungsi yang penting sebagai kawasan konservasi yang menyediakan ruang bagi rekreasi dan pendidikan lingkungan. Dengan luas mencapai 3.744,49 hektare, Tahura ini dapat menjadi pusat konservasi dan pengembangan ekowisata yang mendukung pelestarian alam dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap seluruh kawasan hutan di Kabupaten Bulukumba sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomisnya. Hal ini mencakup upaya konservasi, reboisasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk menjaga hutan dari degradasi dan deforestasi.

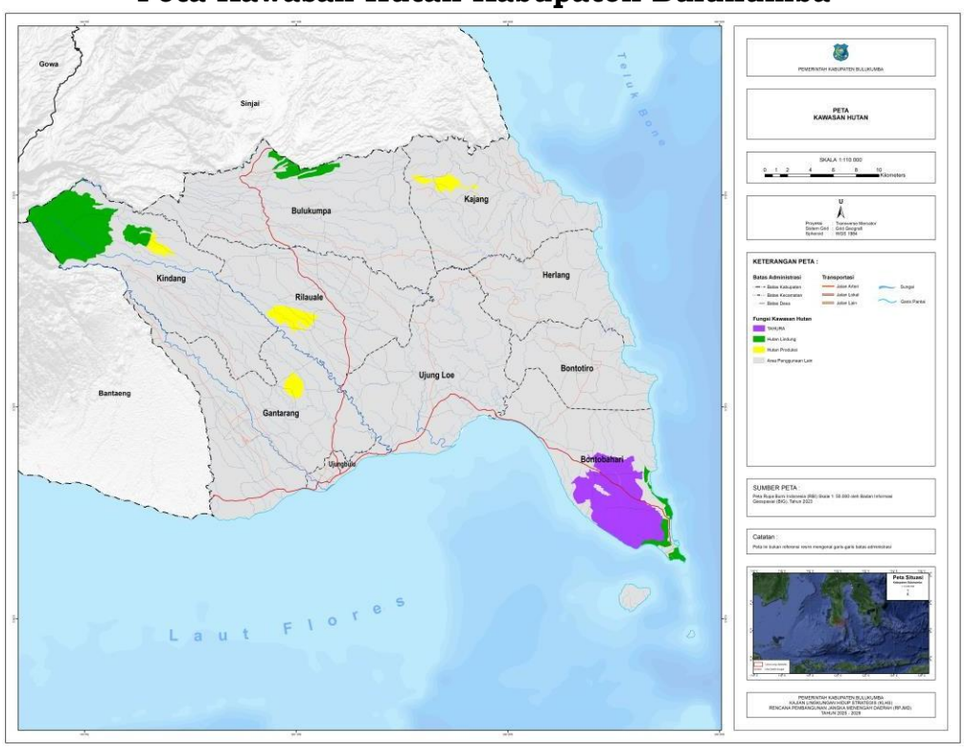
Tabel II-58
Distribusi Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Kawasan Hutan (ha)			
	Area Penggunaan Lain	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Tahura
Bonto Bahari	7.826,65	445,25		3.744,49

Kecamatan	Kawasan Hutan (ha)			
	Area Penggunaan Lain	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Tahura
Bonto Tiro	6.742,20	0	0	0
Bulukumpa	17.035,87	532,39	0	0
Gantarang	16.537,31	0	258,32	0
Herlang	8.131,37	0	0	0
Kajang	12.586,44	0	336,56	0
Kindang	10.762,70	3.581,00	202,22	0
Rilauale	12.064,24	0	554,38	0
Ujungloe	14.726,31	0	0	0
Ujung Bulu	1.124,10	0	0	0

Sumber: SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Gambar II-7
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bulukumba



Sumber: SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Berdasarkan data hasil pengamatan pada tahun 2019, jenis flora yang dapat dijumpai di TAHURA Bonto Bahari yaitu sekurangnya terdapat 35 jenis tumbuhan, yang terdiri dari 27 jenis pohon, 8 jenis perdu dan selebihnya yang tidak dilakukan pencatatan merupakan jenis-jenis dengan bentuk tumbuh herba, liana, dan rumput.

Tabel II-59
Jenis Flora pada Kawasan TAHURA Bonto Bahari

No	Jenis	Family
1	Vitex cofassus	Verbenaceae
2	Diospyros maritima	Ebenaceae
3	Schleichera oleosa	Sapindaceae
4	Olea sp.	Oleacaceae
5	Myrsine sp.	Myrisnaceaec
6	Mangifera sp.	Anacardiaceae
7	Streblus asper	Moraceae

No	Jenis	Family
8	Lannea grandis	Anacardiaceae
9	Sterculia foetida	Sterculiaceae
10	Mischocarpus sundaicus	Sapindaceae
11	Ricinus communis	Euphorbiaceae
12	Abrus sp.	Fabaceae
13	Acacia aurculiformis	Fabaceae
14	Dracaena multiflora	Asparagaceae
15	Pongania pinnata	Fabaceae
16	Muraya paniculta	Rutaceae
17	Acer laurinum	Aceraceae
18	Alyxia sp	Apocynaceae
19	Lagerstroemia sp	Lythraceae
20	Pterospermum celebica	Sterculiaceae
21	Tabarneamontana	Apocynaceae
22	Buchanania arborescens	Anacardiaceae
23	Ceistanthus sumatranus	Phyllanthaceae
24	Exocarpus latifolius	Santalaceae
25	Syzygium sp1	Myrtaceae
26	Syzygium sp2	Myrtaceae
27	Syzygium sp3	Myrtaceae
28	Ficus benjamina	Moraceae
29	Macaranga sp.	Euphorbiaceae
30	Morinda sp.	Rubiaceae
31	Ziziphus mauritiana	Rhamnaceae
32	Koordersiodendron pinnatum	Anacardiaceae
33	Eupatorium odoratum	Asteraceae
34	Lantana camara	Verbenaceae
35	Bombax sp.	Bombacaceae

Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Bonto Bahari periode 2021-2030

Selain tumbuhan, secara umum dapat ditemukan kurang lebih 19 jenis satwa liar di TAHURA Bonto Bahari yang terdiri dari 15 jenis burung, 3 jenis mamalia dan 1 jenis reptil. Dari keseluruhan jenis yang ditemukan terdapat 2 jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan perundang-undangan karena status populasinya yang mengalami penurunan di alam liar.

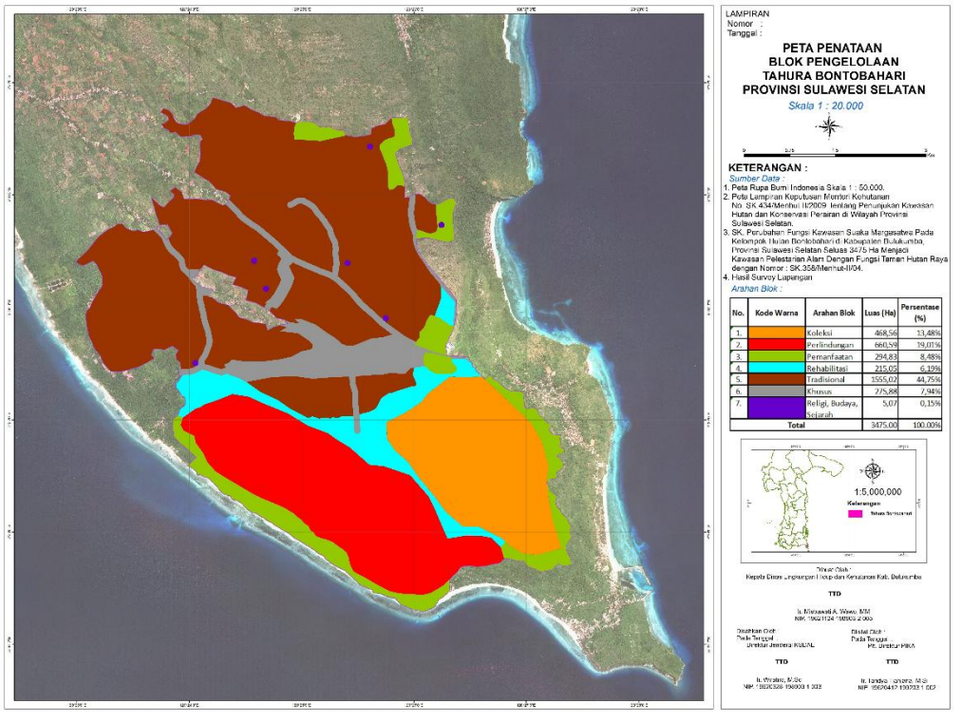
Tabel II-60
Jenis Fauna pada Kawasan TAHURA Bonto Bahari

No	Nama Indonesia/Lokal	Nama Latin	Status Konservasi & Perlindungan	
			Red List IUCN	Permen LHK No. P.106 tahun 2018
I	**AVES**			
1	Burung madu sriganti	Nectarinia jugularis	Least Concern	Tidak Dilindungi
2	Burung madu hitam	Nectarinia aspasia	Least Concern	Tidak Dilindungi
3	Kacamata laut	Zosterops chloris	Least Concern	Tidak Dilindungi
4	Layang-layang batu	Hirundo tahitica	Least Concern	Tidak Dilindungi
5	Cucak Kutilang	Pycnonotus aurigaster	Least Concern	Tidak Dilindungi
6	Gagak hutan	Corvus enca	Least Concern	Tidak Dilindungi
7	Walik kembang	Ptilinopus melanospila	Least Concern	Tidak Dilindungi
8	Kirik-kirik laut	Merops philippinus	Least Concern	Tidak Dilindungi
9	Kapasan sayap putih	Lalage atrovirens	Least Concern	Tidak Dilindungi
10	Bubut alang-alang	Centropus bengalensis	Least Concern	Tidak Dilindungi
11	Cekakak sungai	Halcyon chloris	Least Concern	Tidak Dilindungi
12	Cici padi	Cisticola juncidis	Least Concern	Tidak Dilindungi
13	Puyuh batu	Coturnix chinensis	Least Concern	Tidak Dilindungi
14	Ayam hutan	Gallus gallus	Least Concern	Tidak Dilindungi

No	Nama Indonesia/Lokal	Nama Latin	Status Konservasi & Perlindungan	
			Red List IUCN	Permen LHK No. P.106 tahun 2018
15	Kekep babi	Artamus leucorhynchus	Tidak ada data	Tidak Dilindungi
II	**MAMALIA**			
16	Kera hitam	Macaca maura	Endangered	Dilindungi
17	Rusa timor	Cervus timorensis	Vulnerable	Dilindungi
18	Babi hutan	Sus sp.	Unknown	Tidak Dilindungi
III	**REPTIL**			
19	Kadal	Mabuya multifasciata	Tidak ada data	Tidak Dilindungi

Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Bonto Bahari periode 2021-2030

Gambar II-8
Peta Pengembangan TAHURA Bonto Bahari



Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Bonto Bahari periode 2021-2030

Tabel II-61
Persentase Luas Blok TAHURA Bonto Bahari

No	Blok	Luas (Ha)	Persentase Luas terhadap Kawasan
1	Koleksi	468,56	13,48
2	Perlindungan	660,59	19,01
3	Pemanfaatan	294,84	8,48
4	Rehabilitasi	215,06	6,19
5	Tradisional	1.555,02	44,75
6	Khusus	275,88	7,94
7	Religi, Budaya, dan Sejarah	5,06	0,15

Sumber: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA Bonto Bahari periode 2021-2030

TAHURA dengan luas daratan mencapai 3.475 ha dibagi ke dalam 7 (tujuh) blok yaitu: 1) Blok koleksi, sebagai area untuk koleksi berbagai jenis tumbuhan yang dapat mendukung atau meningkatkan kualitas habitat dari beberapa

jenis satwa liar yang ada di dalamnya; 2) Blok perlindungan, sebagai area untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan keutuhan komunitas tumbuhan dan satwa dalam ekosistem alaminya; 3) Blok pemanfaatan, sebagai area untuk pariwisata alam, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, penelitian, pendidikan, pembinaan populasi, dan habitat satwa, dan kegiatan menunjang budidaya; 4) Blok rehabilitasi, sebagai area untuk memulihkan/memperbaiki kondisi ekosistem kawasan yang mengalami kerusakan; 5) Blok tradisional, sebagai area untuk mengakomodir pemanfaatan potensi kawasan oleh masyarakat setempat melalui pengaturan pemanfaatan secara lestari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari; 6) Blok khusus, sebagai area untuk kepentingan aktivitas dan sarana penunjang kehidupan kelompok masyarakat, sarana transportasi, dan sarana lainya yang sudah ada di dalam kawasan sebelum penunjukan/penetapan Tahura Bonto Bahari; dan 7) Blok Religi, Budaya, dan Sejarah, sebagai area untuk kepentingan aktivitas dan sarana penunjang kehidupan kelompok masyarakat, terkait religi, budaya, dan sejarah. Selain itu, pada lokasi tersebut memiliki sejarah sebagai tempat pembuatan perahu pinisi dan situs seperti kuburan tua.

Rencana kehutanan tingkat provinsi di Kabupaten Bulukumba, yang mencakup empat kategori penggunaan lahan: Arahan Penggunaan Lain, Kawasan untuk Konservasi, Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, dan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut. Kecamatan Bonto Bahari memiliki luasan terbesar dalam Arahan Penggunaan Lain dengan 48.145,59 hektare dan juga memiliki kawasan konservasi seluas 12.036,40 hektare. Bulukumpa dan Kindang memiliki kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut dengan luas masing-masing 17.568,27 hektare dan 654.566,67 hektare. Sementara itu, Kecamatan Gantarang dan Rilauale diindikasikan untuk pengusahaan hutan skala kecil dengan luasan masing-masing 16.802,65 hektare dan 12.618,63 hektare. Kajang juga memiliki luasan yang signifikan untuk pengusahaan hutan skala kecil sebesar 51.716,08 hektare.

Rencana kehutanan tingkat provinsi ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola penggunaan lahan hutan secara berkelanjutan, melindungi kawasan konservasi, mempromosikan pengusahaan hutan skala kecil yang berkelanjutan, dan memastikan perlindungan hutan alam serta lahan gambut. Arahan Penggunaan Lain mencakup penggunaan lahan yang tidak terkait langsung dengan fungsi hutan tetapi penting untuk kesejahteraan masyarakat. Kawasan untuk Konservasi mencakup wilayah yang harus dilindungi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil mendukung kegiatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, sedangkan Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut fokus pada konservasi ekosistem penting yang sensitif terhadap perubahan lingkungan.

Untuk mendukung rencana kehutanan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk program konservasi dan rehabilitasi hutan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengelolaan hutan, termasuk dalam kegiatan konservasi dan pengusahaan hutan skala kecil, untuk

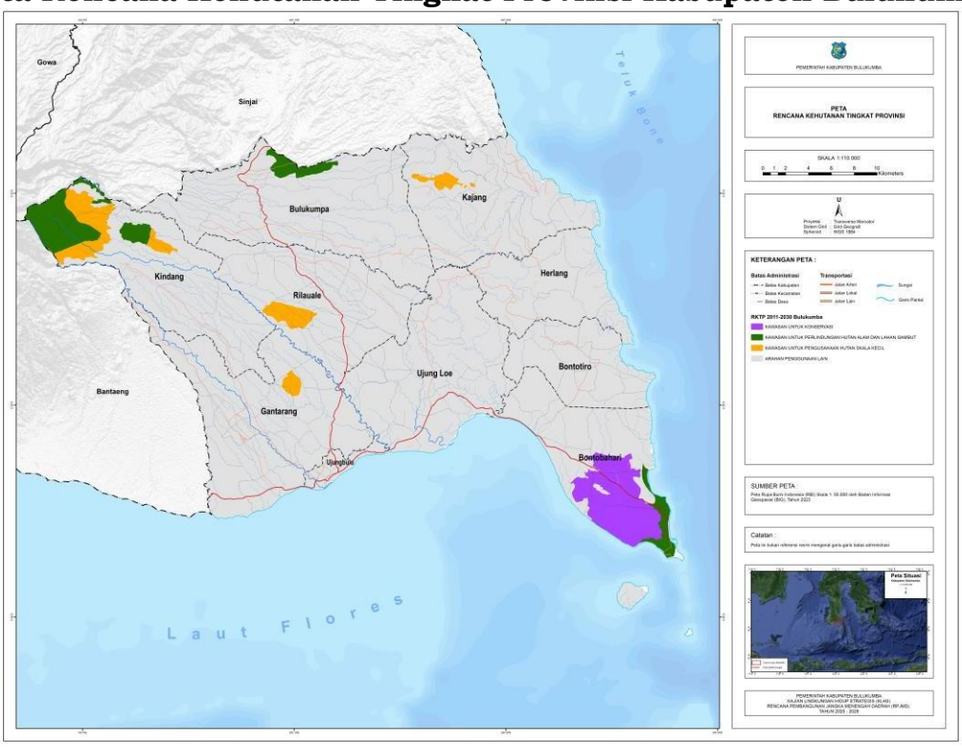
memastikan manfaat langsung bagi mereka. Selain itu, edukasi dan pelatihan mengenai praktik pengelolaan hutan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Pihak swasta juga dapat berperan dalam mendukung inisiatif konservasi dan pengusahaan hutan melalui investasi yang bertanggung jawab dan berbasis prinsip-prinsip keberlanjutan.

Tabel II-62
Distribusi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kabupaten Bulukumba

Kecamatan	Rencana kehutanan tingkat provinsi (ha)			
	Arahan penggunaan lain	Kawasan untuk konservasi	Kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil	Kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut
Bonto Bahari	48.145,59	12.036,40	0	12.036,40
Bonto Tiro	6.744,69	0	0	0
Bulukumpa	17.568,27	0	0	17.568,27
Gantarang	16.802,65	0	16.802,65	0
Herlang	8.131,97	0	0	0
Kajang	12.929,02	0	51.716,08	0
Kindang	43.637,78	0	29.091,85	654.566,67
Rilauale	12.618,63	0	12.618,63	0
Ujungloe	14.759,61	0	0	0
Ujung Bulu	1.139,85	0	0	0

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, Tahun 2023

Gambar II-9
Peta Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kabupaten Bulukumba



Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar, Tahun 2023

2.1.1.2.7 Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) melalui peninhgkatan lapangan kerja dan usaha terkait pariwisata. Secara keseluruhan Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pariwisata yang sangat kaya dan beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata buatan, wisata budaya

dan religi berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2021—2025, serta industri kreatif meliputi:

a) Wisata Alam

Wisata alam merupakan jenis pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik yang masih alami maupun yang telah melalui proses budi daya. Kabupaten Bulukumba memiliki 45 destinasi wisata alam yang meliputi air terjun, danau, telaga, lembah, bukit, sungai, dan gua, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-63
Daya Tarik Wisata Alam Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
1	Air Terjun Sapayya Na'na	Kp. Katimbang/Na'na, Kel. Borong Rappoa	Destinasi ini berada di tebing yang menjulang dengan debit air yang cukup deras yang dikelilingi oleh tanaman hijau	Air bersih	-
2	Danau Senggang	Kayu beranga/Na'na, Kel. Borong Rappoa	Danau ini masih sangat alami yang airnya terlihat berwarna biru yang dikelilingi oleh vegetasi yang masih hijau	Air bersih	-
3	Danau Lurayya/Na'na	Kayu beranga/Na'na, Kel. Borong Rappoa	Danau Lurayya yang memiliki luas 10.000 meter persegi atau sekitar 1 Hektare dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter pada saat kemarau dan potensial untuk dijadikan lokasi wisata mancing.	WC umum, penampungan air bersih, spot photo	Pokdarwis
4	Air terjun ere lulua	Kayu beranga/Na'na, Kel. Borong Rappoa	Memiliki debit air yang cukup deras khususnya pada musim penghujan	Air bersih	-
5	Air Terjun Bravo 45	Desa Kindang, Kec. Kindang	Memiliki Daya Tarik berupa air terjun dengan ketinggian air terjun 10 meter dengan lebar 2 meter dan di kelilingi oleh Vegetasi yang masih alami,namun pada musim kemarau debit air akan berkurang,akibat pada hulu sungai sudah rusak akibat adanya penebangan hutan.	Wc umum, tangga jalan, akses jalan menuju lokasi sangat memadai, fasilitas kebersihan dan keamanan	Pemerintah
6	Air Terjun Gamaccayya	Dusun Gamaccayya, Kec. Kindang	Air Terjun Gamacayya memiliki tinggi menjulang dan debit airnya lebih besar dibanding air terjun lain disekitarnya. Dikelilingi oleh pepohonan dengan udara yang sejuk.	Wc umum	Pemerintah

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
7	Danau Lurayya/Kahayya	Desa Kahayya, Kec. Kindang	Di Puncak Danau Lurayya ini tersaji pemandangan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Di sekelilingnya terlihat lekukan-lekukan bukit yang indah, hamparan hutan alam, dan pegunungan yang membentuk burung kelelawar yang membentangkan sayapnya. Di salah satu sisi sayap gunung ini terlihat dengan jelas Gunung Bawa Karaeng.	WC umum, penampungan air bersih, spot photo	-
8	Tanjung Ta'buakkang	Desa Kahayya, Kec. Kindang	Memiliki pemandangan alam yang masih alami	Belum ada akses jalan	-
9	Puncak Donggia	Desa Kahayya, Kec. Kindang	Merupakan salah satu camp-site terbaru dengan panorama alam bukit yang sangat indah karena berada di perbukitan	Tempat swafoto, aliran listrik, Gazebo, Fasilitas kebersihan	Swasta
10	Lembah lannying-lannying	Desa Kahayya, Kec. Kindang	Pemandangan alam berupa lapangan luas yang digunakan untuk campsite/berkemah	Spot photo	Pokdarwis
11	Lembah kunang-kunang	Desa Kahayya, Kec. Kindang	Tempat ini berada diatas ketinggian dan menyuguhkan pemandangan perbukitan yang hijau	Spot photo	Pokdarwis
12	Permandian Alam Bettu	Desa Dampang, Kec. Gantarang	Pengunjung sudah bisa menjangkau beberapa kawasan permandian lengkap dengan panorama alamnya.	UMKM, Wc umum	Desa
13	Puncak Bonto Massailea	Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang	Berada di atas puncak bukit dengan wahana spot photo yang instagrammable	Tempat swafoto, UMKM, Gazebo	Pokdarwis
14	Bangkeng Buki'	Desa Tanah Harapan. Kec. Gantarang	Memiliki daya tarik perkebunan coklat dan pemandangan yang indah dari atas bukit	Spot photo	-
15	Hutan Manggrove Luppung	Luppung, Kec. Ujungloe	Perpaduan antara hutan bakau dan pantai menjadi daya tarik tempat ini. Obyek wisata ini dilengkapi dengan dengan fasilitas jembatan lintas warna warni serta lampu hias yang menambah keindahan dan keunikan tempat ini.	Tempat swafoto, area parkir	Pokdarwis

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
16	Gua Malukua	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Dapat dijumpai stalaktit dan stalakmit dan bernilai sejarah sanagt tepat untuk berwisata religi	-	Pokdarwis
17	Gua Pa'banderang	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Dapat dijumpai stalaktit dan stalakmit dan bernilai sejarah	Akses jalan memadai	Pokdarwis
18	Liang Tantarayya	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Dapat dijumpai stalaktit dan stalakmit dan bernilai sejarah	Akses jalan kurang memadai	Pokdarwis
19	Puncak Pua' Janggo	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Ziarah makam tokoh Islam dengan menampilkan pemandangan pantai bira dari puncak bukit. Pua Janggo adalah seorang ulama penyiar agama Islam di daerah Bira pada masa lalu. Di kawasan Puncak Pua Janggo terdapat pusara Pua Janggo, yang dibuatkan rumah kayu dengan warna kuning.	Gazebo	Pemerintah
20	Liang Panikia	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Daya Tarik yang dimiliki Gua ini, kondisi yang masih alami dan merupakan habitat kelelawar serta terdapat pancaran sinar matahari yang menembus di dalam Gua.	Akses jalan cukup memadai	Pokdarwis
21	Liang Lajayya	Desa Ara, Kec. Bonto Bahari	Daya Tarik yang dimiliki Gua ini, kondisi pancaran sinar matahari yang menembus di dalam Gua.	Akses jalan memadai	-
22	Gua Passohara	Desa Ara, Kec. Bonto Bahari	Adapun daya Tarik yang dimiliki yaitu kondisi di dalam Gua yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen Gua berupa stalaktik dan stalakmit yang masih aktif, terdpat kumpulan air yang menyerupai kolam di dalam Gua yang bersih dan jernih dengan kedalaman ± 10 meter, sedangkan lebar Gua ± 15 meter m2.	Akses jalan memadai	Pokdarwis
23	Gua Passea	Desa Lembanna, Kec. Bonto Bahari	Gua purba desa lembanna kecamatan Bonto Bahari terdapat peti mati purba	Akses jalan, spot photo	Pokdarwis

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
24	Telaga Ere Manerang	Kel. Benjala, Kec. Bonto Bahari	Memiliki keunikan dengan air yang terlihat berwarna biru yang kerap disebut dengan telaga Biru dengan wahana spot photo yang sangat menarik	Tempat swafoto, WC Umum, akses jalan memadai, UMKM, Listrik, Gazebo	Pokdarwis
25	Permandian Alam Ere La'bua/Sumur Panjang Hila-Hila	Kel. Ekatiro, Kec. Bonto Tiro	Memiliki sejarah religi Dato Tiro, tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk berwisata religi dan memiliki potensi wisata alam	jaringan Listrik, jaringan air bersih, fasilitas kebersihan	Pemerintah
26	Air Terjun Baruttung	Desa Sapanang, Kec. Kajang	Memiliki debit air yang cukup deras dimana terdapat batu berukuran besar tepat di bawah pancaran air yang menjadi daya tarik tersendiri	Akses jalan cukup memadai	-
27	Air Terjun Barang	Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang	Memiliki keunikan dan daya tarik yang cukup menarik yang cukup indah yang dikelilingi oleh panorama alam yang menambah nilai natural kawasan tersebut.	-	-
28	Air Terjun Batu Licin	Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang	Memiliki keunikan air terjun dengan debit air yang sangat melimpah khususnya pada musim hujan	WC umum dan akses jalan cukup	-
29	Air Terjun Baruttung Dassa	Desa Bonto Baji, Kec. Kajang	Memiliki keunikan air terjun dengan debit air yang sangat melimpah khususnya pada musim hujan yng dijadikan sebagai salah satu sumber pengairan warga masyarakat sekitarnya	Akses jalan cukup memadai	-
30	Air Terjun Baruttung Lembanna	Desa Lembanna, Kec. Kajang	Memiliki keunikan air terjun dengan debit air yang sangat melimpah khususnya pada musim hujan	Akses jalan cukup memadai	-
31	Wisata Alam Puncak Bongki	Desa Tanah Towa, Kec. Kajang	Daya Tarik yang dimiliki kawasan ini yaitu dari atas puncak dapat dinikmati pemandangan alam kawasan wisata adat ammatowa yang cukup mempesona, selain itu diatas puncak terdapat pepohonan dengan ukuran besar yang menambah	Tempat berswapoto	Pokdarwis

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
			kealamian wisata tersebut.		
32	Wisata Alam Puncak Kampoeng Kajang	Desa Pattiroang, Kec. Kajang	Daya Tarik yang dimiliki kawasan ini yaitu dari atas puncak dapat dinikmati pemandangan alam kawasan pegunungan yang cukup mempesona, selain itu diatas puncak terdapat pepohonan dengan ukuran besar yang menambah kealamian wisata tersebut.	Akses jalan kurang memadai	Komunitas
33	Puncak Karangpuang	Desa Barugae, Kec. Bulukumpa	Daya tarik wisata pada destinasi ini adalah terdapat makam yang dikeramatkan dan slelau dikunjungi oleh wisatawan yang akan berziarah yang berada dia atas puncak	Akses jalan sangat baik	Komunitas
34	Wisata Arung Jeram	Desa Sapobonto, Kec. Bulukumpa	Arena olah raga / wisata alam arung jeram Sungai Balantieng,(Panjang arus 5 km)	Akses jalan kurang memadai	-
35	Wisata Arung Jeram	Desa Bonto Manai, Kec. Rilauale	Merupakan area sungai yang memiliki debit air yang cukup deras khusunya di musim hujan	Akses jalan kurang memadai	-
36	Permandian Alam Seppenge	Desa Bontomate'ne, Kec. Rilauale	Daya tarik sungai yang jernih disertai dengan pepohanan yang rindang disekitar sungai	Akses jalan	Desa
37	Permandian Alam Bombang Tellue	Kec. Rilauale	Permandian alam dengan panorama alam yang indah	Tempat swapoto	-
38	Permandian Alam Limbua	Kel. Eka Tiro Kec Bonto Tiro	Permandian Limbua merupakan permandian air tawar yang menyatu dengan laut dan hanya dipisahkan oleh pohon kelapa. Air tawar di permandian itu larut bersama dengan air laut, sehingga warga mempercayai kolam tersebut dapat menyembuhkan penyakit	WC umum, area parkir, ruang ganti, sanitasi	Swasta

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
39	Air Terjun Baruttung Lembanna	Kecamatan Kajang	Merupakan air terjun yang membutuhkan waktu sekitar ±1,5 jam dari kota Bulukumba	Fasilitas jalan belum memadai	-
40	Kebun Bersama	Desa Bonto Sunggu Kec. Gantarang	Merupakan destinasi wisata di aliran sungai sehingga pengunjung akan dimanjakan dengan suara air sungai dan merupakan kebun semi modern yang dikelola komunitas pemuda setempat yang dapat dijadikan sebagai wisata alternatif yang konsen pada edukasi tentang lingkungan	Mushalla, WC umum	Swasta
41	Waterpark Milano	Desa Pallangisang Kec. Ujungloe	sebuah destinasi wisata baru di Kabupaten Bulukumba yang namanya terinspirasi oleh klub sepakbola ternama Inter Milan. sebagai tempat berwisata alam yang menawarkan ketenangan dan kesejukan alam yang menyediakan kolam renang untuk orang dewasa maupun anak-anak	Spot photo	Swasta
42	Sungai Dampang Kayu	Desa Tammatto, Kec. Ujungloe	Merupakan destinasi wisata yang berada di pinggir sungai yang menyediakan gazebo untuk pengunjung yang dikelilingi oleh pepohonan	Akses jalan cukup memadai	Pokdarwis
43	Lego-lego Sarrea	Desa Kahayya, Kecamatan Kindang	Salah satu camping site yang ada di Kabupaten Bulukumba dengan view alam pegunungan hingga sungai yang jernih.	Tenda Camping, Musolah, lampu penerangan, Gazebo, Kios, Tempat sampah,	Swasta
44	Air Terjun Tanete Lappang	Kindang	Air terjun dengan pemandangan alam yang masih asri	-	-
45	Tebing Passohara	Desa Ara, Kec. Bonto Bahari	Salah satu daya tarik wisata alam yang menyuguhkan keindahan tebing	Akses jalan memadai	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bulukumba Tahun 2025

Destinasi wisata alam di Bulukumba tidak hanya menawarkan panorama yang indah, tetapi juga mengandung nilai sejarah, religi, hingga edukasi lingkungan. Namun, aspek sarana dan fasilitas belum sepenuhnya merata. Sebagian besar destinasi wisata hanya memiliki fasilitas dasar seperti akses

jalan atau spot foto, sementara beberapa destinasi unggulan seperti Air Terjun Bravo 45, Danau Lurayya, dan Telaga Ere Manerang telah dilengkapi fasilitas lebih memadai. Pengelolaan destinasi pun masih beragam; ada yang dikelola oleh pemerintah, desa, pokdarwis, komunitas, maupun pihak swasta. Hal ini menunjukkan bahwa peran multipihak telah berjalan, namun tingkat profesionalisme dan kesinambungan pengelolaan masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, pengembangan wisata alam Bulukumba perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, pemeliharaan lingkungan, serta sinergi antarpengelola untuk menciptakan daya saing destinasi secara berkelanjutan.

b) Wisata Bahari

Wisata bahari adalah jenis pariwisata yang memanfaatkan potensi kelautan dan pesisir, seperti pantai, laut, terumbu karang, pulau, dan kekayaan biota laut, untuk kegiatan rekreasi, edukasi, maupun konservasi. Kabupaten Bulukumba memiliki 37 destinasi wisata bahari yang meliputi pantai, hutan manggrove, tebing karang tepi laut, dan wisata bawah laut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-64
Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
1	Pantai Merpati	Kel. Terang-terang, Kec. Ujung Bulu	Pantai yang berada di kawasan perkotaan Kab. Bulukumba, dimana sangat terkenal dengan kegiatan malamnya sebagai tempat hiburan muda-mudi serta tersedianya fasilitas seperti panggung hiburan sebagai tempat pergelaran musik.	Memiliki fasilitas lengkap seperti WC umum, sanitasi, ramah anak dan ramah disabilitas	Pemerintah
2	Pantai Lembang	Dusun Lembang, Desa Salemba, Kec. Ujungloe	Memiliki daya tarik serta pada bagian dinding sungai terdapat rembesan air sungai yang ada disebelahnya,sehingga Nampak seperti air terjun yang berjejer sepanjang 30 meter.	Jembatan penyeberangan	Bumdes
3	Pantai Babana	Kel. Dannuang, Kec. Ujungloe	Memiliki daya tarik pantai dan disekitarnya terdapat perkampungan nelayan	Akses jalan	-
4	Pantai Paranyalling	Kel. Dannuang, Kec. Ujungloe	Di tempat ini banyak dijumpai proses pengeringan ikan yang dilakukan oleh nelayan setempat	Akses jalan	-

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
5	Pantai Pussahelu	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai pasir putih nan lembut berpadu dengan gradasi air laut yang berwarna biru hingga hijau tosca mampu menghipnotis siapapun yang memandangnya. Akses untuk menuju kepantai bara ini bisa memakai kapal nelayan dari pantai tanjung Bira atau melalui jalan setapak di darat.	area parkir	-
6	Pantai Bara	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai pasir putih nan lembut berpadu dengan gradasi air laut yang berwarna biru hingga hijau tosca mampu menghipnotis siapapun yang memandangnya. Akses untuk menuju kepantai bara ini bisa memakai kapal nelayan dari pantai tanjung Bira atau melalui jalan setapak di darat.	area parkir, hotel/penginapan, wc umum, UMKM, banana boat, area camping, gazebo, jaringan air bersih	Pemerintah
7	Pantai Bira	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pasir putih yang terhampar luas, air laut yang jernih serta pada bagian bibir pantai yang tersusun atas tebing-tebing batu karang yang cukup indah. Ada banyak hal yang dapat pengunjung lakukan di kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, salah satunya yaitu snorkeling maupun diving sembari menikmati keindahan bawah lautnya di beberapa spot yang ada di pantai ini.	Bank, akses jalan memadai, lapangan, UMKM, jaringan air bersih, hotel/penginapan, restorant, aliran listrik, wifi, Gazebo, faskes, dan fasilitas pendukung lainnya	Pemerintah
8	Titik Nol	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai yang berada diatas tebing dan berada di titik Nol Provinsi Sulawesi Selatan, adapaun keunikan yang dimiliki yaitu terdapat potensi karang, terdapat beberapa gua, dan wisatawan juga dapat menikmati sunset dan sunrise.	Wc umum, tempat swafoto, UMKM, Area parkir	Pemerintah
9	Pulau Kambing	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Keindahan alam yang dimiliki seperti pepohonan yang cukup lebat, serta tebing yang merupakan bibirpulau yang tersusun atas batu karang.	Akses jalan melalui transportasi laut	-

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
10	Pulau Liukang Loe	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Pasir putih yang terhampar luas serta terdapat terumbu karang, selain pulau liukang loe cukup berkembang ini ditandai dengan terdapatnya berbagai fasilitas dan utilitas, salah satu diantara terdapat dermaga kayu dengan Panjang 85 m sebagai tempat tambatan perahu yang terdapat pada bagian selatan pulau.	Memiliki tempat umum seperti sarana ibadah, sekolah, faskes, jaringan air bersih dll	Swasta
11	Pantai Batu Babang	Pulau Liukang Loe, Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Pantai ini masih sangat alami dengan pemandangan yang sangat indah	Akses jalan melalui transportasi laut	-
12	Pantai Panrang Luhu	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Daya Tarik pantai berupa pasir putih yang terhampar luas, perkebunan kelapa yang berada di sepanjang bibir pantai dan terdapat pemikiman nelayan yang menyediakan fasilitas kapal bagi wisatawan yang ingin memancing ikan, di pantai ini juga kitadapat menyaksikan proses pembuatan kain tenun khas Bira dengan cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat.	Gazebo, penginapan, sarana kebersihan, jaringan air bersih	Swasta
13	Pantai Kapu	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Daya Tarik pantai berupa pasir putih yang terhampar luas, perkebunan kelapa yang berada di sepanjang bibir pantai dan terdapat pemikiman nelayan yang menyediakan fasilitas kapal bagi wisatawan yang ingin memancing ikan	Akses jalan kurang memadai	-
14	Pantai Balabalayya	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Daya tarik pantai yang terhampar luas dengan panorama alam yang masih asri	Akses jalan kurang memadai	-
15	Pantai Tanjung Solorang	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Pantai dengan daya tarik tebing yang terhampar luas yang dilengkapi dengan spot foto yang instagrammable	tempat swafoto, WC umum	Swasta
16	Pantai Marumasa	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Keindahan alam sekita pantai yang masih alami, pasir putih serta di kawasan ini pula terdapat tempat berswaphoto	UMKM, Tempat swafoto, aliran listrik	Swasta

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
17	Tanjung Tonggoiyya	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Daya tarik dari destinasi ini adalah pemandangan pantai yang tidak memiliki bibir pantai akan tetapi dikelilingi oleh tanaman hijau	Akses jalan kurang memadai	Swasta
18	Tebing Pantai Tahiyoiyya	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Tempat ini salah satu dari objek wisata karena alam yang ada di tebing Tahiyoiyya adalah tebing karang tepi laut dengan pemandangan alam yang eksotis.	Akses jalan kurang memadai	Swasta
19	Pantai Panaikang Birayya	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Obyek wisata yang dibangun dan dikelola secara pribadi, disana sangat banyak spot foto dengan latar yang mengesankan yang dihiasi dengan latar akan indahnya pemandangan laut, walaupun tergolong obyek wisata baru pengungjung yang datang di sana banyak, tidak hanya dari wisatawan lokal, wisatawan dari mancanegara pun selalu ada menikmati keindahan di sana.	penginapan, tempat swaforo, gazebo, dan area parkir, P3K	Swasta
20	Pantai Ere la'bayya	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai pasir putih dan terdapat pemukiman nelayan	Akses jalan cukup memadai	-
21	Pantai Kasuso	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai pasir putih dan terdapat pemukiman nelayan, adapun keunikan yang dimiliki yaitu terdapat batu yang berdiri tegak ditengah air yang jaraknya tidak jauh dari bibir pantai kasuso	Spot photo	Swasta
22	Pantai Solleng	Desa Ara, Kec. Bonto Bahari	Daya Tarik yang dimiliki yaitu bagian pantai yang terletak di tepi tebing curam, ditambah lagi dengan deburan ombak dan hempasan angin laut yang membuatnya semakin menegangkan. (tebing karts tepi laut dengan pemandangan yang eksotis)	Akses jalan cukup memadai	-

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
23	Pantai (Tebing) Apparalang	Desa Ara, Kec. Bonto Bahari	Tebing Apparalang dalam Bahasa Konjo terdiri dari dua suku kata yaitu appa dan ralang. Appa memiliki makna ujung dan ralang bermakna curam. Sesuai namanya tebing dikelilingi tebing-tebing yang curam. Tebing Apparalang merupakan destinasi yang sesuai untuk diabadikan dalam perjalanan travelling, ada sejumlah spot foto menawan yang juga dapat dinikmati sebagai aktifitas wisata di tempat ini	UMKM, Mushola, Gazebo, tempat swafoto, WC umum, area parkir, fasilitas kebersihan	Yayasan
24	Pantai Mandala Ria	DesaAra - Lembanna, Kec. Bonto Bahari	Merupakan salah satu pantai yang terpanjang di Kab. Bulukumba dengan pasang pantai -+ 800 M. kawasan pantai yang memiliki daya Tarik yang dapat dinikmati dikawasan ini adalah berupa keindahan pantai pasirputih, serta keindahan alam disekitar kawasan yang masih alami.	Tempat swafoto, WC umum, penginapan, area parkir, fasilitas kebersihan, jaringan air bersih	Pokdarwis
25	Pantai Batu Tongkarayya	Desa Lembanna, Kec. Bonto Bahari	Merupakan salah satu pantai yang terpanjang di Kab. Bulukumba dengan pasang pantai -+ 800 M. kawasan pantai yang memiliki daya Tarik yang dapat dinikmati dikawasan ini adalah berupa keindahan pantai pasirputih, serta keindahan alam disekitar kawasan yang masih alami.	Akses jalan, spot photo	Pokdarwis
26	Pantai Lemo – lemo	Kel. Tana Lemo, Kec. Bonto Bahari	Keindahan pantai, keindahan alam sekitar Kawasan yang masih alami serta hamparan pasirputih yang begitu indah. Disekitar Kawasan pantai terdapat hutan lindung (cagar alam).	Tempat swafoto, area parkir, WC umum	Komunitas
27	Pantai Samboang	Kel. Ekatiro, Kec. Bonto Tiro	Pantai dengan panorama alama yang permai, pasirputih, panorama gugusan bukit disisi kiri kanan pantai, serta barisan pohon kelapa yang melambai.	UMKM, jaringan Listrik, jaringan air bersih	Pemerintah

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
28	Pantai Ujung Tiro	Kel. Ekatiro, Kec. Bonto Tiro	Kondisi pantai ujung tiro agak mirip dengan pantai Apparalang yaitu pantai karang, sepanjang garis pantainya laut langsung berbatasan dengan tebing karang sehingga taka da garis pantai yang berupa pasir seperti pantai Samboang atau pantai lainnya yang ada di Kab. Bulukumba	Tempat swapoto	Pemerintah
29	Pantai Bajange	Desa Gunturu, Kec. Herlang	Pantai dengan panorama alam yang permai, serta barisan pohon kelapa yang melambai. Ditempat ini juga dapat dijumpai tempat pelelangan ikan	Akses jalan kurang memadai	Pemerintah
30	Pantai Tambung Palayya	Desa Gunturu, Kec. Herlang	Pantai dengan panorama alam yang permai, serta barisan pohon kelapa yang melambai.	Akses jalan kurang memadai	-
31	Pantai Turungan beru	Kel. Bonto Kamase, Kec. Herlang	Pantai ini dijadikan sebagai tempat pendaratan ikan oleh nelayan dan menjadi tempat transaksi penjualan ikan	Akses jalan cukup memadai	-
32	Pantai Lolisang (Tanjung Cinta)	Desa Lolisang, Kec. Kajang	Pantai yang memiliki keunikan dan daya Tarik yang cukup menarik salah satunya bagian pantai tersebut terdapat pantai yang cukup indah yang dikelilingi oleh pohon nyiur yang menambah nilai natural kawasan tersebut.	Tempat swafoto	Pemerintah
33	Pantai Batunggulung	Desa Pantama, Kec Kajang	Pantai yang memiliki keindahan pasir putih yang bersih dan pepohanan kelapa disekitar pantai. Selain ini ditempat ini terdapat dermaga untuk menautkan perahu dan dijadikan tempat lompatan untuk berenang	Akses jalan	Desa
34	Pantai Lembang Keke	Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang	Pantai dengan panorama alam yang permai, serta barisan pohon kelapa yang melambai.	Akses jalan memadai	-
35	Wisata Bawah Laut Ruku-Ruku	Desa Bira Kecamatan Bonto Bahari	Pemandangan bawah laut yang sangat indah yang menakjubkan atau biasa disebut surga bawah laut Bira	Spot foto	-

No.	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
36	Pelabuhan Leppe'e	Kel. Ela - Ela Kecamatan Ujung Bulu	Merupakan pelabuhan penyeberangan yang biasa jg digunakan sebagai pelabuhan antar pulau. Pelabuhan ini	Dermaga, lapangan parkir	Pemerintah
37	Pantai Laikang	Kecamatan Kajang	Pantai ini dijadikan sebagai tempat pendaratan ikan oleh nelayan dan menjadi tempat transaksi penjualan ikan	Akses jalan kurang memadai	Swasta

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bulukumba Tahun 2025

Beberapa destinasi telah berkembang pesat dan dikenal luas, seperti Pantai Bira, Pantai Bara, Pulau Liukang Loe, dan Tebing Apparalang, yang dilengkapi sarana prasarana lengkap serta dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun, masih terdapat banyak destinasi lain yang belum didukung dengan infrastruktur memadai, seperti akses jalan, sanitasi, dan fasilitas pendukung wisata. Pola pengelolaan juga bervariasi, melibatkan pemerintah, desa, bumdes, pokdarwis, komunitas, hingga pihak swasta, yang menunjukkan adanya partisipasi multipihak dalam mengelola potensi bahari. Keanekaragaman daya tarik wisata bahari Bulukumba memperlihatkan kekuatan besar untuk pengembangan pariwisata pesisir terpadu, namun disparitas fasilitas dan pengelolaan menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang berkelanjutan harus mengedepankan peningkatan aksesibilitas, penguatan kelembagaan pengelola, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

c) Wisata Buatan

Wisata buatan adalah jenis pariwisata yang mengandalkan objek dan daya tarik yang diciptakan oleh manusia, baik berupa taman hiburan, wahana rekreasi, monumen, museum, maupun infrastruktur lainnya yang dirancang untuk tujuan wisata. Kabupaten Bulukumba memiliki 30 destinasi wisata buatan yang meliputi perkebunan, permandian, taman, dan kawasan agrowisata sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-65
Daya Tarik Wisata Buatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Daya Tarik wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
1	Bulu Padido	Desa Tammatto, Kec. Ujungloe	Letaknya berada di wilayah perbukitan yang dapat disaksikan dari sudut 160°. Selain panorama yang indah, obyek wisata ini dilengkapi dengan rumah pohon, flying fox, kolam renang serta tempat khusus untuk camping.	Kolam renang, gazebo, UMKM, home stay, area parkir, aliran listrik, wc umum, sewa tenda, sepeda gantung, Flying fox, tempat Swafoto	Pokdarwis

No	Nama Daya Tarik wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
2	Perkebunan Karet	Bulukumpa, Kajang, Ujungloe	Tempat ini merupakan kawasan wisata agro yang menyebar di dua tempat yakni Pallangisang Estate dan Ballombassie Estate. Pada awalnya area ini merupakan area perkebunan serei dan diganti menjadi perkebunan kopi dan terakhir perkebunan karet.	Jaringan air bersih, sanitasi, ramah anak dan ramah disabilitas	Swasta
3	Permandian Waena Hongkong	Desa Kambuno Kec. Bulukumpa	Merupakan area kolam renang yang berasal dari mata air alami	UMKM, WC umum, ruang ganti, air bersih, dan area parkir	Swasta
4	Permandian alam bangkeng-bangkeng	Desa Balantaroang Kec. Bulukumpa	Merupakan permandian alam berupa kolam yang disekitarnya dipenuhi dengan pepohonan dengan mata air berasal dari pegunungan	WC umum, air bersih	-
5	Permandian Borong Kaluku	Desa Bontotangnga, Kec Bonto Tiro	Wahana kolam renang dan permandian buatan	WC umum dan area parkir	Swasta
6	Kawasan Tambak Ikan	Kec. Ujungloe, Kec. Gantarang	Tambak udang dan ikan bandeng yang membentang luas	Akses jalan memadai	Swasta
7	Permandian Lembah Biru	Desa PalambaraE, Kec. Gantarang	Merupakan destinasi wisata buatan berupa permandian dengan berbagai Wahana kolam renang dan permandian buatan	WC umum, UMKM, area parkir, jairngan air bersih	Swasta
8	Lapangan pemuda	Kel. Loka, Kec. Uung Bulu	Menjadi salah satu pusat kegiatan di pusat kota Bulukumba dan menjadi ikon Bulukumba yang dikelilingi oleh UMKM kuliner	UMKM, area jogging, fasilitas keamanan, ramah anak dan difabel, fasilitas kebersihan	Pemerintah
9	Pinisi Park	Kelurahan Bentenge, Kec. Ujung Bulu	Menjadi salah satu pusat kegiatan di pusat kota Bulukumba yang dikelilingi oleh UMKM kuliner	UMKM, area parkir, Gazebo, Wifi, ramah anak dan difabel, fasilitas kebersihan	Pemerintah
10	Taman Cekkeng	Kelurahan Ela-Ela, Kec. Ujung Bulu	Tempat santai sore hari dengan pemandangan pepohonan dan area bermain anak	Gazebo, WC umum. Pos jaga keamanan, jaringan air bersih, kolam, ramah anak dan difabel, fasilitas kebersihan	Pemerintah
11	Cekkeng Nursery	Kelurahan Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu	Tempat santai sore hari dengan pemandangan pepohonan dan area bermain anak	UMKM, area bermain anak, perpustakaan, taman jaga, jogging track, fasilitas	Pemerintah

No	Nama Daya Tarik wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
				kebersihan, ramah anak dan difabel dan area parkir	
12	Islamic Center Dato Tiro	Kelurahan Bintarore, Kec. Ujung Bulu	Mesjid terbesar di Kab. Bulukumba yang menjadi simbol sejarah penyebaran agama islam oleh Dato Tiro	UMKM, area parkir, WC umum, fasilitas kebersihan dan keamanan	Pemerintah
13	Taman Kota Pasar Tua	Kelurahan Loka, Kec. Ujung Bulu	Merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat Kab. Bulukumba yang juga digunakan sebagai sentra kuliner khususnya pada bulan ramadhan	tempat duduk, lampu taman, area parkir, pos jaga, WC umum, faskes, fasilitas kebersihan	Pemerintah
14	Hutan Kota Bulukumba	Kel. Terang - terang, Kec. Uung Bulu	Tempat santai sore hari dengan pemandangan pepohonan dan area bermain anak	tempat duduk, lampu taman, area parkir, pos jaga, WC umum, fasilitas kebersihan	Pemerintah
15	Permandian Korner	Tanete Kec. Bulukumpa	Merupakan kolam renang buatan yang mata airnya berasal dari pegunungan	WC umum, area parkir	Swasta
16	Permandian Wae Tuoe	Tanete Kec. Bulukumpa	Merupakan kolam renang buatan yang mata airnya berasal dari pegunungan	area parkir	Swasta
17	Permandian Jo'jolo	Desa Jojjolo, Kec. Bulukumpa	Merupakan kolam renang buatan yang mata airnya berasal dari pegunungan dan masih aktif dkunjungi wisatawan	WC umum, area parkir	Swasta
18	Permandian Mallenreng	Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa	Merupakan permandian alam	-	Swasta
19	Kawasan Agrowisata	Bulu Lohe, Kec. Rilauale	Merupakan Perkebunan karet dan buah	Fasilitas kebersihan	Swasta
20	Kawasan Agrowisata	Bonto Manai, Kec. Rilauale	Merupakan Perkebunan karet dan buah	Fasilitas kebersihan	Swasta
21	Kawasan Agrowisata	Salassae, Kecamatan Bulukumpa	Merupakan Perkebunan karet dan buah	Fasilitas kebersihan	Swasta
22	Kawasan Pembuatan Perahu Pinisi	Kel. Tanah Lemo, Kec. Bonto Bahari	Pembuatan perahu tradisional pinisi yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang dengan luas kawasan ± 5 km2	WC umum, UMKM, area parkir, jaringan air bersih	Swasta
23	Cafe Sawah 2	Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang	Salah satu obyek wisata yang dibuat oleh anak muda di Desa tersebut dengan ide dan kreativitas sehingga menghasilkan sebuah obyek wisata buatan	WC umum dan area parkir	Swasta

No	Nama Daya Tarik wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
24	Kolam Wisata Daeng Malliongi	Kec. Bonto Bahari	Merupakan kolam renang buatan yang juga menyediakan tempat santai	Sarana air bersih dan akses jalan memadai	Swasta
25	Taman Kuliner	Desa Bialo, Kec. Gantarang	Merupakan salah satu spot kuliner yang berada di sepanjang sungai bialo. Tempat ini dimanfaatkan oleh pelaku UMKM setempat untuk berjualan	Booth makanan, spot photo	Pemerintah
26	Toddoppuli Greenland	Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu	Merupakan destinasi wisata baru yang menyuguhkan keindahan kolam buatan yang dapat digunakan untuk memancing. Selain itu juga tersedia rumah makan serta penginapan serta wahana tambahan seperti ATV dan bahwkan dijadikan sebagai arena pacuan kuda	Wahana bermain, restoran, WC umum	Swasta
27	Cafe Empang	Desa Sapiri Kec. Gantarang	Merupakan tempat bersantai yang berlokasi di tengah empang sehingga pengunjung dapat sekaligus memancing	WC umum	Swasta
28	Permandian Borkal	Jl. Poros Bonto Bahari - Kajang, Desa Bontotangnga, Kec. Bonto Tiro	Permandian Borkal tidak hanya menawarkan kolam renang untuk berenang. Kawasan ini juga menawarkan wisata garden tour dan food court, menghadirkan pengalaman liburan yang lengkap bagi pengunjung	Akses jalan memadai, toilet	Swasta
29	Permandian Jera Lompoa	Kec. Ujung Bulu	Merupakan kolam renang buatan	Akses jalan cukup memadai	Swasta
30	Permandian Lotong - lotong	Kelurahan Benjala, Bonto Bahari	Permandian alam dengan pemandangan sawah ksekelilingnya, memiliki kedalaman 2-3m bersumber dari mata air.	Penyewaan ban, tempat jual makanan dan minuman	Swasta

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bulukumba Tahun 2025

Keberagaman jenis wisata buatan ini menunjukkan adanya inovasi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan daya tarik wisata yang melengkapi potensi wisata alam dan bahari. Beberapa destinasi, seperti Bulu Padido, Islamic Center Dato Tiro, dan Kawasan Pembuatan Perahu Pinisi, tidak hanya memiliki nilai hiburan tetapi juga mengandung nilai edukasi, budaya, dan religi. Dari sisi fasilitas, sebagian besar destinasi wisata buatan telah memiliki sarana penunjang seperti kolam renang, gazebo, area parkir, UMKM, serta jaringan air bersih. Namun, sebagian lainnya masih terbatas pada fasilitas dasar dan dikelola secara sederhana, terutama destinasi yang dikelola oleh swasta skala kecil maupun komunitas lokal. Hal ini mengindikasikan adanya potensi besar pengembangan wisata buatan di Bulukumba, namun diperlukan

peningkatan kualitas fasilitas, promosi, serta pengelolaan yang lebih profesional agar dapat menarik wisatawan secara berkelanjutan.

d) Wisata Budaya dan Religi

Wisata budaya dan religi adalah jenis pariwisata yang berfokus pada pengenalan, pelestarian, dan pengalaman terhadap nilai-nilai budaya serta kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Kabupaten Bulukumba memiliki 28 destinasi wisata budaya dan religi yang meliputi cagar budaya, masjid, dan kegiatan budaya seperti pertenunan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel II-66
Daya Tarik Wisata Budaya dan Religi Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
1	Pasar Cekkeng	Kel. Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu	Pasar tradisional di tengah kota Bulukumba yang setiap hari dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan masyarakat	UMKM, area arkir	Pemerintah
2	Pertenunan Sutra Bira	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	Merupakan kawasan pembuatan kain sutera bira yang dibuat dengan alat tenun tradisional	Fasilitas kebersihan	Swasta
3	Makam Dato' Tiro	Kel. Eka Tiro, Bonto Tiro	Ziarah makam tokoh Islam, dipercaya memiliki kekuatan magis	wc umum, area parkir, fasilitas keamanan	Pemerintah
4	Makam Bakkatera'	Desa Ara. Bonto Bahari	Makam tokoh ini terletak di Desa Ara kecamatan Bonto Bahari dan berada ditengah perkebungnan masyarakat yang ada di Desa tersebut	Fasilitas jalan	Komunitas
5	Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia)	Kel. Eka Tiro, Bonto Tiro	Makam karaeng Ambibia terletak diatas puncak Ekatiro dan berada di tengah perkebunan jambu mente, dari atas puncak dapat dinikmati hamparan laun dan pulau Sembilan yang sangat indah.	Fasilitas jalan	Pemerintah
6	Makam Samparaja Karaeng Sapo Batu	Desa Tri Tiro, Bonto Tiro	Makam karaeng Sapo Batu yang berada diatas batu dan memiliki keunikan tersendiri yang letaknya berada di pesisir pantai sehingga apabila air pasang maka terlihat kuburan tersebut dikelilingi air laut.	Fasilitas jalan	Pokdarwis
7	Rumah adat Bola Lohea	Desa Lolisang, Kec. Kajang	Rumah Adat Bola Lohea merupkan salah satu objek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Bulukumba letaknya di desa Lolisang dan merupakan salah satu situs peninggalan sejarah masa lampau dan pusat	WC Umum, listrik, fasilitas kebersihan, dan keamanan	Pemerintah

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
			peninggalan benda sejarah serta tempat upacara adat.		
8	Kawasan Adat Ammatoa	Desa Tana Toa, Kec. Kajang	Kawasan wisata adat Ammatoa merupakan salah satu destinasi wisata suku kajang yang memiliki keunikan dengan mempertahankan tradisi leluhur. Dengan simbol warna hitam, bentuk rumah sangat unik karena menempatkan dapur di area depan rumah. Memasuki tempat ini diharuskan untuk tidak menggunakan alas kaki.	Tempat swafoto, WC Umum, Area Parkir, Sewa baju adat Kajang, fasilitas keamanan, dan kebersihan	Pemerintah
9	Pertenunan Tradisional Kajang	Kec. Kajang	Tempat ini merupakan kawasan pembuatan Kain hitam khas Kajang yang ditenun secara tradisional dan bahan yang alami	Fasilitas kebersihan	Swasta
10	Makam To Salamatta Rijalayya	Desa Tanah Jaya, Kec. Kajang	Merupakan Warisan cagar budaya	Fasilitas jalan	-
11	Pesanggrahan Tanete	Kel. Tanete, Kec. Bulukumpa	Merupakan bangunan warisan belanda dengan arsitektur unik yang masih dipertahankan	WC Umum, listrik, fasilitas kebersihan, dan keamanan	Pemerintah
12	Makam Raja-Raja dan Dewan Adat Kerajaan Bulukumpa di Bontolanggere	Kelurahan Balla Saraja, Kec. Bulukumpa	Merupakan Warisan cagar budaya	Fasilitas jalan	Komunitas
13	Kompleks Makam Lampe Uttu	Desa Salassae, Kec. Bulukumpa	Merupakan Warisan cagar budaya	Fasilitas kebersihan, sanitasi, fasilitas keamanan	Komunitas
14	Bola Kambarae (Saorajae) Tanete	Kelurahan Tanete, Kec. Bulukumpa	Salah satu wisata budaya yang ada di kelurahan tanete Kec. Bulukumba	Fasilitas kebersihan, sanitasi, fasilitas keamanan,	Komunitas
15	Kawasan Wisata Benteng Palioi	Desa Somba Palioi, Kec. Kindang	Merupakan Warisan cagar budaya yang masih bertahan hingga sekarang	Fasilitas kebersihan	Desa
16	Kompleks Makam Raja-Raja Gowa ri Campagayyya	Kec. Kindang	Warisan cagar budaya	Akses jalan cukup memadai	Komunitas

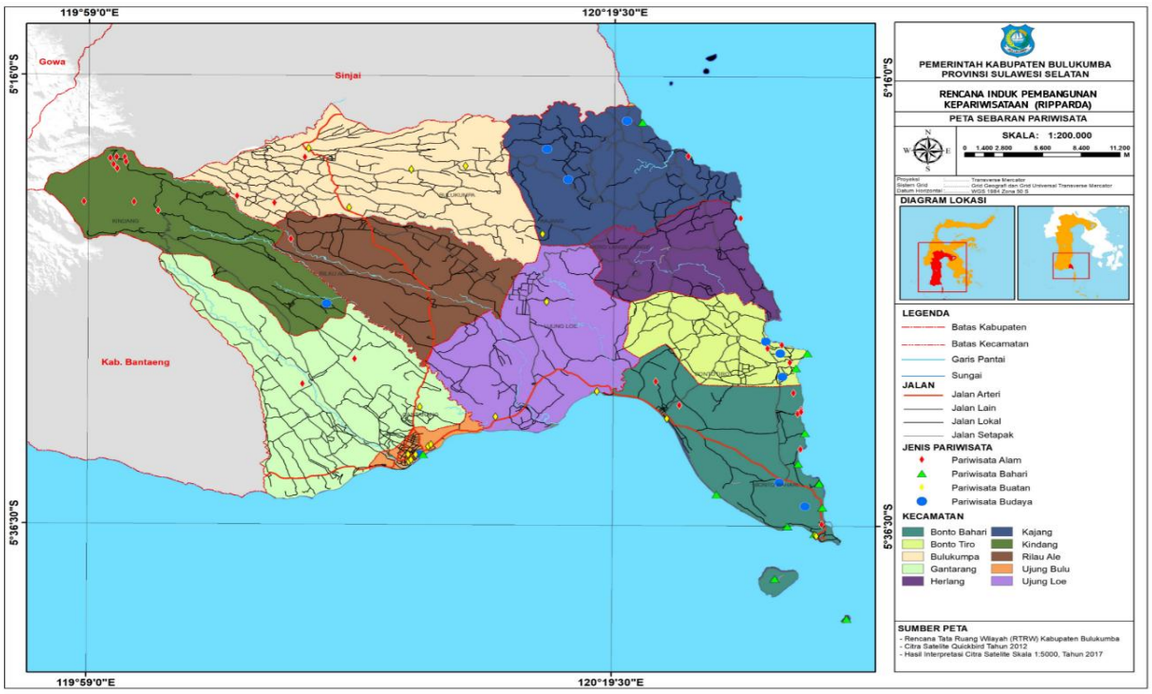
No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
17	Makam Parakkasi Dg. Maloga	Desa Gunturu, Kec. Herlang	Makam ini tipe susun timbun terdiri dri 11 lapisan. Ukuran makam tinggi 1,6 m. Makam ini adalah Raja Hero ke II yang dilantik sekitar abad ke 19 dan makam ini ditempatkan sebagai cagar budaya	Kawasan pemakaman	Komunitas
18	Makam Sultan Dg. Raja	Kelurahan Bintarore. Kec. Gantarang	Makam ini dijadikan sebagai sumber narasi tokoh sejarah serta literasi pengenalan ilmu pengetahuan juga dijadikan sebgaai obyek wisata Budaya yang ada di Kab. Bulukumba	Fasilitas kebersihan, sanitasi, fasilitas keamanan	Komunitas
19	Makam Tonrang Gowa	Desa Borong Loe, Kec. Gantarang	Merupakan Warisan cagar budaya	Akses jalan cukup memadai	Komunitas
20	Makam Petta Matinroe Ri Punranga di Torolia	Desa Bialo, Kec. Gantarang	Merupakan Warisan cagar budaya	Akses jalan cukup memadai	Pemerintah
21	Makam Raja Bone IX	Desa Dampang, Kec. Gantarang	Merupakan Warisan cagar budaya	Fasilitas kebersihan, sanitasi, fasilitas keamanan	Pemerintah
22	Makam Sombayya di Palioi	Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang	Makam ini memiliki nilai historis. Somba Palioi dulunya adalah Dusun dari Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang yang kini telah di mekarkan pada tahun 2012. Somba di maknai oleh warga Palioi sebagai “To Risompa” atau Sombayya yang berarti seorang Raja perempuan. Sementara Palioi adalah tempat pertemuan atau biasa di sebut “Toddao Pulinna Gowa, Toddo tallasa’na Bone”	WC umum, spot photo	Komunitas
23	Kompleks Makam Petta Matinroe ri Tasi’na Kasimpureng	Kelurahan Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu	Merupakan Warisan cagar budaya	Akses jalan cukup memadai	Komunitas
24	Makam Karaeng Hero	Desa Gunturu, Kec Herlang	Makam ini memiliki nilai historis tinggi. Kerajaan Hero adalah kerajaan di Sulawesi, Kab. Bulukumba, prov. Sulawesi Selatan. Karaeng Hero dan Langnge-langnge, penggabungan kedua nama menjadi asal	Akses jalan baik	Komunitas

No	Nama Daya Tarik Wisata (DTW)	Lokasi	Potensi Wisata	Sarana / Fasilitas	Pengelola
			muasalah Kerajaan Herlang. Abad ke-16		
25	Situs Pembuatan Perahu Pinisi	Desa Ara, Tanah Lemo, Darubiah, Lembanna, Kec. Bonto Bahari	Merupakan sebuah situs sejarah pembuatan perahu pinisi dari nenek moyang pembuat perahu yang dikenal dengan panrita	Akses jalan sangat baik, sarana ibadah, dan WC umum	-
26	Balla Paleha	Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe	Merupakan rumah adat Kec. Ujungloe yang memiliki nilai sejarah	Akses jalan memadai	Komunitas
27	Lappa Lipa	Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe	Merupakan destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan alam perbukitan	Akses jalan cukup memadai	Pemerintah
28	Situs Palantikan Batu Tujua (Saukang Batu Pitue)	Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa	salah satu cagar budaya yang ada di Desa Salassae yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama batu tujua atau Batu Pallantikang atau tujuh batu bersejarah, Batu Pallantikang merupakan salah satu saksi tautan penting perjalanan sejarah Bulukumba di ujung jazirah Sulawesi Selatan.	Akses jalan cukup memadai	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bulukumba Tahun 2025

Keberagaman destinasi wisata budaya dan religi memperlihatkan bahwa Bulukumba tidak hanya unggul dalam wisata alam dan bahari, tetapi juga memiliki kekayaan nilai budaya, religi, dan sejarah yang kuat. Beberapa destinasi, seperti Kawasan Adat Ammatoa, Situs Pembuatan Perahu Pinisi, dan Rumah Adat Bola Lohea, memiliki daya tarik unik dengan nilai warisan budaya yang diakui secara luas, bahkan pada level nasional maupun internasional. Dari sisi sarana, sebagian destinasi telah dilengkapi fasilitas dasar seperti jalan, sanitasi, dan area parkir, namun masih terdapat destinasi yang minim fasilitas, terutama yang dikelola komunitas atau belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pola pengelolaan juga bervariasi, melibatkan pemerintah, desa, komunitas lokal, pokdarwis, hingga swasta, yang mencerminkan adanya partisipasi multipihak. Meski demikian, variasi kualitas pengelolaan berimplikasi pada ketidakseragaman pelayanan dan daya tarik wisata. Oleh karena itu, pengembangan wisata budaya dan religi Bulukumba perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur, promosi terpadu, serta pelestarian nilai sejarah dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas daerah.

Gambar II-10
Peta Sebaran Daerah Wisata Kabupaten Bulukumba



Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bulukumba Tahun 2025

e) Industri Kreatif

Industri kreatif di Bulukumba menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ekonomi kreatif cukup beragam khususnya yang berbasis pada kearifan lokal, seperti pembuatan kapal tradisional Phinisi di kawasan Tanah Lemo, serta berbagai kerajinan tangan dan produk UMKM yang unik dan kaya nilai budaya.

Kawasan wisata bahari dan kawasan wisata budaya merupakan motor penggerak ekonomi kreatif di Bulukumba. Pada wisata bahari terlahir Pengrajin perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari, Mereka melestarikan kerajinan pembuatan kapal layar tradisional yang menjadi ikon budaya dan ekonomi daerah. Pada awalnya masih usaha perorangan dikelola secara turun-temurun oleh keluarga pengrajin dan saat ini sudah ada yang bertransformasi menjadi badan usaha. Pemerintah juga telah mengarahkan kawasan industri Phinisi sebagai kawasan strategis dengan tujuan menjaga kelestarian budaya sekaligus meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis kreativitas dan inovasi. Pembuatan kapal pinisi termasuk dalam kategori industri kreatif, dimana dalam pembuatannya menegaskan nilai kreativitas dan keunikan industri perahu pinisi, selain sebagai alat transportasi dan perikanan Kapal Pinisi juga berkembang sebagai produk wisata budaya dan kapal pesiar mewah yang merepresentasikan sistem pengetahuan yang kompleks, sarat dengan nilai simbolik, ritual, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun yang semakin menguatkan posisi pembuatan kapal ini sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis budaya dan pariwisata. Pembuatan kapal pinisi sudah mendapatkan pengakuan secara internasional oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017 sebagai Warisan Budaya Takbenda. Sebelumnya, warisan budaya ini telah ditetapkan secara nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 13 Desember 2013 melalui Surat Keputusan Nomor 238/M/2013, dengan klasifikasi dalam domain "Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta".

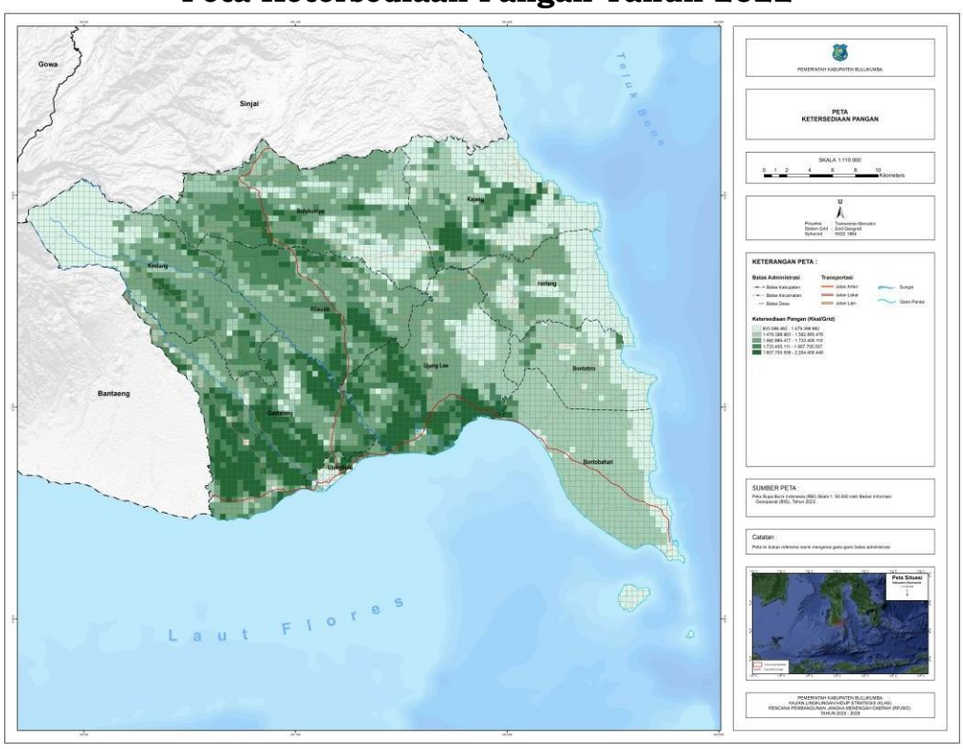
Selain Pinisi, berbagai kerajinan tangan juga sudah berkembang seperti pelaku usaha kerajinan tangan pengrajin Atap Konjo di Desa Tritiro yang memproduksi anyaman daun lontar yang menjadi tas dan produk kreatif lainnya. Atap Konjo juga dikenal sebagai produk kreatif yang telah meraih penghargaan di *Sulsel Craft Show*. Sedangkan Sarung Tenun Bira dan Sarung Tenun Kajang juga merupakan produk tekstil tradisional dari Bulukumba yang masuk kategori industri kreatif. Produk ini sebagai produk unggulan khas Bulukumba yang sering ditampilkan dalam berbagai event kerajinan. Sarung tenun ini memadukan kearifan lokal dalam motif dan teknik tenunya yang unik, menjadi salah satu produk budaya yang mendukung ekonomi kreatif daerah.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1 Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) adalah sejalan dengan jumlah sumber daya lingkungan yang tersedia dan berkebalikan dengan jumlah konsumsi penduduk. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan pada KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025–2029 dilakukan secara spasial menggunakan *grid* dengan resolusi 5”x5” (≈ 150 m x 150 m), sehingga pada setiap luasan area tersebut dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Gambar II-11
Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2022

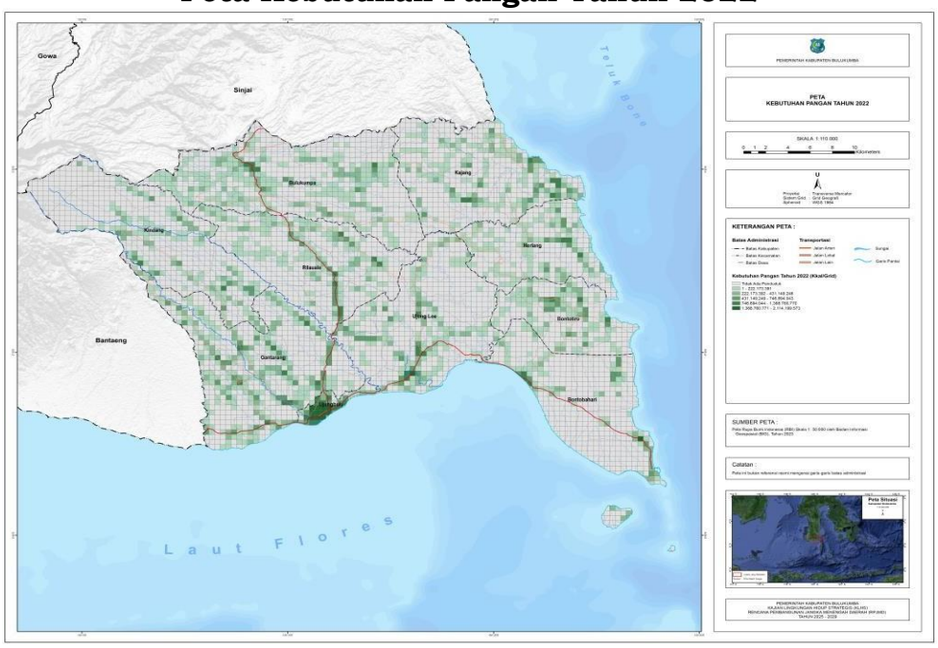


Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Bulukumba dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjutnya didistribusikan ke setiap

grid dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Beberapa kawasan memiliki nilai kebutuhan pangan bernilai nol karena tidak terdapat penduduk pada kawasan tersebut. Wilayah dengan nilai kebutuhan pangan tinggi di Kabupaten Bulukumba berada di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, dan Kecamatan Ujung Bulu.

Gambar II-12
Peta Kebutuhan Pangan Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian, yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari.

Gambar II-13
Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2022



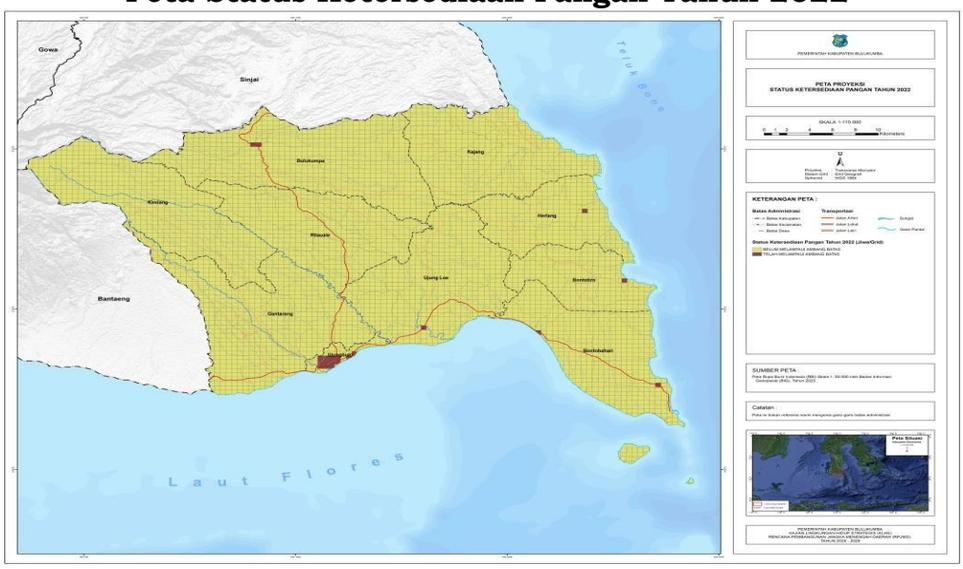
Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutnya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Bulukumba didominasi oleh selisih ketersediaan yang bernilai positif di setiap kecamatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Bulukumba masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun yang perlu

diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep *in situ*, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Bulukumba tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Penentuan nilai ambang batas dilakukan dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan energi bahan pangan. Hasil analisis menunjukkan jumlah penduduk yang penyediaan pangannya dapat didukung oleh Kabupaten Bulukumba. Sebagian besar Kabupaten Bulukumba memiliki nilai ambang batas yang tinggi mulai dari 135.204–1.728.464 Jiwa.

Gambar II-14
Peta Status Ketersediaan Pangan Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Tabel II-67
Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (kkal)	Selisih (kkal)	Ambang Batas (jiwa)
Bonto Bahari	30.632	885.581.591.574,56	24.038.462.064,04	861.543.129.510,52	1.099.166
Bonto Tiro	30.260	500.680.425.817,09	23.746.535.000,02	476.933.890.817,08	607.997
Bulukumpa	55.504	1.295.785.643.224,88	43.556.763.951,94	1.252.228.879.272,96	1.595.893
Gantarang	86.375	1.424.194.915.275,20	67.782.781.312,84	1.356.412.133.962,39	1.728.464
Herlang	30.196	600.466.676.898,83	23.696.311.157,60	576.770.365.741,19	735.351
Kajang	49.136	941.980.695.113,17	38.559.476.129,43	903.421.218.983,70	1.151.222
Kindang	33.928	1.091.811.962.769,68	26.624.998.000,04	1.065.186.964.769,58	1.357.358
Rilauale	44.320	1.024.521.159.544,17	34.780.119.991,93	989.741.039.562,37	1.261.218
Ujungloe	50.933	1.179.577.690.550,73	39.969.671.722,04	1.139.608.018.828,61	1.452.801
Ujung Bulu	50.055	135.983.159.635,41	39.280.661.261,53	96.702.498.373,86	135.204
Kabupaten Bulukumba	**461.339**	**9.080.583.920.413,71**	**362.035.780.591,40**	**8.718.548.139.822,26**	**11.124.674**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Tabel II-68
Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Pangan Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (kkal)	Selisih (kkal)	Ambang Batas (jiwa)
Bonto Bahari	32.700	885.581.591.574,56	25.661.325.068,35	859.920.266.506,22	1.097.434
Bonto Tiro	32.630	500.680.425.817,09	25.606.392.500,01	475.074.033.317,09	605.835
Bulukumpa	56.820	1.295.785.643.224,88	44.589.494.950,80	1.251.196.148.273,99	1.594.656
Gantarang	90.956	1.424.194.915.275,20	71.377.721.066,17	1.352.817.194.209,03	1.723.883

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal)	Kebutuhan Pangan Domestik (kkal)	Selisih (kkal)	Ambang Batas (jiwa)
Herlang	32.058	600.466.676.898,83	25.157.515.667,32	575.309.161.231,54	733.597
Kajang	49.699	941.980.695.113,17	39.001.290.380,91	902.979.404.732,31	1.150.659
Kindang	35.118	1.091.811.962.769,68	27.558.850.500,05	1.064.253.112.269,57	1.356.168
Rilauale	46.239	1.024.521.159.554,17	36.286.055.241,59	988.235.104.312,64	1.259.299
Ujungloe	54.494	1.179.577.690.550,73	42.764.166.470,07	1.136.813.524.080,63	1.449.401
Ujung Bulu	50.582	135.983.159.635,41	39.694.224.511,66	96.288.935.123,76	135.003
Kabupaten Bulukumba	**481.296**	**9.080.583.920.413,71**	**377.697.036.356,93**	**8.702.886.884.056,78**	**11.105.935**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

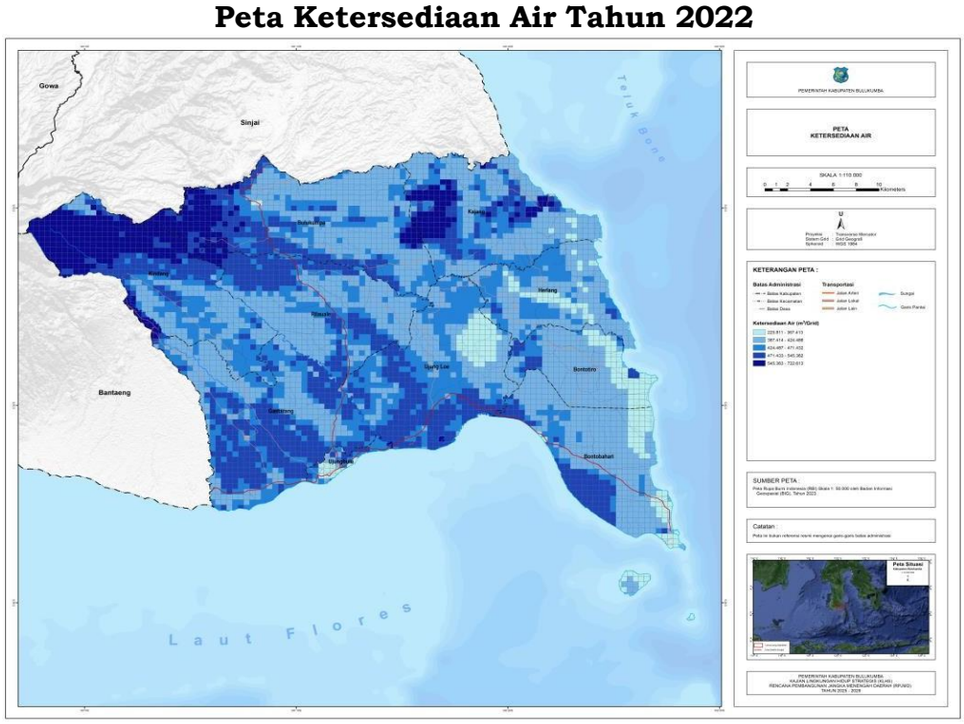
Status DDLH Penyedia Pangan di setiap grid ditentukan dengan membandingkan ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk di setiap grid. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut didefinisikan memiliki status DDLH Penyedia Pangan “Melampaui”; dan jika sebaliknya, jumlah penduduk lebih kecil daripada ambang batas penduduk, maka grid tersebut memiliki status DDLH Penyedia Pangan “Belum Melampaui.”

Terlihat total ketersediaan pangan Kabupaten Bulukumba sangat berlimpah sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan pangan penduduk. Adapun kecamatan dengan ketersediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Gantarang sebesar 1.424.194.915.275,20 kkal/tahun dengan nilai kebutuhan pangan hanya sebesar 67.782.781.312,84 kkal/tahun untuk tahun 2025, diperoleh selisih sebesar 1.356.412.133.962,39 kkal/tahun sehingga memiliki ambang batas 1.728.464 jiwa dengan status DDLH Penyedia Pangan dominan belum terlampaui.

2.1.1.3.2 Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air

DDLH Penyedia Air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersedian air, (ii) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH Penyedia Air di setiap *grid*. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem *grid* dengan resolusi 5”x5” (±150 m x 150 m).

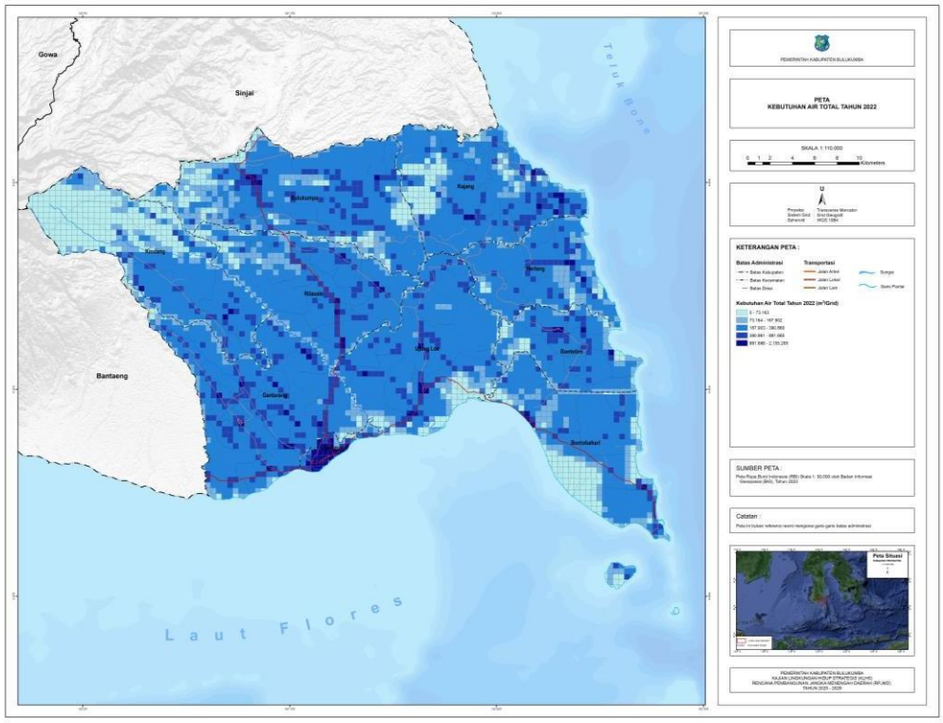
Gambar II-15
Peta Ketersediaan Air Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Total ketersediaan air Kabupaten Bulukumba bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023, kemudian dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Berdasarkan distribusi ketersediaan air, ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Bulukumpa, Gantarang, dan Kindang. Sementara ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Ujung Bulu.

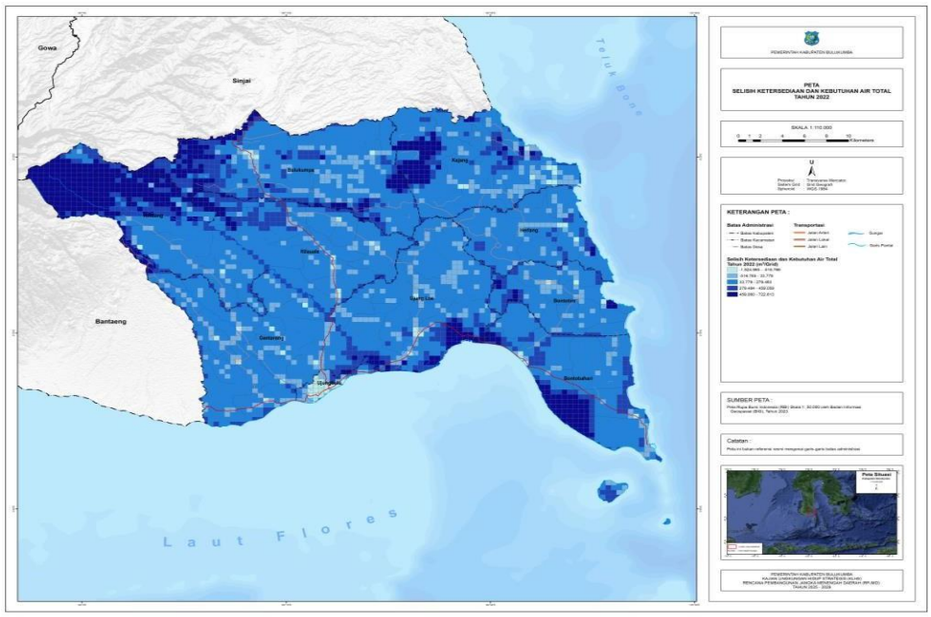
Gambar II-16
Peta Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 800 m^3/tahun.

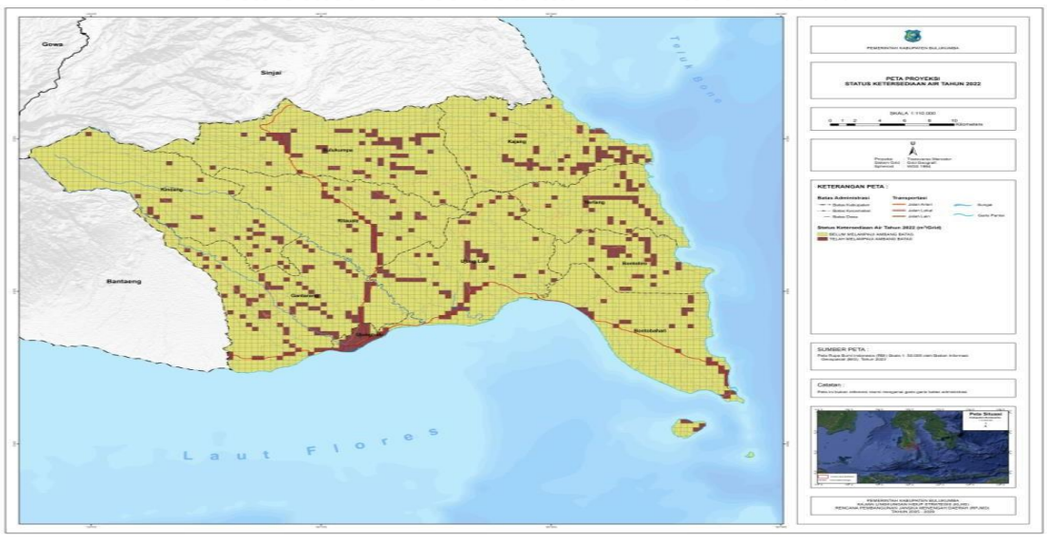
Gambar II-17
Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada DDLH bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

Gambar II-18
Peta Status Ketersediaan Air Tahun 2022



Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Tabel II-69
Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik (m^3)	Kebutuhan Air Lahan (m^3)	Selisih (m^3)	Ambang Batas (jiwa)
Bonto Bahari	30.632	240.880.258,63	24.505.600,07	93.080.348,13	147.799.910,50	196.866
Bonto Tiro	30.260	130.706.565,88	24.208.000,00	71.531.285,07	59.175.280,81	85.961
Bulukumpa	55.504	374.507.091,36	44.403.199,95	173.844.822,89	200.662.268,47	265.193
Gantarang	86.375	361.894.066,94	69.100.000,06	208.426.308,62	153.467.758,32	221.969

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik (m^3)	Kebutuhan Air Lahan (m^3)	Selisih (m^3)	Ambang Batas (jiwa)
Herlang	30.196	162.039.824,13	24.156.800,16	88.310.000,35	73.729.823,78	100.589
Kajang	49.136	268.546.784,80	39.308.800,13	140.732.185,28	127.814.599,53	179.192
Kindang	33.928	339.803.145,13	27.142.400,00	91.448.427,46	248.354.717,66	318.312
Rilauale	44.320	268.577.877,89	35.455.999,99	132.412.059,12	136.165.818,77	182.788
Ujungloe	50.933	301.696.723,93	40.746.399,97	172.115.726,26	129.580.997,67	180.584
Ujung Bulu	50.055	35.831.606,36	40.044.000,01	44.651.920,54	-8.820.314,18	23.373
Kabupaten Bulukumba	**461.339**	**2.484.483.945,05**	**369.071.200,35**	**1.216.553.083,71**	**1.267.930.861,33**	**1.754.827**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Tabel II-70
Distribusi Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air Domestik (m^3)	Kebutuhan Air Lahan (m^3)	Selisih (m^3)	Ambang Batas (jiwa)
Bonto Bahari	32.700	240.880.258,63	26.160.000,07	94.734.748,13	146.145.510,50	196.375
Bonto Tiro	32.630	130.706.565,88	26.104.000,00	73.427.285,07	57.279.280,81	85.391
Bulukumpa	56.820	374.507.091,36	45.455.999,95	174.897.622,89	199.609.468,47	264.618
Gantarang	90.956	361.894.066,94	72.764.800,07	212.091.108,62	149.802.958,32	220.680
Herlang	32.058	162.039.824,13	25.646.400,17	89.799.600,63	72.240.223,77	99.829
Kajang	49.699	268.546.784,80	39.759.200,13	141.182.585,28	127.364.199,53	179.020
Kindang	35.118	339.803.145,13	28.094.400,00	92.400.427,46	247.402.717,66	317.777
Rilauale	46.239	268.577.877,89	36.991.199,99	133.947.259,12	134.630.618,77	182.026
Ujungloe	54.494	301.696.723,93	43.595.199,97	174.964.526,26	126.732.197,67	179.706
Ujung Bulu	50.582	35.831.606,36	40.465.600,01	45.073.520,54	-9.241.914,18	23.348
Kabupaten Bulukumba	**481.296**	**2.484.483.945,05**	**385.036.800,36**	**1.232.518.683,73**	**1.251.965.261,32**	**1.748.768**

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2024

Ambang batas penduduk yang telah dihitung selanjutnya dibandingkan dengan populasi penduduk di *grid* tersebut. Apabila jumlah penduduk lebih besar daripada ambang batas penduduk, maka *grid* tersebut didefinisikan memiliki status DDLH Penyedia Air "Melampaui", dan jika sebaliknya maka *grid* tersebut memiliki status DDLH Penyedia Air "Belum Melampaui".

Terlihat total ketersediaan air Kabupaten Bulukumba masih cukup berlimpah sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan air, domestik maupun lahan. Adapun kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Bulukumpa sebesar 374.507.091,36 m^3/tahun dengan nilai kebutuhan air total (domestik dan lahan) sebesar 220.353.622,84 m^3/tahun untuk tahun 2025, sehingga diperoleh selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 199.609.468,47 m^3/tahun dengan ambang batas sebanyak 264.618 dengan status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

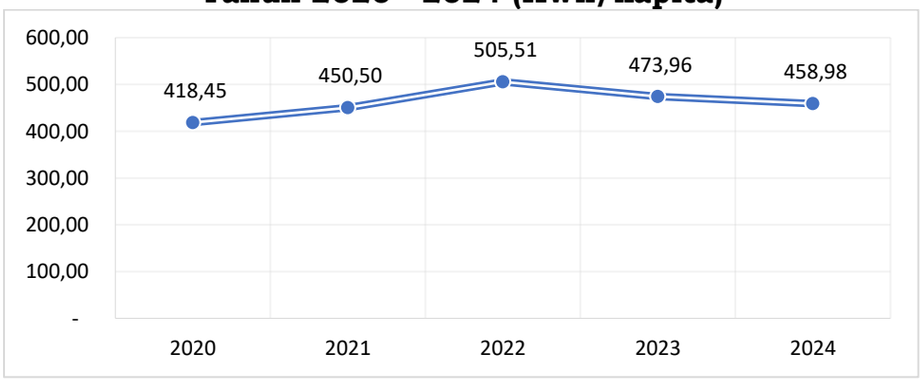
2.1.1.4.1 Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta potensi geografis. Ketahanan energi Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada indikator berikut:

Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan.

Grafik II-7
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024 (KWh/kapita)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2025

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2020—2024. Terdapat peningkatan konsumsi dari tahun 2020 sebesar 418,45 KWh/kapita menjadi 505,51 KWh/kapita pada 2022 dan kembali menurun ke 458,98 KWh/kapita tahun 2024. Jumlah pelanggan listrik di PLN UP3 Bulukumba tahun 2024 sebanyak 140.989 pelanggan (naik 5.792 pelanggan dibandingkan 2023) dengan jumlah listrik yang terjual sebanyak 220.618.659 KWh, dipakai sendiri 2.194.713,27 KWh dan susut/hilang sebanyak 16.494.792,22 KWh. Fluktuasi ini dapat mencerminkan berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan aktivitas ekonomi, efisiensi penggunaan energi, pengaruh kebijakan dan infrastruktur ketenagalistrikan. Meskipun terdapat peningkatan konsumsi dalam dua tahun awal, tren penurunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola konsumsi listrik dan efektivitas distribusinya.

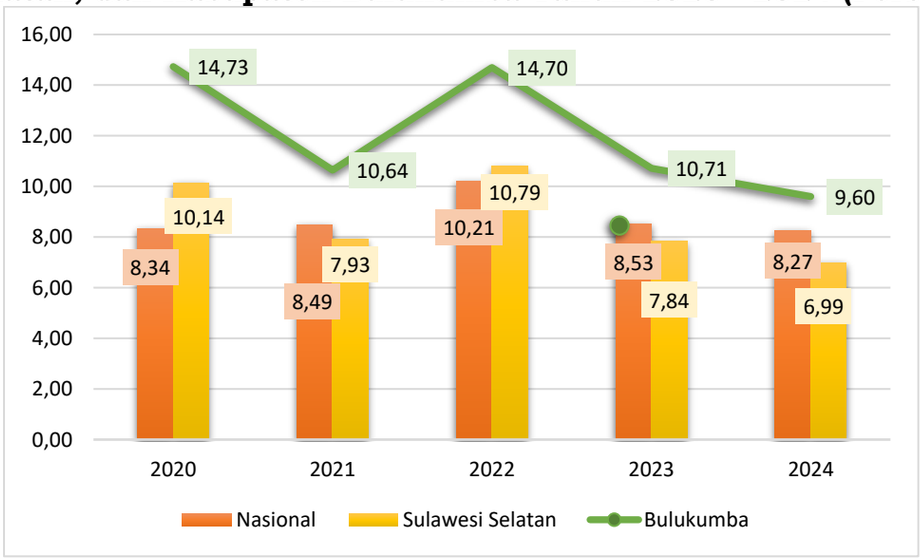
2.1.1.4.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan daerah merupakan kondisi suatu wilayah mampu memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh penduduknya. Hal ini bergantung pada faktor seperti produksi pertanian lokal, infrastruktur distribusi, kebijakan pemerintah, serta daya beli masyarakat. Ketahanan pangan daerah juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan.

a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Grafik II-8
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



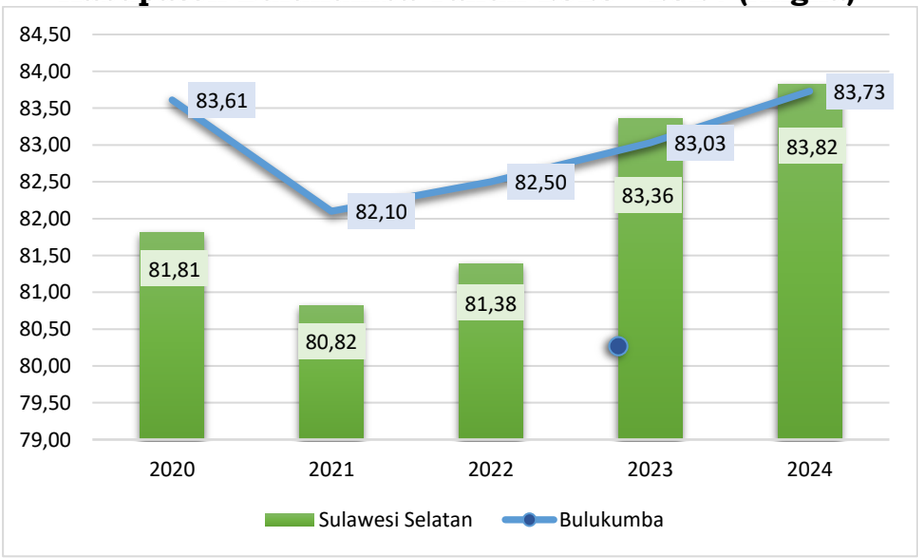
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

Berdasarkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Bulukumba, terdapat tren penurunan dari tahun 2020 sebesar 14,73 persen menjadi 9,60 persen tahun 2024 (turun sebesar 5,13 persen). Dari angka ini menunjukkan bahwa terdapat 9,60 persen penduduk di Kabupaten Bulukumba secara reguler mengkonsumsi makanan dengan jumlah energi yang kurang untuk menjalani hidup normal, aktif, dan sehat, angka yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan target nasional sebesar 5 persen, meskipun tingkat kemiskinan menurun dan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik hal ini belum sepenuhnya berimbas pada peningkatan akses dan konsumsi pangan bergizi bagi seluruh masyarakat. masih terdapat tantangan dalam hal distribusi, aksesibilitas, kualitas konsumsi, dan faktor kesehatan masyarakat yang perlu diatasi secara terpadu agar ketahanan pangan dapat meningkat secara signifikan.

b) Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan rumah tangga untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Secara umum, ketahanan pangan terdiri dari beberapa aspek utama yaitu ketersediaan pangan (jumlah pangan yang cukup tersedia di suatu wilayah), akses pangan (kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan secara fisik dan ekonomi), pemanfaatan pangan (penggunaan pangan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi), serta stabilitas ketiga aspek tersebut dari waktu ke waktu, dan biasanya diukur melalui indeks ketahanan pangan. Data Indeks ketahanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-9
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Bulukumba, 2025

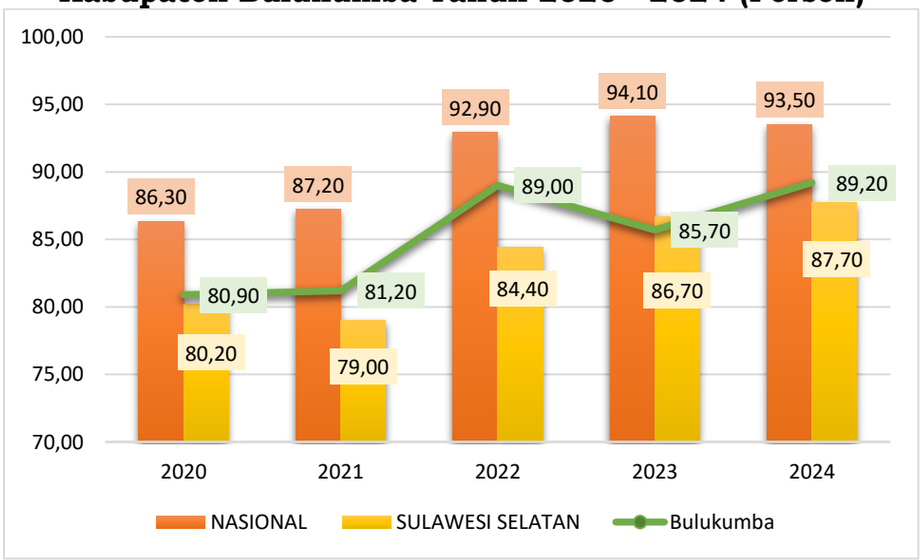
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Bulukumba menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu lima tahun terkahir, meskipun di tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, namun hal ini tidak signifikan penurunannya. Hal ini mencerminkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Bulukumba relatif stabil dan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan beberapa program prioritas khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai pilar utama ketahanan pangan lokal. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program, seperti penyediaan bibit unggul, pengembangan infrastruktur irigasi dengan teknologi beton pracetak, serta mendorong budaya menanam di lahan kosong dan pekarangan rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Selain itu, pemerintah kabupaten terus memperkuat koordinasi dengan desa-desa melalui rapat koordinasi ketahanan pangan yang melibatkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alokasi anggaran ketahanan pangan di tingkat desa minimal 20 persen, yang mencakup infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan, menjadi salah satu langkah nyata untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif di tingkat akar rumput. Bahkan hal ini yang seringkali disuarakan oleh Bapak Bupati sebagai kepala pemerintahan baik pada kegiatan formal dan informal tentang bagaimana budaya menanam semakin digiatkan baik dilingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun dilingkungan perkantoran.

c) Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di wilayah tertentu. Skor PPH yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan perkembangan Skor PPH Kabupaten Bulukumba selama tahun 2020—2024, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan kondisi awal. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, mencerminkan puncak keberhasilan dalam mendekati pola konsumsi ideal. Meskipun terjadi sedikit penurunan skor pada dua tahun terakhir, pencapaian tetap berada pada level yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses masyarakat terhadap pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman telah

mengalami perbaikan, namun tetap perlu dijaga dan ditingkatkan secara konsisten untuk mencapai kondisi yang lebih stabil dan optimal. Hal ini disebabkan oleh program pemerintah dalam diversifikasi pangan, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi, serta edukasi mengenai pola makan sehat. Namun, penurunan skor pada 2024 terjadi akibat faktor eksternal yaitu perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan, distribusi yang terganggu, dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan terhadap petani lokal, memperbaiki sistem distribusi pangan, serta terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi.

Grafik II-10
Skor Pola Pangan Harapan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.1.4.3 Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Ketahanan terhadap air tidak hanya terbatas pada air, namun dapat terjadi pada benda yang bergerak melalui cairan jenis apa pun. Ketahanan air terjadi karena adanya partikel-partikel di dalam air atau fluida, saat benda bergerak melewatinya ia bertabrakan dengan partikel yang mencoba memperlambatnya.

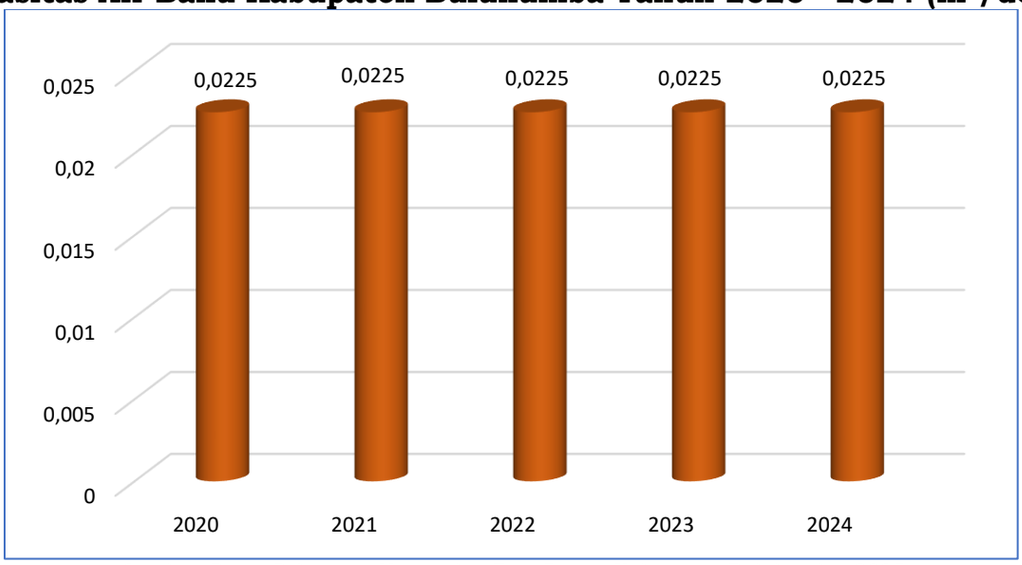
a) Kapasitas Air Baku

Air baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum, sedangkan air permukan adalah sumber air yang terdapat di permukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan, dan danau. Air permukaan merupakan sumber air yang terdapat pada permukaan bumi, contohnya sumber air permukaan adalah air sungai. Di daerah hulu, pemenuhan kebutuhan air secara kuantitas dan kualitas dapat disuplai oleh air sungai, tetapi di daerah hilir kebutuhan air tidak dapat disuplai lagi baik kuantitas maupun kualitas, hal tersebut karena kerusakan lingkungan seperti sedimentasi dan ulah manusia sendiri sehingga sumber tercemar. Sumber air baku tersebut sebelum digunakan perlu diolah agar memenuhi syarat baik dari segi fisika, kimia maupun biologi.

Sungai merupakan salah satu potensi sumber daya air permukaan yang cukup besar peluangnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk

memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Akan tetapi potensi sungai belum dimaksimalkan secara optimal sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sebagian besar memanfaatkan mata air yang tersebar dibeberapa lokasi di Kabupaten Bulukumba sebagai sumber air baku.

Grafik II-11
Kapasitas Air Baku Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (m³/detik)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, 2025

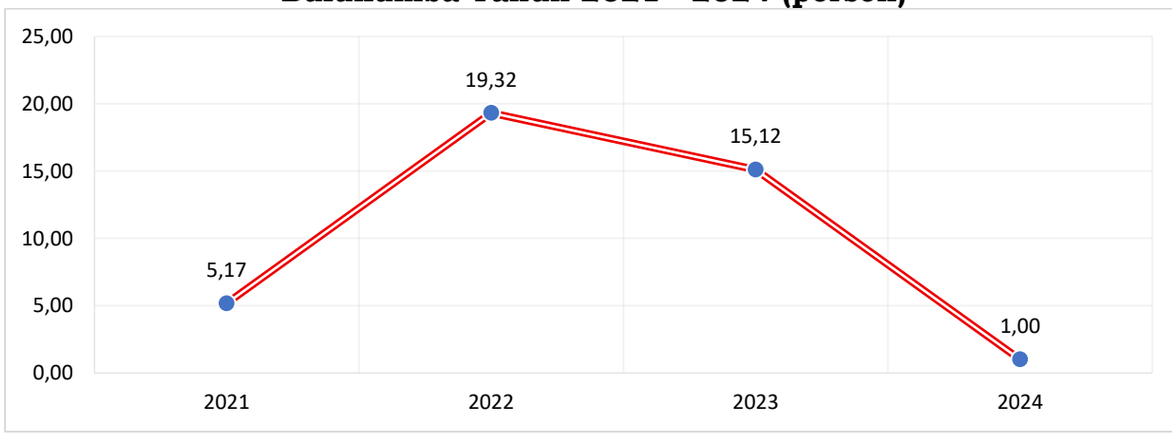
Capaian kapasitas air baku di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sampai tahun 2024 stagnan diangka 0,0225 m³/detik. Teridentifikasi terdapat 83 sungai yang mengalir diantaranya terdapat 8 sungai besar yang memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah dan belum optimal penggunaannya, baik sebagai sumber air baku, air untuk kebutuhan pertanian, ataupun untuk kegiatan pariwisata. Sungai-sungai tersebut adalah: Sungai Balantieng, Sungai Danuang, Sungai Bampang, Sungai Kulepang, Sungai Bialo, Sungai Bijawang, dan Sungai Anruling. Salah satu kendala dalam pemenuhan kapasitas air baku karena belum tersedianya dokumen perencanaan strategis yang disusun pemerintah daerah untuk mempercepat akses terhadap layanan air minum yang layak dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan atau waduk, menerapkan kebijakan konservasi air, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui edukasi dan teknologi pengolahan air yang lebih baik. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan air baku bagi masyarakat dan sektor industri di daerah tersebut.

b) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan melalui sistem perpipaan. Syarat SPAM JP ini meliputi kualitas air minum setidaknya mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan kualitas air minum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kontinuitas pengaliran selama 24 jam.

Grafik II-12
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (persen)



Sumber: PKP Bappelitbangda Prov. Sulsel dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, 2025

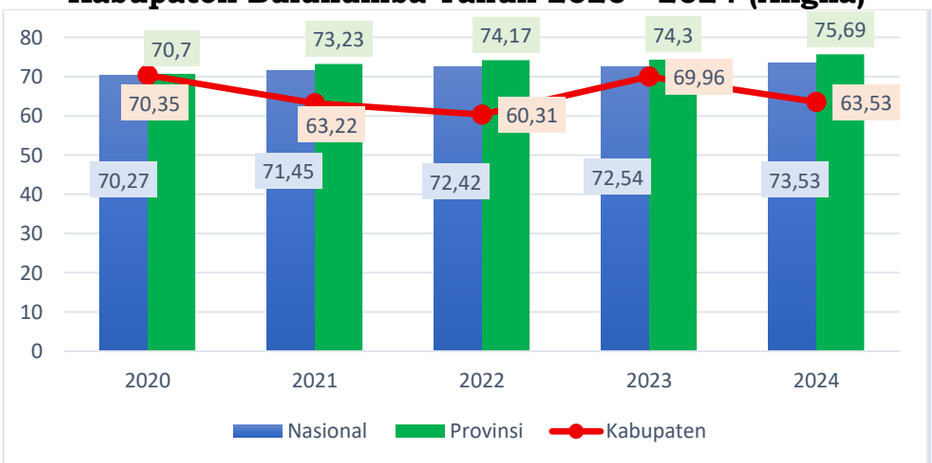
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan yang siginifikan karena sistem pengelolaan air bersih di Kabupaten Bulukumba masih menghadapi masalah dalam infrastruktur, seperti pipa induk yang bermasalah dan kebocoran yang banyak. Tata kelola pipa yang tidak efisien, seperti sistem jaring laba-laba, juga menyebabkan masalah ketika satu saluran bermasalah, yang berdampak pada saluran lainnya. Olehnya itu perlu upaya dalam memperkuat peran pengelola utama sistem penyediaan air Olehnya itu, perlu upaya dalam memperkuat peran pengelola utama sistem penyediaan air untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH mengintegrasikan beberapa komponen utama, seperti Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan indeks kualitas udara yang menilai berbagai parameter lingkungan seperti kualitas air sungai, dan indeks kualitas udara. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bulukumba tersaji pada tabel berikut:

Grafik II-13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



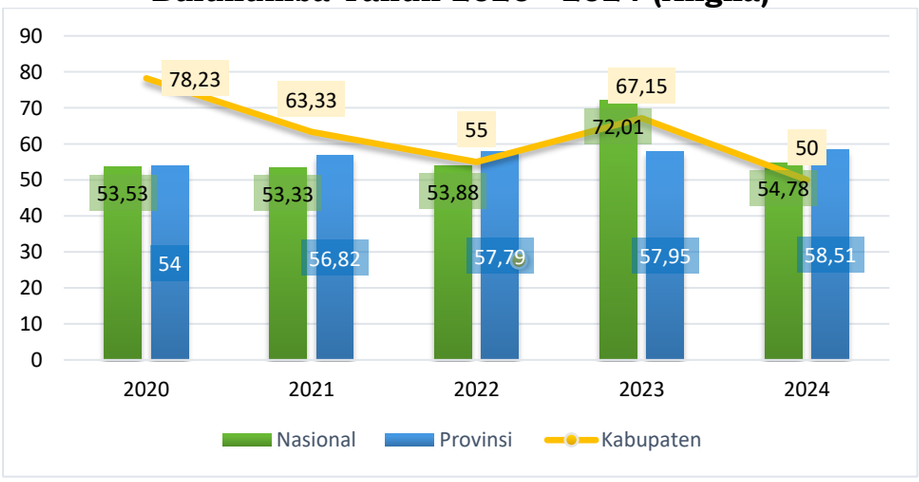
Sumber: DLHK Kab. Bulukumba, 2025

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada pada angka 63,53 atau berada pada predikat sedang. Penurunan ini disebabkan karena terdapat penurunan nilai untuk indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan untuk nilai indeks kualitas udara terdapat peningkatan dari lima tahun terakhir. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk peningkatan kualitas lingkungan namun secara signifikan belum terlihat dalam waktu singkat. Proses pemulihan lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan perlu dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum pada aktivitas yang merusak lingkungan. Salah satu upaya yang massif dilakukan dalam periode RPJMD sebelumnya adalah program penanaman pohon produktif baik melalui APBD, APBN maupun dana CSR.

(1) Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penentuan nilai IKA Kabupaten Bulukumba didasarkan pada hasil pemantauan kualitas air pada sungai yang meliputi 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran kualitas air untuk setiap sungai dilakukan pada lokasi hulu, tengah, dan hilir. Adapun Capaian IKA Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II-14
Indeks Kualitas Air Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



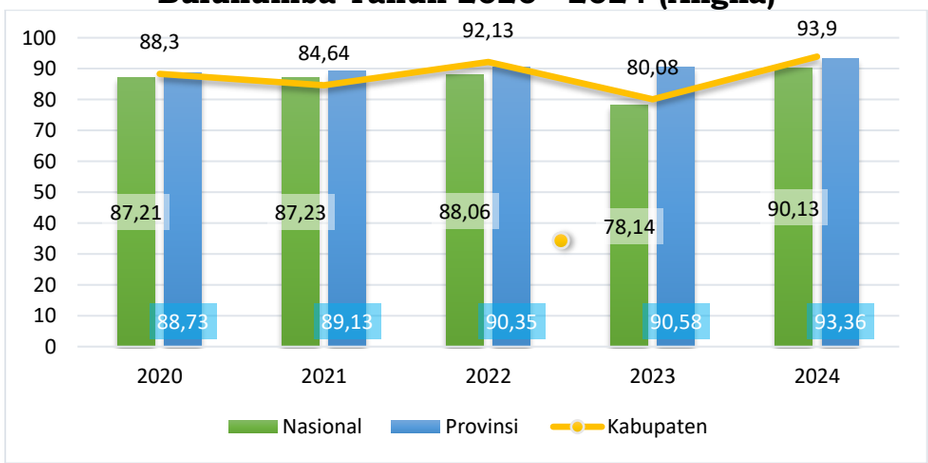
Sumber: DLHK Kab. Bulukumba, 2025

IKA Kabupaten Bulukumba berada pada predikat sedang. Berdasarkan data tersebut, pengukuran indeks kualitas air dari tahun 2020 ke tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan, terlihat dari data hasil pemantauan khususnya Parameter e-Coli, Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang semakin meningkat. Tingginya hasil pengujian di laboratorium pada beberapa parameter disebabkan karena aktifitas pertanian dan industri, serta limbah rumah tangga. Sehingga diharapkan kedepannya untuk meningkatkan kualitas air maka strategi yang perlu dilakukan adalah menurunkan beban pencemar pada sumber tercemar, memulihkan kualitas air di badan air, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasaranan pengelolaan air limbah.

(2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran Indeks Kualitas Udara ambien dilakukan pada 4 (empat) titik utama yang dianggap representatif mewakili kondisi udara di Kabupaten Bulukumba yaitu Kompleks Perumahan Ujung Bulu, Kantor Bupati (perkantoran), Terminal (Transportasi), serta Pabrik PT. PP Lonsum Tbk (Industri). Adapuan Capaian IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II-15
Indeks Kualitas Udara Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



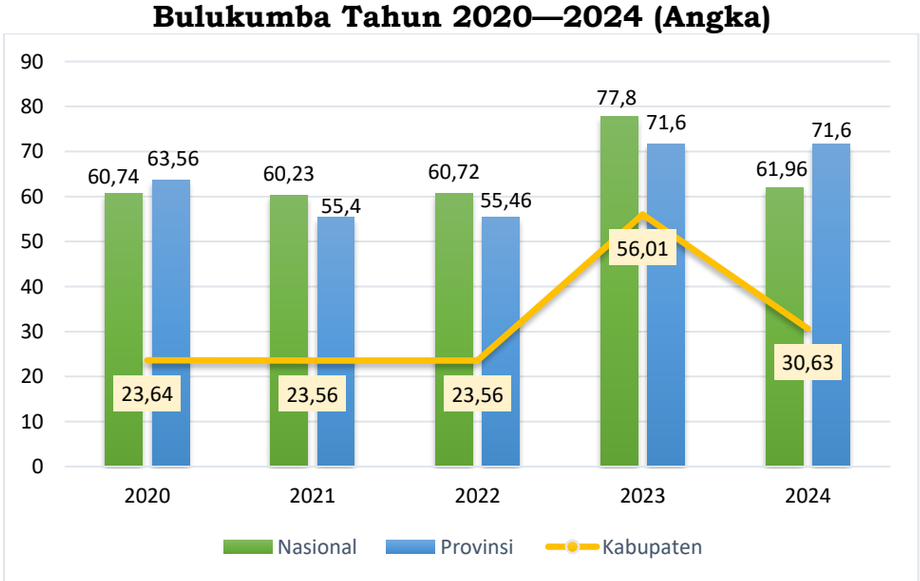
Sumber: DLHK Kab. Bulukumba, 2025

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun berada pada predikat sangat baik, tentunya capaian ini perlu dipertahankan untuk mendorong pencapaian indeks lingkungan hidup khususnya kualitas udara ambien.

(3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun indeks kualitas tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik II-16
Indeks Kualitas Lahan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: DLHK Kab. Bulukumba, 2025

Hasil perhitungan data IKTL di Kabupaten Bulukumba termasuk dalam predikat rendah, meskipun tingkat Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, meskipun upaya pengelolaan lingkungan seperti rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan, dampaknya terhadap kualitas tutupan lahan belum optimal karena proses pemulihan lahan memerlukan waktu yang cukup lama. Disamping itu juga adanya tekanan dari aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk pertanian, pemukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya yang masih berlangsung di Bulukumba menyebabkan degradasi tutupan lahan. Rendahnya indeks kualitas tutupan lahan di Bulukumba tidak lepas dari keterbatasan kewenangan kehutanan di tingkat kabupaten yang menghambat pelaksanaan pengelolaan hutan secara efektif dan berkelanjutan, Keterbatasan kewenangan ini membatasi kemampuan kabupaten untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya hutan secara menyeluruh.

2.1.1.5.2 Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati

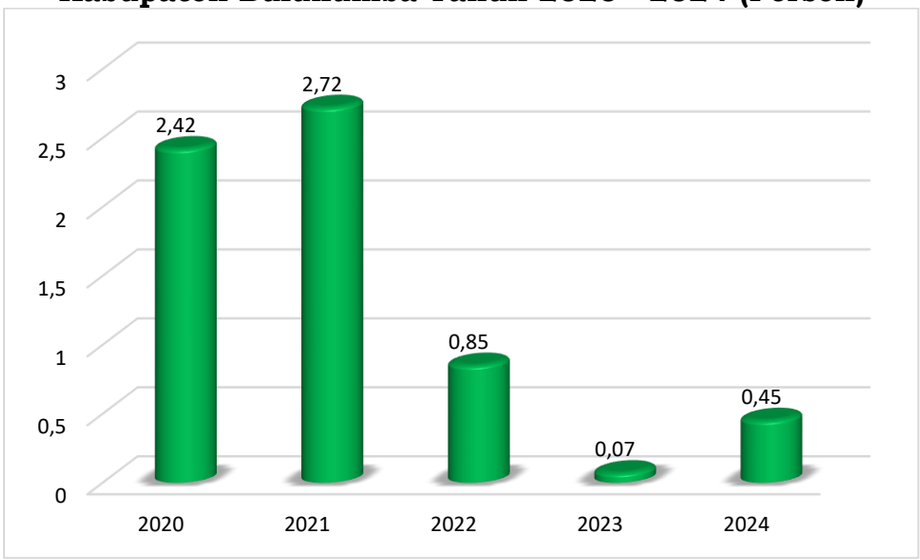
Ancaman terhadap keragaman hayati adalah kepunahan biologis (*biological extinction*), kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru serta beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati mencakup hilangnya habitat, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, eksploitasi spesies yang berlebihan, spesies invasif, polusi, dan perubahan iklim global. Penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, seperti pertumbuhan populasi manusia dan konsumsi berlebihan seringkali bersifat kompleks dan berasal dari banyak faktor yang saling terkait. Hilangnya keanekaragaman hayati mengacu pada berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di planet ini saat ini. Hal ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan, termasuk genetika, jumlah spesies, dan ekosistem secara keseluruhan.

a) Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Kondisi penyaluran pupuk organik saat ini masih dalam tahap peningkatan dan penguatan, sementara pupuk kimia tetap menjadi pilihan utama petani karena ketersediaan dan mekanisme distribusi yang lebih terorganisir dan luas. Sementara itu, penyaluran pupuk organik masih dalam tahap pengembangan dan lebih terbatas. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berupaya mendorong penggunaan pupuk organik melalui penyuluh pertanian memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik cair/padat, pestisida organik, serta pendampingan teknis kepada kelompok tani agar mampu menghasilkan dan menggunakan pupuk organik secara efektif. Pemerintah juga mendorong kerjasama antar kelompok tani dan inovasi seperti pelibatan petani milenial untuk meningkatkan minat generasi muda dalam pertanian organik, serta mengintegrasikan penggunaan pupuk organik secara berimbang dengan pupuk kimia untuk menjaga kesuburan tanah. Berikut proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Bulukumba:

Grafik II-17
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

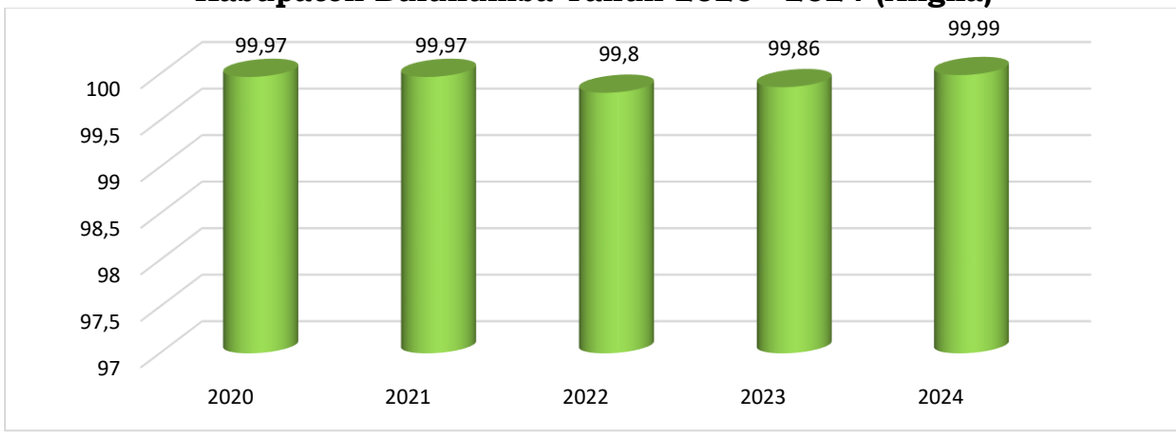
Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia/pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati tahun 2024 mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya intervensi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, provinsi, dan pusat melalui pemberian bantuan pupuk organik sendiri dan pemberian benih/bibit beserta sarana produksinya seperti pupuk organik. Secara umum, masih sedikit petani yang menggunakan pupuk organik secara swadaya dalam berusaha tani, jadi proporsi penggunaan pupuk organik sangat bergantung sari intervensi/bantuan pemerintah.

2.1.1.5.3 Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

a) Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu satu tahun. Intensifikasi adalah upaya peningkatan produksi melalui peningkatan penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Indeks pertanaman adalah rata-rata masa tanam dan masa panen dalam satu tahun pada lahan yang sama, persentase merupakan besar perbandingan yang digunakan dalam persentase yakni perseratus atau persen atau sebuah bentuk bilangan yang menggambarkan berapa bagian dari keseluruhan data yang ada.

Grafik II-18
Indeks Pertanaman (IP) Padi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



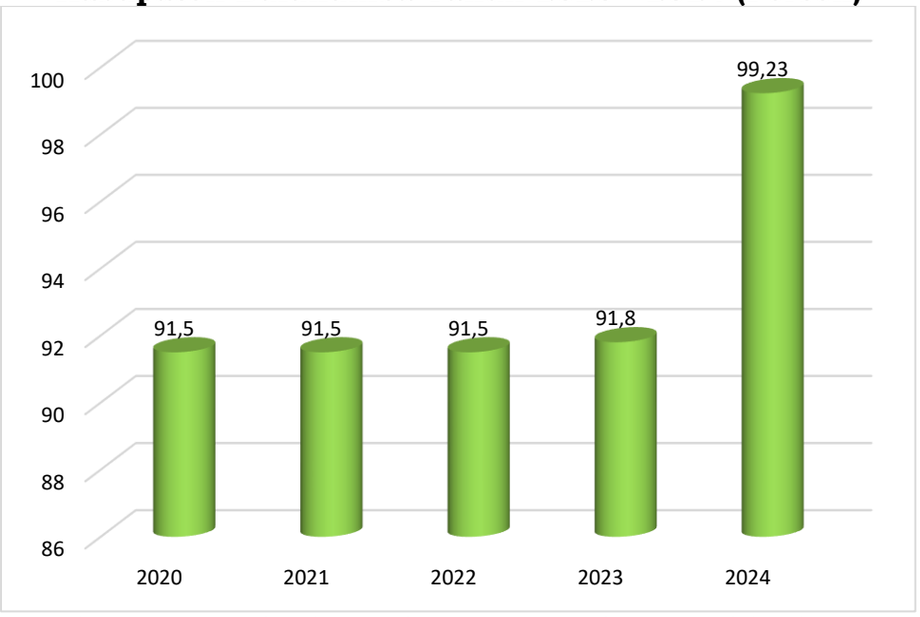
Sumber Data : Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

Indeks pertanaman (IP) padi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pola tanam padi di wilayah ini masih didominasi oleh dua kali tanam dalam setahun dengan sistem padi-padi atau padi-palawija. Pada tahun 2024, IP 1 tercatat sebesar 0,76; IP 2 sebesar 95,37; dan IP 3 sebesar 3,86. Indeks pertanaman padi masih berpotensi untuk ditingkatkan menjadi tiga kali dalam setahun, asalkan ketersediaan air untuk irigasi dan pertanaman dapat terpenuhi. Indeks pertanaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi cuaca, ketersediaan air irigasi, serangan hama, serta penerapan teknologi pertanian yang berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk menjaga dan meningkatkan indeks pertanaman, diperlukan strategi seperti penguatan sistem irigasi, penggunaan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama, serta penerapan teknologi pertanian modern dan penggunaan pupuk organik guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

b) Proporsi Sawah Irigasi

Sawah irigasi adalah sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain melalui saluran-saluran yang sengaja dibuat untuk itu. Sawah irigasi dibedakan atas sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah (semi) teknis, dan sawah irigasi sederhana.

Grafik II-19
Proporsi Sawah Irigasi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



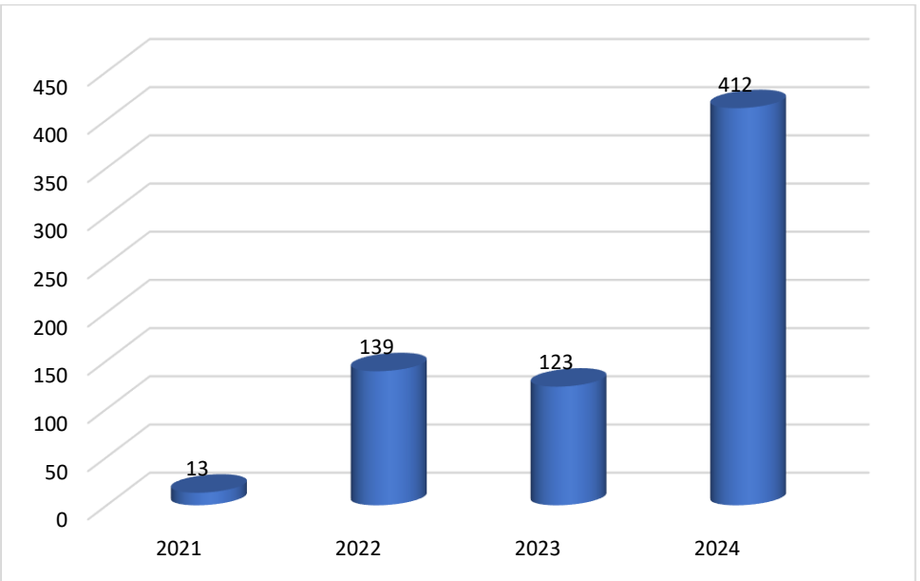
Sumber Data : Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Bulukumba diinterpretasikan sebagai proporsi penggunaan lahan irigasi terhadap luas lahan baku sawah secara keseluruhan. Peningkatan proporsi ini dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh data penggunaan lahan untuk pertanaman pada jenis lahan, baik lahan irigasi maupun nonirigasi. Kenaikan tersebut juga didorong oleh perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, serta dukungan program pemerintah dalam sektor pertanian. Untuk meningkatkan proporsi sawah irigasi secara lebih optimal, diperlukan upaya seperti optimalisasi jaringan irigasi yang sudah ada, penerapan teknologi irigasi modern seperti irigasi tetes atau sprinkler, serta peningkatan kesadaran petani terhadap pentingnya pengelolaan air yang efisien dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air di masa mendatang.

c) Keanekaragaman Hayati Sektor Perikanan

Keanekaragaman hayati sektor perikanan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan kekayaan ekosistem yang beragam baik di perairan laut maupun perairan darat. Wilayah ini memiliki sejumlah jenis ikan dan organisme laut yang menjadi sumber daya penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan lokal Pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati di sektor perikanan Kabupaten Bulukumba menjadi fokus penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Kabupaten Bulukumba yang memiliki garis pantai sepanjang 128 kilometer dan potensi sumber daya laut yang melimpah, mengembangkan berbagai strategi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah kabupaten bulukumba dalam menjaga keanekaragaman hayati disektor perikanan adalah program 1.000 rumpon yang menggabungkan aspek ekologi dan ekonomi, di mana rumpon berfungsi sebagai rumah ikan yang membantu meningkatkan stok ikan sekaligus menjaga habitat alami di perairan Bulukumba. Program ini menjadi bukti nyata dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat nelayan secara aktif dalam konservasi sumber daya laut. Jumlah rumpon yang telah di distribusikan sebanyak 687 kepada 86 kelompok nelayan yang tersebar di tujuh kecamatan (Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang) dalam kurun waktu tahun 2021—2024. Data jumlah pengadaan rumpon di Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel berikut:

Grafik II-20
Jumlah Pengadaan Rumpon Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Unit)



Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Selain itu, pengelolaan kawasan pesisir di Bulukumba terus didorong agar dapat dimanfaatkan secara lestari. Pendekatan pengelolaan berkelanjutan ini meliputi konservasi terumbu karang, hutan mangrove, dan ekosistem pesisir lainnya yang menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan dan biota laut. Partisipasi masyarakat pesisir sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem ini, melalui edukasi dan pelibatan langsung dalam pengelolaan sumber daya, pengawasan aktivitas perikanan, serta pengelolaan sampah laut yang semakin meningkat. Kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat diharapkan dapat

mencegah praktik perikanan destruktif dan menjaga keberlanjutan ekosistem perairan Bulukumba.

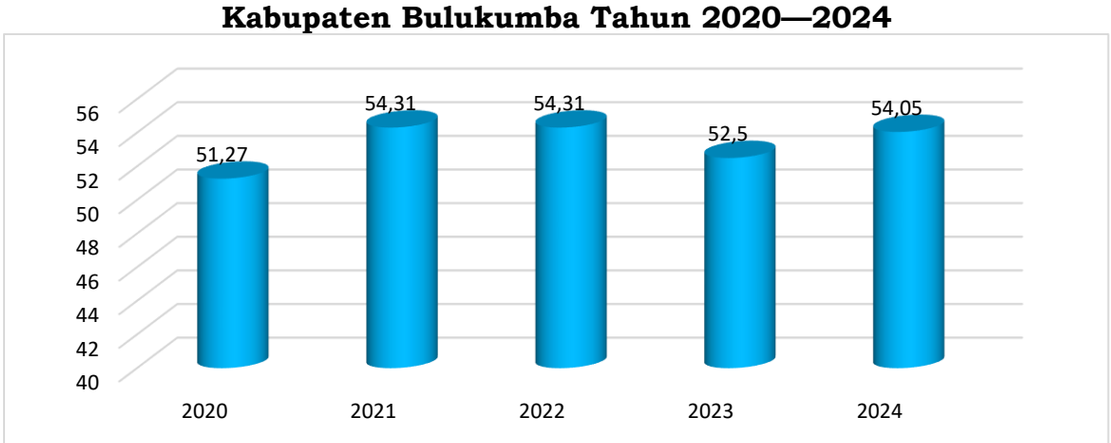
Pada sektor perikanan budidaya, kebijakan yang mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan. Pemerintah daerah fokus pada penyediaan bibit ikan unggul, pengelolaan kawasan budidaya, peningkatan sumber daya manusia, serta pengendalian hama dan penyakit. Pengembangan tambak percontohan dan sosialisasi pengelolaan budidaya berbasis kawasan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas lingkungan perairan. Dengan demikian, pemanfaatan keanekaragaman hayati di sektor perikanan budidaya di Bulukumba diarahkan agar tetap seimbang antara peningkatan produksi dan pelestarian ekosistem.

Secara keseluruhan, pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati di sektor perikanan Kabupaten Bulukumba mengedepankan sinergi antara konservasi ekosistem, pemberdayaan masyarakat nelayan, dan pengembangan budidaya yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut

d) Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan salah satu indikator tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Grafik angka konsumsi ikan di Kabupaten bulukumba sebagai berikut:

Grafik II-21
Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/thn)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



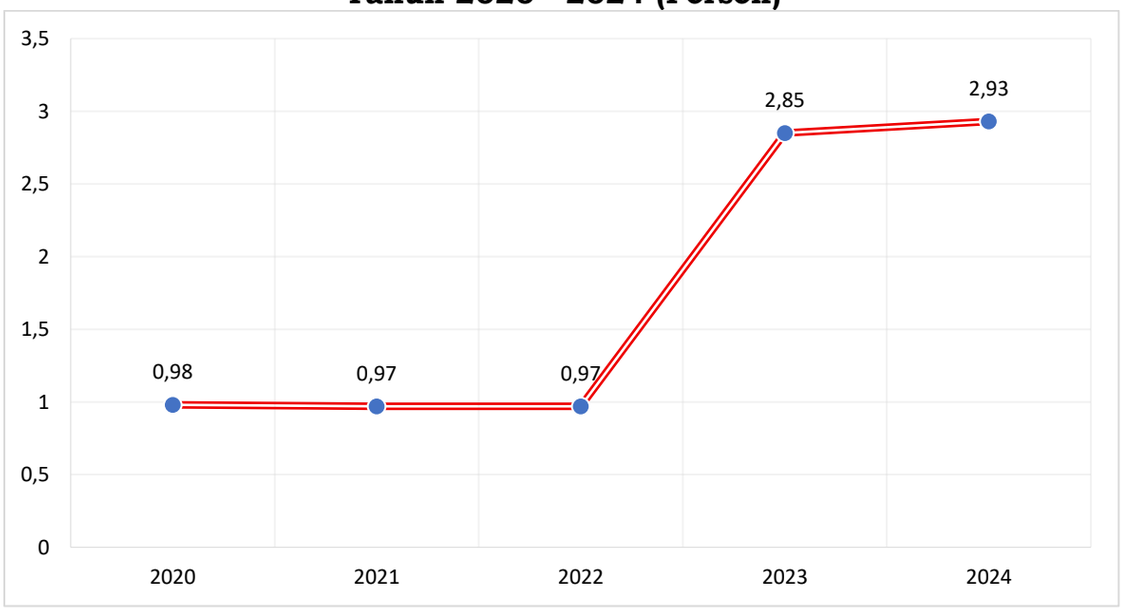
Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Cakupan angka konsumsi ikan Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, meningkat dari 51,27 Kg/kapita/thn pada 2020 menjadi 54,05 Kg/kapita/thn pada 2024, terdapat peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 2,77 dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun mengalami peningkatan namun angka ini belum memenuhi standar nasional (62,5 kg/kapita/thn). Secara umum angka disebabkan oleh faktor harga ikan yang meningkat, distribusi yang tidak merata, atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, solusi yang perlu diterapkan adalah mendorong program diversifikasi produk olahan ikan agar lebih menarik bagi masyarakat, meningkatkan kampanye edukasi tentang manfaat gizi ikan, serta memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga agar ikan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.1.5.4 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman menggambarkan setiap keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah domestik yang tidak mencemari lingkungan. Regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Aman di Kabupaten Bulukumba yang terdata sejak tahun 2020—2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik II-22
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, 2025

Pada tahun 2024, akses Rumah Tangga terhadap sanitasi aman di Kabupaten Bulukumba mencapai 2,93 persen, yang mencerminkan tantangan dalam menyediakan layanan sanitasi yang aman bagi seluruh penduduk. Masih sedikit populasi yang memiliki akses memadai terhadap sanitasi aman, yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Belum tercapainya target akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi aman dan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba disebabkan oleh sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur di wilayah pedesaan, minimnya sumber daya keuangan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi, serta kendala teknis dalam pemeliharaan fasilitas yang ada. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama provinsi melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan edukasi masyarakat, namun pencapaian target masih memerlukan sinergi lebih kuat serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.

Adapun infrastruktur air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba ditunjang oleh Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Borong Manempa yang berlokasi di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, dengan kapasitas pengolahan sebesar 6 m^3 per hari. Wilayah layanan IPLT ini mencakup Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, dan Kecamatan Gantarang. Operasional pengangkutan lumpur tinja dilakukan menggunakan dua unit truk tinja, masing-masing dengan ritasi satu kali per hari per unit. Namun, hingga saat ini pemeriksaan kualitas

efluen hasil pengolahan belum dilakukan, sehingga aspek pemantauan mutu keluaran instalasi masih menjadi perhatian.

Tingkat pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bulukumba saat ini baru mencapai 16,67%, sehingga masih terdapat potensi peningkatan akses layanan aman melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Apabila IPLT dimanfaatkan hingga kapasitas penuh (100%), maka fasilitas ini diperkirakan dapat melayani sekitar 0,32% dari total penduduk Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, tingkat pemanfaatan armada truk tinja baru mencapai 50%, dengan kapasitas angkut yang setara dengan 133,33% dari kapasitas IPLT.

Sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa 98% rumah tangga telah memiliki jamban dan tangki septik layak, yang terdiri atas 116.161 rumah tangga dengan fasilitas layak sendiri dan 1.444 rumah tangga dengan fasilitas layak bersama. Sementara itu, sekitar 2% atau 1.682 rumah tangga masih tergolong belum memiliki fasilitas jamban dan tangki septik yang layak, sehingga memerlukan intervensi untuk meningkatkan akses sanitasi layak secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat di Kabupaten Bulukumba berjumlah 19 unit yang dibangun pada periode 2013 hingga 2018 dan tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Meskipun fasilitas ini telah beroperasi untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik, hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan kualitas efluen pada infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada, sehingga aspek pemantauan dan pengendalian mutu keluaran perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

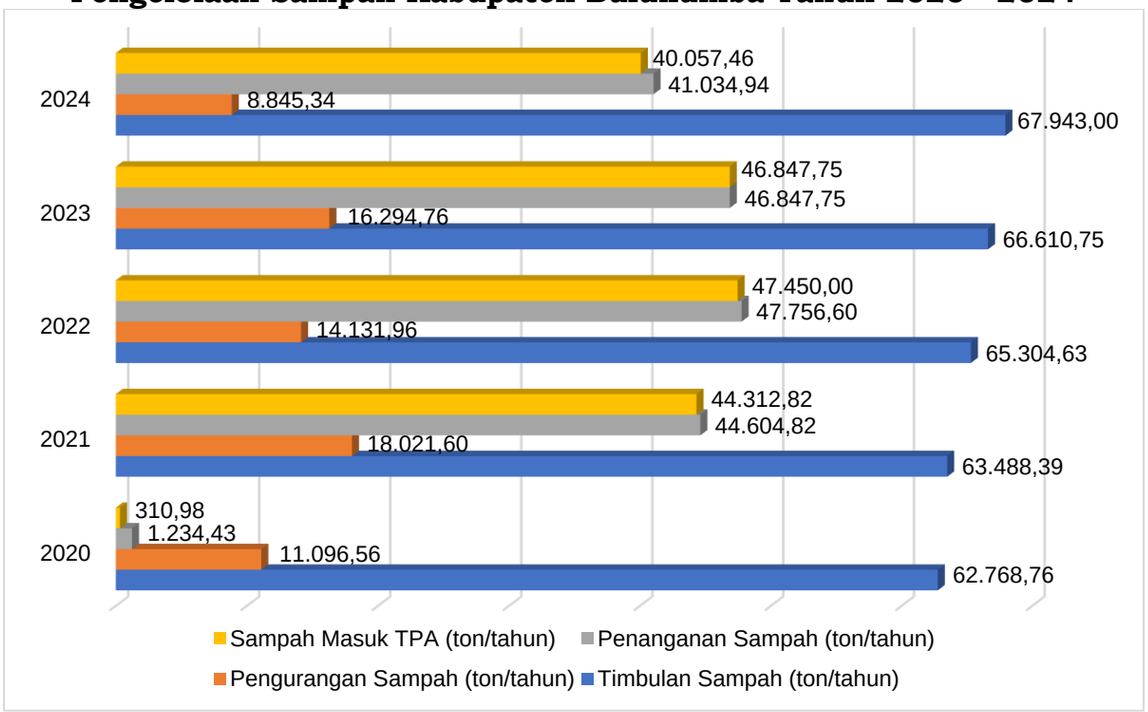
Rantai layanan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba mencakup Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat dan SPALD setempat. Pada SPALD terpusat, jumlah rumah tangga yang tersambung atau terkoneksi ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru mencapai 0,62% atau 742 sambungan rumah. Sementara itu, pada SPALD setempat, hingga tahun 2024 tercatat hanya 23 rumah tangga yang tangki septiknya telah dilakukan penyedotan, sehingga menunjukkan bahwa cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik di kedua sistem tersebut masih sangat terbatas dan memerlukan peningkatan.

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba saat ini berada di bawah tanggung jawab Bidang Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bulukumba. Saat ini, sedang berlangsung proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direncanakan akan terealisasi pada tahun 2025, sebagai langkah untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba.

2.1.1.5.5 Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dengan tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis atau mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Regulasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba diatur melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun data pengolahan sampah berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang terdata pada tahun 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-23
Pengelolaan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



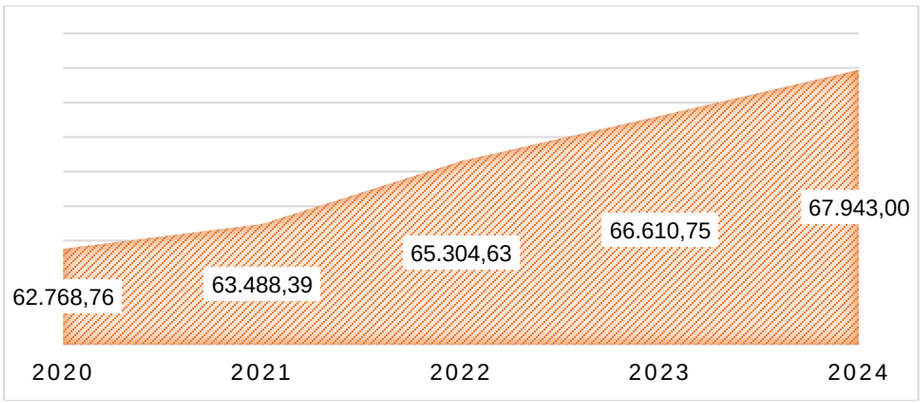
Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Timbulan sampah Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari 62.768,76 ton/tahun pada 2020 menjadi 67.943,00 ton/tahun pada 2024. Sementara itu, pengurangan sampah berfluktuasi, mencapai puncaknya pada 2023 dengan 16.294,76 ton/tahun, namun menurun menjadi 8.845,34 ton/tahun pada 2024. Penanganan sampah juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada 2021 dan 2022, tetapi sedikit menurun pada 2024. Sampah yang masuk ke TPA cenderung meningkat hingga 2023, namun mengalami penurunan pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengurangan dan penanganan sampah, peningkatan timbulan sampah tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola lebih efektif.

a) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu, dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram) gravimetri atau volume (liter) volumetri. Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah diantaranya adalah letak geografis, topografi, musim, iklim, kepadatan penduduk, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai langkah yaitu pengumpulan sampah, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pengolahan, dan pembuangan. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), untuk data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

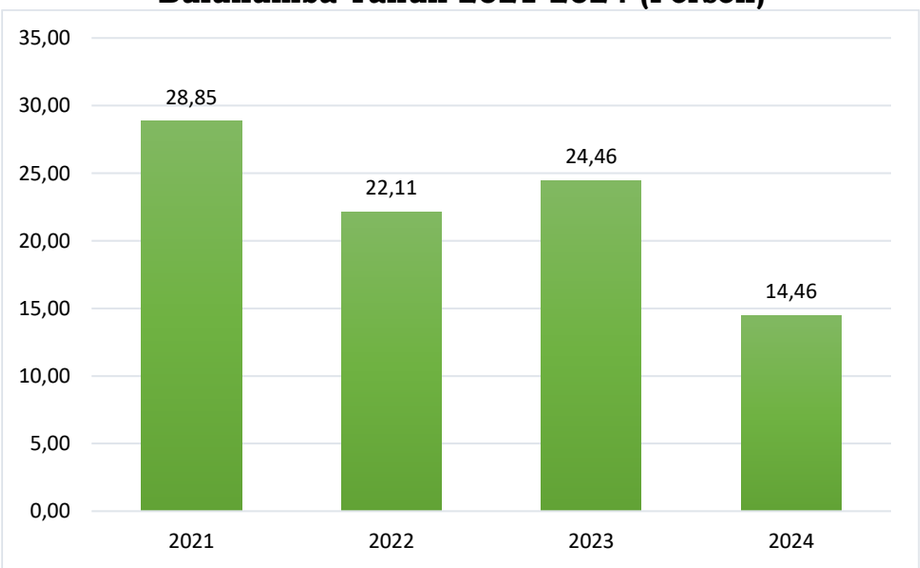
Grafik II-24
Jumlah Timbulan Sampah (Ton) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

Timbulan sampah di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan setiap tahunnya ini menggambarkan bahwa adanya pertumbuhan produksi sampah dari waktu ke waktu yang didominasi oleh sampah rumah tangga. Kapasitas dari TPA sudah *overload* tidak dapat lagi menampung sampah yang dihasilkan rumah tangga maupun non rumah tangga, sehingga tidak dapat dilakukan proses penutupan tanah atau dengan metode *controlled* dan *sanitary landfill*. Untuk itu dibutuhkan perluasan dan pembangunan TPA baru, mengingat bahwa TPA yang beroperasi sudah lebih dari 10 tahun. Adapun timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 sebesar 14,46 persen, hal ini dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-25
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024 (Persen)

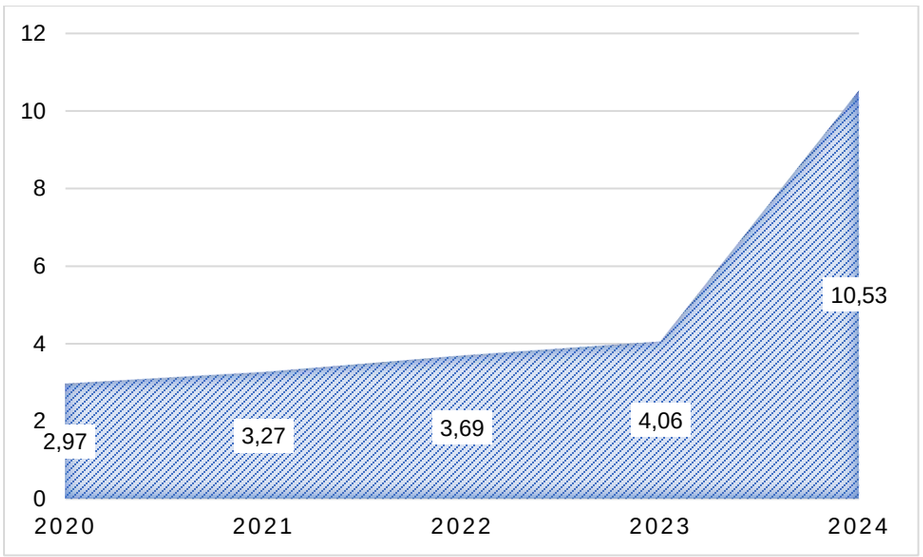


Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

b) Daur Ulang Sampah

Daur ulang sampah merupakan kegiatan mengolah kembali sampah atau produk habis pakai menjadi produk baru yang bermanfaat. Dengan cara ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan menghemat sumber daya alam, akan tetapi juga dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan menurunkan emisi gas rumah kaca serta mencegah pencemaran lingkungan. Dengan demikian, daur ulang sampah merupakan strategi penting dalam mengolah sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Grafik II-26
Daur Ulang Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2025

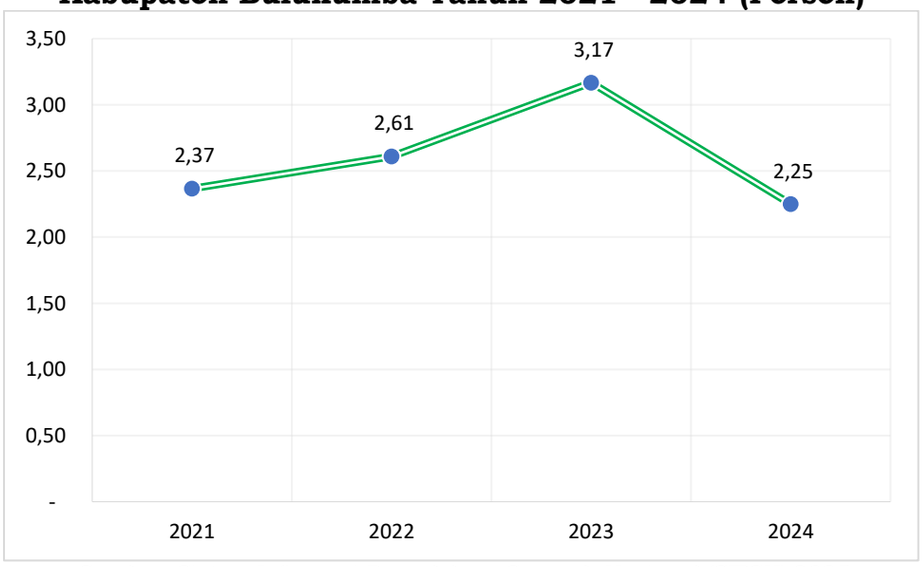
Dari grafik diatas persentase daur ulang sampah meningkat signifikan pada tahun 2024. Akan tetapi persentase masih sangat kurang jika di bandingan dengan timbulan sampah yang ada. Pada tahun 2024 jumlah timbulan sampah sebesar 67.943 ton sedangkan yang di daur ulang hanya sebesar 7.157,2 ton.

Adapun fasilitas daur ulang sampah di Kabupaten Bulukumba terdiri dari TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle*), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan bank sampah. Terdapat lima unit TPS3R, namun tiga di antaranya tidak beroperasi. Jumlah TPST yang tersedia sebanyak tiga unit, namun dua di antaranya tidak beroperasi sehingga kapasitas pengolahan sampah menjadi terbatas. Selain itu, terdapat enam belas unit Bank Sampah KSM, dengan sembilan unit yang tidak beroperasi.

c) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Rumah tangga yang memiliki akses penuh pelayanan pengumpulan sampah diperuntukkan bagi keluarga dengan volume sampah maksimal 2,5 kg/pengambilan sampah, dan untuk keluarga yang di huni 2 KK atau lebih dengan volume sampah lebih dari 2,5 kg harus memisahkan sampah kering dan basah.

Grafik II-27
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen)



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),2025

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari 3,17 persen pada tahun 2023

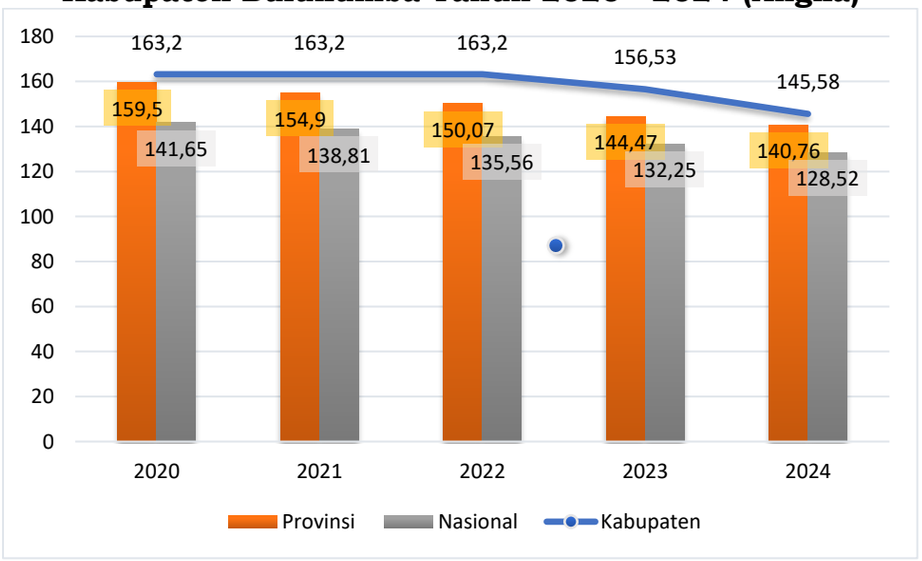
menjadi 2,25 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan perlunya evaluasi dan penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Layanan penuh pengumpulan sampah ini di dominasi pada daerah perkotaan, sampai saat ini terdapat 2 kecamatan yang terlayani yaitu Kecamatan Ujung Bulu dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a) Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks untuk menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Adapun indeks risiko bencana Kabupaten Bulukumba tertera berikut ini:

Grafik II-28
Indeks Risiko Bencana Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024

Berdasarkan hasil analisa kajian risiko Kabupaten Bulukumba didapatkan Indeks Risiko Bencana mengalami stagnansi sebesar 163,2 poin tahun 2020 sampai 2022 kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2024 sebesar 145,58, angka tersebut termasuk dalam kategori kelas risiko yang tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang berada pada angka 140,76 dan 128,52 pada tahun 2023. Secara umum bencana di Kabupaten Bulukumba adalah bencana hidrometeorologi yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas.

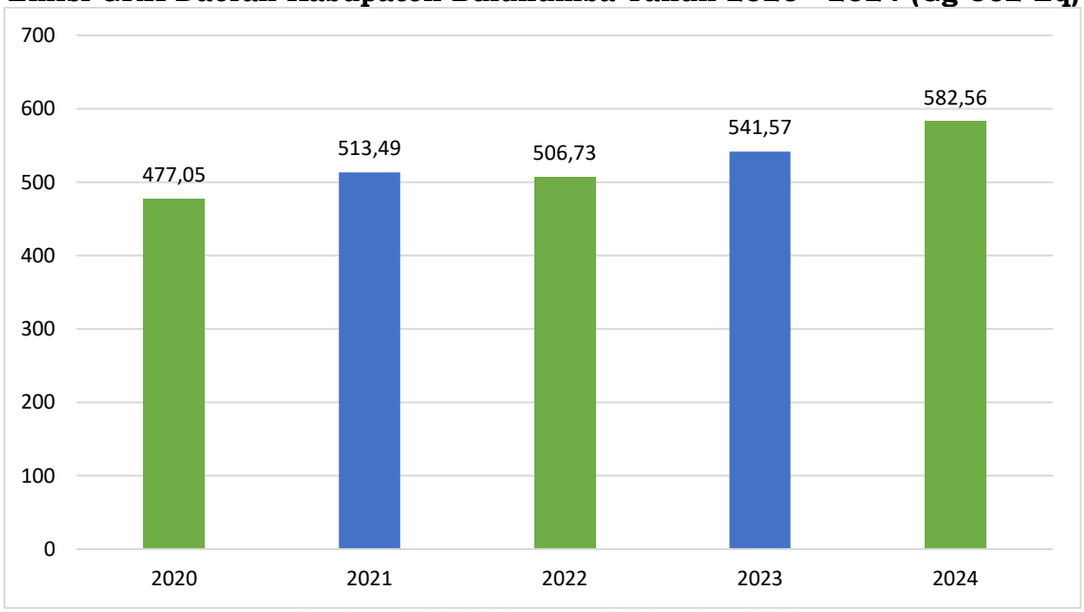
Tingginya Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bulukumba dikarenakan letak geografis berada di kaki Gunung Lompobattang dan Gunung Bawakaraeng, berdasarkan hasil survei juga menunjukkan bahwa kawasan lereng gunung sudah mulai gundul dan berpotensi banjir bandang karena aliran air dari puncak ke lereng gunung akan semakin besar, sehingga kondisi ini berpotensi terjadinya tanah longsor. Beberapa wilayah garis pantai terjadi abrasi tahun 2024 yaitu di Kecamatan Herlang (Bontokamase Dusun Butung, Tanuntung Dusun Paatinoang, dan Gunturu Dusun Dajo), Kecamatan Bonto Tiro (Batu Tanrung/Para-Para Dusun Ekatiro dan Bogo Dusun Ekatiro), dan Kecamatan Ujungloe (Garantha Dusun Namboe dan Salemba Dusun Lembang). Langkah strategis yang perlu dilakukan

adalah mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat sampai ke pemulihan rehabilitasi dan rekontruksi.

b) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi gas rumah rumah kaca merupakan emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktifitas manusia di bumi yang menimbulkan efek rumah kaca diatmosfir seperti Karbon Dioksida (CO2), Belerang Dioksida (SO2), Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2), Gas Metana (CH4), dan Klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain. Dalam perhitungan GRK terdapat 5 komponen sebagai dasar perhitungan diantaranya 1). Energi, 2). Pertanian, 3). Kehutanan, 4). Limbah dan 5). IPPU (*Industrial Process and Production Use*). Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik II-29
Emisi GRK Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Gg Co2-Eq)



Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2025

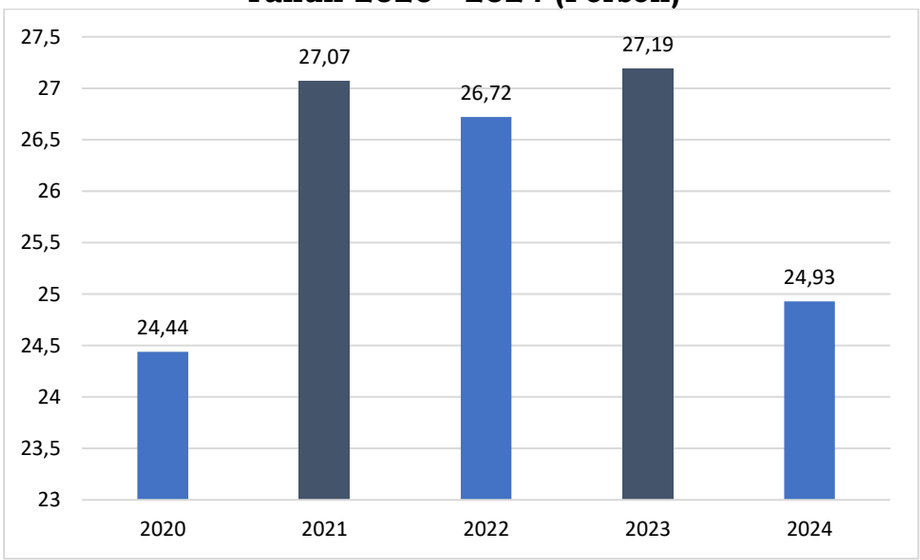
Berdasarkan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020—2024 mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 477,05 (Gg Co^2-Eq) dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 582,56 (Gg Co^2-Eq) yang disumbang oleh beberapa sektor yaitu bidang energi, bidang energi, bidang industri, bidang kehutanan, dan bidang limbah. Dari kelima sektor tersebut sektor pertanian yang menyumbang emisi terbesar. Emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan lahan pertanian, penggunaan pupuk non organik (urea) yang tidak seimbang dan sub sektor peternakan (utamanya dari sendawa pernafasan ternak dan penanganan kotoran ternak).

(1) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK

Persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020 hingga 2024 berfluktuatif. Penurunan intensitas emisi GRK ini menjadi penting karena dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, seperti badai, kekeringan, dan banjir yang menyebabkan kerugian jiwa dan kerusakan properti. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi produktifitas pertanian dan ketahanan pangan, akibat pola cuaca yang berubah dan sulit diprediksi. Untuk itu, perlu perhatian pemerintah dalam upaya penurunan emisi GRK melalui kebijakan pembangunan rendah karbon.

Adapun capaian persentase penurunan emisi GRK di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik II-30
Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



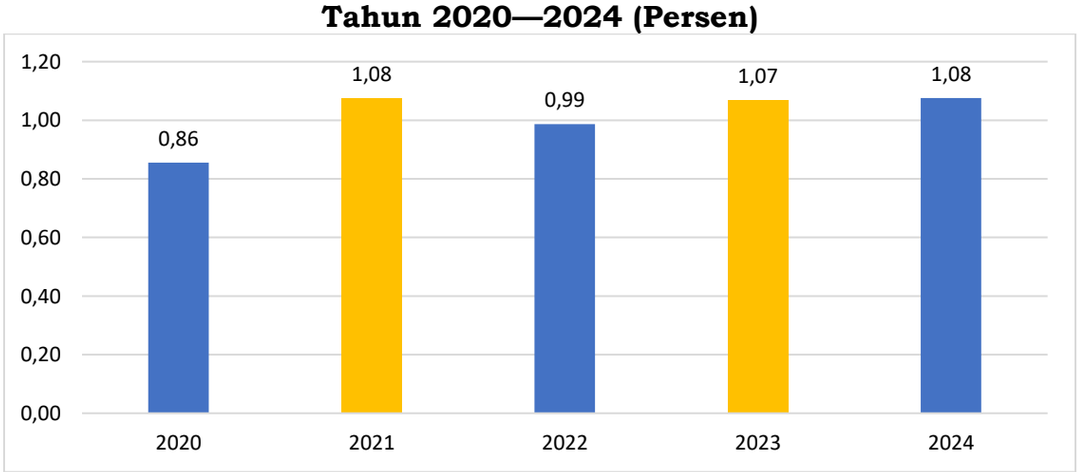
Sumber : AKSARA PPRK BAPPENAS, 2025

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Bulukumba secara umum menunjukkan tren positif dalam penurunan intensitas emisi GRK selama lima tahun terakhir, meskipun terdapat variasi dari tahun ke tahun. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya perlu mendapat perhatian, karena dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan atau dinamika sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan serta penguatan strategi pembangunan berkelanjutan guna menjaga pencapaian target penurunan emisi di masa mendatang.

(2) Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Daerah Tahunan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu daerah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari tahun ke tahun. Emisi gas rumah kaca berkontribusi terhadap perubahan iklim global, sehingga penurunan emisi adalah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Grafik II-31
Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



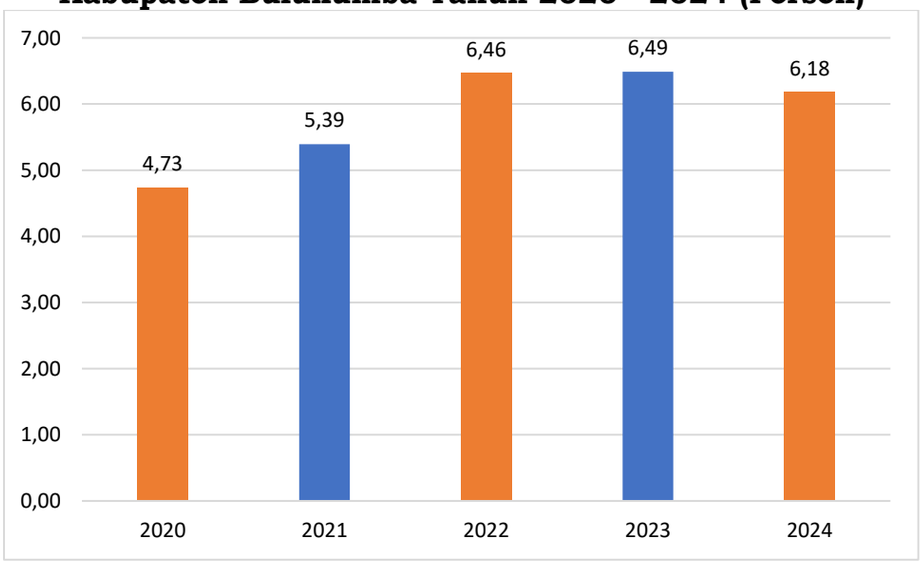
Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahunan di Kabupaten Bulukumba stagnan sebesar 1,08 pada tahun 2021 dan 2024 dengan dinamika perubahan diantaranya. Hal ini terjadi karena kebijakan lingkungan yang berubah, efektivitas program pengurangan emisi, atau peningkatan aktivitas industri dan transportasi. Untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas pengurangan emisi, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan energi terbarukan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi.

(3) Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Daerah Kumulatif mengukur total penurunan emisi gas rumah kaca yang dicapai oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan jangka panjang daerah dalam upaya mengurangi emisi GRK dan kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim global.

Grafik II-32
Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber : DLHK Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 4,73 persen menjadi 6,18 persen. Tren ini mengindikasikan keberhasilan dalam program pengurangan emisi, disebabkan oleh kebijakan lingkungan yang lebih ketat, peningkatan penggunaan energi terbarukan, atau adopsi teknologi hijau di berbagai sektor. Namun, untuk memastikan tren positif ini berlanjut, pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan insentif bagi industri ramah lingkungan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan emisi melalui edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan.

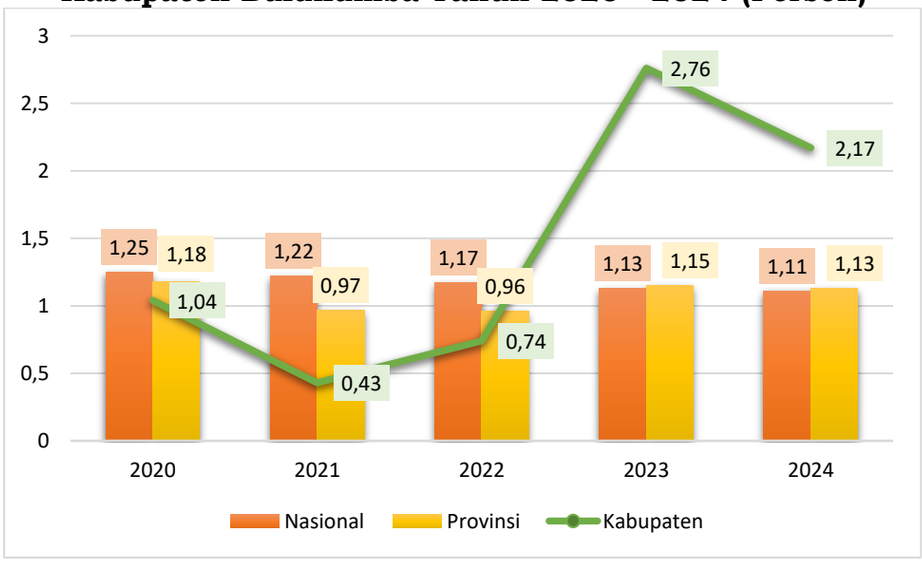
2.1.1.7 Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah istilah yang mengacu pada kecepatan perubahan jumlah penduduk suatu daerah dalam suatu periode tertentu. LPP biasanya diukur dalam bentuk persentase atau angka per seribu penduduk dalam satu tahun. LPP juga dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang struktur usia populasi, tingkat urbanisasi, migrasi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu daerah. Dalam analisis

demografi, LPP sering digunakan bersama indikator-indikator lain seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat migrasi, dan piramida penduduk untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika populasi suatu wilayah. Berdasarkan Buku Bulukumba Dalam Angka, laju pertumbuhan penduduk dalam kondisi 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan fluktuatif, pada tahun 2024 pertumbuhan menurun menjadi 2,17 persen, sama halnya dengan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional mengalami penurunan yakni 1,13 persen dan 1,11 persen.

Grafik II-33
Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

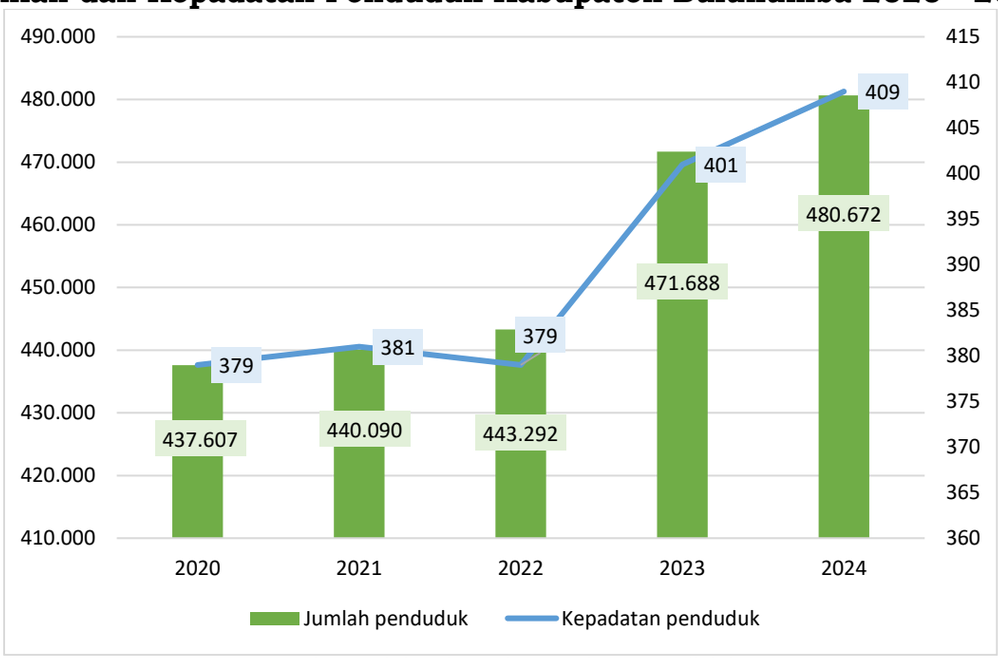


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2024 sebanyak 480.672 jiwa yang terdiri atas 235.138 jiwa penduduk laki-laki dan 245.534 jiwa penduduk perempuan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 437.607 jiwa dan pada tahun 2024 penduduk sebanyak 480.672 jiwa. Hal ini serupa dengan jumlah penduduk untuk wilayah provinsi dan nasional yang terus mengalami peningkatan.

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi (Km^2). Hasil perhitungan pada tahun 2024 yakni 409 Penduduk/Km^2.

Grafik II-34
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba 2020—2024



Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2025 diolah

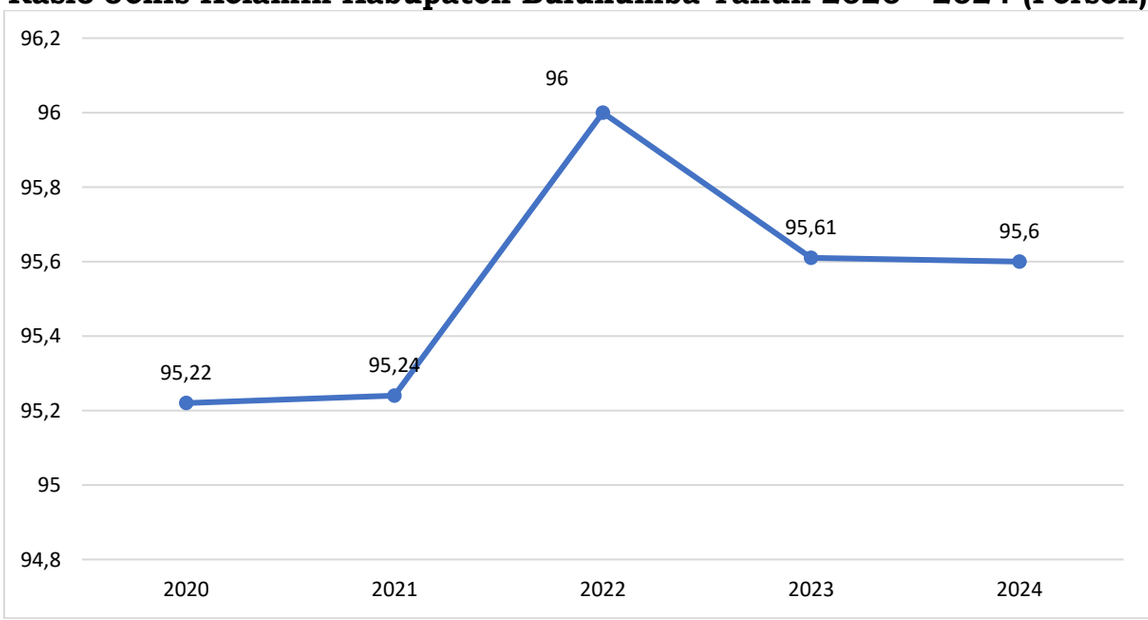
b. Rasio Penduduk

Rasio penduduk digunakan untuk menggambarkan tingkat keseimbangan antara dua unsur penduduk yang meliputi beberapa rasio yaitu rasio kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur.

a) Rasio Jenis Kelamin

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2024 sebesar 95,6 hal ini menggambarkan bahwa jumlah laki-laki lebih rendah dibandingkan jumlah perempuan, karena rasio jenis kelamin di bawah 100 mengindikasikan lebih banyak perempuan dalam populasi dibanding laki-laki. Fluktuasi kecil dalam rasio ini menunjukkan bahwa perubahan demografi dalam hal jenis kelamin terjadi secara perlahan dan relatif seimbang dari tahun ke tahun.

Grafik II-35
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

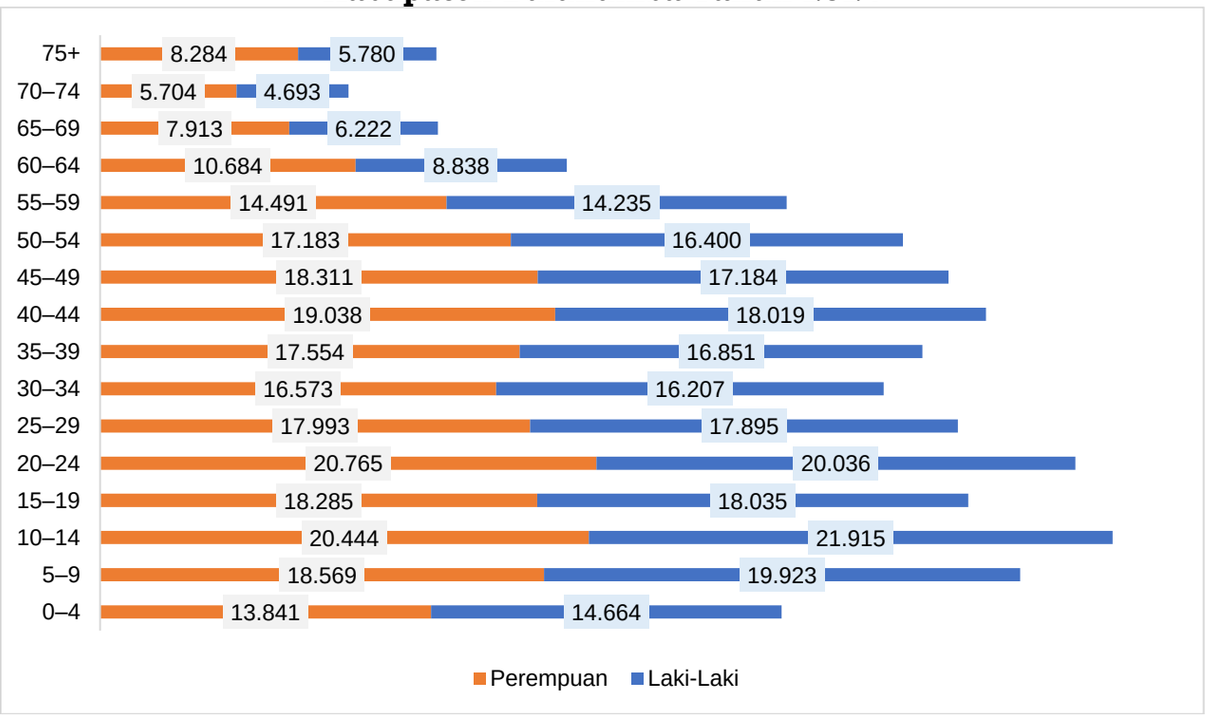


Sumber: Bulukumba Dalam Angka, 2025

c) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba tercatat sebanyak 480.672 jiwa yang terdiri dari 235.138 jiwa laki-laki dan 245.534 jiwa perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur juga memperlihatkan dominasi usia muda, dengan kelompok usia 10–14 tahun sebagai yang terbesar, yaitu sebanyak 42.359 jiwa. Kondisi ini mencerminkan potensi demografis yang cukup besar bagi pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan sosial yang berorientasi pada kelompok usia produktif dan keseimbangan gender. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik II-36
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

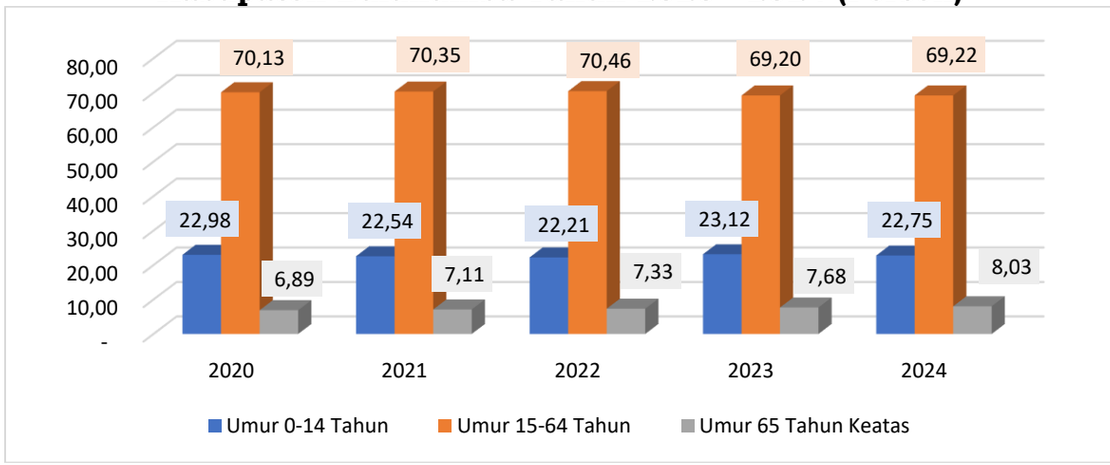


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2025

d) Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Data persentase penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan kelompok umur tahun 2020–2024 menunjukkan adanya perubahan struktur demografi. Proporsi anak-anak usia 0–14 tahun relatif stabil di kisaran 22 hingga 23 persen, sementara penduduk usia produktif (15–64 tahun) menunjukkan tren menurun dari 70,13 persen pada 2020 menjadi 69,22 persen pada 2024. Di sisi lain, kelompok lansia (65 tahun ke atas) mengalami peningkatan dari 6,89 persen tahun 2020 menjadi 8,03 persen tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Bulukumba tengah memasuki fase awal transisi demografi dengan indikasi meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan menurunnya proporsi usia produktif. Hal ini menuntut respons kebijakan yang adaptif, terutama dalam penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan sosial dan kesehatan yang ramah lansia.

Grafik II-37
Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

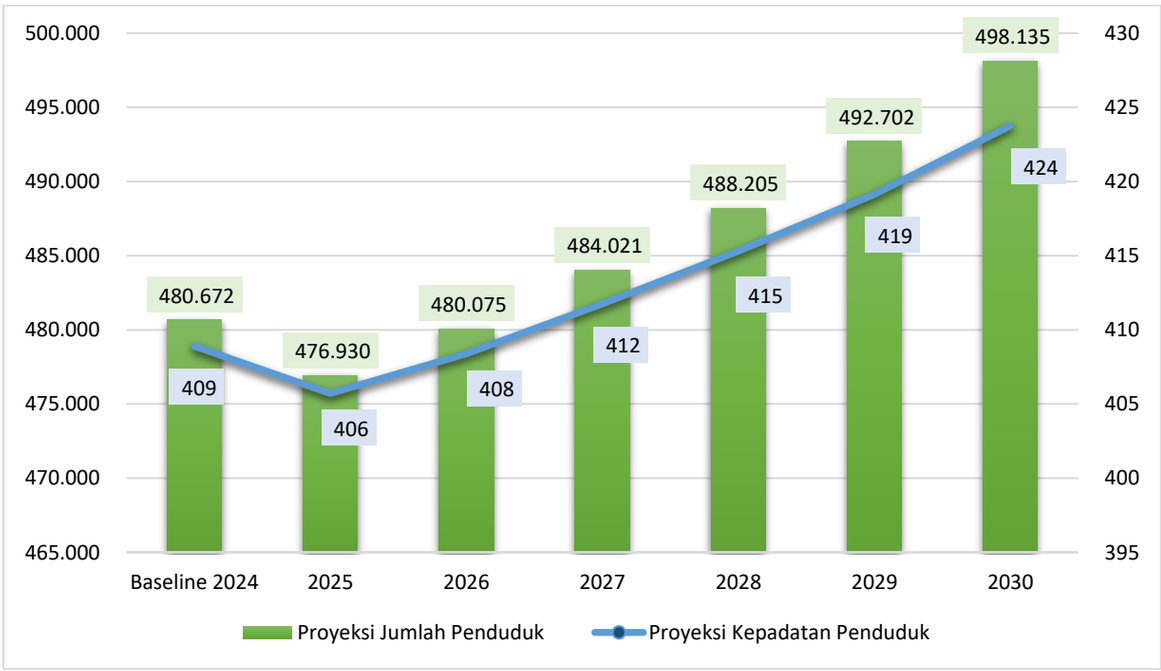


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2025

e) Proyeksi Demografi 2025-2030

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur penduduk Kabupaten Bulukumba di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat hasil perhitungan parameter penduduk Kabupaten Bulukumba disajikan pada tabel berikut.

Grafik II-38
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2030



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2025 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

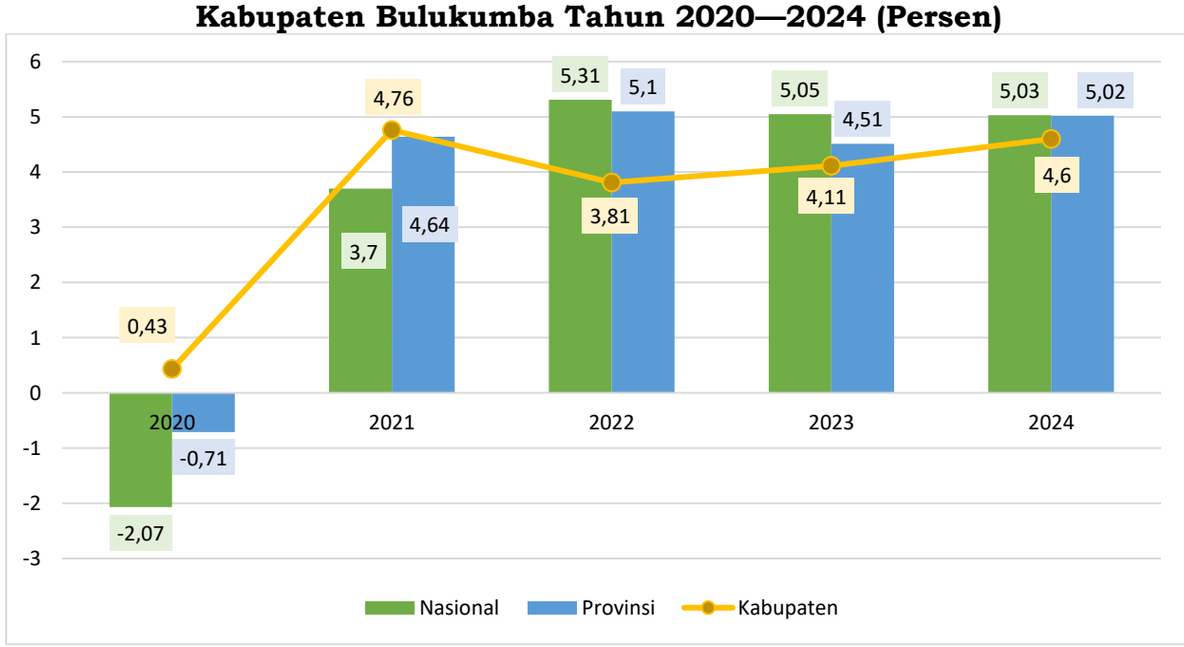
Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Gambaran kondisi dari aspek kesejahteraan masyarakat ini dijelaskan sebagai berikut :

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan peningkatan produktifitas ekonomi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pada tahun 2020—2024, laju pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten bervariatif sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini:

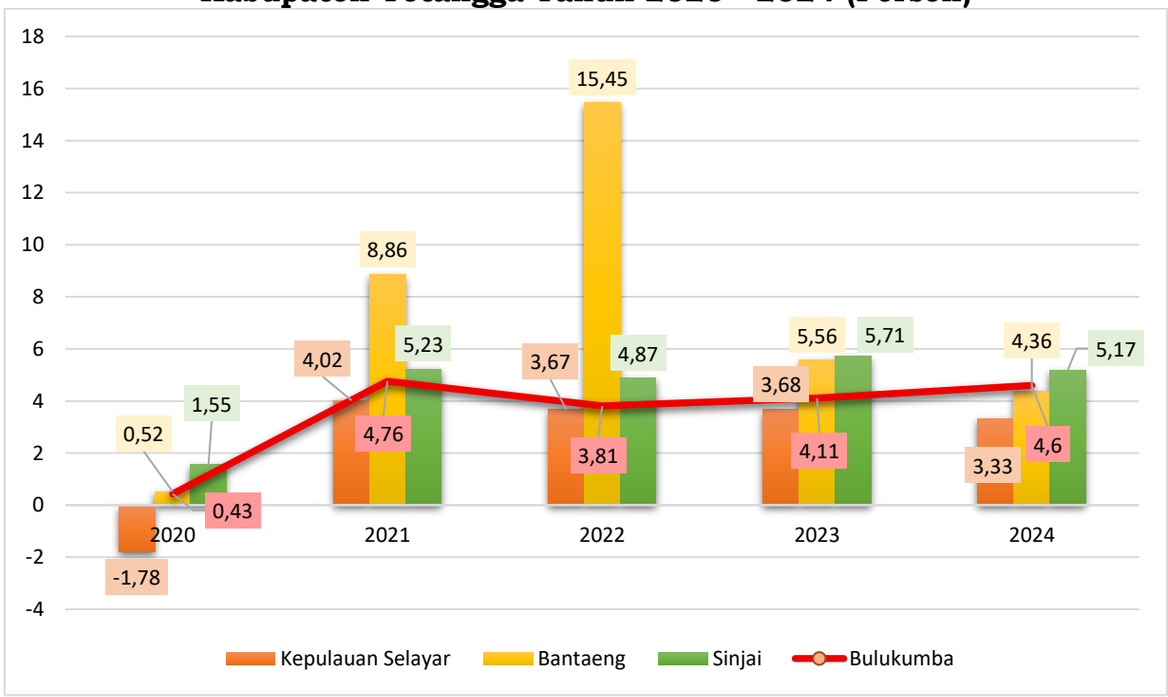
Grafik II-39
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara kumulatif, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2024 tumbuh sebesar 0.49 persen menjadi 4,6 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 4.11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 14,42 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 15,90 persen. Pada skala provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2024 berada pada urutan kesebelas.

Grafik II-40
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen)

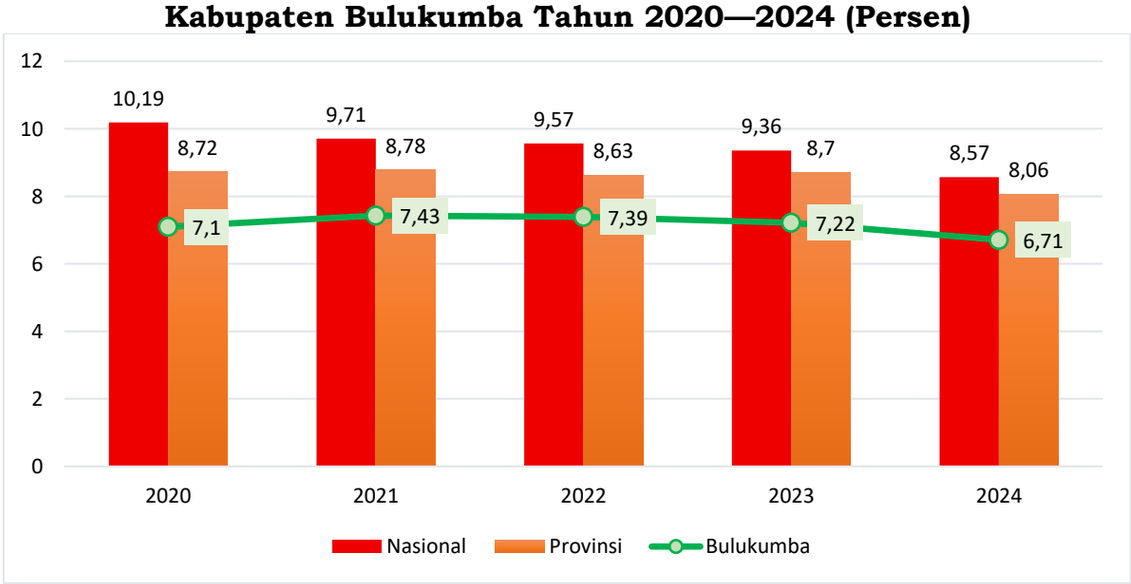


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan antara kabupaten, provinsi dan nasional dalam tabel berikut:

Grafik II-41
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

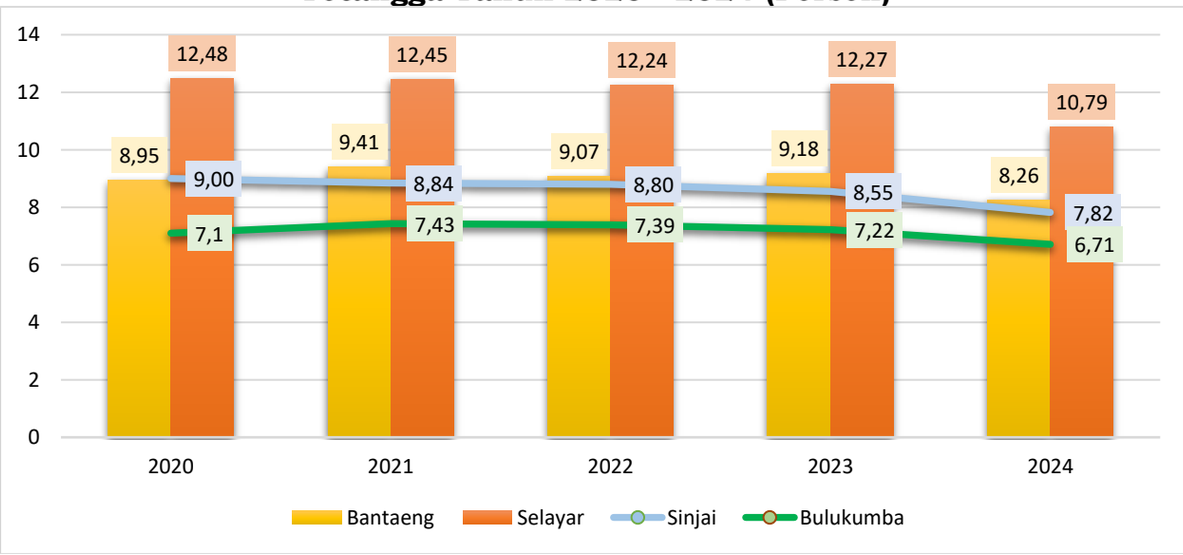


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren penurunan bertahap. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 turun sekitar 2,05 ribu jiwa dibanding tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat, yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, di tingkat provinsi dan nasional, angka kemiskinan relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja, serta mendorong sektor UMKM dan ekonomi kreatif agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Pada skala provinsi, tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2024 berada pada urutan keenam terendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Bantaeng, Selayar, dan Sinjai, Bulukumba konsisten berada di posisi terendah, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-42
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen)

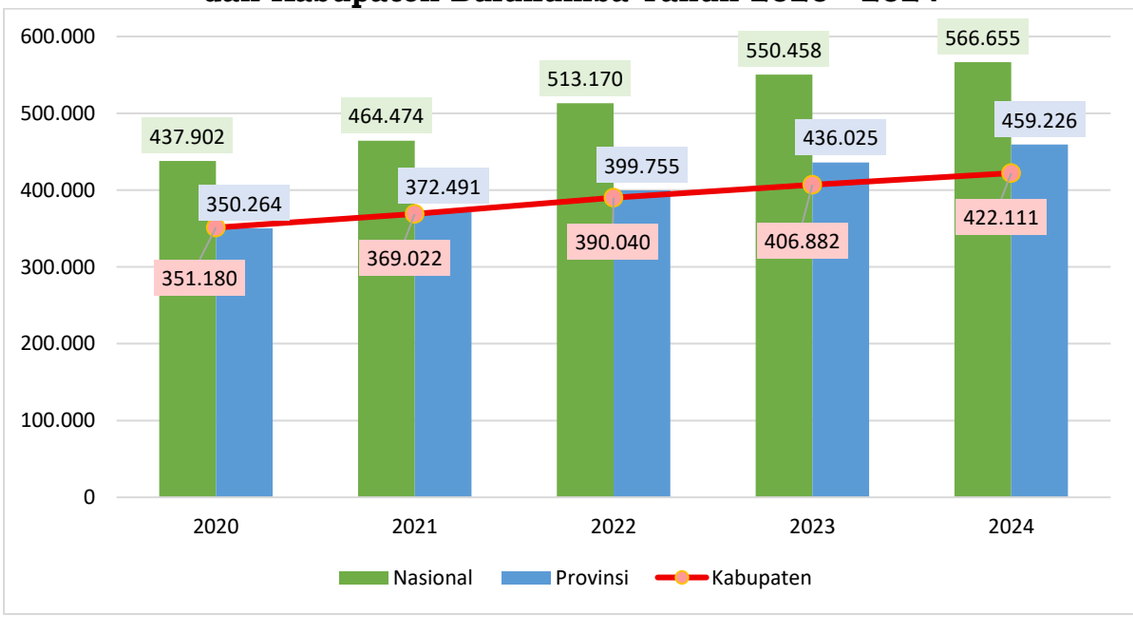


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.3 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi disuatu negara. Dalam prakteknya, garis kemiskinan untuk negara maju lebih tinggi dibanding negara berkembang. Garis kemiskinan ini merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan untuk Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2020—2024 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel II-71
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



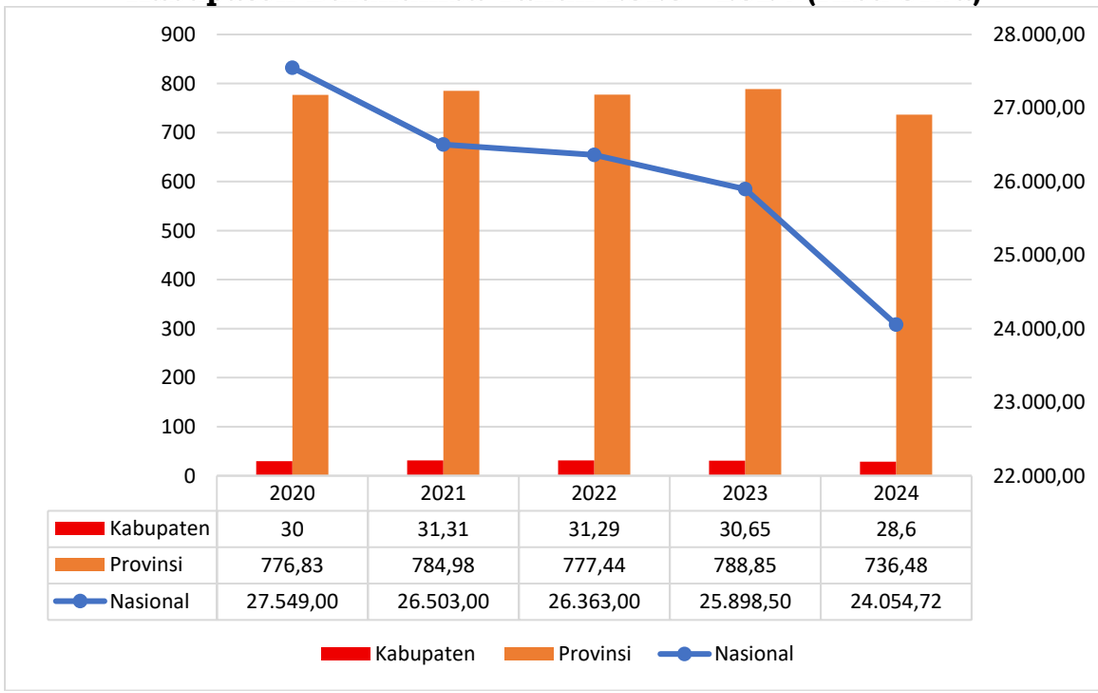
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, terdapat tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba sebesar 422.111 rupiah/kapita/bulan ini lebih rendah dibanding dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 459.226 rupiah/kapita/bulan dan Nasional sebesar 550.458 rupiah/kapita/bulan. Jika rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota keluarga. Garis Kemiskinan satu rumah tangga sebesar Rp1.988.142 per rumahtangga per bulan.

2.1.2.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah dan merupakan permasalahan global. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan, sehingga salah satu targetnya adalah menghapus segala bentuk kemiskinan.

Grafik II-43
Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ribu Jiwa)



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	30	31,31	31,29	30,65	28,6
Provinsi	776,83	784,98	777,44	788,85	736,48
Nasional	27.549,00	26.503,00	26.363,00	25.898,50	24.054,72

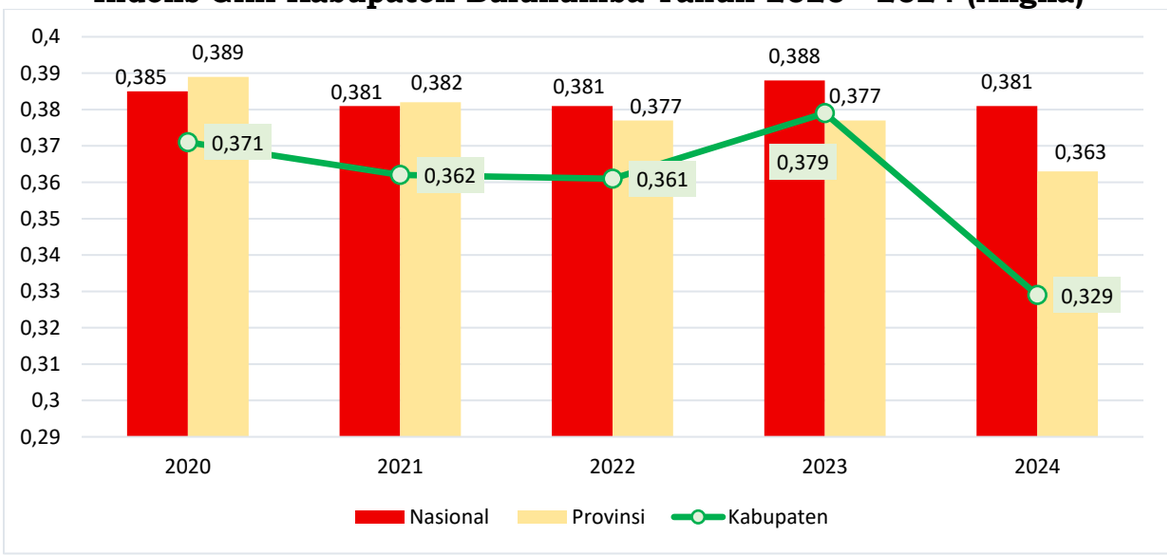
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya fluktuasi sebelum akhirnya mengalami penurunan yang lambat sampai tahun 2024. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 turun sekitar 2,05 ribu jiwa dibanding tahun 2023. Diperlukan intervensi program yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba. Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin.

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus italia Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya Variabilità e mutabilità. Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh. Todaro 1994 memberikan kriteria ketimpangan berdasarkan nilai Gini rasio diantaranya: Indeks Gini < 0,35 (rendah), Indeks Gini 0,35-0,5 (moderat) dan Indeks Gini > 0,5 (tinggi).

Grafik II-44
Indeks Gini Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2025

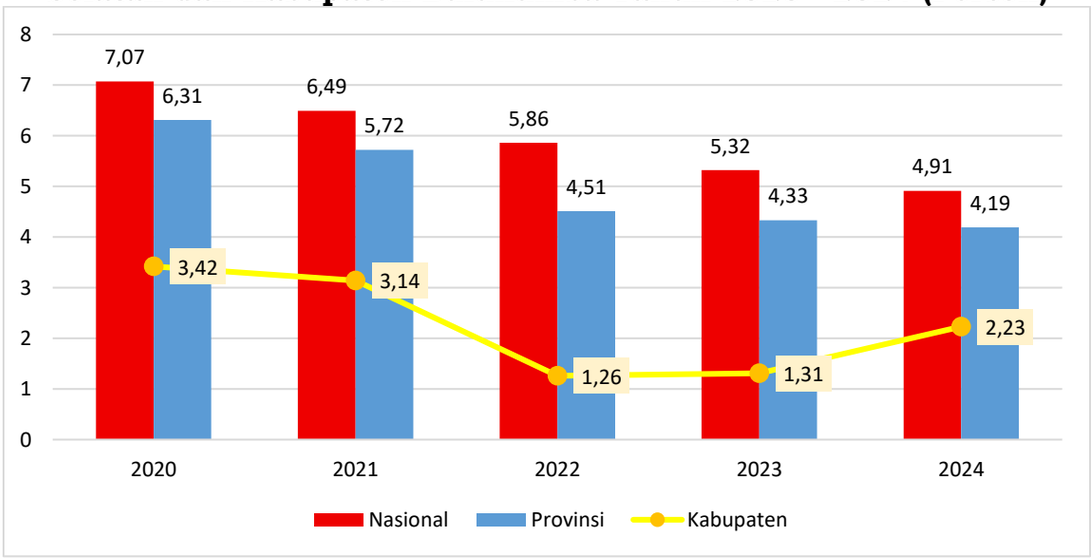
Di tingkat kabupaten, Indeks Gini turun dari 0,371 pada 2020 menjadi 0,329 pada 2024,hal ini menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Di tingkat provinsi, terjadi penurunan dari 0,382 pada 2020 menjadi 0,360 pada 2024, yang juga mencerminkan perbaikan kesenjangan ekonomi. Saat ini, Capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba masuk dalam kategori rendah.

Capaian Indeks Gini di Kabupaten Bulukumba dapat ditekan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, perluasan program perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta memastikan pembangunan infrastruktur merata.

2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya.

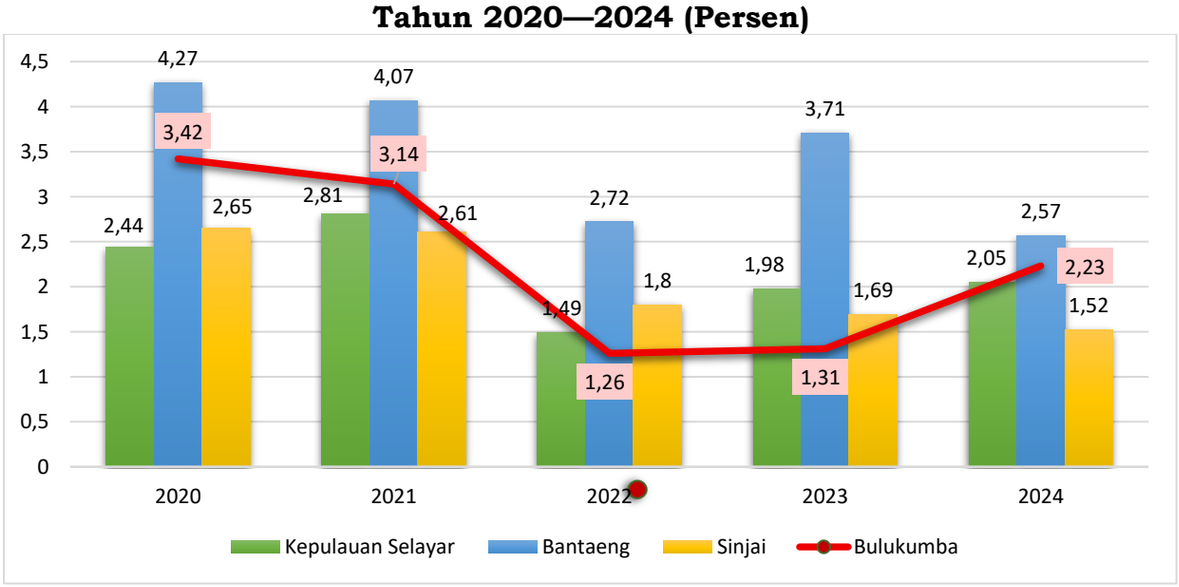
Grafik II-45
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase TPT Kabupaten Bulukumba 2024 sebesar 2,23 persen, naik 0,92 persen poin dibandingkan dengan 2023. Artinya, dari 100 angkatan kerja Bulukumba, terdapat sekitar 2-3 orang yang masuk kategori penganggur. Pada skala provinsi, TPT Kabupaten Bulukumba tahun 2024 berada pada urutan keempat terendah dibawah Enrekang (1,51), Sinjai (1,52), dan Kepulauan Selayar (2,05). Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Bantaeng, Selayar, dan Sinjai, TPT Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-46
Perbandingan TPT Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Persen)



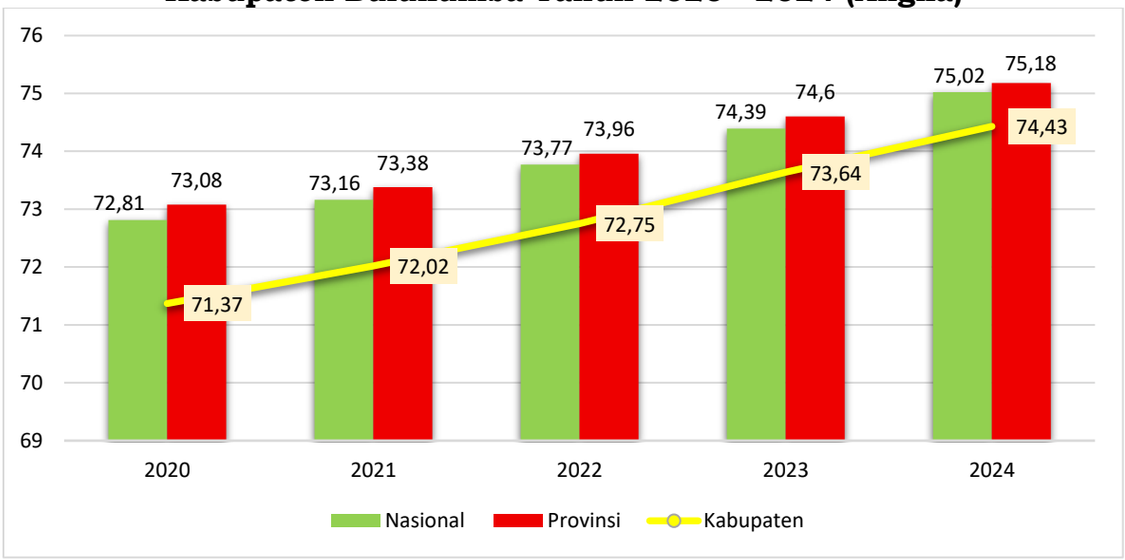
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IPM ini adalah nilai Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan Pengeluaran Perkapita. Pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kelompok diantaranya Skor IPM

> 80 (sangat tinggi), Skor IPM 70-80 (tinggi), Skor IPM 60-70 (sedang) dan Skor IPM < 60 (rendah).

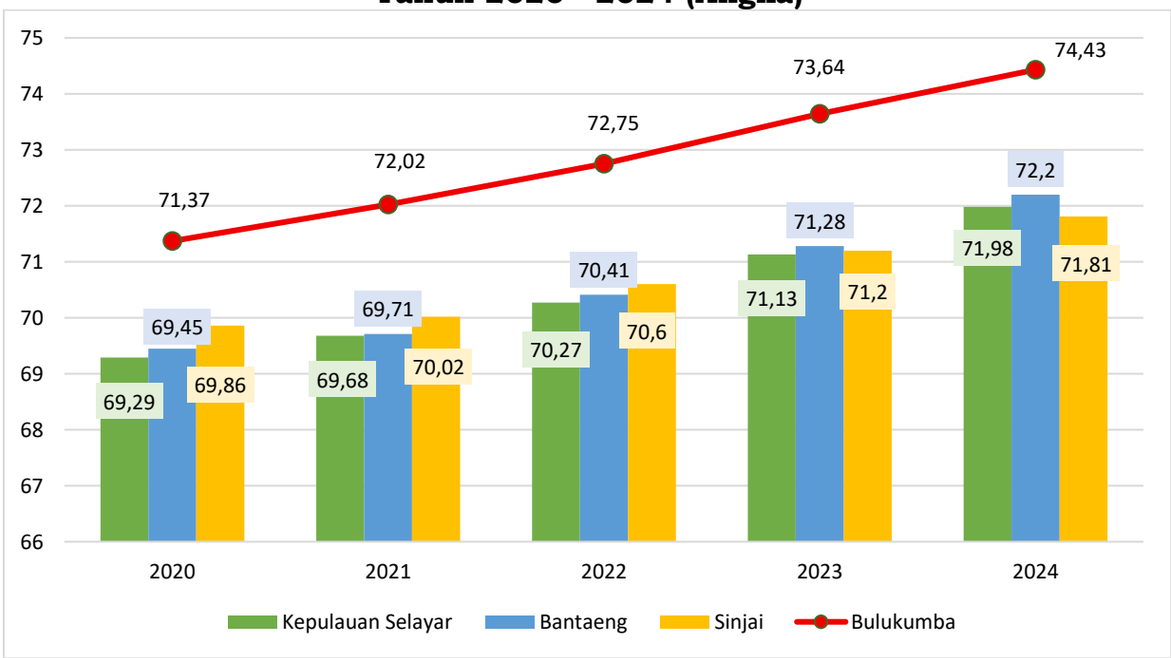
Grafik II-47
Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian IPM Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM Bulukumba selama 2021 sampai 2024 tergolong ke dalam IPM tinggi. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada skala provinsi, IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2024 berada pada urutan kesembilan tertinggi. Perbandingan IPM Kabupaten Bulukumba dengan kabupaten tetangga tahun 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-48
Perbandingan IPM Kabupaten Bulukumba dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

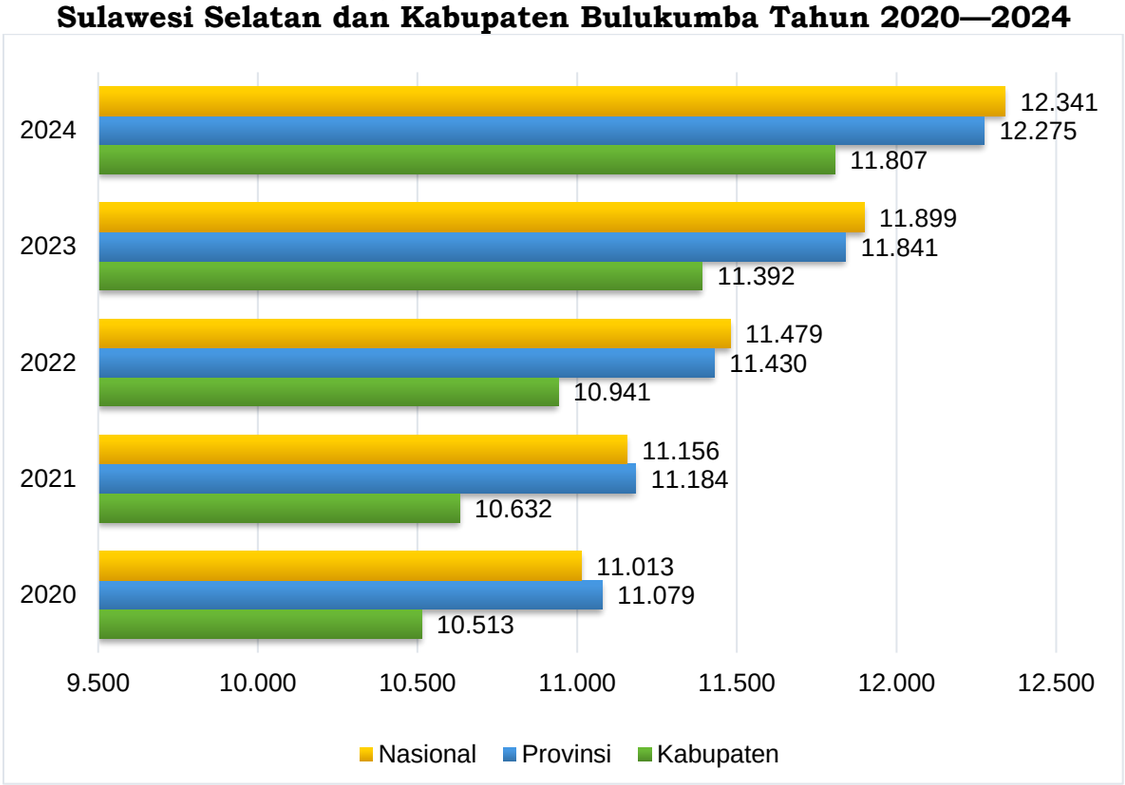
2.1.2.1.8 Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah

biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Grafik II-49
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

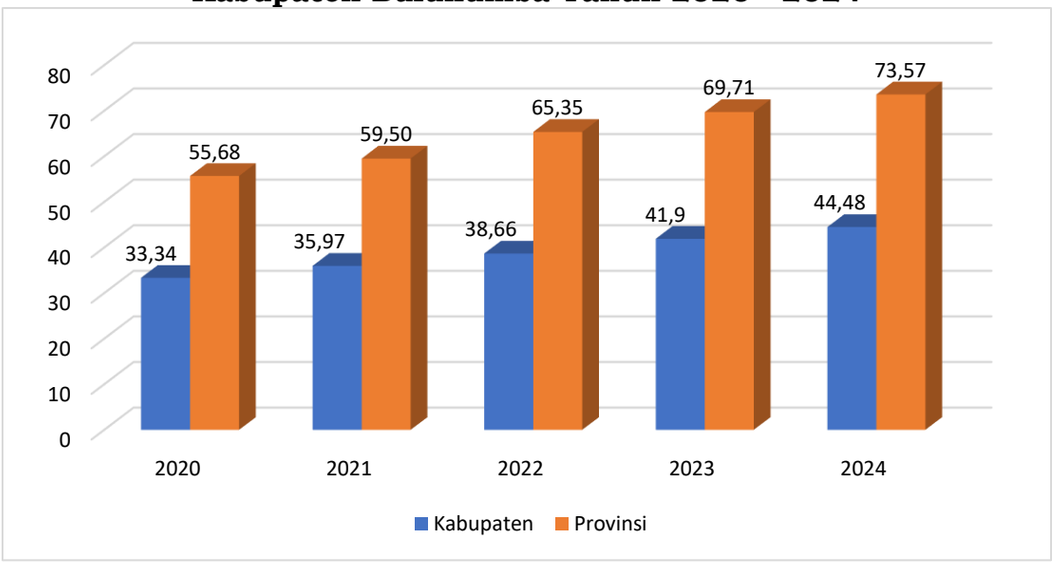
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 10.513 ribu rupiah per orang per tahun dan perlahan meningkat hingga tahun 2024 sebesar 11.807 ribu rupiah per orang per tahun, demikian halnya dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional juga mengalami peningkatan. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi yang meningkatkan harga barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya konsumsi akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Meskipun peningkatan pengeluaran per kapita bisa menjadi indikator perbaikan kesejahteraan, perlu diimbangi dengan upaya pengendalian inflasi, peningkatan daya beli masyarakat, serta kebijakan yang memastikan distribusi pendapatan yang merata agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2.1.9 PDRB Per Kapita ADHB

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan

rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. Perekonomian Kabupaten Bulukumba tahun 2020 hingga 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami tren peningkatan hingga 2024 mencapai 44,48 Juta Rupiah. Kenaikan ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif, 65,75 persen PDRB 2024 berasal dari Pertanian, Perdagangan dan Konstruksi. Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan seperti peningkatan infrastruktur, penguatan sektor UMKM, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi tahun 2020 hingga 2024 selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik II-50
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

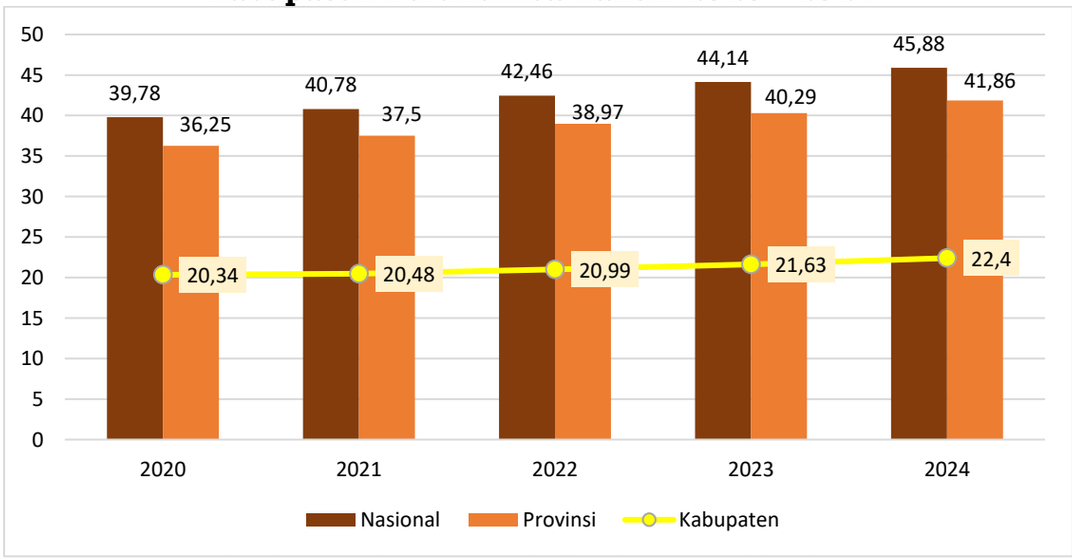


Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.1.10 PDRB Per Kapita ADHK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (ADHK) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, dan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Disamping itu juga PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Berikut PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sd 2024:

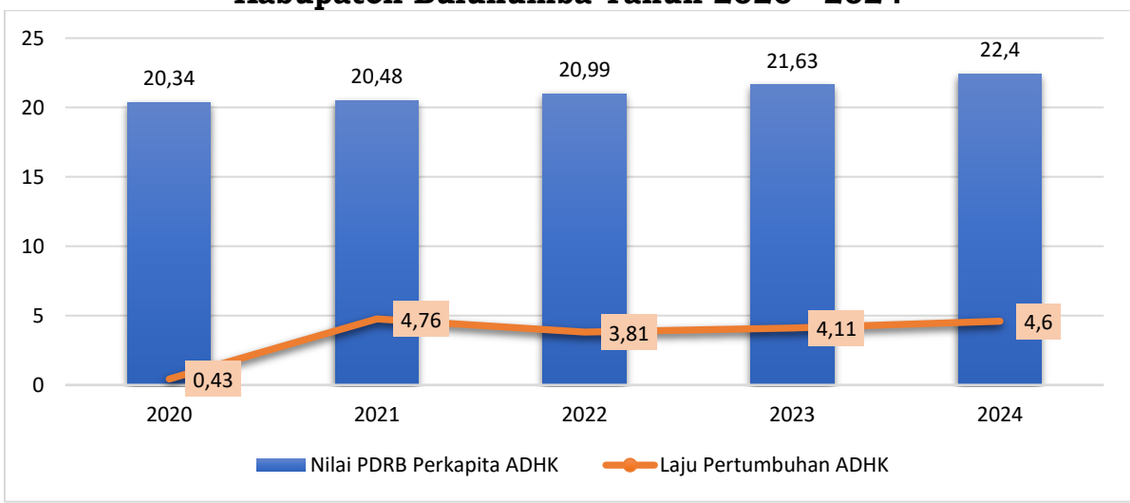
Grafik II-51
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2025

Peningkatan PDRB ADHK setiap tahun selama periode 2020—2024, menunjukkan perekonomian di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan setiap tahunnya, demikian juga dengan provinsi dan nasional. Peningkatan PDRB Kabupaten Bulukumba tertinggi pada tahun 2024 mencapai 22,40. Angka peningkatan PDRB ADHK untuk kabupaten, provinsi dan nasional terdapat ketimpangan sebesar 80 sd 100 persen.

Grafik II-52
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2025

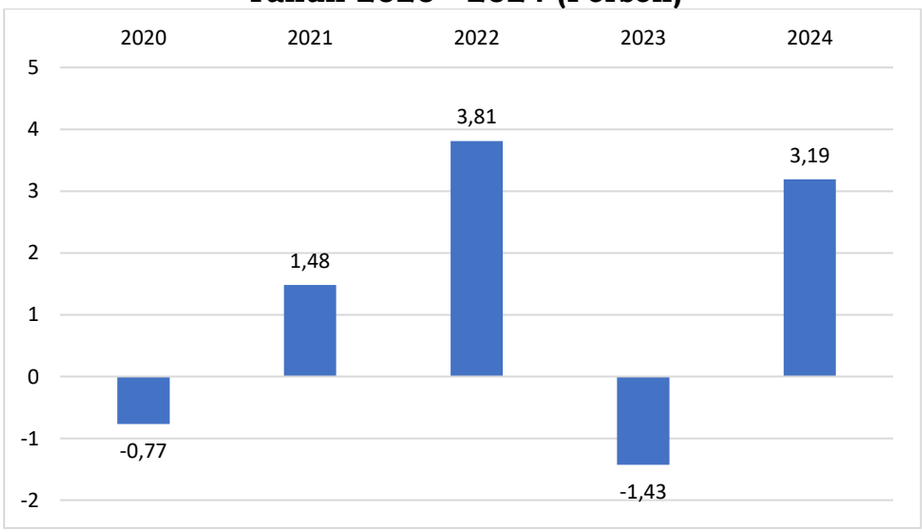
Secara kumulatif, Pertumbuhan Ekonomi Bulukumba tahun 2024 tumbuh 4,60 persen dibandingkan dengan tahun 2023. 65,75 persen PDRB tahun 2024 berasal dari 3 lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,74 persen dan Konstruksi sebesar 11,01 persen.

2.1.2.1.11 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian

Sub sektor pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan serta jasa pertanian dan oerburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 mengalami fluktuasi yang

menunjukkan adanya dinamika signifikan dalam sub sektor pertanian. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, gangguan produksi, atau perubahan harga komoditas.

Grafik II-53
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

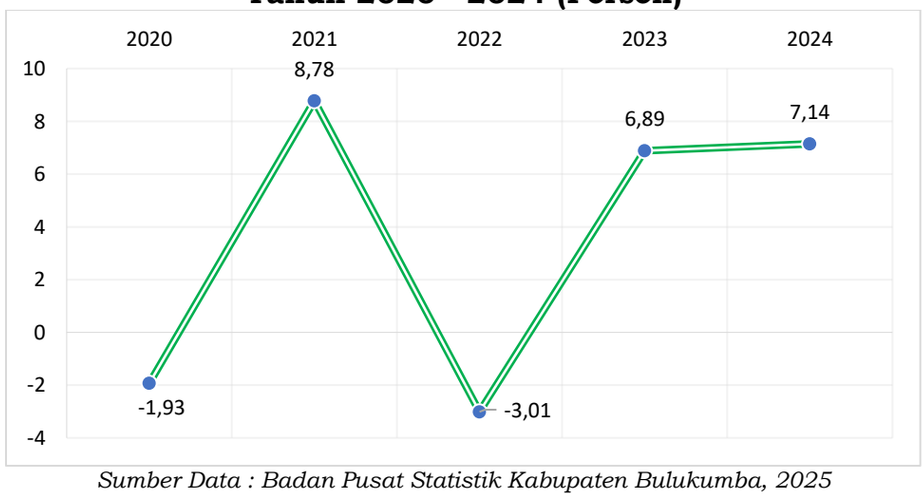


Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.1.12 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Subsektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 menjadi penyumbang PDRB terbesar dengan nilai kontribusi 12,01 persen. Meskipun tahun 2022 mengalami penurunan drastis, sub sektor perikanan berhasil meningkatkan kembali pertumbuhan hingga 7,14 persen tahun 2024.

Grafik II-54
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



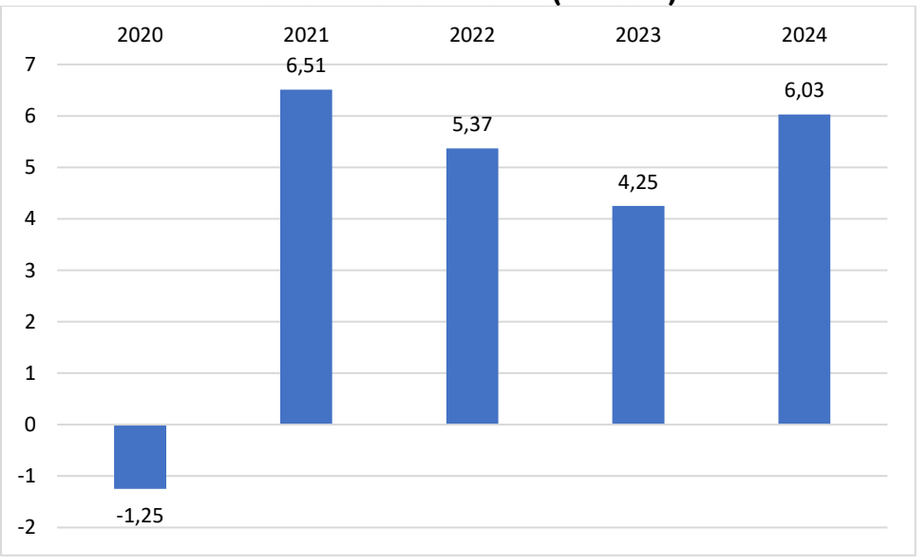
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.1.13 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren positif selama periode 2021–2024 setelah mengalami kontraksi sebesar -1,25 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,51 persen. Secara nominal, PDRB sub sektor perdagangan terus meningkat dari 2.463,87 miliar rupiah tahun 2020

menjadi 3.384,60 miliar rupiah tahun 2024. Nilai ini masih dipengaruhi oleh inflasi.

Grafik II-55
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua mencerminkan pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat, yang dihitung dari berbagai komponen utama, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) secara umum serta berdasarkan jenis kelamin, jumlah kematian ibu, prevalensi stunting pada balita, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (baik treatment coverage maupun treatment success rate), serta cakupan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional. Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian dan tantangan sektor kesehatan, terutama dalam menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel II-72
Cakupan Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

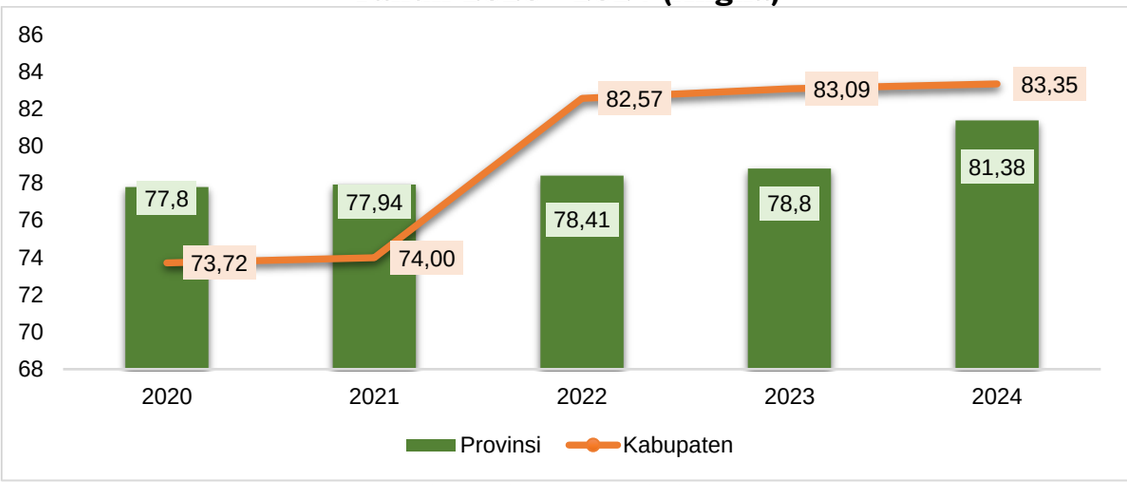
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
UHH (Thn)	73,06	73,25	73,67	74,01	74,18
UHH Laki-laki (Thn)	71,04	71,16	71,44	71,66	71,77
UHH Perempuan (Thn)	75,18	75,43	76,01	76,48	76,71
Jumlah Kematian Ibu	4	10	9	11	5
Prevalensi Stunting pada Balita (%)	-	30,1	28,0	33,7	25,2
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	28,9	40,1	50,1	53,6	45
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	86,1	80,8	88,9	88,9	78,00
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	71,83	66,87	90,37	94,27	97,09

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 2025

a) Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan adalah salah satu komponen dasar dalam mengukur kualitas hidup berdasarkan dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran indeks ini sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan masyarakat, membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan yang telah dijalankan. Indeks kesehatan Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan dari 73,72 poin tahun 2020 menjadi 83,35 poin tahun 2024.

Grafik II-56
Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)

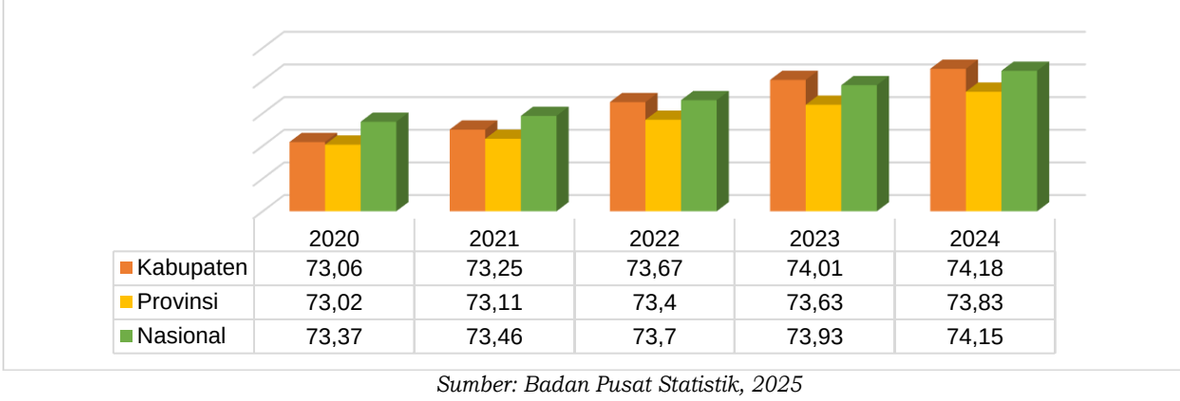


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

b) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH masuk dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat. Dimensi ini berkaitan dengan Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Morbiditas dan lain-lain.

Grafik II-57
Usia Harapan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	73,06	73,25	73,67	74,01	74,18
Provinsi	73,02	73,11	73,4	73,63	73,83
Nasional	73,37	73,46	73,7	73,93	74,15

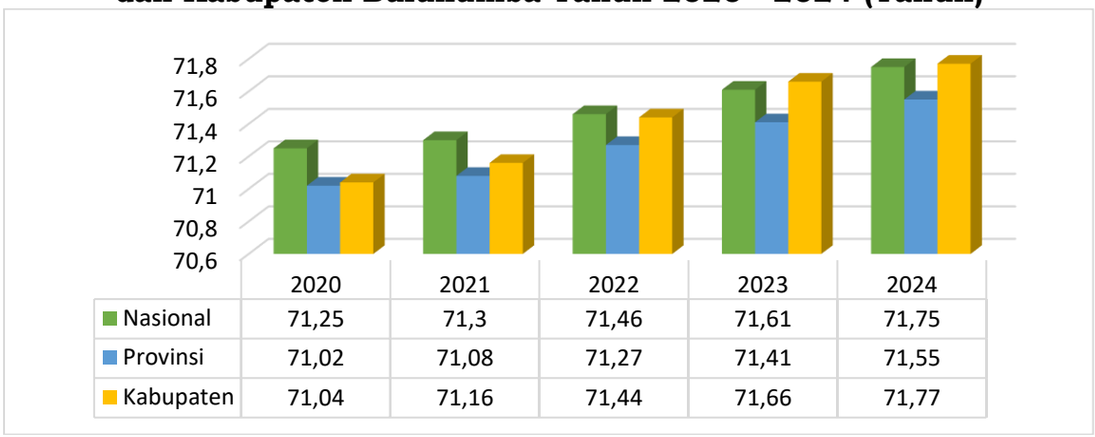
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 UHH Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional.

a. Usia Harapan Hidup Laki-laki

Usia Harapan Hidup (UHH) laki-laki merupakan indikator demografi yang mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup laki-laki di suatu wilayah. Secara umum, UHH laki-laki secara komparatif pada tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bulukumba selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kesadaran terhadap gaya hidup sehat, serta penguatan intervensi kesehatan berbasis gender. Dengan membandingkan ketiga wilayah, dapat dilihat posisi Kabupaten Bulukumba dalam konteks regional dan nasional dalam hal pencapaian indikator UHH laki-laki.

Grafik II-58
Usia Harapan Hidup Laki-laki Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	71,25	71,3	71,46	71,61	71,75
Provinsi	71,02	71,08	71,27	71,41	71,55
Kabupaten	71,04	71,16	71,44	71,66	71,77

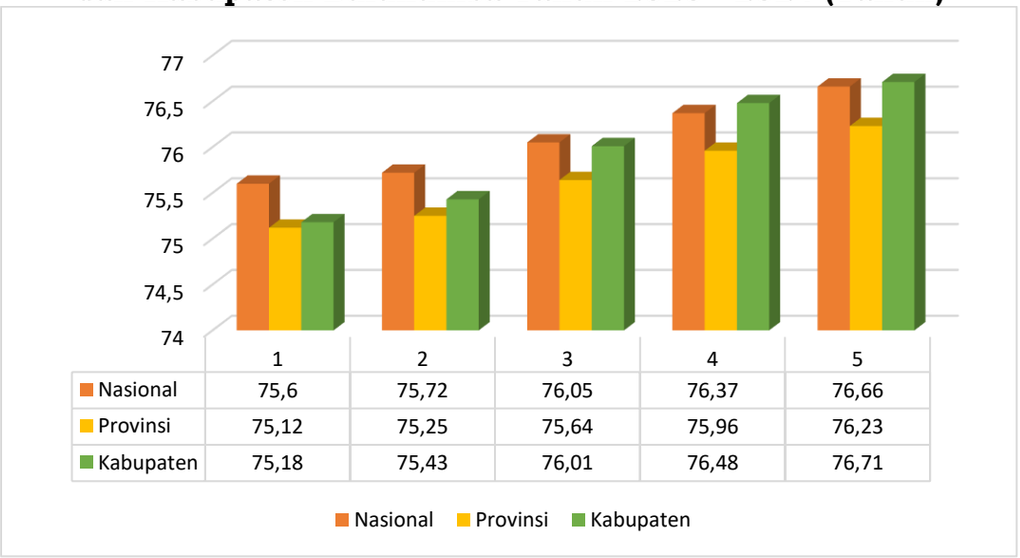
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2020–2024, UHH laki-laki di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari 71,04 tahun menjadi 71,77 tahun di tahun 2024, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka provinsi pada setiap tahun dan relatif sejalan dengan tren nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian UHH laki-laki di Kabupaten Bulukumba berada dalam kisaran yang kompetitif baik di tingkat provinsi maupun nasional. Konsistensi peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat laki-laki. Namun, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak hanya kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh kelompok usia dan wilayah.

b. Usia Harapan Hidup Perempuan

Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan adalah salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas kesehatan dan keberhasilan program kesehatan untuk perempuan di suatu wilayah. Data periode 2020–2024 di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten memperlihatkan tren perubahan UHH perempuan. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan pada ketiga wilayah tersebut, yang mencerminkan perbaikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan, seperti layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Dengan membandingkan data pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, dapat dianalisis kontribusi Kabupaten Bulukumba terhadap pencapaian UHH perempuan yang lebih baik dalam konteks regional. Untuk capaian UHH Perempuan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-59
Usia Harapan Hidup Perempuan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun)



	1	2	3	4	5
Nasional	75,6	75,72	76,05	76,37	76,66
Provinsi	75,12	75,25	75,64	75,96	76,23
Kabupaten	75,18	75,43	76,01	76,48	76,71

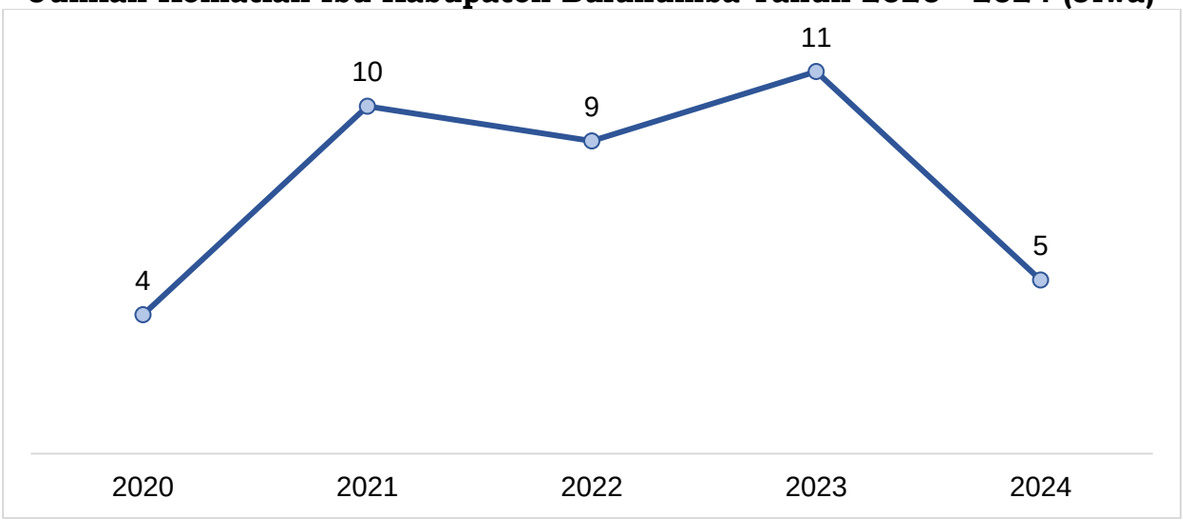
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa UHH perempuan di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. UHH perempuan di Kabupaten Bulukumba pada 2020 adalah 75,18 tahun dan meningkat menjadi 76,71 tahun di periode 2024, dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Meskipun UHH perempuan di Kabupaten Bulukumba sedikit lebih tinggi dibandingkan angka provinsi, namun masih berada sedikit di bawah angka nasional. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan yang signifikan dalam bidang kesehatan perempuan di Kabupaten Bulukumba. Upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, diharapkan dapat mempercepat pencapaian UHH perempuan yang lebih tinggi di masa mendatang.

c) Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan maternal dalam suatu wilayah. Tingginya jumlah kematian ibu mencerminkan beberapa kondisi atau masalah dalam sistem kesehatan dan masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, kualitas perawatan kesehatan, faktor-faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, kesehatan umum populasi termasuk prevalensi penyakit menular dan tidak menular serta akses terhadap air bersih, sanitasi yang baik, dan gizi yang memadai, serta efektivitas pengaturan kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan. Jumlah kematian ibu Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020—2024 mengalami fluktuatif. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 11 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-60
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa)



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

d) Prevalensi Stunting

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan *(growth faltering)* akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbanginya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai. Sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah makanan yang tersedia dalam keluarga sehingga turut menentukan status gizi keluarga tersebut, termasuk mempengaruhi pertumbuhan anak.

Kejadian balita pendek atau stunting merupakan kondisi balita memiliki tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih kurang dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting tergolong masalah gizi kronik yang disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi ekonomi, gizi ibu hamil, kesakitan pada bayi, kurang asupan gizi pada balita. Secara global, sekitar 1 dari 4 balita mengalami stunting. Kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seorang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak. Hal ini dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak secara permanen dan menyebabkan kerusakan yang lama.

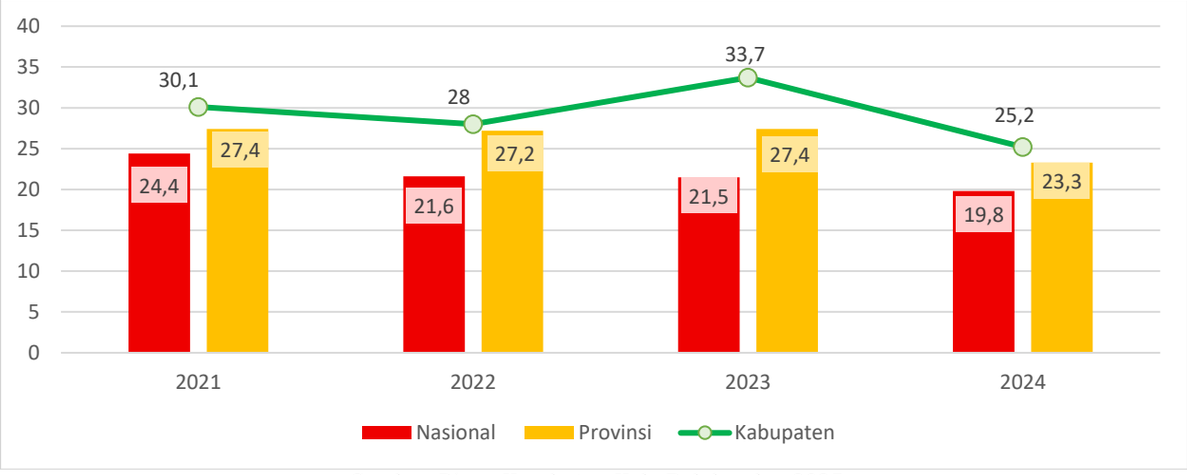
Kemiskinan dianggap menjadi faktor penting penyebab terjadinya stunting pada balita. Rumah tangga yang miskin tidak dapat memenuhi asupan gizi untuk anak nya, sehingga anak tersebut menjadi stunting. Dengan kondisi seperti itu, tumbuh kembang anak menjadi terhambat sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem-setara dengan USD1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Penurunan persentase kemiskinan ekstrim sejalan dengan penurunan stunting, maka dapat diasumsikan bahwa kemiskinan ekstrim dan stunting merupakan suatu permasalahan yang saling beririsan.

Ketersediaan kebutuhan rumah tangga dan jenis pangan yang dibeli tergantung dari pendapatan keluarga. Keluarga dengan pendapatan terbatas kurang memenuhi kebutuhan makanannya terutama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh. Jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi

pola pertumbuhan anak dan balita, jumlah anggota keluarga yang banyak tanpa diimbangi peningkatan pendapatan akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan yang tidak merata karena bisa jadi faktor pembagian makanan yang kurang adil dapat juga mengakibatkan balita tersebut mendapatkan jumlah makanan yang kurang, sehingga asupan gizinya pun kurang. Pola asuh keluarga yang salah seperti membiasakan anak yang lebih tua mendapatkan jumlah makanan atau asupan gizi yang lebih banyak dibandingkan anak yang lebih muda (balita) dapat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah kejadian stunting pada balita.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit sampai pada baduta. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka Kementerian Kesehatan, data yang tersedia untuk indikator prevalensi stunting mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-61
Prevalensi Stunting Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

Capaian revalensi stunting di Kabupaten Bulukumba masih cukup tinggi, namun cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2021 pravalensi stunting mencapai 30,8 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 25,2 persen. Capaian ini berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pravelensi stunting di Kabupaten Bulukumba diantaranya pada saat pengukuran masih menggunakan timbangan dacin sementara alat yang direkomendasikan adalah Antropometri, Sumber Daya Manusia yang belum terlatih dan bersertifikat, jumlah sasaran yang berkunjung ke Posyandu sedikit.

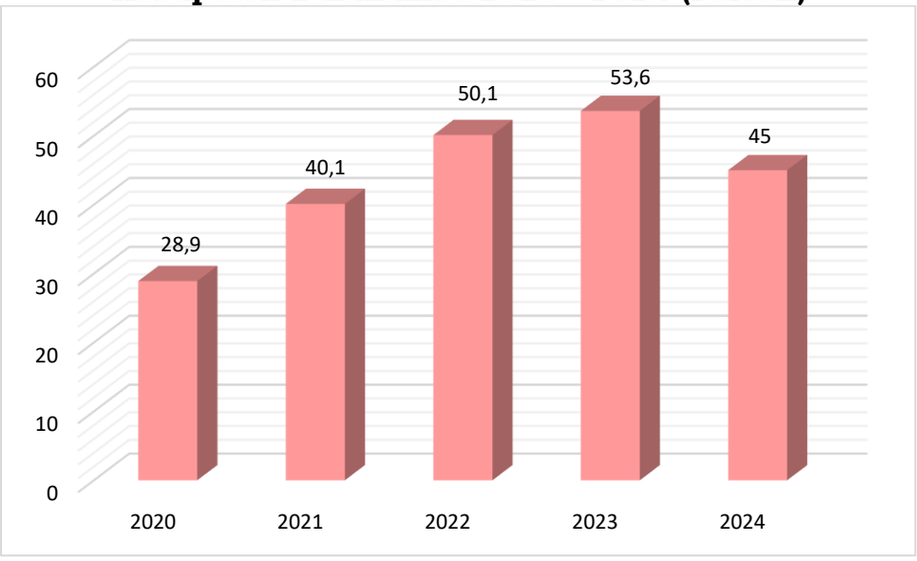
Untuk tahun 2024 berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba untuk percepatan penurunan stunting diantaranya Intervensi Spesifik berupa Pemberian PMT dan susu selain itu juga pemberian susu ibu hamil kepada ibu hamil yang kekurangan energi kronis (KEK). Kemudian Dukungan Kebijakan

dan Anggaran Daerah Tingkat Kabupaten dengan mengalokasikan anggaran penurunan Stunting ke dalam APBD Kabupaten dan tersebar di beberapa Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab layananmstunting sebesar Rp. 109.101.744.241,- yang terdiri dari dana transfer (DAK, DAU, DBH, dll) sebesar Rp22.863.602.374, APBD murni : Rp. 194.812.000 dan dana lain-lain (Kemitraan, CSR, APBN) : Rp. 86.043.329.867,-.

e) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan TBC dapat diperkirakan berdasarkan jumlah kasus yang ditemukan dan kasus kambuh yang terdeteksi dan diobati pada tahun tertentu, dibagi dengan perkiraan jumlah kejadian kasus TBC pada tahun yang sama. Cakupan penemuan dan pengobatan TBC di Kabupaten Bulukumba pada periode 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-62
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Bulukumba 2020—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

Cakupan penemuan dan pengobatan TBC di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2023 sebesar 53,60 persen dan turun hingga 45 persen pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang buruk tentang kasus tuberkulosis, dukungan lintas program dan lintas sektor yang belum maksimal, belum adanya regulasi berupa perda atau perbup sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis serta belum adanya dokumen rencana aksi daerah tentang penanggulangan tuberkulosis. Untuk terus meningkatkan cakupan dan efektivitas penanganan tuberkulosis, perlu dilakukan penguatan sistem surveilans kesehatan, edukasi masyarakat tentang gejala dan pencegahan, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat dan terapi yang berkelanjutan.

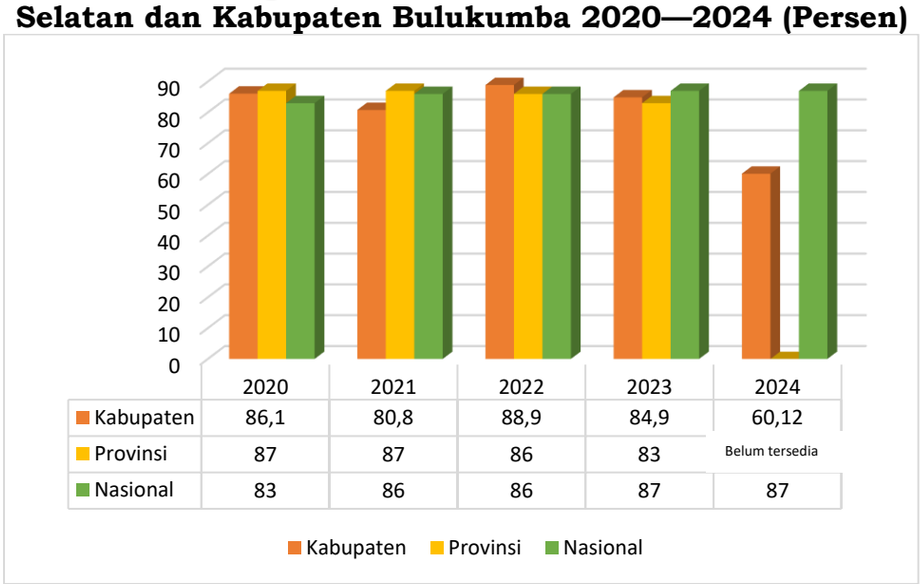
f) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Penanggulangan atau pengobatan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat

Tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) pasien tuberkulosis merupakan jumlah pasien tuberkulosis semua kasus yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Pasien tuberkulosis paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pasien tuberkulosis yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas program pengendalian TB di suatu wilayah. Pengobatan TB yang efektif merupakan upaya penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular ini. Dengan melihat tren dari tiga wilayah yang berbeda, dapat dianalisis perbandingan capaian antara Kabupaten Bulukumba dengan tingkat provinsi dan nasional, serta faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi angka keberhasilan pengobatan tersebut. Adapun angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-63
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba 2020—2024 (Persen)



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	86,1	80,8	88,9	84,9	60,12
Provinsi	87	87	86	83	Belum tersedia
Nasional	83	86	86	87	87

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

Selama periode 2020–2024, angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Bulukumba menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, angka keberhasilan pengobatan mencapai 86,1 persen, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 menjadi 60,12 persen. Penurunan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis disebabkan oleh stigma masyarakat yang buruk tentang kasus tuberkulosis, dukungan lintas program dan lintas sektor yang belum maksimal, belum adanya regulasi berupa perda atau perbup sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis serta belum adanya dokumen rencana aksi daerah tentang penanggulangan tuberkulosis. Meskipun demikian, angka keberhasilan pengobatan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 dan 2023 masih cukup tinggi, yakni 88,9 persen dan 84,9 persen, yang menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut program pengobatan berjalan dengan baik. Jika dibandingkan dengan angka nasional yang

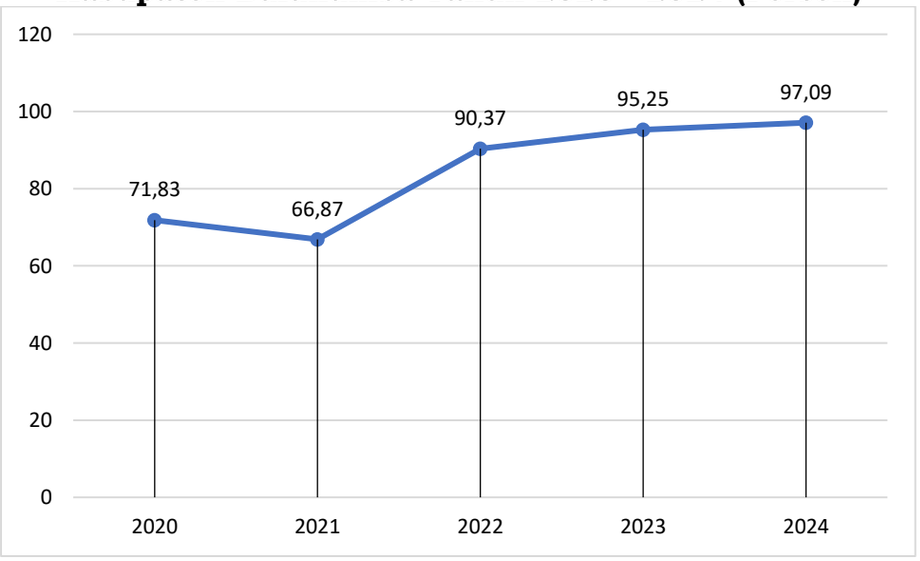
stabil di sekitar 87 persen pada tahun 2023 dan 2024 serta angka provinsi pada angka 83 persen, Kabupaten Bulukumba perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab penurunan yang terjadi pada tahun 2024, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif dalam upaya pengendalian TB.

g) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Cakupan kepesertaan nasional untuk tahun 2023 telah mencapai angka 95,25 persen, sekitar lebih dari 264 juta orang telah mendapatkan manfaat jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan mencapai angka sebesar Rp. 113 triliun dan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30 triliun dengan total 150 triuliun dengan target 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2024. Adapun persentase cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-64
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

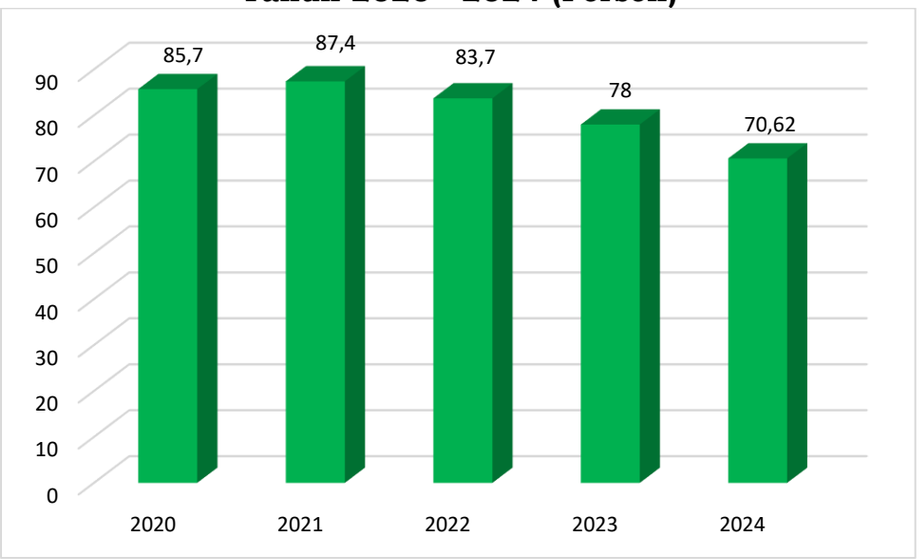
Selama periode 2020 hingga 2024, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, cakupan JKN tercatat sebesar 71,83 persen, namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,09 persen. Lonjakan besar terlihat pada tahun 2022, dengan angka cakupan mencapai 90,37 persen, dan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi program JKN di Kabupaten Bulukumba dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 hingga 2024 diterapkan peraturan kesehatan yang melibatkan dan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-

Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sehingga diperlukan kembali registrasi atau administrasi untuk pembuatan KIS bagi masyarakat. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal atau kendala dalam pelaksanaan, pencapaian cakupan yang hampir mencapai 100 persen pada tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hampir seluruh penduduk terakses oleh layanan jaminan kesehatan nasional.

h) Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Presentase persalinan di fasilitas keehatan adalah jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, adanya kebijakan mendorong persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ditekankan untuk menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi. Adapun manfaat bersalin di fasyankes diantaranya ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, Ibu dapat memperoleh pelayanan KB segera setelah melahirkan, serta ibu dan bayi mendapatkan penanganan segera jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi.

Grafik II-65
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, 2025

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020 sebesar 85,7 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 70,6 persen. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis terlatih yaitu dokter, bidan dan tenaga medis lainnya, lebih banyak dibantu oleh bidan dibandingkan oleh dokter.

i) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Kusta

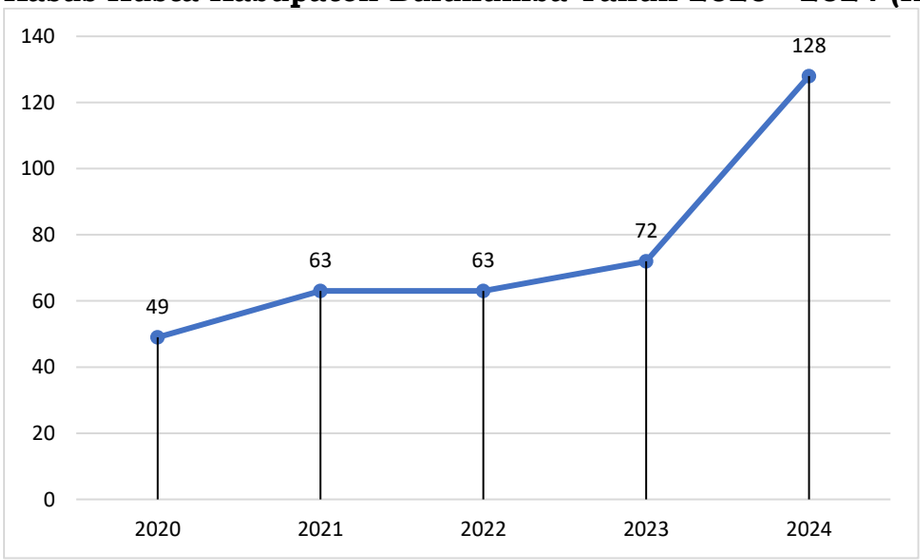
Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau Morbus Hansen. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri ini dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat penderitanya batuk atau bersin. Angka kejadian kusta di Indonesia termasuk yang tertinggi. Berdasarkan data WHO tahun 2020, jumlah kasus kusta di Indonesia menduduki

peringkat ketiga terbesar di dunia, yaitu sebanyak 8 persen. Selain itu, terdapat sebanyak 9,14 persen dari total kasus baru kusta terjadi pada anak-anak.

Kusta umumnya dapat ditangani dan jarang menyebabkan kematian. Namun, penyakit ini berisiko menyebabkan cacat. Akibatnya, penderita kusta berisiko mengalami diskriminasi yang dapat berdampak pada kondisi psikologisnya. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium leprae*. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernapasan (*droplet*), yaitu ludah atau dahak, yang keluar saat batuk atau bersin.

Untuk kasus penyakit kusta di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan jumlah kasus yang dipengaruhi oleh stigma atau perilaku penderita yang enggan berobat dan adanya rasa malu. Adapun data kasus kusta di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik II-66
Data Kasus Kusta Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Kasus)



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 2025

Data kasus kusta di Kabupaten Bulukumba, dari 49 kasus pada tahun 2020 menjadi 128 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya upaya deteksi dini, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai gejala dan penularan kusta, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di daerah tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi masyarakat tentang kusta, peningkatan akses layanan kesehatan, pelatihan tenaga medis dalam deteksi dini, serta penguatan program pengobatan dan rehabilitasi bagi penderita agar penularan dapat ditekan secara efektif.

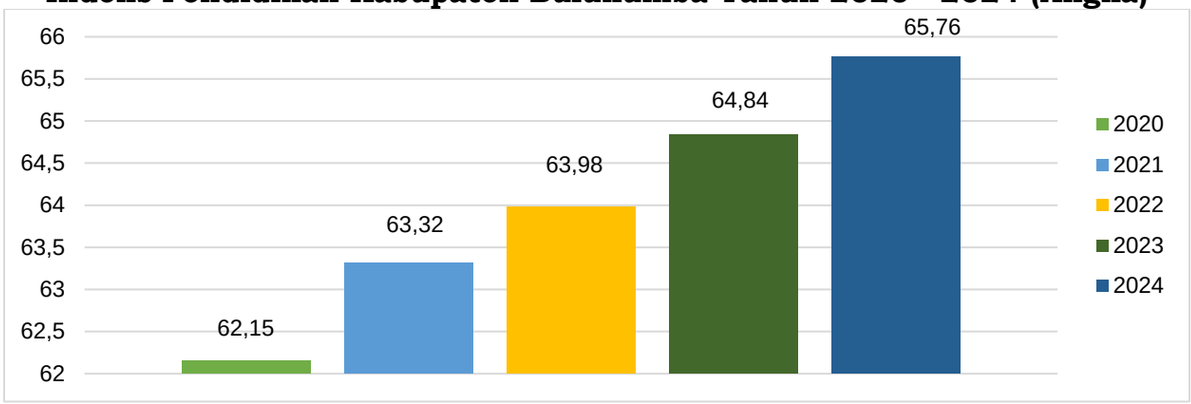
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di presentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan dapat dialami oleh penduduk usia 7 tahun keatas dimasa yang akan datang.

Grafik II-67
Indeks Pendidikan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber Data : BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

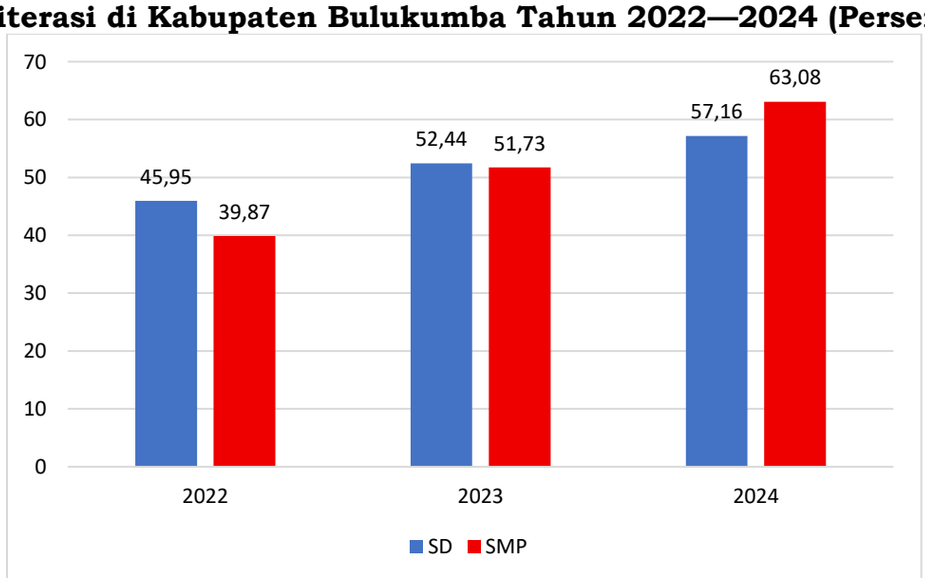
Berdasarkan grafik diatas, Indeks pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mencapai angka 62,15 dan meningkat setiap tahunnya sampai pada angka 65,76 di tahun 2024. Akan tetapi masih perlu mendapat perhatian lebih serius baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan maupun kualitas pendidikan.

b) Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa

Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang penting bagi siswa. Kemampuan literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Bulukumba masih perlu ditingkatkan. Berikut informasi nilai kompetensi literasi dan numerasi pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun 2022—2024 berdasarkan hasil Rapor Pendidikan untuk Kabupaten Bulukumba.

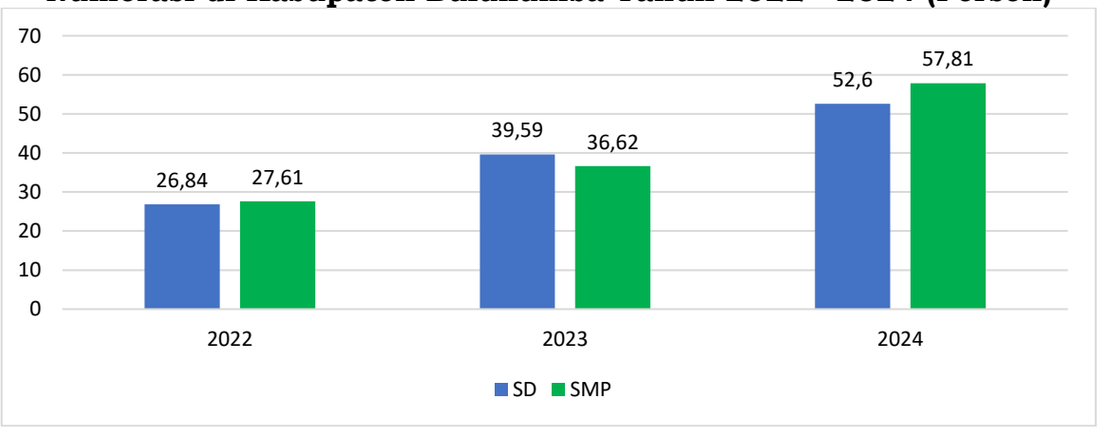
Grafik II-68
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Persen)



Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Skor kompetensi literasi untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Tahun 2024, 57,16 persen peserta didik SD memiliki kompetensi literasi di atas minimum dan 63,08 persen peserta didik SMP yang termasuk dalam kategori sedang. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendorong lebih banyak peserta didik mencapai dan melampaui kompetensi minimum tersebut.

Grafik II-69
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Persen)



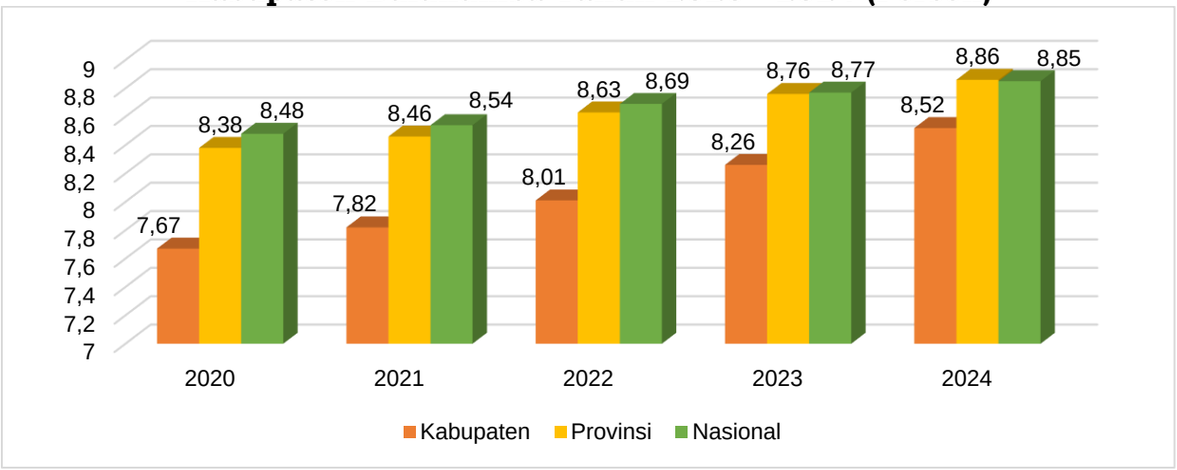
Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Hasil capaian kemampuan numerasi menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik di Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan. Sebanyak 52,6 persen (kategori sedang) peserta didik jenjang SD telah memiliki kompetensi numerasi di atas standar minimum, sedangkan 57,81 persen (kategori sedang) peserta didik jenjang SMP. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kemampuan numerasi peserta didik masih berada pada kategori kurang.

c) Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu aspek dalam pengkuran IPM adalah rata-rata lama sekolah. Lama sekolah yang menggambarkan dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2020 hingga 2024. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bulukumba yang lebih baik. Hingga tahun 2024 mencapai 8,52 persen.

Grafik II-70
Rata Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

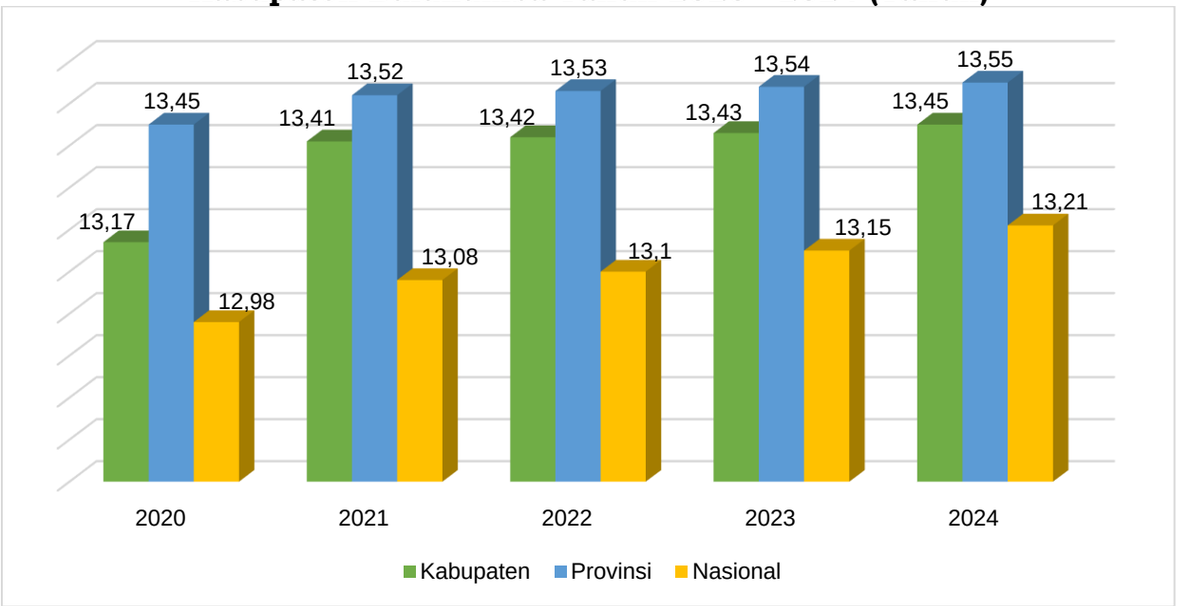


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

d) Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik II-71
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

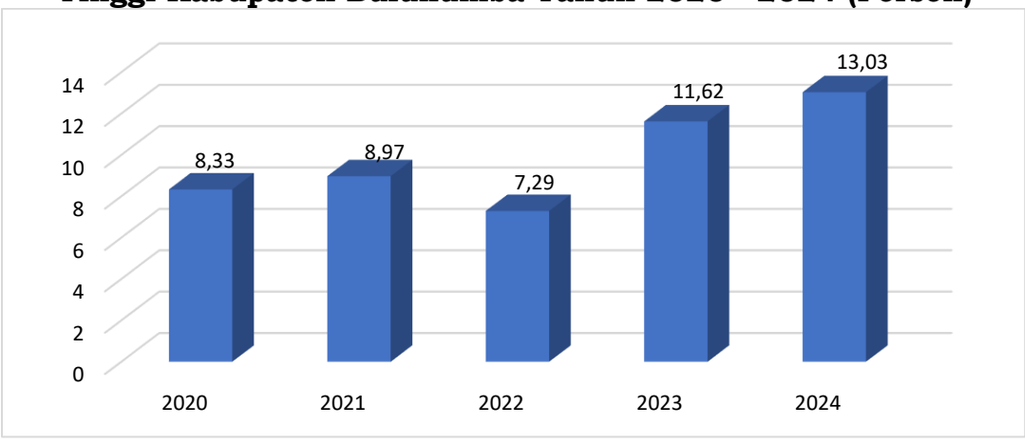
Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir bergerak naik secara perlahan dari 13,17 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,45 tahun pada tahun 2024. Artinya, seorang anak berumur 7 tahun keatas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 13 tahun atau minimal Diploma Satu (D1) pada perguruan tinggi. Penyebab utama peningkatan ini yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta kebijakan wajib belajar yang semakin diperkuat. Namun, pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh tantangan seperti keterbatasan ekonomi keluarga tingkat putus sekolah akibat faktor sosial atau budaya. Untuk mempercepat peningkatan AHLS,

diperlukan strategi seperti pemberian beasiswa lebih luas, peningkatan kualitas dan aksesibilitas sekolah di daerah terpencil, kampanye kesadaran pentingnya pendidikan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan anak-anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

e) Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan jenjang perguruan tinggi. Jenjang perguruan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 terapan, dan S3. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen bila seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Grafik II-72
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Bulukumba Dalam Angka, 2025, diolah

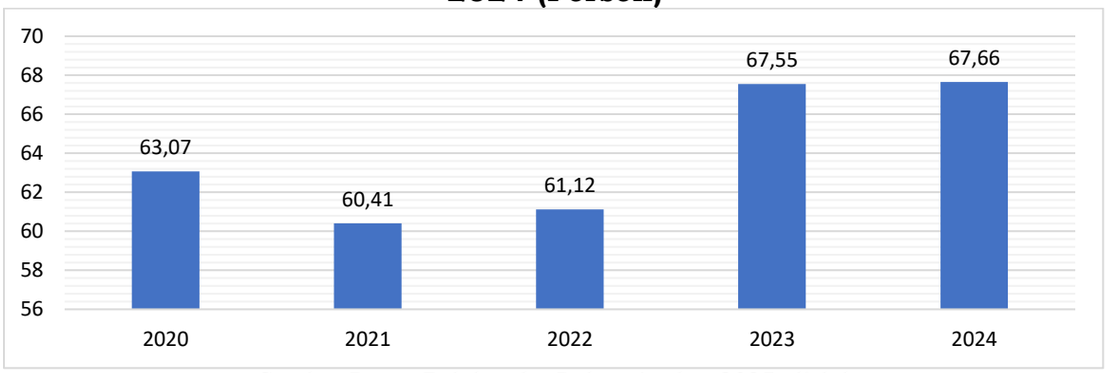
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Bulukumba meningkat dari 8,33 persen pada tahun 2020 menjadi 13,03 persen pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan pada 2022. Proporsi ini masih relatif rendah, mengindikasikan masih banyak penduduk yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini terjadi karena biaya kuliah yang tidak terjangkau bagi banyak keluarga, tingkat putus kuliah atau mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya, migrasi keluar daerah, di mana penduduk usia produktif meninggalkan daerah untuk mencari pekerjaan atau pendidikan di wilayah lain. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, memperbanyak perguruan tinggi dan sekolah vokasi lokal, serta mengadakan program pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, kampanye kesadaran pentingnya pendidikan dan kerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja juga dapat membantu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Bulukumba.

f) Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui akses pendidikan yang berkualitas dan merata dengan sasaran meningkatkan jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Tahun 2020 sampai 2024 proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang

ditamatkan sebesar 63,07 persen pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 67,66 persen.

Grafik II-73
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

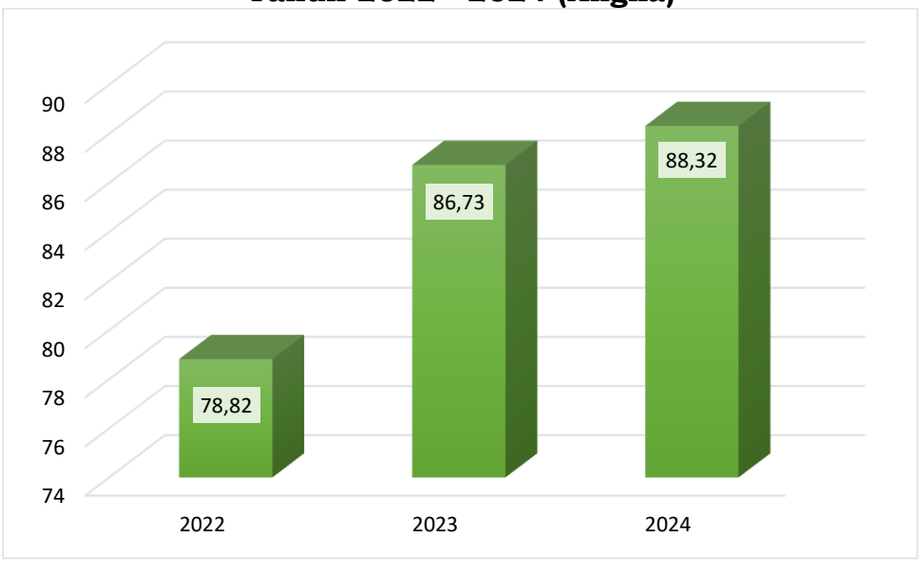


Sumber Data : Bulukumba Dalam Angka, 2025, diolah

g) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan literasi di suatu daerah, mencakup kemampuan membaca, menulis, dan pemahaman informasi di kalangan masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur bagaimana keterampilan literasi berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Terdapat 5 kategori penilaian yaitu: sangat rendah (0-0,28); rendah (0,30-49,9); sedang (50-79,9); tinggi (80-89,9) dan sangat tinggi (90-100).

Grafik II-74
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka)



Sumber: Dinas Pe rpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, 2025

Indeks pembangunan literasi masyarakat mulai terdata pada tahun 2022 oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulukumba, berdasarkan hal tersebut pada tahun 2022 Kabupaten Bulukumba berada pada kategori sedang sebesar 78,82, kemudian mengalami peningkatan sebesar 9,5 persen pada tahun 2024 sebesar 88,32 persen atau berada dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjang dengan ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya anggota perpustakaan,

keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan instrumen utama dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi, bencana, dan berbagai risiko sosial lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, sistem perlindungan sosial yang adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin.

Kabupaten Bulukumba menghadapi berbagai tantangan sosial yang memerlukan respon kebijakan yang cepat, fleksibel, dan berbasis data. Oleh karena itu, pendekatan adaptif dalam perlindungan sosial harus mampu menjangkau kebutuhan yang dinamis dan beragam, serta meningkatkan efektivitas intervensi sosial agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi perlindungan sosial di Kabupaten Bulukumba, termasuk kebijakan, program, serta capaian dan kendala yang dihadapi. Harapannya, dokumen ini dapat menjadi dasar dalam penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih tanggap terhadap perubahan dan mampu melindungi martabat serta hak dasar seluruh lapisan masyarakat

a) Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas pada Dinas Sosial mencakup pelayanan kebutuhan dsasar yang berfokus pada penyandang disabilitas terlantar atau tidak mampu. Pemberian pelayanan dasar tersebut mencakup bantuan permakanan, pemberian alat bantu dan pelayanan rujukan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Sosial telah melaksanakan program terkait aspek perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan disabilitas, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang komprehensif. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki akses terhadap berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial dan pemberdayaan, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk kesempatan penyandang disabilitas dapat bekerja baik di sektor formal maupun sektor nonformal.

Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang mencakup kebutuhan dasar dan dalam pemberian bantuan sosial mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial RI. Saat ini jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba sebanyak 1.627 jiwa. Adapun jenis bantuan dan pelayanan yang diberikan bagi penyandang disabilitas berupa bantuan permakanan, alat bantu berupa tongkat dan kursi roda, Bantuan Usaha Eknomi Produktif (UEP) dan pemberian layanan rujukan. Selain itu terdapat juga bantuan atau program dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH)/BPNT dan BPJS kesehatan.

Intervensi program dan kegiatan berupa bantuan layanan dasar dan bantuan usaha, pelatihan teknis dan penciptaan lapangan kerja yang ramah disabilitas adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas.

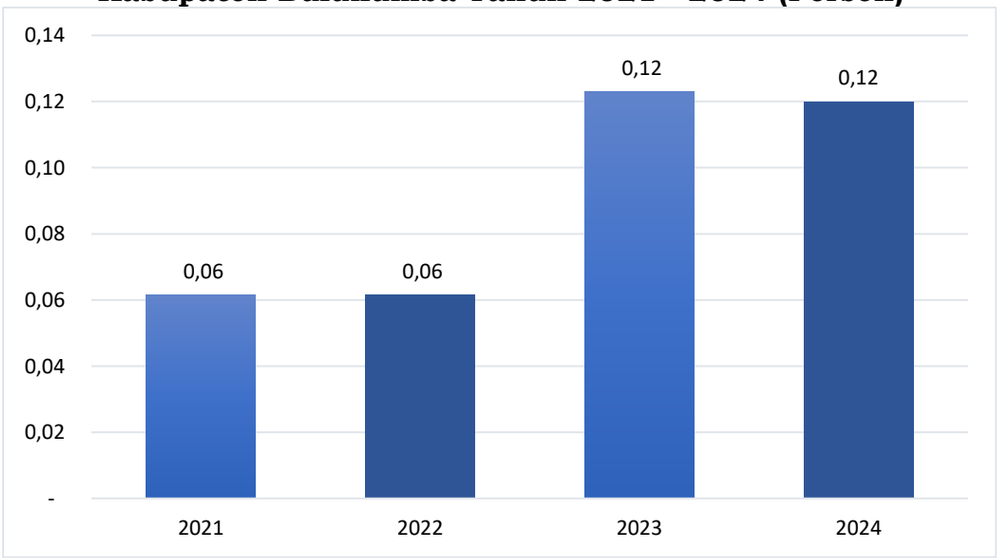
Tabel II-73
Persentase Penyandang Disabilitas Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Persentase Per Kecamatan (%)
1	Bonto Bahari	104	6,39
2	Bonto Tiro	141	8,67
3	Herlang	151	9,28
4	Kindang	78	4,79
5	Rilauale	162	9,96
6	Ujung Bulu	123	7,56
7	Bulukumpa	164	10,08
8	Gantarang	197	12,11
9	Kajang	272	16,72
10	Ujungloe	235	14,44
Bulukumba		**1.627**	**100,00**

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2025

Adapun jumlah penyandang disabilitas terbesar berada di Kecamatan Kajang, dan terendah di Kecamatan Kindang. Dari 1.627 penyandang disabilitas, terdapat 2 (dua) orang yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Bulukumba sehingga persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal sebesar 0,12 persen pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,06 persen pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Swasta untuk lebih memberi ruang kepada penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di sektor formal sesuai dengan keahlian masing-masing. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-75
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen)



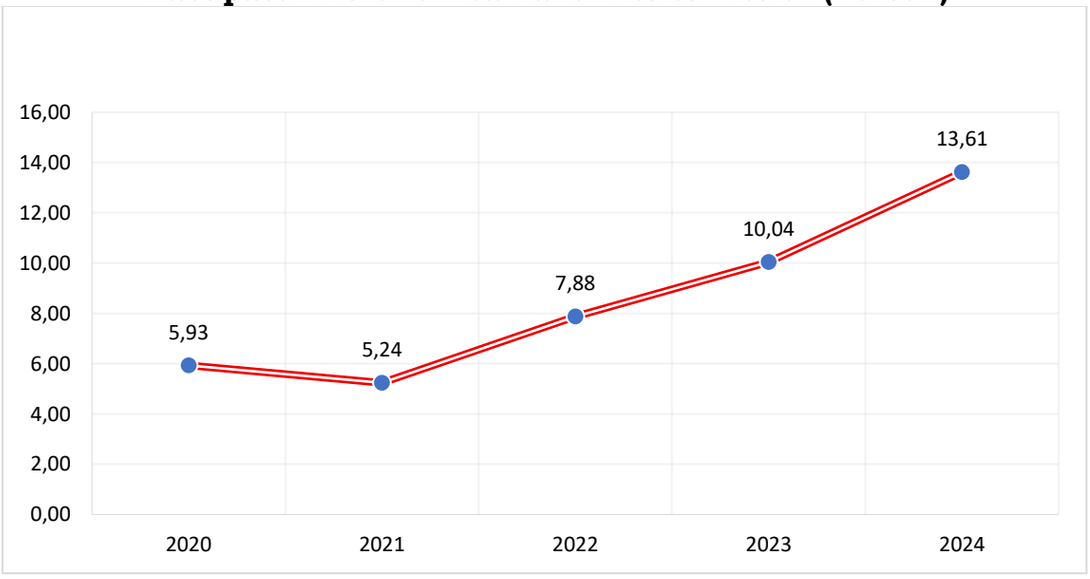
Sumber Data : Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, 2025

b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengacu pada jumlah pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial yang ditawarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini meliputi berbagai jenis perlindungan sosial untuk pekerja, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan Bulukumba terus berupaya mempercepat

pencapaian *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) dengan membuat kebijakan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan fokus pada perlindungan pekerja rentan di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas serta tenaga Non ASN, hal Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan.

Grafik II-76
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, diolah, 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020—2024 mengalami peningkatan namun belum mencapai *Universal Coverege* Kepesertaan Jamsostek sebesar 99,5 persen dari total jumlah semesta penduduk bekerja. Untuk tahun 2020 baru mencapai 5,93 persen kemudian meningkat menjadi 13,61 persen tahun 2024.

Dalam pencapaian target *Universal Coverege Jamsostek* (UCJ) pemerintah Kabupaten Bulukumba akan melakukan upaya dan langkah langkah strategis melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta berbagai stakeholder seperti perusahaan, UMKM, kepala desa, dan asosiasi pekerja untuk memaksimalkan cakupan perlindungan sosial, disamping itu juga melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja dalam program Jamsostek serta membangun kemitraan dengan kelompok usaha mikro dan komunitas pekerja untuk mendukung pendaftaran massal dan memberikan pendampingan agar seluruh anggota terlindungi.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan

superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Selama ini, pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) belum dilakukan pada level kabupaten, melainkan hanya diukur pada tingkat nasional maupun provinsi. Pengukuran indikator ini penting untuk memperoleh data yang lebih akurat, mendalam, dan relevan sebagai dasar dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan serta program pembinaan kerukunan umat beragama yang lebih tepat sasaran.

b) Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. Pengukuran indeks ini dimulai pada tahun 2024 dengan capaian Kabupaten Bulukumba sebesar 0,76 poin.

c) Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi

Pemerintah Daerah berkomitem dalam memberikan dukungan /fasilitasi aspek keagamaan, termasuk komitmen dalam mendukung penguatan nilai-nilai keagamaan melalui kebijakan publik yang inklusif. Salah satu inisiatif awal yang dilakukan adalah penyusunan regulasi keagamaan dalam kerangka Crash Program keagamaan telah dimulai sejak awal tahun 2002 yang bertujuan memperkuat kehidupan sosial masyarakat melalui penginternalisasian nilai-nilai moral dan spiritual.

Beberapa Peraturan Daerah telah dibuat dalam konteks pengaturan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari upaya penguatan karakter masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan peran aktif tokoh agama serta organisasi keagamaan yang berkembang di Daerah ini. Penetapan regulasi tersebut juga memperhatikan koridor hukum nasional serta prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara. Regulasi Daerah yang mengatur praktik-praktik sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat, tata cara berpakaian di lingkungan pendidikan, pengendalian konsumsi minuman beralkohol, serta pembinaan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik. Semua kebijakan tersebut disusun dalam kerangka pembangunan sosial budaya yang inklusif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebangsaan dan supremasi hukum nasional. Adapun beberapa Peraturan Daerah yang ditetapkan antara lain:

Tabel II-74
Penetapan Perda Tentang Keagamaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No	Nama Perda	Tanggal Penetapan
1	Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penjualan Minuman Keras	12 Maret 2002
2	Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pakaian Muslim dan Muslimah di lingkungan pendidikan	25 Agustus 2003

No	Nama Perda	Tanggal Penetapan
3	Perda Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin	25 Agustus 2003
4	Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	19 Oktober 2015
5	Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Jemaah Haji	9 Oktober 2017
6	Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren	3 Juli 2025

Sumber : Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

Penerbitan peraturan ini dipahami sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berorientasi pada pembentukan karakter masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi konstitusi, serta memperhatikan keberagaman masyarakat Kabupaten Bulukumba. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan dinamika sosial dan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan. Pembentukan kebijakan keagamaan diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia seutuhnya, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, dan menjunjung nilai-nilai universal yang hidup dalam masyarakat lokal, dengan tetap mempehatikan prinsip hak asasi manusia, kebinekaan, dan dasar negara Pancasila.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkarakter serta memperkuat ketahanan sosial berbasis nilai-nilai religius, Pemerintah Daerah secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan keagamaan yang diatur melalui Peraturan Daerah. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang periode tahun 2020 hingga 2024 dan menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi kuantitas perda yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) jenis kegiatan utama yang mendapatkan fasilitasi dan dukungan pemerintah daerah:

Tabel II-75
Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Uraian Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pelaksanaan MTQ TK Kabupateb dan STQH Tk. Provinsi	Kali	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100
2	Pengajian Rutin	Bulan	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
3	Pelayanan Jemaah Haji	Orang		Covid 19	0		Covid 19	0	185	185	100	427	427	100	438	438	100
4	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Kecamatan	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100
5	Pemberian Insentif Guru TKA/TPA	Orang	59	59	100	57	57	100,00	56	56	100	48	48	100	47	47	100
6	Hibah Bantuan Keagamaan		1.596	25	0,37	1596	10	15,27	1596	16	5,20	1596	11	5,10	1596	19	0,29
	Masjid	Unit	1.117	25	2,24	1.117	6	0,54	1.117	9	0,81	1.117	3	0,27	1.117	17	1,52
	Pondok Pesanteren	Unit	33	0	0,00	33	2	6,06	33	4	12,12	33	4	12,12	33	0	0,00
	Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ)	Unit	39	0	0,00	39	0	0,00	39	0	0	39	2	5,13	39	0	0,00
	Panti Asuhan	Unit	19	0	0,00	19	0	0,00	19	1	5,26	19	0	0	19	0	0,00
	Organisasi (MUI, Muhammadiyah, NU, BKPRMI, Bokomubin, DMI, IPHI, OHBI, IPIM, dan Muslimat NU)	Unit	11	0	0,00	11	0	0,00	11	2	18,18	11	2	18,18	11	0	0,00
	Lembaga Pemerintah Non Struktural (BAZNAS)	Unit	1	0	0,00	1	1	100,00	1	0	0	1	0	0	1	0	0,00
	Lembaga TPA /TPQ	Unit	376	0	0	376	1	0,27	376	0	0,00	376	0	0,00	376	2	0,53
	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi				**66,72**			**69,21**			**84,20**			**84,18**			**83,38**

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi secara rutin dilakukan sebanyak dua kali setiap tahun, sebagai ajang pembinaan dan pengembangan potensi tilawah serta syiar keagamaan masyarakat. Kegiatan Pengajian Rutin berlangsung setiap bulan selama periode 2020–2024 dengan konsistensi pelaksanaan yang menunjukkan komitmen terhadap penguatan spiritual masyarakat. Pelayanan Jemaah Haji, yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021, kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dengan jumlah peserta yang terus meningkat: 185 orang pada tahun 2022, 427 orang pada tahun 2023, dan 438 orang pada tahun 2024. Pelaksanaan Safari Ramadhan terlaksana secara merata di 10 kecamatan setiap tahunnya, sebagai bentuk pendekatan pelayanan langsung pemerintah kepada masyarakat selama bulan suci Ramadhan. Pembinaan Guru TKA/TPA menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam penguatan pendidikan keagamaan non-formal, dengan jumlah peserta bervariasi antara 47–59 orang per tahun. Hibah Bantuan Keagamaan juga diberikan untuk mendukung institusi dan kegiatan keagamaan masyarakat, yang jumlahnya mencapai 19 bantuan pada tahun 2024.

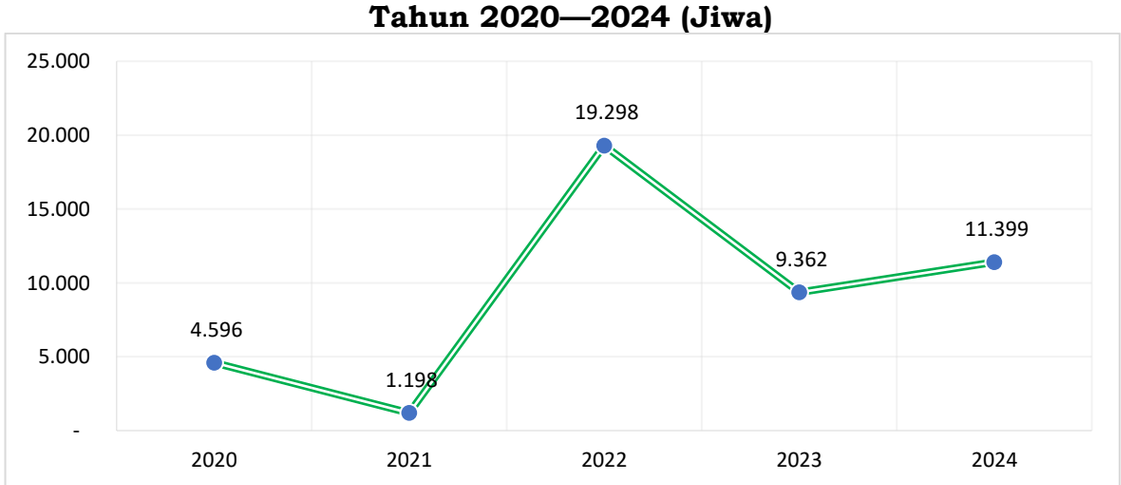
Secara keseluruhan, persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan fasilitasi menunjukkan tren meningkat, yakni dari 67,04 persen pada tahun 2020 menjadi 83,63 persen pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat pembangunan bidang sosial budaya, khususnya penguatan nilai-nilai keagamaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Pelaksanaan program dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap keragaman keyakinan, sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar pembangunan daerah

d) Jumlah Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa tujuan utama pengelolaan zakat adalah membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat. Jumlah penerima manfaat penyaluran baznas tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 19.298 orang.

Grafik II-77
Jumlah Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa)

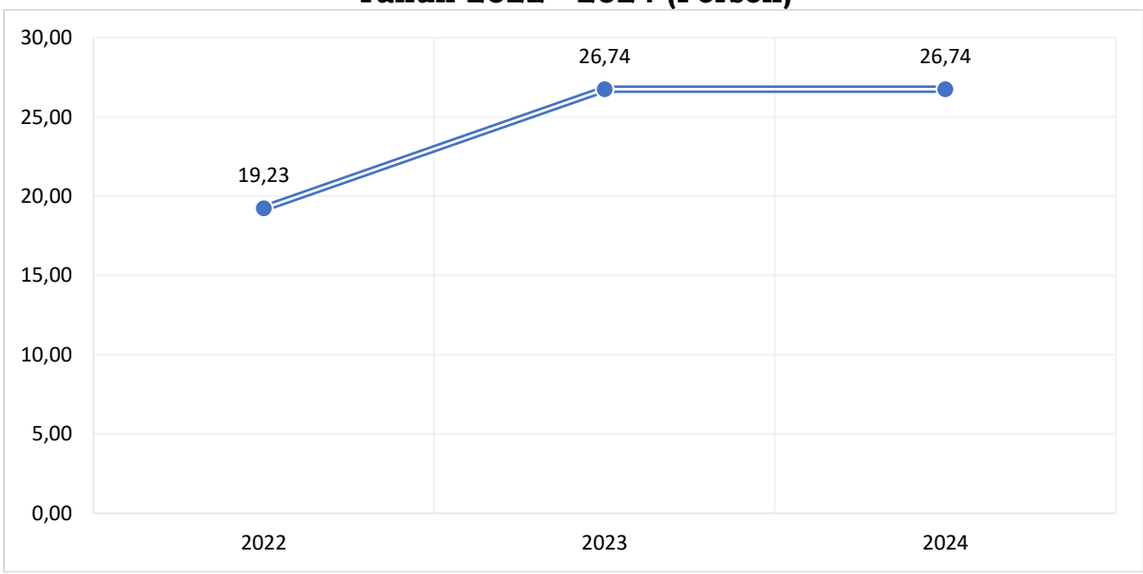


Sumber : Baznas dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

e) Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan adalah kategori elemen warisan budaya yang diakui dan dilindungi berdasarkan peraturan dan kebijakan pemerintah. Kategori ini mencakup berbagai jenis warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, atau budaya yang signifikan.

Grafik II-78
Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Pada tahun 2022, persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan sebesar 19,23 persen, yaitu sebanyak 15 objek dari 78 objek yang terregistrasi. Persentase tersebut meningkat menjadi 26,74 persen pada tahun 2023, atau sebanyak 23 objek dari 86 objek yang terregistrasi, dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2024 karena tidak dilakukan proses penetapan baru terhadap benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam proses inventarisasi dan perlindungan warisan budaya yang memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya peningkatan kecepatan registrasi dan penetapan cagar budaya harus terus didorong untuk melindungi dan mengelola aset budaya Kabupaten Bulukumba dengan lebih baik di masa depan. Berikut 23 Cagar Budaya yang telah Terregistrasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024:

Tabel II-76
Jumlah Cagar Budaya Yang Telah Terregistrasi Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Registrasi	Surat Keputusan Bupati
1	Eks Ranjau Laut Lemo Lemo	Dusun Butung Keke Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari	Benda Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-441 Tahun 2022 Tentang Penetapan Eks Ranjau Laut Lemo-Lemo sebagai benda Cagar Budaya	SK Bupati

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Registrasi	Surat Keputusan Bupati
2	Meriam Lemo lemo	Dusun Butung Keke Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari	Benda Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-442 Tahun 2022 Tentang Penetapan Meriam Lemo-Lemo sebagai benda Cagar Budaya	SK Bupati
3	Makam Tonteng Daeng Matarrang	Desa Lembang Loe Kecamatan Kajang	Struktur Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Makam Tonteng Daeng Matarrang sebagai struktur Cagar Budaya	SK Bupati
4	Pesanggrahan Tanete	Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa	Bangunan Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-440 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pesanggrahan Tanete sebagai bangunan Cagar Budaya	SK Bupati
5	Lokasi Pesanggrahan Tanete	Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-439 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pesanggrahan Tanete sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
6	Lokasi Leang Passea	Desa Lembanna Kecamatan Bonto Bahari	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-437 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Leang Passea sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
7	Makam Dea Daeng Lita	Dusun Jalaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Struktur Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-436 Tahun 2022 Tentang Penetapan Makam Dea Daeng Lita sebagai Struktur Cagar Budaya	SK Bupati
8	Kompleks Makam Dea Daeng Lita	Dusun Jalaya Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-435 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kompleks Makam Dea Daeng Lita sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
9	Makam Tobo Daeng Marappo	Dusun Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Struktur Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-434 Tahun 2022 Tentang Penetapan Makam Tobo Daeng Marappo sebagai Struktur Cagar Budaya	SK Bupati
10	Kompleks Makam Tobo Daeng Marappo	Dusun Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-433 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kompleks Makam Tobo Daeng Marappo sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
11	Kompleks Makam Raowa	Dusun Raowa Desa Lembang Loe Kecamatan Kajang	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-432 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kompleks Makam Raowa sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Registrasi	Surat Keputusan Bupati
12	Makam Karaeng Matinroe Ri Pungranga	Lingkungan Torolia Desa Bialo Kecamatan Gantarang	Struktur Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-431 Tahun 2022 Tentang Penetapan Makam Karaeng Matinroe Ri Pungranga sebagai Struktur Cagar Budaya	SK Bupati
13	Kompleks Makam Karaeng Matinroe Ri Pungranga	Lingkungan Torolia Desa Bialo Kecamatan Gantarang	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-430 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kompleks Makam Karaeng Matinroe Ri Pungranga sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
14	Makam Dato Tiro	Kampung Hila Hila Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro	Struktur Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-429 Tahun 2022 Tentang Penetapan Makam Dato Tiro sebagai Struktur Cagar Budaya	SK Bupati
15	Kompleks Makam Dato Tiro	Kampung Hila Hila Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro	Situs Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-428 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kompleks Makam Dato Tiro sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
16	Makam Petta Matinroe Ri Tasi'na	Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-578 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kompleks Makam Petta Matinroe Ri Tasi'na sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
17	Batu Pelantikan Possi Tana	Kampung Tabuakkang Kelurahan Mattoanging Kecamatan kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-579 Tahun 2023 Tentang Penetapan Batu Pelantikan Possi Tana Tasi'na sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
18	Kompleks Makam To Salama Ri Jalayya	Kampung Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-580 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kompleks Makam To Salama Ri Jalayya sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
19	Kompleks Makam Cidu Daeng Matarang	Kampung Daloba Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-581 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kompleks Makam Cidu Daeng Matarang sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
20	Makam Boto Daeng Pabeta	Kampung Jannaya Desa lembanna Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-582 Tahun 2023 Tentang Penetapan Makam Boto Daeng Pabeta sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Nomor Registrasi	Surat Keputusan Bupati
21	Makam Karaeng Kambatia	Kampung Torassi Kelurahan Lembang Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-583 Tahun 2023 Tentang Penetapan Makam Karaeng Kambatia sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
22	Kompleks Makam Karaeng Sangkala Lombo	Kampung Bonto Biraeng Desa Sangkala Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-584 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kompleks Makam Karaeng Sangkala Lombo sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati
23	Kompleks Makam Puang Liong	Kampung Torassi Kelurahan Lembang Lohe Kecamatan Kajang	Cagar Budaya	Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-585 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kompleks Makam Puang Liong sebagai Situs Cagar Budaya	SK Bupati

f) Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan

Pemerintah Bulukumba aktif dalam melestarikan budaya lokal, khususnya yang terkait dengan masyarakat adat seperti Suku Kajang yang merujuk pada Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti festival budaya (andingingi), pentas lomba kesenian tradisional, pemberlakukan pemakaian baju adat Kajang pada setiap Hari Jadi Kabupaten Bulukumba dan dukungan terhadap kelompok seni Kajang yang mewakili Bulukumba pada even regional maupun nasional.

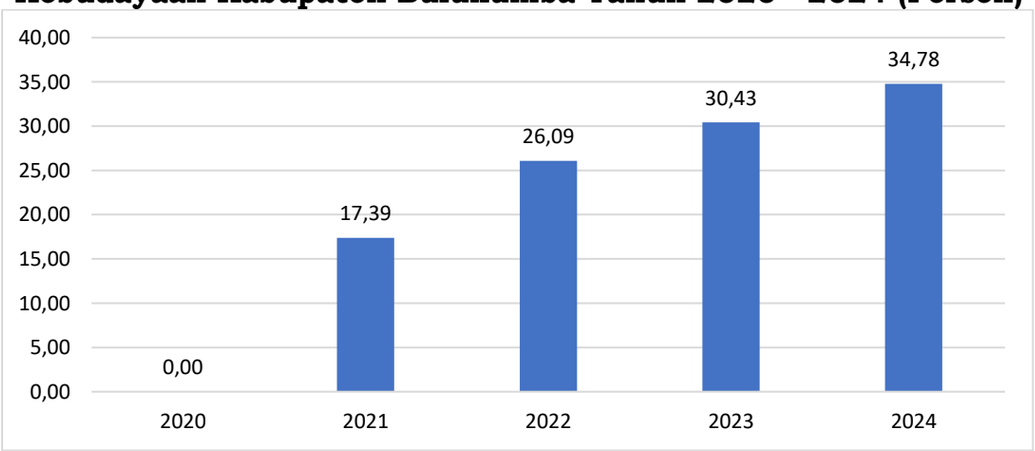
Puncak apresiasi pemerintah daerah terhadap pelestarian Budaya Kajang Adalah dengan membangun gedung kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang diberi nama Gedung Ammatoa. Kehadiran gedung Ammatoa sebagai pusat kebudayaan di Kabupaten Bulukumba merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Penguatan pelestarian budaya dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal. Gedung ini nantinya akan dilengkapi dengan galeri seni budaya sebagai tempat yang menyajikan informasi kekayaan budaya dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Gedung Ammatoa juga menyediakan sebuah ruang pertunjukan seni budaya yang dirancang khusus untuk pertujukan seni, pementasan dan atraksi budaya serta menjadi wadah bagi para seniman dan penggiat budaya untuk menampilkan karya-karyanya.

Selain itu, sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Bulukumba telah diselenggarakan beberapa festival seni budaya yaitu: 1) Festival Pinisi (Kharisma Event Nusantara); 2) Festival Annyorong Lopi; 3) Festival Andingingi; 4) Festival Senandung Kopi Kahayya; 5) Festival Laonruma; 6) Festival Dato Tiro; 7) Festival Samindara; 8) Festival Bulukumba Culture; 9) Festival Negeri Pesisir dan Budaya Maritim; 10) Festival Telusur Budaya VI; 11) Festival To Panrita; 12) Festival Gelar Kreativitas I 2024; dan 13) Festival Budaya dan Seni 2024.

Untuk memastikan pelestarian nilai-nilai tradisi secara autentik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan lokal,

pelibatan komunitas dan pelaku budaya dalam Festival Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting. Persentase komunitas atau pelaku budaya yang berpartisipasi aktif dalam festival kebudayaan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, persentase partisipasi tercatat sebesar 0 persen karena tidak adanya penyelenggaraan festival kebudayaan akibat pandemi Covid-19. Namun, partisipasi terus meningkat hingga tahun 2024, dengan capaian sebesar 8 komunitas atau pelaku budaya yang berpartisipasi aktif dari total 23 komunitas atau pelaku budaya yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Delapan komunitas atau pelaku budaya tersebut adalah Sanggar Seni Budaya Al Farabi, Teater Kampong, Sanggar Seni Katangka Panrita (SSK), Sanggar Seni Saorajae, Sanggar Seni To'dang Rilangi', Karang Taruna Kahayya, Sanggar Seni Bahari Nusantara dan Sanggar Seni Turiolo Kajang. Berikut persentase komunitas atau pelaku budaya yang berpartisipasi aktif dalam festival kebudayaan:

Grafik II-79
Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

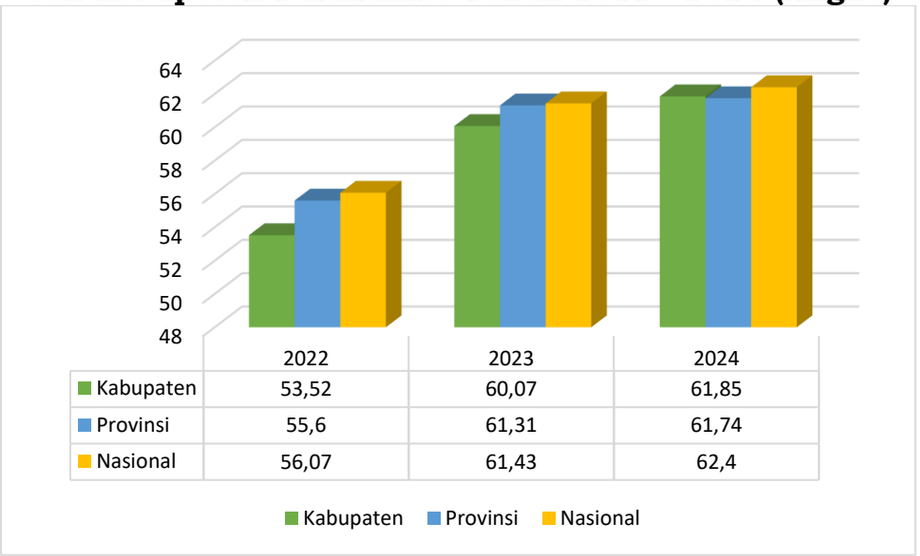
Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai unit sosial terkecil, pentingnya kesetaraan gender, serta partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Kondisi dan tantangan dalam mewujudkan keluarga berkualitas, mendorong keadilan gender, serta membangun masyarakat Bulukumba yang inklusif dan berkeadilan sosial

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan indeks ini juga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Adapun nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70, dan baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Grafik II-80
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka)



Sumber Data :DP2KBP3A, 2025

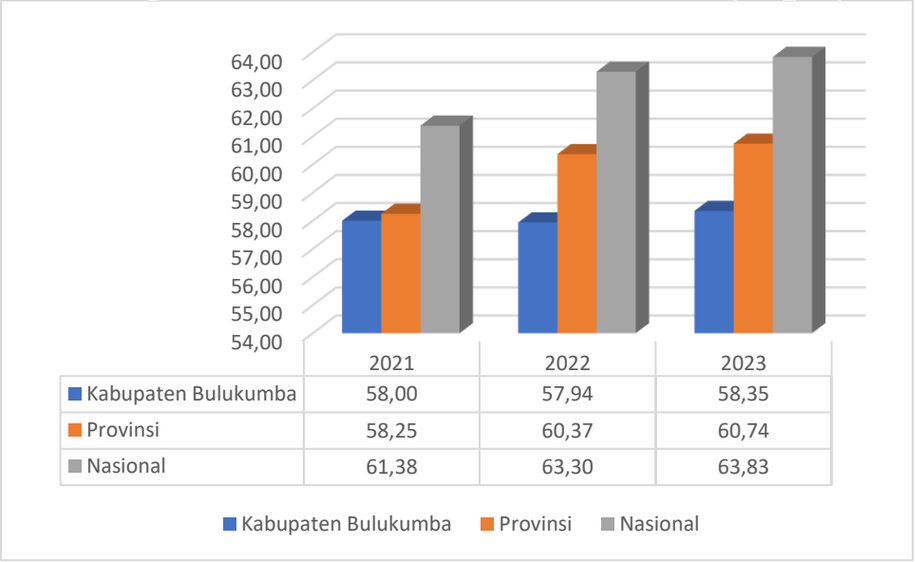
Selama periode tahun 2022 hingga 2024, Indeks Pembangunn Kualitas Keluarga di Kabupaten Bulukumba menunjukan peningkatan yang cukup baik. Tercatat nilai IPKK meningkat dari 53,52 pada tahun 2022 menjadi 61,85 pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspe kketahanan dan kesejahteraan keluarga di tingkat lokal, meskipun menunjukan pertumbuhan yang cukup baik, IPKK Kabupaten Bulukumba masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional pada tahun 2022 dan 2023 ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dan ruang yang perlu dioptimalkan melalui penguatan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan IPKK diantaranya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, stabilitas ekonomi keluarga, kemudahan akses layanan kesehatan berupa layanan KB, gizi, dan imunisasi serta partisipasi aktif keluarga dalam program pembangnan serta penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Namun demikian ada sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dilapangan diantaranya, tingkat pendidikan yang masih rendah, ketidakstabilan ekonomi keluarga, minimnya partisipasi keluarga dalam program pemerintah dan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Melihat capaian dan tantangan yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas kebijakan pembangunan keluarga. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip inklusif berbasis data serta kolaboratif antar sektor. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan keluarga yang tangguh, sehat dan berkualitas akan semakin nyata terwujud.

b) Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi di suatu kabupaten atau daerah. IPA dinilai berdasarkan lima klaster hak anak yaitu; 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan 5) Perlindungan khusus. Capaian IPA dipublikasikan dalam Sistem Informasi Gender dan Anak serta Laporan Indeks Perlindungan Anak Indonesia tahun 2021, 2022

dan 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. Sedangkan data pada tahun 2024 belum dipublikasikan. Adapun capaian IPA Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba dapat diamati pada grafik berikut.

Grafik II-81
Indeks Perlindungan Anak Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2023 (Angka)



	2021	2022	2023
Kabupaten Bulukumba	58,00	57,94	58,35
Provinsi	58,25	60,37	60,74
Nasional	61,38	63,30	63,83

Sumber Data : Sistem Informasi Gender dan Anak, 2025

Selama periode tahun 2021 hingga 2023, Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang relatif stabil. Angka indeks meningkat secara tipis dari 58,00 pada tahun 2021 menjadi 58,35 pada tahun 2023, meskipun ada perbaikan, nilai tersebut masih berada jauh dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 60,74 dan Nasional sebesar 63,83 pada tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan anak di Kabupaten Bulukumba telah dilakukan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mencapai standar nasional yang lebih ideal. Kondisi ini menuntut penguatan program perlindungan anak yang lebih menyeluruh dan responsive terhadap kebutuhan anak-anak di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian dan potensi peningkatan IPA antara lain, kebijakan daerah yang pro terhadap anak seperti pembentukan forum anak, peraturan daerah ramah anak dan desa/kelurahan layak anak, keterlibatan aktif lembaga masyarakat dan dunia pendidikan, akses terhadap pendidikan dasar dan layanan kesehatan dasar yang membaik, program peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga serta kemitraan lintas sektor. Meski demikian sejumlah tantangan utama masih menjadi penghambat dalam peningkatan IPA diantaranya masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, masih adanya kasus perkawinan usia anak, terbatasnya layanan perlindungan khusus anak, kurangnya SDM terlatih di bidang perlindungan anak serta belum optimalnya pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan.

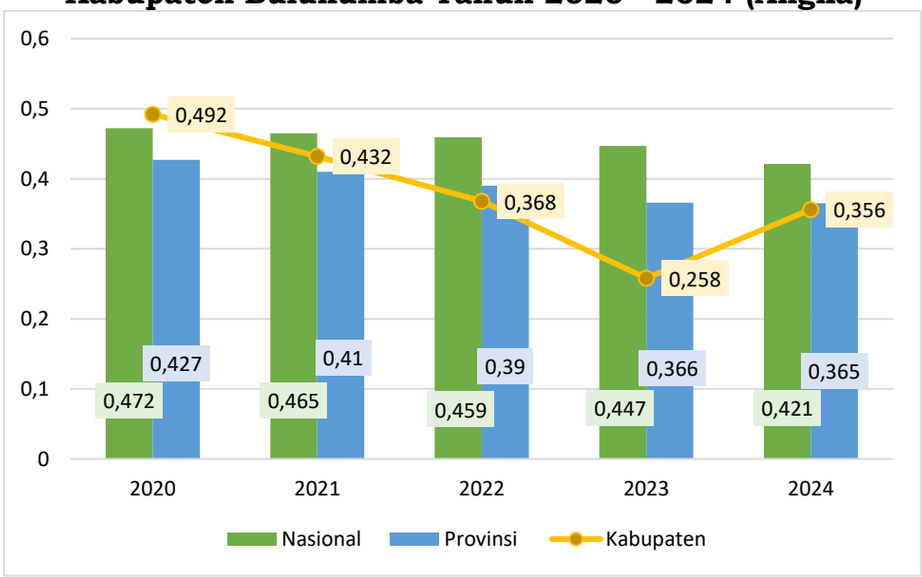
Meskipun data tahun 2024 belum diliris secara resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tren yang terjadi selama tiga tahun terakhir dapat menjadi dasar penting bagi evaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih progresif. Pemerintah Kabupaten Bulukumba diharapkan dapat terus memperkuat komitmen terhadap upaya perlindungan anak melalui penyususnan regulasi yang lebih kuat dan ramah anak, peningkatan kapasitas lembaga layanan dan petugas, penyediaan ruang aman dan edukasi bagi anak serta membangun budaya masyarakat yang menolak kekerasan terhadap anak

dalam bentuk apapun. Dengan sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat secara aktif, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang layak anak bukanlah hal yang mustahil.

c) Indeks Ketimpangan Gender

IKG atau *Gender Inequality Index* (GII) adalah indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Angka yang lebih rendah pada indeks ini mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin kecil, sehingga menunjukkan keberhasilan dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Adapun Indeks Ketimpangan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba dapat diamati pada grafik berikut.

Grafik II-82
Indeks Ketimpangan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Selama lima tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 0,492 dan menurun menjadi 0,356 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan yang substansial dalam mengurangi kesenjangan gender dan merupakan indikasi positif bahwa arah pembangunan yang ditempuh sudah mulai memperhatikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Penurunan IKG ini menunjukkan keberhasilan berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan di tingkat daerah, seperti peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun tren penurunannya cukup baik, nilai IKG Kabupaten Bulukumba masih sedikit lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional. Ini menandakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender secara menyeluruh. Ada bebrapa hal yang menjadi pendukung penurunan IKG diantaranya meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan formal baik di tingkat dasar maupun lanjutan, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan, lembaga politik dan forum masyarakat, serta kesadaran

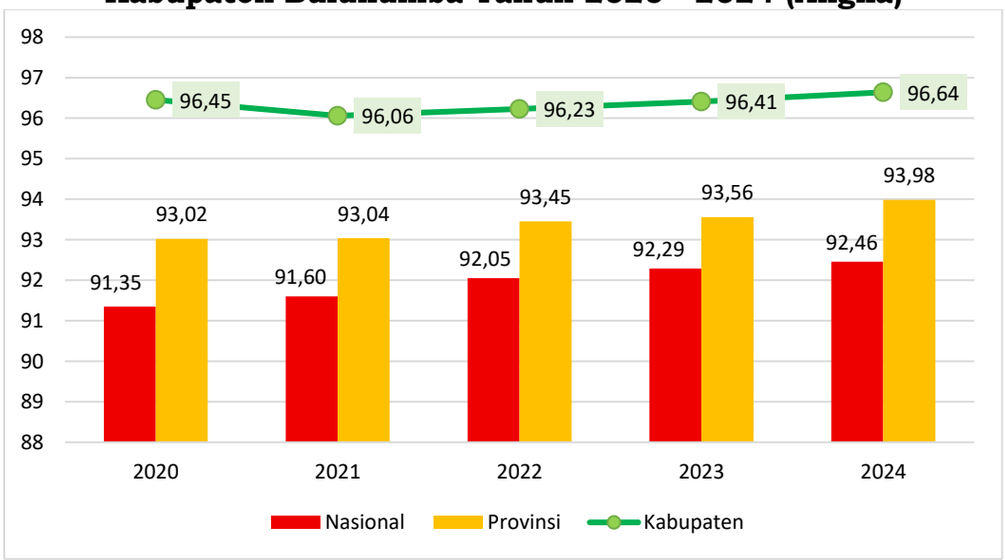
masyarakat yang tumbuh terhadap pentingnya kesetaraan gender terutama di lingkungan keluarga, dukungan kebijakan dan regulasi yang mengakomodir hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengurangan ketimpangan gender diantaranya tingginya beban ganda perempuan seperti mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah tanpa dukungan yang seimbang, terbatasnya akses perempuan terhadap sumberdaya ekonomi serta masih adanya stereotip dan norma budaya patriarkal yang membatasi peran perempuan di masyarakat serta minimnya data terpilah dan monitoring berbasis gender yang membuat kebijakan belum sepenuhnya responsif gender.

Secara keseluruhan, penurunan IKG di Kabupaten Bulukumba menandakan adanya arah kebijakan yang positif dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Namun untuk percapatan pencapaian target pembangunan yang adil gender, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan program responsif gender, meningkatkan partisipasi dalam semua bidang, menghapus diskriminasi gender serta mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah, cita-cita menciptakan Kabupaten Bulukumba yang lebih adil setara dan inklusif dapat terwujud.

d) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG juga digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Metodologi perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP yang mencakup dimensi antara lain: a) Dimensi Umur Panjang dan Sehat dengan Umur Harapan Hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan; b) Dimensi Pengetahuan dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki dan perempuan; c) Dimensi Kehidupan yang Layak dengan Perkiraan Pendapatan laki-laki dan perempuan secara nasional, perhitungan dimensi kehidupan BPS menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik II-83
Indeks Pembangunan Gender Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tren data Indeks Pembagunan Gender (IPG) selam periode 2020 sampai dengan 2024, yang menggunakan data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2020 LF BPS, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten bulukumba secara konsiten mencatatkan performa yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Capaian ini mencerminkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Kabupaten Bulukumba relatif lebih baik, dengan peluang pembangunan yang cukup seimbang antar laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Stabilitas dan kecenderungan peningkatan IPG menunjukan bahwa kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah telah berjalan cukup efektif dalam mengurangi kesenjangan gender. Capaian ini tentu menjadi kebanggan tersendiri mengingat disaat beberapa daerah masih berjuang mengejar kesetaraan gender, Kabupaten Bulukumba justru telah menunjukan keunggulan yang kompetitif. Namun demikian, keunggulan ini tidak boleh membuat upaya pembangunan menjadi stagnan. Diperlukan komitmen yang kuat untuk terus melanjutkan dan memperkuat capaian ini secara berkelanjutan. Ada beberpa hal yang menjadi pendukung peningkatan IPG di Kabupaten Bulukumba diantaranya akses pendidikan yang merata antar laki-laki dan perempuan, pelayanan kesehatan yang membaik terutama bagi perempuan dan anak, program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro dan kelompok perempuan produktif serta tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan social dan ekonomi lokal yang meningkat secara bertahap. Namun ada juga bebeberapa hal yang menjadi penghambat pembangunan gender diantaranya norma sosial dan budaya patriarkal yang masih mengakar di sebagian masyarakat dan membatasi peran perempuan di ranah publik, beban kerja ganda perempuan yang harus mengelola tanggung jawab domestik dan ekonomi sekaligus tanpa dukungan yang memadai serta kurangnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menghambat perumusan kebijakan yang sensitif gender.

Capaian positif Kabupaten Bulukumba dalam pembangunan gender patut diapresiasi, namun harus pula dijadikan landasan untuk melangkah lebih jauh. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan birokrasi, memperkuat kebijakan afirmasi gender, menyediakan

peluang kerja dan ekonomi inklusif serta membangun budaya kesetaraan sejak usia dini melalui pendidikan dan keluarga. Dengan memperkuat sinergi antar lembaga, komunitas dan pemerintah, Kabupaten Bulukumba dapat menjadi model daerah yang tidak hanya unggul dalam angka IPG, tetapi juga dalam praktik nyata pembangunan yang adil dan setara bagi semua.

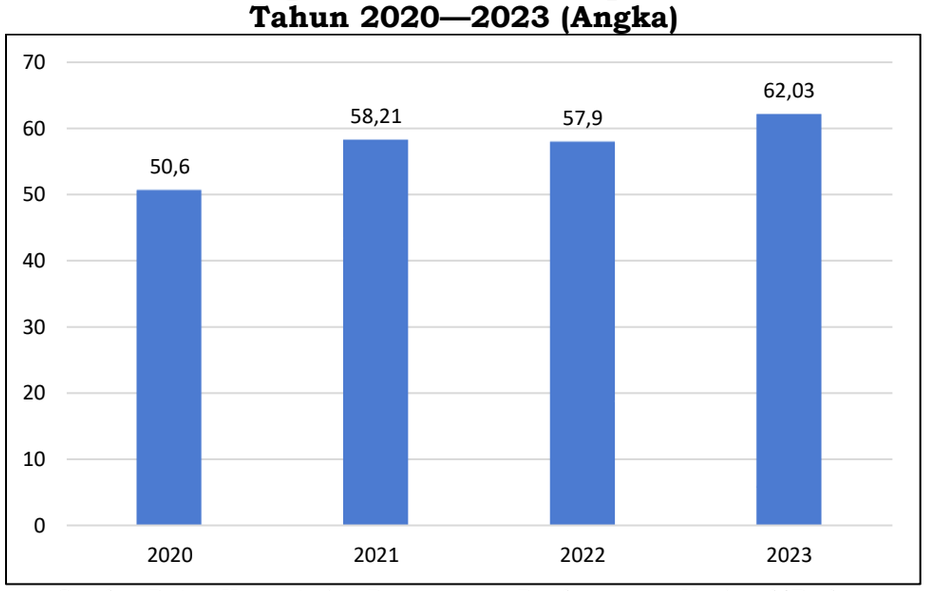
e) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, meliputi dimensi partisipasi, dimensi keberlangsungan/keberlanjutan, dimensi pemihakan, dimensi integrasi dan dimensi kesetaraan. Data IPBK Kabupaten Bulukumba tahun 2020-2024 belum tersedia.

f) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup serta perkembangan pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi pembangunan. Indeks ini menyajikan potret menyeluruh mengenai pengaruh berbagai aspek, seperti pendidikan formal maupun nonformal, kondisi kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial, serta aspek inklusivitas dan kesetaraan terhadap kehidupan pemuda. Secara konseptual, IPP dibangun melalui lima domain utama, yakni Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender. Adapun capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-84
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2023 (Angka)



Sumber Data : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025

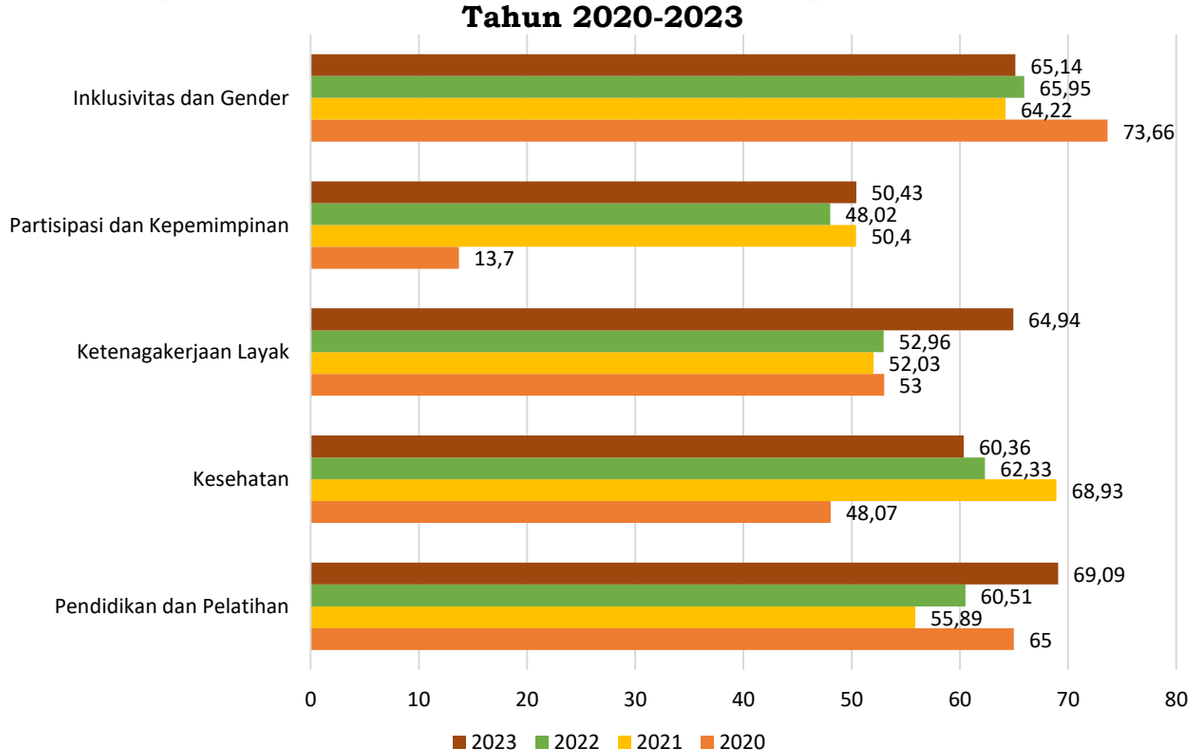
Berdasarkan data IPP Kabupaten Bulukumba tahun 2020 hingga 2023, secara umum terjadi peningkatan capaian pembangunan pemuda. Nilai IPP meningkat dari 50,60 pada tahun 2020 menjadi 62,03 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup pemuda di berbagai aspek, meskipun masih terdapat dinamika antar-domain. Pada domain pendidikan dan pelatihan, terjadi pertumbuhan positif yang cukup konsisten, dari 65,00 pada tahun 2020 menjadi 69,09 pada tahun 2023, meskipun sempat

menurun pada tahun 2021. Kondisi ini mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pemuda dalam pendidikan formal maupun pelatihan nonformal.

Domain kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup nyata. Setelah meningkat signifikan dari 48,07 pada tahun 2020 menjadi 68,93 pada tahun 2021, capaian indikator ini menurun hingga 60,36 pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam akses layanan kesehatan dan perilaku hidup sehat, konsistensi pencapaian masih perlu diperkuat. Sementara itu, domain ketenagakerjaan layak menunjukkan tren peningkatan dari 53,00 pada tahun 2020 menjadi 64,94 pada tahun 2023. Perbaikan ini mengindikasikan adanya peluang kerja yang lebih baik serta tumbuhnya aktivitas kewirausahaan di kalangan pemuda.

Selanjutnya, domain partisipasi dan kepemimpinan memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan. Nilai awal yang rendah pada 2020, yaitu 13,70, meningkat pesat menjadi sekitar 50 pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan ini mencerminkan peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi, kegiatan sosial, dan peran kepemimpinan. Sebaliknya, domain inklusivitas dan kesetaraan gender mengalami tren menurun. Jika pada tahun 2020 nilainya cukup tinggi yaitu 73,66, pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 65,14. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi pemuda perempuan, penyandang disabilitas, serta upaya pencegahan perkawinan anak. Berikut capaian lima domain pembentuk IPP Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2023:

Grafik II-85
Capaian Lima Domain Pembentuk IPP Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2023



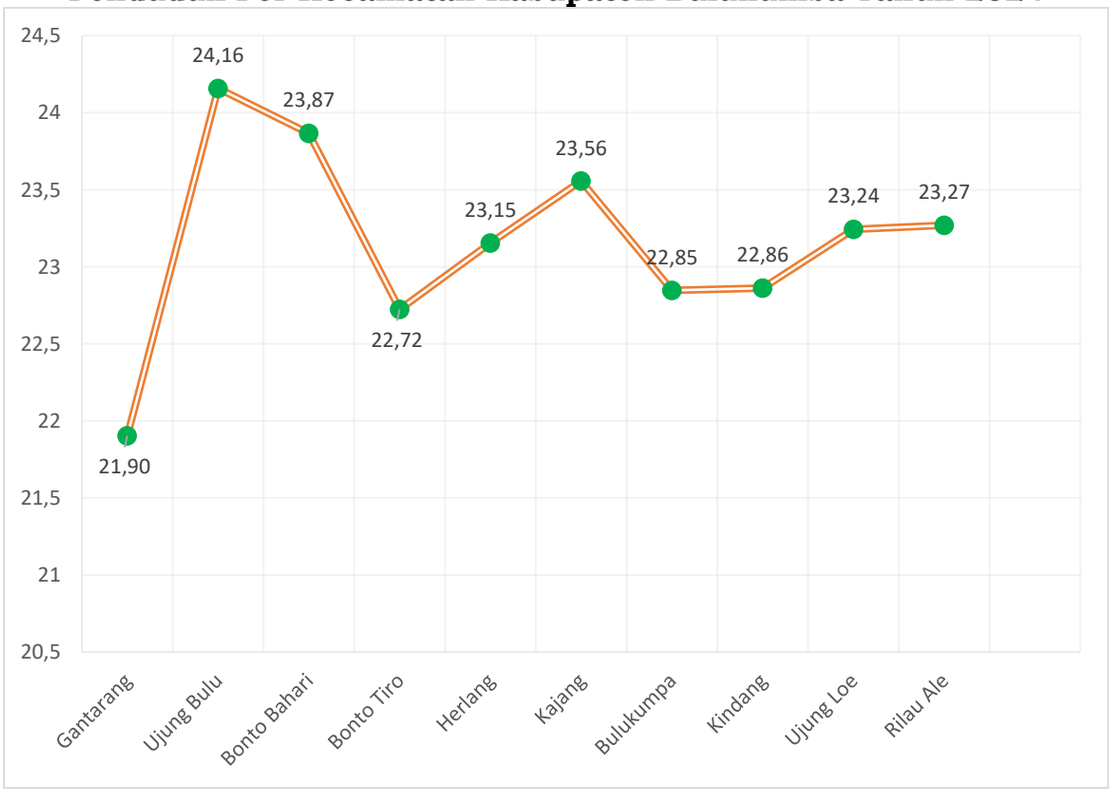
Sumber Data : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025

Secara keseluruhan, IPP Kabupaten Bulukumba dalam periode 2020–2023 menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kekuatan utama terdapat pada domain pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan, sedangkan partisipasi sosial dan kepemimpinan menjadi aspek yang mengalami lonjakan terbesar. Namun

demikian, fluktuasi pada domain kesehatan dan penurunan pada domain inklusivitas serta kesetaraan gender menjadi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPP ke depan perlu difokuskan pada konsistensi program kesehatan pemuda serta penguatan kebijakan yang mendorong kesetaraan dan inklusivitas, agar pembangunan pemuda dapat berlangsung lebih berkelanjutan, merata, dan inklusif.

Kelompok usia pemuda merupakan aset penting dalam pembangunan daerah karena memiliki potensi tinggi dalam mendukung sektor-sektor strategis, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan lokal. Tingginya proporsi penduduk usia 16–30 tahun di beberapa kecamatan menunjukkan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan program pemberdayaan pemuda, peningkatan keterampilan, serta pelibatan aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi berbasis masyarakat. Berikut persentase perbandingan penduduk usia 16-30 tahun dan jumlah seluruh penduduk per kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2024:

Grafik II-86
Persentase Perbandingan Penduduk Usia 16-30 Tahun dan Jumlah Seluruh Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024



Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025, diolah

Tabel II-77
Perbandingan Penduduk Usia 16-30 Tahun dan Jumlah Seluruh Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Usia 16-30 Tahun
1	Gantarang	9.667	10.044	19.711	89.990	21,90
2	Ujung Bulu	6.362	6.270	12.632	52.290	24,16
3	Bonto Bahari	3.755	3.702	7.457	31.245	23,87
4	Bonto Tiro	3.364	3.426	6.790	29.880	22,72

5	Herlang	3.516	3.662	7.178	31.000	23,15
6	Kajang	6.259	6.510	12.769	54.204	23,56
7	Bulukumpa	6.506	6.621	13.127	57.456	22,85
8	Kindang	4.053	4.151	8.204	35.885	22,86
9	Ujungloe	5.844	6.213	12.057	51.872	23,24
10	Rilauale	5.331	5.571	10.902	46.850	23,27
J u m l a h		**54.657**	**56.170**	**110.827**	**480.672**	**23,06**

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2025, diolah

Perbandingan penduduk usia 16–30 tahun terhadap jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ujung Bulu, yaitu sebesar 24,16 persen, dengan jumlah penduduk usia 16–30 tahun sebanyak 12.632 jiwa dari jumlah penduduk 52.290 jiwa. Sementara itu, persentase terendah berada di Kecamatan Gantarang, yakni sebesar 21,90 persen, meskipun jumlah penduduk usia 16–30 tahun mencapai 19.711 jiwa dari jumlah penduduk 89.990 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk usia 16–30 tahun di Kecamatan Gantarang merupakan yang tertinggi secara absolut, persentasenya terhadap jumlah penduduk keseluruhan lebih rendah karena populasi kecamatan tersebut juga tergolong besar.

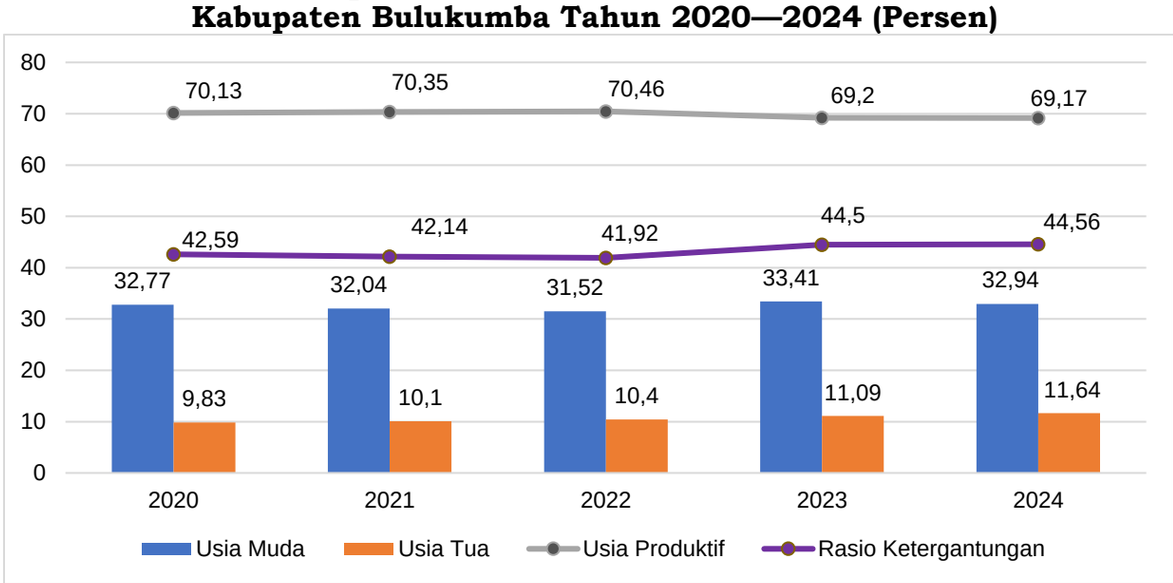
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a) Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau rasio beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-15 tahun + 65 Tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Grafik II-87
Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : BPS Kabupaten Bulukumba, 2025

Penduduk usia muda berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia tua berusia diatas 65 tahun keatas dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Sedangkan penduduk usia 15 – 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

Dari tabel diatas nampak kelompok usia produktif secara konsisten mendominasi, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 70,35 persen tahun 2021 menjadi 69,17 persen tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia muda dan tua yang merupakan usia non-produktif cenderung meningkat, menyebabkan rasio ketergantungan juga meningkat dari 42,59 persen tahun 2020 menjadi 44,56 persen tahun 2024. Peningkatan angka ketergantungan ini menunjukkan semakin besarnya beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk menopang penduduk non-produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan fondasi utama dalam mendorong daya saing daerah dan mempercepat transformasi struktural perekonomian. Ketiganya berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, membuka peluang kerja baru, serta memperluas akses masyarakat terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

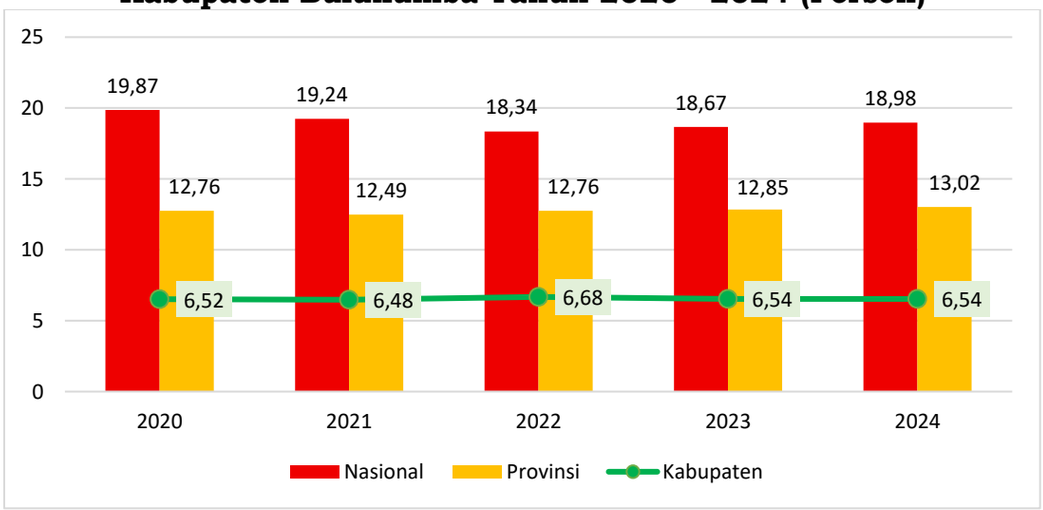
Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Bulukumba, penguatan kapasitas Iptek dan inovasi menjadi kebutuhan strategis untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, industri kreatif, dan sektor jasa. Oleh karena itu, analisis terhadap capaian, tantangan, serta arah pengembangan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi menjadi bagian penting dalam perumusan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Gambaran umum perkembangan Iptek dan inovasi di daerah, tingkat produktivitas ekonomi, serta isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di masa mendatang.

a) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama sehingga produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-88
Rasio PDRB Industri Pengolahan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



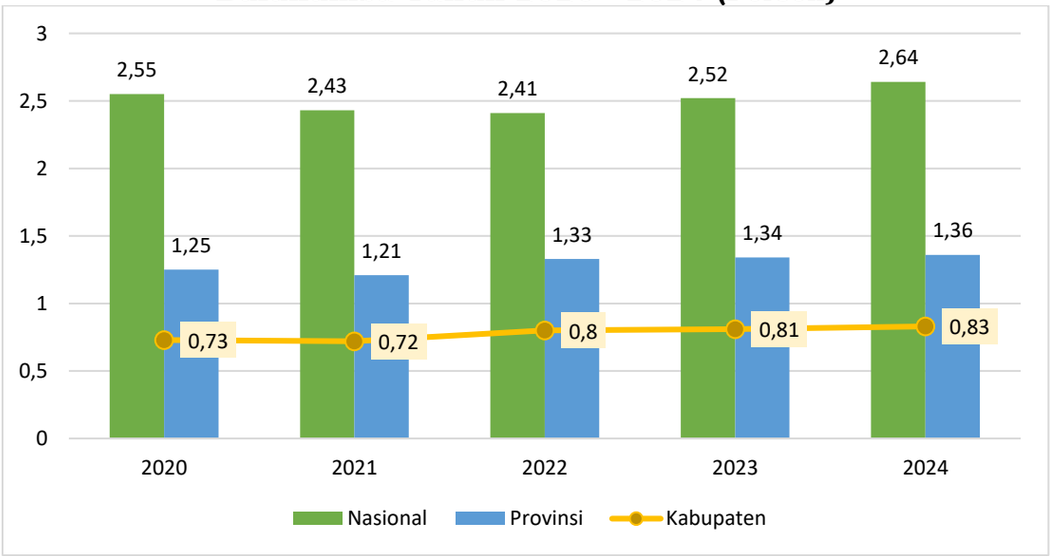
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio PDRB industri pengolahan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan angka yang relatif stabil, berkisar antara 6,48 persen pada 2021 hingga 6,68 persen pada 2022, dan berakhir pada 6,54 persen pada 2024. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Bulukumba masih jauh di bawah angka nasional (yang berkisar antara 18,34 persen hingga 19,87 persen) dan provinsi (sekitar 12,49 persen hingga 13,02 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Bulukumba masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Penyebab dari pola ini berasal dari berbagai faktor, seperti ketersediaan bahan baku, permintaan pasar, serta dampak pandemi yang mungkin masih berpengaruh pada tahun-tahun awal. Untuk meningkatkan dan menstabilkan rasio PDRB industri pengolahan, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor manufaktur, meningkatkan infrastruktur pendukung, memberikan insentif bagi pelaku industri, serta melakukan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri agar daya saing semakin kuat.

b) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen,motel,dan sejenisnya.

Grafik II-89
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 0,73% pada 2020 menjadi 0,83% pada 2024. Kategori ini didominasi oleh sub sektor penyediaan makan minum. Capaian ini masih sangat rendah dibandingkan dengan kontribusi PDRB dari sektor lain. Meskipun terdapat peningkatan, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba masih relatif kecil jika dibandingkan dengan angka nasional (yang berkisar antara 2,41% hingga 2,64%) dan Provinsi Sulawesi Selatan (antara 1,21% hingga 1,36%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata dan jasa terkait penyediaan akomodasi dan konsumsi di Kabupaten Bulukumba berkembang, kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih terbilang terbatas. Untuk meningkatkan kontribusi sektor ini, perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas layanan, serta promosi yang lebih agresif untuk menarik wisatawan dan mendukung pertumbuhan sektor ini sebagai pendorong utama ekonomi lokal.

Diketahui bahwa Kabupaten Bulukumba ditunjang dengan pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan daerah, dengan ketersediaan rumah makan dan restoran tentunya dapat menunjang penyediaan akomodasi makan dan minum, akan tetapi kesadaran pelaku usaha sebagai wajib pajak masih rendah sehingga tidak memberi pengaruh yang cukup besar terhadap rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum. Kemampuan managerial pengelolaan pariwisata yang masih rendah serta belum optimalnya implementasi terhadap regulasi merupakan hambatan dalam pencapaian indikator ini. Peningkatan pembinaan terhadap pengelolaan pariwisata dan pemberian pembinaan digitalisasi dalam promosi wisata dapat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan volume jumlah tamu wisata.

c) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Bulukumba yang berperan terhadap perekonomian dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut jumlah tamu wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024:

Tabel II-78
Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Jiwa)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Domestik						
1	Pantai Pasir Putih Bira	288.091	366.119	537.617	446.412	444.282
2	Titik Nol Bira			124.160	78.130	97.326
3	Pua Janggo	1.469	7.260	702	502	227
4	Makam dato Tiro	5.546	7.480	12.688	10.985	17.541
5	Permandian Hila-hila	4.056	4.135	5.278	5.073	4.027
6	Pantai Lolisang	1.248	590	650	520	182
7	Pantai Samboang	604	959	685	194	-
8	Wisata Alam Kahayya	70	199	149	130	128
9	Air Terjun Bravo 45	130	191	104	126	313
	JUMLAH TAMU WISATAWAN DOMESTIK	301.214	386.933	682.033	542.072	564.026
Mancanegara						
1	Pantai Pasir Putih Bira	293	57	744	2.148	2.716
2	Titik Nol Bira			-	33	144
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	293	57	744	2.181	2.860
	Total Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara	**301.507**	**386.990**	**682.777**	**544.253**	**566.886**

Sumber Data : Disparpora Kabupaten Bulukumba, 2025

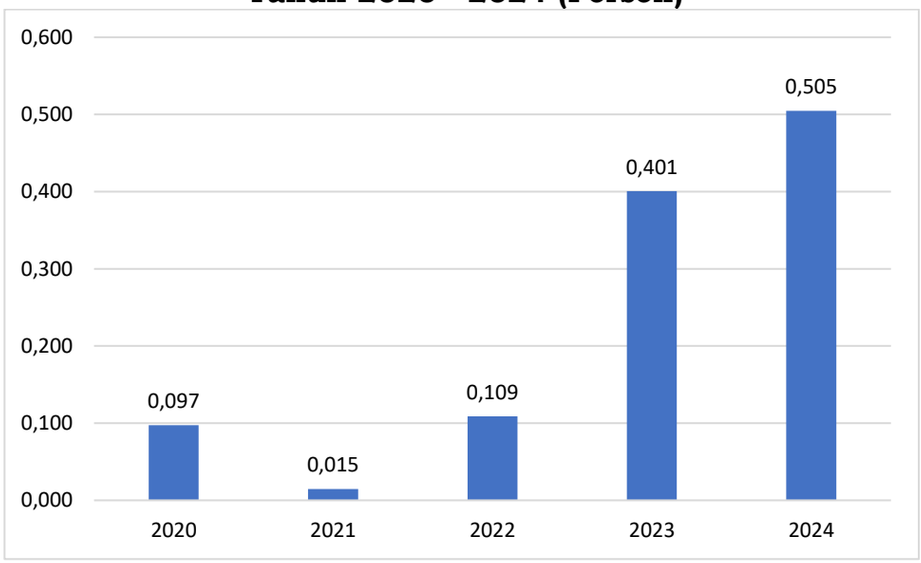
Data kunjungan tamu wisatawan domestik tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam pengelolaan destinasi. Tahun 2022 tercatat jumlah wisatawan tertinggi sebanyak 682.033 jiwa dengan rata-rata lama kunjungan 2 hari dan mengalami penurunan sampai tahun 2024 sebesar 564.026 jiwa dengan rata-rata lama kunjungan 4 hari. Kunjungan tamu wisatawan domestik didominasi pada destinasi wisata Pantai Pasir Putih Bira sebanyak 444.282 jiwa, Titik Nol Bira sebanyak 97.326 jiwa, Makam Dato Tiro sebanyak 17.541 jiwa, dan Permandian Hila-Hila sebanyak 4.027 jiwa pada tahun 2024.

Sementara itu, data menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pasca pandemi COVID-19, yang mencerminkan adanya pemulihan sektor pariwisata secara bertahap. Wisatawan mancanegara tercatat mengunjungi destinasi unggulan yaitu Pantai Pasir Putih Bira dan Titik Nol Bira. Pada tahun 2024, kunjungan wisatawan mancanegara ke Pantai Pasir Putih Bira mencapai 2.716 orang, meningkat dari 2.148 orang pada tahun 2023. Sementara itu, Titik Nol Bira mencatat kunjungan sebesar 144 orang, melonjak tajam dari hanya 33 orang pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024 sebanyak 4 hari. Pencapaian ini menunjukkan bahwa daya tarik kedua destinasi tersebut semakin meningkat di mata wisatawan mancanegara.

Kunjungan wisatawan mancanegara berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah secara nasional dan global, karena mencerminkan keunggulan daerah dalam infrastruktur, pelayanan, keamanan, pelestarian budaya, dan kualitas lingkungan. Kehadiran mereka memberikan eksposur internasional yang memperkuat citra daerah sebagai destinasi unggulan, sekaligus mendorong

inovasi, peningkatan layanan, dan penguatan tata kelola destinasi oleh pemerintah dan pelaku usaha. Persentase wisatawan mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-90
Persentase Wisatawan Mancanegara Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Disparpora Kabupaten Bulukumba, 2025

Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka semakin besar pula potensi pemasukan devisa yang diperoleh daerah. Setiap kunjungan wisatawan membawa dampak ekonomi melalui pengeluaran untuk akomodasi, transportasi, kuliner, belanja, dan aktivitas wisata lainnya, yang semuanya berkontribusi terhadap perputaran uang dan peningkatan pendapatan sektor pariwisata. Berikut pendapatan sektor pariwisata untuk tahun 2020—2024:

Tabel II-79
Pendapatan Sektor Pariwisata
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Kamar Bilas	660.000	1.290.000	1.056.000	300.000	6.000.000
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Penyewaan Bangunan			15.000.000	-	-
3	Retribusi Tempat Penginapan /Pasanggarahan	4.600.000	2.800.000	1.600.000	14.200.000	11.600.000
4	Retribusi Khusus Parkir	492.390.000	777.520.000	825.375.000	676.943.000	626.217.000
5	Retribusi Pantai Pasir Putih Bira	3.177.415.000	5.083.065.000	5.574.260.000	4.665.565.000	5.561.108.000
6	Retribusi Titik Nol Bira			783.435.000	518.160.000	669.480.000
7	Retribusi Makam Dato tiro	23.650.000	37.400.000	48.800.000	42.250.000	69.750.000
8	Retribusi Permandian Hila-Hila	31.200.000	41.350.000	40.600.000	39.000.000	31.000.000
9	Retribusi Puncak Pua Janggo	11.550.000	7.510.000	5.400.000	3.850.000	1.750.000
10	Retribusi Pantai Lolisang	9.600.000	5.900.000	5.000.000	4.000.000	1.400.000
11	Retribusi Pantai Samboang	4.650.000	9.590.000	5.270.000	1.480.000	-

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
12	Retribusi Wisata Alam Kahayya	600.000	1.490.000	1.075.000	1.000.000	1.000.000
13	Retribusi Wisata Alam Bravo 45	1.300.000	955.000	810.000	1.000.000	1.340.000
14	Retribusi Lapangan Stadion Mini	-	-	-	4.000.000	4.000.000
15	Retribusi Lapangan Bulutangkis Gor Remaja	-	-	-	31.000.000	39.200.000
16	Retribusi Pemakaian Gedung Futsal *Indoor*	-	-	2.750.000	1.100.000	10.000.000
Jumlah		**3.757.615.000**	**5.968.870.000**	**7.310.431.000**	**6.003.848.000**	**7.033.845.000**

Sumber Data : Disparpora Kabupaten Bulukumba, 2025

Seiring dengan dominasi kunjungan wisatawan pada beberapa destinasi tertentu, kontribusi pendapatan sektor pariwisata pada tahun 2024 juga didominasi oleh Pantai Pasir Putih Bira sebesar Rp5.561.108.000, Titik Nol Bira sebesar Rp669.480.000, Makam Dato Tiro sebesar Rp69.750.000, dan Permandian Hila-Hila sebesar Rp31.000.000. Sementara itu, retribusi di Objek Wisata Pantai Samboang dihentikan karena biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan retribusi. Kondisi ini menyebabkan objek wisata tersebut mengalami kerugian terus-menerus, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional dan penarikan retribusi di lokasi tersebut. Meskipun pembangunan infrastruktur menuju Pantai Samboang telah dilakukan sejak tahun 2011, tingkat kunjungan wisatawan tetap tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mengambil keputusan untuk menghentikan sementara seluruh operasional sebagai bentuk evaluasi.

Beberapa destinasi wisata masih memerlukan intervensi kebijakan strategis agar lebih kompetitif dan menarik minat wisatawan melalui peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan promosi secara merata di seluruh destinasi; optimalisasi data digital kunjungan serta umpan balik pengunjung untuk mendukung perencanaan yang responsif; serta pengembangan event budaya dan olahraga sebagai daya tarik tambahan. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data-data di atas, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan proyeksi jumlah wisatawan domestik dan mancanegara serta pendapatan sektor pariwisata tahun 2026—2030 sebagai berikut:

Tabel II-80
Proyeksi Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara Kabupaten Bulukumba tahun 2026-2030

No	Uraian Objek Wisata	2026	2027	2028	2029	2030	Satuan
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -**	**1.520**	**1.558**	**1.597**	**1.637**	**1.678**	
	Penyewaan Tanah dan Bangunan						
	Kamar Bilas	1.400	1.435	1.471	1.508	1.545	Orang
	Mess Pinisi Pemda	120	123	126	129	132	Kamar
2	**Retribusi Parkir**	**109.052**	**111.778**	**114.572**	**117.437**	**92.446**	
	Parkir Mobil Bus Roda Enam	2.667	2.733	2.802	2.872	2.944	Unit
	Parkir Mobil Bus Roda Empat	55.784	57.179	58.608	60.073	61.575	Unit
	Parkir Motor	50.601	51.866	53.163	54.492	27.927	Unit
3	**Retribusi Tempat Rekreasi**	**444.459**	**455.570**	**466.960**	**478.634**	**490.599**	

No	Uraian Objek Wisata	2026	2027	2028	2029	2030	Satuan
	Objek Wisata Bira Dewasa/Bara	290.951	298.225	305.680	313.322	321.155	Orang
	Objek Wisata Bira Anak-Anak/Bara	47.373	48.557	49.771	51.016	52.291	Orang
	Objek Wisata Bira Mancanegara	**2.791**	**2.861**	**2.932**	**3.006**	**3.081**	**Orang**
	Objek Wisata Titik Nol Bira Dewasa	67.500	69.188	70.917	72.690	74.507	Orang
	Objek Wisata Titik Nol Bira Anak-Anak	1.600	1.640	1.681	1.723	1.766	Orang
	Objek Wisata Titik Nol Bira Mancanegara	**3.750**	**3.844**	**3.940**	**4.038**	**4.139**	**Orang**
	Puncak Pua Janggo Dewasa	1.752	1.796	1.841	1.887	1.934	Orang
	Puncak Pua Janggo Mancanegara	**199**	**204**	**209**	**214**	**219**	**Orang**
	Permandian Hila-Hila Dewasa	4.786	4.906	5.028	5.154	5.283	Orang
	Makam dato Tiro Dewasa	14.642	15.008	15.383	15.768	16.162	Orang
	Lolisang Dewasa	1.595	1.635	1.676	1.718	1.761	Orang
	Objek Wisata Alam Kahayya Dewasa	721	739	758	776	796	Orang
	Objek Wisata Alam Baravo 45 Kindang Dws	1.459	1.495	1.533	1.571	1.610	Orang
	Retribusi Lap.Stadion Mini	40	41	42	43	44	Hari
	Retribusi.Gedung Futsal Indoor	300	308	315	323	331	Jam
	Retribusi GR Bulutangkis	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519	Set
	Jumlah	**555.030**	**568.906**	**583.129**	**597.707**	**584.723**	

Sumber Data : Disparpora Kabupaten Bulukumba, 2025

Tabel II-81
Proyeksi Pendapatan Sektor Pariwisata
Kabupaten Bulukumba Tahun 2026—2030 (Rupiah)

No	Uraian Objek Wisata	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan**	**37.000.000**	**37.925.000**	**38.873.125**	**39.844.953**	**40.841.077**
	Kamar Bilas	7.000.000	7.175.000	7.354.375	7.538.234	7.726.690
	Mess Pinisi Pemda	30.000.000	30.750.000	31.518.750	32.306.719	33.114.387
2	**Retribusi Parkir**	**850.845.000**	**872.116.125**	**893.919.028**	**916.267.004**	**939.173.679**
	Parkir Mobil Bus Roda Enam	40.000.000	41.000.000	42.025.000	43.075.625	44.152.516
	Parkir Mobil Bus Roda Empat	557.840.000	571.786.000	586.080.650	600.732.666	615.750.983
	Parkir Motor	253.005.000	259.330.125	265.813.378	272.458.713	279.270.180
3	**Retribusi Tempat Rekreasi**	**7.112.155.000**	**7.289.958.875**	**7.472.207.847**	**7.659.013.043**	**7.850.488.369**
	Obyek Wisata Bira Dewasa/Bara	5.528.069.000	5.666.270.725	5.807.927.493	5.953.125.680	6.101.953.822
	Obyek Wisata Bira Anak-Anak/Bara	426.357.000	437.015.925	447.941.323	459.139.856	470.618.353
	Obyek Wisata Bira Mancanegara	150.714.000	154.481.850	158.343.896	162.302.494	166.360.056
	Obyek Wisata Titik Nol Bira Dewasa	675.000.000	691.875.000	709.171.875	726.901.172	745.073.701
	Obyek Wisata Titik Nol Bira Anak-Anak	8.000.000	8.200.000	8.405.000	8.615.125	8.830.503
	Obyek Wisata Titik Nol Bira Mancanegara	75.000.000	76.875.000	78.796.875	80.766.797	82.785.967
	Puncak Pua Janggo Dewasa	17.520.000	17.958.000	18.406.950	18.867.124	19.338.802

No	Uraian Objek Wisata	2026	2027	2028	2029	2030
	Puncak Pua Janggo Mancanegara	4.970.000	5.094.250	5.221.606	5.352.146	5.485.950
	Permandian Hila-Hila Dewasa	47.860.000	49.056.500	50.282.913	51.539.985	52.828.485
	Makam dato Tiro Dewasa	73.210.000	75.040.250	76.916.256	78.839.163	80.810.142
	Lolisang Dewasa	15.950.000	16.348.750	16.757.469	17.176.405	17.605.816
	Obyek Wisata Alam Kahayya Dewasa	7.210.000	7.390.250	7.575.006	7.764.381	7.958.491
	Oby Wisata Alam Baravo 45 Kindang Dws	7.295.000	7.477.375	7.664.309	7.855.917	8.052.315
	Retribusi Lap.Stadion Mini	10.000.000	10.250.000	10.506.250	10.768.906	11.038.129
	Retribusi.Gedung Futsal *Indoor*	15.000.000	15.375.000	15.759.375	16.153.359	16.557.193
	Retribusi GR Bulutangkis	50.000.000	51.250.000	52.531.250	53.844.531	55.190.645
	Jumlah	**8.000.000.000**	**8.200.000.000**	**8.405.000.000**	**8.615.125.000**	**8.830.503.125**

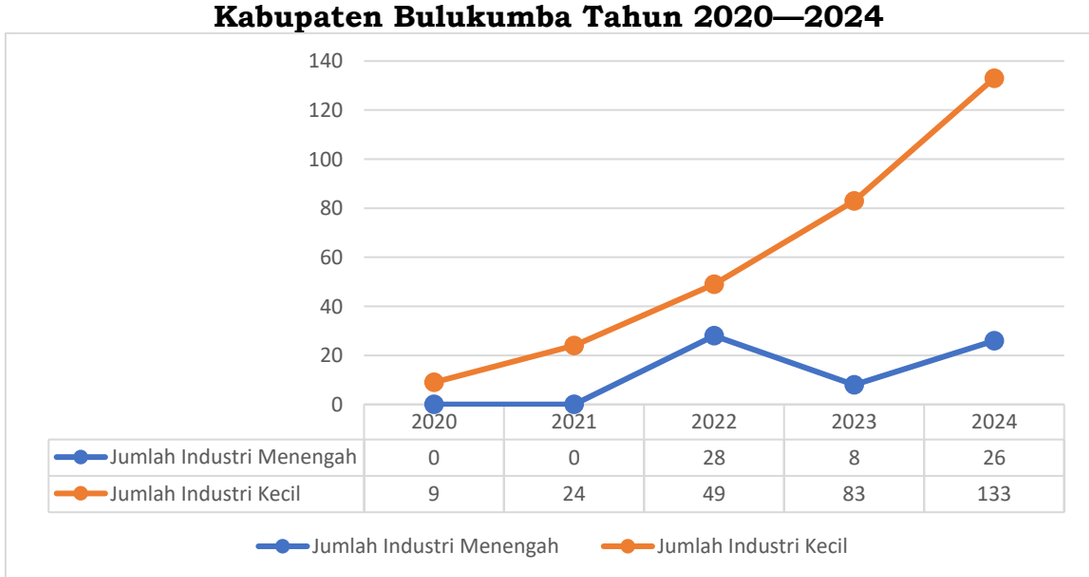
Sumber Data : Disparpora Kabupaten Bulukumba, 2025

d) Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah sub sektor yang mengelola jenis jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan mencapai Rp.200.000.000,- belum termasuk biaya untuk tanah dan bangunan. IKM mempunyai peranan penting bagi perekonomian yaitu menjaga stabilitas ekonomi karena seluruh proses bisnis atau usaha dari IKM terjadi dalam cakupan industri yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang baru merintis bisnis.

Industri kecil adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang dengan modal usaha diatas 50 juta sampai 500 juta. Industri menengah adalah perusahaan yang memiliki tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang dengan modal usaha lebih dari 5 Milyar sampai 10 Milyar. Adapun usaha mikro adalah perusahaan yang tenaga kerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang dengan modal usaha sebesar 50 Juta ke bawah.

Grafik II-91
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2025

Tabel II-82
Jumlah Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Industri Menengah	0	0	28	8	26
Jumlah Industri Kecil	9	24	49	83	133
Jumlah Industri Mikro	30	25	654	1.784	1.010
Total	**39**	**49**	**731**	**1.875**	**1.169**

Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Jumlah industri di Kabupaten Bulukumba tahun 2024 sebesar 1.171 industri dengan rincian industri mikro 1.010 industri kecil sebesar 133, industri menengah sebesar 26 industri dan terdapat industri besar sebanyak 2 industri. Uraian jumlah industri dan tenaga kerja berdasarkan kecamatan Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

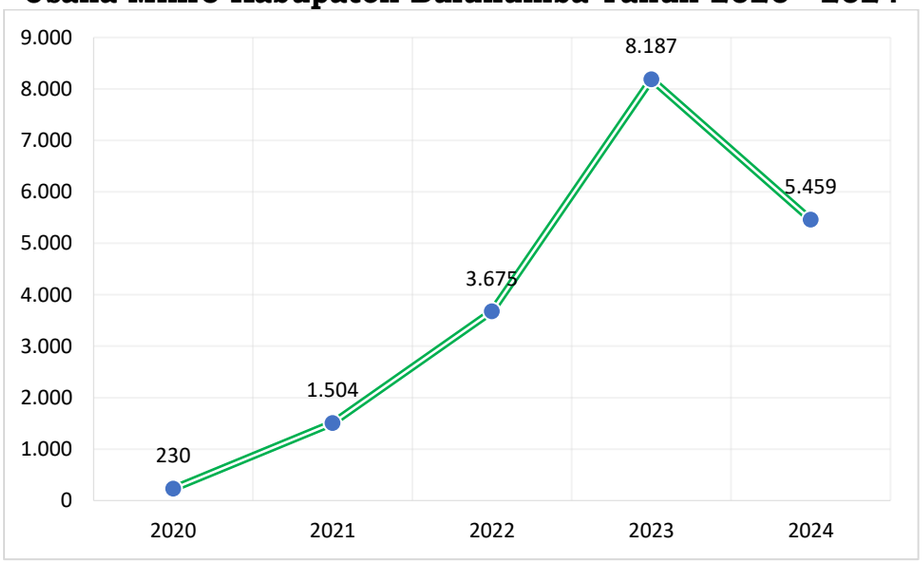
Tabel II-83
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
1	Ujung Bulu	26	116	9	49	202	611	167	558	204	467
2	Ujungloe	4	15	11	52	50	98	231	348	128	557
3	Gantarang	3	15	2	8	163	372	182	340	180	411
4	Kindang	2	7	0	0	50	124	201	285	103	188
5	Rilauale	0	0	0	0	54	118	213	389	114	232
6	Bulukumpa	1	4	1	5	67	15	147	234	147	490
7	Kajang	1	4	17	86	53	120	235	451	65	127
8	Bonto Tiro	0	0	3	22	20	50	35	78	52	138
9	Herlang	2	9	2	10	32	95	339	734	86	248
10	Bonto Bahari	0	0	4	40	40	111	125	332	92	262
	Total	**39**	**170**	**49**	**272**	**731**	**1.714**	**1.875**	**3.749**	**1.171**	**3.120**

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2025

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Jumlah usaha mikro yang terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah usaha mikro mencapai 8.187 unit. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 5.459 usaha mikro. Meskipun demikian, tren secara umum menunjukkan bahwa digitalisasi pendaftaran melalui OSS semakin diadopsi oleh pelaku usaha mikro, mencerminkan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan mereka dalam sistem formal perizinan usaha.

Grafik II-92
Usaha Mikro Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

e) Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

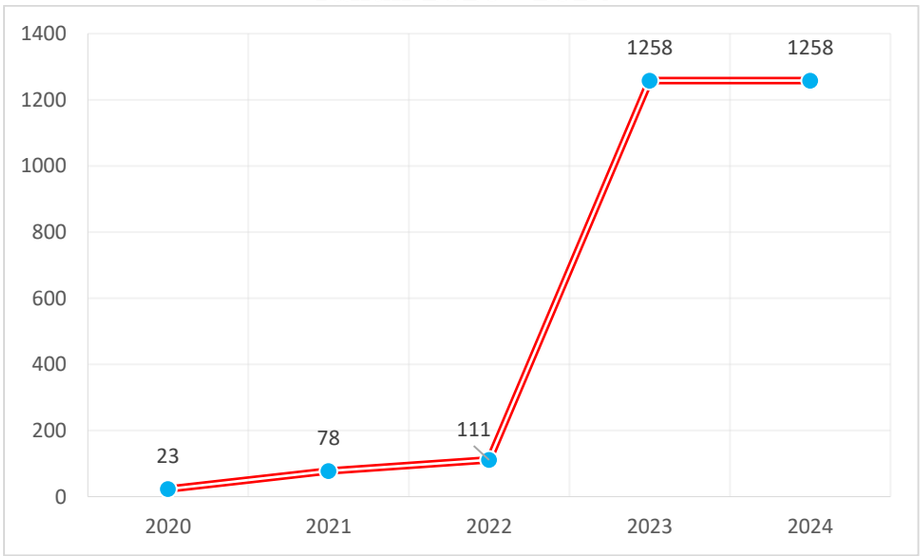
Ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba telah melakukan inventarisasi data industri ekonomi kreatif yang menunjukkan pertumbuhan dan diversifikasi signifikan dari tahun ke tahun. Data ini menggambarkan dinamika sektor kreatif yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Tahun 2020 merupakan fondasi awal dengan industri ekonomi kreatif sebanyak 23 industri. Sektor yang menonjol pada tahun ini adalah kerajinan tangan, khususnya Souvenir Pinisi, dengan nama-nama seperti Nurdin Souvenir Centre dan Eqi Miniatur Phinisi di Tanah Beru. Selain itu, tenun khas Bira juga menjadi bagian penting dengan adanya Tenun Toliganra di Desa Bira. Kuliner tradisional seperti Kue Tradisional (Uhu-Uhu) dari Desa Bira juga turut meramaikan, bersama dengan Warkop Portable dan Mushroom Panrita. Desain grafis dan kemasan juga mulai muncul dengan Andira Indah Designer dan Panrita Clothing. Bidang seni, termasuk jasa henna dari Ancha Kumar Henna, serta channel Youtube "Pandemi Project", menunjukkan keragaman jenis usaha yang mulai berkembang. Jumlah industri ekonomi kreatif meningkat menjadi 78 pada tahun 2021. Diversifikasi usaha semakin terlihat dengan hadirnya berbagai jenis kuliner seperti Kripik, kopi, kue tradisional dari Genpi Bulukumba, hingga Boba Milk dan Coffe dari Erviana Makmur. Sektor fotografi dan videografi juga berkembang pesat dengan adanya Syaeful Syah Alam, S.Kom. yang menawarkan video dokumentasi, dan Asriandi yang menyediakan jasa fotografi, desain komunikasi visual, hingga pengelolaan media sosial. Kerajinan tas daun lontar oleh Yuyun Wahyuni dan souvenir oleh-oleh dari Eky Hendrawan juga menunjukkan kekayaan produk lokal. Promosi acara dan event di Bulukumba juga mulai difokuskan oleh Islamul Kautsar dan Bulukumba Event.

Tahun 2022, jumlah industri ekonomi kreatif terus bertambah mencapai 111. Sektor kuliner dan minuman tetap mendominasi dengan berbagai variasi, seperti "Mamatae food and drink" , "Kamsia x Xiaolin Bulukumba" yang menawarkan Boba Milk dan Coffe , dan berbagai kedai kopi seperti "Bulukumba Bubble Cheese". Industri kreatif juga menunjukkan inovasi dalam jasa, seperti

"Ruang production" untuk desain kemasan dan editing video , serta "BISAJI STUDIO" yang menyediakan layanan fotografi, desain komunikasi visual, hingga pengembangan website. Kerajinan buket bunga dan hampers juga semakin populer dengan adanya "Lani Flower" dan "Elbuket". Data untuk tahun 2023-2024 menunjukkan fokus yang lebih luas pada sektor pariwisata dan jasa. Hotel melati, restoran, dan pondok wisata mulai tercatat, seperti Yuvensius Panggung dengan Hotel Melati di Kawasan Bira, dan Rollys Jewawo dengan restorannya. Layanan jasa boga dan catering menjadi sangat beragam, melayani event tertentu maupun periode tertentu. Aktivitas biro perjalanan wisata juga mulai aktif dengan Muhammad Asrul A. Keberadaan rumah pijat, kedai makanan dan minuman yang tersebar di berbagai lokasi seperti Jl. Pahlawan, Jl. M. Noor, dan Pantai Merpati, menunjukkan geliat ekonomi yang merata. Jumlah industri ekonomi kreatif Tahun 2023-2024 yaitu 1.258 industri. Berikut jumlah industri ekonomi kreatif Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024:

Grafik II-93
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

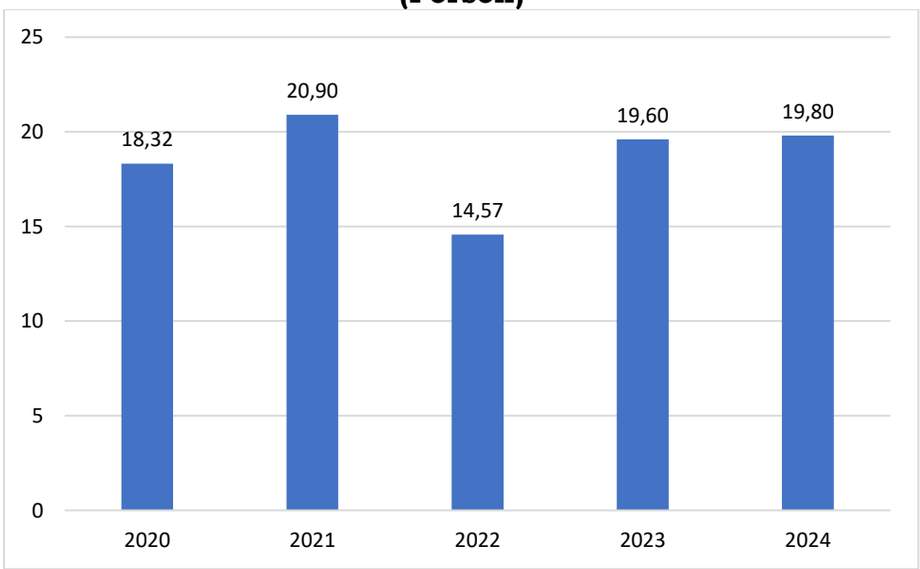


Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, diolah, 2025

f) Presentase Koperasi Sehat

Koperasi berpredikat sehat adalah koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum serta koperasi yang mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya dan masih aktif secara kelembagaan 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan meliputi 4 aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yaitu tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan sanksi (Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021).

Grafik II-94
Presentase Koperasi Sehat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024
(Persen)



Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase koperasi sehat di Kabupaten Bulukumba mengalami tren fluktuatif. Jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi secara keseluruhan menurun, akan tetapi dari segi kualitas presentase koperasi sehat meningkat. Persentase tertinggi koperasi sehat tercatat pada tahun 2021, yakni sebesar 20,90 persen. Berikut uraian data koperasi sehat dan tidak sehat Kabupaten Bulukumba:

Tabel II-84
Jumlah Koperasi Sehat dan Tidak Sehat Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (Sehat)	Unit	35	42	29	39	39
Koperasi Tidak Sehat	Unit	156	159	170	160	158
Koperasi Aktif	Unit	191	201	199	199	197
Persentase koperasi sehat	**%**	**18.32**	**20.90**	**14.57**	**19.60**	**19.80**
Jumlah Koperasi	Unit	290	286	290	291	292

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase koperasi sehat di Kabupaten Bulukumba menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan mendapatkan predikat terbaik dari pemerintah pusat yaitu Koperasi Berkat dan Koperasi Primkoppol. Kedua koperasi ini memiliki unit usaha yang produktif dan menguntungkan serta anggota koperasi yang aktif.

Salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan koperasi adalah tingkat kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam pengurusan izin usaha, seperti Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP). Berdasarkan data yang ada, saat ini hanya terdapat 10 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) yang memiliki izin resmi, dari sekian banyak koperasi yang beroperasi.

Rendahnya jumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih minimnya kesadaran pengelola koperasi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait izin usaha simpan pinjam. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018, koperasi yang hanya menjalankan usaha simpan pinjam, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), wajib memiliki izin usaha. Di samping itu, prosedur baru pengurusan izin usaha yang kini dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan upaya pemerintah untuk

mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesehatan koperasi, pemerintah daerah juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Namun, program ini belum memberikan dampak yang signifikan, disebabkan masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menyampaikan laporan keuangan. Akibatnya, hanya koperasi yang melaksanakan RAT dan menyerahkan laporan keuangan yang dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, serta pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan oleh dinas terkait.

Mengklasifikasikan jenis-jenis koperasi di Kabupaten Bulukumba merupakan langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan koperasi yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan serta mendukung program. Melalui klasifikasi ini, pemerintah daerah dapat mengetahui karakteristik, bidang usaha, dan kebutuhan masing-masing koperasi sehingga intervensi kebijakan, pembinaan, serta program pemberdayaan dapat disesuaikan secara tepat sasaran. Jenis-jenis koperasi di Kabupaten Bulukumba mencerminkan beragam kebutuhan dan peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat. Koperasi konsumen melayani kebutuhan pokok anggota melalui penyediaan barang-barang konsumsi sehari-hari. Koperasi pemasaran berfokus pada membantu anggota memasarkan produk atau jasa mereka. Koperasi simpan pinjam (KSP) menyediakan layanan keuangan berupa tabungan dan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi produsen terdiri dari para pelaku usaha seperti petani dan pengrajin yang bekerja sama dalam produksi dan pemasaran hasil usaha. Sementara itu, koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk di tingkat desa atau kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui semangat gotong royong dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan. Berikut jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi Kabupaten Bulukumba per Juni 2025:

Tabel II-85
Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi
Kabupaten Bulukumba per Juni 2025

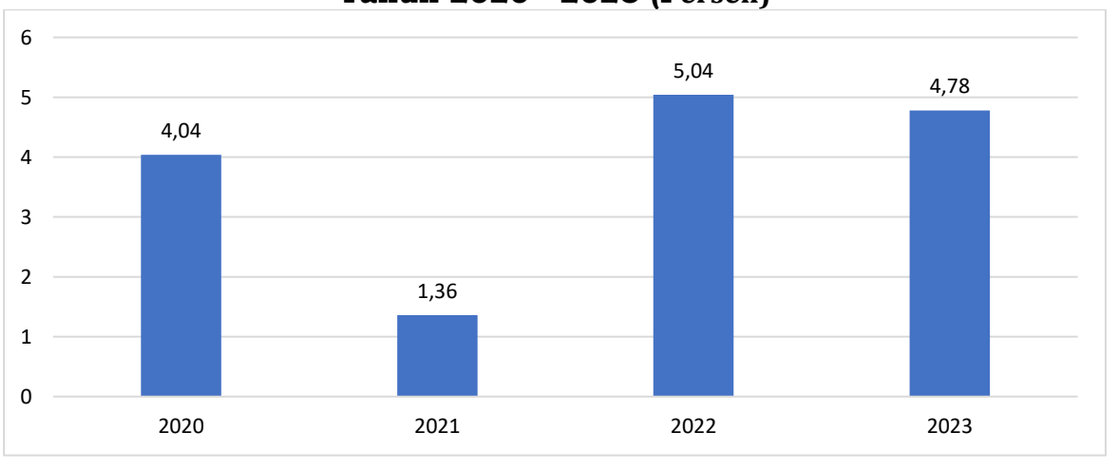
NO	JENIS	JUMLAH
1	Koperasi Konsumen	165
2	Koperasi Pemasaran	11
3	Koerasi Simpan Pinjam	30
4	Koperasi Produsen	94
5	Koperasi Merah Putih	136
	Desa	109
	Kelurahan	27
JUMLAH KOPERASI		**436**

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

g) Return on Aset (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) adalah salah satu indikator kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien BUMD dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam penggunaan aset atau efektivitas operasional. Berikut data ROA BUMD Kabupaten Bulukumba:

Grafik II-95
***Return on Aset* (ROA) BUMD Kabupaten Bulukumba**
Tahun 2020—2023 (Persen)



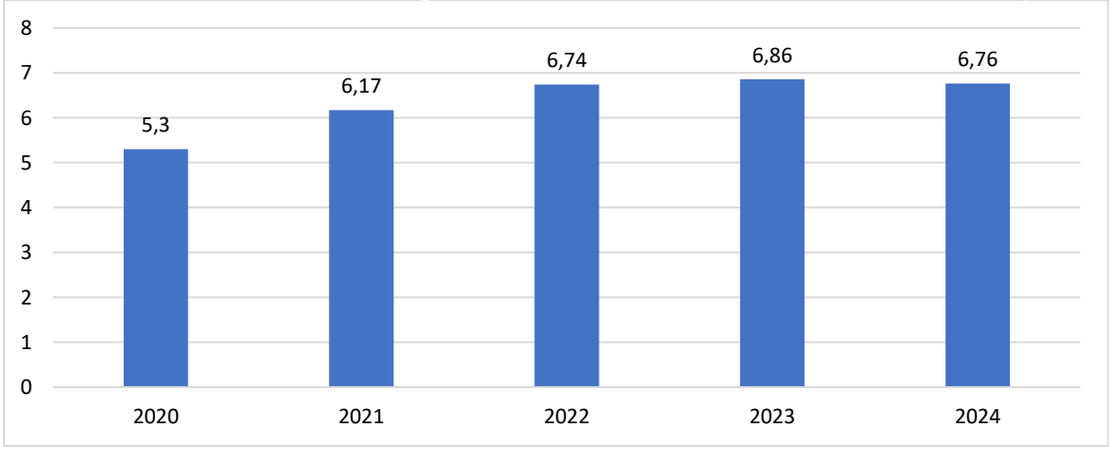
Sumber: Bank Sulselbar Kabupaten Bulukumba, 2025

Dari grafik di atas, ROA BUMD Kabupaten Bulukumba berdasarkan data yang diperoleh salah satu BUMD Bank Sulselbar Cabang Bulukumba pada tahun 2021 nilai ROA BUMD hanya sebesar 1,36 persen yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid -19*. Untuk tahun 2022 sampai 2023 nilai ROA Kabupaten Bulukumba menunjukkan trend meningkat, nilai ROA mencapai 5,04 persen dan 4,78 persen.

h) Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan kemampuan lahan dalam menghasilkan tanaman secara optimal dan menguntungkan bagi petani, yang memainkan peran penting dalam ketahanan pangan, efisiensi distribusi sumber daya, dan daya saing wilayah di pasar global. Peningkatan produktivitas tidak hanya memperkuat keunggulan komparatif suatu wilayah melalui penurunan biaya produksi, tetapi juga berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan harga pangan, peningkatan pendapatan riil, dan pengentasan kemiskinan, mengingat sektor pertanian sering menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk. Selain mendorong pertumbuhan sektor pertanian itu sendiri, peningkatan produktivitas juga memberikan manfaat bagi sektor lain melalui kestabilan pasokan dan harga pangan yang lebih terjangkau.

Grafik II-96
Produktivitas Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)



Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

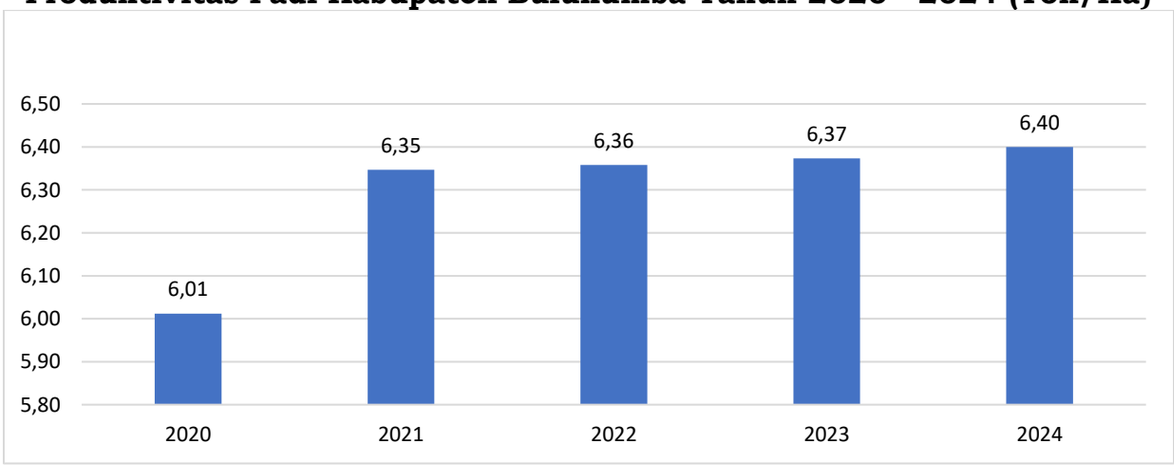
Produktivitas pertanian Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh perbaikan teknologi pertanian, pemberian bibit unggul, peningkatan infrastruktur irigasi, serta program penyuluhan kepada petani. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan alat pertanian

modern juga berperan dalam peningkatan ini. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, pemerintah perlu memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian terbaru, meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi petani, serta memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk serta sarana produksi lainnya secara tepat waktu dan merata.

a) Padi

Produktivitas padi dari tahun 2020 samapi tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya intervensi bantuan varietas benih unggul yang bermutu dan bersertifikat baik melalui APBD maupun APBD Provinsi dan APBN. Selain itu, faktor-faktor lain yang turut mendukung peningkatan produktivitas meliputi kondisi iklim yang mendukung, penerapan teknologi budidaya sesuai dengan anjuran teknis, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pengawalan serta pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.

Grafik II-97
Produktivitas Padi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)

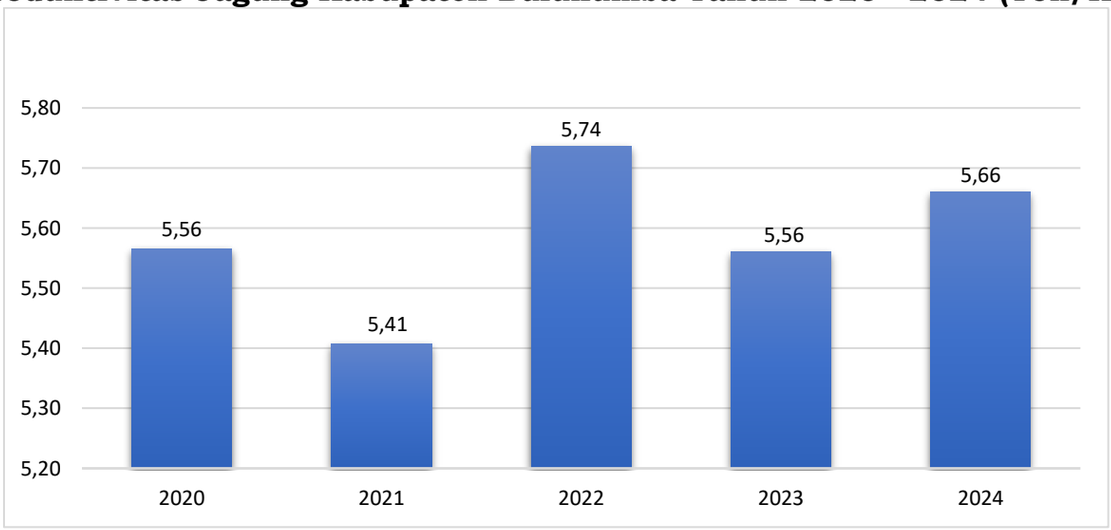


Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

b) Jagung

Tingkat produktivitas jagung dari 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu seperti curah hujan yang tidak stabil dan suhu yang berubah-ubah, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung secara signifikan. Disamping itu juga pada sebagian wilayah kecamatan terdapat gangguan hama babi yang menjadi ancaman dalam peningkatan produktifitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengantisipasi gangguan hama babi adalah kegiatan berburu babi terutama di daerah sentra seperti Kecamatan Bonto Tiro, Herlang dan Kajang.

Grafik II-98
Produktivitas Jagung Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)



Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

i) Produktivitas Perkebunan

Produktivitas perkebunan di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari tahun 2020—2024 karena perubahan iklim dimana curah hujan yang tidak menentu, kekeringan yang mengganggu siklus pertumbuhan tanaman perkebunan. Disamping itu juga terjadinya degradasi lahan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, penggunaan bahan kimia berlebihan serta menurunnya bahan organik tanah.

Tabel II-86
Produktivitas Perkebunan menurut Komoditi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton/Ha)

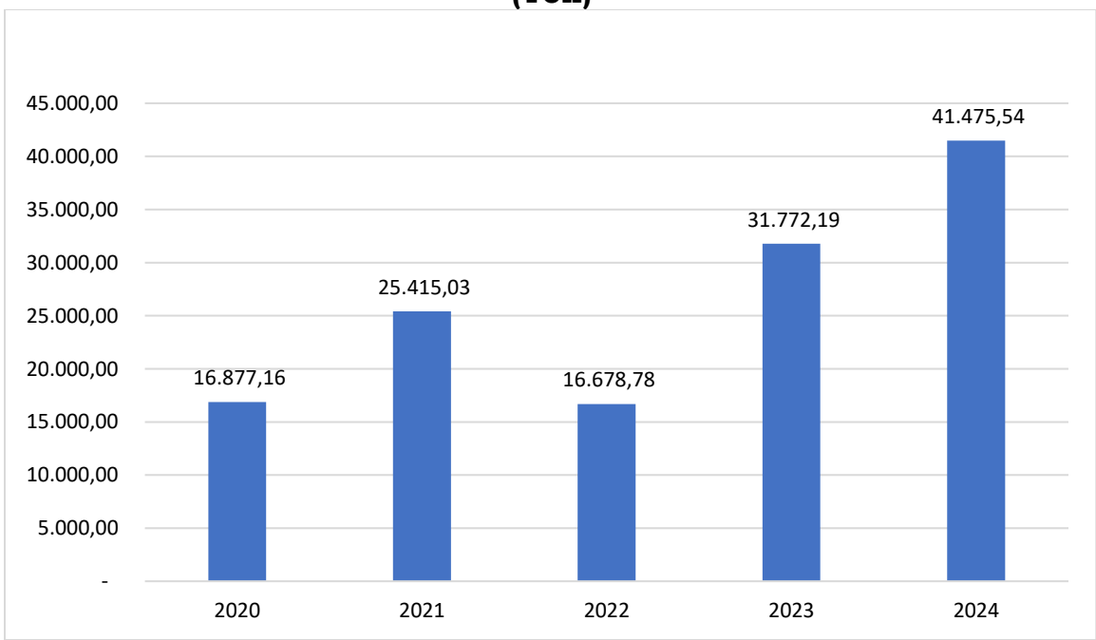
No	Jenis Komoditi	Produktivitas				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam	0,99	0,68	0,64	0,32	0,45
2	Kelapa Hybrida	1,16	1,00	0,76	0,38	0,37
3	Kopi Robusta	0,39	0,18	0,07	0,09	0,10
4	Kopi Arabika	0,89	0,22	0,16	0,15	0,16
5	Cengkeh	0,19	0,09	0,07	0,06	0,24
6	Kakao	0,82	0,37	0,35	0,15	0,21
7	Jambu Mete	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pala	0,20	0,80	0,23	0,16	0,17
9	Lada	0,17	0,08	0,13	0,07	0,08
10	Karet	1,12	1,08	1,00	0,29	0,62
	Produktivitas Perkebunan	**0,62**	**0,45**	**0,34**	**0,17**	**0,24**

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

j) Jumlah Produksi Hortikultura

Produksi hortikultura di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari tahun 2020—2024 dan komoditas yang memberikan kontribusi tertinggi adalah durian, manggis, rambutan serta cabai rawit. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya intervensi bantuan varietas benih unggul yang bermutu dan bersertifikat baik melalui APBD maupun APBD Provinsi dan APBN. Disamping itu juga terdapat peningkatan luas panen untuk komoditas cabai sehingga secara signifikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi.

Grafik II-99
Jumlah Produksi Hortikultura Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)

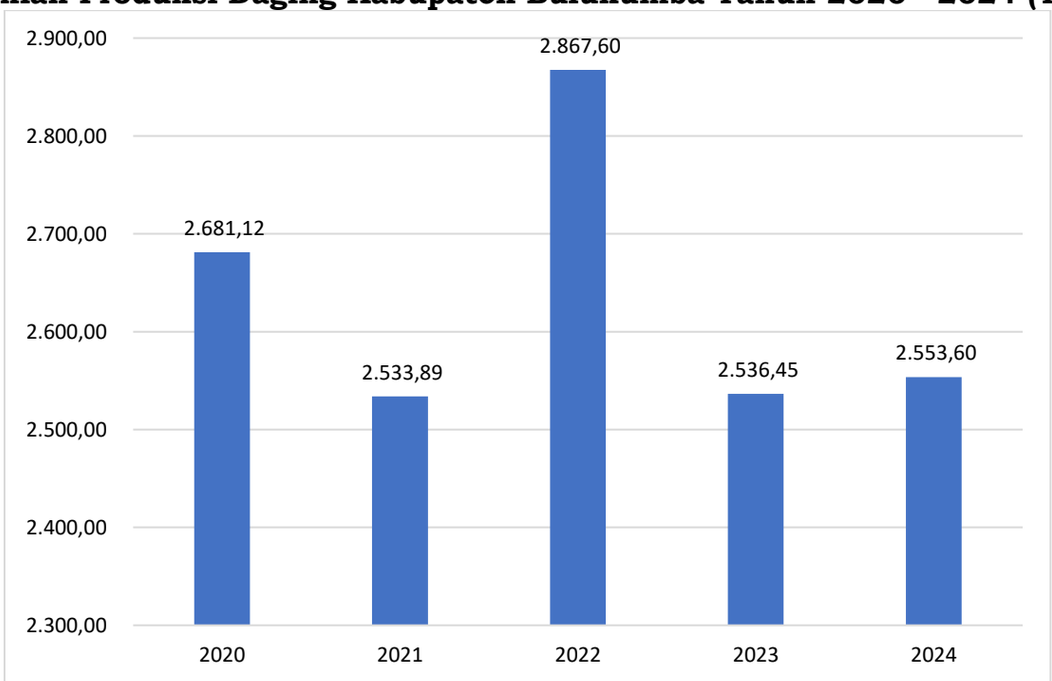


Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

k) Jumlah Produksi Daging

Produksi daging di Kabupaten Bulukumba mengalami fluktiasi. Adapun produksi yang menyumbang untuk peningkatan produksi daging adalah Sapi Potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik dan lain-lain. Potensi sektor ini masih cukup besar, didukung oleh ketersediaan lahan penggembalaan yang luas dan minat masyarakat terhadap usaha peternakan. Jumlah produksi daging Kabupaten Bulukumba diperoleh dari metode sampling dan proyeksi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penurunan data jumlah produksi daging disebabkan oleh tingginya pengeluaran ternak ke daerah lain serta mewabahnya penyakit mulut dan kuku (PMK).

Grafik II-100
Jumlah Produksi Daging Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)



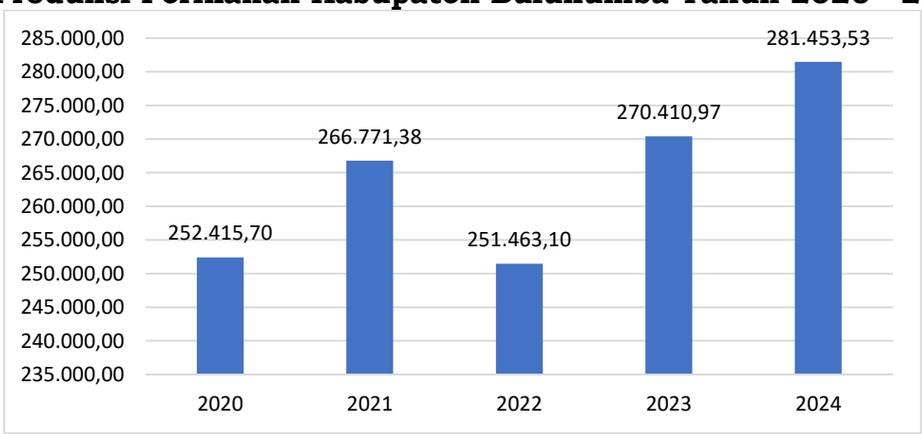
Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

l) Jumlah Produksi Perikanan

Dalam upaya mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan pelaksanaan 5 (lima) program proritas berbasis Ekonomi Biru yang meliputi keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, revitalisasi kesehatan laut dan percepatan pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, keterkaitan dengan produksi perikanan tangkap yaitu penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dan pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang ramah lingkungan. Kedua program inilah yang terbagi kedalam 2 sektor perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Jumlah produksi perikanan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 2020—2024 secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2020 jumlah produksi sebesar 252.415,70 ton dan pada tahun 2024 jumlah produksi sebesar 281.453,53 ton. Faktor penyebab fluktuasi ini mencakup kondisi cuaca, overfishing, perubahan ekosistem laut, serta ketersediaan sarana dan prasarana perikanan. Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan produksi, diperlukan solusi seperti penerapan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan, peningkatan teknologi budidaya perikanan, penguatan pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya laut, serta pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha perikanan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-101
Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (ton)



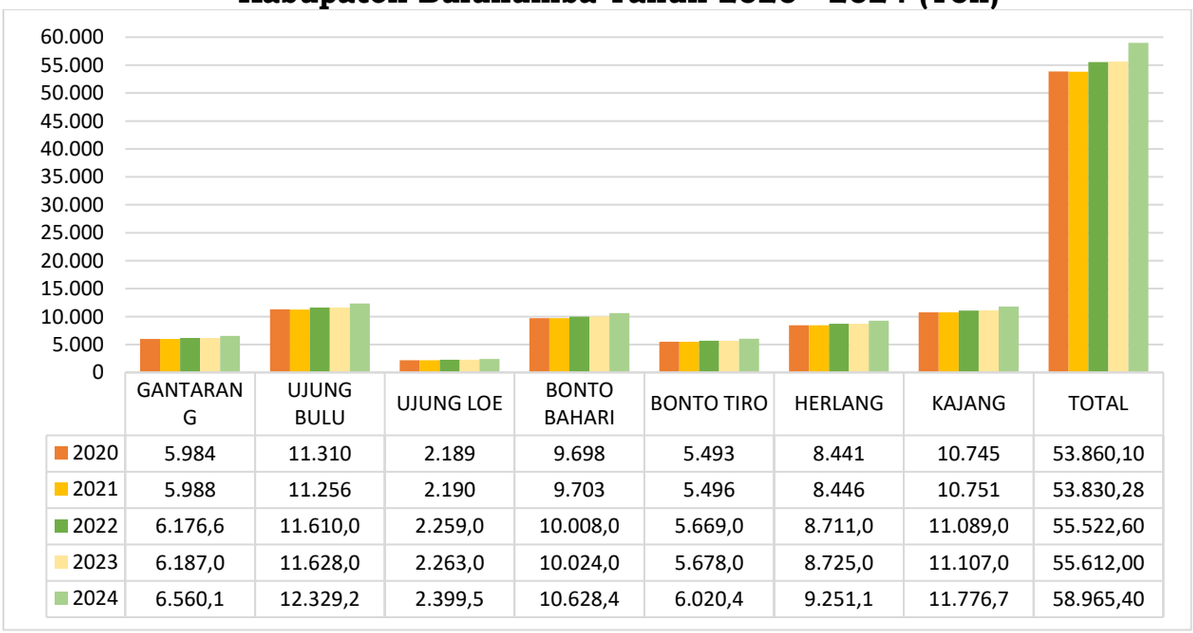
Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Dari grafik diatas jumlah produksi perikanan merupakan akumulasi dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya, dengan rincian sebagai berikut:

a) Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan produksi perikanan tangkap Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-102
Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)



	GANTARANG	UJUNG BULU	UJUNG LOE	BONTO BAHARI	BONTO TIRO	HERLANG	KAJANG	TOTAL
2020	5.984	11.310	2.189	9.698	5.493	8.441	10.745	53.860,10
2021	5.988	11.256	2.190	9.703	5.496	8.446	10.751	53.830,28
2022	6.176,6	11.610,0	2.259,0	10.008,0	5.669,0	8.711,0	11.089,0	55.522,60
2023	6.187,0	11.628,0	2.263,0	10.024,0	5.678,0	8.725,0	11.107,0	55.612,00
2024	6.560,1	12.329,2	2.399,5	10.628,4	6.020,4	9.251,1	11.776,7	58.965,40

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Untuk menjaga stabilitas dan peningkatan produksi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerapkan beberapa strategi yaitu:

1. Program 1000 Rumpon

Program ini mulai dirintis sejak tahun 2021 dan di tahun 2024 telah diberikan bantuan sebanyak 687 dari 1000 rumpon yang direncanakan atau telah tercapai 68,7 persen. Adapun tujuan dari program rumpon adalah untuk menyediakan rumah ikan sebagai titik kumpul ikan, dimana nelayan tidak lagi harus berburu ikan secara acak di laut dan ketersediaan ikan cukup di perairan dangkal sehingga tidak memakan biaya yang cukup besar untuk menangkap ikan. Berdasarkan survei Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa produksi tangkapan meningkat rata-rata sebesar 40,24 persen. Sebelum menerima bantuan, tangkapan rata-rata nelayan hanya 2,6 ton per trip (15 hari) dengan pendapatan sekitar Rp 44,7 juta, namun setelah adanya bantuan rumpon, tangkapan meningkat menjadi 3,7 ton/trip dengan pendapatan rata-rata Rp 63,6 juta. Artinya, terdapat kenaikan pendapatan rata-rata sebesar Rp 18,9 juta per trip.

Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa kelompok nelayan tangkap mengalami peningkatan produksi diantaranya: Kelompok Putra Sibara, kenaikan produksi mencapai 127 persen dan Kelompok Tiga Putra mencapai 75,3 persen. Program ini telah berhasil mengubah paradigma nelayan dari berburu menjadi panen berbasis titik ekosistem buatan, serta meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya operasional nelayan.

2. Pembangunan Kolam Labuh

Kolam labuh adalah bagian dari pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang berfungsi sebagai area tempat kapal-kapal bersandar atau berlabuh di perairan sebelum atau sesudah melakukan kegiatan bongkar muat, naik turun awak kapal, atau persiapan pelayaran.

Dalam konteks pelabuhan perikanan, kehadiran Kolam Labuh di Kabupaten Bulukumba menjadi area penampungan sementara kapal-kapal perikanan sebelum menuju dermaga atau setelah selesai beraktivitas dan juga sebagai tempat

berlabuh yang aman bagi kapal-kapal pada saat musim angin barat dan musim angin timur.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah membangun 1 unit kolam labuh yaitu Kolam Labuh Bentenge dengan total panjang causeway 435 meter yang terletak di Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu. Kolam Labuh Bentenge berada dalam Satu Kawasan Pantai Merpati Bulukumba sebagai pusat kuliner dan ruang aktifitas warga kota seperti joging, senam, panggung hiburan dan berenang.

Saat ini, kolam labuh sudah difungsikan secara operasional sebagai tempat labuh dan bongkar muat ikan bagi sekitar 10–100 nelayan setiap hari. Namun demikian, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena pembangunan breakwater (pemecah gelombang) belum rampung. Akibatnya, pada musim angin timur seperti sekarang, nelayan kesulitan berlabuh dan memilih masuk ke muara Sungai Bialo untuk berlindung. Namun begitu, infrastruktur kolam labuh ini telah memberi kemudahan signifikan bagi nelayan dalam hal efisiensi waktu, biaya operasional, dan akses ke pasar hasil perikanan.

3. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Bentenge

Setelah direhabilitasi, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bentenge kini sangat dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan. Volume ikan yang didaratkan di TPI kini mencapai rata-rata 1,38 ton/hari. Dengan asumsi harga ikan rata-rata Rp 25.000/kg, maka nilai transaksi harian di TPI mencapai:

1.380 kg × Rp 25.000 = Rp 34.500.000 per hari

Denyut ekonomi di sekitar TPI meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sebelum rehabilitasi, hanya ada sekitar 5 orang penjual ikan yang berjualan pada sore hari. Kini, terdapat penjual ikan lebih dari 60 orang dan waktu aktifitas bertambah dimulai dari pukul 03.00 dini hari hingga pukul 22.00 malam, menunjukkan peningkatan aktivitas yang luar biasa.

Efek berganda (multiplier effect) dari revitalisasi TPI juga dirasakan masyarakat sekitar:

- Munculnya lapangan usaha baru seperti penjualan es batu, kantong kresek,buruh dll,
- Penjual makanan dan warung nasi di sekitar TPI yang turut terdorong oleh geliat ekonomi pelabuhan.

Ketiga strategi melalui program prioritas yaitu: pengadaan rumpon, Pembangunan Kolam Labuh, dan Tempat Pelelangan Ikan merupakan satu kesatuan sistem penguatan perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba. Penerapan Ekonomi Biru kini hadir dimulai hulu ke hilir, mulai dari produksi di laut, fasilitas sandar kapal, hingga penyediaan pasar yang tertib dan produktif. Dengan kesinambungan program dan dukungan infrastruktur diyakini produktifitas perikanan dan kesejahteraan nelayan akan terus meningkat serta memperkuat ekosistem ekonomi nelayan secara berkelanjutan.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Bulukumba meliputi jenis ikan tuna, cakalang, tongkol, layang, kembung, tembang, lemuru, kerapu, teri, paperek, kakap dan ikan lainnya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap yang signifikan di setiap kecamatan. Produksi tertinggi berada di Kecamatan Ujung Bulu, Kajang dan Herlang. Peningkatan produksi di Kecamatan Ujung Bulu ditunjang oleh ketersediaan pasar dan tempat pelelangan ikan yang memadai, sehingga para nelayan cenderung bersandar di pesisir Kecamatan Ujung Bulu. Adapun produksi perikanan yang di daratkan didominasi oleh ikan pelagis kecil yang bukan merupakan komoditas ekspor utama, komposisi produksi tersebut sesuai dengan permintaan pasar. Sementara

itu peningkatan produksi Kecamatan Herlang dan Kajang ditunjang oleh adanya peningkatan jumlah dan kapasitas armada tangkap dan penggunaan teknologi seperti GPS. Faktor lain yang menjadi pendorong peningkatan produksi adalah dengan diluncurkannya program Minapolitan Perikanan Tangkap. Terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang masuk dalam Zona Minapolitan. Zona Minapolitan ini terdiri dari zona inti yaitu Kecamatan Kajang dan Zona Penyangga/Pengembangan terdiri dari Kecamatan Bonto Tiro, Herlang, Bonto Bahari, Ujungloe, Ujung Bulu dan Gantarang.

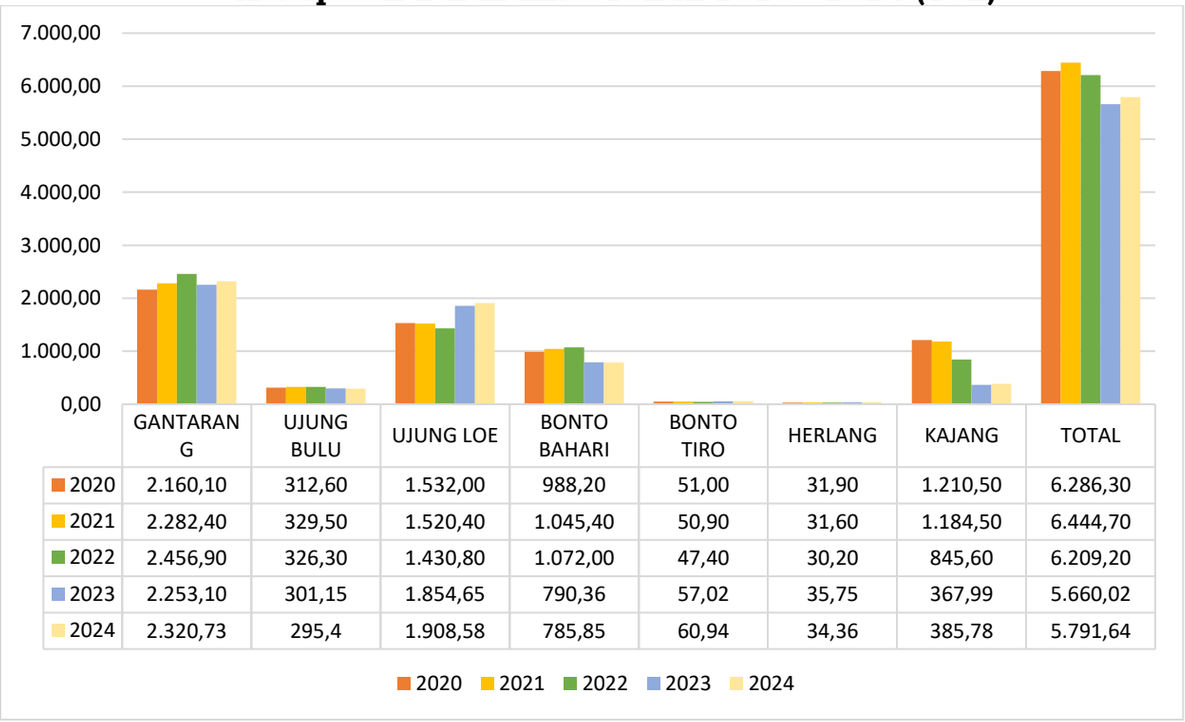
b) Produksi Perikanan Budidaya

Selama lima tahun terakhir, produksi sektor budidaya secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun mengalami fluktuasi tahunan. Produksi budidaya meningkat dari 198.556 ton 2020 menjadi 222.488,2 ton tahun 2024. Ini mencerminkan adanya pertumbuhan kumulatif yang mencerminkan keberhasilan strategi peningkatan produksi dan efisiensi dalam sektor ini.

Untuk perikanan budidaya tambak di Kabupaten Bulukumba meliputi komoditas seperti udang windu, udang vaname, ikan bandeng, udang api-api, udang putih, ikan mujair, dan jenis ikan lainnya. Perkembangan produksi perikanan budidaya tambak selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah produksi mencapai 6.286,3 ton dan meningkat sebesar 2,52 persen pada tahun 2021 menjadi 6.444,7 ton. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari tambak intensif dengan luas lahan produksi yang cukup besar. Namun, pada tahun 2022, produksi mengalami penurunan sebesar 3,65 persen menjadi 6.209,2 ton. Penurunan ini terutama terjadi pada produksi rumput laut Gracilaria di tambak, khususnya di Kecamatan Kajang, yang menurun dari 1.184,5 ton pada tahun 2021 menjadi 845,6 ton pada tahun 2022. Kecamatan Kajang merupakan salah satu sentra produksi rumput laut Gracilaria, namun harga jual rumput laut tambak yang rendah, berbanding terbalik dengan harga rumput laut pantai yang terus meningkat.

Selanjutnya tahun 2023, produksi kembali menurun dari 6.209,2 ton menjadi 5.660,0 ton. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya produksi tambak di Kecamatan Kajang yang turun dari 845,6 ton pada tahun 2022 menjadi 367,99 ton pada tahun 2023, serta di Kecamatan Bonto Bahari dari 1.072,0 ton menjadi 790,36 ton pada periode yang sama. Penurunan tersebut banyak dipengaruhi oleh kegagalan panen udang yang terjadi di beberapa perusahaan. Namun demikian, pada tahun 2024 produksi perikanan tambak mengalami kenaikan sebesar 2,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan produksi perikanan budidaya tambak Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-103
Produksi Perikanan Budidaya Tambak
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)



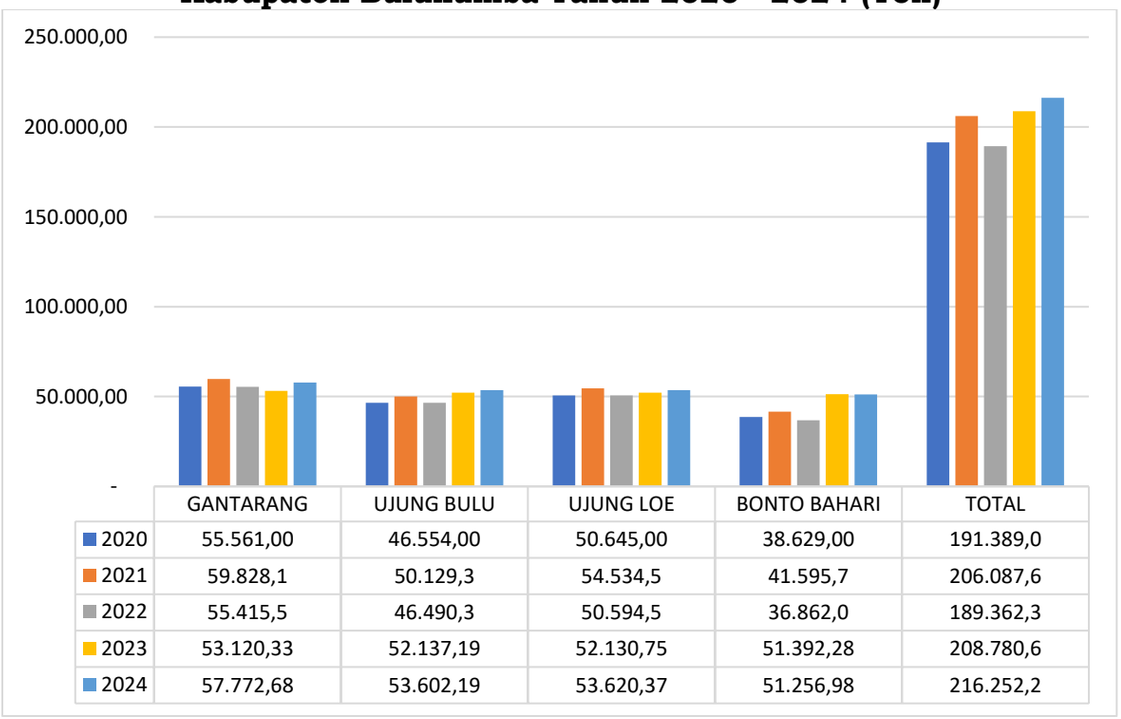
	GANTARANG	UJUNG BULU	UJUNG LOE	BONTO BAHARI	BONTO TIRO	HERLANG	KAJANG	TOTAL
2020	2.160,10	312,60	1.532,00	988,20	51,00	31,90	1.210,50	6.286,30
2021	2.282,40	329,50	1.520,40	1.045,40	50,90	31,60	1.184,50	6.444,70
2022	2.456,90	326,30	1.430,80	1.072,00	47,40	30,20	845,60	6.209,20
2023	2.253,10	301,15	1.854,65	790,36	57,02	35,75	367,99	5.660,02
2024	2.320,73	295,4	1.908,58	785,85	60,94	34,36	385,78	5.791,64

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Untuk perikanan budidaya laut didominasi oleh komoditas rumput laut, khususnya jenis *Eucheuma cottonii* dan *Eucheuma spinosum*. Produksi rumput laut menunjukkan fluktuasi yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan keberhasilan budidaya. Pada tahun 2020, produksi mencapai 191.389,0 ton dan meningkat sebesar 7,68 persen tahun 2021 menjadi 206.087,6 ton. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi sebesar 8,12 persen menjadi 189.362,3 ton, yang disebabkan oleh kegagalan produksi akibat cuaca ekstrem dan penurunan kualitas air laut seiring dengan kenaikan permukaan laut secara global. Selanjutnya, produksi kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 208.780,5 ton (naik 10,25 persen), dan pada tahun 2024 meningkat lagi sebesar 3,58 persen menjadi 216.252,22 ton. Hal ini mencerminkan ketahanan dan kemampuan adaptasi sektor budidaya laut terhadap tantangan lingkungan dan teknis yang dihadapi.

Peningkatan produksi budidaya rumput laut terjadi karena beberapa nelayan dan masyarakat beralih kepada budidaya rumput laut sehingga secara tidak langsung ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya terjadi. Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya peminat budidaya rumput laut dikarenakan mudahnya pengelolaan dengan modal dan risiko usaha yang terbilang kecil, ditambah dengan arti penting komoditas ini sebagai komoditas ekspor semakin menempatkannya sebagai komoditas andalan untuk penghasil devisa. Pengembangan rumput laut ini berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba. Perkembangan produksi perikanan budidaya rumput laut Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-104
Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)



	GANTARANG	UJUNG BULU	UJUNG LOE	BONTO BAHARI	TOTAL
2020	55.561,00	46.554,00	50.645,00	38.629,00	191.389,0
2021	59.828,1	50.129,3	54.534,5	41.595,7	206.087,6
2022	55.415,5	46.490,3	50.594,5	36.862,0	189.362,3
2023	53.120,33	52.137,19	52.130,75	51.392,28	208.780,6
2024	57.772,68	53.602,19	53.620,37	51.256,98	216.252,2

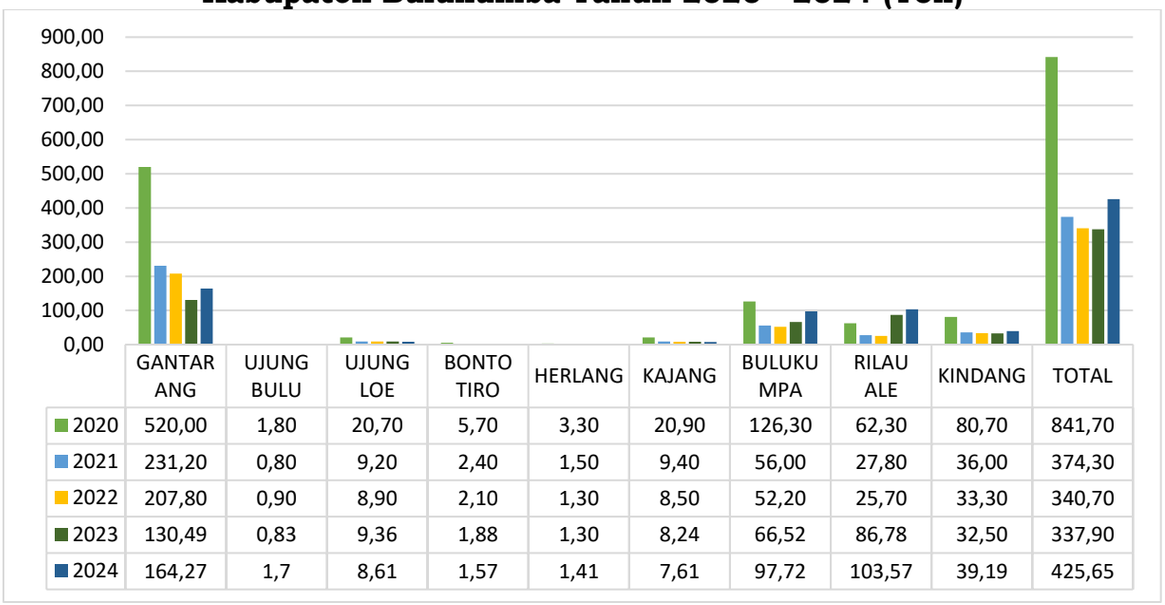
Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

Produksi perikanan budidaya kolam di Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, khususnya dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, produksi mencapai 841,7 ton, yang sebagian besar berasal dari komoditas ikan ekonomis seperti ikan mas, lele, nila, dan mujair. Namun, produksi mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 menjadi 374,3 ton atau menurun sebesar 55,53 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat di Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa dalam membudidayakan ikan air tawar. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan produksi sebesar 340,7 ton (turun 8,98 persen) dan tahun 2023 sebesar 337,9 ton (turun 0,82 persen).

Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan produksi menjadi 425,65 ton. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya pemulihan dan pengembangan budidaya kolam melalui dukungan pemerintah berupa bantuan bibit ikan serta pembangunan kolam percontohan bagi kelompok masyarakat. Secara umum, kontribusi produksi kolam masih tergolong rendah dibandingkan jenis perikanan budidaya lainnya di Kabupaten Bulukumba, namun menunjukkan potensi pertumbuhan apabila ditunjang dengan intervensi dan pengelolaan yang tepat.

Orientasi produksi ikan air tawar ini belum mengarah pada komersial melainkan masih berbasis pada konsumsi semata. Dengan demikian jika ditinjau dari aspek ekonomi budidaya air tawar ini belum berdampak banyak terhadap peningkatan *income* (pendapatan) masyarakat meskipun diantara beberapa pembudidaya sudah ada yang menjual hasil produksinya. Orientasi masyarakat yang masih lebih banyak ke konsumsi ini karena kurangnya pangsa pasar baik itu lokal maupun ke regional. Strategi awal yang bisa dilakukan adalah memasyarakatkan konsumsi ikan air tawar pada penduduk Bulukumba.

Grafik II-105
Produksi Perikanan Budidaya Kolam
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Ton)



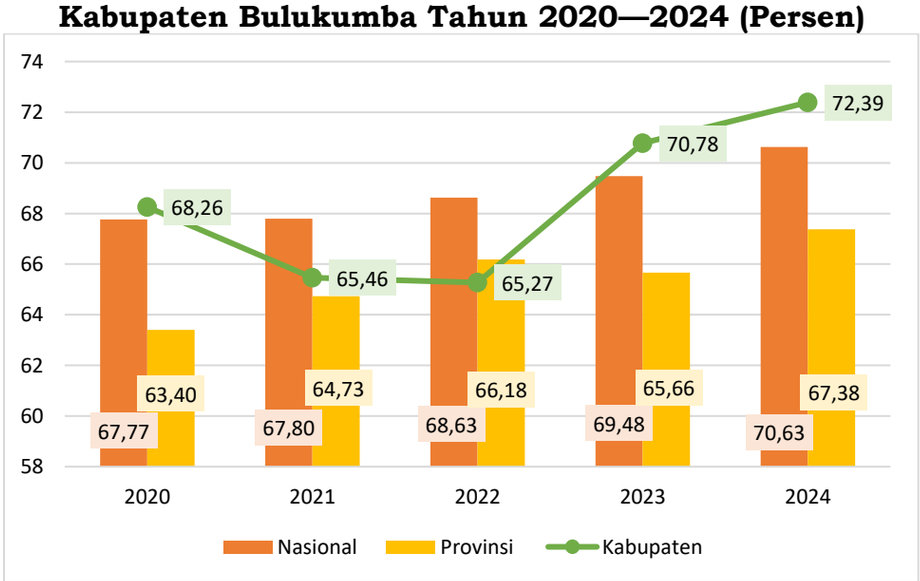
	GANTARANG	UJUNG BULU	UJUNG LOE	BONTO TIRO	HERLANG	KAJANG	BULUKUMPA	RILAU ALE	KINDANG	TOTAL
2020	520,00	1,80	20,70	5,70	3,30	20,90	126,30	62,30	80,70	841,70
2021	231,20	0,80	9,20	2,40	1,50	9,40	56,00	27,80	36,00	374,30
2022	207,80	0,90	8,90	2,10	1,30	8,50	52,20	25,70	33,30	340,70
2023	130,49	0,83	9,36	1,88	1,30	8,24	66,52	86,78	32,50	337,90
2024	164,27	1,7	8,61	1,57	1,41	7,61	97,72	103,57	39,19	425,65

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

m) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja, dan merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Grafik II-106
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

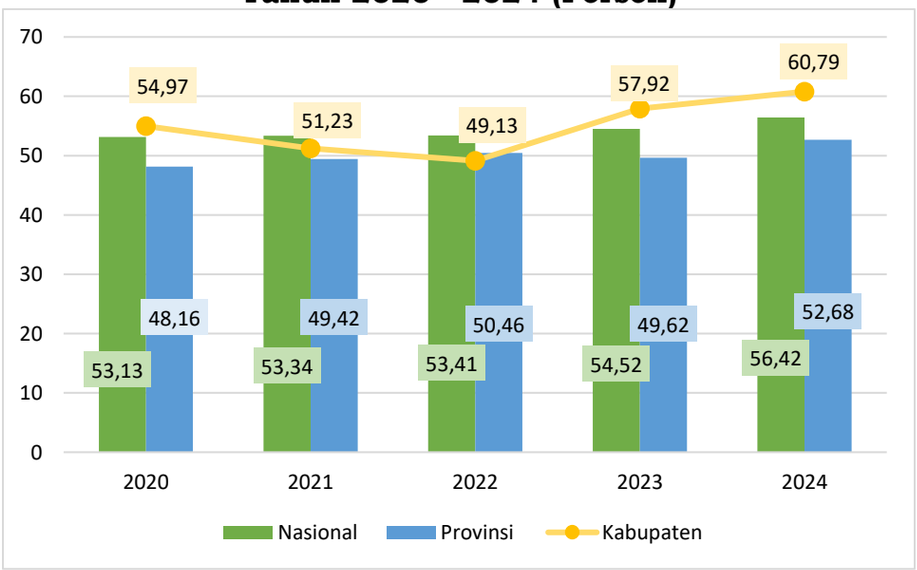
TPAK Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir, dari 68,26 persen pada 2020 menjadi 72,39 persen pada 2024. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja sebanyak 251.230 orang, naik sebanyak 6.275 orang dari Agustus 2023. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian

sebanyak 102.364 orang atau sebesar 40,75 persen dari total pekerja. Sebanyak 159.582 orang (63,52 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 6 persen poin dibanding Agustus 2023. Peningkatan pada 2024 menunjukkan adanya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mempertahankan tren positif ini, solusi yang perlu dilakukan meliputi peningkatan pelatihan keterampilan kerja, penciptaan lapangan pekerjaan berbasis sektor potensial seperti industri kreatif dan digital, serta kebijakan insentif bagi pelaku usaha untuk memperluas rekrutmen tenaga kerja.

n) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat fertilitas, pendidikan perempuan, populasi perempuan dan upah tenaga kerja perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki perekonomian rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan individu serta menyalurkan potensi bekerja perempuan. Perempuan mempunyai kemampuan dalam melihat dan memahami keadaan lingkungan sekitarnya sehingga sebagian dari mereka mampu menjadi tulang punggung keluarga. Perempuan dapat melaksankan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga serta penjaga keberlangsungan kehidupan dan pengambil keputusan dalam keluarga, sehingga hal ini dapat mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. Meningkatnya TPAK-P dapat menurunkan angka ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja sehingga permasalahan tentang diskriminasi perempuan akan berkurang.

Grafik II-107
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



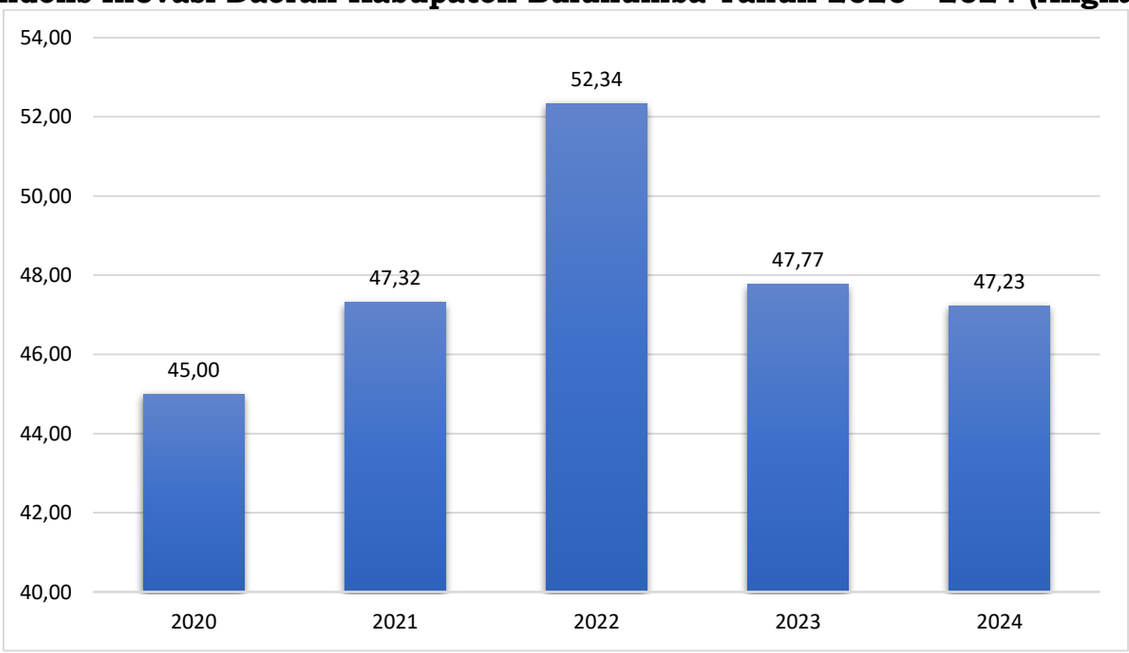
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

TPAK-P Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi berada di angka 54,97 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan dan kembali meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 57,92 persen dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan 60,79 persen. TPAK-P Kabupaten Bulukumba juga tampak lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi selama lima tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja di tingkat daerah yang cukup positif.

o) Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Berikut capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024:

Grafik II-108
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2024 masuk dalam predikat "Kabupaten inovatif". Komitmen Bulukumba dalam berinovasi terbukti melalui sejumlah penghargaan yang diraih:

1. Tahun 2020: Dua inovasi dari Bulukumba berhasil lolos dalam TOP 30 di tingkat Provinsi, yaitu inovasi LARAKU NYATA dan Adminduk INKLUSIF.
2. Tahun 2021: Inovasi RAMAH ADAT menjadi sorotan dan diakui.
3. Tahun 2022: Inovasi KAREBA juga sukses menembus TOP 30 di tingkat provinsi.
4. Tahun 2023: Inovasi LORONG JELITA dan PROMINA menambah daftar prestasi Kabupaten Bulukumba.

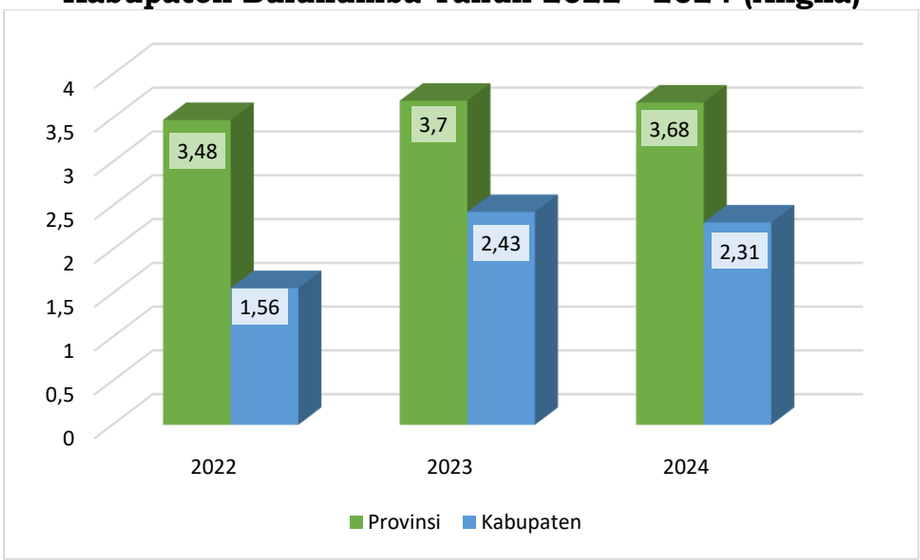
Tak berhenti di tingkat provinsi dan nasional, inovasi Bulukumba juga berkancah di panggung internasional:

1. Tahun 2023: Inovasi LORONG JELITA berhasil meraih juara kedua dan menjadi favorit dalam kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh COPSI.
2. Tahun 2024: Inovasi PROMINA juga menunjukkan kualitasnya dengan lolos sebagai finalis di ajang yang sama.

p) Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Grafik II-109
Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka)



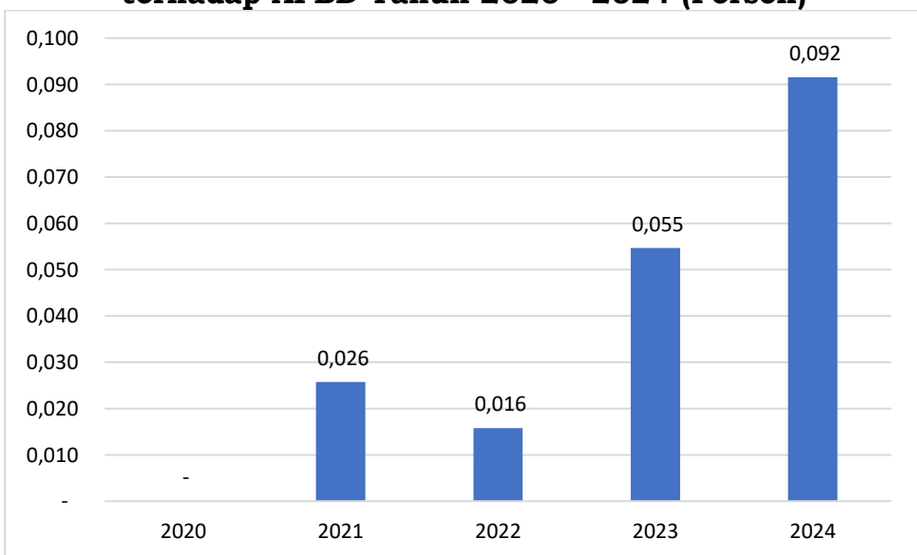
Sumber : Indeks Daya Saing Daerah, BRIN, 2025

Pada grafik di atas, Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2022—2024 yang dikeluarkan oleh BRIN mengalami penurunan 0,12 dari angka 2,43 pada tahun 2023 dan 2,31 pada tahun 2024.

q) Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD

Proporsi Anggaran Riset terhadap APBD merujuk pada persentase dari total APBD yang dialokasikan untuk kegiatan riset dan pengembangan di tingkat pemerintah daerah. Ini memberikan gambaran tentang prioritas dan komitmen daerah terhadap inovasi, pengembangan teknologi, dan penelitian ilmiah.

Grafik II-110
Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap APBD Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber : Bapperida, diolah 2025

Proporsi anggaran riset Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar 0 persen pada 2020, meningkat menjadi 0,026 persen pada 2021, turun menjadi 0,016 persen pada 2022, lalu naik signifikan menjadi 0,092 persen pada 2024. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi dana, prioritas anggaran yang lebih condong ke sektor lain, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. Peningkatan pada 2024 menunjukkan adanya

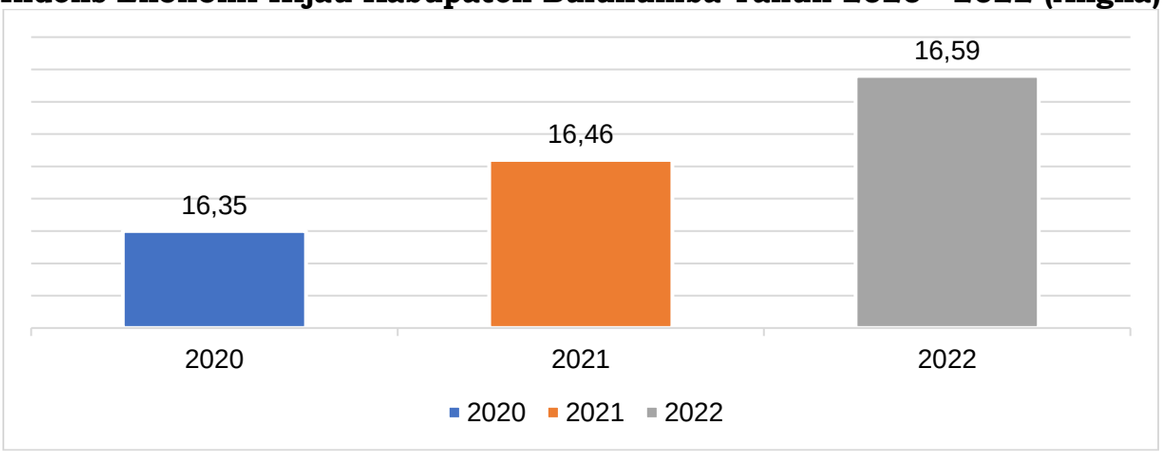
kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya riset untuk pembangunan daerah. Untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung riset, meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung dalam pengambilan kebijakan dan inovasi daerah.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a) Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Bulukumba menunjukkan perkembangan yang positif dari capaian 16,35 pada tahun 2020 menjadi 16,59 pada tahun 2022, mencerminkan upaya yang semakin kuat dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi. Meskipun terdapat peningkatan, tantangan utama yang dihadapi termasuk fluktuasi hasil yang disebabkan oleh ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan lingkungan, kekurangan infrastruktur hijau, dan keterbatasan dalam kapasitas pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya pelaksanaan harus fokus pada konsolidasi kebijakan yang mendukung ekonomi hijau, peningkatan investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kapasitas institusi lokal dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek-proyek hijau. Integrasi yang lebih baik antara sektor publik dan swasta serta keterlibatan masyarakat dalam prakarsa hijau akan menjadi kunci dalam mencapai peningkatan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada Indeks Ekonomi Hijau di masa depan. Namun, untuk data tahun 2023 dirilis pada satu tahun selanjutnya atau tahun 2025.

Grafik II-111
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2022 (Angka)



Sumber Data : Bappenas, 2024

b) Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Bulukumba terus menjadi fokus penting dalam upaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan. Meskipun data resmi tahun 2024 masih dalam proses penyusunan oleh Bappenas, arah kebijakan dan implementasi program daerah menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap pengembangan sektor ekonomi yang berbasis air, seperti perikanan tangkap dan budidaya, ekowisata bahari, serta pengelolaan kawasan pesisir dan perairan darat secara terpadu. Wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba mencakup beberapa kecamatan, yaitu Kajang, Ujung Bulu, Gantarang, Ujungloe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, dan Herlang, yang seluruhnya memiliki garis pantai dan potensi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi biru. Namun demikian, kegiatan ekonomi biru tidak terbatas pada wilayah pesisir saja;

kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki garis pantai pun dapat terlibat aktif melalui budidaya ikan di kolam, empang, tambak, maupun pemanfaatan perairan darat lainnya yang dikelola secara berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan praktik ramah lingkungan, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta minimnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya perairan. Untuk mendorong peningkatan Indeks Ekonomi Biru ke depan, dibutuhkan sinergi yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya ini harus mencakup peningkatan literasi ekonomi biru, penguatan regulasi dan tata kelola perairan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi akuakultur dan kelautan yang inovatif guna menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian ekosistem air.

2.1.3.4 Transformasi Digital

a. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa banyak layanan publik yang dapat diakses secara online dan seberapa baik layanan-layanan tersebut terintegrasi satu sama lain dalam suatu sistem. Ini adalah indikator penting dalam menilai kemajuan digitalisasi layanan publik, efisiensi administratif, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada urusan komunikasi dan informatika, tahun 2020—2022 sejumlah 14 layanan dan bertambah menjadi 17 layanan pada tahun 2024 layanan publik tersebut sudah diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi.

Tabel II-87
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Publik yang Diselenggarakan	14	14	14	20	17
Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	14	14	14	20	17
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

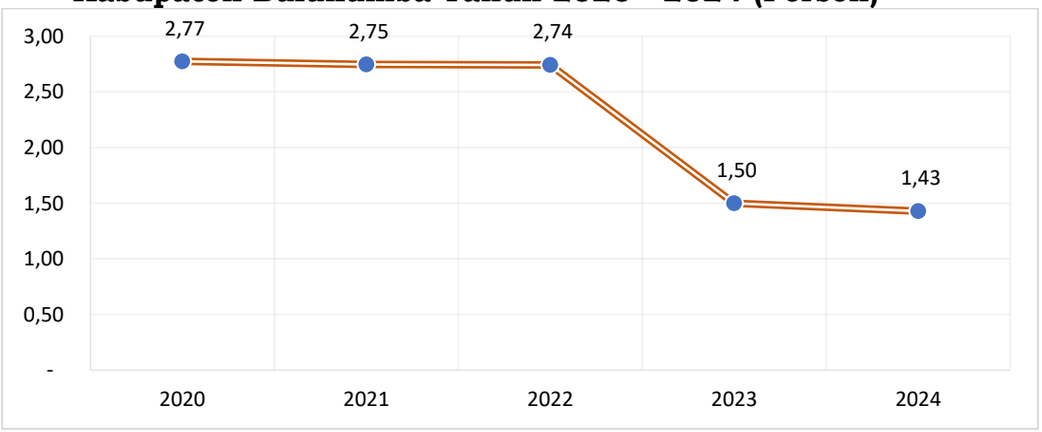
Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien antar waktu adalah perbandingan Simpangan baku pada tahun N terhadap harga rata-rata pertahun pada tahun N. Simpangan baku adalah

persentase selisih harga real dengan harga rata-rata per komoditi. Harga rata rata adalah harga rata rata per komoditi yang telah ditentukan.

Tabel II-88
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2025

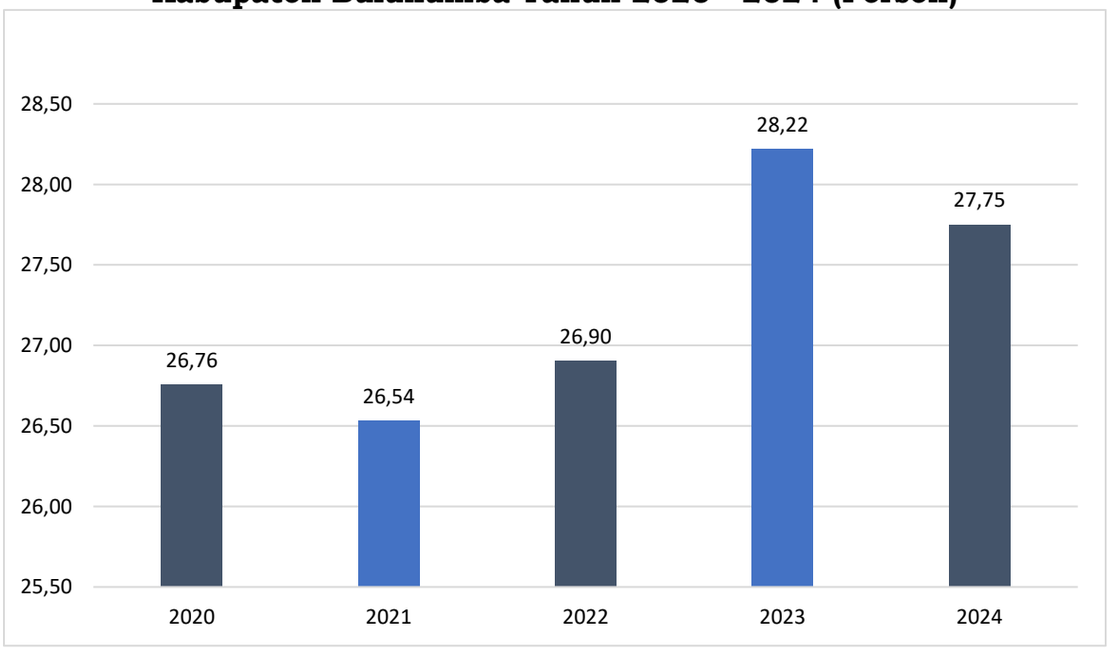
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren menurun dari 2,77 persen pada 2020 menjadi 1,43 persen pada 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah komoditi yang menjadi perhitungan pada tahun 2020—2022 dengan jumlah komoditi tahun 2023—2024.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Grafik II-112
Pembentukan Modal Tetap Bruto

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : BPS Kabupaten Bulukumba, 2025

Dapat dilihat bahwa nilai PMBT atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan secara perlahan dari 26,76 persen tahun 2020 menjadi 27,75 persen tahun 2024. Kenaikan bertahap ini menunjukkan pemulihan ekonomi serta adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi swasta. Untuk mempertahankan tren positif ini, pemerintah terus memperbaiki iklim investasi dengan memberikan insentif pajak, penyederhanaan regulasi, serta meningkatkan infrastruktur guna menarik lebih banyak investor.

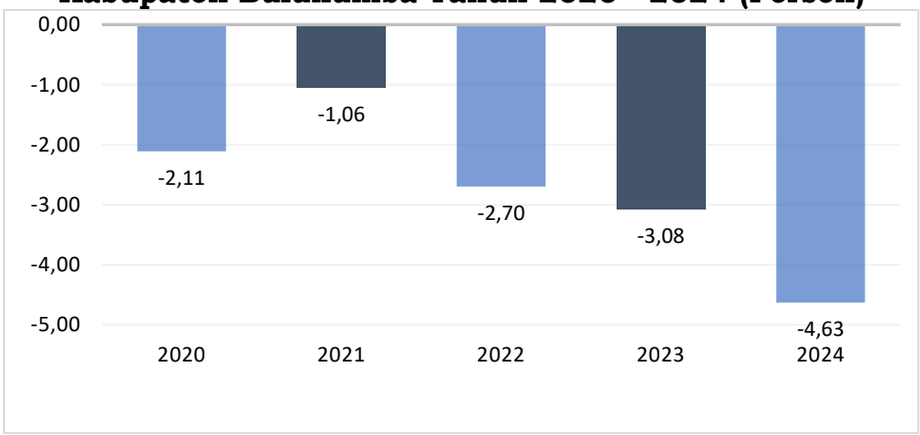
c. Net Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor neto (*net export*) adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurang nilai barang dan jasa yang di impor dari negara lain. Ekspor neto bernilai positif ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor dan negatif ketika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Ekspor-impor merupakan alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan nonresiden (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.

Grafik II-113
Net Ekspor Barang dan Jasa

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : BPS Kabupaten Bulukumba, 2025

Nilai net ekspor di Kabupaten Bulukumba menunjukkan angka negatif dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar -4,63 persen, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan produk dari luar wilayah Bulukumba (impor) dan rendahnya daya saing produk lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan daya saing produk lokal melalui inovasi dan teknologi, memperbaiki infrastruktur logistik, serta mendorong investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor guna mengurangi defisit perdagangan.

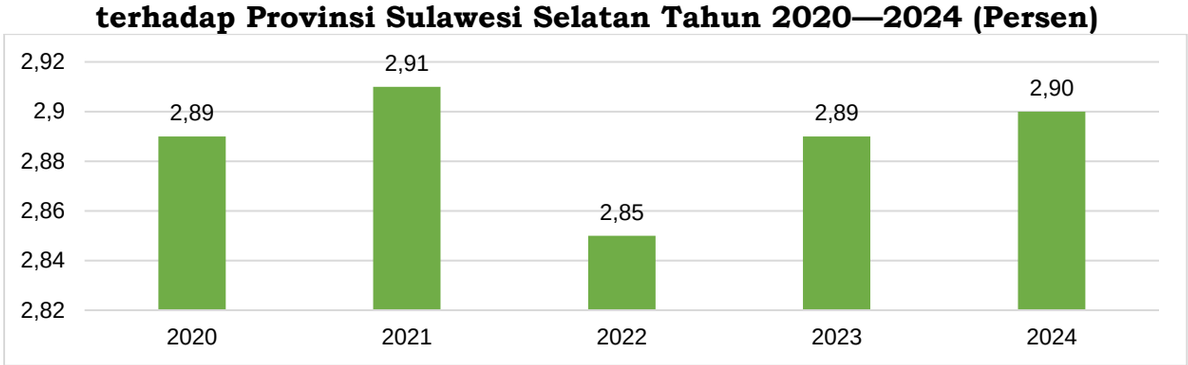
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi

Proporsi kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi adalah untuk mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah dengan 24 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bulukumba memberikan kontribusi 2,90 persen pada tahun 2024 berdasarkan nilai PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) terhadap total capaian PDRB ADHB pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik II-114
Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Bulukumba terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020—2024 (Persen)



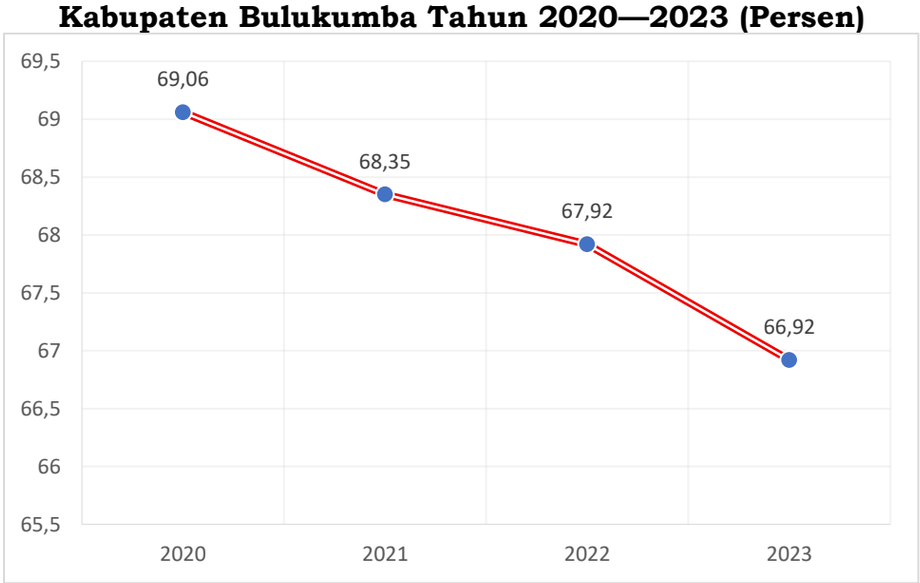
Sumber Data : BPS Kabupaten Bulukumba,2025

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan penurunan dari 69,06 persen pada 2020 menjadi 66,92 persen pada 2023. Penyebab tren penurunan ini mencakup meningkatnya harga properti dan bahan bangunan, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan, keterbatasan lahan, serta rendahnya daya beli masyarakat. Solusi yang perlu dilakukan adalah penguatan program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

penyediaan lahan untuk pembangunan hunian terjangkau, insentif bagi pengembang perumahan rakyat, serta peningkatan akses kredit perumahan dengan suku bunga rendah guna memastikan lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak.

Grafik II-115
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Persen)

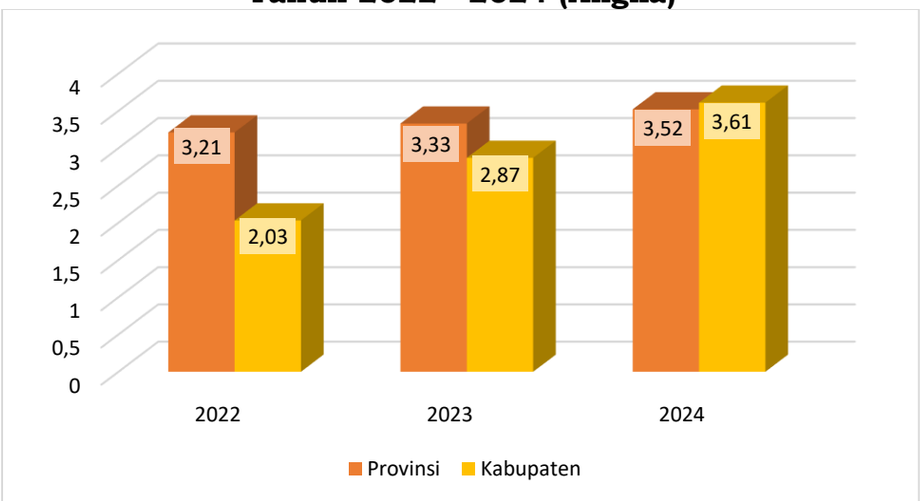


Sumber Data : SUSENAS 2015 - 2023, diolah Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Bappenas bersama BPS

2.1.3.6.3 Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur di suatu daerah, seperti kabupaten. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas dan layanan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, transportasi, energi dan air bersih. Indeks Daya Saing Daerah yang dirilis oleh BRIN sejak tahun 2022—2024 untuk kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagi berikut.

Grafik II-116
Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka)



Sumber Data : Indeks Daya Saing Daerah, BRIN, 2025

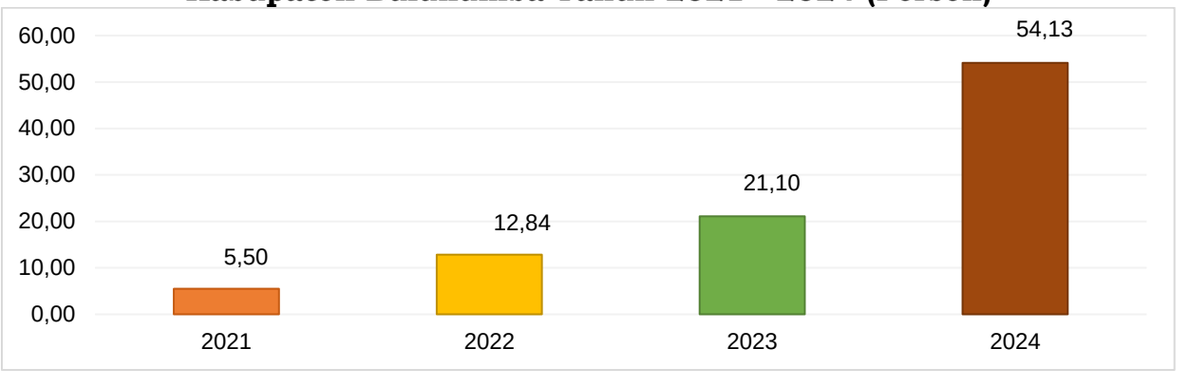
Peningkatan indeks layanan infrastruktur dari 2,03 pada tahun 2022 menjadi 3,61 pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang positif dalam kualitas dan aksesibilitas layanan infrastruktur di Kabupaten Bulukumba. Namun,

meskipun ada perbaikan, masih penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan merencanakan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa semua aspek infrastruktur mendukung kebutuhan masyarakat secara efektif.

2.1.3.6.4 Presentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa. Basis data pengukuran indeks desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh desa yang dikelola oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Indeks desa terdiri atas dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, eksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDT pada tahun 2021—2024 terkait Persentase Desa Mandiri Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik II-117
Persentase Desa Mandiri
Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Persen)



Sumber Data : Dinas PMD Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah desa mandiri tercatat sebesar 5,50 persen atau sebanyak 6 desa. Angka ini meningkat secara signifikan menjadi 54,13 persen pada tahun 2024, dengan total 59 desa mandiri dari 109 desa yang ada. Desa mandiri ditandai oleh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM dan sektor lokal, serta didukung oleh pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang meningkatkan keterampilan masyarakat. Peran aktif pemerintah dan swasta melalui program pemberdayaan dan investasi turut mempercepat pencapaian kemandirian desa, yang semakin diperkuat dengan tersedianya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk menunjang akses pasar dan pengembangan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan memilik 1 (satu) kecamatan yang berpotensi untuk dilakukan pemekaran. Kecamatan Gantarang yang memiliki luas wilayah 175,84 Hektar dengan jumlah penduduk 88.151 jiwa sangat berpotensi untuk dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan baik ditinjau dari syarat dasar, syarat administrasi dan syarat teknis.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Stabilitas tersebut tercermin melalui sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, investasi, daya beli masyarakat, hingga rasio pajak daerah terhadap PDRB. Ketahanan ekonomi yang terjaga akan memberikan ruang fiskal

dan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

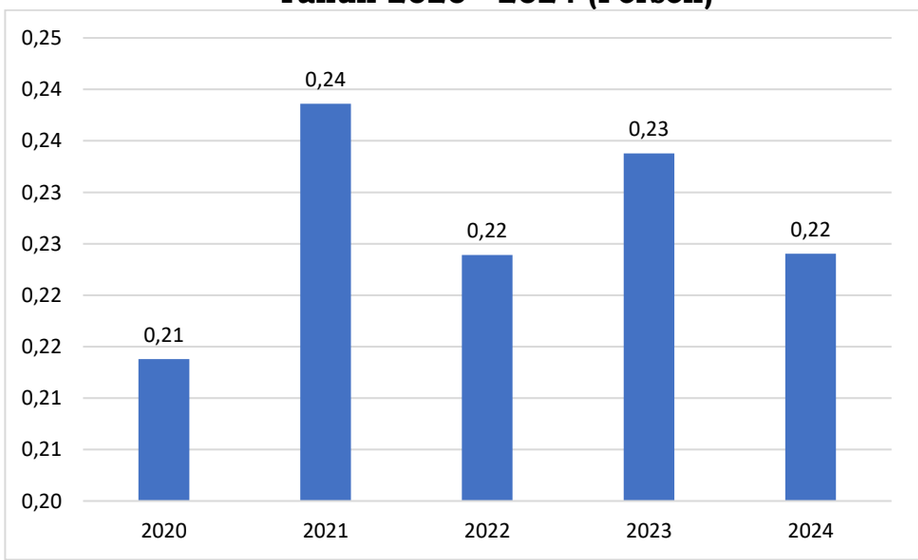
Bagi Kabupaten Bulukumba, penguatan stabilitas ekonomi makro menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi global, nasional, maupun regional yang terus berubah. Oleh karena itu, tinjauan terhadap capaian indikator ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Analisis ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, resilien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Total pendapatan daerah sebagai proporsi terhadap PDRB digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik dalam melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa juga untuk mendukung sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB. Secara sederhana terhadap PDRB dihitung dengan cara membagi total penerimaan pajak dengan PDRB lalu dikalikan 100 persen.

Grafik II-118
Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, BPKAD Kabupaten Bulukumba, diolah, 2025

Rasio pajak terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari 0,21 pada 2020 menjadi 0,22 pada 2024. Hal ini disebabkan karena PDRB mengalami peningkatan sebesar 7,17% dari Tahun 2023 serta rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang sering kali tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan; sistem administrasi perpajakan yang rumit dan peraturan yang tumpang tindih; luasnya sektor informal yang tidak tercatat dan tidak melaporkan pendapatan; serta praktik penghindaran pajak yang semakin mengurangi basis pajak. Selain itu, pendataan basis pajak yang belum akurat, lemahnya pengawasan dalam pemungutan, serta

keterbatasan sumber daya manusia, organisasi, dan sistem teknologi informasi juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Untuk meningkatkan dan menstabilkan rasio pajak terhadap PDRB, pemerintah daerah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan kemudahan layanan; reformasi administrasi perpajakan dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan; perluasan basis pajak melalui pendataan sektor-sektor yang belum terjangkau; optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum atas kepatuhan pajak; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan; serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pemungutan pajak.

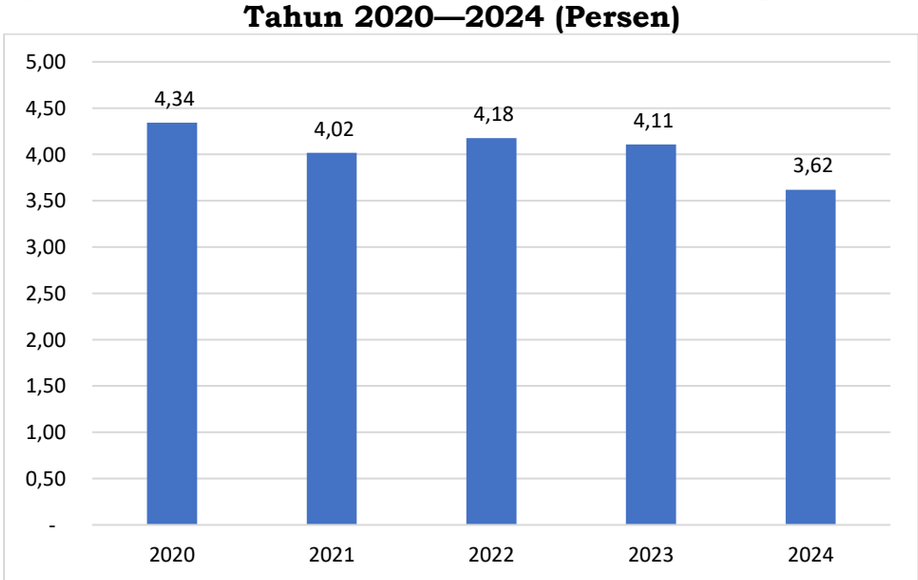
2.1.3.7.2 Indeks Kemandirian Fiskal

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.

2.1.3.7.3 Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD

Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar kontribusi daerah dalam membiayai anggarannya sendiri, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal, kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan dalam memperluas basis pajak dan retribusi. Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari 4,34 persen tahun 2020 menjadi 3,62 persen tahun 2024. Hal ini mencerminkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Grafik II-119
Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



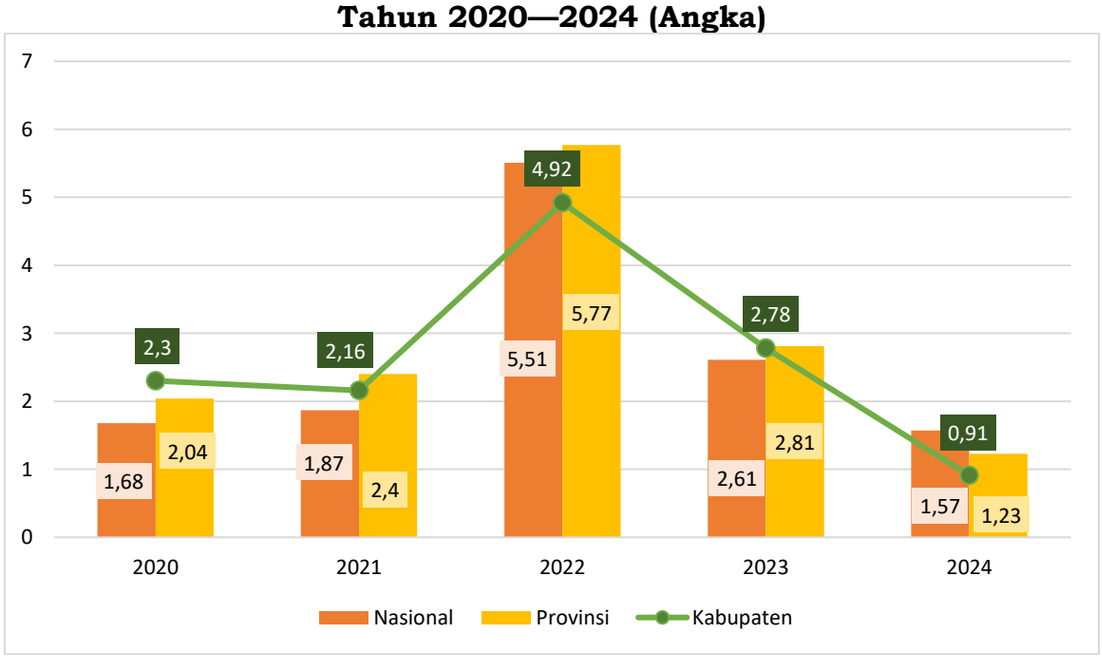
Sumber Data : Bapenda Kabupaten Bulukumba, diolah, 2025

2.1.3.7.4 Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi merupakan gejala

ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik II-120
Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2025

Inflasi Bulukumba tahun 2024 sebesar 0,91 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,78 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,92 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,41 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80 persen. Kabupaten Bulukumba menempati posisi kedua inflasi terendah di 8 kabupaten/kota yang menjadi pengukuran IHK di Sulsel.

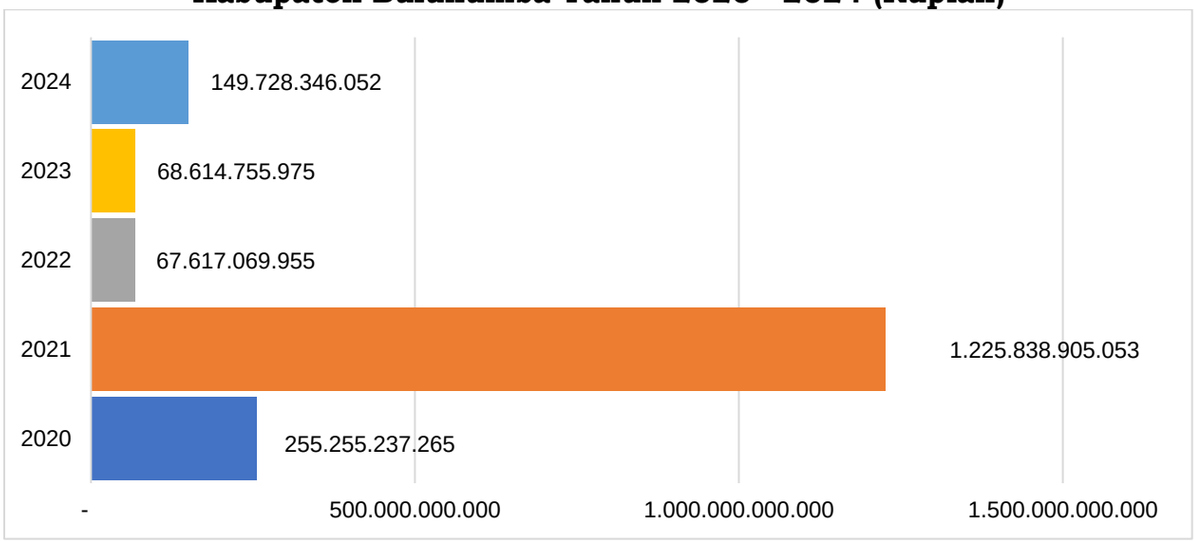
2.1.3.7.5 Pertumbuhan Investasi Daerah

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik warga negara Indonesia baik orang perorangan maupun berbentuk badan usaha, dengan modal usaha tidak melebihi Rp 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan Usaha non Mikro dan Kecil (Non UMK) ini adalah usaha yang skalanya lebih besar dari pada UMK diantaranya adalah Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Usaha Menengah adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha antara Rp 5 Miliar dan tidak melebihi dari Rp 10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan Usaha Besar adalah badan usaha yang dimiliki oleh penanaman modal dalam negeri (PMN) atau penanaman modal asing (PMA) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Bulukumba untuk PMA dan PMN yang terdata tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan sebesar 118,22 persen yang dirilis oleh Dinas PTSP Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II-121
Jumlah Investasi Non UMK PMA/PMDN
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Rupiah)

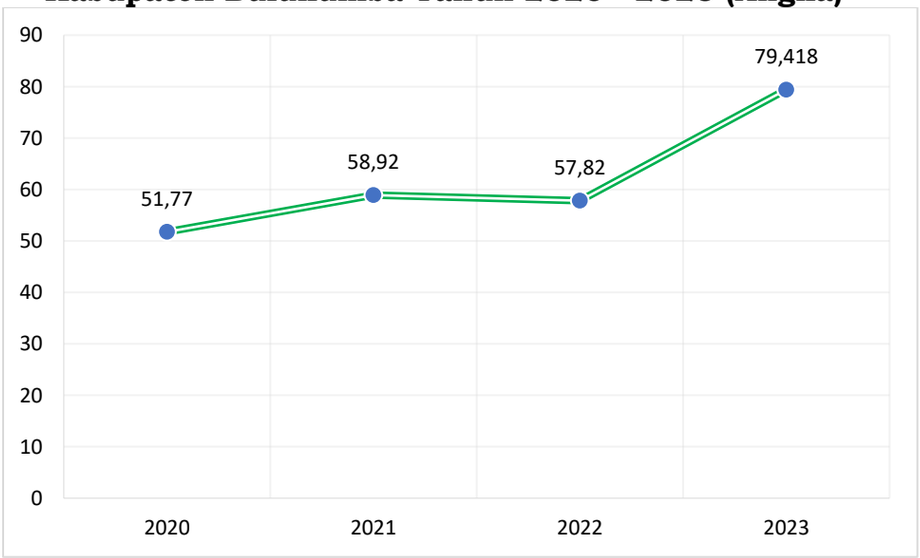


Sumber : Dinas PTSP Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.3.7.6 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: (1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; (2)pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; (3)transparansi pengelolaan keuangan daerah; (4)penyerapan anggaran; (5)kondisi keuangan daerah dan (6)opini Badan Pemerikasa Keuangan atas LKPD. Terdapat lima skor indeks pengelolaan keuangan daerah yaitu: skor 81-100 sangat baik (A); skor 61-80 baik (B); skor 41-60 cukup (C); skor 21-40 buruk (D) dan skor 0-20 sangat buruk (E).

Grafik II-122
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2023 (Angka)



Sumber: IPKD-BPP.Kemendagri, 2024

Pada tahun 2023, Kabupaten Bulukumba mencatat nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79,418, yang menempatkan daerah ini dalam kategori "Perlu Perbaikan". Penilaian ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa capaian positif, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Capaian per dimensi menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Dimensi 2 (Pelaksanaan dan Penatausahaan), Dimensi 4 (Pengawasan dan Audit), serta Dimensi 6 (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik) masing-masing memperoleh skor maksimal sebesar 15 hingga 20 poin, menandakan pengelolaan pada aspek-aspek tersebut telah cukup baik. Namun demikian, Dimensi 5 (Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia) memperoleh skor terendah yaitu 3,25 poin, menjadi indikator perlunya peningkatan kapasitas institusional dan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah. Sementara itu, Dimensi 1 (Perencanaan dan Penganggaran) serta Dimensi 3 (Pelaporan dan Pertanggungjawaban) masing-masing memperoleh nilai 11,43 dan 14,74 yang menunjukkan perlunya penguatan dalam proses penyusunan anggaran dan pelaporan yang lebih akuntabel. Dengan memperhatikan hasil tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu mengambil langkah perbaikan yang terarah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar tercapai tata kelola yang lebih baik di masa mendatang. Data tahun 2024 dirilis pada satu tahun selanjutnya atau tahun 2026.

2.1.3.7.7 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah adalah indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data *supply* dan *demand*. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu penggunaan, ketersediaan dan kedalaman dengan nilai indeks berkisar antara 0-10. IKAD Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan

produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. IKAD Kabupaten Bulukumba tahun 2024 yang disediakan secara terpusat oleh Kemenko Perekonomian, OJK dan Bappenas mencapai 4,43 poin.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum yang berkualitas merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara. Kondisi, tantangan, dan capaian pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

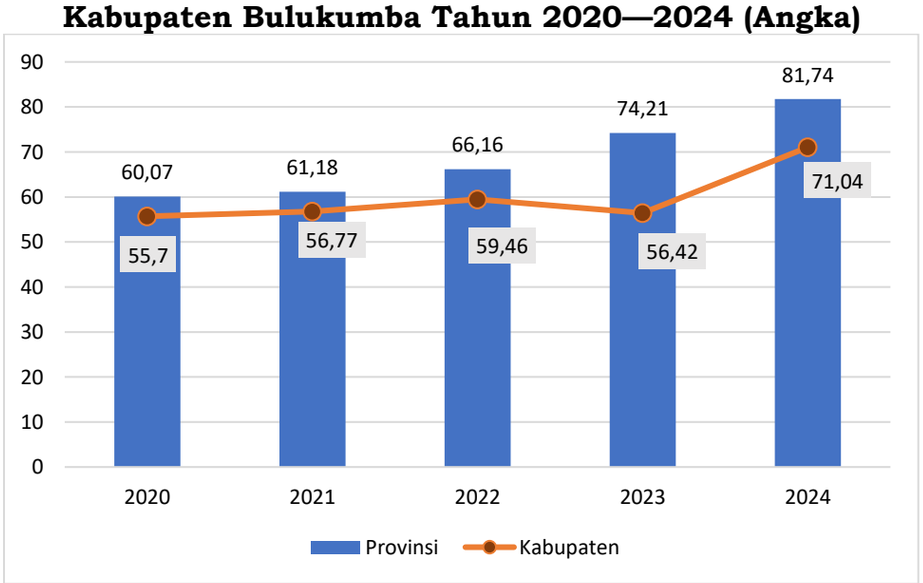
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi yang jelas serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif merupakan prasyarat utama tercapainya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Kondisi aktual dan tantangan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama mencakup aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur. Terdapat 7 kategori predikat diantara AA (>90-100) Sangat memuaskan, A (>80-90) Memuaskan, BB (>70-80) Sangat Baik, B (>60-70) Baik, CC (>50-60) Cukup/Memadai, C (>30-50) Kurang, dan D (>0-30) Sangat Kurang. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II-123
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bulukumba, 2025

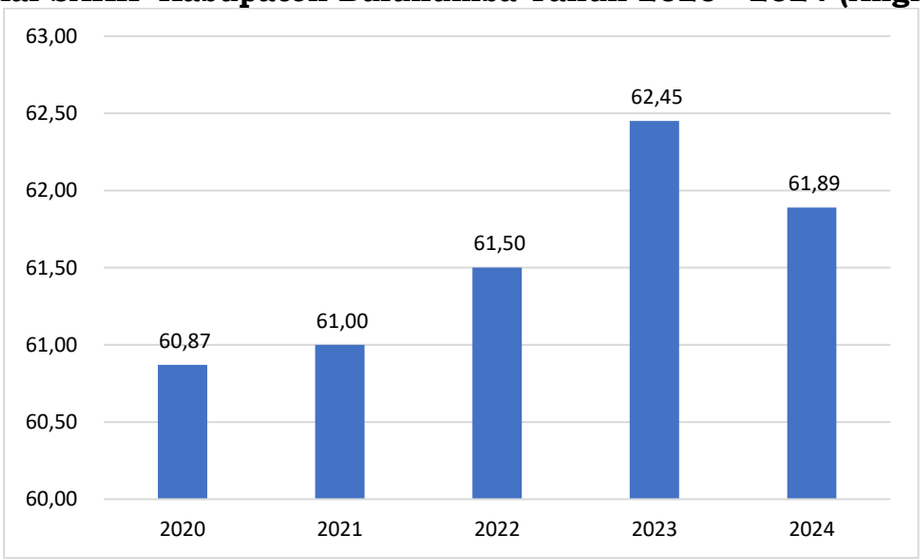
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI, Indeks Refromasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024 mengalami peningkatan dari 55,7 poin tahun 2020 menjadi 71,04 poin (BB) pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 8,03 persen. Faktor-faktor pendukung utama dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bulukumba meliputi penetapan indikator SMART yang jelas, rencana aksi yang terintegrasi mencakup perencanaan, penganggaran, SOP, sumber daya manusia, pengawasan, teknologi

informasi, dan inovasi. Selain itu, keselarasan dengan kebijakan nasional, khususnya Kepmen PANRB Nomor 182 tahun 2024, menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi. Pemanfaatan data berbasis BPS, survei kesehatan, dan realisasi investasi, serta dukungan digitalisasi pemerintahan melalui arsitektur SPBE. Seluruh upaya ini diperkuat dengan penguatan tata kelola serta manajemen risiko yang baik.

b) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen perhitungan Nilai SAKIP meliputi perencanaan/perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2023 mengalami peningkatan mencapai 62,45 (B) tahun 2023 kemudian mengalami penurunan 0,56 poin tahun 2024 atau sebesar 61,89 (B). Jika dibandingkan dengan capaian Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 69,02 (B), Nilai SAKIP Kabupaten Bulukumba berada 7,13 poin dibawah Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik II-124
Nilai SAKIP Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bulukumba, 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan dari 62,45 pada tahun 2023 menjadi 61,89 pada tahun 2024 (predikat B). Penurunan ini terjadi karena indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak lengkap, kurangnya SOP pengumpulan data, monitoring dan evaluasi yang tidak rutin, LHE internal yang tidak mutakhir, serta belum sepenuhnya mematuhi pedoman Permen PANRB No. 88/2021. Kondisi tersebut berdampak pada turunnya nilai komponen utama, khususnya pada Perjanjian Kinerja (bobot 30%) dengan nilai 22,29 pada 2023, lalu turun menjadi 21,79 pada 2024, Pengukuran Kinerja (bobot 25–30%) yang turun dari 17,60 pada 2023 menjadi 17,39 pada 2024. Sementara itu, Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dengan nilai 10,30 pada 2024, dan komponen Evaluasi Internal serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot total 30%) dengan nilai 12,41 pada 2024, Meski demikian, penurunan bobot komponen perencanaan dan pengukuran

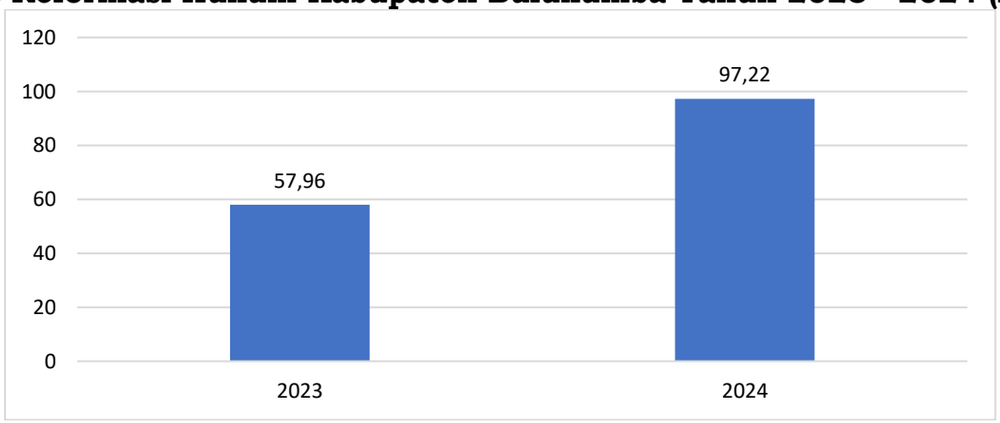
masing-masing sebesar 0,5 dan 0,2 poin menyebabkan skor total berkurang 0,56 poin. Kualitas data yang kurang baik juga meningkatkan variabilitas nilai dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan SAKIP. Walaupun predikat B masih dipertahankan, kondisi ini mengindikasikan adanya potensi risiko penurunan lebih lanjut apabila langkah-langkah perbaikan tidak segera dilakukan secara terarah dan konsisten.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan re-desain seluruh indikator agar memenuhi kriteria SMART, melengkapi IKU dengan definisi operasional yang jelas, menyusun SOP pengumpulan dan verifikasi data, menerapkan sistem monitoring berkala, memperbarui LHE setiap tahun berdasarkan data aktual dan SOP terbaru, serta mempublikasikannya tepat waktu. Terakhir, memastikan kepatuhan pada Permen PANRB No. 88/2021 dengan mengadopsi pedoman pelaksanaan yang meliputi penetapan target SMART, monitoring rekomendasi, dan pelaporan publik, disertai konsultasi dan pengecekan kepatuhan bersama Kementerian PANRB.

c) Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas reformasi hukum di suatu daerah. untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020—2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Indeks ini mencakup berbagai aspek terkait dengan tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dan penataan database peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel merupakan salah satu agenda strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Reformasi Hukum menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, serta pedoman pelaksanaan reformasi hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021. Data IRH Kabupaten Bulukumba dirilis mulai pada tahun 2023 oleh Kementerian Hukum. Adapun Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bulukumba dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik II-125
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023—2024 (Angka)



Sumber: KemenkumHAM, 2025

Nilai IRH pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba berada pada kategori reformasi hukum CC (cukup). Kemudian mengalami perbaikan pada tahun tahun 2024 IRH Kabupaten Bulukumba berada pada kategori AA (Istimewa) dengan skor 97,22 dengan nilai tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi mencapai bobot yang telah ditentukan, nilai kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas sebesar 24,4 dari bobot 25, nilai kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu sebesar 21,7 dari bobot 30 dan nilai penataan database peraturan perundang-undangan sebesar 15 dari bobot 20.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan hukum, serta peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Peningkatan nilai IRH tersebut didukung oleh beberapa intervensi strategis, antara lain:

1. Penataan dan evaluasi regulasi daerah yang adaptif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat
2. Penguatan koordinasi dengan instansi vertikal, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan
3. Peningkatan digitalisasi dokumentasi produk hukum daerah
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur hukum melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan penyusunan naskah akademik yang berkualitas.

Optimisme terhadap keberlanjutan pencapaian nilai IRH perlu ditopang dengan kesiapan saran dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai salah satu indikator penunjang yang peru dipenuhi setiap tahunnya melalui dukungan penganggaran pada tahun 2025-2029. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia memperihatkan kondisi atau trend yang semakin memadai. Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum telah memperoleh tambahan 4 (empat) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2 (dua) tenaga perancang perundang undangan dan 2 (dua) tenaga analis hukum. Penambahan ini menjadi faktor pengungkit (leverage) dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, harmonisasi regulasi, serta evaluasi dan penyusunan kebijakan hukum daerah secara terukur dan sistematis.

Memperhatikan capaian kinerja dalam dua tahun terakhir serta penguatan kelembagaan hukum yang telah dilakukan, maka dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan arah kebijakan untuk:

1. Meningkatkan skor IRH secara konsisten mempertahankan, dan berupaya meningkatkan dengan target kenaikan rata minimal 5–7% per tahun;
2. Memperkuat sistem pengendalian kualitas regulasi melalui pemantauan dan evaluasi produk hukum daerah secara berkala;
3. Mengembangkan layanan hukum berbasis digital dan keterbukaan informasi hukum, sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur hukum melalui pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, dan peningkatan jenjang kompetensi;
5. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan hukum daerah.

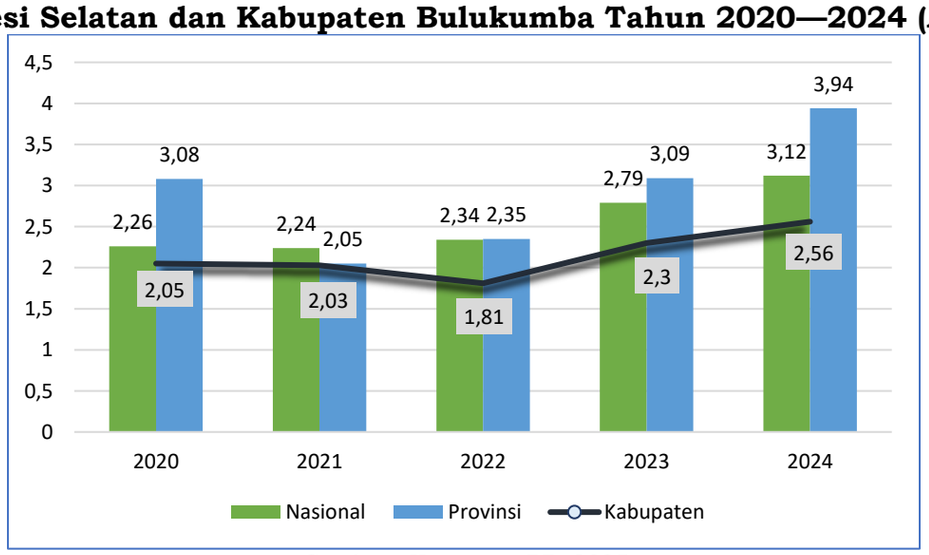
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya menjadikan Indeks Reformasi Hukum sebagai indikator kinerja prioritas dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

d) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah pendekatan relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta administrasi pemerintahan.

Cakupan layanan SPBE ini meliputi : layanan dari pemerintah ke pemerintah (G2G), pemerintah ke Masyarakat (G2C), pemerintah ke pelaku usaha (G2B), dan pemerintah ke ASN (G2E). Dengan SPBE diharapkan pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II-126
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber : KemenpanRB, 2025

Indeks SPBE Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, walaupun sempat menurun pada tahun 2022. Indeks SPBE 2024 sebesar 2,56 poin predikat cukup dengan domain (area penerapan SPBE yang dinilai) paling tinggi adalah D4 layanan SPBE (aspek layanan

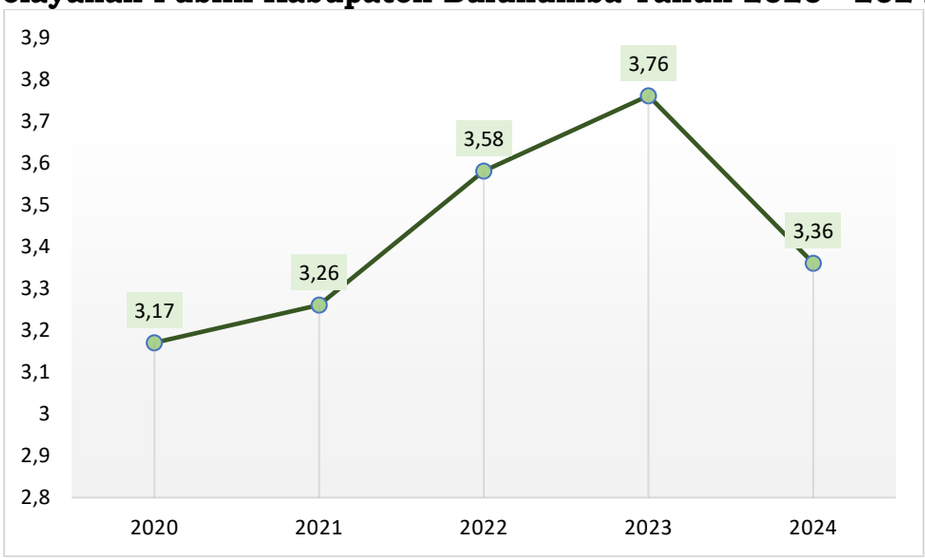
administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik) sebesar 3,69 poin dan domain paling rendah adalah D3 manajemen SPBE (aspek penerapan menajemen SPBE dan aspek pelaksanaan audit TIK) sebesar 1,00 poin.

Untuk meningkatkan indeks SPBE secara berkelanjutan, pemerintah daierah perlu mempercepat transformasi digital melalui peningkatan infrastruktur teknologi, pelathan aparatur sipil negara dalam literasi digital, serta pengembangan sistem layanan publik yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dapat membantu mempercepat inovasi serta meningkatkan efektivitas implementasi pemerintahan berbasis elektronik.

e) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. IPP sering kali dihitung berdasarkan berbagai parameter seperti kepuasan masyarakat, kualitas layanan, aksesibilitas, dan transparansi. Berikut ini IPP Kabupaten Bulukumba dari tahun 2020—2024 adalah:

Grafik II-127
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Angka)



Sumber: Bagian Organisasi Setda, 2025

Selama lima tahun terakhir, nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Bulukumba menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kualitas layanan pemerintah daerah. Pada 2021 dan 2022, nilai IPP stabil di angka 3,58 (grade B), menandakan pelayanan cukup baik dan konsisten. Tahun 2023 mencatat peningkatan menjadi 3,76 (B) berkat penguatan kapasitas aparatur, inovasi prosedur layanan, digitalisasi, serta pengawasan internal yang lebih efektif. Namun, pada 2024 nilai IPP turun menjadi 3,36 (B-), dipengaruhi oleh stagnasi pengembangan layanan, hambatan operasional seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang berkurang, atau resistensi perubahan pada beberapa unit kerja. Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi seperti perubahan regulasi, atau keluhan masyarakat yang meningkat. Lemahnya monitoring real-time, serta penurunan kinerja di unit layanan utama seperti RSUD dan Disdukcapil juga menjadi kendala.

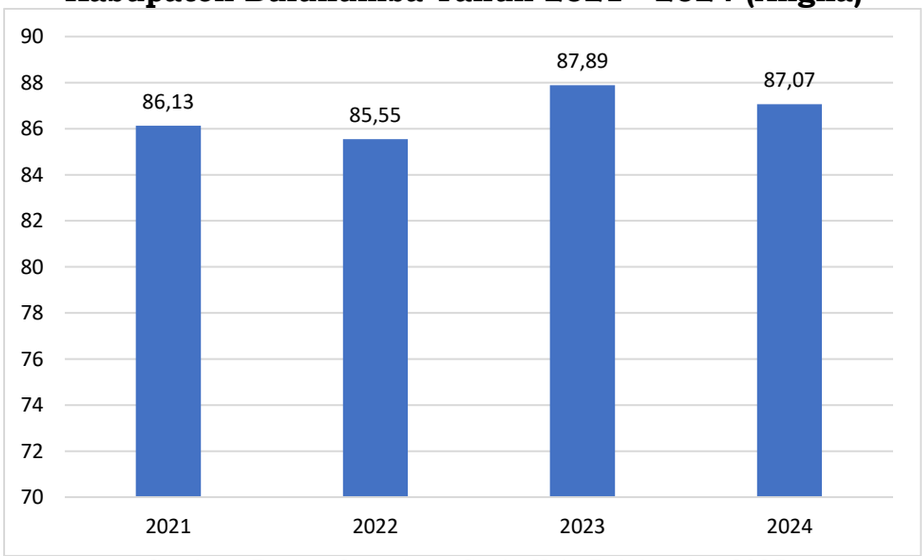
Data per unit kerja menunjukkan variasi kinerja, antara lain DMPTSP yang stabil di 3,23 (B-), Disdukcapil yang sempat turun ke 3,29 (B-) lalu membaik ke 3,22 (B) tahun 2024, Kecamatan Ujungloe yang stabil di 3,57 (B), Dinas Sosial yang

turun dari 3,85 tahun 2023 menjadi 3,67 (B) tahun 2024, serta RSUD yang merosot dari 3,86 (B) tahun 2023 menjadi 3,19 (B-) tahun 2024. Secara rata-rata, kinerja layanan meningkat di 2023 namun menurun di 2024, sehingga diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan seperti penguatan kapasitas SDM dan pelatihan berkala, penerapan digitalisasi layanan secara menyeluruh, penguatan monitoring, evaluasi dan pelaporan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antar dinas, serta fokus strategis pada layanan kesehatan dan kependudukan.

f) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Grafik II-128
Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bulukumba, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan nilai 87,07 poin yang mengindikasikan kategori Baik terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Analisis mendetail dari berbagai OPD/Unit Pelayanan Publik menunjukkan nilai IKM tertinggi berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan skor IKM 97,46 yang didukung oleh unsur-unsur prioritas perbaikan pada aspek persyaratan layanan dan kompetensi pelaksana. Diikuti oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan nilai IKM 92,67 yang fokus pada peningkatan kompetensi dan pemahaman petugas dalam pelayanan. Unit layanan seperti Puskesmas Caile dan Dinas Sosial juga mencatat nilai IKM di atas 86 dengan kategori Baik, menandakan kualitas layanan yang sudah cukup memadai. Bahkan Puskesmas Caile memperoleh kategori Sangat Baik dengan nilai 90,86 yang didukung oleh unsur waktu penyelesaian layanan yang optimal.

Dari sisi metode, sebagian besar survei dilakukan secara manual dan online, dengan jumlah responden yang cukup representatif (total 353 responden rata-rata per instansi), mencerminkan keandalan data yang diperoleh. Rencana tindak lanjut pada beberapa OPD lebih difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana melalui pengusulan anggaran, penguatan kompetensi SDM, sosialisasi produk

layanan, pengelolaan pengaduan, serta monev terhadap waktu pelayanan dan jadwal dokter yang langsung berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Meski sebagian realisasi rencana tindak lanjut masih di tahap 20-50 persen, indikasi komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sudah tampak dengan persentase realisasi rencana tindak lanjut yang cukup baik terutama di OPD seperti Dinas Sosial dan DMPTSP yang mencapai 90 persen.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba tahun 2024 menunjukkan tren positif yang kuat dalam memastikan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan berkualitas, dengan catatan perlunya akselerasi realisasi tindak lanjut dari hasil survei agar kualitas tersebut bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.

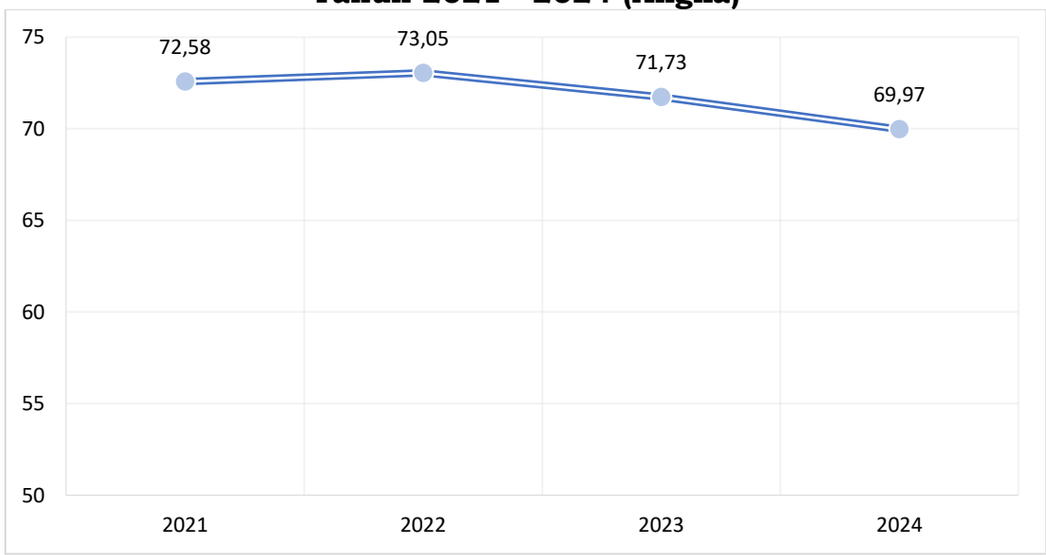
g) Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat integritas dan transparansi di berbagai institusi atau sektor. Integritas dalam konteks ini merujuk pada kepatuhan terhadap standar etika, hukum, dan prinsip-prinsip yang memastikan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam tindakan dan kebijakan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

Pelaksanaan SPI tahun 2023, KPK tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mendorong K/L/PD untuk mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari SPI 2022. KPK telah mendistribusikan tabel pengisian rencana aksi kepada setiap K/L/PD. Dengan tabel tersebut, setiap K/L/PD dapat menyusun rencana aksinya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK berdasarkan hasil SPI 2022.

Dalam SPI, beberapa area yang memiliki risiko korupsi diukur dengan pendekatan pengalaman dan persepsi. Area yang diukur risiko korupsinya antara lain area yang terkait dengan pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, nepotisme dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, hingga penyelewengan dalam pengelolaan anggaran atau perjalanan dinas. Berikut capaian Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Bulukumba tahun 2021—2024:

Grafik II-129
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka)



Sumber: Inspektorat Kabupaten Bulukumba, 2025

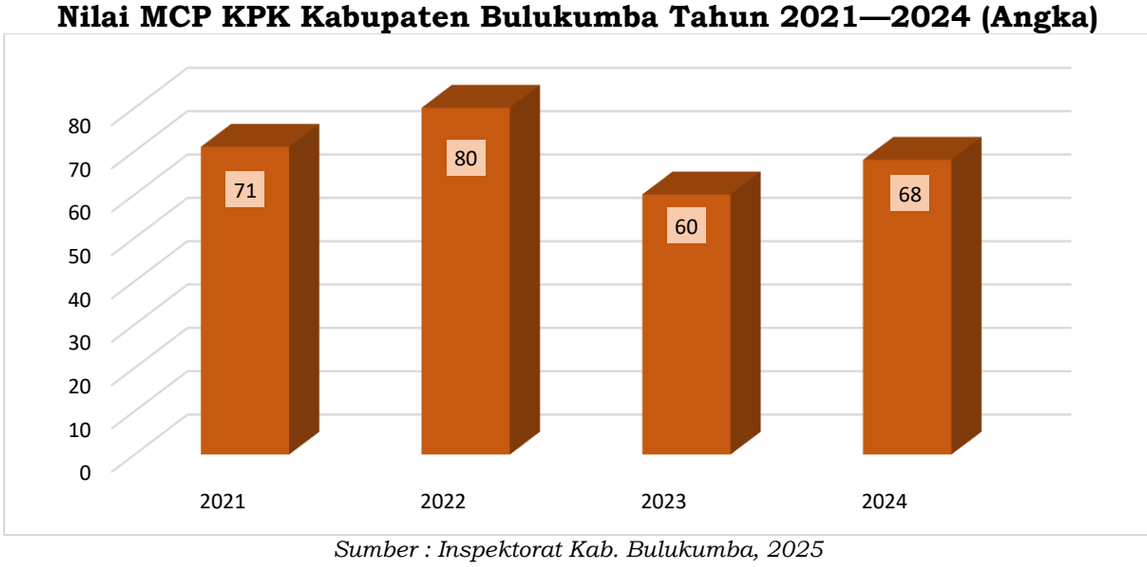
Berdasarkan grafik diatas, capaian Indeks SPI menunjukkan sebuah tantangan yang patut menjadi perhatian bersama. Pada tahun 2022, Indeks SPI mencapai angka 73,05 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 69,97. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dalam survei yang dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa meski instrumen sudah tersedia, tingkat kesadaran dan keterlibatan untuk mengisi survei masih perlu ditingkatkan.

Menyikapi kondisi ini, pimpinan menyatakan komitmen untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan penetapan standar perilaku anti-korupsi yang jelas. Komitmen ini mendorong evaluasi, penyusunan strategi partisipasi yang lebih baik, dan penguatan nilai integritas di seluruh organisasi. Dengan demikian, SPI diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga mendorong perbaikan dan penguatan budaya integritas secara menyeluruh

h) Nilai MCP KPK

MCP atau *Monitoring Center for Prevention* KPK merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi. Nilai MCP Kabupaten Bulukumba yang dikeluarkan oleh KPK, sejak tahun 2021—2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik II-130
Nilai MCP KPK Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka)



Sumber : Inspektorat Kab. Bulukumba, 2025

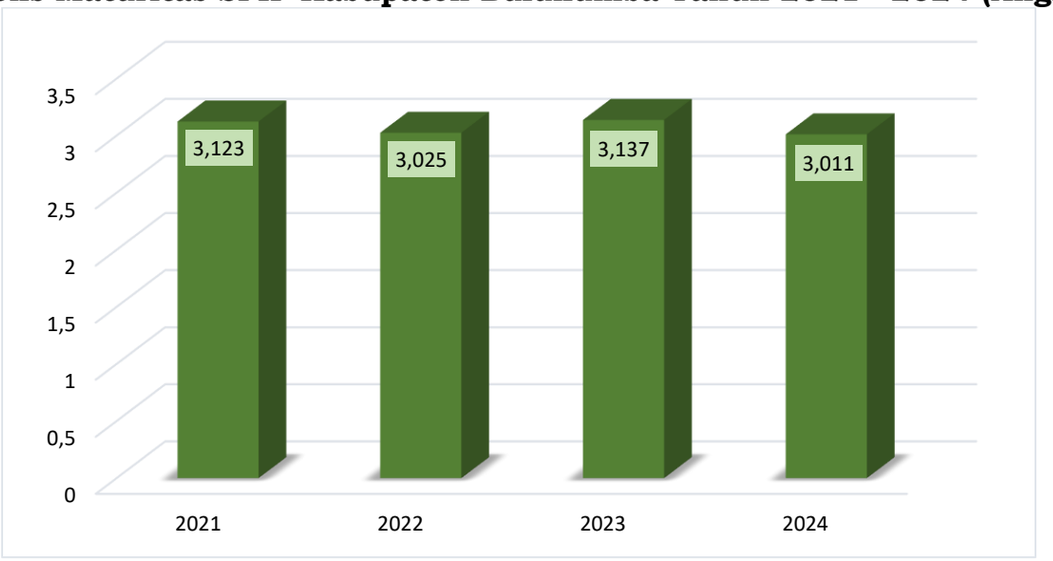
Nilai MCP Kabupaten Bulukumba tahun 2021—2024 mengalami fluktuasi. Pada 2021, nilainya tercatat 71, lalu meningkat menjadi 80 pada 2022, menunjukkan perbaikan dalam implementasi program pencegahan korupsi. Namun, pada 2023 nilai tersebut turun tajam menjadi 60 yang disebabkan karena pergeseran kebijakan yang kurang menekankan pencegahan korupsi, rotasi pejabat yang mengganggu kesinambungan program, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan internal, serta kendala teknis dalam implementasi sistem dan prosedur pendukung. Sementara itu, nilai MCP tahun 2024 mengalami perbaikan menjadi 68.

Adapun area yang mengalami penurunan nilai dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada area optimalisasi pajak dengan persentase 36,40 persen disebabkan regulasi pajak daerah belum ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum menyusun SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan kepala daerah, belum adanya perkada turunan terkait pajak daerah, belum adanya laporan capaian kinerja pajak daerah, target pajak APBD tahun berjalan, realisasi pajak daerah tahun berjalan, laporan upaya penagihan piutang pajak daerah kategori tidak lancar, diragukan dan macet. Pada area penganggaran 45,85 persen disebabkan laporan penyusunan SHS tahun 2025 belum dilengkapi dengan kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses oleh E-katalog lokal, belum adanya perbandingan antara kegiatan PBJ fisik dan non fisik yang tersedia ASB dibandingkan seluruh kegiatan PBJ Pemerintah daerah yang seharusnya menggunakan ASB. Pada area pengadaan barang dan jasa 63,60 persen disebabkan belum adanya dokumen yang menunjukkan 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pada area pengelolaan BMD 64,31 persen disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, pada area pelayanan publik 76,10 persen disebabkan Perda RDTR belum terbentuk. Pada pengawasan APIP 78,08 persen disebabkan belum terpenuhinya kegiatan kompetensi oleh setiap SDM pengawas dan belum terpenuhinya kecukupan SDM APIP.

i) Indeks Maturitas SPIP

Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan (dokumen perencanaan), penyelenggaraan struktur dan proses (pengendalian yang dilakukan), serta pencapaian tujuan (Pencapaian kinerja) yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Indeks maturitas SPIP Kabupaten Bulukumba 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II-131
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Bulukumba Tahun 2021—2024 (Angka)



Sumber: Inspektorat Kabupaten Bulukumba, 2025

Pada grafik di atas, berdasarkan hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi sejak tahun 2021 s.d 2024 menggambarkan indeks maturitas berada pada interval skor 3,00≤Skor<4,00, indeks tersebut telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefinisi)** yang artinya Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi namun masih memerlukan perbaikan pada pengendalian yang telah dibangun.

Pada tahun 2022 terdapat penurunan nilai skor menjadi 3,025 yang terjadi karena penurunan dari hasil penilaian penetapan tujuan atau perencanaan tahunan yang disusun pada periode tersebut sehingga BPKP memberikan saran untuk memberikan pelatihan tentang perencanaan keuangan kepada OPD dan melakukan reviu/evaluasi perencanaan untuk memperbaiki menetapkan sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan dalam perencanaan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan skor menjadi 3,137 namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 3,011. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024 terdapat rekomendasi tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti yaitu belum melakukan revisi kebijakan manajemen risiko (Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah) yang belum mengakomodir risiko kemitraan dan risiko *fraud* dan belum melaksanakan reviu independen atas proses manajemen risiko dan beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan.

BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperbaiki perencanaan berbasis indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, melakukan penilaian mandiri SPIP-T sesuai Perban BPKP No. 5 Tahun 2021, serta merevisi regulasi terkait pedoman pengelolaan risiko. Sementara itu, Inspektur diminta untuk menyusun pedoman evaluasi manajemen risiko (MR), memasukkannya ke dalam rencana pengawasan, serta mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, termasuk identifikasi risiko kemitraan dan fraud, pengalokasian anggaran, monitoring RTP, dan evaluasi pelaksanaan MR.

Untuk sektor pariwisata, Kepala OPD diminta mengevaluasi kerja sama transportasi wisata, menyusun regulasi trayek dan pelatihan sopir, serta

menyediakan sistem navigasi alternatif dan sosialisasi aplikasi "Bulukumba Tourism". Selain itu, penting untuk menyusun perencanaan terpadu, membuat penunjuk arah jalan alternatif, mendorong kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan komunitas penggiat pariwisata, serta menggunakan alat analisis efektivitas konten promosi. Evaluasi kemitraan, penyusunan standar konten, dan pelaksanaan FGD lintas OPD juga menjadi bagian dari strategi penguatan sektor ini.

Terkait pengelolaan sektor kemiskinan, rekomendasi mencakup pembentukan lembaga pengelola air bersih di desa/kelurahan, sinkronisasi data penerima bantuan jamban dengan DTKS, serta penyediaan bantuan rumah bagi masyarakat miskin. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi akar penyebab temuan BPK dan menyusun pengendalian yang tepat, serta menindaklanjuti dan memantau rekomendasi perbaikan dari laporan evaluasi dan penilaian mandiri.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Persentase Penegakan Hukum Peraturan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan daerah diterapkan dan ditegakkan dalam suatu kabupaten. Persentase ini memberikan gambaran tentang efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Pada tahun 2020—2022 terdapat 15 perda yang telah ditetapkan dan ditegakkan. Pada tahun 2024 jumlah perda yang ditetapkan dan ditegakkan sebanyak 10 perda karena adanya harmonisasi dari penggabungan beberapa perda menjadi satu perda. Berikut 10 Perda yang ditetapkan dan ditegakkan adalah:

Tabel II-89
Jumlah Perda yang ditetapkan dan ditegakkan di Kabupaten Bulukumba

No	Perda yang memuat sanksi	Perda yang ditegakkan	Satuan	Ket.
1.	Perda No. 3 tahun 2022 tentang Larangan Pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2022 seri c No. 1	Perda No. 3 tahun 2022 tentang Larangan Pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol	Buah	
2.	Perda No. 5 tahun 2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba, Lembaran Daerah No. No. 5 tahun 2005 seri c No. 3	Perda No. 5 Tahun 2005 tentang berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba	Buah	
3.	Perda No. 4 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2005	Perda No. 4 tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Buah	

No	Perda yang memuat sanksi	Perda yang ditegakkan	Satuan	Ket.
4.	Perda No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keluarga Sehat	Perda No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keluarga Sehat	Buah	
5.	Perda No. 13 tahun 2013 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2013	Perda No. 13 tahun 2013 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak	Buah	
6.	Perda No. 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014	Perda No. 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Buah	
7.	Perda No. 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2015	Perda No. 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Buah	
8.	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Buah	
9.	Perda No. 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2018	Perda No. 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Buah	
10.	Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Buah	

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2025

Adapun Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-90
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tindakan Penegakan Hukum	15	15	15	11	10
Jumlah Pelanggaran Perda	15	15	15	11	10
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber Data : SatpolPP dan Damkar Kabupaten Bulukumba, 2025

Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2013-2023 telah mencapai 100 persen ini menunjukkan pemerintah telah melaksanakan secara menyeluruh melakukan penegakan hukum bagi pelaku melakukan pelanggaran perda.

b) Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Persentase tindak kriminal yang ditangani mengalami fluktuasi seiring dengan berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi wilayah tersebut. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan kasus kriminal yang berhasil diungkap berkat peningkatan upaya aparat keamanan dan kerjasama masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi kasus-kasus seperti pencurian dan kekerasan domestik yang masih relatif tinggi. Upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem plaporan, meningkatkan patroli, dan melibatkan masyarakat dalam program pencegahan kejahatan menjadi kunci untuk menurunkan angka kriminalitas. Namun, tidak semua kasus dapat ditangani dengan tuntas karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, kendala dalam pengumpulan bukti, dan kurangnya informasi dari saksi. Selain itu, beberapa kasus menghadapi hambatan hukum atau administratif yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyelesaian. Upaya terus-menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas, penguatan jaringan informasi, dan memperbaiki sistem administrasi penegakan hukum guna memastikan bahwa semakin banyak kasus dapat ditangani secara efektif di masa depan.

Tabel II-91
Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

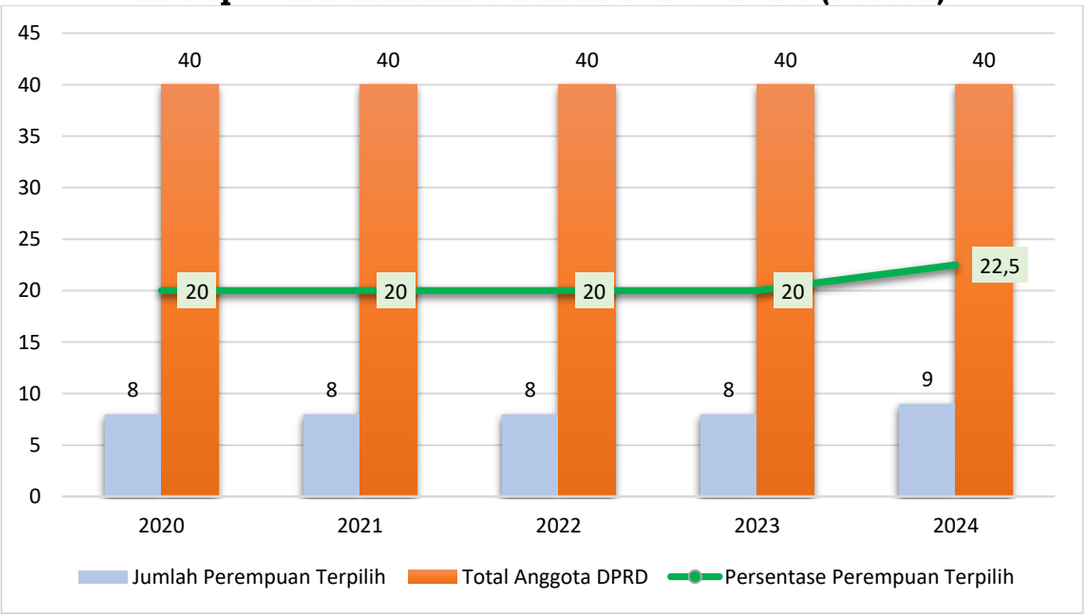
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tindak kriminal tertangani	408	404	515	618	318
Jumlah Keseluruhan Kriminalitas	492	520	881	701	318
Persentase tindak kriminal yang ditangani	82,93	77,69	58,46	88,16	

Sumber Data : BPS, Polres Kabupaten Bulukumba

c) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 241 mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa dalam pencalonan calon legislatif harus memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari jumlah calon yang diusulkan. Persentase perempuan terpilih terhadap jumlah anggota DPRD tahun 2020—2023 sebesar 20 persen sedangkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 23 persen atau sebanyak 9 orang dari 40 orang terpilih.

Grafik II-132
Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)

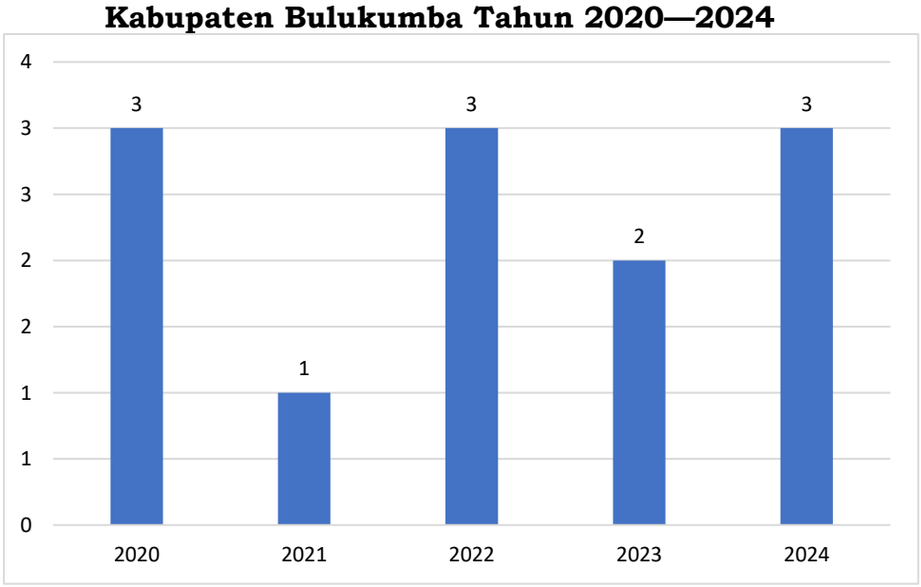


Sumber Data : Sekretariat DPRD, 2025

d) Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD

Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD adalah merupakan peraturan daerah yang disusun dan disahkan oleh DPRD, yang biasanya dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan lembaga mitra. Sebagian besar Perda yang disusun ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan dan kebutuhan masyarakat. Berikut ini jumlah perda yang dihasilkan berdasarkan inisiatif DPRD kurun waktu 2013 sampai dengan 2023 adalah:

Grafik II-133
Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba 2025

Adapaun uraian Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Bulukumba sebagian besar terkait pelayanan publik dan perlindungan sosial terhadap masyarakat yaitu:

Tabel II-92
Nama Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

No.	Nama Peraturan Daerah	Tanggal Penetapan	Tanggal Diundangkan	Nomor Register	Ket.
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	28 April 2020	20 Mei 2020	B.Hk.Ham.004.29.20	
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Kepemudaan	31 Desember 2020	31 Desember 2020	B.Hk.010.204.20	
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah	28 April 2020	28 April 2020	B.Hk.Ham.004.29.20	
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa	17 September 2021	17 September 2021	B.Hk.06.112.21	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kerjasama Desa	17 September 2021	17 September 2021	B.Hk.07.113.21	
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata	12 Agustus 2022	12 Agustus 2022	B.Hk.03.053.22	
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Pemakaman	1 September 2023	1 September 2023	B.Hk.01.061.23	
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	1 September 2023	1 September 2023	B.Hk.02.062.23	
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro	12 Agustus 2022	12 Agustus 2022		
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Agustus 2022	12 Agustus 2022		

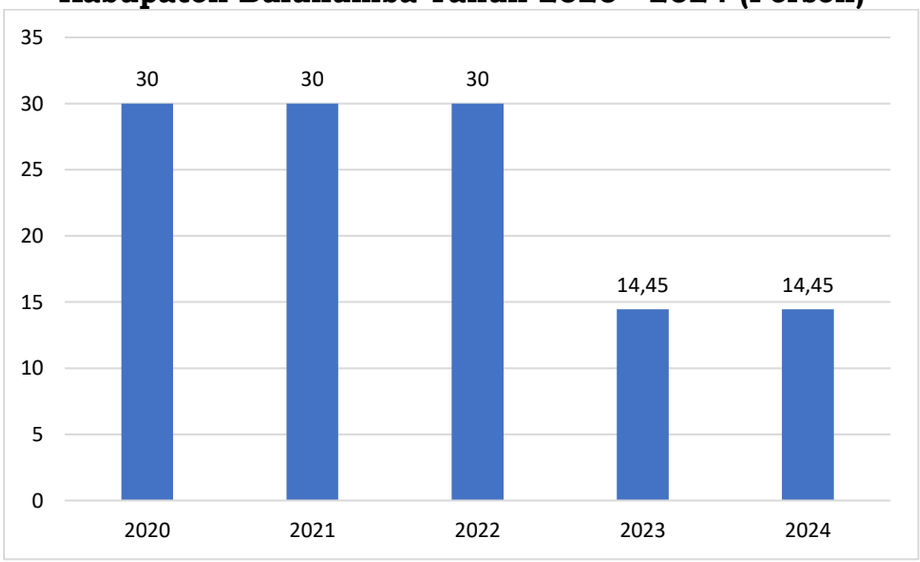
No.	Nama Peraturan Daerah	Tanggal Penetapan	Tanggal Diundangkan	Nomor Register	Ket.
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi	5 Juli 2024	5 Juli 2024		
12	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak	5 Juli 2024	5 Juli 2024		
13	Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan Kecil	5 Juli 2024	5 Juli 2024		

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba 2025

e) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Persentase perempuan pengurus partai politik masih relatif rendah, meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mendorong partai politik untuk mencapai target minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tahun 2024. Persentase perempuan pengurus partai politik Kabupaten Bulukumba 2020—2022 sebesar 30 persen kemudian terjadi penurunan 2023 dan 2024 sebesar 14,45 persen.

Grafik II-134
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024 (Persen)



Sumber Data : Bakesbangpol, 2025

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Peran strategis daerah dalam memperkuat ketahanan kawasan melalui diplomasi yang adaptif serta sistem pertahanan yang tangguh dan responsif. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan daya saing wilayah,

serta menjaga integritas dan kedaulatan di tengah dinamika regional yang terus berkembang. Berikut ini akan diuraikan sejumlah indikator yang menjadi pendukung capaian dan analisis terkait

a) Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa maju mundurnya satu daerah juga bergantung pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 195 (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan." Bahkan pasal 196 (2) lebih tegas lagi berisi "perintah" untuk membuat kerjasama antar daerah, dengan menyatakan: "Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat."

Dalam menginplementasikan amanat undang-undang yang dimaksud, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah telah melakukan kerjasama antara daerah/kabupaten/kota dengan jumlah kerjasama sebagai berikut:

Tabel II-93
Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota Tahun 2020—2024

No	Tahun	Uraian		Jumlah kerjasama
		Jumlah penawaran kerjasama	Jumlah kerjasama yang diselenggarakan	
1	2020	13 Kerja sama	13 Kerja sama	13 Kerja sama
2	2021	10 Kerja sama	10 Kerja sama	10 Kerja sama
3	2022	22 Kerja sama	22 Kerja sama	22 Kerja sama
4	2023	19 Kerja sama	19 Kerja sama	19 Kerja sama
5	2024	7 Kerja sama	7 Kerja sama	7 Kerja sama

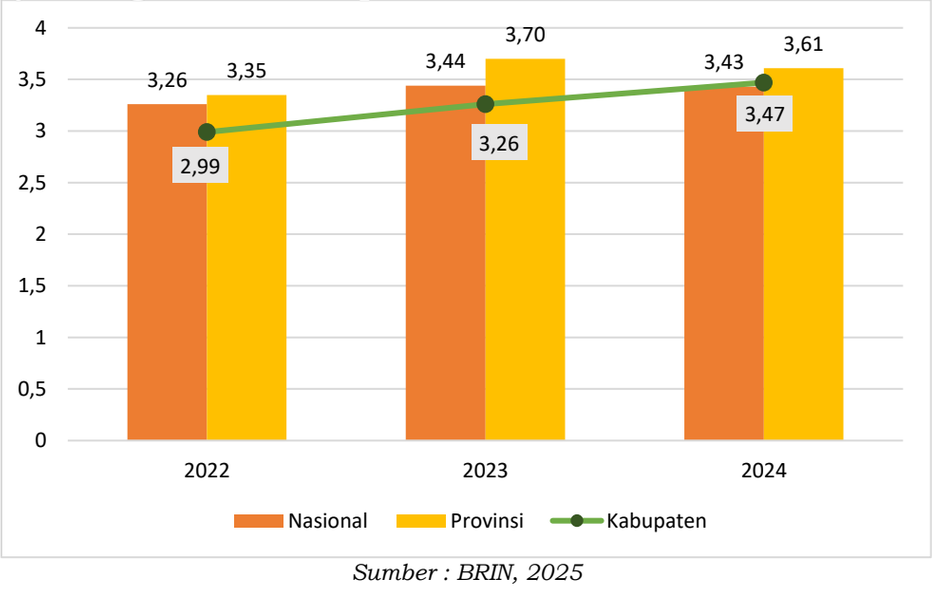
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

b) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memetakan tingkat daya saing daerah sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah.

Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Bulukumba, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik II-135
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022—2024 (Angka)



Sumber : BRIN, 2025

Skor IDSD Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 sebesar 3,47 poin dengan skor pilar paling tinggi yaitu pilar 3 adopsi TIK sebesar 4,40 poin. Sedangkan skor pilar paling rendah adalah pilar 9 sistem keuangan sebesar 1,89 poin. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Bantaeng dan Sinjai, Skor IDSD Kabupaten Bulukumba lebih tinggi dari Bantaeng (3,37 poin) dan lebih rendah dari Sinjai (3,50 poin).

2.1.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

Capaian indikator pembangunan daerah mencerminkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pengukuran dilakukan melalui empat kerangka utama, yaitu IKU, SPM, SDGs, dan IKK, yang saling melengkapi. IKU menunjukkan pencapaian sasaran strategis, SPM menilai layanan dasar kepada masyarakat, SDGs mengukur kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, dan IKK mencerminkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemantauan indikator ini penting untuk mengevaluasi kinerja serta memperkuat arah kebijakan dan pelayanan publik daerah.

2.1.5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. IKU digunakan untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Capaian IKU mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas pembangunan secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-94
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024
M1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak dan Berbudaya Maju	T1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Indeks Pembangunan Manusia	74,43
		S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2 Indeks Kesehatan	83,35
		S2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	3 Indeks Pendidikan	65,76
		S3 Menguatnya Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan sebagai Fondasi Kehidupan Sosial	4 Indeks Kerukunan Umat Beragama	
			5 Jumlah Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas	11.399
			6 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	26,74
			7 Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan	34,78
		S4 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Generasi muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	8 Indeks Pembangunan Keluarga	
			9 Indeks Ketimpangan Gender	0,356
			10 Indeks Pembangunan Pemuda	
M2 Membangun Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan	T2 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Inklusif		11 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6
			12 Rasio Gini	0,329
		S5 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	13 PDRB PerKapita	44,48
			14 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,19
			15 Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	7,14
			16 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,03
			17 Persentase Wisatawan Mancanegara	0,505
			18 Persentase Koperasi Sehat	19,8
			19 Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,54
			20 Pertumbuhan Investasi Daerah	118,22
		S6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	21 Indeks Ketahanan Pangan	83,73
		S7 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	22 Tingkat Kemiskinan	6,71
			23 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,23
		S8 Meningkatnya Stabilitas Fiskal	24 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD	3,62

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024
		S9 Meningkatnya Pembangunan Desa Mendukung Perekonomian Daerah	25 Persentase Desa Mandiri	54,13
M3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	T3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani		26 Indeks Reformasi Birokrasi	71,04
		S10 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	27 Nilai SAKIP	61,89
		S11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital dan Inovasi Daerah	28 Indeks Pelayanan Publik	3,36
			29 Indeks SPBE	2,56
			30 Indeks Inovasi Daerah	47,23
M4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Pengembangan Wilayah yang Terencana dan Berketahanan Iklim	T4 Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Daerah terhadap Layanan Infrastruktur yang Berkualitas		31 Indeks Daya Saing Daerah	3,47
		S12 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi	32 Indeks Layanan Infrastruktur	3,61
	T5 Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim		33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,53
		S13 Menurunnya Intensitas Emisi GRK	34 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	24,93
		S14 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Resiko Bencana	35 Indeks Risiko Bencana	145,58

Sumber Data : Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029

2.1.5.2 Standar Pelayanan Minimal

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Bulukumba diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan pada RPJMD Kabupaten Bulukumba, seperti pada tabel berikut.

Tabel II-95
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDIDIKAN**						
1.1	**Pendidikan Dasar**						
1	persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	95	82,42	94,6	97	98,51
1.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen			36,40	46,02	54,88
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**						
2	Persentase WargaNegara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	persen	94	7,49	94,2	96,5	96,25
2.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen			33,74	44,18	60,45
1.3	**Pendidikan anak usia dini**						
3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	67	84,76	83,9	90	98,37
3.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen					
2	**KESEHATAN**						
2.1	**Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah**						
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	persen	73,31	72,51	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**						
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	persen	85,66	87,12	100	100	100
2.3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**						
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	79	87,32	100	100	100
2.4	**Pelayanan kesehatan balita**						
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	50,02	84,71	100	100	90,82
2.5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**						
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	2,14	19,19	100	100	100
2.6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**						
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	4,46	49,94	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**						
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	31,41	41,96	67	100	100
2.8	**Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi**						
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	7,88	13,81	100	100	100
2.9	**Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus**						
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	79,08	100	100	100
2.10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**						
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	63,49	90.07	84	100	100
2.11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis**						
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	27,01	100	100	51,76
2.12	**Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)**						
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	40,63	52,12	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**						
3.1	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**						
16	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum seharihari	persen	84,4	84,26	90,26	85,80	86,01
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**						
17	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	persen	76,12	76,26	97,49	83,41	83,82
4	**PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**						
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;**						
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	persen	54	100	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**						

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	persen	-	-	93	100	0
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**						
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	96,9	100	100	100
5.2	**Pelayanan informasi rawan bencana**						
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**						
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100	100	100
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**						
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100
5.5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**						
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**						
6.1	**Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti**						
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	89,8	54,55	97,64	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**						
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	-	90.91	94,20	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**						
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	41,18	67,57	99,13	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**						
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	persen	-	100	94,28	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska**						

No	Uraian	Satuan	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
	bencana bagi korban bencana kab/kota						
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), 2025

2.1.5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistanable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi-generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan;
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;
11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13) Penanganan Perubahan Iklim;
14) Ekosistem Lautan;
15) Ekosistem Daratan;
16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-96
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2024

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target SDGs : 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	Persen	7,43	7,39	7,22	6,71
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas kesehatan	Persen	80,9	90,37	94,27	97,22
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen	NA	5,3	10,04	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Persen	74,1	97,36	100	100
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Rumah Tangga	15011	14945	12935	12997
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas kesehatan	Persen	99,6	99	100	100
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas kesehatan	Persen	90,2	80,6	94,11	87,5
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pembendayaa Perempuan dan Perlindungan anak	Persen	64,63	55,43	45,7	67,21

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persen	63,45	85,46	85,8	86,01
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persen	57,26	76,87	83,41	83,82
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	88,89	98,41	98,86	98,01
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	67,72	84,48	87,04	89,9
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan catatan sipil	Persen	97,79	98,29	98,62	99,08
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Sekretariat Daerah bagian Ekonomi dan Pengembnagan Energi dan Sumber daya Mineral	Rumah Tangga	NA	NA	NA	NA
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana	Orang	12.326	3	12.326	126
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana	Lokasi	23	10	23	6
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Orang	60	26	59	150
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Orang	60	26	59	150
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus9 SMAB=Sekolah/madrasah aman bencana)	Dinas Sosial		NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RP	1.518.000.000	3.000.000.000	4.068.000.000	4.909.500.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial	Dokumen	0,36	0,32	0,33	0,36
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Dinas Sosial	Persen	NA	21,64	25,45	23,9
TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik serta Peningkatan Pertanian Berkelanjutan							
Target SDGs : 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.1.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	10,64	14,7	10,71	9,6
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	Persen	6,87	5,96	8,7	5,1
2.2.1 *	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Persen	10,3	5,4	8,2	7,3
2.2.1.(a)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Persen	3,42	2,1	4,5	2,7
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Persen	5,15	3,3	5,95	5,75
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Persen	72,46	69,59	73,44	5,6
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Persen	72,8	76,42	78,06	73,35

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	86,9	NA	89,6	88,4
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.							
2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	NA	NA	NA	NA
TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahtraan Seluruh Penduduk Semua Usia							
Target SDGS : 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Angka	10	9	9	77,8
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persen	87,35	83,72	95	67,85
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	87,11	86,25	85	67,33
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Angka	0	0	3	0,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Persen	7,29	24	63	8,3
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Persen	29	43	7	0
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Persen	0,33	0,63	0,57	0,61
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Orang	131	166	90	185
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Persen	0,02	0,047	0,069	0,048
3.3.4.(a)	Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan kusta).	Dinas Kesehatan	Orang	63	63	72	113
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur £18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	0,012	0,011	11,6	13,3
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	NA	0,009	8,7	11,1
3.4.1. (c)	Prevelensi Obesitas pada penduduk umur < 18 Tahun	Dinas Kesehatan	Persen	2,19	0,1	3,89	6,18
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1 (e)	Prevelensi Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Kesehatan		NA	NA	NA	NA
3.5.2 *	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur >15 tahun dalam satu tahun terakhir	Dinas Kesehatan		NA	NA	NA	NA
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persen	21,5	22,77	20,7	25,04
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persen	51,58	55,43	45,7	67,21
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persen	19,62	34,43	60,3	56,07

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persen	45,7	23,5	45,7	28,3
3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk , KB Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	TFR	2,19	2,13	2,11	2,09
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Dinas Kesehatan	Persen	NA	NA	NA	NA
3.8.1.(a)	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	19,1	28,51	15,78	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Penduduk	348767	419304	444665	461578
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	66,87	90,37	94,27	97,09
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	-	0	0	0	0
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	50,1	23,75	NA	NA
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	2,53	2,53	2,53	6,51
TUJUAN 4. Menjamin Kualitas pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesemoatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
Target SDGs : 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	Persen	91	92	94	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Persen	90,3	90,3	90,3	90,3
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Persen	71,42	71,42	71,42	71,42
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	112,32	113,27	114,54	109,38
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persen	89,69	86,46	97,14	92,89
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur [3]15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	9,08	9,02	9,25	9,25
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	Persen	96,7	93,33	94,1	98,6
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	16	20,8	25	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Persen	78,37	82	84	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Persen	92,5	90,3	99,73	99,73
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15 -59 tahun.	Dinas Pendidikan	Persen	92,5	90,3	91,53	93,31
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan	Persen	92	91	91	
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	Persen	66,1	44,35	45,25	52,33
TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan							
Target SDGs :5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan	1	1	1	1
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	22	26	11	0
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pengendalian	Persen	17	50	46	11

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	NA	21	68,75	2
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	NA	0,11	0,09	0,45
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		67,18	23,5	45,7	45,7
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	20	20	20	22,5
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	18,4	18,4	34,5	NA
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.							
5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	16	0	0	0
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	4,23	99,35	100	100
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Badan Pusat Statistik	Persen	NA	84,46	90	
TUJUAN 6. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
Target SDGs : 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Persen	84,61	85,46	85,8	86,01
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Persen	63,46	85,46	85,8	86,01
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	%	85,41	NA	NA	NA
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Persen	75,35	97,88	83,41	83,82
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa	136	136	136	136
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa	136	136	136	136
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Unit	747	720	720	720
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	19	8	NA	NA
6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Unit	1	1	1	1
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Unit	2707	3329	3425	3470

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indeks	65	55	50	50
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Sungai	NA	NA	NA	NA
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum & Penata Ruang	Kegiatan	Ada	Ada	Ada	Ada
TUJUAN 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
Target SDGs : 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral		NA	NA	NA	NA
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Sekda, Bagian Ekonomi dan Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral		NA	NA	NA	NA
TUJUAN 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
Target SDGs : 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Badan Pusat Statistik	Persen	4,76	3,81	4,11	
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Badan Pusat Statistik	Juta	36,06	38,88	42,27	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	8,1	8,76	NA	4,6
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	0,22	0,31	NA	NA
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	30,1	26,43	30,47	36,47
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	70,77	67,48	69,52	40,75
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	29,97	61,33	15	18,98
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Rp	34.143	34.143	19.565	19325
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	3,1	1,3	1,31	4,32
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	0,1	0,1	7,71	NA
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	58,3	58,3	NA	NA
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Orang	60	753	2.181	2.860
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Orang	326.993	512.716	542.072	564.006
8.9.2*	Jumlah Pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja		38	38	38	NA
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per100.000 penduduk dewasa	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	ATM	1	1	1	1
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank Umum)	Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		2,5	2,5	2,5	2,5
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	29,1	45,4	81,8	50,29
TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta mendorong inovasi							
Target SDGs 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Dermaga	3	2	2	2

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persen	6,48	6,68	6,54	6,54
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persen	5,72	8,41	5,09	3,61
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Persen	50	50	NA	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Badan Pusat Statistik	~~Persen~~	~~NA~~	~~84,46~~	90	
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Badan Pusat Statistik	Persen	43	57,91	85	
TUJUAN 10 mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara							
Terget SDGs 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	Dinas Sosial	Koefisien	0,362	0,361	0,379	0,329
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	Persen	7,43	7,39	7,22	6,71
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	109	109	109	109
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	0	0	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan	Desa	6	14	23	59

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		Masyarakat dan Desa					
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		80,2	NA	NA	NA
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial	Persen	19,05	16,75	1,89	1,89
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Sekda, Bagian Hukum dan HAM	Fasilitasi Koordinasi Produk Hukum Daerah Berupa Perda, Perbup,Keputusan dan Fasilitasi Bantuan Hukum	743	743	NA	Tidak ada
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Persen	5,36	5,3	10,04	
TUJUAN 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
Target SDGs 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Persen	77,5	74,6	74,77	93,05
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	3	91	12.236	126
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	100	100	100
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RP	1.518.000.000	3.000.000.000	4.068.000.000	4.909.500.000
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	86,63	94,77	70,33	63,73
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
TUJUAN 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
Target SDGs 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	35	35	35	43,85
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	2.495	2.100,35	590.300	2.228,53
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	1	1	1	1
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.							
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	14,33	0	NA	NA
TUJUAN 13.Mengambil Tindakan cepat untuk Mengangtisipasi Perubahan Iklim dan Dampaknya							
Target SDGs 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.							
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Orang	3	91	12.326	126
TUJUAN 14. melestarikan dan memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan							
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.							
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Dinas Perikanan	Ton	53.830	55.522,60	55.612,00	55.522,6
14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.							
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Perikanan	Persen	100	100,00	100	80
14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.							
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Perikanan	Nelayan	NA	NA	NA	669
TUJUAN 15.Melindungi, Merestorasi dan meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara lestari, menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan serta menghentikan kehilangan Keanekaragaman hayati							
Target SDGs 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	29,86	29	29,86	30,63
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	32,29	25	25	30,63
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada
TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses keadilan							
Target SDGs 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Satpol PP	Kasus	3	2	0	5
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kematian	0	0	4	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Satpol PP	Kasus	56	78	324	356
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Satpol PP	Persen	100	100	100	100
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	19	23	9	18
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Orang	19	23	13	18
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	90,04	85,12	93,78	92,32
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP ( )
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Persen	64,29	64,29	62,45	61,89
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekda, Bagian Pembangunan	Persen	94	95	95	99,09
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Persen	68,91	68,91	56,42	70,22
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	20	20	20	22,5
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	NA	NA	17,3	23,08
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan	Persen	96,24	97,31	98,42	98,95

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
		dan Pencatatan Sipil					
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	97,79	98,29	98,42	98,95
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	ASN	1	1	1	1
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Setda, Bagian Hukum dan HAM	NA	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
TUJUAN 17. Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
Target SDGs 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	Persen	8,63	7,98	7,96	7,89
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah	Persen	0,97	0,98	0,99	1,05
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	Persen	11,3	12,59	12,15	13,13
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Persen	50	50,00	50	50

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Capaian			
				2021	2022	2023	2024
17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Badan Pusat Statistik	Persen	50	57,91	NA	
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik	Persen	100	100,00	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik	Persen	100	100,00	100	100
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik		6	6	NA	
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang Daerah					
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Ada	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik	Orang				
17. 19. 2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik	Persen	100	100,00	100	100

Sumber : Bapperida Kabupaten Bulukumba 2025, diolah

2.1.5.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.2.5.1 Urusan Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah pada jenjang PAUD (usia 5-6 tahun), SD (usia 7-12 tahun) dan jenjang SMP (usia-13-15) sudah sangat baik dengan persentase capaian yang mengalami peningkatan setiap tahun. Pencapaian ini ditunjang dengan beberapa program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba seperti kemudahan akses layanan pendidikan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan turut dipengaruhi oleh adanya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) serta program bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Pada indikator angka partisipasi jenjang kesetaraan terjadi penurunan yang disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan masyarakat dengan keberadaan pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal. Selain itu, dipengaruhi oleh faktor pendataan anak tidak sekolah yang belum berjalan secara optimal serta ikut dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial seperti: maraknya pernikahan dini dan banyak anak yang cenderung lebih memilih bekerja untuk membantu orangtua mencari nafkah. Berikut kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024:

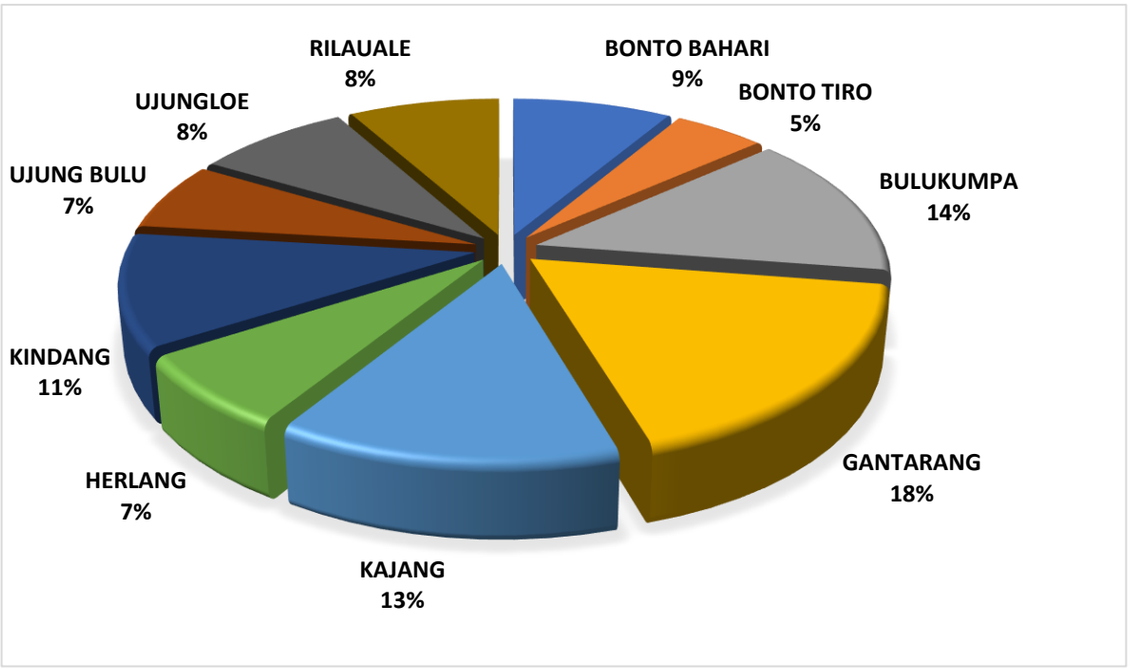
Tabel II-97
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97,23	98,14	98,81	98,59	98,77
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,06	99,24	99,75	99,51	98,69
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,42	96,76	97,27	98,41	98,64
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	87,57	88,44	96,94	98,29	81,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara merata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah baik jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di seluruh kecamatan. Berikut persentase pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024:

Grafik II-136
Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024 tercatat sebanyak 467 unit. Kecamatan Gantarang mencatat persentase tertinggi dalam pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020–2024, yaitu sebesar 18 persen atau sebanyak 84 unit, mencerminkan fokus pengembangan pendidikan yang lebih intensif di wilayah ini. Sebaliknya, Kecamatan Bonto Tiro menunjukkan persentase terendah, yakni sebesar 5 persen atau sebanyak 23 unit, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan fasilitas pendidikan agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah.

Selain menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara merata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba juga telah berupaya memberikan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan setiap satuan pendidikan di seluruh kecamatan Kabupaten Bulukumba mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya manusia berkualitas dalam mendukung proses belajar mengajar. Berikut sebaran pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2024:

Tabel II-98
Sebaran Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Kecamatan	2024	
		Pendidik	Tenaga Kependidikan
1	Bulukumpa	637	273
2	Rilauale	428	158
3	Kajang	585	249
4	Herlang	485	200
5	Bonto Tiro	426	173
6	Bonto Bahari	393	112
7	Kindang	417	162
8	Gantarang	940	351
9	Ujungloe	549	235
10	Ujung Bulu	648	217
TOTAL		**5.508**	**2.130**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

Kecamatan Ujung Bulu mencatat jumlah pendidik dan tenaga kependidikan tertinggi di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024, yaitu masing-masing sebanyak 648 pendidik dan 271 tenaga kependidikan, yang mencerminkan tingginya konsentrasi satuan pendidikan di wilayah ini. Sebaliknya, jumlah terendah tercatat di Kecamatan Bonto Tiro, yaitu 393 pendidik dan 112 tenaga kependidikan, yang mengindikasikan perlunya perhatian khusus untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan di daerah tersebut guna mendukung pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu tantangan besar dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak di Kabupaten Bulukumba adalah pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditemukan bahwa sejumlah anak usia sekolah (7–18 tahun) tidak mengakses pendidikan formal karena berbagai faktor seperti ekonomi, geografis, sosial-budaya, dan lain-lain. Dalam upaya pengentasan ATS, pada tanggal 15 Bulan Juni tahun 2023 dicanangkan Gerakan Pengembalian Anak ke Sekolah dan Program Penguatan Remaja Perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong ATS mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Pemerintah kabupaten Bulukumba telah mereplikasi kegiatan tersebut pada 64 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Proses pendataan selesai dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023. Selanjutnya, pada bulan Juni tahun 2024 proyek pilot ini dilaksanakan pada 109 Desa dan 27 Kelurahan di Kabupaten Bulukumba. Data ATS yang tercatat sebanyak 11.041. Dalam perjalanannya selama kurun waktu 6 bulan, terjadi penurunan ATS di bulan Desember tahun 2024 dengan jumlah menjadi 9.687 anak. Melalui proses yang melibatkan banyak stakeholder, seperti Bapperida, DP2KBP3A, DPMD, Dinsos, Disdukcapil, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta didukung oleh Unicef, pada Bulan Januari tahun 2025 ada penurunan jumlah ATS menjadi 9539 anak, sampai pada bulan Juli tahun 2025 jumlah ATS di Kabupaten Bulukumba tersisa 9033 anak. Data ini terus mengalami perubahan yang dapat dipantau setiap hari melalui aplikasi Pusdatin Kemendikdasmen. Berdasarkan gambaran di atas menjelaskan bahwa, telah terjadi pengurangan

jumlah ATS dan akan dikembalikan masuk ke satuan pendidikan formal dan non formal untuk tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 2.023 anak.

Tabel II-99
Angka Penurunan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bulukumba

No	Tahun	Jumlah ATS	Jumlah Penurunan	Total ATS
1	2023	11.041	1.354	9.687
2	2024	9.687	148	9.539
3	2025	9.539	521	9.018
	Total		**2.023**	

Sumber Data :Update data ATS sampai dengan bulan Juli tahun 2025

2.1.2.5.2 Urusan Kesehatan

Capaian urusan kesehatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2020–2024 menunjukkan berbagai perkembangan positif, terutama dalam hal layanan kesehatan ibu dan anak. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan mengalami peningkatan signifikan, dari 0,07 persen pada tahun 2020 menjadi 1,27 persen pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 0,07 persen dibanding tahun sebelumnya ini didorong oleh penambahan fasilitas pelayanan, terutama dengan berdirinya RS Pratama/RS Andi Makkarodda pada tahun 2023. Berdasarkan target capaian kinerja sebesar 1:1000 penduduk, rasio daya tampung tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan dan berdampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan rujukan di wilayah Kabupaten Bulukumba. Peningkatan ini juga menunjukkan keberhasilan dalam memperluas akses layanan kesehatan masyarakat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin terus menunjukkan capaian maksimal dengan angka 100 persen secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan program edukasi antenatal care terpadu, pemanfaatan teknologi dalam monitoring kehamilan, serta meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilan secara dini. Capaian ini turut diikuti dengan layanan kesehatan bayi baru lahir yang juga mencapai 100 persen, yang didukung oleh keberhasilan dalam pemantauan kunjungan neonatal secara rutin melalui Puskesmas dan tenaga kesehatan di tingkat desa.

Namun, beberapa indikator pelayanan kesehatan mengalami penurunan dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar mengalami penurunan sebesar 9,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 100 persen menjadi 90,82 persen. Bila dibandingkan dengan target capaian kinerja sebesar 100 persen, terdapat selisih sebesar 9,18 persen. Penurunan ini berpotensi meningkatkan angka kesakitan dan kematian balita, terutama karena sebagian masyarakat lebih memilih melakukan pemantauan pertumbuhan balita ke sarana pelayanan kesehatan lain seperti klinik dan praktik dokter mandiri, yang tidak terlapor dalam sistem pencatatan wilayah kerja Puskesmas.

Demikian pula, capaian persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami penurunan sebesar 5,57 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan capaian 90,43 persen pada tahun 2024 dan selisih sebesar 9,57 persen dari target nasional. Penurunan ini sangat berpengaruh terhadap cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah dasar. Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan SDM dan

biaya operasional dalam proses penjaringan siswa, minimnya sarana dan prasarana pemeriksaan (seperti reagen), serta belum optimalnya peran UKS dan guru dalam mendukung kegiatan penjaringan kesehatan. Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman siswa akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dini dan adanya penolakan dari sebagian orang tua terhadap pemberian imunisasi, akibat stigma negatif terkait dampaknya.

Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada cakupan skrining kesehatan bagi penduduk usia produktif (15–59 tahun) dan lanjut usia (60 tahun ke atas), yang kini telah mencapai 100 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini serta komitmen pelayanan Puskesmas dalam menjangkau kelompok rentan. Meski tantangan masih ada, seperti keterbatasan anggaran homecare dan belum optimalnya dukungan lintas sektor, capaian ini menunjukkan arah perbaikan yang konsisten.

Capaian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) juga sangat baik dengan angka 100 persen, berkat meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin dan keberlanjutan program pengobatan oleh stakeholder kesehatan. Hal serupa juga terjadi pada pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, yang tetap berada di angka 100 persen berkat keterlibatan aktif keluarga, petugas kesehatan, serta puskesmas dalam pendampingan dan pemberian terapi rutin.

Namun demikian, pelayanan kesehatan untuk orang terduga TBC mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2024, capaian pelayanan hanya sebesar 51,76 persen, turun sebesar 48,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan target capaian kinerja sebesar 100 persen, terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 48,25 persen. Penurunan ini sangat berdampak pada efektivitas pengendalian dan penanganan TBC di daerah. Faktor-faktor penyebabnya meliputi masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit TBC, yang menyebabkan penderita cenderung mengobati diri secara mandiri dan tidak melapor. Selain itu, adanya perbedaan definisi operasional antara indikator program dan indikator LPPD menyulitkan pelaporan akurat. Keterbatasan logistik untuk penegakan diagnosis TBC yang didistribusikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi juga menghambat kinerja faskes. Partisipasi faskes swasta dalam penemuan kasus suspek TBC belum maksimal, dan komitmen petugas dalam mengejar target juga masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, dukungan lintas sektor, termasuk kader desa dalam proses rujukan, serta alokasi anggaran melalui dana desa, belum berjalan optimal.

Sebaliknya, capaian pelayanan deteksi dini HIV menunjukkan hasil yang optimal dengan angka 100 persen. Capaian ini didorong oleh pendekatan berbasis komunitas melalui pendampingan terhadap kelompok berisiko, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi lintas program yang memperkuat deteksi dini dan pengobatan HIV secara menyeluruh.

Secara umum, capaian urusan kesehatan Kabupaten Bulukumba selama periode 2020—2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam layanan esensial seperti kesehatan ibu, bayi, dan kelompok rentan. Meskipun demikian, sejumlah indikator strategis yang masih rendah memerlukan perhatian serius dan intervensi berkelanjutan, baik melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan sarana prasarana, maupun kolaborasi lintas

sektor guna mendukung pemerataan dan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah.

Tabel II-100
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Rujukan	0,07	0,06	1,22	1,20	1,27
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	90,82
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,00	100,00	97,10	96,00	90,43
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	4,46	17,48	100,00	100,00	100,00
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	31,41	100,00	93,07	100,00	100,00
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	51,76
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
deteksi dini HIV sesuai standar					

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti penyediaan infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan kawasan pesisir, pelayanan jaringan irigasi, penyediaan air minum dan pengolahan limbah domestik, kepatuhan izin bangunan, kondisi kemantapan jalan, kualitas tenaga teknis bersertifikat, serta pengawasan proyek konstruksi. Data capaian indikator tersebut mencerminkan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mengurangi risiko bencana, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan data kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bulukumba tahun 2020—2024, indikator rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, belum terdapat target maupun capaian indikator ini. Hal tersebut disebabkan kewenangan pengelolaan wilayah sungai masih berada pada Dinas PSDA dan belum terintegrasi dengan Dinas PUTR pascamerger kelembagaan. Selanjutnya, pada tahun 2022 tercatat capaian sebesar 100 persen. Namun demikian, angka tersebut bukanlah representasi capaian faktual, melainkan akibat adanya kesalahan perhitungan luas lokasi permukiman rawan banjir. Perbaikan data baru dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, yang menghasilkan rasio masing-masing 41,56 persen dan 15,60 persen. Rendahnya capaian pada dua tahun terakhir dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi anggaran, mengingat regulasi terbaru menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah sungai berada di bawah pemerintah provinsi, bukan lagi pemerintah kabupaten (PP Nomor 35 Tahun 1991 dan Permen PUPR terkait). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi dan kelembagaan, sehingga upaya pencapaian target kinerja membutuhkan sinergi lintas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Sama halnya dengan indikator rawan banjir, indikator perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi juga menghadapi dinamika serupa. Sebelum adanya penggabungan kelembagaan, kewenangan penanganan pantai masih berada pada Dinas PSDA. Hal ini menyebabkan pada periode 2020—2021 tidak tercatat adanya target capaian. Pada tahun 2022, indikator menunjukkan angka 100 persen, yang kembali disebabkan oleh permasalahan perhitungan luas kawasan permukiman. Setelah dilakukan perbaikan pada tahun 2023, capaian turun menjadi 31,39 persen, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 13,30 persen. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2024 didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur pengaman pantai berupa breakwater sepanjang 1,5 kilometer dengan alokasi anggaran sebesar Rp32 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan fisik mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja indikator, meskipun realisasi rasio masih relatif rendah.

Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020—2024. Pada tahun 2020, capaian indikator ini berada pada angka 65,30 persen. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 84,98 persen, dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2022 sebesar 86,78 persen. Pada tahun 2023, rasio tersebut relatif stabil dengan capaian 86,79 persen, dan akhirnya mencapai 87,14 persen pada tahun 2024. Perkembangan positif ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi capaian. Pada tahun 2020, persentase akses rumah tangga terhadap air minum aman tercatat sebesar 93,72%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 84,97%, atau turun sekitar 8,75 poin persentase. Setelah penurunan tersebut, capaian kembali menunjukkan tren peningkatan meskipun relatif lambat. Pada tahun 2022, angka persentase naik menjadi 85,75%, kemudian meningkat sedikit menjadi 85,80% pada tahun 2023, dan mencapai 86,01% pada tahun 2024. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa capaian akses air minum aman di Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya stabil. Jika dibandingkan dengan capaian awal tahun 2020 (93,72%), kondisi pada tahun 2024 (86,01%) masih lebih rendah sekitar 7,71 poin persentase. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada tren perbaikan, tingkat akses belum sepenuhnya pulih ke posisi terbaik dalam lima tahun terakhir.

Adapun data persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bulukumba periode 2020—2024, terlihat adanya dinamika capaian yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, capaian akses layanan pengolahan air limbah domestik tercatat sebesar 77,30% dan capaian tertinggi pada tahun 2022 hingga 85,90%. Setelah capaian tertinggi pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 83,41% sebelum meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 83,82%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren capaian menunjukkan arah yang positif dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020, yaitu terdapat peningkatan sebesar 6,52 poin persentase pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Bulukumba telah mengalami perbaikan akses layanan pengolahan air limbah domestik, namun tetap memerlukan upaya konsisten dalam penguatan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengelolaan berkelanjutan agar target akses sanitasi layak dapat tercapai secara merata.

Berdasarkan data rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bulukumba periode 2020—2024, terlihat capaian yang sangat tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan IMB tercatat sebesar 99,64%, kemudian pada tahun 2021 hingga 2024 mencapai 100,00% secara berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh aktivitas pembangunan di Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku dan mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi tata ruang dan bangunan. Penguatan pengawasan,

pemantauan langsung terhadap pembangunan, serta integrasi dengan sistem perizinan berbasis digital menjadi penting agar tingkat kepatuhan IMB di Kabupaten Bulukumba dapat terus terjaga dan berkontribusi terhadap penataan ruang yang berkelanjutan.

Berdasarkan data tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba periode 2020—2024, terlihat adanya fluktuasi capaian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat kemantapan jalan tercatat sebesar 70,40%, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 88,07%, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 86,00%, meskipun masih berada dalam kategori capaian tinggi. Penurunan lebih signifikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan capaian hanya 49,20%, atau turun hampir setengah dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek pemeliharaan berkelanjutan, keterbatasan anggaran, atau meningkatnya kerusakan jalan yang tidak segera tertangani. Dengan demikian, diperlukan strategi pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih konsisten dan berkesinambungan, termasuk perencanaan anggaran yang memadai, penguatan manajemen pemeliharaan, serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih tahan lama agar tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bulukumba dapat terjaga secara stabil dan mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data rasio tenaga operator, teknisi, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Bulukumba periode 2020—2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase tenaga kerja bersertifikat tercatat sebesar 77,40%, kemudian meningkat menjadi 83,00% pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam mendorong sertifikasi tenaga teknis agar memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan lebih lanjut hingga mencapai 86,40%, dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2023 dengan angka yang sama, sebelum kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 87,72%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba berhasil meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga operator/teknisi/analis secara bertahap dan konsisten, dengan kenaikan sebesar 10,32 poin persentase dalam kurun waktu lima tahun. Meski demikian, dengan target sertifikasi sebanyak 375 orang dalam lima tahun ke depan, upaya peningkatan sertifikasi perlu terus dilanjutkan secara sistematis melalui program pelatihan, dukungan pembiayaan sertifikasi, serta penguatan kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi agar seluruh tenaga teknis dapat memenuhi standar profesional yang ditetapkan.

Berdasarkan data rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi di Kabupaten Bulukumba periode 2020—2024, dapat dilihat bahwa capaian indikator ini menunjukkan nilai 100,00% secara konsisten setiap tahun. Hal ini menunjukkan seluruh proyek konstruksi yang diawasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat diselesaikan tanpa terjadi kecelakaan kerja yang tercatat. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kegiatan konstruksi telah diterapkan dengan baik, serta adanya efektivitas pengawasan dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap pelaksana proyek mematuhi standar

teknis, regulasi keselamatan, dan prosedur operasional yang berlaku. Meskipun capaian 100% patut diapresiasi sebagai indikator positif atas keberhasilan Kabupaten Bulukumba dalam menjaga keselamatan proyek konstruksi, tetap diperlukan mekanisme monitoring yang transparan, audit lapangan secara berkala, serta peningkatan kapasitas tenaga pengawas dan pelaksana proyek agar kualitas pengawasan dan budaya K3 dapat terus terjaga secara faktual di lapangan, bukan hanya secara administratif.

Tabel II-101
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	100,00	41,56	15,60
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	100,00	31,39	13,30
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,30	84,98	86,78	86,79	87,14
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	93,72	84,97	85,75	85,80	86,01
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,30	75,07	85,90	83,41	83,82
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,40	70,50	88,07	86,00	49,20
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	77,40	83,00	86,40	86,40	87,72
Rasio proyek yang menjadi kewenangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba, 2025

Secara keseluruhan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bulukumba pada periode 2020—2024 menunjukkan adanya dinamika yang cukup beragam antarindikator. Beberapa indikator memperlihatkan tren positif dan konsistensi capaian, seperti peningkatan rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi, kepatuhan IMB yang stabil pada angka maksimal, peningkatan jumlah tenaga teknis bersertifikat, serta nihilnya kecelakaan konstruksi pada proyek yang diawasi. Namun demikian, terdapat pula indikator yang menunjukkan fluktuasi signifikan bahkan penurunan, seperti tingkat kemantapan jalan, perlindungan kawasan permukiman rawan banjir dan pantai rawan abrasi, serta akses air minum yang belum sepenuhnya pulih ke capaian tertinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan alokasi anggaran, tetapi juga oleh aspek regulasi, kelembagaan, serta koordinasi lintas kewenangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi tepat guna agar pelayanan publik di bidang infrastruktur dan tata ruang dapat lebih optimal, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pemerintah Daerah memiliki Kewajiban dalam penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), salah satu jenis layanan SPM adalah Bidang Perumahan Rakyat yang bisa melekat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kewenangan layanan dalam menerapkan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Layanan 1, Penyediaan & Rehabilitasi RLH bagi Korban Bencana.
2. Layanan 2, Fasilitasi Penyediaan RLH masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah.

Pada Tahun 2023 terdapat bencana yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa unit rumah, kemudian setelah dilakukan verifikasi teknis disimpulkan 2 unit rumah yang bersyarat dan membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Kemudian adanya penertiban dan penataan Kawasan Pantai Merpati, membuat beberapa warga yang tinggal sementara di lokasi tersebut diharuskan untuk dilakukan relokasi program pemerintah ke lokasi lain yang sudah dipersiapkan dan membangunkan hunian sementara sebanyak 6 unit untuk 6 keluarga yang relokasi dari lokasi sebelumnya.

Untuk tahun 2024 terjadi bencana angin kencang yang mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah masyarakat berdasarkan dari SK Tanggap Darurat nomor: 188.45 – 150 tahun 2024, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang di Kabupaten Bulukumba, setelah dilakukan verifikasi teknis disimpulkan 4 unit rumah bersyarat dan membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, kemudian terjadi bencana kembali dengan dasar SK Bupati Bulukumba nomor: 188.45-

517 Tahun 2024, tanggal 3 Juli 2024, tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Erosi di Kabupaten Bulukumba. Dengan hasil verifikasi teknis 1 unit rumah bersyarat dan membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan total bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Tahun 2024 sebanyak 5 unit rumah.

Tabel II-102
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	0,00	0,00	3,17	100,00
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,00	4,33	9,55	17,44	14,81
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,65	7,28	6,97	6,95	6,81
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini tercermin dari dua indikator yang konsisten mencapai target maksimal setiap tahunnya.

Persentase gangguan Trantibum yang berhasil diselesaikan di Kabupaten Bulukumba mencapai 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Artinya, seluruh kasus gangguan ketertiban masyarakat yang terjadi berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi indikator keberhasilan dalam menjaga situasi kondusif di masyarakat, serta menunjukkan kesiapsiagaan dan respons cepat dari aparat penegak Trantibum.

Demikian pula, persentase penegakan Perda dan Perkada juga tercatat sebesar 100 persen setiap tahun dalam periode yang sama. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran terhadap regulasi daerah yang terdeteksi berhasil ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Konsistensi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menegakkan aturan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib dan disiplin.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menggambarkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjaga ketertiban serta menegakkan hukum di tengah masyarakat. Prestasi ini juga mencerminkan keberhasilan dalam membangun sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam

menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-103
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	72.687,00	175,81	100,00	100,00	100,00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	419,00	1.304,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	7,00	7,00	7,00	11,75	12,11

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.6 Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan sosial di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Pada tahun 2020, capaian masih berada pada angka 65,49 persen, yang kemudian meningkat menjadi 79,96 persen pada tahun 2021. Yang menjadi masalah dalam pencapaian tahun ini adalah, keterbatasan data yang akurat, dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas petugas sosial, dan proses asesmen yang belum menyeluruh menjadi hambatan tersendiri dalam menjangkau seluruh kelompok rentan secara efektif.

Namun demikian, upaya perbaikan secara berkelanjutan telah dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta peningkatan kapasitas petugas lapangan seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Hal ini berkontribusi pada peningkatan signifikan capaian di tahun 2022 sebesar 96,10 persen, hingga akhirnya mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pendekatan berbasis

komunitas dan layanan sosial di luar panti, yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga memperkuat kolaborasi dengan lembaga sosial masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk memaksimalkan program bantuan sosial non-tunai dan rehabilitasi berbasis keluarga. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan juga mulai meningkat, terbukti dari partisipasi aktif dalam pelaporan dan pendampingan kasus.

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir konsisten mencapai angka 100 persen. Capaian ini menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dan efektivitas pemerintah daerah dalam merespon situasi tanggap darurat. Dukungan logistik yang memadai, keberadaan gudang penyangga logistik di lokasi strategis, serta sinergi yang baik antara Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, dan relawan menjadikan penanganan bencana di Bulukumba lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, adanya simulasi kebencanaan secara rutin dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah rawan bencana turut meningkatkan kapasitas respon lokal. Masyarakat Bulukumba sendiri menunjukkan tingkat kepedulian dan gotong royong yang tinggi, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar selama dan pasca bencana.

Tabel II-104
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	65,49	79,96	96,10	100,00	100,00
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.7 Urusan Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berhasil difasilitasi dan diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2023 dan 2024 jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang telah mendaftar melalui aplikasi Siap Kerja. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami penururnan tahun 2024 karena pelatihan dan produktivitas tenaga kerja hanya fokus pada pelatihan alat berat.

Tabel II-105
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	20,00	100	100	100	100
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,12	0,13	0,17	0,06	0,13
Tingkat produktivitas tenaga kerja	39,09	42,39	43,83	39,24	39,65
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0	0	0	0	0
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	125,90	25,31	68,31	38,99	14,83

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

Data pencari kerja yang terdaftar dan yang berhasil ditempatkan memiliki peran penting dalam urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba, karena menjadi indikator dalam mengukur efektivitas program penempatan tenaga kerja serta kondisi pasar kerja di daerah. Informasi ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, pengembangan peluang kerja lokal, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta. Terdapat 2 (dua) jenis pencari kerja antara lain Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara resmi dan Antar Kerja 1 (AK1) /Kartu Kuning yaitu kartu pencari kerja sebagai identitas resmi dan data administrasi ketenagakerjaan dalam negeri.

2.1.2.5.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup beragam, baik dari aspek penguatan kelembagaan perencanaan berbasis gender maupun layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu indikator utama dalam pengarusutamaan gender adalah Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD. Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian ARG di Kabupaten Bulukumba mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dari 3 persen pada 2020, meningkat menjadi 3,71 persen pada 2021, namun menurun menjadi 1,68 persen pada tahun 2024. Angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target ideal pengarusutamaan gender yang mensyaratkan setiap kegiatan/subkegiatan dalam APBD dianalisis melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan dilengkapi dengan Gender Budget Statement (GBS). Rendahnya capaian ini mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman serta

komitmen OPD dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis gender, meskipun proses pendampingan dan pengawasan telah dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, faktor kurangnya pelatihan teknis terkait analisis gender dan minimnya integrasi isu gender dalam perencanaan juga turut memengaruhi capaian tersebut.

Meski demikian, upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, seluruh anak korban kekerasan yang melapor ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berhasil mendapatkan layanan perlindungan dan pendampingan secara menyeluruh. Hal ini membuktikan bahwa responsivitas terhadap perlindungan anak di Kabupaten Bulukumba telah berada pada tingkat yang sangat baik. Pendampingan ini mencakup layanan holistik mulai dari pendampingan psikososial, bantuan hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial, dan dilaksanakan oleh petugas terlatih melalui Tim Reaksi Cepat (TRC). Sinergi dengan lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, serta aparat penegak hukum juga turut memperkuat keberhasilan intervensi terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Namun, indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), masih menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama. Meskipun sempat menurun drastis dari 0,01 pada tahun 2020 menjadi 0,0021 di tahun 2021, rasio ini melonjak tajam menjadi 3,3177 per 100.000 penduduk perempuan di tahun 2023, sebelum kembali turun menjadi 0,0012 pada tahun 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Di antaranya adalah masih kuatnya budaya patriarki dan norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta minimnya pendidikan terkait kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Di sisi lain, faktor ekonomi seperti kemiskinan, ketergantungan ekonomi perempuan, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum, sosial, dan kesehatan juga memperbesar risiko kekerasan.

Masalah ini diperburuk oleh masih lemahnya penegakan hukum yang berpihak pada korban, lambatnya proses hukum terhadap pelaku kekerasan, dan belum maksimalnya perlindungan hukum bagi korban TPPO. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan perempuan yang mencakup peningkatan akses layanan hukum, edukasi publik yang masif, serta integrasi pendekatan berbasis komunitas untuk mencegah kekerasan sejak dini. Perlu juga penegakan hukum yang tegas dan berpihak kepada korban serta peningkatan koordinasi antar sektor untuk memastikan semua kasus kekerasan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Selain itu, penguatan komitmen OPD dalam menyusun GAP dan GBS juga sangat krusial untuk memastikan bahwa penganggaran daerah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan dan laki-laki. ARG bukan hanya sekadar angka persentase, tetapi merupakan cerminan dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek pembangunan.

Tabel II-106
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		3	3,71	3,40	1,68
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0.01	0.0021	3,3177	0,0012

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.9 Urusan Pangan

Persentase ketersediaan pangan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada diatas 100 persen yang menggambarkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki stok pangan yang cukup atau surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara optimal.

Tabel II-107
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	230,90	216,79	214,88	193,33	187,28

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.10 Urusan Pertanahan

Data urusan pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam sektor pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan walaupun pada tahu 2020 hingga 2021 tidak mengalami kenaikan, sedangkan persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dalam kurung waktu 4 (empat) tahun periode tahun 2020 hingga 2024 stabil diangka 100,00 walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka sebesar 60,00 yang diakibatkan karena ketidak sesuaian harga yang mengakibatkan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mengalami penurunan dari target yang direncanakan sebelumnya.

Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan hanya menunjukkan nilai sebesar 0,00 persen sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan nilai 100,00 persen dari tahun 2022 sampai tahun 2023

bahkan pada tahun 2024 mengalami lonjakan dengan nilai total sebesar 101,26 persen.

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan hanya menunjukkan nilai 0,00 persen sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan nilai 100,00 persen dari tahun 2022 sampai pada tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 99,35.

Tersedianya tanah untuk masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada capaian target namun pada tahun 2022 hingga 2024 capaian mengalami lonjakan 100,00 karna adanya pembebasan lahan yang berhasil di lakukan pada tahun tersebut. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi termasuk berhasil karna pada tahun berjalan 2020 hingga 2024 capaian 100,00 karna ada sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi.

Tabel II-108
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0,00	0,00	100,00	100,00	101,93
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0,00	0,00	0,00	100,00	99,35
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.11 Urusan Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu indeks kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Pengukuran indeks kualitas air telah dihitung dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode indeks pencemaran (IP). Pengujian kualitas air sungai di Kabupaten

Bulukumba dilakukan sebanyak 6 (enam) sungai besar yaitu Sungai Balantieng, Sungai Bijawang, Sungai Anyorang, Sungai Bialo, Sungai Lolisang, dan Sungai Raowa. Hasil pengukuran menunjukkan indeks dari kondisi baik pada tahun 2021, kondisi sedang (air sedikit tercemar) di tahun 2022 dan kondisi cukup tercemar tahun 2023 dan tahun 2024 ini disebakan salah satunya oleh kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan pupuk kimia dan petsida yang berlebihan dan meresap kedalam tanah dan mencemari air.

Hasil Pengukuruan Indeks kualitas udara tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kondisi pada level sedang atau dapat diartikan tingkat pencemaran udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia secara umum, namun berdampak pada kelompok sensitif. Hasil pengukuran indeks tutupan lahan tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan pada level kurang, ini disebakan diantaranya alih fungsi lahan menjadi pemukiman, pertanian, pembangunan infrastruktur dan penebangan pohon.

Tabel II-109
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	70,96	64,80	64,32	63,74	63,53
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98,27	70,43	73,13	94,79	68,27
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	21,74	100,00	19,40	6,67	31,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian perekaman KTP Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren positif meskipun mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian perekaman mencapai 100 persen, namun mengalami penurunan menjadi 94,67 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2024, angka ini kembali naik ke 97,17 persen. Fluktuasi ini sebagian besar disebabkan oleh kendala teknis, seperti pembaruan sistem, perubahan data penduduk dinamis, serta keterbatasan dukungan operasional di lapangan. Di sisi lain, tingkat kepemilikan fisik KTP-el belum mencapai tingkat ideal karena keterbatasan bahan cetak blanko di tingkat pusat.

Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) terus meningkat, dari 23,42 persen pada tahun 2020 menjadi 45,65 persen pada tahun 2024. Meskipun telah terjadi kenaikan signifikan, capaian ini masih berada di bawah target nasional sebesar 50 persen. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi, pelibatan lembaga pendidikan dan kesehatan, serta percepatan layanan untuk mendukung pemenuhan hak identitas anak di Kabupaten Bulukumba.

Kepemilikan akta kelahiran mengalami lonjakan dari 77,93 persen (2020) menjadi 98,62 persen (2023), namun menurun menjadi 94,13 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penambahan data kelahiran yang belum seluruhnya terinput atau kendala teknis dalam pemrosesan dokumen. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian melalui optimalisasi sistem pelaporan kelahiran berbasis desa dan fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, pemanfaatan data kependudukan antar perangkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis maupun administratif. Sejak tahun 2023, terdapat enam perangkat daerah (OPD) yang telah menjalin perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan, namun realisasi pemanfaatannya belum optimal. Hal ini tercermin dari persentase pemanfaatan yang stagnan pada angka 15,38 persen dari total 39 OPD pada tahun 2022 dan 37 OPD pada tahun 2023–2024. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan bandwidth dan kapasitas infrastruktur digital yang dikelola oleh Dinas Kominfo, yang belum sepenuhnya mampu mendukung lalu lintas data kependudukan secara cepat dan stabil, terutama untuk akses data yang bersifat real-time. Selain itu, belum seluruh OPD memiliki sistem informasi internal yang terintegrasi, sehingga proses pemanfaatan data masih dilakukan secara manual atau melalui metode yang belum efisien.

Dari sisi administratif, proses perolehan hak akses ke data kependudukan dari Ditjen Dukcapil memerlukan waktu dan tahapan yang cukup panjang. OPD wajib mengajukan perjanjian kerja sama secara formal disertai dokumen pendukung teknis, kesiapan infrastruktur, serta penjelasan tujuan penggunaan data. Bagi sebagian OPD, proses ini dianggap rumit karena keterbatasan pemahaman terhadap prosedur maupun kurangnya dukungan teknis. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran terhadap aspek keamanan dan privasi data, sehingga beberapa OPD belum berani secara aktif memanfaatkan akses yang telah diberikan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendampingan teknis dari Dinas Dukcapil dan Kominfo, peningkatan literasi digital aparatur, serta penguatan sistem keamanan informasi yang dapat menjamin perlindungan data penduduk secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas infrastruktur digital, serta penyederhanaan proses perizinan akses data dari kementerian terkait. Penguatan sistem informasi yang terintegrasi berbasis data kependudukan menjadi kunci dalam mendukung pelayanan publik yang lebih responsif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Tabel II-110
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP elektronik	100,00	99,90	94,67	99,54	97,17
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	23,42	20,77	33,42	45,44	45,65
Kepemilikan akta kelahiran	77,93	97,80	98,33	98,62	94,13

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	15,22	13,51	16,22	15,38	15,38

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Bulukumba menunjukkan hasil yang baik dan konsisten sejak tahun 2021. Pada tahun 2020, sebanyak 80,00 persen desa tertinggal telah berhasil naik status menjadi desa berkembang. Bahkan mulai tahun 2021 seluruh desa tertinggal Kabupaten Bulukumba telah 100 persen terentaskan, sehingga sejak tahun 2021 hingga 2024 tidak ada lagi desa dengan status tertinggal. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen kuat pemerintah daerah, optimalisasi penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM), peningkatan infrastruktur dasar, pendampingan desa yang efektif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat dan perguruan tinggi.

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kesulitan geografis, dan ketimpangan kapasitas SDM desa, hambatan-hambatan tersebut berhasil diatasi secara bertahap melalui efisiensi program, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan peran lembaga desa dan BUMDes. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan mampu mempercepat transformasi desa dari status tertinggal menjadi berkembang secara menyeluruh.

Berbeda dengan pengentasan desa tertinggal yang sudah tuntas, peningkatan status menjadi desa mandiri masih menunjukkan tren fluktuatif, meskipun tetap positif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana 76,47 persen desa berkembang berhasil naik menjadi desa maju dan mandiri. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi desa, insentif pemerintah daerah, dan adopsi inovasi digital desa. Namun, tantangan seperti kesenjangan kapasitas antar desa, ketergantungan terhadap bantuan eksternal, keterbatasan akses pasar, dan perubahan indikator IDM masih menjadi faktor penghambat yang perlu terus diatasi untuk mencapai kemandirian desa yang berkelanjutan dan merata.

Tabel II-111
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengentasan desa tertinggal	88,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Persentase peningkatan status desa mandiri	16,30	37,66	31,25	48,48	76,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 (2,31) hingga mencapai angka terendah di tahun 2024 (0,75). Penurunan ini mengindikasikan

keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu meningkatnya pendidikan perempuan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Selain itu, menurunnya TFR juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan pergeseran preferensi terhadap jumlah anak yang ideal.

Sementara itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 sebesar 56,29 persen namun kembali meningkat hingga 65,21 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh akses terhadap layanan KB, ketersediaan alat kontrasepsi, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan kontrasepsi. Adapun persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) juga menunjukkan tren yang signifikan, dari angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 28,49 persen turun menjadi 15,32 persen di tahun 2024. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pemenuhan layanan KB, didorong oleh peningkatan edukasi, distribusi alat kontrasepsi, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan ke masyarakat.

Tabel II-112
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
TFR (Angka Kelahiran Total)	2,31	2,30	2,13	2,19	0,75
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	74,97	78,62	56,29	65,15	65,21
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	15,68	10,78	28,49	15,34	15,32
Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-16		67,18	23,5	45,7	45,7
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)					

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.15 Urusan Perhubungan

Indikator **rasio konektivitas kabupaten/kota** menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, konektivitas berada pada angka 46,83 dan meningkat tajam menjadi 94 di tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memperbaiki keterhubungan jaringan transportasi antarkawasan, baik melalui pembangunan jalan penghubung, penataan terminal, maupun integrasi layanan angkutan umum. Mulai tahun 2022 hingga 2024, nilai konektivitas konsisten mencapai angka maksimal 100, yang menunjukkan bahwa seluruh wilayah telah terhubung secara fungsional dan mendukung mobilitas penduduk maupun distribusi logistik secara efisien.

Sementara itu, kinerja lalu lintas kabupaten/kota menunjukkan capaian yang masih fluktuatif. Di tahun 2020, kinerja berada pada level sangat rendah yaitu 0,20. Capaian ini melonjak drastis di tahun 2021 menjadi 0,94 yang

diperkirakan merupakan hasil dari peningkatan pelayanan lalu lintas, seperti pemasangan fasilitas keselamatan jalan, peningkatan pengawasan lalu lintas, serta penertiban kawasan rawan kemacetan. Namun peningkatan ini tidak berkelanjutan, karena kembali menurun di tahun 2022 dan 2023 pada angka 0,24, serta sedikit menurun lagi di tahun 2024 menjadi 0,19. Penurunan ini menandakan masih lemahnya efektivitas pengendalian lalu lintas, minimnya inovasi manajemen transportasi perkotaan, dan kurangnya kapasitas infrastruktur penunjang keselamatan jalan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun pernah mengalami peningkatan yang sangat baik, kinerja lalu lintas di Kabupaten Bulukumba belum stabil dan memerlukan perhatian serius untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien.

Tabel II-113
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas kabupaten/kota	46,83	94	100,00	100,00	100,00
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,20	0,94	0,24	0,24	0,19

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Data Perangkat daerah yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan kinerja yang sangat bagus dimana rata rata capian di empat tahun terakhir semua mencapai 100 persen, hal ini menjadi pertimbangan dari dinas Kominfo bahwa di era Digital sekarang ini akses internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan utamanya untuk Perangkat Daerah.

Untuk Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi rata rata capaian 100 persen dalam lima tahun terakhir, capaian tersebut menunjukkan bahwa semua layanan yang ada di Dinas Kominfo sudah terintegrasi dan dapat diakses secara umum.

Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran informasi menunjukkan tren yang sangat baik dimana pada capaian awal Tahun 2020 masih 67,89 persen namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,35 persen hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk mengakses informasi melalui media sosial dan media online lainnya sangat bagus, dimana media sosial sangat banyak memiliki manfaat, walaupun disisi lain terdapat juga sisi buruknya. Fungsi mendia sosial untuk berinteraksi semakin besar terutama karena kemudahan fasilitas dalam penyebaran informasi Juga karena informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan terbuka di media sosial.

Tabel II-114
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	52,17	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	67,89	71,35	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.17 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tren capaian koperasi berkualitas mengalami dinamika fluktuatif dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih adanya koperasi yang tidak aktif, rendahnya kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi, serta keterbatasan pelaksanaan RAT, volume usaha, dan aset. Salah satu penyebab utama menurunnya capaian kinerja adalah pembubaran 42 koperasi tidak aktif melalui SK Kementerian Koperasi RI, yang berdampak langsung terhadap penurunan volume usaha koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Bulukumba. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi penguatan kelembagaan yang lebih terarah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi yang sehat dan berdaya saing.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) di Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam Renstra dan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan, meliputi berbagai aspek kelembagaan, kapasitas pengelola, dan infrastruktur penunjang. Para pengelola KUMKM dinilai belum profesional dan akuntabel dalam mengelola kelembagaan serta usaha, dan masih memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi, maupun pemasaran. Selain itu, kelembagaan dan infrastruktur yang mendukung kegiatan koperasi dan UMKM, terutama pada aspek pembiayaan dan pemasaran, belum optimal. Rendahnya kemampuan inovasi pengelola, baik laki-laki maupun perempuan, dalam pengembangan produk turut menjadi hambatan tersendiri. Permasalahan kelembagaan koperasi juga masih signifikan, seperti rendahnya jumlah koperasi yang melakukan RAT tepat waktu, memperoleh sertifikat NIK, berstatus sehat, serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif dan minimnya koperasi berprestasi.

Tabel II-115
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	70,00	9,69	63,78	40,20	20,30
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	64,39	85,90	72,96	100,00	16,06

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.18 Urusan Penanaman Modal

Perubahan persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi OSS dan tingkat kompetensi pelaku usaha dalam memahami serta mengisi item-item pelaporan LKPM secara tepat dan lengkap.

Tabel II-116
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	71,79	-79,18	8,33	1,48	118,22

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bulukumba selama periode lima tahun menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan respons terhadap tantangan dan upaya penguatan kapasitas generasi muda dan sektor olahraga daerah.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami lonjakan tajam dari 0,27 di tahun 2020 menjadi 705,49 pada tahun 2021, menunjukkan keberhasilan program awal pengembangan kewirausahaan pemuda. Namun, tren ini tidak stabil karena mengalami penurunan kembali ke 1,77 (2022), 4,98 (2023), dan 3,33 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan perlunya konsistensi program inkubasi usaha pemuda serta penguatan sistem pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil pemuda. Jumlah pemuda yang berwirausaha tahun 2024 sebanyak 3.689 pemuda dengan jenis usaha antara lain kuliner, pertukangan, perdagangan, jasa, perbengkelan, dll.

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan memperlihatkan capaian yang relatif stabil hingga tahun 2023, dengan nilai tertinggi 77,08 pada tahun 2022. Namun, terdapat penurunan drastis di tahun 2024 menjadi 18,74, yang dapat diindikasikan sebagai dampak dari minimnya fasilitasi organisasi, berkurangnya ruang publik bagi pemuda, atau menurunnya minat generasi muda dalam kegiatan kolektif berbasis komunitas. Jumlah pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan tahun 2024 sebesar 20.773 pemuda.

Peningkatan prestasi olahraga mengalami tren peningkatan positif, dimulai dari 6 capaian di tahun 2020 dan mencapai 21 capaian di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pembinaan olahraga dan dukungan terhadap atlet telah menunjukkan hasil nyata. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 (3 capaian), tren pemulihan yang cepat menunjukkan adanya ketepatan dalam intervensi program keolahragaan.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bulukumba telah menyelenggarakan event kepemudaan tahun 2023-2024 antara lain *Overland, Trail Adventure*, *Tournament Bulu Tangkis Open Sulsel* dan *Bulukumba Run*. Selain itu, telah diselenggarakan pelatihan kepemudaan antara lain perkemahan ilmiah remaja, paskibraka, lelang karya pemuda, pentas seni, *public speaking* bagi pemuda, sosialisasi narkoba, pelatihan kewirausahaan,

temu karya pemuda, FGD kepemudaan dan pemuda pelopor. Tahun 2024 jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 467 pemuda.

Tabel II-117
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,27	0,70	1,77	4,98	3,33
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	70,82	75,84	77,08	71,18	18,74
Peningkatan prestasi olahraga	6,00	10,00	3,00	14,00	21,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.20 Urusan Statistik

Capaian Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 100 persen, ini menandakan seluruh perangkat daerah menggunakan data statistik yang sahih, terukur, dan dapat diverifikasi untuk mengevaluasi kinerja program/kegiatan pembangunan di wilayahnya. Evaluasi ini mencakup hasil, manfaat, dan dampak pembangunan yang telah dilaksanakan. Selaras dengan Prinsip Satu Data Indonesia, evaluasi pembangunan berbasis data statistik mendukung integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor dan daerah yang menjadi tujuan dari Satu Data Indonesia.

Tabel II-118
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.21 Urusan Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah, kemampuan dan upaya pemerintah dalam melindungi data dan informasi digital yang dimilikinya semakin membaik setiap tahunnya. Pemerintah makin baik dalam menjaga informasi penting agar tidak bocor, tidak rusak, dan tetap tersedia saat dibutuhkan.

Tabel II-119
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah	27,60	27,60	27,60	27,60	50,85

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.22 Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja pada urusan Kebudayaan berhasil dicapai dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan pendataan dan pelestarian cagar budaya serta pelaksanaan sidang penetapan cagar budaya yang diprakarsai oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba.

Demikian halnya dengan penyelenggaraan festival, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kegiatan budaya yang semakin besar. Kegiatan-kegiatan festival diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan hari jadi Bulukumba, rangkaian kegiatan Festival Pinisi dan kegiatan festival yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

Tabel II-120
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.23 Urusan Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan budaya literasi masyarakat. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) mulai tercatat pada tahun 2022 dengan capaian 51,77, namun tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan tetap stagnan pada angka yang sama. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kegiatan membaca dalam seminggu, baik bahan bacaan tercetak, elektronik melalui perangkat seperti handphone atau laptop, maupun bahan bacaan audiovisual seperti siaran radio atau podcast. Selain itu, turunnya jumlah bahan bacaan yang dibaca dalam kurun waktu tiga bulan, serta menurunnya frekuensi dan durasi akses internet untuk membaca atau mencari informasi juga turut memengaruhi capaian tersebut.

Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai TGM menjadi 69,62 yang menunjukkan adanya kemajuan dalam kebiasaan membaca masyarakat. Peningkatan ini tidak lepas dari membaiknya frekuensi dan durasi membaca, baik dalam bentuk cetak maupun digital, meningkatnya jumlah bahan bacaan yang diakses, serta meningkatnya frekuensi dan durasi penggunaan internet untuk mengakses informasi yang bersifat edukatif. Capaian ini menjadi indikasi bahwa budaya membaca di Kabupaten Bulukumba mulai tumbuh kembali dan merespons berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong minat baca masyarakat. Untuk mempertahankan tren positif ini, diperlukan berbagai upaya strategis, seperti penyusunan program jam belajar masyarakat, pembentukan komunitas literasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, promosi buku secara rutin, peningkatan

kualitas dan kuantitas layanan baca di tempat, pembaharuan fasilitas perpustakaan umum dan daerah, serta pengembangan layanan digital perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jika pada tahun 2020 dan 2021 belum terlihat perkembangan berarti, pada tahun 2022 IPLM melonjak ke angka 78,82 dan terus meningkat menjadi 86,73 pada 2023 serta 88,32 pada 2024. Kemajuan ini didorong oleh bertambahnya jumlah perpustakaan yang tersedia di masyarakat, meningkatnya jumlah koleksi bahan bacaan yang lebih beragam dan sesuai minat, bertambahnya jumlah tenaga perpustakaan yang kompeten, serta semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan literasi dan sosialisasi perpustakaan. Selain itu, jumlah perpustakaan yang telah dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan juga terus meningkat, mencerminkan upaya penguatan kelembagaan dan sistem perpustakaan yang berkelanjutan.

Untuk mempertahankan dan memperkuat pencapaian ini, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang mewajibkan pengadaan perpustakaan di setiap kecamatan, desa, kelurahan, dan institusi daerah, serta melakukan pendataan menyeluruh melalui aplikasi resmi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dukungan anggaran juga sangat penting untuk pengembangan koleksi yang sesuai kebutuhan masyarakat, perbaikan serta penambahan fasilitas perpustakaan yang inklusif, nyaman, dan ramah terhadap semua kalangan. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba berada pada jalur yang tepat dalam membangun budaya literasi yang kuat, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan dari sisi infrastruktur, kebijakan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Tabel II-121
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0,00	0,00	51,77	51,71	69,62
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	5,64	78,82	86,73	88,32

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.24 Urusan Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama dalam hal pengelolaan dan penyediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2020, belum terdapat data terkait ketersediaan arsip, dan baru pada tahun 2021 mulai tercatat dengan nilai 48,48. Peningkatan tajam terlihat pada tahun 2022 hingga mencapai angka 471,50, serta 75,00 pada tahun 2023. Namun demikian, capaian nilai yang tinggi pada tahun 2022 dan 2023 tersebut sebenarnya belum mencerminkan kondisi pengelolaan arsip yang substansial karena data yang digunakan masih berupa data mentah yang belum disusun dalam bentuk daftar arsip yang sistematis. Tanpa adanya daftar arsip, verifikasi atas keberadaan dan

pengelolaan arsip menjadi sulit dilakukan, sehingga fungsi arsip sebagai alat bukti sah dan bahan akuntabilitas kinerja belum dapat dijalankan secara optimal.

Setelah mengikuti sosialisasi dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif pada tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mulai menerapkan rumus penghitungan tingkat ketersediaan arsip secara tepat. Penerapan rumus ini membuat proses pengukuran menjadi lebih objektif dan terukur, sehingga capaian nilai 9,98 pada tahun 2024 lebih mencerminkan kondisi riil dari pengelolaan arsip yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam metode pengukuran dan pengelolaan arsip, meskipun hasilnya belum maksimal. Perubahan ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip sebagai alat pertanggungjawaban kinerja yang sah dan terpercaya.

Sementara itu, dalam aspek tingkat keberadaan dan keutuhan arsip, capaian nilai pada tahun 2022 dan 2023 tercatat cukup tinggi, yakni masing-masing sebesar 571,80 dan 571,83. Namun, serupa dengan indikator sebelumnya, nilai tersebut diperoleh berdasarkan data mentah yang belum diolah atau disusun dalam daftar arsip yang sahih. Pada tahun 2024, nilai indikator ini justru menurun drastis menjadi 1,00 karena belum dilakukan kegiatan pemusnahan arsip. Sesuai dengan ketentuan sistem penilaian kinerja pengelolaan arsip, jika belum ada kegiatan pemusnahan arsip, maka instansi dapat tetap diberikan nilai 1 (satu) apabila disertai dengan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam proses penilaian dan menjaga keakuratan pelaporan kinerja kearsipan.

Tabel II-122
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0,00	48,48	471,50	75,00	9,98
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	571,80	571,83	1,00

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.25 Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Bulukumba menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020, total produksi perikanan tercatat sebesar 252.415,70 ton. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan produksi dengan capaian sebesar 251.463,10 ton, yang merupakan nilai terendah selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika tahunan sektor perikanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan eksternal. Penurunan produksi Tahun 2022 ada pada Produksi sub sektor perikanan budidaya yang mengalami penurunan drastis menjadi 195.940,5 ton (turun sekitar 8 persen), yang diduga karena kondisi cuaca ekstrem dan penurunan kualitas lingkungan sehingga diperlukan optimalisasi budidaya laut: fokus pada peningkatan teknologi dan revitalisasi tambak yang memerlukan evaluasi penurunan kualitas lingkungan budidaya seperti kualitas air dan penyakit ikan.

Selanjutnya, pada tahun 2023, produksi perikanan kembali meningkat secara signifikan sebesar 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total produksi sebesar 270.411,00 ton. Peningkatan ini dilanjutkan pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 4,1 persen, menjadikan jumlah total produksi mencapai 281.453,50 ton, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi tahunan, tren lima tahunan ini menunjukkan arah positif dalam pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Bulukumba. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam mendorong peningkatan produksi, baik dari subsektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Tabel II-123
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	252.415,70	266.771,40	251.463,10	270.410,97	281.453,50

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.26 Urusan Pariwisata

Kinerja urusan pariwisata selama lima tahun terakhir diwarnai oleh fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi global (pandemi COVID-19) dan dinamika lokal. Pertumbuhan wisatawan mancanegara mengalami kontraksi pada 2020 dan 2021 masing-masing sebesar -0,87 dan -0,80, mencerminkan dampak langsung dari pembatasan perjalanan internasional. Namun, pemulihan mulai tampak pada 2022 (12,05 persen) dan tetap positif di 2023 (1,93 persen) serta 2024 (0,31 persen), meskipun dalam angka yang kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi promosi internasional dan diversifikasi pasar wisatawan.

Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sempat mencapai puncak pada 2022 (0,80) namun kembali menurun drastis ke angka -0,20 di 2023. Tahun 2024 menunjukkan sedikit pemulihan (0,03). Perlu adanya peningkatan program promosi domestik serta event wisata yang mampu menarik kunjungan dari dalam negeri.

Tingkat hunian akomodasi mencerminkan dinamika yang tajam, dari angka tinggi pada 2022 (100 persen) turun signifikan menjadi 46,17 persen di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan tidak selalu berbanding lurus dengan lama tinggal, sehingga perlu perbaikan dalam kualitas layanan dan diversifikasi aktivitas wisata. Tingkat hunian akomodasi mengalami lonjakan setiap penyelenggaraan Festival Pinisi sebagai agenda pariwisata tahunan Kabupaten Bulukumba. Pada bulan Agustus 2023 seiring dengan penyelenggaraan acara nasional "Pembagian 10 Juta Bendera" yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, para gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, turut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat hunian hotel dan penginapan di wilayah tersebut.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami peningkatan secara perlahan dari 0,73 persen tahun 2020 menjadi 0,83 persen tahun 2024, sementara kontribusi terhadap PAD juga menunjukkan penurunan dari 4,31 tahun 2022 menjadi 3,30 tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun aktivitas wisata meningkat secara kuantitatif, dampak ekonominya belum optimal karena rendahnya belanja wisatawan dan belum efektifnya pemungutan retribusi daerah berbasis wisata.

Tabel II-124
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-0,87	-0,80	12,05	1,93	0,31
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	0,07	0,21	0,80	-0,20	0,03
Tingkat hunian akomodasi	69,14	92,95	100,00	48,11	46,17
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,73	0,72	0,80	0,81	0,83
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,23	3,90	4,31	3,20	3,30

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, 2025

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba telah menyelenggarakan berbagai event pariwisata dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat citra destinasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2020, terdapat empat kegiatan yang diselenggarakan, yaitu Festival Pinisi 2020, Pementasan Seni 2 2020, Gowes Hutan Karet IV 2020, dan Ritual Songkabala Ri Bantilang 2020. Kecamatan Bonto Bahari menjadi lokasi untuk Festival Pinisi 2020, Pementasan Seni 2 2020, dan Ritual Songkabala Ri Bantilang 2020, sementara Gowes Hutan Karet IV 2020 dilaksanakan di Kecamatan Bulukumpa. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan jumlah event dengan lima kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Festival Pinisi XII 2022, Jelajah Hutan Karet IV 2022, Bira Run IV 2022, Tour De Bira, dan Tourism Trail Adventure III 2022. Sebagian besar event, seperti Festival Pinisi XII 2022, Bira Run IV 2022, dan Tour De Bira, berlokasi di Kecamatan Bonto Bahari, sedangkan Jelajah Hutan Karet IV 2022 dan Tourism Trail Adventure III 2022 diadakan di Kecamatan Bulukumpa. Pada tahun 2023, ada empat event yang dilaksanakan. Event-event tersebut adalah Festival Pinisi XIII 2023, Festival Mancing, Tanjung Bira Prix, dan Pentas Musik Akhir Tahun. Kesemua event ini diselenggarakan di Kecamatan Bonto Bahari. Di tahun 2024, tercatat dua event pariwisata, yaitu Festival Pinisi XIV 2024 dan Pentas Musik Akhir Tahun, keduanya berlokasi di Kecamatan Bonto Bahari.

Selain penyelenggaraan event pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba telah menyelenggarakan berbagai pelatihan kepariwisataan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan total 935 peserta. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan 3 (tiga) pelatihan dengan masing-masing 40 peserta. Pelatihan tersebut meliputi Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kecamatan Ujung Bulu, dan Pelatihan Manajemen Homestay di Kecamatan Bonto Bahari. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah pelatihan terbanyak, yaitu 7 (tujuh) pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata di Kecamatan Bonto Bahari, dan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Kecamatan Ujung Bulu. Selain itu, ada juga Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Pemandu Wisata Outbond di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kecamatan Ujung Bulu, serta Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi di Kecamatan Ujung Bulu. Di tahun 2022, dilaksanakan lima pelatihan. Ini termasuk Pelatihan Pengelolaan Homestay di Kecamatan Ujung Bulu, Pelatihan Pemandu Wisata Trekking di Kecamatan Kindang, Pelatihan Pemandu Ekowisata di Kecamatan Ujung Bulu, Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kecamatan Ujung Bulu, dan Pelatihan Vlog di Kecamatan Ujung Bulu. Pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran di Kecamatan Ujung Bulu, dan Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner di Kecamatan Ujung Bulu. Ada juga Pelatihan Pemandu Wisata Selam di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Pemandu Wisata Trekking di Kecamatan Ujung Bulu, Pelatihan Pemandu Wisata Caving/Susur Goa di Kecamatan Ujung Bulu, Pelatihan Pemandu Wisata Outbond di Kecamatan Bonto Bahari, Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata di Kecamatan Ujung Bulu, dan Pelatihan Pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kecamatan Ujung Bulu.

Tak hanya itu, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapastitas SDM bidang pengembangan destinasi pariwisata antara lain Pelatihan Tata Kelola Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata dan Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah tahun 2023. Tahun 2025 terdapat 2 (dua) pelatihan yaitu Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Kepariwisataan dan Bimbingan Teknik Pedoman Pengawasan Standar Usaha Berbasis Risiko.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas destinasi guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memiliki 10 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yaitu: 1) Kelompok Sadar Wisata Kahayya Hills, yang berlokasi di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang; 2) Kelompok Sadar Wisata Adat Ammatoa Kajang di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang; 3) Kelompok Sadar Wisata Ara Bersinar di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari; 4) Kelompok Sadar Wisata Lembah Palambarae di Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang; 5) Kelompok Sadar Wisata Pesona HKM Buhung Lali di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang; 6) Kelompok Sadar Wisata Mangrove Luppung di Desa Manyampa, Kecamatan Ujungloe; 7) Kelompok Sadar Wisata Meraki di Desa Bialo, Kecamatan Gantarang; 8) Kelompok Sadar Wisata Water Spring of Benjala di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari; 9) Kelompok Sadar Wisata Sadar Wisata Ada' Puang di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang; dan 10) Kelompok Sadar Wisata Kr. Sapahatu di Desa Tritiro, Kecamatan Bonto Bahari.

2.1.2.5.27 Urusan Pertanian

Produktivitas pertanian Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh perbaikan teknologi pertanian, pemberian bibit unggul, peningkatan infrastruktur irigasi, serta program penyuluhan kepada petani. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan alat pertanian modern juga berperan dalam peningkatan ini. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, pemerintah perlu memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian terbaru, meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi petani, serta memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk serta sarana produksi lainnya secara tepat waktu dan merata.

Berdasarkan data persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren fluktiatif. Tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular sebesar 2.895 kasus dari 1.310 kasus pada tahun 2021. Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 2.183 kasus karena terdapat vaksinasi yang dilakukan secara masif di seluruh kecamatan dengan sumber anggaran APBN. Kemudian tahun 2024 kembali meningkat sebanyak 2.674 kasus karena penyakit PMK bersifat endemis sehingga sewaktu-waktu bisa muncul kembali sementara vaksinasi hanya dilakukan satu kali pada tahun tersebut.

Tabel II-125
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,3	6,17	6,74	6,86	6,76
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-15,44	-14,99	120,99	-24,59	22,49

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.28 Urusan Perdagangan

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, menjadi indikator penting dalam pengukuran kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan usaha yang berlaku. Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan tahun 2021 sebanyak 51 pelaku usaha dan sampai tahun 2024 sebanyak 54 pelaku usaha dari 60 pelaku usaha. Jumlah Sementara itu, persentase kinerja realisasi pupuk pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian harga pupuk, sedangkan data realisasi diperoleh dari Dinas Pertanian. Terdapat 6 (enam) jenis penyaluran pupuk yang telah dilakukan antara lain Pupuk Urea, Pupuk ZA, Pupuk SP-36, Pupuk NPK, Pupuk NPK FK, dan Pupuk Organik. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh daya beli petani yang sangat bergantung pada modal yang tersedia, meskipun harga pupuk selama lima tahun terakhir relatif stabil.

Di sisi lain, persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang memiliki tanda tera sah mengalami peningkatan setiap tahun. Jumlah UTTP bertanda tera sah tahun 2021 sebesar 389 unit dari 4.500 unit unit potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang, 2022 sebesar 407 unit dari 4.516 unit unit potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang, 2023 sebesar 450 unit dari 4.516 unit unit potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang dan tahun 2024 sebesar 808 unit dari 2.704 unit potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dihapuskannya biaya retribusi tera yang mendorong antusiasme pelaku usaha untuk melakukan tera ulang, serta adanya inisiatif dari tim pelaksana untuk memberikan pelayanan secara langsung melalui sistem *door to door*. Selain itu, pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat turut meningkatkan kebutuhan terhadap alat UTTP, dan kegiatan pengawasan yang intensif oleh pemerintah telah mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan demi menghindari sanksi.

Tabel II-126
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00	100,00	100,00	98,08	90,00
Persentase kinerja realisasi pupuk	99,13	78,89	87,72	64,19	91,99
Persentase alat; alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1,10	8,64	9,01	9,96	29,88

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.29 Urusan Perindustrian

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Bulukumba dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, dengan realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar -37,55 persen. Penurunan ini terlihat dari jumlah industri baru yang mendaftar melalui sistem OSS, yaitu sebanyak 1.171 pada tahun 2024, menurun signifikan dibandingkan dengan 1.875 pada tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat deflasi, sehingga minat untuk memulai usaha juga menurun; rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam melakukan proses produksi, inovasi, dan peningkatan mutu produk; keterbatasan modal usaha yang dimiliki pelaku industri; serta belum optimalnya sarana promosi dan pemasaran produk yang tersedia.

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, termasuk indikator turunan yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), dihitung dari jumlah industri unggulan dalam RIPIN yang telah direalisasikan di Kabupaten Bulukumba dibagi dengan total industri prioritas dalam RIPIN, dikalikan 100 persen. Dari 10 industri prioritas nasional, Kabupaten Bulukumba telah merealisasikan 5 di antaranya selama lima tahun terakhir. Industri tersebut meliputi: 1) Industri Pangan, dengan jumlah industri terdaftar pada tahun 2024; 2) Industri Tekstil dan Aneka; 3) Industri Alat Transportasi; 4) Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri; dan 5) Industri Logam Dasar serta Bahan Galian Bukan Logam. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK tahun 2020 belum ada karna Perda RPIK Kab. Bulukumba ditetapkan pada tahun 2021.

Adapun terkait pengawasan dan pemantauan terhadap kepemilikan Izin Usaha Industri (IUI) oleh industri kecil dan menengah, hingga tahun 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba hanya menemukan tiga industri yang telah memiliki IUI yang terdaftar pada sistem SIINAS. Dari total 61 industri yang diawasi pada tahun 2024, hanya tiga yang memiliki izin resmi, sehingga upaya peningkatan pengawasan dan fasilitasi pengurusan izin masih perlu dimaksimalkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan regulasi dan mendorong legalitas usaha di sektor industri.

Sementara itu, untuk Izin Perluasan Industri (IPUI) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) maupun Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), hingga tahun 2024 belum terdapat satupun yang diterbitkan di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, pemantauan dan pengawasan terhadap perizinan tersebut belum dapat dilakukan, dan instansi terkait hanya melampirkan surat keterangan tidak memiliki data. Selain itu, ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini masih sangat terbatas, di mana hanya terdapat satu sistem informasi industri yang digunakan, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), yang menjadi sumber utama dalam pencatatan dan pelaporan data industri di daerah.

Tabel II-127
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	NA	25,64	1.391,84	156,50	-37,65
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50	14,08	22,31	22,47	22,77
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100,00	0	0	100,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	0	0	0	0
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5	11	54	61

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.30 Unsur Perencanaan dan Keuangan

Selama periode 2020–2024, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah terlihat dari dinamika belanja pegawai non-guru dan non-tenaga kesehatan yang mencerminkan prioritas kebijakan fiskal pemerintah daerah. Fluktuasi rasio belanja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pergeseran prioritas ke sektor lain, efisiensi anggaran, perubahan struktur pegawai, serta variabel eksternal seperti perubahan realisasi transfer ke daerah. Sementara itu, penurunan signifikan dalam rasio belanja urusan pemerintahan daerah pada tahun 2024—sebesar 14,34 persen—disebabkan oleh pelaksanaan pilkada

serentak dan kewajiban pemenuhan mandatory spending, yang menggeser alokasi belanja dari urusan pemerintahan ke keperluan lainnya.

Di sisi lain, indikator opini laporan keuangan dari BPK menunjukkan perbaikan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 2021 hingga 2024 setelah sebelumnya hanya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2020. Perbaikan ini turut mendorong efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, tercermin dari penurunan deviasi antara anggaran dan realisasi belanja. Tahun 2024 menunjukkan kinerja terbaik dengan deviasi hanya 1,99 persen, menandakan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sebaliknya, deviasi yang tinggi pada 2023 (45,97 persen) mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran dan dampak regulasi yang menyebabkan banyak kegiatan tidak terealisasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja APBD mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan membandingkan sisa anggaran (SiLPA) terhadap total belanja tahun sebelumnya. Rasio yang rendah mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan rasio tinggi menunjukkan anggaran tidak terserap dengan baik. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), penurunan rasio SILPA paling signifikan terjadi pada tahun 2020 (1,86 persen) akibat fokus belanja pada penanggulangan pandemi COVID-19, serta tahun 2024 (1,05 persen) karena peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, pemanfaatan sistem informasi keuangan, dan pergeseran kebijakan ke arah pembangunan infrastruktur serta layanan publik. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara lebih tepat sasaran dan terencana. Keseluruhan data mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal dan manajerial pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel II-128
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,68	9,38	10,86	8,30	8,84
Rasio PAD	11,39	11,19	12,31	12,49	13,38
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	2	3
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	60,69	55,87	51,53	63,74	14,34
Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba 2025

2.1.2.5.31 Unsur Pengadaan

Capaian persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan angka yang sangat rendah selama periode 2020–2024, dengan nilai tertinggi hanya sebesar 0,14 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mampu menyelesaikan hampir seluruh kontrak konstruksi dalam tahun anggaran berjalan. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh mekanisme penyusunan surat pernyataan untuk proyek yang tidak memiliki waktu cukup dalam tiga kuartal, yang mulai mendapatkan poin penilaian sejak tahun 2022. Jumlah total paket pengadaan juga mengalami peningkatan signifikan dari 820 pada tahun 2021 menjadi 1896 pada tahun 2024, mencerminkan meningkatnya aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 5,17 persen di tahun 2020 menjadi 69,94 persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, sejalan dengan semakin banyaknya paket pengadaan yang menggunakan mekanisme yang terbuka. Sementara itu, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi di tahun 2020 sebesar 87,61 persen, dan terendah pada tahun 2021 sebesar 15,76 persen. Fluktuasi ini erat kaitannya dengan besarnya nilai anggaran belanja operasi dan modal yang tersedia setiap tahun, serta prioritas belanja pada program dan kegiatan masing-masing OPD di Kabupaten Bulukumba.

Tabel II-129
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	0,00	0,14	0,09	0,05
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	5,17	10,36	98,87	55,07	69,94
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	87,61	15,76	32,88	28,80	32,46
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0,00	6,92	2,94	2,54	13,00

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.32 Unsur Kepegawaian

Berdasarkan data tahun 2020–2024, capaian rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami tren penurunan signifikan menjadi 72,54 persen pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan daerah yang membatasi ASN dalam melakukan penyesuaian ijazah bagi ASN yang telah melanjutkan jenjang Pendidikan namun tidak memiliki Ijin Belajar yang sah serta adanya kebijakan Moratorium Penerimaan CPNS yang sempat diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Rasio pegawai fungsional juga menunjukkan penurunan drastis dari 25,72 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 16,52 persen di tahun 2024, yang disebabkan oleh pengalihan kewenangan jabatan fungsional dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi dan pusat. Sementara itu, rasio pegawai pada jabatan fungsional bersertifikat kompetensi bersifat fluktuatif, dengan capaian tertinggi pada 2023 sebesar 25,95 persen, yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan seleksi kenaikan jenjang jabatan fungsional yang berlaku setiap tahunnya.

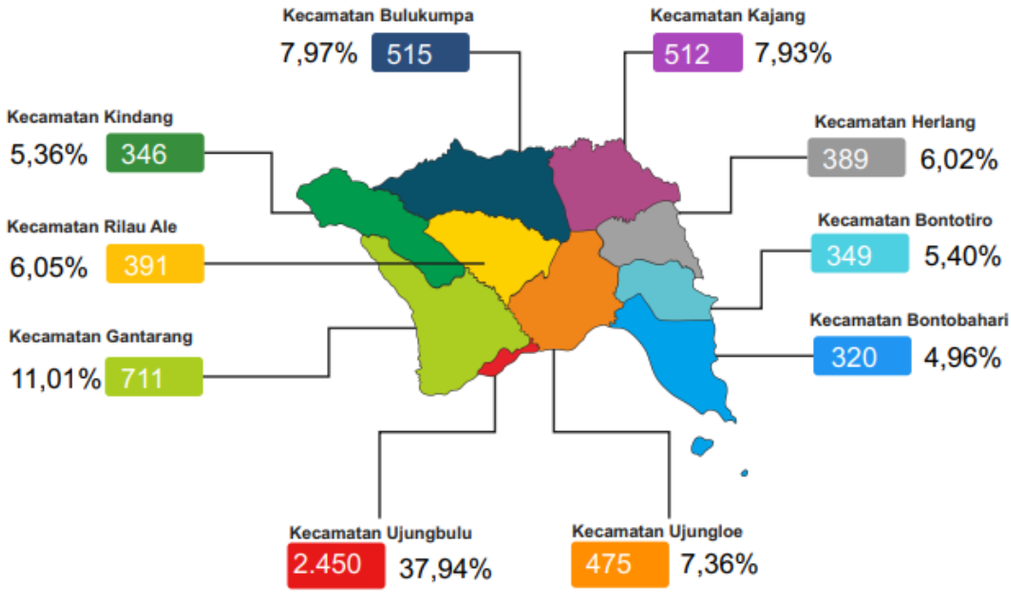
Tabel II-130
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian Kabupaten Bulukumba
Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah /Dasar (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	74,14	78,84	76,74	76,26	72,54
Rasio pegawai Fungsional (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,72	31,18	22,05	22,98	16,52
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,06	16,62	24,00	25,95	22,83

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba, 2025

Pemerataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap kecamatan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan merata.

Gambar II-19
Peta Sebaran ASN Kabupaten Bulukumba Per Juni 2025



Sumber: BKPSDM Kabupaten Bulukumba, 2025

Sebaran ASN di Kabupaten Bulukumba per Juni 2025 menunjukkan ketimpangan distribusi yang signifikan, di mana Kecamatan Ujung Bulu mencatat jumlah ASN tertinggi sebesar 2.450 orang atau 37,94 persen dari total keseluruhan, sementara Kecamatan Bonto Bahari memiliki jumlah ASN terendah yakni hanya 320 orang atau 4,96 persen. Jumlah ASN yang tinggi di Kecamatan Ujung Bulu disebabkan oleh perannya sebagai ibu kota Kabupaten Bulukumba, yang menjadi pusat pemerintahan, administrasi, dan berbagai institusi pelayanan publik. Setiap organisasi perangkat daerah menyusun kebutuhan ASN melalui analisis jabatan dan beban kerja untuk memetakan kekurangan atau kelebihan pegawai, yang selanjutnya menjadi dasar penyebaran ASN di OPD dan unit kerja kecamatan guna mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba secara umum mencerminkan kualitas yang baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,78, yang diperoleh dari hasil survei terhadap ASN sebagai penerima layanan kepegawaian. Survei ini dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, spesifikasi jenis produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

2.1.2.5.33 Urusan Manajemen Keuangan

Kinerja penyelenggaraan urusan manajemen keuangan Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi pada beberapa

indikator utama. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, deviasi realisasi belanja daerah menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, deviasi tercatat sebesar 8,49%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 9,96%. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana deviasi mencapai 14,88%. Salah satu penyebab tingginya deviasi pada tahun 2022 karena tidak terdapat APBD Perubahan sehingga tidak dilakukan penyesuaian pos-pos belanja. Salah satu pos penyumbang deviasi tertinggi adalah belanja modal dimana terdapat penganggaran pembangunan pasar sentral yang tidak terealisasi. Namun demikian, mulai tahun 2023, deviasi belanja mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,22%, dan sedikit meningkat menjadi 7,11% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, serta semakin efektifnya koordinasi antara perencana program dan pelaksana kegiatan.

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD juga mengalami fluktuasi, dengan deviasi tertinggi sebesar 25,78 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 13,79 persen pada tahun 2024.

Untuk manajemen aset, kinerja menunjukkan konsistensi dengan skor 4,00 setiap tahunnya dimana rasio manajemen aset ini terdiri dari daftar aset tetap, manual penyusunan daftar aset tetap, inventarisasi aset tahunan dan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga pencatatan aset akurat.

Sementara itu, rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan dari 6,58 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 1,05 persen pada tahun 2024.

Tabel II-131
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Manajemen Keuangan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,49	9,96	14,88	6,22	7,11
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0	24,55	25,78	21,61	13,79
Manajemen Aset	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,86	4,16	6.58	5,64	1,05

Sumber : Badan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.1.2.5.34 Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

Kinerja penyelenggaraan urusan transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Bulukumba selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup konsisten. Informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk pelayanan sempat mengalami penurunan dari 112,96 pada tahun 2020 menjadi 85,12 pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 93,78 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 92,75 pada tahun 2024. Sementara itu, akses publik terhadap informasi keuangan daerah tercatat stabil dan maksimal di angka 100,00 selama lima tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin transparansi pengelolaan

keuangan daerah serta meningkatkan keterbukaan informasi publik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam penyajian informasi terkait sumber daya pelayanan.

Tabel II-132
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Kabupaten Bulukumba Tahun 2020—2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	112,96	111,06	85,12	93,78	92,75
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba, 2025

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dankeuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

a. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan denganpelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
b. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikatorkinerja yang telah ditetapkan.

2. Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel II-133
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8	7	7	5	7	7	5	5	1	-	2	2
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	2	2	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-
4	PUSKESMAS CAILE	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
5	PUSKESMAS UJUNG LOE	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
6	PUSKESMAS PONRE	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
7	PUSKESMAS BONTO BANGUN	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
8	PUSKESMAS TANETE	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
9	PUSKESMAS BONTO BAHARI	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
10	PUSKESMAS GATTARENG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
11	PUSKESMAS BONTONYELENG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
12	PUSKESMAS BORONG RAPPOA	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
13	PUSKESMAS MANYAMPA	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
14	PUSKESMAS PALANGISANG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
15	PUSKESMAS BALIBO	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
16	PUSKESMAS SALASSAE	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
17	PUSKESMAS LEMBANA	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
18	PUSKESMAS HERLANG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
19	PUSKESMAS BONTO TIRO	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
20	PUSKESMAS KARASSING	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
21	PUSKESMAS BATANG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
22	PUSKESMAS TANAH TOA	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
23	PUSKESMAS KAJANG	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	11	9	9	9	9	9	9	9	2	-	-	2
25	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	7	6	6	7	6	7	6	7	1	-	1	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
27	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
28	Dinas Sosial	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	11	8	8	8	8	8	8	8	3	-	-	3
30	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	5	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	1
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	5	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	9	9	9	9	9	9	9	1	-	-	1
33	Dinas Perhubungan	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
34	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	5	4	4	4	4	4	4	4	1	-	-	1
35	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	4	4	9	9	9	9	9	1	-	-	1
36	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	2

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
37	Dinas Perikanan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
38	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
39	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-	-
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15	8	8	8	8	8	8	8	7	-	-	7
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-
42	Sekertariat Daerah	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
43	Sekertariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
44	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-
45	Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
46	Badan Pendapatan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4				
47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	1
48	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
49	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
50	Kantor Kecamatan Ujung Loe	4	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	1
51	Kantor Kecamatan Bulukumpa	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
52	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
53	Kantor Kecamatan Gantarang	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program Yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja - PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
54	Kantor Kecamatan Kindang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
55	Kantor Kecamatan Herlang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
56	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
57	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
58	Kantor Kecamatan Kajang	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
59	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 214 program (jumlah pada kolom 3), dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2024 berjumlah 186 program (jumlah pada kolom 4).
   b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat 25 program yang tidak sama diantara kedua dokumen tersebut.
2. Kesesuaian program RKPD dan Renja-PD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 186 program (jumlah pada kolom 4), dan jumlah program dalam Renja-PD adalah 186 program (jumlah pada kolom 5).
   b. Antara dokumen RKPD dan Renja-PD tidak terdapat program yang selisih diantara keduanya.
3. Kesesuaian program RKPD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 186 program (jumlahpada kolom 4), sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 190 program (jumlah pada kolom 6).
   b. Antara dokumen RKPD dan APBD terdapat 3 program yang tidak sama diantara keduanya.
4. Kesesuaian program RPJMD dan APBD
   a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 214 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 190 program (kolom 10). Dengan demikian terdapat 27 program yang tidak sesuai antara kedua dokumen (jumlah pada kolom 14).
   b. Seluruh program yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut merupakan program RPJMD yang tidak dianggarkan dalam APBD dan terdapat program pada APBD yang tidak direncanakan pada RPJMD.

Menjadi hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-134
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15	15	15	15	15	15	-	-	-
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	25	25	25	25	25	25	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	3	3	3	3	3	3	-	-	-
4	Puskesmas Caile	1	1	1	1	1	1	-	-	-
5	Puskesmas Ujung Loe	1	1	1	1	1	1	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	Puskesmas Ponre	1	1	1	1	1	1	-	-	-
7	Puskesmas Bonto Bangun	1	1	1	1	1	1	-	-	-
8	Puskesmas Tanete	1	1	1	1	1	1	-	-	-
9	Puskesmas Bonto Bahari	1	1	1	1	1	1	-	-	-
10	Puskesmas Gattareng	1	1	1	1	1	1	-	-	-
11	Puskesmas Bontonyeleng	1	1	1	1	1	1	-	-	-
12	Puskesmas Borong Rappoa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
13	Puskesmas Manyampa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
14	Puskesmas Palangisang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
15	Puskesmas Balibo	1	1	1	1	1	1	-	-	-
16	Puskesmas Salassae	1	1	1	1	1	1	-	-	-
17	Puskesmas Lembana	1	1	1	1	1	1	-	-	-
18	Puskesmas Herlang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
19	Puskesmas Bonto Tiro	1	1	1	1	1	1	-	-	-
20	Puskesmas Karassing	1	1	1	1	1	1	-	-	-
21	Puskesmas Batang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
22	Puskesmas Tanah Toa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
23	Puskesmas Kajang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	15	15	15	15	15	15	-	-	-
25	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	13	13	13	13	13	13	-	-	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	7	7	7	7	-	-	-
27	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
28	Dinas Sosial	13	13	13	13	13	13	-	-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	12	12	12	12	12	12	-	-	-
30	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	10	10	10	10	10	10	-	-	-
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	11	11	10	11	10	10	-	1	1
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20	20	20	20	20	20	-	-	-
33	Dinas Perhubungan	8	8	8	8	8	8	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama			Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
34	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	7	7	7	7	7	7	-	-	-
35	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	8	8	8	8	8	-	-	-
36	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	12	12	12	12	12	12	-	-	-
37	Dinas Perikanan	10	10	10	10	10	10	-	-	-
38	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	14	14	14	14	14	14	-	-	-
39	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	24	24	24	24	24	24	-	-	-
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12	12	12	12	12	12	-	-	-
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	9	9	9	9	9	9	-	-	-
42	Sekertariat Daerah	17	17	17	17	17	17	-	-	-
43	Sekertariat DPRD	14	14	14	14	14	14	-	-	-
44	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	16	16	16	16	16	16	-	-	-
45	Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	13	13	13	13	13	13	-	-	-
46	Badan Pendapatan Daerah	7	7	7	7	7	7			
47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	13	13	13	13	13	-	-	-
48	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	11	-	-	-
49	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	7	7	7	7	7	7	-	-	-
50	Kantor Kecamatan Ujung Loe	8	8	8	8	8	8	-	-	-
51	Kantor Kecamatan Bulukumpa	8	8	8	8	8	8	-	-	-
52	Kantor Kecamatan Rilau Ale	8	8	8	8	8	8	-	-	-
53	Kantor Kecamatan Gantarang	8	8	8	8	8	8	-	-	-
54	Kantor Kecamatan Kindang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
55	Kantor Kecamatan Herlang	6	6	6	6	6	6	-	-	-
56	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	7	7	7	7	7	7	-	-	-
57	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	7	7	7	7	7	7	-	-	-
58	Kantor Kecamatan Kajang	7	7	7	7	7	7	-	-	-
59	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13	13	13	13	13	13	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 454 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 454 (jumlah pada kolom 4). Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 454 kegiatan, sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 8).
   b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100 %.
2. RKPD dan APBD.
   a. Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 454 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 433 (jumlah pada kolom 5). Jumlah kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 453 (jumlah pada kolom 7), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 (jumlah pada kolom10).
   b. Dari 1 kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah kegiatan RKPD yang tidak dianggarkan dalam APBD. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 100%. Ketidaksesuaian kegiatan antara RKPD dan APBD tersebut disebabkan antara lain dukungan anggaran dalam pelaksaan kegiatan yang masih kurang.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2024 sudah mengacu kepada permendagri nomor 90 tahun 2020 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD terhadap Renja Perangkat daerah, RKPD terhadap APBD. Adapun gambaran konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel II-135
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	75	75	75	75	75	75	-	-	-
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	88	88	88	88	88	88	-	-	-
3	RSUD H.A. Sultan Dg. Radja	4	4	4	4	4	4	-	-	-
4	Puskesmas Caile	1	1	1	1	1	1	-	-	-
5	Puskesmas Ujung Loe	1	1	1	1	1	1	-	-	-
6	Puskesmas Ponre	1	1	1	1	1	1	-	-	-
7	Puskesmas Bonto Bangun	1	1	1	1	1	1	-	-	-
8	Puskesmas Tanete	1	1	1	1	1	1	-	-	-
9	Puskesmas Bonto Bahari	1	1	1	1	1	1	-	-	-
10	Puskesmas Gattareng	1	1	1	1	1	1	-	-	-
11	Puskesmas Bontonyeleng	1	1	1	1	1	1	-	-	-
12	Puskesmas Borong Rappoa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
13	Puskesmas Manyampa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
14	Puskesmas Palangisang	1	1	1	1	1	1	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
15	Puskesmas Balibo	1	1	1	1	1	1	-	-	-
16	Puskesmas Salassae	1	1	1	1	1	1	-	-	-
17	Puskesmas Lembana	1	1	1	1	1	1	-	-	-
18	Puskesmas Herlang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
19	Puskesmas Bonto Tiro	1	1	1	1	1	1	-	-	-
20	Puskesmas Karassing	1	1	1	1	1	1	-	-	-
21	Puskesmas Batang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
22	Puskesmas Tanah Toa	1	1	1	1	1	1	-	-	-
23	Puskesmas Kajang	1	1	1	1	1	1	-	-	-
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	39	39	39	39	39	39	-	-	-
25	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kab. Bulukumba	30	30	30	30	30	30	-	-	-
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10	10	10	-	-	-
27	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	18	18	18	18	18	18	-	-	-
28	Dinas Sosial	29	29	30	29	29	29	-	1	1
29	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	20	20	20	20	20	20	-	-	-
30	Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil	29	29	26	29	26	26	-	3	3
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Bulukumba	21	21	21	21	21	21	-	-	-
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	48	48	48	48	48	48	-	-	-
33	Dinas Perhubungan	15	15	16	15	15	15	-	1	1
34	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	15	15	15	15	15	15	-	-	-
35	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	21	21	21	21	21	-	-	-
36	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	25	25	25	25	25	25	-	-	-
37	Dinas Perikanan	19	19	19	19	19	19	-	-	-
38	Dinas Pariwisata,Pemuda Dan Olahraga	23	23	23	23	23	23	-	-	-
39	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	52	52	52	52	52	52	-	-	-
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18	18	18	18	18	18	-	-	-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama			Sub Kegiatan Tidak Sama		
		RKPD	Renja - PD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	15	15	15	15	15	15	-	-	-
42	Sekertariat Daerah	50	50	50	50	50	50	-	-	-
43	Sekertariat DPRD	38	38	38	38	38	38	-	-	-
44	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	43	43	43	43	43	43	-	-	-
45	Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	72	72	72	72	72	72	-	-	-
46	Badan Pendapatan Daerah	36	36	36	36	36	36			
47	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19	19	19	19	19	19	-	-	-
48	Inspektorat Daerah	26	26	26	26	26	26	-	-	-
49	Kantor Kecamatan Ujung Bulu	18	18	18	18	18	18	-	-	-
50	Kantor Kecamatan Ujung Loe	17	17	17	17	17	17	-	-	-
51	Kantor Kecamatan Bulukumpa	19	19	19	19	19	19	-	-	-
52	Kantor Kecamatan Rilau Ale	11	11	11	11	11	11	-	-	-
53	Kantor Kecamatan Gantarang	10	10	10	10	10	10	-	-	-
54	Kantor Kecamatan Kindang	10	10	10	10	10	10	-	-	-
55	Kantor Kecamatan Herlang	11	11	11	11	11	11	-	-	-
56	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	11	11	11	11	11	11	-	-	-
57	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	11	11	11	11	11	11	-	-	-
58	Kantor Kecamatan Kajang	14	14	14	14	14	14	-	-	-
59	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29	29	29	29	29	29	-	-	-

Sumber : Bapperida Kab. Bulukumba, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD dan Renja-PD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.079 (jumlah pada kolom 3) dan Renja-PD adalah sejumlah 1.079 (jumlah pada kolom 4). Jumlah sub kegiatan untuk kedua dokumen konsisten adalah 1.079 (jumlah pada kolom 6), sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah 0 (jumlah pada kolom 9).
   b. Untuk jumlah sub kegiatan Antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai.
   c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan Renja-PD adalah sebesar 100%.
2. RKPD dan APBD.
   a. Sub Kegiatan dalam RKPD adalah sejumlah 1.079 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1.058 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub

kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.078 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 (jumlah pada kolom 10).

b. Dari 1 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran disebabkan perubahan anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

c. Persentase konsistensi kegiatan RKPD dan APBD adalah sebesar 99,99%.

3. Renja-PD dan APBD

a. Sub Kegiatan dalam Renja-PD adalah sejumlah 1.079 (jumlah pada kolom 3) dan APBD adalah sejumlah 1.078 (jumlah pada kolom 5). Jumlah sub kegiatan yang sesuai antara kedua dokumen adalah 1.078 (jumlah pada kolom 7), sedangkan sub kegiatan yang tidak sesuai adalah 1 (jumlah pada kolom 10).

b. Dari 1 sub kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan APBD tersebut adalah sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD mendapatkan untuk alokasi Anggaran.

3. Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2024

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Perubahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-136
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

No	Perangkat daerah	APBD	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	561.871.539.876,00	540.110.978.916,00	96,13
2	Dinas Kesehatan	159.676.376.523,00	147.247.464.891,00	92,22
3	Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan Dg. Raja	143.301.918.252,00	150.226.307.573,04	104,83
4	Puskesmas Caile	3.819.530.540,00	3.332.322.595,00	87,24
5	Puskesmas Ujung Loe	4.038.116.868,00	3.313.006.806,00	82,04
6	Puskesmas Ponre	2.764.613.405,00	2.588.184.776,00	93,62
7	Puskesmas Bonto Bangun	5.014.820.617,00	4.128.392.743,00	82,32
8	Puskesmas Tanete	3.766.326.432,00	3.189.107.894,00	84,67
9	Puskesmas Bonto Bahari	3.970.055.021,00	3.143.683.144,00	79,18
10	Puskesmas Gattareng	2.641.198.951,00	2.193.195.139,80	83,04
11	Puskesmas Bontonyeleng	2.875.678.667,00	2.541.376.296,00	88,37
12	Puskesmas Borong Rappoa	1.935.101.981,00	1.659.198.673,00	85,74
13	Puskesmas Manyampa	783.899.394,00	734.194.050,00	93,66
14	Puskesmas Palangisang	1.880.678.140,00	1.696.390.759,00	90,20
15	Puskesmas Balibo	2.275.188.314,00	1.891.989.373,00	83,16
16	Puskesmas Salassae	2.158.540.852,00	1.533.452.964,00	71,04
17	Puskesmas Lembana	2.289.404.976,00	1.968.608.935,00	85,99
18	Puskesmas Herlang	2.412.084.649,00	2.108.966.170,00	87,43
19	Puskesmas Bonto Tiro	2.727.788.853,00	2.118.541.769,00	77,67
20	Puskesmas Karassing	1.499.978.050,00	1.117.343.274,00	74,49
21	Puskesmas Batang	1.876.959.187,00	1.617.867.949,00	86,20
22	Puskesmas Tanah Toa	1.683.725.774,00	1.373.029.864,00	81,55
23	Puskesmas Kajang	2.685.290.113,00	2.433.985.458,00	90,64
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	168.384.831.820,00	138.146.708.208,00	82,04
25	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33.174.046.294,00	17.689.675.775,46	53,32
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.220.657.808,00	2.154.613.425,00	97,03

No	Perangkat daerah	APBD	Realisasi	%
27	Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.572.330.088,00	11.420.340.590,00	98,69
28	Dinas Sosial	4.834.393.013,00	4.725.579.578,00	97,75
29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.085.053.267,00	12.872.875.590,00	98,38
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.487.130.219,00	4.316.380.643,00	96,19
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.714.079.033,00	5.666.789.603,00	99,17
32	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.095.347.885,00	13.380.698.546,00	94,93
33	Dinas Perhubungan	25.304.160.717,00	25.096.103.198,00	99,18
34	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3.937.290.090,00	3.781.128.702,00	96,03
35	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.428.578.065,00	3.320.569.974,00	96,85
36	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.996.527.795,00	2.714.571.366,00	90,59
37	Dinas Perikanan	40.292.962.770,00	26.921.836.199,00	66,82
38	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	17.193.584.493,00	16.055.664.027,00	93,38
39	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.355.896.232,00	34.078.043.902,00	96,39
40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	62.353.845.565,00	47.126.445.541,00	75,58
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.284.793.533,00	5.084.059.646,00	96,20
42	Sekretariat Daerah	26.630.228.526,00	24.626.976.319,00	92,48
43	Sekretariat DPRD	38.515.241.172,00	37.559.761.221,00	97,52
44	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.411.916.938,00	9.913.950.117,00	95,22
45	Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah	199.439.216.839,70	194.001.188.269,00	97,27
46	Badan Pendapatan Daerah	8.823.153.151,00	7.518.440.845,00	85,21
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.648.717.215,00	5.298.819.996,00	93,81
48	Inspektorat Daerah	11.742.457.729,00	11.101.716.008,00	94,54
49	Kantor Kecamatan Ujungbulu	11.152.159.085,00	10.930.531.070,00	98,01
50	Kantor Kecamatan Ujung Loe	2.700.070.361,00	2.672.261.651,00	98,97
51	Kantor Kecamatan Bulukumpa	4.305.776.656,00	4.268.804.753,00	99,14
52	Kantor Kecamatan Herlang	2.909.304.708,00	2.844.412.331,00	97,77
53	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3.484.036.096,00	3.284.994.508,00	94,29
54	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2.749.916.662,00	2.658.097.678,00	96,66
55	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	5.731.134.563,00	5.578.816.950,00	97,34
56	Kantor Kecamatan Kajang	3.695.735.757,00	3.462.186.016,00	93,68
57	Kantor Kecamatan Gantarang	5.048.109.402,00	4.995.905.034,00	98,97
58	Kantor Kecamatan Kindang	2.341.403.196,00	2.279.102.578,00	97,34
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.038.203.651,00	31.490.644.474,00	98,29
	Jumlah Belanja	**1.749.031.105.829,70**	**1.621.306.284.343,30**	**92,70**

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bulukumba tahun 2024 adalah Rp. 1.749.031.105.829,70,- anggaran tersebut terbagi atas 59 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 sebesar 92,70 persen, Pengukuran capaian target kinerja outcome/output pada program/kegiatan/sub kegiatan yang diakumulasi berdasarkan urusan dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, adapun Skala Nilai Peringkat Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-137
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	ST
2	76% ≤ 90%	TINGGI	T
3	66% ≤ 75%	SEDANG	S
4	51% ≤ 65%	RENDAH	R
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH	SR

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja dari 59 perangkat daerah, hanya ada 1 perangkat daerah yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 14,86% ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan 100%, kategori Tinggi berjumlah 8 Perangkat Daerah dan Kategori sangat tinggi berjumlah 19.

Tabel II-138
Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	100,00	ST	77,42	T
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	100,00	ST	84,83	T
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,30	ST	90,51	T
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,69	T	81,41	T
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	97,11	ST	99,55	ST
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	100,00	ST	98,40	ST
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	100,00	ST	100,00	ST
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44,43	SR	44,14	SR
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	65,89	R	65,66	R

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	89,64	T	61,92	R
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	68,47	S	66,81	S
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,08	T	77,66	T
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	ST	77,76	T
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77,64	T	77,79	T
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	40,55	SR	46,80	SR
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	99,91	ST	90,93	T
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	14,86	SR	18,99	SR
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	57,03	R	57,00	R
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	99,92	ST	99,07	ST
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100,00	ST	99,82	ST
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	0,00	SR	0,00	SR
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	50,14	SR	48,93	SR
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	77,84	T	67,90	S
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100,00	ST	95,96	ST
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	80,65	T	69,10	S
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	65,35	R	69,14	S
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	91,61	ST	96,11	ST
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	100,00	ST	100,00	ST
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	75,00	S	70,61	S
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	44,44	SR	39,14	SR
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
1	Sekretariat Daerah	96,05	ST	91,76	ST
2	Sekretariat DPRD	87,71	T	92,86	ST
Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang					
1	Perencanaan	100,00	ST	95,60	ST
2	Keuangan	75,03	S	74,42	S
3	Kepegawaian	71,06	S	69,51	S

No	Urusan	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
4	Pendidikan dan Pelatihan	98,00	ST	93,89	ST
5	Penelitian dan Pengembangan	100,00	ST	98,21	ST
Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan					
1	Pengawasan	95,71	ST	90,47	T
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan					
1	Kecamatan	78,30	T	81,73	T
	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00	ST	83,93	T
	RKPD Kabupaten Bulukumba	80,14	T	76,14	T

Sumber : Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan tahun 2024 dipengaruhi oleh:

a. Adanya Mutasi Keluar dan masa pensiun pada ASN yang mempengaruhi serapan anggaran gaji di OPD.
b. Adanya pekerjaan fisik yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan (KDP).
c. Beberapa pekerjaan fisik telat selesai 100%, namun keuangan belum terealisasi disebabkan tidak adanya anggaran pada pemerintah daerah, sehingga menjadi utang di tahun berikutnya.
d. Kegiatan tidak terlaksana karena keterbatasan waktu yang bertepatan dengan kegiatan yang lain.
e. Transfer dana bantuan keuangan provinsi yang tidak terealisasi sehingga pekerjaan fisik tidak dibayarkan meskipun sudah 100%.
f. Khusus pada anggaran DAK terdapat kendala pada proses penerbitan SPM sehingga realisasi keuangan rendah

5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPD antara lain adalah:

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1) Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2) Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3) Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4) Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5) Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6) Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1) Peningkatan pemahaman aparatur perangkat daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
2) Penyusunan dokumen rencana dan anggaran sesuai dengant ahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundangan.
3) Pengelolaan data yang baik. Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena :

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan di OPD.
2. Untuk sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD-Perubahan tetapi masuk ke dalam APBD-Perubahan diharapkan kedepannya OPD agar lebih memperhatikan sub kegiatan yang rutin dilakukan.
3. Perlu Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan karena masih banyaknya kesalahan penginputan utamanya pada nomenklatur urusan dan nomer rekening kegiatan sehingga menghambat proses pengendalian dan evaluasi.
4. Proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD/Renja OPD sudah seharusnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga memudahkan dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan memperbaiki mutu dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah.
5. Perlu peningkatan komitmen OPD dalam penyusunan evaluasi hasil Renja OPD setiap tahunnya, agar penyusunan dan penyampaian laporan tepat waktu setiap triwulan dan sesuai dengan format yang telah ada.
6. OPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA OPD.
7. Hasil evaluasi RKPD-Perubahan Triwulan IV Tahun 2024 sedapat mungkin menjadi bahan perumusan kebijakan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.
8. Program dan kegiatan yang tidak berjalan efektif dan efisien sedapat mungkin di evaluasi kinerjanya sehingga bisa melahirkan kebijakan untuk penganggaran di tahun depan.

Adapun hasil evaluasi Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-91
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
Tahun Anggaran 2024

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					Dinas Dikbud
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					Dinas Dikbud
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)							374.967.636,48	390.654.739,66		110.558.223,98										Dinas Dikbud
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi							-	-		-		-								Dinas Dikbud
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					16,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					5,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan							374.338.724	390.025.827	0,00	110.095.211	0,00	383.270.148,52	0,00	102,39	98,27	0,00	383.270.149	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang					2.839,00	373.391.114	388.939.719,45	771,36	109.815.030,87	2839,00	382.187.554,52	100,00	102,36	98,26	2839,00	382.187.555	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					1,00	937.170	1.070.700,00	98,97	273.770,00	99,81	1.068.685,00	9981,00	114,03	99,81	99,81	1.068.685	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1	10.440	15.408,00	0,18	6.410,00	0,90	13.909,00	90,00	133,23	90,27	0,90	13.909	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-	-		-									0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM							10.000	10.000		-								0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3,00	10.000	10.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					359,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran							65.418	65.418		41.571								0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	5.884	5.884,25	1,00	5.884,25	1,00	5.884,25	100,00	100,00	100,00	1,00	5.884	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					180,00	7.383	7.383,19	0,00	3.932,90	180,00	7.383,19	100,00	100,00	100,00	180,00	7.383	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					40,00	22.015	22.014,75	16,07	11.573,85	37,73	20.764,50	94,33	94,32	94,32	37,73	20.765	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					800,00	8.400	8.400,00	594,08	6.240,00	657,12	6.900,00	82,14	82,14	82,14	657,12	6.900	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					30,00	21.736	21.736,00	10,41	13.939,70	27,72	20.081,20	92,40	92,39	92,39	27,72	20.081	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**							**81.802**	**81.802**		**81.130**								0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					300,00	22.700	22.700,00	300,00	22.700,00	300,00	22.700,00	100,00	100,00	100,00	300,00	22.700	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	59.102	59.102,00	0,99	58.430,00	0,99	58.430,00	99,12	98,86	98,86	0,99	58.430	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang yang disiapkan**							**431.388**	**431.388**		**330.089**								**0,00**	**0,00**	**Dinas Dikbud**
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1,00	139.182	139.182,42	0,38	53.077,91	0,93	130.107,88	93,48	93,48	93,48	0,93	130.108	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	292.206	292.206,00	0,96	277.011,00	1,00	287.859,55	99,51	98,51	98,51	1,00	287.860	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik**	**%**					**60,00**	**40.304**	**40.304**		**10.224**								0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					2,00	27.514	27.513,60	0,59	8.067,50	1,45	19.871,03	72,50	72,22	72,22	1,45	19.871	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					85,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					50,00	12.790	12.790,00	8,43	2.156,00	50,00	12.790,00	100,00	100,00	100,00	50,00	12.790	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**339,53**	**53,00**	**50,66**	**149,92**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**ST**	**R**	**SR**	**ST**		**SR**	**SR**	
	37257	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 -15 Thun yng brprtisipsi dlm pndidikn dsr (SPM), Prsnts Jumlh Wrg Ngr Usi 7 –18 Thun yng blum mnyIsikn pndidikn dsr dn tu mnngh yng prprtisipsi dlm pndidikn kstrn (SPM)**	**%**					**100**	**146.063.944**	**146.063.949**		**63.126.973**										Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase bangunan kondisi baik**	**%**					**60**	**91.095.315**	**91.095.260**		**42.055.862**										Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang					5,00	1.359.870	1.359.870,00	3,49	950.183,81	4,53	1.233.019,49	90,67	90,67	90,67	4,53	1.233.019	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					8,00	323.000	323.000,00	5,64	227.858,58	5,64	227.858,58	70,50	70,54	70,54	5,64	227.859	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					3,00	1.149.193	1.149.192,95	1,67	642.464,07	2,08	795.467,15	69,22	69,22	69,22	2,08	795.467	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					10,00	8.260.495	8.260.440,53	8,36	5.784.778,00	8,48	5.882.662,64	84,82	71,21	71,21	8,48	5.882.663	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					10,00	1.991.833	1.991.833,00	6,48	1.247.215,29	8,80	1.752.617,89	88,00	87,99	87,99	8,80	1.752.618	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					15,00	80.443	80.443,00	0,00	35.770,63	3,75	55.643,20	25,00	69,17	69,17	3,75	55.643	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					8,00	1.218.431	1.218.431,00	5,49	835.268,02	6,88	1.048.121,32	86,03	86,02	86,02	6,88	1.048.121	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket					8	218.000	218.000,00	7,94	216.394,50	7,94	216.394,50	99,26	99,26	99,26	7,94	216.395	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket					10,00	236.250	236.250,00	10,00	236.187,00	10,00	236.187,00	99,97	99,97	99,97	10,00	236.187	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket					8,00	3.500.000	3.500.000,00	0,00	-	8,00	3.500.000,00	100,00	100,00	100,00	8,00	3.500.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Didik					180,00	547.578	547.577,58	122,00	353.692,12	180,00	529.591,82	100,00	96,72	96,72	180,00	529.592	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					5,00	971.800	971.800,00	0,00	-	5,00	971.800,00	99,97	100,00	100,00	5,00	971.800	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pendidikan					350,00	39.593.180	39.593.180,00	103,08	11.629.415,07	349,90	39.549.545,23	99,97	99,89	99,89	349,90	39.549.545	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Pendidikan					350,00	695.999,9	695.999,90	171,99	342.764,24	346,99	690.003,64	99,14	99,14	99,14	346,99	690.004	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang					350,00	953.720	953.720,00	0,00	-	350,00	953.720,00	100,00	100,00	100,00	350,00	953.720	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang					10,00	5.666.125	5.666.125,00	6,70	3.795.045,30	9,19	5.207.146,10	91,92	91,90	91,90	9,19	5.207.146	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					2,00	277.074	277.073,50	1,15	178.560,00	1,91	258.281,50	95,50	93,22	93,22	1,91	258.282	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1,00	177.210	177.210,00	0,31	69.023,30	0,41	72.273,30	41,00	40,78	40,78	0,41	72.273	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					5,00	1.133.225	1.133.225,00	3,50	849.384,00	5,00	1.132.512,00	99,94	99,94	99,94	5,00	1.132.512	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					20,00	1.637.871	1.637.870,65	14,92	1.221.567,78	17,96	1.470.239,26	89,78	89,77	89,77	17,96	1.470.239	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					15,00	21.104.018	21.104.018,25	9,02	13.440.290,08	11,63	17.084.032,41	77,53	80,95	80,95	11,63	17.084.032	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**%**					**95,00**	**37.015.607**	**37.015.666**		**15.579.109**										Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang					8,00	511.640	511.640,00	4,82	306.079,04	6,78	433.629,37	84,78	84,75	84,75	6,78	433.629	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					8	134.071	134.071,00	3,60	60.331,95	5,60	93.849,70	70,01	70,00	70,00	5,60	93.850	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					8	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang					8,00	1.952.500	1.952.500,00	4,64	1.215.916,87	6,64	1.620.321,37	83,00	82,99	82,99	6,64	1.620.321	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit					8,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					8,00	2.010.667	2.010.726,00	5,66	985.522,86	6,08	1.090.227,90	76,00	54,22	54,22	6,08	1.090.228	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					8,00	8.574.891	8.574.890,82	4,93	5.281.469,59	6,82	7.305.448,04	85,21	85,20	85,20	6,82	7.305.448	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					8,00	160.886	160.886,00	6,00	120.568,05	8,00	160.757,40	100,00	99,92	99,92	8,00	160.757	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					8,00	995.504	995.504,00	4,74	589.368,49	6,45	802.236,82	80,60	80,59	80,59	6,45	802.237	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					4,00	1.363.300	1.363.300,00	2,38	809.599,37	3,11	1.060.999,59	77,80	77,83	77,83	3,11	1.061.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					8,00	609.926	609.926,00	6,26	477.036,04	7,83	596.893,87	97,89	97,86	97,86	7,83	596.894	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket					4,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket					4,00	52.500	52.500,00	4,00	52.486,00	4,00	52.486,00	99,99	99,97	99,97	4,00	52.486	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket					4,00	996.950	996.950,00	3,18	791.000,00	3,98	991.000,00	99,44	99,40	99,40	3,98	991.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Didik					1632,00	1.877.829	1.877.828,81	182,29	209.501,05	1584,02	1.822.402,72	97,06	97,05	97,05	1584,02	1.822.403	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					10,00	786.480	786.480,00	0,00	-	10,00	786.480,00	100,00	100,00	100,00	10,00	786.480	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan					69,00	15.380.560	15.380.560,00	17,93	3.996.647,85	68,99	15.379.146,71	99,99	99,99	99,99	68,99	15.379.147	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Pendidikan					69,00	199.806	199.806,40	29,97	86.798,46	59,88	173.400,21	86,78	86,78	86,78	59,88	173.400	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang					69,00	158.200	158.200,00	0,00	-	69,00	158.200,00	100,00	100,00	100,00	69,00	158.200	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					3,00	133.863	133.863,00	1,50	66.915,95	2,25	100.307,27	75,00	74,93	74,93	2,25	100.307	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					2,00	301.640	301.639,81	0,90	63.764,60	1,98	226.463,18	99,00	75,08	75,08	1,98	226.463	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan					1,00	200.427	200.426,55	0,00	6.496,00	0,69	99.046,00	69,00	49,42	49,42	0,69	99.046	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					8,00	613.968	613.968,00	5,98	459.606,57	7,98	612.808,76	99,81	99,81	99,81	7,98	612.809	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**%**					**80,00**	**12.667.512**	**12.667.513**		**4.481.753**										Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit					3,00	1.396.267	1.396.268,10	2,62	1.218.015,59	2,62	1.218.015,59	87,29	87,23	87,23	2,62	1.218.016	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					3,00	2.968.991	2.968.991,00	2,14	2.118.932,68	2,89	2.860.309,55	96,38	96,34	96,34	2,89	2.860.310	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					3,00	394.240	394.240,00	1,84	267.473,41	2,59	340.814,08	86,45	86,45	86,45	2,59	340.814	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket					2,00	640.000	640.000,00	1,80	549.490,25	1,80	549.490,25	90,00	85,86	85,86	1,80	549.490	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					5,00	180.800	180.800,00	0,00	-	5,00	180.800,00	100,00	100,00	100,00	5,00	180.800	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendidikan					429,00	6.613.200	6.613.200,00	5,92	90.492,00	418,36	6.447.900,00	97,52	97,50	97,50	418,36	6.447.900	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan					429,00	399.163	399.162,50	249,38	231.973,99	404,98	376.741,39	94,40	94,38	94,38	404,98	376.741	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					2,00	74.851	74.851,00	-0,07	5.375,50	1,93	74.570,00	96,50	99,62	99,62	1,93	74.570	0,00	0,00	Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**%**					**87,00**	**5.285.510**	**5.285.510**		**1.010.249**										Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit					1,00	840.000	840.000,00	0,31	263.831,47	0,31	263.831,47	31,00	31,41	31,41	0,31	263.831	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					5,00	-	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendidikan					32,00	3.859.900	3.859.900,00	4,43	535.377,00	30,08	3.627.127,00	94,00	93,97	93,97	30,08	3.627.127	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pendidikan					32,00	173.197	173.196,60	9,50	51.402,87	29,41	159.155,42	91,91	91,89	91,89	29,41	159.155	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang					32,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Didik					2000,00	412.414	412.413,50	814,00	159.637,85	1938,00	391.493,98	96,90	94,93	94,93	1938,00	391.494	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**91,21**	**90,43**	**90,43**	**118,67**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**ST**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
	37622	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**								**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**								**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,01,04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah**	**%**					**100,00**	**521.869,60**	**521.869,60**		**110.419,95**										Dinas Dikbud
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah PTK yang ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi**	**PTK**					**30,00**	**521.869,60**	**521.869,60**		**110.419,95**										Dinas Dikbud
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen					1,00	521.869,60	521.869,60	0,05	110.419,95	0,77	481.592,98	77,10	92,28	92,28	0,77	481.593	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**77,10**	**92,28**	**92,28**	**0,77**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38353	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan**	**%**					**75,00**	**199.999,85**	**199.999,85**		**39.658,00**										Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal**	**%**					**100,00**	**199.999,85**	**199.999,85**		**39.658,00**										Dinas Dikbud
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen					1,00	99.999,90	99.999,90	0,16	16.645,50	0,85	85.291,80	85,00	85,29	85,29	0,85	85.292	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen					1,00	99.999,95	99.999,95	0,23	23.012,50	1,00	99.592,63	99,59	99,59	99,59	1,00	99.593	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**61,53**	**61,63**	**61,63**	**0,62**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**R**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN								**521.753.449,626**	**537.440.558,557**				**517.452.868,137**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**113,87**	**59,47**	**59,00**	**53,99**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**R**	**R**	**R**		**SR**	**SR**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					Dinas Dikbud
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																					Dinas Dikbud
	2,22,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**	**%**						**22.641.341,01**	**22.540.266,05**		**19.008.325,51**										Dinas Dikbud
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah**	**Kegiatan**						**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek					3,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**					**1,00**	**22.641.341,01**	**22.540.266,05**		**19.008.325,51**										Dinas Dikbud
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek					4,00	22.619.966,01	22.518.891,05	0,77	18.996.325,51	3,77	21.068.865,79	94,33	93,14	93,56	3,77	21.068.866	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat					2,00	21.375,00	21.375,00	1,00	12.000,00	1,00	12.000,00	50,00	56,14	56,14	1,00	12.000	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**28,87**	**29,86**	**29,94**	**0,95**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,22,03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase sanggar kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan**	**%**					**50,00**	**906.708,50**	**906.708,50**		**477.404,34**										Dinas Dikbud
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian**	**Kegiatan**					**1,00**	**906.708,50**	**906.708,50**		**477.404,34**										Dinas Dikbud
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					30,00	906.708,50	906.708,50	14,74	477.404,34	24,21	676.878,84	80,70	74,65	74,65	24,21	676.879	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**80,70**	**74,65**	**74,65**			**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**T**	**S**	**S**			**SR**	**SR**	
	2,22,04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**							**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**							**-**	**-**		**-**										Dinas Dikbud
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**SR**	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
	2,22,05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**%**					**50,00**	**830.139,85**	**931.206,91**		**796.763,04**										Dinas Dikbud
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Cagar Budaya yang di Tetapkan**	**%**					**100,00**	**830.139,85**	**931.206,91**		**796.763,04**										Dinas Dikbud
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek					5,00	830.139,85	931.206,91	2,55	796.763,04	4,55	848.727,29	91,00	102,24	91,14	4,55	848.727	0,00	0,00	Dinas Dikbud
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Peresentase Cagar Budaya yang dikelola Secara Terpadu**	**%**					**100,00**	**-**													Dinas Dikbud
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Dikbud
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**91,00**	**102,24**	**91,14**			**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**ST**	**ST**	**ST**			**SR**	**SR**	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN								**24.378.189,357**	**24.378.181,460**				**22.606.471,913**								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				**50,14**	**51,69**	**48,93**	**0,24**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**SR**	**R**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					SKB
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																					SKB
	1,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)**							**52.799,86**	**52.799,86**		**17.575,99**										SKB
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**							**-**	**-**		**-**										SKB
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Paket					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran**							**-**	**-**		**-**										SKB

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tahun					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang yang disiapkan**							**36.000,00**	**36.000,00**		**16.000,00**										SKB
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tahun					1,00	36.000,00	36.000,00	0,44	16.000,00	1,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	36.000	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik**							**-**	**-**		**-**										SKB
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SKB
	2.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang yang disiapkan**							**16.799,86**	**16.799,86**		**1.575,99**										SKB
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1,00	16.799,86	16.799,86	0,09	1.575,99	0,93	15.638,87	93,00	93,09	93,09	0,93	15.639	0,00	0,00	SKB
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**96,50**	**96,54**	**96,54**	**0,97**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN								**52.799,859**	**52.799,859**				**51.638,866**								
										521.806.249,485	**537.493.358,416**	**TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM**				**96,50**	**96,54**	**96,54**	**0,97**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														105,19		77,77					
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**159.662.204,85**	**159.676.376,52**		**72.823.869,13**										
	1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)**							**71.326.087,82**	**71.346.786,69**		**25.662.324,40**										Dinkes
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu**							**188.692,95**	**195.223,05**		**89.018,49**										Dinkes
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4,00	89.126,40	95.656,50	2,98	56.286,19	3,50	73.307,31	87,50	82,25	76,64	3,50	73.307	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					4	53.058,85	53.058,85	2,82	17.432,05	2,90	24.798,55	72,50	46,74	46,74	2,90	24.799	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2,00	9.515,45	9.515,45	1,38	5.807,20	1,58	7.415,45	78,75	77,93	77,93	1,58	7.415	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12	36.992,25	36.992,25	4,96	9.493,05	7,00	19.294,20	58,33	52,16	52,16	7,00	19.294	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)**							**67.052.461,64**	**67.066.630,42**		**24.213.163,39**										Dinkes
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	63.981.482,64	63.995.651,42	5,76	23.147.185,19	12,00	63.601.995,00	100,00	99,41	99,38	12,00	63.601.995	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12,00	2.910.300,00	2.910.300,00	5,44	998.595,00	10,60	2.551.425,00	88,33	87,67	87,67	10,60	2.551.425	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					6	91.840,20	91.840,20	1,91	35.939,60	5,99	91.516,60	99,83	99,65	99,65	5,99	91.517	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					4	9.080,00	9.080,00	2,96	2.100,00	4,00	9.080,00	100,00	100,00	100,00	4,00	9.080	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					18	22.440,40	22.440,40	15,46	16.412,65	17,98	20.899,35	99,89	93,13	93,13	17,98	20.899	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					12	37.318,40	37.318,40	6,96	12.930,95	12,00	36.932,45	100,00	98,97	98,97	12,00	36.932	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya**							**452.062,88**	**452.062,88**		**32.161,48**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen					2	452.062,88	452.062,88	0,19	32.161,48	0,19	43.337,48	9,59	9,59	9,59	0,19	43.337	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai standar**							**29.774,450**	**29.774,450**		**3.276,000**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					4	8.849,500	8.849,50	1,16	-	2,20	4.791,50	55,00	54,14	54,14	2,20	4.792	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					21,00	11.476,00	11.476,00	9,15	3.276,00	14,40	7.850,00	68,57	68,40	68,40	14,40	7.850	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					112,00	9.448,95	9.448,95	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum di instansi kesehatan, puskesmas dan jaringannya**							**1.100.547,02**	**1.100.547,02**		**415.280,21**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	31.545,50	31.545,50	0,41	8.611,00	0,80	24.739,50	80,00	78,42	78,42	0,80	24.740	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10,00	484.773,42	484.773,42	0,60	190.564,90	9,80	475.127,90	98,01	98,01	98,01	9,80	475.128	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	41.313,35	41.313,35	0,00	9.513,30	0,29	33.974,70	29,00	82,24	82,24	0,29	33.975	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	104.327,05	104.327,05	0,65	66.459,95	0,97	101.682,65	97,47	97,47	97,47	0,97	101.683	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	59.154,15	59.154,15	0,36	17.349,20	0,77	45.558,75	77,02	77,02	77,02	0,77	45.559	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	34.209,55	34.209,55	0,82	15.173,90	0,94	32.153,64	93,99	93,99	93,99	0,94	32.154	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					2	345.224,00	345.224,00	0,80	107.607,96	1,90	328.760,67	95,23	95,23	95,23	1,90	328.761	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terlaksananya pengadaan kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasiobal dan pusk keliling serta ambulans**							**-**	**-**		**-**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)		RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa penunjang pelayanan urusan pemerintahan bidang kesehatan**	**%**					**100,00**	**1.741.325,31**	**1.741.325,31**		**514.234,07**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4,00	716.865,31	716.865,31	1,56	172.654,07	2,80	492.494,86	70,00	68,70	68,70	2,80	492.495	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	41.440,00	41.440,00	0,55	19.665,00	1,00	41.390,00	100,00	99,88	99,88	1,00	41.390	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					4,00	983.020,00	983.020,00	395,44	321.915,00	397,52	960.040,00	9938,00	97,66	97,66	397,52	960.040	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan bidang kesehatan**	**%**					**100**	**312.093,01**	**312.093,01**		**90.080,77**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	19.781,26	19.781,26	0,49	8.584,75	0,95	18.340,60	95,00	92,72	92,72	0,95	18.341	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					35,00	292.311,75	292.311,75	11,55	81.496,02	28,00	215.787,79	80,00	73,82	73,82	28,00	215.788	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas**	**%**					**100**	**449.130,55**	**449.130,55**		**305.110,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja					20	449.130,55	449.130,55	11,88	305.110,00	18,08	405.905,09	90,38	90,38	90,38	18,08	405.905	0,00	0,00	Dinkes
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**629,60**	**111,35**	**111,05**	**29,38**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk**						**100**	**86.323.254,91**	**86.316.766,47**		**46.404.351,56**										Dinkes
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan**	**%**					**100**	**38.792.451,36**	**38.487.898,66**		**24.619.135,58**										Dinkes
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit					5	1.046.283,61	893.618,00	4,88	814.180,88	4,88	814.180,88	97,58	77,82	91,11	4,88	814.181	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit					8	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit					2,00	13.450.902,15	12.980.902,15	1,99	12.696.970,70	1,99	12.696.970,70	99,71	94,39	97,81	1,99	12.696.971	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit					1,00	17.529.912,77	17.529.912,77	0,98	16.942.339,90	0,98	16.942.339,90	98,00	96,65	96,65	0,98	16.942.340	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,01	-	0,51	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit					10,00	1.014.567,88	982.680,79	9,92	898.300,91	9,92	898.300,91	99,20	88,54	91,41	9,92	898.301	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					2,00	250.284,00	250.284,00	1,80	219.582,40	1,80	219.582,40	90,00	87,73	87,73	1,80	219.582	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket					2,00	5.259.908,36	5.609.908,36	0,77	(3.672.452,98)	1,98	5.548.985,72	99,00	105,50	98,91	1,98	5.548.986	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket					10,00	240.592,60	240.592,60	6,40	(3.279.786,23)	9,50	220.499,50	95,00	91,65	91,65	9,50	220.500	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi capaian indikator Standar pelayanan minimal bidang kesehatan**	**%**					**100,00**	**47.146.378,49**	**47.444.442,76**		**21.670.853,47**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5738,00	191.226,95	191.226,95	2999,83	91.730,00	2999,83	91.730,00	52,28	47,97	47,97	2999,83	91.730	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5470,00	79.999,90	100.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					5210	48.000,00	57.600,00	2554,46	18.660,00	2554,98	28.040,00	49,04	58,42	48,68	2554,98	28.040	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					25899,00	10.000,00	10.000,00	17000,10	6.400,00	17000,10	6.400,00	65,64	64,00	64,00	17000,10	6.400	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					4639	10.192,000	10.192,00	2199,81	4.602,90	2199,81	4.602,90	47,42	45,16	45,16	2199,81	4.603	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					1000	25.180,000	25.180,00	610,00	7.976,90	700,00	16.808,30	70,00	66,75	66,75	700,00	16.808	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					1000	47.265,90	47.265,90	480,00	22.058,65	850,00	39.552,25	85,00	83,68	83,68	850,00	39.552	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					19034,00	85.578,10	85.578,10	1844,39	2.017,00	16500,57	68.490,50	86,69	80,03	80,03	16500,57	68.491	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					7820,00	83.253,50	83.253,50	3893,58	40.243,70	7099,78	74.855,28	90,79	89,91	89,91	7099,78	74.855	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang					818	81.463,40	81.463,40	188,22	15.750,40	449,98	42.526,20	55,01	52,20	52,20	449,98	42.526	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					7036	28.777,00	28.777,00	2286,00	8.293,00	7000,12	27.696,80	99,49	96,25	96,25	7000,12	27.697	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					9094,00	246.316,00	246.316,00	3139,25	81.404,00	9050,35	242.401,75	99,52	98,41	98,41	9050,35	242.402	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar						2	13.378,00	13.378,00	1,62	8.415,00	1,90	12.160,00	95,00	90,90	90,90	1,90	12.160	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen					7	39.746,55	39.746,55	5,67	28.148,75	7,00	36.533,65	100,00	91,92	91,92	7,00	36.534	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen					1,00	3.695.241,75	3.839.697,85	0,45	1.719.099,71	0,80	2.963.596,41	80,00	80,20	77,18	0,80	2.963.596	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen					12,00	28.940,35	28.940,35	3,36	7.464,75	12,00	28.420,00	100,00	98,20	98,20	12,00	28.420	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen					5,00	121.474,25	121.474,25	3,13	70.708,55	4,60	107.738,50	92,00	88,69	88,69	4,60	107.739	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen					4,00	142.205,00	142.205,00	3,74	130.869,10	3,85	133.683,50	96,25	94,01	94,01	3,85	133.684	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen					1	167.992	167.992,15	0,62	103.023,42	0,99	165.019,37	99,00	98,23	98,23	0,99	165.019	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen					4	137.257	137.256,70	2,52	80.759,45	3,86	122.601,35	96,50	89,32	89,32	3,86	122.601	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						818,00	64.240,00	64.240,00	267,65	12.240,30	499,96	34.974,20	61,12	54,44	54,44	499,96	34.974	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					1025	80.380,05	80.380,05	624,23	43.030,20	899,95	65.928,05	87,80	82,02	82,02	899,95	65.928	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen					3	20.369,70	20.369,70	2,37	15.225,00	3,00	19.520,00	100,00	95,83	95,83	3,00	19.520	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen					13	434.339,500	434.339,50	12,51	227.445,08	12,80	418.473,83	98,46	96,35	96,35	12,80	418.474	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen					1	36.232.899,350	36.323.462,07	0,50	16.851.835,31	0,90	29.230.641,34	90,00	80,67	80,47	0,90	29.230.641	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						104028,00	114.500,20	114.500,20	35692,01	34.532,00	43005,18	42.576,70	41,34	37,18	37,18	43005,18	42.577	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket					10	24.084,20	24.084,20	4,60	6.119,82	10,00	23.493,82	100,00	97,55	97,55	10,00	23.494	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen					1	164.259,00	164.259,00	0,23	33.294,20	0,95	152.316,32	95,00	92,73	92,73	0,95	152.316	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen					21,00	648.863,81	648.863,81	6,93	212.489,29	11,55	355.727,13	55,00	54,82	54,82	11,55	355.727	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen					21	3.768.832,45	3.802.277,80	10,76	1.662.090,90	20,00	3.332.347,30	95,24	88,42	87,64	20,00	3.332.347	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit					20	124.499,850	124.499,85	13,72	83.373,48	17,00	103.738,38	85,00	83,32	83,32	17,00	103.738	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan					4	80.259,950	80.259,95	0,59	10.089,50	3,80	74.497,60	95,00	92,82	92,82	3,80	74.498	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen					3,00	40.516,35	40.516,35	1,13	13.104,30	2,90	37.048,66	96,67	91,44	91,44	2,90	37.049	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1	64.846,58	64.846,58	0,02	18.358,80	0,70	41.426,87	70,00	63,88	63,88	0,70	41.427	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentasi instansi/sarana kesehatan yg menerapkan sistem informasi berbasis teknologi (web)**	**%**					**100**	**79.471,15**	**79.471,15**		**25.759,15**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen					1	79.471,15	79.471,15	0,36	25.759,15	0,90	68.751,65	90,00	86,51	86,51	0,90	68.752	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan**	**%**					**68**	**304.953,90**	**304.953,90**		**88.603,36**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit					2	59.174,00	59.174,00	0,72	20.423,71	1,90	55.267,35	95,00	93,40	93,40	1,90	55.267	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit					2	20.999,90	20.999,90	1,75	18.269,90	2,00	20.859,90	100,00	99,33	99,33	2,00	20.860	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						21	200.000,00	200.000,00	4,69	33.372,05	18,00	160.177,10	85,71	80,09	80,09	18,00	160.177	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen					22	24.780,00	24.780,00	16,00	16.537,70	20,00	21.828,40	90,91	88,09	88,09	20,00	21.828	0,00	0,00	Dinkes
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**82,36**	**79,05**	**79,04**	**2361,77**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar**	**Persen**					**85**	**1.246.248,18**	**1.246.248,13**		**298.102,14**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentasi praktek tenaga kesehatan yg dibina dan diawasi**	**%**					**80**	**23.390,85**	**23.390,85**		**1.274,25**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					5	11.499,25	11.499,25	0,6	1274,25	1274,25	1.274,25	25485,00	11,08	11,08	1274,25	1.274	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					2	11.891,60	11.891,60	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar**	**%**					**91**	**245.809,70**	**245.809,70**		**107.277,60**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	12.970,20	12.970,20	0,69	8.799,50	0,80	10.173,50	80,00	78,44	78,44	0,80	10.174	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang					1000	206.753,35	206.753,35	480,00	86.315,10	650,00	126.087,97	65,00	60,98	60,98	650,00	126.088	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					2	26.086,15	26.086,15	1,09	12.163,00	1,50	17.567,50	75,00	67,34	67,34	1,50	17.568	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya**	**%**					**85**	**977.047,63**	**977.047,58**		**189.550,29**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					300	977.047,63	977.047,58	64,41	189.550,29	260,01	822.663,05	86,67	84,20	84,20	260,01	822.663	0,00	0,00	Dinkes
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**4298,61**	**50,34**	**50,34**	**364,43**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**SR**	**SR**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1,02,04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase ketersediaan ALKES Sesuai standar,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Pakai sesuai standar**	**Persen**					**85**	**552.488,85**	**552.450,13**		**314.924,18**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Pesentasi apotek, toko obat, toko alkes, optikal dan Umot yg memiliki izin**	**%**					**85**	**108.983,000**	**108.983,000**		**70.496,900**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					77	108.983,00	108.983,00	51,37	70.496,90	72,00	99.608,90	93,51	91,40	91,40	72,00	99.609	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik**	**%**					**60**	**27.134,45**	**27.134,45**		**8.762,50**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen					1	27.134,45	27.134,45	0,35	8.762,50	0,52	13.501,60	52,00	49,76	49,76	0,52	13.502	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentasi produksi pangan industri Rumah tangga yg duawasi dan bersertifikat laik**	**%**					**60**	**179.405,00**	**179.405,00**		**113.829,90**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					1	179.405,00	179.405,00	0,66	113.829,90	0,85	147.692,90	85,00	82,32	82,32	0,85	147.693	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentasi TPM dan DAM yg diawasi dan bersertifikat laik**	**%**					**96**	**27.310,95**	**27.272,23**		**15.324,20**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						1	27.310,95	27.272,23	0,57	15.324,20	1,00	27.140,95	100,00	99,38	99,52	1,00	27.141	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentasi pembinaan pd sentra nakanan jajanan dan pemberian stiker**	**%**					**56**	**9.810,00**	**9.810,00**		**5.732,00**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen					1,00	9.810,00	9.810,00	0,86	5.732,00	1,00	9.170,90	100,00	93,49	93,49	1,00	9.171	0,00	0,00	Dinkes

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT**	**%**					**60,00**	**199.845,45**	**199.845,45**		**100.778,68**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit					30,00	199.845,45	199.845,45	15,24	100.778,68	27,00	179.203,56	90,00	89,67	89,67	27,00	179.204	0,00	0,00	Dinkes
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**86,75**	**84,34**	**84,36**	**17,06**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga Ber PHBS**	**Persen**					**71,00**	**214.125,10**	**214.125,10**		**144.166,85**						0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan**	**%**					**23,00**	**69.999,80**	**69.999,80**		**33.288,60**						0,00	-	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen					2	69.999,80	69.999,80	0,98	33.288,60	1,90	65.568,00	95,00	93,67	93,67	1,90	65.568	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS**	**%**					**44**	**94.999,95**	**94.999,95**		**68.850,90**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen					1	94.999,95	94.999,95	0,74	68.850,90	0,98	92.099,95	98,00	96,95	96,95	0,98	92.100	0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentasi UKBM yg purnama atau mandiri**	**%**					**30**	**49.125,35**	**49.125,35**		**42.027,35**								0,00	0,00	Dinkes
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen					4	49.125,35	49.125,35	3,60	42.027,35	3,60	42.027,35	90,00	85,55	85,55	3,60	42.027	0,00	0,00	Dinkes
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**94,33**	**92,06**	**92,06**	**2,16**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**159.662.204,845**	**159.676.376,523**		**72.823.869,128**		**147.135.690,759**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S				**342.044.836,964**	**1038,33**	**83,43**	**83,37**	**554,96**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1 **1.02**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																					RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kesehatan)**	**%**					**100,00**	**127.717.614,17**	**127.717.614,17**		**40.728.044,54**										RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)**	**%**					**100**	**26.366.951,08**	**26.366.951,08**		**5.718.022,69**										RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						362,00	26.366.951,08	26.366.951,08	73,12	5.718.022,69	358,02	26.159.114,95	98,90	99,21	99,21	358,02	26.159.115	0,00	0,00	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksananya pengelolaan keuangan secara langsung dan mandiri oleh RS utk mendukung peningkatan mutu layanan Rumah Sakit dan Puskesmas**	**%**					**100**	**101.350.663,09**	**101.350.663,09**		**35.010.021,85**							0,00	0,00	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kerja					1	101.350.663,09	101.350.663,09	0,20	35.010.021,85	1,00	110.766.630,82	100,00	109,29	109,29	1,00	110.766.631	0,00	0,00	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**99,45**	**104,25**	**104,25**	**179,51**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**%ib hmil y dpt ply ksht str, %ib hmil y dpt fslts ply ksht,%byi br lhr umr 0-28 hri y dpt ply ksht str,%Blit y brmr 0–59 bln y dpt ply ksht, %nk usi pndidkn dsr y dpt ply ksht str,%org brusi lbh dr 60 th y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit Hiprtnsi y dpt ply ksht str,%org y brusi 15 th kts y mdrit DM y dpt ply ksht str,%ODG brt y dpt ply ksht str,%org trdg TBCy dpt ply ksht str,%prslin difslts ply ksht,%Blit y dpt ply ksht ssi str,Rso pksms trhdp jml pddk%org brusi 15-59 th y dpt ply ksht str, Rasio pksmas trhdp jml pddk**	**%**					**100,00**	**15.584.304,09**	**15.584.304,09**		**13.300.561,80**									**0,00**	**0,00**	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan Sarana, Prasarana dan AlkesUKP dan UKM Rujukan**	**%**					**100,00**	**15.584.304,09**	**15.584.304,09**		**13.300.561,80**									**0,00**	**0,00**	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					12,00	12.694.764,93	12.694.764,93	10,27	10.863.303,08	10,27	10.863.303,08	85,62	85,57	85,57	10,27	10.863.303	0,00	0,00	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						0,00	2.889.539,16	2.889.539,16	0,00	2.437.258,72	0,00	2.437.258,72	0,00	84,35	84,35	0,00	2.437.259	0,00	0,00	RSUD H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**42,81**	**84,96**	**84,96**	**5,14**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**SR**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**143.301.918,252**	**143.301.918,252**		**54.028.606,340**		**150.226.307,573**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				**71,13**	**94,61**	**94,61**	**92,32**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN		**S**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Caile Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Caile
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Caile**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Caile**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.819.530,54**	**3.819.530,54**		**1.547.872,19**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Caile**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3.819.530,54**	**3.819.530,54**		**1.547.872,19**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Caile**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	3.819.530,54	3.819.530,54	3,00	1.547.872,19	12,00	3.332.322,60	100,00	87,24	87,24	12,00	3.332.323	0,00	0,00	Puskesmas Caile
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**87,24**	**87,24**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									3.819.530,540	3.819.530,540		1.547.872,194		3.332.322,595								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	87,24	87,24	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Ujung Loe Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.038.116,87	4.038.116,87		1.835.004,43								0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								4.038.116,87	4.038.116,87		1.835.004,43								0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	4.038.116,87	4.038.116,87	3,00	1.835.004,43	12,00	3.313.006,81	100,00	82,04	82,04	12,00	3.313.007	0,00	0,00	Puskesmas Ujung Loe
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	82,04	82,04	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									4.038.116,868	4.038.116,868		1.835.004,428		3.313.006,806								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	82,04	82,04	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Ponre Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Ponre
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Ponre
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Ponre
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.764.613,41	2.764.613,41		1.058.458,29								0,00	0,00	Puskesmas Ponre
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								2.764.613,41	2.764.613,41		1.058.458,29								0,00	0,00	Puskesmas Ponre
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.764.613,41	2.764.613,41	3,00	1.058.458,29	12,00	2.588.184,78	100,00	93,62	93,62	12,00	2.588.185	0,00	0,00	Puskesmas Ponre
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	93,62	93,62	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.764.613,405	2.764.613,405		1.058.458,285		2.588.184,776								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	93,62	93,62	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	ST	ST	SR		SR	SR	
		Puskesmas Bonto Bangun Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.014.820,62	5.014.820,62		2.264.217,78								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								5.014.820,62	5.014.820,62		2.264.217,78								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	5.014.820,62	5.014.820,62	3,00	2.264.217,78	12,00	4.128.392,74	100,00	82,32	82,32	12,00	4.128.393	0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bangun
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	82,32	82,32	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									5.014.820,617	5.014.820,617		2.264.217,776		4.128.392,743								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	82,32	82,32	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Tanete Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Tanete
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Tanete
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Tanete
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.766.326,43	3.766.326,43		1.573.781,79								0,00	0,00	Puskesmas Tanete
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								3.766.326,43	3.766.326,43		1.573.781,79								0,00	0,00	Puskesmas Tanete
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	3.766.326,43	3.766.326,43	3,00	1.573.781,79	12,00	3.189.107,89	100,00	84,67	84,67	12,00	3.189.108	0,00	0,00	Puskesmas Tanete
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	84,67	84,67	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									3.766.326,432	3.766.326,432		1.573.781,791		3.189.107,894								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	84,67	84,67	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Bonto Bahari Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari Kab.
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.970.055,02	3.970.055,02		1.931.402,33								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								3.970.055,02	3.970.055,02		1.931.402,33								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	3.970.055,02	3.970.055,02	3,00	1.931.402,33	12,00	3.143.683,14	100,00	79,18	79,18	12,00	3.143.683	0,00	0,00	Puskesmas Bonto Bahari Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	79,18	79,18	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									3.970.055,021	3.970.055,021		1.931.402,325		3.143.683,144								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	79,18	79,18	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)		RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
		Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Gattareng Kab.**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**-**											**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**-**											**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0,00**	**2.641.198,95**	**2.641.198,95**		**1.127.911,29**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**0,00**	**2.641.198,95**	**2.641.198,95**		**1.127.911,29**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.641.198,95	2.641.198,95	0,00	1.127.911,29	9,00	2.193.195,14	75,00	83,04	83,04	9,00	2.193.195	0,00	0,00	Puskesmas Gattareng Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**75,00**	**83,04**	**83,04**	**9,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.641.198,951**	**2.641.198,951**		**1.127.911,291**		**2.193.195,140**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**75,00**	**83,04**	**83,04**	**9,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**S**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.875.678,67**	**2.875.678,67**		**1.189.771,81**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.875.678,67**	**2.875.678,67**		**1.189.771,81**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Bontonyeleng Kab.**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.875.678,67	2.875.678,67	3,00	1.189.771,81	12,00	2.541.376,30	100,00	88,37	88,37	12,00	2.541.376	0,00	0,00	Puskesmas Bontonyeleng Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**88,37**	**88,37**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.875.678,667**	**2.875.678,667**		**1.189.771,806**		**2.541.376,296**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**100,00**	**88,37**	**88,37**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1.935.101,98**	**1.935.101,98**		**892.700,87**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Borong Rappoa Kab.**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1.935.101,98**	**1.935.101,98**		**892.700,87**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Borong Rappoa Kab.**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	1.935.101,98	1.935.101,98	3,00	892.700,87	12,00	1.659.198,67	100,00	85,74	85,74	12,00	1.659.199	0,00	0,00	Puskesmas Borong Rappoa Kab. Bulukumba

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	85,74	85,74	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									1.935.101,981	1.935.101,981		892.700,870		1.659.198,673								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	85,74	85,74	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab.
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								783.899,39	783.899,39		329.927,82								0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								783.899,39	783.899,39		329.927,82								0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab.
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	783.899,39	783.899,39	3,00	329.927,82	12,00	734.194,05	100,00	93,66	93,66	12,00	734.194	0,00	0,00	Puskesmas Manyampa Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	93,66	93,66	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									783.899,394	783.899,394		329.927,818		734.194,050								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	93,66	93,66	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	ST	ST	SR		SR	SR	
		Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab.
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.880.678,14	1.880.678,14		915.098,52								0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								1.880.678,14	1.880.678,14		915.098,52								0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab.
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	1.880.678,14	1.880.678,14	3,00	915.098,52	12,00	1.696.390,76	100,00	90,20	90,20	12,00	1.696.391	0,00	0,00	Puskesmas Palangisang Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	90,20	90,20	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									1.880.678,140	1.880.678,140		915.098,515		1.696.390,759								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	90,20	90,20	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.275.188,31	2.275.188,31		1.003.509,13								0,00	0,00	Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.275.188,31**	**2.275.188,31**		**1.003.509,13**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.275.188,31	2.275.188,31	3,00	1.003.509,13	12,00	1.891.989,37	100,00	83,16	83,16	12,00	1.891.989	0,00	0,00	Puskesmas Balibo Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**83,16**	**83,16**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.275.188,314**	**2.275.188,314**		**1.003.509,133**		**1.891.989,373**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**100,00**	**83,16**	**83,16**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.158.540,85**	**2.158.540,85**		**629.020,80**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.158.540,85**	**2.158.540,85**		**629.020,80**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.158.540,85	2.158.540,85	3,00	629.020,80	12,00	1.533.452,96	100,00	71,04	71,04	12,00	1.533.453	0,00	0,00	Puskesmas Salassae Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**71,04**	**71,04**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.158.540,852**	**2.158.540,852**		**629.020,803**		**1.533.452,964**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**100,00**	**71,04**	**71,04**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Lembanna Kab.
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba**
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																			**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba**
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.289.404,98**	**2.289.404,98**		**905.861,89**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Lembanna Kab. Bulukumba**
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2.289.404,98**	**2.289.404,98**		**905.861,89**								**0,00**	**0,00**	**Puskesmas Lembanna Kab.**
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.289.404,98	2.289.404,98	3,00	905.861,89	12,00	1.968.608,94	100,00	85,99	85,99	12,00	1.968.609	0,00	0,00	Puskesmas Lembanna Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**85,99**	**85,99**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.289.404,976**	**2.289.404,976**		**905.861,890**		**1.968.608,935**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**100,00**	**85,99**	**85,99**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.412.084,65	2.412.084,65		1.614.997,80								0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								2.412.084,65	2.412.084,65		1.614.997,80								0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.412.084,65	2.412.084,65	3,00	1.614.997,80	12,00	2.108.966,17	100,00	87,43	87,43	12,00	2.108.966	0,00	0,00	Puskesmas Herlang Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	87,43	87,43	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.412.084,649	2.412.084,649		1.614.997,802		2.108.966,170								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	87,43	87,43	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab.
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.727.788,85	2.727.788,85		1.160.631,73								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								2.727.788,85	2.727.788,85		1.160.631,73								0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab.
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.727.788,85	2.727.788,85	3,00	1.160.631,73	12,00	2.118.541,77	100,00	77,67	77,67	12,00	2.118.542	0,00	0,00	Puskesmas Bonto Tiro Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	77,67	77,67	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.727.788,853	2.727.788,853		1.160.631,729		2.118.541,769								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	77,67	77,67	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba																			0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.499.978,05	1.499.978,05		645.267,31								0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								1.499.978,05	1.499.978,05		645.267,31								0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab.
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	1.499.978,05	1.499.978,05	3,00	645.267,31	12,00	1.117.343,27	100,00	74,49	74,49	12,00	1.117.343	0,00	0,00	Puskesmas Karassing Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	74,49	74,49	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	S	S	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									1.499.978,050	1.499.978,050		645.267,305		1.117.343,274								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	74,49	74,49	12,00		0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	S	S	SR		SR	SR	
		Puskesmas Batang Kab. Bulukumba																				0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.876.959,19	1.876.959,19		856.492,59									0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								1.876.959,19	1.876.959,19		856.492,59									0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	1.876.959,19	1.876.959,19	3,00	856.492,59	12,00	1.617.867,95	100,00	86,20	86,20	12,00	1.617.868	0,00	0,00	Puskesmas Batang Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	86,20	86,20	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									1.876.959,187	1.876.959,187		856.492,594		1.617.867,949								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	86,20	86,20	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba																				0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.683.725,77	1.683.725,77		606.793,30									0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								1.683.725,77	1.683.725,77		606.793,30									0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab.
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	1.683.725,77	1.683.725,77	3,00	606.793,30	12,00	1.373.029,86	100,00	81,55	81,55	12,00	1.373.030	0,00	0,00	Puskesmas Tanah Toa Kab.
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	81,55	81,55	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									1.683.725,774	1.683.725,774		606.793,304		1.373.029,864								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					100,00	81,55	81,55	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
		Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba																				0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.685.290,11	2.685.290,11		1.184.701,46									0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								2.685.290,11	2.685.290,11		1.184.701,46									0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	bulan					12,00	2.685.290,11	2.685.290,11	3,00	1.184.701,46	12,00	2.433.985,46	100,00	90,64	90,64	12,00	2.433.985	0,00	0,00	Puskesmas Kajang Kab. Bulukumba
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	90,64	90,64	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.685.290,113	2.685.290,113		1.184.701,459		2.433.985,458								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S					342.044.836,964	100,00	90,64	90,64	12,00		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	SR		SR	SR	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														140,20		84,83			0,00	0,00	PUTR
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																			0,00	0,00	PUTR
	1,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)**							**11.438.389,55**	**11.239.322,98**		**2.232.074,36**		**10.697.672,68**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi**							**209.113,20**	**201.999,15**		**35.758,45**		**192.050,60**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					39	209.113,20	201.999,15	10,00	35.758,45	39,00	192.050,60	100,00	91,84	95,07	39,00	192.051	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**							**7.855.745,65**	**7.800.830,53**		**1.849.585,06**		**7.558.065,67**	0,00	96,21	96,89	0,00	7.558.066	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12	7.599.325,65	7.557.190,53	3,00	1.780.320,06	12,00	7.320.005,67	100,00	96,32	96,86	12,00	7.320.006	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12	256.420,00	243.640,00	3,00	69.265,00	12,00	238.060,00	100,00	92,84	97,71	12,00	238.060	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**							**-**	**-**		**-**			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					15	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**							**95.281,05**	**122.142,45**		**33.957,35**		**122.142,39**	0,00	128,19	100,00	0,00	122.142	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					34	3.395,00	4.510,40	0,00	1.115,40	34,00	4.510,40	100,00	132,85	100,00	34,00	4.510	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					500	5.262,05	5.262,05	167,00	1.754,00	500,00	5.262,00	100,00	100,00	100,00	500,00	5.262	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					150	86.624,00	112.370,00	10,01	31.087,95	150,00	112.369,99	100,00	129,72	100,00	150,00	112.370	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan**							**2.205.305,65**	**2.006.820,65**		**-**		**1.902.275,29**	0,00	86,26	94,79	0,00	1.902.275	0,00	0,00	PUTR

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					10	2.123.002,00	1.923.002,00	1,43	-	10,00	1.819.971,64	100,00	85,73	94,64	10,00	1.819.972	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7	82.303,65	83.818,65	0,00	-	7,00	82.303,65	100,00	100,00	98,19	7,00	82.304	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor**							**869.094,00**	**871.190,20**		**273.554,00**		**817.241,64**	0,00	94,03	93,81	0,00	817.242	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	155.874,00	155.874,00	3,00	37.489,00	12,00	110.201,64	100,00	70,70	70,70	12,00	110.202	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	713.220,00	715.316,20	3,00	236.065,00	12,00	707.040,00	100,00	99,13	98,84	12,00	707.040	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara**							**203.850,00**	**236.340,00**		**39.219,50**		**105.897,08**	0,00	51,95	44,81	0,00	105.897	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	12.000,00	12.000,00	0,09	1.033,33	0,88	10.585,17	88,21	88,21	88,21	0,88	10.585	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					4	118.460,00	138.360,00	0,95	18.603,16	3,95	66.721,36	98,75	56,32	48,22	3,95	66.721	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	73.390,00	74.400,00	0,20	8.003,00	1,00	17.010,55	100,00	23,18	22,86	1,00	17.011	0,00	0,00	PUTR
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					20	-	11.580,00	20,00	11.580,00	20,00	11.580,00	100,00	0,00	100,00	20,00	11.580	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**86,69**	**101,47**	**102,60**	**50,86**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,03,02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi**							**47.840.513,28**	**47.668.907,43**		**26.434.859,13**		**30.806.700,56**	0,00	64,39	64,63	0,00	30.806.701	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung/Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai**							**35.295.801,45**	**35.033.335,91**		**17.413.492,39**		**18.274.384,83**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM					5,00	825.391,45	656.033,75	1,00	242.659,70	5,00	622.351,90	100,00	75,40	94,87	5,00	622.352	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM					50	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater	0	-					1	32.450.000,00	32.502.444,00	1,00	16.226.453,82	1,00	16.325.954,22	100,00	50,31	50,23	1,00	16.325.954	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit					21	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen					1	2.020.410,00	1.874.858,16	0,81	944.378,88	1,00	1.326.078,71	100,00	65,63	70,73	1,00	1.326.079	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jaringan irigasi kondisi baik**							**12.544.711,83**	**12.635.571,53**		**9.021.366,74**		**12.532.315,74**						0,00	0,00	PUTR

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM					15	1.843.634,76	1.843.634,76	4,00	1.409.869,03	15,00	1.828.822,29	100,00	99,20	99,20	15,00	1.828.822	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM					45	9.552.116,95	9.642.116,65	25,00	7.249.952,34	45,00	9.588.599,52	100,00	100,38	99,44	45,00	9.588.600	0,00	0,00	PUTR
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM					20	1.148.960,11	1.149.820,11	7,00	361.545,37	20,00	1.114.893,92	100,00	97,04	96,96	20,00	1.114.894	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	81,33	85,24	14,50		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	T	T	SR		SR	SR	
	1,03,03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prsnts Pnduduk Brkss ir Minum, Prsnts Jumlh wrg ngr yng mmprolh kbutuhn pokok ir minum shri-hri (SPM)**							**2.342.657,02**	**2.355.057,02**		**1.065.704,98**		**2.261.052,65**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**							**2.342.657,02**	**2.355.057,02**		**1.065.704,98**		**2.261.052,65**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Unit					12,00	2.342.657,02	2.355.057,02	3,00	1.065.704,98	12,00	2.261.052,65	100,00	96,52	96,01	12,00	2.261.053	0,00	0,00	PUTR
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa					10	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	96,52	96,01	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	1,03,05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)**							**599.108,00**	**651.429,70**		**439.539,95**		**636.520,72**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**599.108,00**	**651.429,70**		**439.539,95**		**636.520,72**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	M					1000	151.927,00	142.718,00	750,00	103.353,74	1000,00	140.158,12	100,00	92,25	98,21	1000,00	140.158	0,00	0,00	PUTR
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	M					100	447.181,00	508.711,70	65,00	336.186,21	100,00	496.362,60	100,00	111,00	97,57	100,00	496.363	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	101,63	97,89	550,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	ST		SR	SR	
	1,03,06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang talud/ drainase yang baik, Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1.5 M)**							**3.199.717,56**	**3.123.505,05**		**1.731.273,55**		**3.062.661,43**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Talud/drainase yang baik**							**3.199.717,56**	**3.123.505,05**		**1.731.273,55**		**3.062.661,43**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Perkotaan					500	3.129.227,56	3.053.015,05	234,00	1.660.783,55	500,00	2.992.171,43	100,00	95,62	98,01	500,00	2.992.171	0,00	0,00	PUTR
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Perkotaan					2707	70.490,00	70.490,00	2707,00	70.490,00	2707,00	70.490,00	100,00	100,00	100,00	2707,00	70.490	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	97,81	99,00	1603,50		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	ST		SR	SR	
	1,03,08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit**							**8.907.049,73**	**9.076.319,40**		**2.713.008,90**		**4.525.821,31**						0,00	0,00	PUTR

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan Gedung yang terbangun dan jumlah rekomendasi IMB yang terbit**							**8.907.049,73**	**9.076.319,40**		**2.713.008,90**		**4.525.821,31**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					10	8.828.289,73	8.911.821,40	3,00	2.602.323,90	10,00	4.367.136,81	100,00	49,47	49,00	10,00	4.367.137	0,00	0,00	PUTR
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen					400	78.760,00	164.498,00	100,00	110.685,00	400,00	158.684,50	100,00	201,48	96,47	400,00	158.685	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**125,47**	**72,73**	**205,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**S**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1,03,10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan**							**93.821.700,12**	**93.992.458,23**		**43.406.934,94**		**85.880.872,40**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang jalan dalam kondisi baik**							**93.821.700,12**	**93.992.458,23**		**43.406.934,94**		**85.880.872,40**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM					1250,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM					13606,00	71.229.102,55	71.025.030,41	6124,06	36.307.393,87	13606,00	68.146.892,07	100,00	95,67	95,95	13606,00	68.146.892	0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM					22100,00	17.020.331,52	17.009.764,64	9485,32	4.819.865,70	20800,52	13.338.122,99	94,12	78,37	78,41	20800,52	13.338.123	0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan					3,00	3.877.520,78	3.866.687,74	1,65	1.025.448,29	2,98	2.717.147,18	99,33	70,07	70,27	2,98	2.717.147	0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM					2,00	119.335,00	521.895,00	0,36	129.345,20	0,54	140.165,20	26,86	117,46	26,86	0,54	140.165	0,00	0,00	PUTR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM					2670	1.575.410,275	1.569.080,44	949,99	1.124.881,88	2620,07	1.538.544,96	98,13	97,66	98,05	2620,07	1.538.545	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**83,69**	**91,85**	**73,91**	**7406,02**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**ST**	**S**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1,03,11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja trampil yang bersertifikat**							**77.732,500**	**77.732,500**		**64.190,500**		**75.775,500**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih**							**49.255,50**	**49.255,50**		**49.255,50**		**49.255,50**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang					100,00	49.255,50	49.255,50	100,00	49.255,50	100,00	49.255,50	100,00	100,00	100,00	100,00	49.256	0,00	0,00	PUTR
	1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji**							**28.477,00**	**28.477,00**		**14.935,00**		**26.520,00**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen					7,00	28.477,00	28.477,00	4,30	14.935,00	7,00	26.520,00	100,00	93,13	93,13	7,00	26.520	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**96,56**	**96,56**	**53,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**R**		**SR**	**SR**	
	1,03,12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan**							**200.099,50**	**200.099,50**		**137.800,14**		**199.630,96**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penataan ruang yang hasilkan**							**200.099,50**	**200.099,50**		**137.800,14**		**199.630,96**						0,00	0,00	PUTR
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen					3,00	200.099,50	200.099,50	1,19	137.800,14	3,00	199.630,96	100,00	99,77	99,77	3,00	199.631	0,00	0,00	PUTR

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)			K	Rp (000)		
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi					3	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
	1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan**							**-**	**-**		**-**								0,00	0,00	PUTR
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PUTR
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**99,77**	**99,77**	**3,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**168.426.967,260**	**168.384.831,820**		**78.225.386,468**		**138.146.708,208**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				**96,30**	**95,87**	**93,87**	**1211,67**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																			0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1,04,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"**							**3.905.752,462**	**4.042.165,917**		**1.331.480,800**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**"Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan"**							**22.743,95**	**56.428,95**		**36.638,20**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					30	22.743,95	26.223,65	4,02	6.497,90	30,00	26.201,65	100,00	115,20	99,92	30,00	26.202	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					4	-	30.205,30	4,00	30.140,30	4,00	30.140,30	100,00	0,00	99,78	4,00	30.140	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun**							**2.925.065,782**	**2.800.530,296**		**762.707,920**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						30,00	2.822.616,68	2.684.926,15	9,37	739.324,87	30,00	2.681.274,45	100,00	94,99	99,86	30,00	2.681.274	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					1,00	18.063,15	21.563,20	0,20	8.615,05	1,00	21.563,20	100,00	119,38	100,00	1,00	21.563	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1,00	73.110,15	77.290,15	0,14	9.295,00	1,00	71.825,15	100,00	98,24	92,93	1,00	71.825	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	11.275,80	16.750,80	0,00	5.473,00	1,00	16.746,80	100,00	148,52	99,98	1,00	16.747	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis**							**10.000,00**	**-**		**-**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					3,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**							**182.074,69**	**387.368,99**		**238.750,53**								0,00	0,00	Dinas Perkintam

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	1.497,00	3.526,00	3,00	2.764,50	12,00	3.510,00	100,00	234,47	99,55	12,00	3.510	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	66.030,00	87.300,14	3,00	49.000,00	12,00	86.730,00	100,00	131,35	99,35	12,00	86.730	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					12,00	1.498,02	4.644,10	3,00	4.267,95	12,00	4.627,70	100,00	308,92	99,65	12,00	4.628	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12	22.752,220	65.731,51	3,00	46.980,57	12,00	65.613,64	100,00	288,38	99,82	12,00	65.614	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12,00	4.279,45	18.175,25	0,00	13.895,80	12,00	18.175,25	100,00	424,71	100,00	12,00	18.175	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	86.018	207.992,00	3,00	121.841,70	12,00	207.859,70	100,00	241,65	99,94	12,00	207.860	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**33.577,47**	**33.577,47**		**-**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					15,00	33.577,470	33.577,47	0,16	-	15,00	33.230,00	100,00	98,97	98,97	15,00	33.230	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**							**554.760,57**	**564.260,21**		**177.770,75**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	60.000,57	82.500,21	3,00	36.902,99	12,00	81.503,74	100,00	135,84	98,79	12,00	81.504	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	494.760,00	481.760,00	3,00	140.867,76	12,00	453.865,55	100,00	91,73	94,21	12,00	453.866	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum**							**177.530,00**	**200.000,00**		**115.613,40**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					12,00	42.750,00	44.330,00	3,00	12.415,50	12,00	42.477,02	100,00	99,36	95,82	12,00	42.477	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					20,00	134.780,00	155.670,00	10,00	103.197,90	20,00	155.280,41	100,00	115,21	99,75	20,00	155.280	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**161,58**	**98,72**	**12,35**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh**							**302.241,050**	**217.673,950**		**90.611,246**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**"Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota"**							**-**	**-**		**-**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Layak Huni bagi masyarakat Korban bencana atau Relokasi Program Pemerintah**							**302.241,05**	**217.673,95**		**90.611,25**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rumah					20,00	302.241,05	217.673,95	12,00	90.611,25	18,00	176.105,34	90,00	58,27	80,90	18,00	176.105	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rumah					15	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**90,00**	**58,27**	**80,90**	**18,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**T**	**R**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,04,03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau**							**14.617.330,050**	**15.169.759,527**		**6.751.782,535**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Pencegahan Timbulnya Kawasan Kumuh Baru**							**-**	**-**		**-**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh**							**50.000,00**	**71.099,40**		**21.831,00**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	Dokumen					1,00	50.000,00	71.099,40	0,03	21.831,00	1,00	70.384,00	100,00	140,77	98,99	1,00	70.384	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Masyarakat					12,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani**							**14.567.330,05**	**15.098.660,13**		**6.729.951,54**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rumah					40,00	128.474,90	141.196,70	30,00	123.602,00	40,00	138.352,00	100,00	107,69	97,99	40,00	138.352	0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha					10,00	14.438.855,15	14.957.463,43	5,00	6.606.349,54	8,00	10.938.382,48	80,00	75,76	73,13	8,00	10.938.382	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**93,33**	**108,07**	**90,04**	**16,33**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,04,05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum**							**31.100,000**	**31.100,000**		**11.554,500**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan**							**31.100,000**	**31.100,000**		**11.554,500**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi					7,00	31.100,00	31.100,00	3,00	11.554,50	5,00	17.408,30	71,43	55,98	55,98	5,00	17.408	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**71,43**	**55,98**	**55,98**	**5,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**S**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																			0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2,10,04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah**							**10.068,00**	**13.067,85**		**6.790,85**								0,00	0,00	Dinas Perkintam

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah**							**10.068,000**	**13.067,850**		**6.790,850**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus					8,00	10.068,00	13.067,85	3,01	6.790,85	8,00	13.067,85	100,00	129,80	100,00	8,00	13.068	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**129,80**	**100,00**	**8,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,10,05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum**							**13.860.919,950**	**13.647.178,750**		**1.077.465,950**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum**							**13.860.919,950**	**13.647.178,750**		**1.077.465,950**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					14,00	13.860.919,95	13.647.178,75	10,99	1.077.465,95	13,99	2.298.750,95	99,93	16,58	16,84	13,99	2.298.751	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,93**	**16,58**	**16,84**	**13,99**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,10,09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi**							**-**	**53.100,300**		**36.600,300**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10.09.2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**"Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi"**							**-**	**53.100,300**		**36.600,300**								0,00	0,00	Dinas Perkintam
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	Dokumen					200,00	-	53.100,30	138,00	36.600,30	138,00	36.600,30	69,00	0,00	68,93	138,00	36.600	0,00	0,00	Dinas Perkintam
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**69,00**	**0,00**	**68,93**	**138,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**SR**	**S**	**ST**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**32.727.411,512**	**33.174.046,294**		**9.306.286,181**		**17.689.675,775**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**89,10**	**75,75**	**73,06**	**30,24**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PI		**2.348.419,10**	**T**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			0,00	0,00	BPBD
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																			0,00	0,00	BPBD
	1,05,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPBD)**							**1.526.748,78**	**1.525.942,81**		**389.634,21**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan**							**1.344.881,38**	**1.344.075,41**		**322.436,17**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	1.247.703,38	1.251.967,41	3,00	296.918,42	12,00	1.189.844,86	100,00	95,36	95,04	12,00	1.189.845	0,00	0,00	BPBD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	97.178,00	92.108,00	4,85	25.517,75	12,00	92.047,75	100,00	94,72	99,93	12,00	92.048	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**											0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum**							**105.226,80**	**105.222,00**		**42.237,72**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	22.353,80	22.349,00	4,92	9.122,90	12,00	22.317,20	100,00	99,84	99,86	12,00	22.317	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	82.873,00	82.873,00	0,00	33.114,82	12,00	82.872,98	100,00	100,00	100,00	12,00	82.873	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**-**		**-**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**40.206,20**	**40.211,00**		**9.633,54**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	26.090,40	26.090,40	3,41	6.633,54	12,00	25.299,20	100,00	96,97	96,97	12,00	25.299	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	14.115,80	14.120,60	2,55	3.000,00	12,00	14.115,80	100,00	100,00	99,97	12,00	14.116	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**36.434,40**	**36.434,40**		**15.326,78**								0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					12,00	36.434,40	36.434,40	5,05	15.326,78	12,00	36.434,40	100,00	100,00	100,00	12,00	36.434	0,00	0,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					12,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**100,00**	**98,13**	**98,82**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,05,03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpencegahan**							**689.645,000**	**694.715,000**		**237.148,500**										BPBD
	1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**22.780,00**	**22.780,00**		**12.569,80**										BPBD
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang						10,00	22.780,00	22.780,00	3,60	12.569,80	8,08	22.775,55	80,80	99,98	99,98	8,08	22.776	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**-**													BPBD
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang					100,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen					1,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**568.228,00**	**555.228,00**		**146.821,25**										BPBD
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen					12,00	568.228,00	555.228,00	3,72	146.821,25	12,00	552.228,00	100,00	97,18	99,46	12,00	552.228	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					12,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**							**98.637,00**	**116.707,00**		**77.757,45**										BPBD
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPBD
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Dokumen					1,00	98.637,00	116.707,00	0,01	77.757,45	0,83	116.677,69	83,00	118,29	99,97	0,83	116.678	0,00	0,00	BPBD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**87,93**	**105,15**	**99,81**	**6,97**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**2.216.393,779**	**2.220.657,808**		**626.782,708**		**2.154.613,425**					**2.154.613,425**			
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**37,59**	**40,66**	**39,73**	**3,79**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					Satpol PP
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																					Satpol PP
	1,05,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Satpol, Damkar dan Penyelamatan)**							**5.548.413,48**	**5.511.578,24**		**1.322.199,66**										Satpol PP
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satpol.PP dan Damkar**							**65.668,20**	**68.918,20**		**20.582,63**										Satpol PP
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					6,00	65.668,20	68.918,20	1,50	20.582,63	6,00	68.918,15	100,00	104,95	100,00	6,00	68.918	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Satpol PP dan Damkar**							**4.846.366,33**	**4.788.288,59**		**1.103.458,87**										Satpol PP
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						14,00	4.762.386,33	4.704.308,59	3,55	1.085.398,87	13,57	4.558.956,14	96,91	95,73	96,91	13,57	4.558.956	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	72.240,00	72.240,00	3,00	18.060,00	12,00	72.240,00	100,00	100,00	100,00	12,00	72.240	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					1,00	11.740,000	11.740,00	0,00	-	1,00	11.740,00	100,00	100,00	100,00	1,00	11.740	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**							**-**	**-**		**-**										Satpol PP
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**		**-**								0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					382,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Satpol.PP dan Damkar**							**90.956,950**	**91.022,950**		**25.543,100**										Satpol PP
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	24.078,250	24.078,25	0,42	9.998,40	1,00	24.078,25	100,00	100,00	100,00	1,00	24.078	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	7.552,700	7.618,70	0,58	4.718,70	1,00	7.618,70	100,00	100,87	100,00	1,00	7.619	0,00	0,00	Satpol PP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					12		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	59.326,000	59.326,00	0,00	10.826,00	9,80	59.326,00	81,67	100,00	100,00	9,80	59.326	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol.PP dan Damkar**							**34.652,000**	**48.484,500**		**13.832,500**										Satpol PP
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					2	34.652,00	48.484,50	0,00	13.832,50	2,00	48.484,50	100,00	139,92	100,00	2,00	48.485	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa Penunjang Pelayanan Kantor Satpol.PP dan Damkar**							**46.740,000**	**34.740,000**		**14.276,943**										Satpol PP
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	46.740,000	34.740,00	6,60	14.276,94	11,60	33.582,50	96,67	71,85	96,67	11,60	33.582	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol.PP dan Damkar**							**464.030,000**	**480.124,000**		**144.505,621**										Satpol PP
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	10.000,000	10.000,00	0,00	-	1,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	10.000	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					28,00	449.970,000	466.064,00	7,97	143.125,62	27,97	465.664,50	99,89	103,49	99,91	27,97	465.665	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					7,00	4.060,000	4.060,00	2,92	1.380,00	7,00	4.060,00	100,00	100,00	100,00	7,00	4.060	0,00	0,00	Satpol PP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**97,93**	**101,40**	**99,46**	**7,83**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,05,02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan Perda, Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)**							**2.928.447,850**	**2.916.005,350**		**922.702,660**										Satpol PP
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba**							**2.463.100,000**	**2.455.690,000**		**807.862,464**										Satpol PP
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen					12		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan					60,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan					60,00	2.463.100,000	2.455.690,00	14,95	807.862,46	59,95	2.454.070,00	99,92	99,63	99,93	59,95	2.454.070	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit					1		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba**	**%**					**100,00**	**465.347,850**	**460.315,350**		**114.840,196**										Satpol PP
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					3,00	100.375,000	100.375,00	0,00	-	3,00	100.375,00	100,00	100,00	100,00	3,00	100.375	0,00	0,00	Satpol PP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan					12,00	200.332,000	199.499,50	5,10	84.951,20	12,00	199.499,50	100,00	99,58	100,00	12,00	199.500	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					12,00	164.640,850	160.440,85	2,35	29.889,00	11,85	158.440,85	98,75	96,23	98,75	11,85	158.441	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**						**100**	**-**	**-**		**-**										Satpol PP
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,67**	**98,86**	**99,67**	**21,70**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,05,04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM), Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**							**3.153.546,500**	**3.144.746,500**		**1.001.805,000**									Satpol PP
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba**							**3.019.630,000**	**3.010.830,000**		**1.001.605,000**									Satpol PP
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					12		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					12	3.019.630	3.010.830,00	4,00	1.001.605,00	12,00	3.009.370,00	100,00	99,66	99,95	12,00	3.009.370	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota						12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal						12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										Satpol PP
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					14,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran**	**%**					**100**	**-**	**-**		**-**										Satpol PP
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**%**					**100,00**	**133.916,500**	**133.916,500**		**200,000**										Satpol PP
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang					1,00	133.916,500	133.916,50	0,00	200,00	1,00	133.916,50	100,00	100,00	100,00	1,00	133.917	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya						1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen					1		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
	1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Terlakssananya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										Satpol PP
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Satpol PP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**99,83**	**99,98**	**6,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**11.630.407,831**	**11.572.330,088**		**3.246.707,317**		**11.420.340,590**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**99,20**	**100,03**	**99,70**	**12,01**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PI		**13.574.954,015**	**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		DINAS SOSIAL																					
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					DINAS SOSIAL
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																					DINAS SOSIAL
	1,06,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Sosial)**							**2.767.655,785**	**2.765.978,013**		**788.671,761**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**21.667,500**	**30.531,500**		**17.109,740**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4,00	14.306,000	14.306,00	0,62	2.858,00	4,00	14.285,20	100,00	99,85	99,85	4,00	14.285	0,00	0,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					2,00	5.760,500	5.760,50	0,50	4.319,10	2,00	5.611,10	100,00	97,41	97,41	2,00	5.611	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					5,00	1.601,000	10.465,00	5,00	9.932,64	5,00	9.932,64	100,00	620,40	94,91	5,00	9.933	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Capaian Kinerja Kesejahteraan ASN, dan Peningkatan sistem dan capaian Laporan Keuangan**	**%**					**100,00**	**2.307.999,341**	**2.266.349,569**		**561.317,398**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						22,00	2.254.264,041	2.212.614,27	4,80	547.797,40	22,00	2.174.045,70	100,00	96,44	98,26	22,00	2.174.046	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	50.880,000	50.880,00	3,00	12.720,00	12,00	50.880,00	100,00	100,00	100,00	12,00	50.880	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	2.855,300	2.855,30	0,28	800,00	1,00	2.855,30	100,00	100,00	100,00	1,00	2.855	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kinerja, Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai/ASN**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**					**100**	**142.944**	**168.977**		**95.795**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	682,00	1,00	682,00	1,00	682,00	100,00	0,00	100,00	1,00	682	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					6	34.045,750	53.345,75	0,24	39.502,00	6,00	52.802,00	100,00	155,09	98,98	6,00	52.802	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	4.061,400	4.436,40	0,00	375,00	1,00	4.436,40	100,00	109,23	100,00	1,00	4.436	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					7,00	15.000,000	17.798,25	0,50	3.966,00	7,00	17.798,00	100,00	118,65	100,00	7,00	17.798	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12,00	1.500,000	2.100,00	0,00	600,00	12,00	2.100,00	100,00	140,00	100,00	12,00	2.100	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					6,00	3.704,700	5.982,45	1,00	2.277,75	5,50	5.089,56	91,67	137,38	85,07	5,50	5.090	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					40,00	84.632,000	84.632,00	11,00	48.392,29	40,00	84.627,70	100,00	99,99	99,99	40,00	84.628	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa kendaraan roda dua dan meubeleur kantor**	**%**					**100,00**	**9.510,850**	**9.510,850**		**5.520,000**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3	9.510,850	9.510,85	1,50	5.520,00	3,00	9.470,00	100,00	99,57	99,57	3,00	9.470	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meninkatnya Jasa dan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**					**100,00**	**245.854,244**	**250.929,244**		**81.457,127**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	40.214,244	41.939,24	4,00	10.997,13	12,00	36.576,82	100,00	90,95	87,21	12,00	36.577	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	205.640,000	208.990,00	4,00	70.460,00	12,00	208.510,00	100,00	101,40	99,77	12,00	208.510	0,00	0,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintah daerah**	**%**					**100,00**	**39.680,000**	**39.680,000**		**27.472,460**										DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					13,00	37.000,000	37.000,00	6,00	27.472,46	13,00	34.968,41	100,00	94,51	94,51	13,00	34.968	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					15,00	2.680,000	2.680,00	0,00	-	15,00	2.680,00	100,00	100,00	100,00	15,00	2.680	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**105,39**	**138,88**	**103,27**	**10,21**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,06,02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan**							**672.060,000**	**672.060,000**		**224.020,000**										DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kemampuan, Keahlian,Keterampilan, Kesejahteraan serta Potensi Sumber Daya Pekerja Sosial dan Kelembagaan Sosial**							**672.060,000**	**672.060,000**		**224.020,000**										DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					53	642.060,000	642.060,00	18,00	214.020,00	53,00	642.060,00	100,00	100,00	100,00	53,00	642.060	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					10	30.000,000	30.000,00	3,00	10.000,00	10,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	10,00	30.000	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**31,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,06,04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)Persentase Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)**							**154.179,500**	**154.179,500**		**44.867,180**									0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Meningkatnya Layanan Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Kesejahteraan PMKS (Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar Panti Sosial.**							**58.262,500**	**58.262,500**		**9.150,380**										DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					70,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					1,00	58.262,500	58.262,50	0,13	9.150,38	1,00	58.005,19	100,00	99,56	99,56	1,00	58.005	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial**	**%**					**97,00**	**95.917,000**	**95.917,000**		**35.716,800**										DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					15,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					20,00	25.205,000	25.205,00	0,43	-	20,00	25.201,35	100,00	99,99	99,99	20,00	25.201	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					12,00	70.712,000	70.712,00	5,00	35.716,80	12,00	70.659,10	100,00	99,93	99,93	12,00	70.659	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**99,82**	**99,82**	**11,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,06,05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Jumlah PMKS yang Tervalidasi dalam data terpadu DTKS dan SIKS-NGPersentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**							**455.706,000**	**560.859,000**		**420.834,931**									DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Meningkatnya Layanan Penjangkauan, Rujukan dan Pemantauan terhadap Pelaksanaan**							**-**	**-**		**-**									DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Layanan dan Pengelolaan data Fakir Miskin dan PMKS, serta Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keluarga fakir Miskin dan PMKS**	**%**					**96,00**	**455.706,000**	**560.859,000**		**420.834,931**									DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga					50	45.000,000	45.000,00	2,00	700,00	50,00	43.880,69	100,00	97,51	97,51	50,00	43.881	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						47,00	6.670,000	35.543,00	46,00	31.592,93	47,00	34.062,93	100,00	510,69	95,84	47,00	34.063	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					40,00	404.036,000	480.316,00	36,00	388.542,00	40,00	429.055,00	100,00	106,19	89,33	40,00	429.055	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**238,13**	**94,23**	**45,67**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,06,06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**							**612.455,000**	**617.330,000**		**209.482,000**									DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Bantuan Logistik Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**							**134.095,000**	**134.095,000**		**27.803,000**									DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					40,00	120.545,000	120.545,00	6,00	21.028,00	40,00	120.396,00	100,00	99,88	99,88	40,00	120.396	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang					40,00	13.550,000	13.550,00	20,00	6.775,00	40,00	13.550,00	100,00	100,00	100,00	40,00	13.550	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kemamuan Keterampilan Petugas dan Penanggulangan Bencana dalam Penanganan Bencana Alam dan Sosial**	**%**					**100,00**	**478.360,000**	**483.235,000**		**181.679,000**										DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					70	478.360,000	483.235,00	22,00	181.679,00	70,00	481.713,00	100,00	100,70	99,69	70,00	481.713	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**100,19**	**99,85**	**50,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	1,06,07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dipelihara**							**63.986,500**	**63.986,500**		**20.678,750**									DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Menengkatnya Pelestarian Taman Makam Pahlawan, Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN**							**63.986,500**	**63.986,500**		**20.678,750**									DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam					3,00	63.986,500	63.986,50	1,17	20.678,75	3,00	59.645,50	100,00	93,22	93,22	3,00	59.646	0,00	0,00	DINAS SOSIAL
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**93,22**	**93,22**	**3,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**4.726.042,785**	**4.834.393,013**		**1.708.554,622**		**4.725.579,578**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**100,90**	**128,37**	**98,40**	**25,23**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. BULUKUMBA																					
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					DLHK
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																					DLHK
	2,11,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik(Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**	**%**					**100,00**	**4.935.535,536**	**4.901.867,097**		**1.256.044,001**										DLHK
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**					**38**	**30.534,500**	**30.534,500**		**7.858,000**										DLHK
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					28	30.534,500	30.534,50	6,12	7.858,00	27,99	30.317,30	99,97	99,29	99,29	27,99	30.317	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	Laporan					24		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**					**100**	**4.638.818,624**	**4.578.512,370**		**1.164.042,444**										DLHK
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						54,00	4.283.575,374	4.223.269,12	12,99	1.051.400,54	53,99	4.219.426,22	99,98	98,50	99,91	53,99	4.219.426	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1,00	345.775,000	345.775,00	0,25	110.540,00	1,00	344.245,00	99,99	99,56	99,56	1,00	344.245	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	Laporan					5	9.468,250	9.468,25	1,05	2.101,90	5,00	9.463,15	100,00	99,95	99,95	5,00	9.463	0,00	0,00	DLHK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III** **Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**					**0**	**-**	**-**		**-**										DLHK
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Administrasi Umum** **Persentase Pemenuhan administrasi umum**	**%**					**100**	**84.719,580**	**84.719,580**		**16.330,150**										DLHK
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	1.308,350	1.308,35	0,03	-	1,00	1.276,25	100,00	97,55	97,55	1,00	1.276	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	32.258,680	32.258,68	0,33	3.810,00	1,00	32.063,30	99,99	99,39	99,39	1,00	32.063	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	2.461,550	2.461,55	0,01	1.236,55	1,00	2.461,55	100,00	100,00	100,00	1,00	2.462	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						240,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					45,00	48.691,000	48.691,00	10,54	11.283,60	44,99	48.574,29	99,98	99,76	99,76	44,99	48.574	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah** **Persentase Pemenuhan kebutahan barang milik daerah**	**%**					**100**	**-**	**-**		**-**										DLHK
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintah** **Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**%**					**100**	**133.962,832**	**155.600,647**		**44.415,407**										DLHK
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	133.962,832	155.600,65	3,00	44.415,41	12,00	153.376,72	99,99	114,49	98,57	12,00	153.377	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah** **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Bulan**					**12**	**47.500,000**	**52.500,000**		**23.398,000**										DLHK
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					40,00	43.600,000	48.600,00	10,00	23.398,00	40,00	48.195,00	100,00	110,54	99,17	40,00	48.195	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					22,00	3.900,000	3.900,00	5,00	-	22,00	3.820,00	100,00	97,95	97,95	22,00	3.820	0,00	0,00	DLHK
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**91,66**	**93,08**	**90,92**	**17,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2,11,02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**	**%**					**90,00**	**307.851,700**	**307.851,700**		**13.045,770**										DLHK
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RPPLH dan Daya Dukung Daya Tampung LH**	**Dokumen**					**2,00**	**-**	**-**		**-**										DLHK
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**Dokumen**					**2,00**	**307.851,700**	**307.851,700**		**13.045,770**										DLHK
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen					2,00	307.851,700	307.851,70	0,01	13.045,77	2,00	307.701,70	100,00	99,95	99,95	2,00	307.702	0,00	0,00	DLHK
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**100,00**	**99,95**	**99,95**	**2,00**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di kabupaten/kota**							**960.333,600**	**960.333,600**		**583.609,174**										DLHK
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk untuk menjaga Kerusakan Lingkungan Akibat Perubahan Iklim**							**960.333,600**	**960.333,600**		**583.609,174**										DLHK
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					6,00	454.774,250	454.774,25	1,15	209.216,95	5,65	284.142,54	94,17	62,48	62,48	5,65	284.143	0,00	0,00	DLHK
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen					12,00	505.559,350	505.559,35	2,94	374.392,22	11,94	503.220,20	99,53	99,54	99,54	11,94	503.220	0,00	0,00	DLHK
	2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bulukumba**							**-**													DLHK
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Presentase Terahibilitasinya kawasan Pantai Lahan Kritis**							**-**													DLHK
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**96,85**	**81,01**	**81,01**	**8,80**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase Terjaganya Kelestarian Sumber Daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora Dan Fauna) Serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan Tahura Dikecamatan**							**-**													DLHK
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**% Pemenuhan Taman Kehati dan TAHURA yang dikelolah dengan baik**							**-**													DLHK
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha					384,70	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2,11,05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**							**139.857,400**	**139.857,400**		**96.539,438**										DLHK
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**persentase limbah B3 yang dkendalikan dengan baik**							**139.857,400**	**139.857,400**		**96.539,438**										DLHK
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan					1,00	139.857,400	139.857,40	0,47	96.539,44	0,97	135.826,60	97,12	97,12	97,12	0,97	135.827	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**97,12**	**97,12**	**97,12**	**0,97**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Perusahaan Yang Memiliki Izin K3Presentase Penyelesaian Terhadap Pengaduan Lingkungan HidupPersentase Ketersediaan Data Potensi Kerusakan 10 Kecamatan Dan Peningkatan 10 Kecamatan Tentang Upaya**							**-**	**-**		**-**										DLHK
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pembinaan dan Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin LH dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota**							**-**	**-**		**-**										DLHK
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**									DLHK
	2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan HAK MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**									DLHK
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat**							**257.634,000**	**257.634,000**		**134.859,100**										DLHK
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase pengetahuan masyarakat di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup**							**257.634,000**	**257.634,000**		**134.859,100**										DLHK
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen					30	257.634,000	257.634,00	10,84	134.859,10	29,84	256.265,50	99,47	99,47	99,47	29,84	256.266	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,47**	**99,47**	**99,47**	**29,84**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**							**4.855,000**	**4.855,000**		**2.202,000**										DLHK
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Presetase Tindak lanjut Pengaduan**							**4.855,000**	**4.855,000**		**2.202,000**										DLHK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kasus					25,00	4.855,000	4.855,00	10,00	2.202,00	25,00	4.855,00	100,00	100,00	100,00	25,00	4.855	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**25,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,11,11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Presentase Sampah Yang Terkelolah**							**6.416.151,750**	**6.475.052,470**		**2.096.134,046**									DLHK
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**% Pemenuhan Sampah yang terkelolah**							**6.416.151,750**	**6.475.052,470**		**2.096.134,046**									DLHK
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Orang					160,00	90.896,000	90.896,00	39,50	26.422,00	159,50	90.619,38	99,69	99,70	99,70	159,50	90.619	0,00	0,00	DLHK
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	Bulan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton					65304	6.325.255,750	6.384.156,47	20799,32	2.069.712,05	65049,31	6.359.423,90	99,61	100,54	99,61	65049,31	6.359.424	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,65**	**100,12**	**99,65**	**32604,41**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**13.022.218,986**	**13.047.451,267**		**4.182.433,529**		**12.835.273,590**								
																68,47	**67,07**	**66,81**	**3268,85**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**S**	**S**	**S**	**ST**		**SR**	**SR**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																					DLHK
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**								**-**													DLHK
	328,04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Konservasi daya hayati dan ekosistem yang terlaksana**							**37.602,000**	**37.602,000**		**4.228,000**									DLHK
	3.28.04.2.01	**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**% Pemenuhan Terjaganya Kelestarian Sumber daya,Fungsi Kawasan Hutan ,Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) serta Rekonstruksi Tata Batas Pada Kawasan TAHURA dikecamatan Bt.Bahari**							**37.602,000**	**37.602,000**		**4.228,000**									DLHK
	3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha					3475,00	37.602,000	37.602,00	390,94	4.228,00	3475,00	37.602,00	100,00	100,00	100,00	3475,00	37.602	0,00	0,00	DLHK
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DLHK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3475,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**12.872.875,590**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**37.602,000**	**37.602,000**		**4.228,000**		**37.602,000**								
																100,00	**100,00**	**100,00**	**3475,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BULUKUMBA																					Duk Capil

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					Duk Capil
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					Duk Capil
	2,12,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)							3.647.737,896	3.601.982,019		777.116,778										Duk Capil
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra, renja, SOP, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKT, Sirup, dan IKU.Tersusunnya RKATersusunnya RKA-PTersusunnya DPATersusunnya							17.146,300	17.146,300		4.777,000										Duk Capil
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					10,00	5.341,050	5.341,05	0,36	194,95	9,57	5.113,40	95,74	95,74	95,74	9,57	5.113	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	1.675,800	1.675,80	0,64	1.066,45	1,00	1.675,80	100,00	100,00	100,00	1,00	1.676	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00	1.498,000	1.498,00	0,50	759,50	1,00	1.498,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1.498	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	7.517,400	7.517,40	0,29	2.201,00	1,00	7.517,40	100,00	100,00	100,00	1,00	7.517	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1,00	1.114,050	1.114,05	0,50	555,10	1,00	1.111,95	99,81	99,81	99,81	1,00	1.112	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASNLancarnya administrasi pelaksanaan Tugas ASNLancarnya penatausahaan keuangan SKPDLancarnya penyusunan akuntansi SKPDTersusunnya laporan akhir tahunTersedianya bahan tanggapan pemeriksaan.Tersusunnya laporan keuangan secara berjenjangTersusunnya laporan akhir tahun	%					100,00	2.457.081,646	2.411.325,769		480.756,181										Duk Capil
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan					29,00	2.401.102,846	2.355.346,97	8,19	467.089,73	28,19	2.203.265,92	97,21	91,76	93,54	28,19	2.203.266	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	53.130,000	53.130,00	3,00	13.282,50	12,00	53.130,00	100,00	100,00	100,00	12,00	53.130	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	2.080,900	2.080,90	0,00	-	1,00	2.080,90	100,00	100,00	100,00	1,00	2.081	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					1,00	767,900	767,90	0,50	383,95	1,00	767,90	100,00	100,00	100,00	1,00	768	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sapras kedisipilinan pegawai, Tersedianya pakaian dinas, Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai, Terlaksananya sistem informasi kepegawaian, Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tupoksi						100,00	-	-		-										Duk Capil
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor, Tersedianya bahan logistik kantor , tersedianya barang cetak						100,00	482.482,870	482.482,870		133.297,315										Duk Capil
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	4.042,000	4.042,00	0,31	1.242,00	0,31	1.242,00	31,00	30,73	30,73	0,31	1.242	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	1.331,300	1.331,30	0,44	591,25	0,99	1.317,50	98,96	98,96	98,96	0,99	1.318	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	255.408,620	255.408,62	0,15	36.553,65	0,98	249.340,56	97,60	97,62	97,62	0,98	249.341	0,00	0,00	Duk Capil

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	5.312,950	5.312,95	0,21	1.560,10	0,95	5.027,90	95,00	94,63	94,63	0,95	5.028	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	216.388,000	216.388,00	1,29	93.350,32	12,00	216.388,00	100,00	100,00	100,00	12,00	216.388	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**"Tersedianya Kendaraan dinas operasional/ lapangan, Tersedianya Mebel, Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya aset tetap lainnya, Tersedianya Gedung Kantor atau bangunan lainnya, Tersedianya Sarana dan**						**100**	**428.458,500**	**428.458,500**		**23.870,000**											Duk Capil
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	24.458,500	24.458,50	0,98	23.870,00	0,98	23.870,00	97,50	97,59	97,59	0,98	23.870	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					10	404.000,000	404.000,00	0,00	-	9,82	404.000,00	98,24	100,00	100,00	9,82	404.000	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**"Tersedianya Jasa Surat menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa pelayanan umum**	**%**					**100,00**	**141.218,580**	**141.218,580**		**43.121,789**											Duk Capil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	86.018,580	86.018,58	5,19	25.971,79	12,00	86.018,58	100,00	100,00	100,00	12,00	86.019	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	55.200,000	55.200,00	3,00	17.150,00	12,00	53.950,00	100,00	97,74	97,74	12,00	53.950	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan beserta pembayaran pajaknya, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional beserta pembayaran pajaknya, Terpeliharanya mebel kantor, Terlaksananya**						**100,00**	**121.350,000**	**121.350,000**		**91.294,493**											Duk Capil
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	43.200,000	43.200,00	0,74	31.981,01	0,97	42.102,77	97,40	97,46	97,46	0,97	42.103	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					9,00	39.010,000	39.010,00	6,21	26.033,50	8,93	38.724,68	99,22	99,27	99,27	8,93	38.725	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					20,00	39.140,000	39.140,00	17,00	33.279,98	17,18	33.629,98	85,90	85,92	85,92	17,18	33.630	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**90,62**	**90,33**	**90,41**	**6,04**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,12,02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk**							**596.691,450**	**596.691,450**		**202.016,250**										Duk Capil
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kecamatan yg mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**							**596.691,450**	**596.691,450**		**202.016,250**										Duk Capil

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen					12	18.608,000	18.608,00	2,88	7.990,00	12,00	18.595,00	100,00	99,93	99,93	12,00	18.595	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang					150,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan					12,00	578.083,450	578.083,45	4,03	194.026,25	12,00	578.037,00	100,00	99,99	99,99	12,00	578.037	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.02.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**terbinanya dan diawasinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Bulan**					**12,00**	**-**	**-**		**-**										Duk Capil
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**99,96**	**99,96**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,12,03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan akta kelahiran, cakupan penerbitan akta kematian, rasio pasangan berakta nikah, rasio bayi berakta kelahiran.**							**242.199,800**	**242.199,800**		**81.178,650**										Duk Capil
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan, analisis dokumen kependudukan**							**242.199,800**	**242.199,800**		**81.178,650**										Duk Capil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan					12,00	230.460,00	230.460,00	3,97	76.315,00	12,00	230.460,00	100,00	100,00	100,00	12,00	230.460	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen					12,00	11.739,800	11.739,80	5,42	4.863,65	12,00	11.301,80	100,00	96,27	96,27	12,00	11.302	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal terkait, koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil.**							**-**	**-**		**-**										Duk Capil
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan					10	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya supervisi bersama dengan instansi vertikal.**							**-**	**-**		**-**										Duk Capil
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan						2,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**98,13**	**98,13**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,1204	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah saluran sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil**	**Buah**					**3,00**	**46.256,950**	**46.256,950**		**13.757,249**										Duk Capil

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**terlaksananya pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan**	**%**					**100,00**	**28.473,400**	**28.473,400**		**8.779,400**										Duk Capil
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen					10,00	13.446,400	13.446,40	1,92	4.389,95	10,00	13.446,40	100,00	100,00	100,00	10,00	13.446	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen					1,00	15.027,000	15.027,00	0,29	4.389,45	1,00	15.016,65	99,90	99,93	99,93	1,00	15.017	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**	**%**					**100,00**	**17.783,550**	**17.783,550**		**4.977,849**										Duk Capil
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan					12,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan					4,00	13.033,850	13.033,85	1,19	3.879,85	4,00	13.033,85	100,00	100,00	100,00	4,00	13.034	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan					12,00	4.749,700	4.749,70	2,78	1.098,00	11,92	4.716,70	99,30	99,31	99,31	11,92	4.717	0,00	0,00	Duk Capil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**99,80**	**99,81**	**99,81**	**6,73**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38395	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Pesentase buku agregat kependudukan yang diterbitkan per tahun**						**-**	**-**		**-**											Duk Capil
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**tersusunnya dokumen Profil Kependudukan**						**-**	**-**		**-**											Duk Capil
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Duk Capil
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**4.532.886,096**	**4.487.130,219**		**1.074.068,927**		**4.316.380,643**								
									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							**78,08**	**77,65**	**77,66**	**7,35**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					DPMD
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																					DPMD
	2,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)**							**3.378.537,580**	**3.321.478,591**		**705.038,722**										DPMD
	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksanananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							**18.162,000**	**17.179,400**		**6.262,150**										DPMD
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					9,00	14.102,000	13.119,40	1,00	3.707,15	9,00	13.054,18	100,00	92,57	99,50	9,00	13.054	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	4.060,000	4.060,00	3,00	2.555,00	12,00	4.060,00	100,00	100,00	100,00	12,00	4.060	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**							**2.926.658,623**	**2.869.599,634**		**566.675,728**										DPMD
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						33,00	2.879.691,023	2.805.632,23	8,00	538.901,68	33,00	2.787.277,00	100,00	96,79	99,35	33,00	2.787.277	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	43.460,000	60.459,80	3,00	25.761,20	12,00	60.088,70	100,00	138,26	99,39	12,00	60.089	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					6,00	3.507,600	3.507,60	3,00	2.012,85	6,00	3.507,35	100,00	99,99	99,99	6,00	3.507	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					18,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**							**5.180,000**	**5.180,000**		**1.435,000**										DPMD
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	5.180,000	5.180,00	0,03	1.435,00	2,00	5.180,00	100,00	100,00	100,00	2,00	5.180	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**27.625,000**	**27.625,000**		**-**										DPMD
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					35,00	27.625,000	27.625,00	3465,00	-	3500,00	27.625,00	10000,00	100,00	100,00	3500,00	27.625	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**110.207,220**	**110.207,220**		**48.051,994**										DPMD
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					25,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	3.874,000	3.874,00	99,50	3.367,80	100,00	3.873,60	10000,00	99,99	99,99	100,00	3.874	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					5,00	56.812,220	56.812,22	1,83	30.233,70	5,00	56.808,67	100,00	99,99	99,99	5,00	56.809	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					2,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	49.521,000	49.521,00	3,00	14.450,49	12,00	49.339,49	100,00	99,63	99,63	12,00	49.339	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**53.975,900**	**53.975,900**		**-**										DPMD
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					18	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					16	53.975,900	53.975,90	1,00	-	16,00	53.580,00	100,00	99,27	99,27	16,00	53.580	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**199.489,475**	**200.472,075**		**62.075,000**										DPMD
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	8.749,475	9.732,08	5,00	-	12,00	9.642,04	100,00	110,20	99,07	12,00	9.642	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	190.740,000	190.740,00	3,00	62.075,00	12,00	189.740,00	100,00	99,48	99,48	12,00	189.740	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan**							**37.239,362**	**37.239,362**		**20.538,850**										DPMD
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	21.164,406	21.164,41	0,00	15.986,85	1,00	20.151,26	100,00	95,21	95,21	1,00	20.151	0,00	0,00	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					6	8.204,956	8.204,96	3,00	2.362,00	6,00	5.696,08	100,00	69,42	69,42	6,00	5.696	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					68	7.870,000	7.870,00	23,76	2.190,00	68,00	7.870,00	100,00	100,00	100,00	68,00	7.870	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**1258,82**	**94,17**	**91,78**	**223,88**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	2,13,02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik**	**%**					**60**	**-**	**-**		**-**										DPMD
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang memiliki Penataan Wilayah Desa Yang Baik**	**%**					**60**	**-**	**-**		**-**										DPMD
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa					90	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,13,03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Adanya kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa**							**29.999,700**	**29.999,700**		**6.295,700**										DPMD
	2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi**							**29.999,700**	**29.999,700**		**6.295,700**										DPMD
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen					54,00	29.999,700	29.999,70	11,00	6.295,70	54,00	29.933,79	100,00	99,78	99,78	54,00	29.934	0,00	0,00	DPMD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**99,78**	**99,78**	**54,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**R**		**SR**	**SR**	
	2,13,04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**							**1.742.579,650**	**1.799.930,242**		**450.642,284**										DPMD
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**							**1.742.579,650**	**1.799.930,242**		**450.642,284**										DPMD
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen					12,00	1.729.668,300	1.787.018,89	3,00	447.080,13	12,00	1.786.416,10	100,00	103,28	99,97	12,00	1.786.416	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen					80,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan					12	12.911,350	12.911,35	3,00	3.562,15	12,00	12.885,35	100,00	99,80	99,80	12,00	12.885	0,00	0,00	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun						109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa					25,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Orang					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**101,54**	**99,88**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,13,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah dan provinsi**	**%**					**100,00**	**562.670,500**	**562.670,500**		**362.515,020**										DPMD
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**%**					**100,00**	**562.670,500**	**562.670,500**		**362.515,020**										DPMD
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Desa					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga					654,00	15.670,500	15.670,50	69,98	1.491,00	654,00	15.485,00	100,00	98,82	98,82	654,00	15.485	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen					10	547.000,000	547.000,00	3,00	361.024,02	10,00	524.576,00	100,00	95,90	95,90	10,00	524.576	0,00	0,00	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga					109,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	97,36	97,36	332,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	ST		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									5.713.787,430	5.714.079,033		1.524.491,726		5.666.789,603								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					311,76	78,57	77,76	124,38		0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			ST	T	T	ST		SR	SR	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				DPPKB P3A
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				DPPKB P3A
	2,08,02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Daerah APBD							100.000,000	100.000,000		99.892,150									DPPKB P3A
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Daerah							-	-		-									DPPKB P3A
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					27	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial							100.000,000	100.000,000		99.892,150									DPPKB P3A
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					5	100.000,000	100.000,00	4,99	99.892,15	4,99	99.892,15	99,89	99,89	99,89	4,99	99.892	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					99,89	99,89	99,89	4,99		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	2,08,03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%					100,00	169.513,000	169.513,000		66.929,650								0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%					45	39.040,000	39.040,000		18.254,000										DPPKB P3A
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					5,00	39.040,000	39.040,00	2,35	18.254,00	4,84	37.762,00	96,73	96,73	96,73	4,84	37.762	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komrehensif	%					50	107.138,000	107.138,000		29.723,150										DPPKB P3A
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					16,00	107.138,000	107.138,00	4,43	29.723,15	4,43	29.723,15	27,71	27,74	27,74	4,43	29.723	0,00	0,00	DPPKB P3A

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi**	**%**					**50,00**	**23.335,000**	**23.335,000**		**18.952,500**										DPPKB P3A
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang					6	23.335,000	23.335,00	4,87	18.952,50	5,90	22.952,50	98,36	98,36	98,36	5,90	22.953	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**74,27**	**74,28**	**74,28**	**5,06**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**S**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38025	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Jumlah Layanan Pembinaan Keluarga**							**148.000,000**	**148.000,000**	0,00	**30.680,100**	0,00	132.114,62	0,00	89,27	89,27	0,00	132.115	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan pembelajaran keluarga yang terstandarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Persentase layanan pembelajaran keluarga yg terstandarisasiembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**								**148.000,000**	**148.000,000**		**30.680,100**									DPPKB P3A
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Keluarga					6,00	148.000,000	148.000,00	1,82	30.680,10	5,36	132.114,62	89,27	89,27	89,27	5,36	132.115	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.04.2.03	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Persentase penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**-**	**-**	**-**											DPPKB P3A
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Keluarga					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**89,27**	**89,27**	**89,27**	**5,36**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38756	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak**							**152.000,000**	**152.000,000**		**46.780,000**									DPPKB P3A
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha**							**152.000,000**	**152.000,000**		**46.780,000**									DPPKB P3A
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi					2,00	152.000,000	152.000,00	0,45	46.780,00	1,97	149.644,71	98,45	98,45	98,45	1,97	149.645	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak**							**-**	**-**		**-**									DPPKB P3A
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					20,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**98,45**	**98,45**	**98,45**	**1,97**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	39121	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**							**236.487,000**	**236.487,000**		**108.012,660**										DPPKB P3A
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengembangan model pencegahan kekerasan terhadap anak**							**62.460,000**	**62.460,000**		**31.004,000**										DPPKB P3A
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang					75	62.460,000	62.460	42,00	31.004,00	72,00	60.121,00	96,00	96,26	96,26	72,00	60.121	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.07.2.01.0004	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**128.342,000**	**128.342,000**		**41.676,660**										DPPKB P3A
	2.08.07.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Persentase Jumlah layanan AMPK yang memerlukan koordinasi	%					100	128.342,000	128.342	32,47	41.676,66	71,90	92.279,52	71,90	71,90	71,90	71,90	92.280	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.08.07.2.01.0004	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**45.685,000**	**45.685,000**		**35.332,000**										DPPKB P3A
	2.08.07.2.01.0004	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Persentase jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	%					100	45.685,000	45.685	71,43	35.332,00	100,00	45.394,50	100,00	99,36	99,36	100,00	45.395	0,00	0,00	DPPKB P3A
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**806.000,000**	**806.000,00**		**352.294,56**		**669.884,15**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	**#REF!**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**		**#REF!**	**#REF!**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																				DPPKB P3A
	36936	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PPKB, PPPA)**							**5.046.341,948**	**4.991.924,485**		**1.259.351,856**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, peganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**							**77.999,200**	**89.231,150**		**51.971,300**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4,00	27.999,300	30.546,25	-0,07	8.222,75	3,05	23.255,55	76,13	83,06	76,13	3,05	23.256	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					2,00	49.999,900	58.684,90	0,72	43.748,55	1,90	55.733,55	94,97	111,47	94,97	1,90	55.734	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu**							**4.482.426,058**	**4.402.228,495**		**1.065.294,466**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	4.410.048,058	4.325.630,50	3,00	1.038.095,47	12,00	4.234.120,37	100,00	96,01	97,88	12,00	4.234.120	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	67.860,000	70.260,00	3,00	26.215,00	12,00	70.260,00	100,00	103,54	100,00	12,00	70.260	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	4.518,000	6.338,00	0,00	984,00	0,78	4.518,00	78,22	100,00	71,28	0,78	4.518	0,00	0,00	DPPKB P3A

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)		RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.14.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang tersusun**							**7.499,800**	**8.794,800**		**4.453,400**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1,00	7.499,800	8.794,80	0,42	4.453,40	1,00	8.750,40	99,50	116,68	99,50	1,00	8.750	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**							**-**	**-**		**-**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor**							**102.082,000**	**118.387,200**		**25.283,825**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	54.458,800	54.458,80	0,06	6.931,35	0,96	52.047,55	95,57	95,57	95,57	0,96	52.048	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	4.457,200	7.457,40	0,50	4.482,50	1,00	7.456,20	99,98	167,28	99,98	1,00	7.456	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					24,00	43.166,000	56.471,00	0,33	13.869,98	23,98	56.419,57	99,91	130,70	99,91	23,98	56.420	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**							**-**	**-**		**-**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					115,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**319.174,890**	**316.122,840**		**92.177,365**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	73.794,890	70.742,84	2,43	12.411,37	9,85	58.064,46	82,08	78,68	82,08	9,85	58.064	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	245.380,000	245.380,00	3,90	79.766,00	11,76	240.456,00	97,99	97,99	97,99	11,76	240.456	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara/ direhabilitasi**							**57.160,000**	**57.160,000**		**20.171,500**										DPPKB P3A
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	12.500,000	12.500,00	0,03	2.949,50	0,53	6.677,35	53,42	53,42	53,42	0,53	6.677	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					5,00	30.000,000	30.000,00	0,35	9.462,00	3,35	20.087,00	66,96	66,96	66,96	3,35	20.087	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					20,00	14.660,000	14.660,00	10,00	7.760,00	20,00	14.660,00	100,00	100,00	100,00	20,00	14.660	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**88,91**	**100,10**	**88,26**	**7,30**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**T**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2,14,02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Pembinaan Kebijakan Dan Strategi Pengendalian Penduduk (Penyusunan Grand Design , Penyusunan Profil Kependudukan/Paremeter Dan Proyeksi Penduduk)**							**502.061,600**	**502.061,600**		**258.669,357**										DPPKB P3A
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**sinkronisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantias penduduk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**364.461,600**	**364.461,600**		**211.177,750**										DPPKB P3A
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan					5,00	264.461,600	264.461,60	2,40	158.525,50	4,90	257.976,71	98,00	97,55	97,55	4,90	257.977	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))						1,00	100.000,000	100.000,00	0,55	52.652,25	0,85	84.813,00	84,81	84,81	84,81	0,85	84.813	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Bahan-bahan dan data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia Bahan-bahan dan Data untuk pengambilan kebijakan pemetaan pengendalian penduduk yang tersedia**							**137.600,000**	**137.600,000**		**47.491,607**										DPPKB P3A
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan					12	27.600,000	27.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen					12	110.000,000	110.000,00	1,67	47.491,61	10,67	97.265,56	88,92	88,42	88,42	10,67	97.266	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Keluarga					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**67,93**	**67,70**	**67,70**	**4,10**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**S**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
	37666	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Program Keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi Dan Kelembagaan Jaringan KB**							**5.342.261,900**	**5.342.261,800**		**3.423.821,100**										DPPKB P3A
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang terlaksana Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Didayagunakan**							**1.387.600,000**	**1.387.600,000**		**873.583,000**										DPPKB P3A
	2.14.03.2.01.0010	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan					8	160.000,000	160.000,00	3,80	112.479,50	6,80	134.574,50	85,00	84,11	84,11	6,80	134.575	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.01.0011	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan					10	556.000,000	556.000,00	6,93	295.818,60	9,93	551.978,60	99,28	99,28	99,28	9,93	551.979	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.01.0012	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan					10	150.000,000	150.000,00	4,60	87.000,00	9,60	144.000,00	96,00	96,00	96,00	9,60	144.000	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.01.0013	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dok					2	181.600,000	181.600,00	1,78	161.388,50	1,78	161.388,50	88,87	88,87	88,87	1,78	161.389	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi					19,00	340.000,000	340.000,00	9,97	216.896,40	16,87	301.847,40	88,78	88,78	88,78	16,87	301.847	0,00	0,00	DPPKB P3A

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.14.03.2.03	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							**1.057.800,000**	**1.057.800,000**		**245.118,000**										DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0001	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang					68	-	408.000,00	27,20	163.200,00	68,00	408.000,00	100,00	0,00	100,00	68,00	408.000	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan					4,00	649.800,000	649.800,00	0,00	81.918,00	2,00	533.178,00	50,00	82,05	82,05	2,00	533.178	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang					68,00	408.000,000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0003	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga**	**Laporan**					**4,00**	**1.429.554,000**	**1.429.554,000**		**1.030.934,000**										DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					21,00	22.500,000	22.500,00	2,69	3.030,00	12,69	13.600,00	60,44	60,44	60,44	12,69	13.600	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang					100,00	647.878,000	647.878,00	66,66	431.800,00	92,72	600.700,00	92,72	92,72	92,72	92,72	600.700	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit					19,00	738.876,000	738.876,00	8,76	587.854,00	18,76	729.554,00	98,74	98,74	98,74	18,76	729.554	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					11,00	20.300,000	20.300,00	3,37	8.250,00	8,37	15.450,00	76,11	76,11	76,11	8,37	15.450	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah pelayanan KB dan KR bergerak/bakti sosial diwilayah dan sasaran khusus**							**1.467.307,900**	**1.467.307,800**		**1.274.186,100**										DPPKB P3A
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi					5,00	534.057,900	534.057,80	2,85	391.058,10	4,70	502.086,35	94,00	94,01	94,01	4,70	502.086	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.04.0006	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit					45,00	660.000,000	660.000,00	41,78	612.788,00	44,92	658.878,00	99,83	99,83	99,83	44,92	658.878	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung					20,00	273.250,000	273.250,00	19,79	270.340,00	20,00	273.200,00	99,98	99,98	99,98	20,00	273.200	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**87,84**	**82,92**	**90,07**	**22,65**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,14,04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Jumlah Kecamatan terkait Keluarga Yang Mandiri, Tentram Dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)**							**2.453.100,000**	**2.453.100,000**		**1.536.171,788**										DPPKB P3A
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlaksana Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana**							**330.000,000**	**330.000,000**		**217.713,788**										DPPKB P3A

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit					19,00	180.000,000	180.000,00	14,74	139.650,00	14,74	139.650,00	77,58	77,58	77,58	14,74	139.650	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang					20,00	150.000,000	150.000,00	8,46	78.063,79	18,46	138.449,77	92,30	92,30	92,30	18,46	138.450	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi**							**2.123.100,000**	**2.123.100,000**		**1.318.458,000**										DPPKB P3A
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.02.0001	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan					10,00	1.011.000,000	1.011.000,00	5,00	505.500,00	10,00	1.011.000,00	100,00	100,00	100,00	10,00	1.011.000	0,00	0,00	DPPKB P3A
	2.14.04.2.02.0001	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan					10,00	1.112.100,000	1.112.100,00	7,31	812.958,00	9,90	1.100.718,00	98,98	98,98	98,98	9,90	1.100.718	0,00	0,00	DPPKB P3A
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**92,22**	**92,21**	**92,21**	**13,27**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**13.343.765,448**	**13.289.347,885**		**6.478.014,101**		**12.710.814,396**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**77,64**	**78,31**	**77,79**	**7,19**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		DINAS PERHUBUNGAN KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	Dishub
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																			0,00	0,00	Dishub
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**-**											0,00	0,00	Dishub

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	37626	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase jumlah aparatur yang mengikuti tanggap bencana (Fasilitasi Petugas Reviter dan Tsunami)**							-	-		-								0,00	0,00	Dishub
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Pelayanaan pencegahan dan kesiap-siagaan bencana**							-	-		-								0,00	0,00	Dishub
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dok					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				Dishub
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																				Dishub
	2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik ((Dinas Perhubungan)**							**17.670.129,815**	**18.481.289,717**		**4.687.766,199**										Dishub
	2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Program SKPD dan Renstra, Lakip.Iku, RKA, DPA, RA, Perjanjian Kinerja SPIP, tersedianya monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD terlaksanya**							-	-		-										Dishub
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi keuangan**							**4.359.289,857**	**4.135.734,059**		**1.065.717,116**										Dishub
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan					51,00	4.247.263,707	4.016.342,01	7,63	1.031.443,62	49,63	3.908.126,73	97,31	92,02	97,31	49,63	3.908.127	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					1	37.215,150	43.910,90	0,20	17.262,00	0,95	41.905,70	95,43	112,60	95,43	0,95	41.906	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	74.811,000	75.481,15	2,47	17.011,50	11,47	72.151,10	95,58	96,44	95,59	11,47	72.151	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Tersedianya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur**							-	-		-										Dishub
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Umum**							**67.459,250**	**76.427,250**		**46.533,669**										Dishub
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					70,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	30.972,00	9.850,00	2,78	9.500,00	2,78	9.500,00	69,45	30,67	96,45	2,78	9.500	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12	13.705,70	13.705,70	2,94	4.645,30	11,94	13.633,70	99,47	99,47	99,47	11,94	13.634	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					34	22.781,55	52.871,55	3,46	32.388,37	34,00	52.869,57	100,00	232,07	100,00	34,00	52.870	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**							-	-		-										Dishub
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Peningkatan pelayanan administrasi Umum**							**13.204.380,708**	**14.230.128,408**		**3.554.848,914**										Dishub
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	13.080.758,508	14.106.506,21	2,30	3.521.081,91	11,99	14.093.249,19	99,91	107,74	99,91	11,99	14.093.249	0,00	0,00	Dishub

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)			K	Rp (000)		
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	123.622,20	123.622,20	2,49	33.767,00	11,49	118.389,37	95,77	95,77	95,77	11,49	118.389	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pelayanan adminitrasi umum**							**39.000,00**	**39.000,00**		**20.666,50**										Dishub
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					0,00	39.000,000	39.000,00	0,00	20.666,50	0,00	28.961,84	0,00	74,26	74,26	0,00	28.962	0,00	0,00	Dishub
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**83,66**	**104,56**	**94,91**	**14,92**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	37302	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C Persentase tersedianya fasilitas penyelengaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C**							**6.154.490,00**	**6.822.871,00**		**5.966.756,00**										Dishub
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan di kabupaten/Kota yang tersedia**							**5.361.110,00**	**6.036.991,00**		**5.765.616,00**										Dishub
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit					40,00	5.150.000,000	5.176.000,00	39,15	5.066.286,00	39,54	5.116.236,00	98,85	99,34	98,85	39,54	5.116.236	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit					120,00	-	634.715,00	0,00	634.715,00	0,00	634.715,00	0,00	0,00	100,00	0,00	634.715	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit					16,00	211.110,000	226.276,00	3,77	64.615,00	15,88	224.590,00	99,25	106,39	99,25	15,88	224.590	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Peningkatan pelayanan dan keberfungsian terminal Tipe C**							**351.660,00**	**348.960,00**		**91.815,00**										Dishub
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang					83,00	351.660,00	348.960,00	19,00	91.815,00	83,00	348.960,00	100,00	99,23	100,00	83,00	348.960	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Terlaksanya pengujian kendaraan bermotor Uji kear**							**36.060,00**	**36.060,00**		**8.510,00**										Dishub
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit					1,00	36.060,00	36.060,00	0,24	8.510,00	0,99	35.555,00	98,60	98,60	98,60	0,99	35.555	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan Tersedianya angkutan umum bagi masyarakat, terwujudnya pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan**							**405.660,000**	**400.860,000**		**100.815,000**										Dishub
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan					12	273.600,00	268.800,00	2,84	67.800,00	11,84	265.200,00	98,66	96,93	98,66	11,84	265.200	0,00	0,00	Dishub
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	angkutan					12,00	132.060,00	132.060,00	3,00	33.015,00	12,00	132.060,00	100,00	100,00	100,00	12,00	132.060	0,00	0,00	Dishub
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**119,07**	**120,10**	**139,07**	**32,65**		**0,00**	**0,00**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									23.824.619,815	25.304.160,717		10.654.522,199		25.096.103,198								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					40,55	44,93	46,80	9,51		#REF!	#REF!	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			SR	SR	SR	SR		#REF!	#REF!	
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BULUKUMBA																					Kominfo
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-													Kominfo
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								-													Kominfo
	2,16,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)							2.929.414,069	2.878.774,040		757.506,324										Kominfo
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja							-	-		-										Kominfo
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					8	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					58		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah							2.313.790,799	2.284.467,200		565.611,364										Kominfo
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	2.119.615,85	2.086.996,20	3,00	498.702,81	12,00	2.031.950,32	100,00	95,86	97,36	12,00	2.031.950	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12,00	194.174,95	197.471,00	3,00	66.908,55	12,00	193.825,55	100,00	99,82	98,15	12,00	193.826	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah							-													Kominfo
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum							68.983,80	77.374,80		27.431,56										Kominfo
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	27.952,80	27.952,80	5,00	13.838,86	12,00	27.807,54	100,00	99,48	99,48	12,00	27.808	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	41.031,00	49.422,00	5,00	13.592,70	12,00	45.302,10	100,00	110,41	91,66	12,00	45.302	0,00	0,00	Kominfo

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					12,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**							**-**	**-**		**-**										Kominfo
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**					**100,00**	**520.089,470**	**489.782,040**		**151.279,640**										Kominfo
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	80.394,020	50.086,59	3,00	9.639,64	12,00	36.736,15	100,00	45,70	73,35	12,00	36.736	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	1.420,000	1.420,00	12,00	1.420,00	12,00	1.420,00	100,00	100,00	100,00	12,00	1.420	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	438.275,45	438.275,45	3,00	140.220,00	12,00	431.140,00	100,00	98,37	98,37	12,00	431.140	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang terpelihara**							**26.550,00**	**27.150,00**		**13.183,76**										Kominfo
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	15.000,000	15.000,00	0,10	5.078,50	1,00	14.957,00	99,71	99,71	99,71	1,00	14.957	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					9,00	10.500,00	10.500,00	6,03	7.030,50	8,97	10.469,50	99,71	99,71	99,71	8,97	10.470	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit					10,00	1.050,000	1.650,00	8,79	1.074,76	9,79	1.615,76	97,92	153,88	97,92	9,79	1.616	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					1		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**99,73**	**100,29**	**95,57**	**10,38**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,16,02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase perangkat daerah yang menggunkan layanan data pemerintah**							**640.136**	**722.096**		**340.067**										Kominfo
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan informasi publik dan terkelolanya opini dan informasi publik melulai media informasi Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui media informasi publik**							**640.136,000**	**722.096,000**		**340.066,630**										Kominfo
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen					12,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					12,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen					12	53.000,00	53.000,00	11,00	25.000,00	12,00	25.723,61	100,00	48,54	48,54	12,00	25.724	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan					12,00	399.936,00	481.896,00	3,00	252.666,63	12,00	446.068,56	100,00	111,53	92,57	12,00	446.069	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen					12,00	187.200,00	187.200,00	4,00	62.400,00	12,00	187.200,00	100,00	100,00	100,00	12,00	187.200	0,00	0,00	Kominfo
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**86,69**	**80,37**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,16,03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yag terkoneksi dijaringan intra pemerintah atau menggunaan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo**							**294.880,000**	**301.320,000**		**98.145,170**										Kominfo
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya pengelolaan domain dan sub domain milik pemerintah daerah Tersenggaranya sistem dan aplikasi dalam kerangka SPBE**							**294.880,00**	**301.320,00**		**98.145,17**										Kominfo
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					5,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit					12,00	294.880,00	301.320,00	4,80	98.145,17	12,00	291.875,41	100,00	98,98	96,87	12,00	291.875	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya pengelolaan E-Government/SPBE baik Infrastruktur maupun sistem**							**-**	**-**		**-**										Kominfo
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Daerah					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen					12,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	98,98	96,87	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**-**													Kominfo
	2,20,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**							**30.480,05**	**35.100,05**		**10.758,25**										Kominfo
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan terlaksananya pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya data statistik sektoral dengan terselenggaranya pengumpulan data dan**							**30.480,050**	**35.100,050**		**10.758,252**										Kominfo
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen					12,00	30.480,05	35.100,05	4,00	10.758,25	12,00	35.037,20	100,00	114,95	99,82	12,00	35.037	0,00	0,00	Kominfo
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang					150,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	114,95	99,82	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**-**													Kominfo
	2,21,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah** **Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah**							**-**	**-**		**-**										Kominfo
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Tertib Administrasi Pesandian Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi**							**-**	**-**		**-**										Kominfo
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen					12,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
	2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**							**-**	**-**		**-**										Kominfo
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Daerah					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kominfo
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**3.894.910,119**	**3.937.290,090**		**1.206.476,376**		**3.781.128,702**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S				**3.746.091,500**	**79,95**	**80,18**	**74,53**	**9,28**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**T**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja																					DKUKMTK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																					
	2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**							**4.423.411,178**	**4.372.741,583**		**1.089.870,313**										DKUKMTK
	2.07	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25.210,00**	**29.920,00**		**13.647,50**										DKUKMTK
	2,07,02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					6,00	25.210,00	29.920,00	0,95	13.647,50	5,59	27.888,00	93,17	110,62	93,21					DKUKMTK
	2.07.02.2.01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.967.219,378**	**3.885.779,233**		**916.999,583**										DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					12,00	3.907.689,38	3.826.249,23	0,55	901.014,58	11,54	3.663.765,00	96,15	93,76	95,75	11,54	3.663.765	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					12,00	59.530,00	59.530,00	3,37	15.985,00	12,00	59.530,00	100,00	100,00	100,00	12,00	59.530	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**79.889,650**	**80.634,100**		**16.888,339**										DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket					3,00	19.460,50	19.464,00	0,00	-	2,90	19.460,70	96,67	100,00	99,98	2,90	19.461	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					2,00	4.308,15	5.049,10	0,19	1.145,95	2,00	5.049,10	100,00	117,20	100,00	2,00	5.049	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					32,00	56.121,00	56.121,00	0,65	15.742,39	32,00	56.121,00	100,00	100,00	100,00	32,00	56.121	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**332.991,69**	**332.991,69**		**103.554,83**						**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	52.298,09	52.298,09	5,58	17.776,23	9,08	39.555,50	75,67	75,63	75,63	9,08	39.556	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	280.693,60	280.693,60	3,28	85.778,60	11,40	266.673,60	95,00	95,01	95,01	11,40	266.674	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**18.100,47**	**43.416,57**		**38.780,07**						**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					13,00	9.700,00	14.200,00	4,48	9.563,50	12,56	13.724,18	96,62	141,49	96,65	12,56	13.724	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	1.250,47	19.996,57	2,00	19.996,57	2,00	19.996,57	100,00	1599,13	100,00	2,00	19.997	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10,00	7.150,00	9.220,00	10,00	9.220,00	10,00	9.220,00	100,00	128,95	100,00	10,00	9.220	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**117,03**	**295,75**	**117,36**	**11,72**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,07,02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun, Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Persentase Jumlah Kasus Pengusaha Pekerja Pertahun**							**-**	**-**		**-**										DKUKMTK
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro**							**-**	**-**		**-**										DKUKMTK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,07,03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**							**849.999,750**	**849.999,500**		**14.854,750**										DKUKMTK
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah pencari kerja / tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi**							**849.999,75**	**849.999,50**		**14.854,75**										DKUKMTK
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang					120,00	849.999,75	849.999,50	2,09	14.854,75	118,87	842.071,05	99,06	99,07	99,07	118,87	842.071	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**99,06**	**99,07**	**99,07**	**118,87**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Pelatihan/Sosialisasi**	**Kegiatan**					**1,00**	**-**	**-**		**-**										DKUKMTK
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	lembaga					1,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.03.2.02.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan					12,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38024	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan**							**10.162,00**	**12.162,00**		**5.472,00**										DKUKMTK
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sosialisasi para penyandang Disabilitas**							**10.162,00**	**-**		**-**										DKUKMTK
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang					16,00	10.162,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Data dan informasi pasar kerja online**							**-**	**-**		**-**										DKUKMTK
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelatihan/ Sosialisasi Penanggulangan pekerja migran di Indonesia**							**-**	**12.162,00**		**5.472,00**										DKUKMTK
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang					16,00	-	12.162,00	5,47	5.472,00	16,00	12.162,00	100,00	0,00	100,00	16,00	12.162	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024											
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	0,00	100,00	16,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja				854.233,05	ST	SR	ST	SR		SR	SR	
	2,17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha							22.990,00	24.239,45		16.708,95						0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha							22.990,00	24.239,45		16.708,95						0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Usaha					40	22.990,00	24.239,45	35,74	16.708,95	38,27	23.191,95	95,68	100,88	95,68	38,27	23.192	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					95,68	100,88	95,68	38,27		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	2,17,03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan							11.171,00	25.651,00		18.060,00						0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							11.171,00	25.651,00		18.060,00						0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Usaha					290,00	11.171,00	25.651,00	92,95	18.060,00	290,00	25.651,00	100,00	229,62	100,00	290,00	25.651	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	229,62	100,00	290,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	ST		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									5.317.733,928	5.284.793,533		1.144.966,013		5.084.059,646								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																73,11	103,62	73,16	67,84		0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN																S	ST	S	S		SR	SR	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BULUKUMBA																					DPMPTSP
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					DPMPTSP
	2,07,05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,						100,00	-	-		-										DPMPTSP
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang terlaksana (Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan)	Bulan					12,00	-	-		-										DPMPTSP
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perselisihan hubungan industrial di perusahaan yang dapat diselesaikan	Kegiatan					1,00	-	-		-										DPMPTSP
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Pekerja					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	2,18,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas PM,PTSP & Tenaga Kerja)**	**%**					**100,00**	**2.674.900,43**	**2.713.612,82**		**715.571,33**										DPMPTSP
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**					**100,00**	**86.377,55**	**80.826,40**		**43.456,30**										DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					2,00	53.487,70	53.586,40	0,20	31.848,30	2,00	53.586,40	100,00	100,18	100,00	2,00	53.586	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					2,00	10.789,75	6.840,00	0,00	8,00	2,00	6.836,80	100,00	63,36	99,95	2,00	6.837	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2,00	9.300,10	7.600,00	1,00	5.600,00	2,00	7.600,00	100,00	81,72	100,00	2,00	7.600	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	12.800,00	12.800,00	0,47	6.000,00	1,00	12.800,00	100,00	100,00	100,00	1,00	12.800	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**					**100,00**	**2.133.622,32**	**2.113.543,00**		**476.730,07**										DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	2.050.747,22	2.030.667,90	2,42	442.605,88	11,42	1.931.966,55	95,17	94,21	95,14	11,42	1.931.967	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	72.585,10	72.585,10	3,00	26.834,19	12,00	72.585,10	100,00	100,00	100,00	12,00	72.585	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	10.290,000	10.290,00	0,00	7.290,00	1,00	10.290,00	100,00	100,00	100,00	1,00	10.290	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**meningkatnya sumber daya manusia dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	**%**					**100,00**	**-**	**-**		**-**										DPMPTSP
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**	**%**					**100,00**	**97.929,22**	**155.016,22**		**61.588,28**										DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	35.820,200	35.820,20	0,25	493,00	1,00	35.816,45	99,92	99,99	99,99	1,00	35.816	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	8.804,80	8.804,80	0,32	2.805,75	1,00	8.804,80	100,00	100,00	100,00	1,00	8.805	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1,00	7.954,22	7.954,22	0,09	778,10	1,00	7.954,22	100,00	100,00	100,00	1,00	7.954	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	45.350,00	102.437,00	6,00	57.511,43	12,00	102.433,82	100,00	225,87	100,00	12,00	102.434	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra saran Yang tersedia Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**	**%**					**100 %100**	**-**	**-**		**-**										DPMPTSP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang tersedia**	**%**					**100,00**	**332.435,40**	**339.691,26**		**122.811,93**										DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	244.490,40	250.496,26	3,00	85.768,87	12,00	242.614,27	100,00	99,23	96,85	12,00	242.614	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	87.945,00	89.195,00	3,00	37.043,06	12,00	89.055,00	100,00	101,26	99,84	12,00	89.055	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Pra Sarana yang mendapat Pemeliharaan**	**%**					**100,00**	**24.535,94**	**24.535,94**		**10.984,75**										DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					12,00	17.835,94	17.835,94	4,44	6.724,75	11,14	16.561,31	92,83	92,85	92,85	11,14	16.561	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					5,00	6.700,00	6.700,00	2,36	4.260,00	5,00	6.700,00	100,00	100,00	100,00	5,00	6.700	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**99,19**	**103,91**	**98,98**	**5,77**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,18,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota**							**-**													DPMPTSP
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerapan Kebijakan Invertaris Penanaman Modal**							**-**													DPMPTSP
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Penyajian informasi penanaman Modal**							**-**													DPMPTSP
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,18,03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**							**4.804,88**													DPMPTSP
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan dan Terlaksananya Promosi Pontensi Unggulan Daerah Kab.Bulukumba**							**4.804,875**													DPMPTSP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	4.804,88	1.013,00	1,00	1.013,00	1,00	1.013,00	100,00	21,08	100,00	1,00	1.013	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**21,08**	**100,00**	**1,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**SR**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,18,04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Peresentase Peningkatan Pelayanan Perizinan**							**111.112,450**												DPMPTSP
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase administrasi Pelayanan Perizinan**							**111.112,450**												DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Usaha					23,00	106.956,95	106.956,95	12,58	40.000,00	23,00	106.956,95	100,00	100,00	100,00	23,00	106.957	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Usaha					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Usaha					5,00	4.155,500	4.155,50	1,48	1.978,00	5,00	4.155,50	100,00	100,00	100,00	5,00	4.156	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**14,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,18,05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**	**(M)/Dollar**					**500/500000**	**602.839,80**												DPMPTSP
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tertib administrasi pelayanan Invertasi**	**Investor**					**76,00**	**602.839,80**												DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Usaha.					2,00	90.424,900	74.854,90	0,66	14.372,10	2,00	74.854,90	100,00	82,78	100,00	2,00	74.855	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Usaha					2,00	331.563,200	390.483,55	0,85	200.235,15	2,00	390.483,55	100,00	117,77	100,00	2,00	390.484	0,00	0,00	DPMPTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Usaha					100,00	180.851,700	137.501,35	31,20	13.067,00	100,00	137.501,35	100,00	76,03	100,00	100,00	137.501	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**92,19**	**100,00**	**34,67**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,18,06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**	**%**					**100,00**	**-**												DPMPTSP
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**penyajian Informasi data base Perizinan**	**Buku**					**1,00**	**-**												DPMPTSP

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DPMPTSP
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									3.393.657,559	3.428.578,065		986.236,583		3.320.569,974								
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN														57,03	45,31	57,00	7,92		0,00	0,00	
			PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN													R	SR	R	SR		SR	SR	
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-											0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								-											0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2,23,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)**							-											0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keterpaduan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan kinerja tepat waktu**																		0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					3,00	14.905,00	17.643,00	0,30	3.667,15	3,00	13.626,75	100,00	91,42	77,24	3,00	13.627	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					2,00	6.830,00	6.830,00	0,20	3.994,00	2,00	6.830,00	100,00	100,00	100,00	2,00	6.830	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2,00	6.830,00	6.830,00	1,10	3.228,00	2,00	3.936,95	100,00	57,64	57,64	2,00	3.937	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	4.724,000	4.724,00	2,16	848,30	12,00	4.724,00	100,00	100,00	100,00	12,00	4.724	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi keuangan pada PD**							**1.886.974,12**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	1.871.171,733	1.849.117,10	2,50	467.331,48	12,00	1.793.350,02	100,00	95,84	96,98	12,00	1.793.350	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	49.170,00	49.170,00	3,00	16.395,55	12,00	49.170,00	100,00	100,00	100,00	12,00	49.170	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya dokumen administrasi umum**							**60.740,95**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					3,00	20.773,05	20.773,05	0,75	4.520,75	3,00	19.050,75	100,00	91,71	91,71	3,00	19.051	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	1.890,00	1.890,00	0,25	318,85	1,00	1.890,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1.890	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)						
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					11,00	45.291,00	67.553,00	0,07	31.164,98	11,00	63.422,11	100,00	140,03	93,88	11,00	63.422	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persentase pemenuhan sarana dan prasarana pengadaan barang milik daerah**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7,00	14.820,000	14.820,00	0,07	-	7,00	14.800,00	100,00	99,87	99,87	7,00	14.800	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**							**231.869,70**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	57.189,70	57.189,70	3,00	13.517,98	12,00	42.972,83	100,00	75,14	75,14	12,00	42.973	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					168,00	171.480,000	171.480,00	55,99	57.160,00	168,00	171.480,00	100,00	100,00	100,00	168,00	171.480	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana pemeliharaan barang miliki daerah**							**18.225,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					7,00	16.100,00	16.100,00	0,00	5.792,00	5,00	13.709,68	71,43	85,15	85,15	5,00	13.710	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**97,80**	**95,14**	**90,59**	**19,23**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,23,02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk, Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengelolaan perpustakaan**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	aan					30,00	216.551,50	216.551,50	14,00	185.906,43	30,00	194.799,43	100,00	89,96	89,96	30,00	194.799	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	an					3,00	6.113,00	6.113,00	2,40	4.926,00	3,00	5.537,00	100,00	90,58	90,58	3,00	5.537	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang					30,00	143.835,250	143.835,25	8,93	17.493,65	30,00	120.221,05	100,00	83,58	83,58	30,00	120.221	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan						58,00	65.808,25	65.808,25	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					15,00	9.805,50	9.805,50	3,33	5.600,50	15,00	9.774,50	100,00	99,68	99,68	15,00	9.775	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pembudayaan gemar membaca**							**35.193,40**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus					10,00	59.303,200	59.303,20	3,00	7.540,60	10,00	56.875,70	100,00	95,91	95,91	10,00	56.876	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	an					1,00	128.623,30	128.623,30	0,40	32.995,10	1,00	57.613,90	100,00	44,79	44,79	1,00	57.614	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					85,71	72,07	72,07	12,71		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					T	S	S	SR		SR	SR	
	37675	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnyaPersentase Jumlah naskah kuno yang dialihaksara dan dialihbahasaPersentase							-									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan naskah kunomilik daearah kabupaten/kota																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang					3,00	33.173,00	33.173,00	2,54	21.417,50	3,00	27.226,00	100,00	82,07	82,07	3,00	27.226	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan kolesksi budaya etnis nusantara							2.898,00									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Budaya					15,00	4.028,000	4.028,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					50,00	41,04	41,04	1,50		0,00	0,00	
										2.948.415,479	2.951.360,845	edikat Kinerja			2.671.010,666	SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																			0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2,24,02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Terlaksananya Pengumpulan data arsip yang mempunyai nilai informasi, pengolahan dan penyimpanan data base arsip	%					100,00	-											0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan arsip dinamis	%					100,00												0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas					37,00	18.909,70	18.909,70	6,82	5.377,75	37,00	18.657,45	100,00	98,67	98,67	37,00	18.657	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas					37,00	11.746,00	11.746,00	6,40	-	37,00	11.020,50	100,00	93,82	93,82	37,00	11.021	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	96,24	96,24	37,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	2,24,03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan							-									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang di kelola							13.875,60									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip					12,00	14.511,250	14.511,25	3,00	12.183,25	12,00	13.882,75	100,00	95,67	95,67	12,00	13.883	0,00	0,00	Dinas Kearsipan &Perpustakaan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	95,67	95,67	12,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.993.582,429	2.996.527,795		901.379,828		2.714.571,366								
										45.166,950	45.166,950	TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S			43.560,700	86,70	80,03	79,12	16,49		0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			T	T	T	SR		SR	SR	
		DINAS PERIKANAN KAB. BULUKUMBA																				0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-												0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3,25,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Perikanan)							4.858.182,95												0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji Tunjangan yang dibayarkan Jumlah Gaji Tunjangan yang terbayarkan							4.308.199,24									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						52,00	4.468.647,94	4.262.318,59	13,00	1.034.443,83	52,00	4.234.706,944	100,00	94,76	99,35	52,00	4.234.707	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	35.880,00	35.880,00	0,39	-	12,00	34.740,00	100,00	96,82	96,82	12,00	34.740	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					3,00	13.620,00	13.620,00	0,00	-	3,00	12.228,625	100,00	89,78	89,78	3,00	12.229	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum							189.251,24									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	23.422,950	23.422,95	0,00	-	1,00	23.344,70	100,00	99,67	99,67	1,00	23.345	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	21.860,80	21.052,80	0,10	7.005,30	1,00	21.052,80	100,00	96,30	100,00	1,00	21.053	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					24,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	3.512,75	3.512,75	3,00	1.736,40	12,00	3.486,50	100,00	99,25	99,25	12,00	3.487	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	107.245,000	109.555,00	2,00	19.332,11	12,00	108.725,705	100,00	101,38	99,24	12,00	108.726	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan BMD**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunang Urusan Pemerintahan Daerah**							**197.892,48**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	81.174,478	75.461,52	3,00	14.791,18	12,00	52.902,101	100,00	65,17	70,10	12,00	52.902	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	105.688,000	103.896,00	3,00	34.808,00	12,00	101.111,00	100,00	95,67	97,32	12,00	101.111	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang terpelihara**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					40,00	10.800,00	10.800,00	28,96	3.890,50	39,62	6.770,00	99,06	62,69	62,69	39,62	6.770	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10,00	-	1.380,00	10,00	1.380,00	10,00	1.380,00	100,00	0,00	100,00	10,00	1.380	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					5,00	-	1.220,00	5,00	1.220,00	5,00	1.220,00	100,00	0,00	100,00	5,00	1.220	0,00	0,00	Dinas Perikanan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**119,91**	**90,15**	**111,42**	**17,16**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,25,03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan Bina Kelompok Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**					**60 Persen 54247**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diberikanan Jumlah Dokumen Data**	**dok**					**37 Unit1**										0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit					9,00	28.567.296,25	28.834.717,53	5,13	6.995.611,21	8,10	16.134.705,37	90,00	56,48	55,96	8,10	16.134.705	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit					292,00	4.479.316,00	5.503.390,51	185,62	3.585.109,19	292,00	5.216.841,39	100,00	116,47	94,79	292,00	5.216.841	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan**	**Paket**					**3,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					250,00	238.675,50	238.675,50	19,93	21.859,33	246,38	208.201,37	98,55	87,23	87,23	246,38	208.201	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok					40,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase TPI yang operasional (%) Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap**						**100 %100**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan**	**asi**					**2,00**										0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	asi					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.05	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Izin Pengadaan Kapal**	**asi**					**2,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.06	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kapal yang terdaftar**	**asi**					**2,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan						1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**96,18**	**86,73**	**79,33**	**182,16**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
	3,25,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan produksi perikanan budidaya**	**Ton**					**188903,00**										0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan**	**asi**					**2,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Pembudidaya yang memperoleh kegiatan pemberdayaan**	**Paket**					**120 Orang1**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok					10,00	171.232,25	171.232,25	2,23	32.289,50	7,14	116.404,50	71,43	67,98	67,98	7,14	116.405	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)**	**asi**					**2,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan						1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	asi					1,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan Jumlah sarana dan prasarana perikanan**	**Paket**					**60 Orang29**	**3.271.086,58**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						17,00	622.348,500	644.285,27	16,15	439.515,56	17,00	475.334,96	99,99	76,38	73,78	17,00	475.335	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12,00	122.516,00	122.516,00	10,46	60.800,58	10,80	64.241,58	90,00	52,44	52,44	10,80	64.242	0,00	0,00	Dinas Perikanan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan						1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**87,14**	**65,60**	**64,73**	**11,65**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,25,06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Tingkat Konsumsi Ikan**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Usaha Mikro**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Usaha					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumah Promosi Hasil Perikanan Jumlah Pembinaan Usaha Pengolahan yang dilaksanakan**							-									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perikanan
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						5,00	108.800,500	116.026,10	4,93	102.942,95	5,00	104.438,67	100,00	95,99	90,01	5,00	104.439	0,00	0,00	Dinas Perikanan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**95,99**	**90,01**	**5,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**39.182.036,914**	**40.292.962,770**		**12.356.735,625**		**26.965.396,899**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**80,65**	**67,69**	**69,10**	**43,19**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. BULUKUMBA																	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								-									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								-									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	37306	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Inovator Persentase Jumlah Pemuda Inovator**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah presentase pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					5,00	38.478,400	38.478,40	3,50	27.420,26	5,00	37.925,56	100,00	98,56	98,56	5,00	37.926	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					5,00	244.767,30	244.767,30	0,30	23.226,97	5,00	244.061,21	100,00	99,71	99,71	5,00	244.061	0,00	0,00	DISPARPORA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang					3	395.849,58	395.849,58	0,60	301.059,15	3,00	373.724,13	100,00	94,41	94,41	3,00	373.724	0,00	0,00	DISPARPORA
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**100,00**	**97,56**	**97,56**	**4,33**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,19,03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Pemuda inovator Persentase Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terbangun**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit					2,00	5.326.322,83	5.326.322,83	1,29	3.558.527,54	1,98	5.266.956,40	98,86	98,89	98,89	1,98	5.266.956	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah kejuaraan yang pertandingkan**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					5,00	122.539,750	122.539,75	5,00	122.441,25	5,00	122.441,25	100,00	99,92	99,92	5,00	122.441	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-	2,00	530.000,00	100,00	100,00	100,00	2,00	530.000	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.02.0002	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	-	%					100,00	283.780,00	283.780,00	16,00	49.597,41	100,00	283.779,88	100,00	100,00	100,00	100,00	283.780	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**jumlah atlet berprestase yang mendapat pembinaan**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**jumlah olahraga rekreasi yang dibina**																0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen					5,00	300.000,00	300.000,00	1,60	99.808,95	5,00	298.208,10	100,00	99,40	99,40	5,00	298.208	0,00	0,00	DISPARPORA
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**99,77**	**99,64**	**99,64**	**22,80**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38036	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah gusus pramuka yang berprestasi tingkat Nasional Persentase Jumlah gugus pramuka yang berprestasi di tingkat nasional**	**%**					**2 Orang100**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**jumlah gugus pramuka yang berprestasi tingkat nasional**	**Gudep**					**2**	**100.000,00**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi					1,00	100.000,000	100.000,00	0,00	-	1,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100.000	0,00	0,00	DISPARPORA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**7.341.737,850**	**7.341.737,850**		**4.182.081,519**		**7.257.096,516**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**99,92**	**99,07**	**99,07**	**9,38**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**-**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																			0,00	0,00	DISPARPORA
	3,26,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Kegiatan**							**7.627.034,42**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencenaan yang disusun**							**333.868,45**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					20	138.936,950	138.973,35	2,32	47.388,45	20,00	138.936,47	100,00	100,00	99,97	20,00	138.936	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase realisasi keuangan**							**4.768.091,58**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	4.718.081,58	4.639.754,64	3,30	843.024,82	12,00	4.527.685,62	100,00	95,96	97,58	12,00	4.527.686	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100,00	50.010,00	50.010,00	27,00	15.540,00	100,00	50.010,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50.010	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**persentase pencapaian PAD**							**656.091,30**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah						100,00	656.091,300	656.091,30	8,60	48.668,00	53,73	286.928,38	53,73	43,73	43,73	53,73	286.928	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi kepegawaian**							**-**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					4	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administasi umum**							**251.781,85**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					50,00	80.702,85	86.788,60	2,89	38.272,30	49,99	86.785,20	99,98	107,54	100,00	49,99	86.785	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100,00	171.079,00	171.079,00	0,05	61.688,56	99,91	170.925,71	99,91	99,91	99,91	99,91	170.926	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumaah pengadaan barang milik daerah**																		0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	25.000,00	55.866,85	0,00	30.000,00	0,97	53.960,00	96,59	215,84	96,59	0,97	53.960	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang**																		0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					100,00	172.168,80	172.168,80	23,96	41.257,43	71,40	122.929,75	71,40	71,40	71,40	71,40	122.930	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					100,00	534.800,00	536.300,00	33,23	166.750,00	99,20	532.000,00	99,20	99,48	99,20	99,20	532.000	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jumlah BMD yang dipelihara**							**62.303,10**											0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					20,00	62.303,10	62.303,10	7,66	25.757,76	16,08	50.084,39	80,39	80,39	80,39	16,08	50.084	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**90,12**	**101,42**	**88,88**	**52,33**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**T**	**ST**	**T**	**R**		**SR**	**SR**	
	3,26,02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah objek wisita yang dikelolah Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen pengambangan kawasan wisata**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana dan prasarana dibangun/dipelihara**							**2.871.000,00**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi					5,00	479.870,50	492.581,50	2,10	172.981,50	5,00	486.631,50	100,00	101,41	98,79	5,00	486.632	0,00	0,00	DISPARPORA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit					12,00	2.391.129,500	2.387.929,50	9,50	1.617.751,33	11,00	1.891.908,33	91,67	79,12	79,23	11,00	1.891.908	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**95,84**	**90,27**	**89,01**	**8,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,26,03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**jumlah event pariwisata yang diselenggarakan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota (%)**						**11 event90**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Event pariwisata yang diselenggarakan**	**Event**					**10,00**	**819.400,00**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan					2,00	330.000,00	330.000,00	1,77	297.335,30	2,00	329.584,60	99,85	99,87	99,87	2,00	329.585	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi					3,00	72.000,00	72.000,00	0,00	34.819,49	1,53	70.197,58	51,00	97,50	97,50	1,53	70.198	0,00	0,00	DISPARPORA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**75,43**	**98,69**	**98,69**	**1,76**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,26,05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah peletihan kewirausahaan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**	**%**					**10 kali1,66**										0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan**	**Pkt**					**7,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPARPORA
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**16.055.664,027**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**9.882.173,583**	**9.851.846,643**		**3.441.234,940**		**8.798.567,511**								
										17.223.911,433	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM**					**65,35**	**72,59**	**69,14**	**15,52**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**R**	**S**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2,09,02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang Dibina							-											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah							-											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	2,09,03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita, Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita							-											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya informasi harga pangan dan NBM serta meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pangan dan jaringan distribusi pangan							76.563,50											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan					1,00	43.563,50	43.563,50	0,00	1.165,00	1,00	43.422,50	99,68	99,68	99,68	1,00	43.423	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit					0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01.0006	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Unit					0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan					1,00	30.000,00	30.000,00	0,25	10.000,00	1,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	30.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen					1,00	3.000,00	3.000,00	0,10	900,00	1,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	3.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi serta pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan kabupaten**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen					0			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton					15	105.311,00	105.312,00	0,09	900,00	14,56	101.033,00	97,06	95,94	95,94	14,56	101.033	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton					0	-	-		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton					5	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Tercapainya target skor PPH pemanfaatan lahan pekarangan dan penanekaragaman konsumsi pangan, berragam, bergizi, seimbang dan aman**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen					1	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	5.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan					2	20.343,00	20.343,00	0,82	11.930,00	1,72	17.543,00	86,20	86,24	86,24	1,72	17.543	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan					0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**97,16**	**96,98**	**96,97**	**3,38**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,09,04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**																		0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersedianya dokumen peta rawan pangan**							**8.992,00**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen					1,00	7.250,00	7.250,00	0,00	3.916,00	1,00	7.090,00	100,00	97,79	97,79	1,00	7.090	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanganan kerawanan pangan daerah**							**130.838,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					1	157.500	157.500,00	0,76	120.798,00	0,99	156.282,00	99,23	99,23	99,23	0,99	156.282	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**66,41**	**65,67**	**65,67**	**0,66**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,09,05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Sampel Pangan Dengan Mutu Aman**	**%**					**45,00**										0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar pada daerah kabupaten**	**%**					**100,00**	**11.000,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen					1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-	1,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	11.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
										382.967,50	**382.968,50**	**a Capaian Kinerja (%)**			**374.370,50**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3,27,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**							**17.878.050,56**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**							**41.385,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	21.405,000	21.405,00	0,60	9.365,00	1,00	21.405,00	100,00	100,00	100,00	1,00	21.405	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1,00	4.270,00	4.270,00	0,23	1.032,00	0,98	4.182,00	97,93	97,94	97,94	0,98	4.182	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00	2.010,000	2.010,00	1,00	2.010,00	1,00	2.010,00	100,00	100,00	100,00	1,00	2.010	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1,00	13.700,00	13.700,00	0,20	4.164,00	1,00	13.674,00	99,80	99,81	99,81	1,00	13.674	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kegiatan perangkat daerah**							**17.026.047,891**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						191,00	16.914.562,89	16.650.079,91	47,77	4.264.954,39	187,77	16.368.803,54	98,31	96,77	98,31	187,77	16.368.804	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	109.000,00	109.000,00	3,00	28.945,00	12,00	109.000,00	100,00	100,00	100,00	12,00	109.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	2.485,00	2.485,00	0,00	-	1,00	2.485,00	100,00	100,00	100,00	1,00	2.485	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah**							**2.503,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1,00	2.503,000	2.503,00	0,20	1.061,00	0,95	2.371,00	94,73	94,73	94,73	0,95	2.371	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					5	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					3,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penadministrasian umum perangkat daerah**							**446.833,80**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	92.503,50	92.503,50	0,00	13.340,00	1,00	92.464,65	99,95	99,96	99,96	1,00	92.465	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	13.317,10	13.285,95	0,00	1.895,00	1,00	12.508,00	100,00	93,92	94,14	1,00	12.508	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					0,00	121.367,00	119.867,00	0,00	112.882,26	0,00	112.882,26	0,00	93,01	94,17	0,00	112.882	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1,00	5.505,20	5.505,20	0,38	2.100,00	1,00	5.479,20	99,50	99,53	99,53	1,00	5.479	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					2,00	214.141,00	214.141,00	0,48	54.206,29	2,00	214.097,15	99,98	99,98	99,98	2,00	214.097	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan kantor OPD**							**23.876,50**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					20,00	23.876,50	23.876,50	0,00	20.000,00	20,00	23.750,00	100,00	99,47	99,47	20,00	23.750	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					11,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi umum OPD**							**270.304,37**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	205.144,368	205.144,37	2,07	40.901,35	8,07	137.942,29	67,24	67,24	67,24	8,07	137.942	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	65.160,000	65.160,00	3,00	21.080,00	12,00	65.160,00	100,00	100,00	100,00	12,00	65.160	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas seluruh aset dan pengamanan aset OPD**							**67.100,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					5,00	26.500,00	28.000,00	3,25	18.306,00	3,59	20.111,00	71,83	75,89	71,83	3,59	20.111	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					265,00	40.600,00	40.600,00	131,49	20.552,24	234,07	35.863,42	88,33	88,33	88,33	234,07	35.863	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					25,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**89,87**	**94,81**	**94,75**	**27,13**		**0,00**	**0,00**	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
											Predikat Kinerja					T	ST	ST	SR		SR	SR	
	3,27,02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Jumlah Produksi Pertanian Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Komoditi Unggulan**	**%**					**76 %22**	**6.243.227,80**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Rasio kelompok tani yang berusaha tani sesuai anjuran**	**%**					**19.6**	**4.871.280,300**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan					3,00	2.245.561,30	2.149.268,80	1,48	1.138.716,49	2,68	1.921.108,34	89,38	85,55	89,38	2,68	1.921.108	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan					4,00	2.625.719,00	2.250.572,00	1,03	577.782,00	3,20	1.802.558,00	80,09	68,65	80,09	3,20	1.802.558	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya peningkatan produksi dan mutu produksi pertanian**	**%**					**100,00**	**1.031.896,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen					6	1.031.896,000	1.031.896,00	1,90	229.352,00	5,96	929.262,00	99,33	90,05	90,05	5,96	929.262	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dar	(VUB)					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota**	**%**					**100,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan					*0,00*		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Terlaksananya pengawasan obat hewan ditingkat pengecer**	**%**					**100,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase cakupan trehadap pengendalian dan pengawasan penyediaan bibit ternak**	**%**					**100,00**	**137.500,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen					*0,00*		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan					100,00	137.500,000	137.500,00	86,42	113.351,00	99,00	130.558,00	99,00	94,95	94,95	99,00	130.558	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang disediakan**	**%**					**100,00**	**202.551,50**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton					*100,00*	46.309,50	46.309,50	0,00	-	97,50	45.059,50	97,50	97,30	97,30	97,50	45.060	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor					100,00	156.242,00	156.242,00	97,40	152.250,00	98,33	153.632,00	98,33	98,33	98,33	98,33	153.632	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**93,94**	**89,14**	**91,69**	**51,11**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**T**	**ST**	**R**		**SR**	**SR**	
	2,27,03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana sektor pertanian yang tersedia**	**%**					**90,00**	**10.210.861,00**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas Terbangunnya kawasan pertanian berbasis komoditas**	**Dokumen**					***100 %3***	**-**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian**	**%**					**100,00**	**10.210.861,00**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					10,00	5.219.283,00	5.219.283,00	3,30	1.842.518,00	10,00	5.217.844,00	99,97	99,97	99,97	10,00	5.217.844	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					6,00	376.904,00	376.904,00	1,90	119.342,00	6,00	376.836,00	99,98	99,98	99,98	6,00	376.836	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					*2,00*	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit					3,00	677.262,00	677.262,00	2,21	498.300,14	2,83	639.149,88	94,37	94,37	94,37	2,83	639.150	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit					20,00	2.195.422,00	2.195.422,00	11,31	1.244.342,00	19,98	2.192.728,00	99,88	99,88	99,88	19,98	2.192.728	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.03.2.02.15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit					1,00	1.741.990,00	1.741.990,00	0,68	1.200.693,90	0,99	1.732.890,64	99,48	99,48	99,48	0,99	1.732.891	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**98,74**	**98,74**	**98,74**	**7,96**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	38073	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**					**12.44**	**447.524,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase wabah penyakit hewan yang berhasil dikendalikan**	**%**					**14,00**	**163.949,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota						264,00	163.949,00	163.949,00	83,85	52.382,00	260,75	161.945,00	98,77	98,78	98,78	260,75	161.945	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengawasan pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan**	**%**					**60,00**	**15.000,000**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan					182,00	15.000,00	15.000,00	70,78	6.000,00	182,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	182,00	15.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan					*0,00*	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aparatur petugas pelayanan medik dan paramedik veteriner**	**%**					**100,00**	**68.500,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan					0	60.000,000	60.000,00	0,00	58.289,00	0,00	58.289,00	0,00	97,15	97,15	0,00	58.289	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan					*0,00*	8.500,00	8.500,00	0,00	-	0,00	8.500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	8.500	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Terlaksananya pendampingan dan pengawasan masyarakat veteriner veteriner**	**%**					**100,00**	**200.075,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.04.07	Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	ORANG/BULAN					14,00	122.075,00	122.075,00	9,32	81.494,14	13,82	120.494,14	98,71	98,71	98,71	13,82	120.494	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Usaha					150,00	78.000,00	78.000,00	48,00	25.500,00	150,00	78.000,00	100,00	100,00	100,00	150,00	78.000	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.05	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Terlaksananya penerapan dan pengawasan terhadap persyaratan teknis kesejahteraan hewan**	**%**					**100,00**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit					0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**66,25**	**99,11**	**99,11**	**101,10**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	3,27,05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi**							**293.050,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Menurunnya Kasus serangan OPT**							**293.050,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan						5000,00	293.050,00	293.050,00	2074,50	121.929,00	4624,50	271.028,00	92,49	92,49	92,49	4624,50	271.028	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani						50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha					10000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**92,49**	**92,49**	**92,49**	**4624,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	38803	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Usaha Sektor Peternakan Yang Berizin**							**18.674,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian dalam daerah**							**18.674,000**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Dokumen*					*30,00*	18.674,00	18.674,00	8,50	5.345,00	30,00	18.605,00	100,00	99,63	99,63	30,00	18.605	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Terlaksananya penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan/pasar hewan rumah potong hewan**	**%**					**100,00**	**-**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi							-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.03	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Terlaksananya pengawasan perijinan usaha pengecer**							**-**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan					*0,00*	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**99,63**	**99,63**	**30,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,27,07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kelompok Tani yang dibina Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh**							**617.494,00**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya Produksi/Produktivitas Pertanian**							**617.494,00**											0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					10,00	198.470,00	198.470,00	7,82	147.091,00	10,00	190.052,00	100,00	95,76	95,76	10,00	190.052	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					10,00	11.919,00	11.919,00	2,30	2.804,00	10,00	11.869,00	100,00	99,58	99,58	10,00	11.869	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit					10,00	150.000,00	150.000,00	1,33	-	10,00	129.276,00	100,00	86,18	86,18	10,00	129.276	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit					10,00	143.305,00	143.305,00	5,70	81.935,00	10,00	143.305,00	100,00	100,00	100,00	10,00	143.305	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.27.07.2.01.06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang					10,00	68.800,00	68.800,00	10,00	66.556,20	10,00	66.556,20	100,00	96,74	96,74	10,00	66.556	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
	3.27.07.2.01.07	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Kapasitasnya	unit					10,00	45.000,00	45.000,00	10,00	44.939,20	10,00	44.939,20	100,00	99,86	99,86	10,00	44.939	0,00	0,00	Dinas Pertanian & Ketanpan
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**96,35**	**96,35**	**10,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**36.091.848,859**	**35.355.896,232**		**12.582.315,591**		**34.078.043,902**								
										35.708.881,359	**34.972.927,732**	**TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S**			**33.703.673,402**	**81,50**	**83,81**	**84,06**	**482,97**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. BULUKUMBA																	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2,17,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**							**28.935,40**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4,00	28.935,40	28.935,40	2,52	17.825,10	4,00	28.537,35	100,00	98,62	98,62	4,00	28.537	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium**																0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						*56,00*	3.177.254,61	3.138.411,62	17,43	734.159,02	56,00	3.024.558,79	100,00	95,19	96,37	56,00	3.024.559	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					1,00	12.720,00	12.720,00	0,21	2.670,00	1,00	12.720,00	100,00	100,00	100,00	1,00	12.720	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ver	Dokumen					12	108.180,000	108.180,00	3,00	27.045,00	12,00	108.180,00	100,00	100,00	100,00	12,00	108.180	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang ikut Pelatihan**							**12.620,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					10,00	12.620,00	10.310,00	3,30	-	10,00	8.512,00	100,00	67,45	82,56	10,00	8.512	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Kantor**							**157.230,90**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2,00	25.391,20	28.701,20	0,44	9.297,90	2,00	28.700,90	100,00	113,03	100,00	2,00	28.701	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3,00	4.990,70	4.990,70	0,63	1.011,00	3,00	4.990,70	100,00	100,00	100,00	3,00	4.991	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					65,00	126.849,00	125.849,00	13,70	56.053,29	65,00	123.904,87	100,00	97,68	98,46	65,00	123.905	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kendaraan dan Peralatan Kantor**							**28.245,80**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	28.245,80	28.245,80	0,75	21.345,00	0,75	21.345,00	75,40	75,57	75,57	0,75	21.345	0,00	0,00	Dinas Perindag

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor**							**461.719,80**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	185.433,000	185.433,00	5,23	34.795,95	12,00	139.302,35	100,00	75,12	75,12	12,00	139.302	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1.830,00	1,00	3.050,00	100,00	100,00	100,00	1,00	3.050	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	273.236,80	279.389,67	3,52	71.033,50	12,00	263.982,00	100,00	96,61	94,49	12,00	263.982	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**							**133.552,05**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					43,00	58.900,00	58.900,00	18,51	32.189,03	43,00	54.337,87	100,00	92,25	92,25	43,00	54.338	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	74.652,05	119.471,73	1,00	119.116,15	1,00	119.116,15	100,00	159,56	99,70	1,00	119.116	0,00	0,00	Dinas Perindag
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**114,62**	**114,26**	**109,43**	**18,56**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17,02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Ada**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Usaha					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17,03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Yang Dilakukan**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Usaha					290,00	-	11.171,00	0,00	-	197,06	7.591,00	67,95	0,00	67,95	197,06	7.591	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**67,95**	**0,00**	**67,95**	**197,06**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**S**	**SR**	**S**	**ST**		**SR**	**SR**	
	2,17,04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Kategori Sehat**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Usaha Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Usaha					267,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Usaha					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17,05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Diklat Perkoperasian Yang Diadakan**																				DKUKMTK
	2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi yang Wilayah Keanggotan dalam daerah Kabupaten/Kota**							**369.370,00**									**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	DKUKMTK
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang					100,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17,06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Volume Usaha dan Modal Usaha Koperasi**																0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan, Pemasaran, Pendampingan dan Kemitraan)**							**10.357,95**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Usaha					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17,07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM Yang Diberdayakan**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melakukan Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.**							**324.520,40**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Usaha					3330,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Usaha					500	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Usaha					21	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang					33178	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	2,17	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha**							**121.515,00**									0,00	-	0,00	0,00	DKUKMTK
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Usaha					40	-	24.000,00	0,00	-	2,53	6.483,00	6,33	0,00	27,01	2,53	6.483	0,00	0,00	DKUKMTK
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**6,33**	**0,00**	**27,01**	**2,53**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**4.120.458,561**	**4.132.588,114**				**3.941.237,977**								
SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																**14,86**	**0,00**	**18,99**	**39,92**		**0,00**	**0,00**	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN																**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3,30,03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal**	**%**					**50**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi**	**%**					**100**	**51.715.061,45**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit					10	51.715.061,45	52.064.749,90	7,93	26.623.133,63	10,00	37.193.758,78	100,00	71,92	71,44	10,00	37.193.759	0,00	0,00	Dinas Perindag

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bina dan di Kelola**	**%**					**100**	**1.572.162,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen					12	1.572.162,00	1.572.162,00	4,21	518.774,50	12,00	1.538.514,50	100,00	97,86	97,86	12,00	1.538.515	0,00	0,00	Dinas Perindag
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																**100,00**	**84,89**	**84,65**	**11,00**		**0,00**	**0,00**	
	Predikat Kinerja															**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,30,04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok**	**%**					**27.90**	**57.951,00**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**%**					**100**	**57.951,000**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan					12	57.951,00	57.951,00	0,51	18.282,00	12,00	57.201,00	100,00	98,71	98,71	12,00	57.201	0,00	0,00	Dinas Perindag
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**100,00**	**98,71**	**98,71**	**12,00**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,03,05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Promosi Komoditi Ekspor**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Pameran**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Usaha					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Usaha					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,30,06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku**							**164.969,60**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku**							**164.969,60**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit					250	93.017,60	93.017,60	46,10	36.997,80	250,00	92.266,80	100,00	99,19	99,19	250,00	92.267	0,00	0,00	Dinas Perindag

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang					10	71.952,00	71.952,00	0,58	27.208,00	10,00	71.202,00	100,00	98,96	98,96	10,00	71.202	0,00	0,00	Dinas Perindag
										57.688.553,613	**57.992.420,615**	**Capaian Kinerja (%)**			**42.894.181,055**	**100,00**	**99,08**	**99,08**	**130,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**Dok**					**1**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3,31,02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi**	**%**					**8.03**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM yang di Bina dan yang di Bantu**	**%**					**100**										0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen					1	3.875.503,25	3.875.503,25	0,28	1.018.261,21	1,00	3.821.438,69	100,00	98,60	98,60	1,00	3.821.439	0,00	0,00	Dinas Perindag
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**33,33**	**32,87**	**32,87**	**0,33**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	3,31,03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang di Awasi**							**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	,331,04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**					**83.33**	**-**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**					**83,33**	**485.921,70**									0,00	-	0,00	0,00	Dinas Perindag
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen					1	485.921,70	485.921,70	0,30	70.410,52	1,00	410.825,80	100,00	84,55	84,55	1,00	410.826	0,00	0,00	Dinas Perindag
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**84,55**	**84,55**	**1,00**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**57.871.569,002**	**58.221.257,451**		**28.794.696,755**		**43.185.207,564**								
SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																**68,49**	**64,29**	**63,66**	**21,61**		**0,00**	**0,00**	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN										**4.361.424,95**	**4.361.424,95**				**4.232.264,49**	**S**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
		SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA								61.992.027,56	62.353.845,57				47.126.445,541					47.126.446	0,00	0,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		-	0,00	0,00	Setda
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																		-	0,00	0,00	Setda
	4,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat Daerah)**	**%**					**100**											-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**						***100 %100***											-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					12	113.612,25	113.612,25	4,00	27.936,00	12,00	113.128,23	100,00	99,57	99,57	12,00	113.128	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan Terlaksananya Administrasi keuangan dan Perangkat daerah**	**%**					**100 %100**	**11.455.488,00**										-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12	11.258.360,00	11.155.577,93	3,00	3.067.202,62	12,00	10.877.495,32	100,00	96,62	97,51	12,00	10.877.495	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12	168.686,40	168.686,40	4,00	49.663,90	12,00	167.219,20	100,00	99,13	99,13	12,00	167.219	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					*12*	28.441,600	28.441,60	3,00	6.654,55	12,00	26.877,25	100,00	94,50	94,50	12,00	26.877	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**1 Dokumen 100**	**55.100,25**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					12	55.100,25	63.800,25	3,00	26.206,07	12,00	62.307,82	100,00	113,08	97,66	12,00	62.308	0,00	0,00	Setda

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan.**	**%**					**100 %100**	**118.992,000**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					1	118.992,000	118.992,00	0,00	-	1,00	118.970,00	100,00	99,98	99,98	1,00	118.970	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1	-	1.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan terlaksananya pelayanan administrasi umum**	**%**	**1**				**100 %100**	**2.141.875,69**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	69.877,90	69.877,90	0,00	-	1,00	69.873,40	100,00	99,99	99,99	1,00	69.873	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	29.350,00	31.350,00	0,00	2.000,00	1,00	31.350,00	100,00	106,81	100,00	1,00	31.350	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12	155.555,94	168.317,04	0,50	27.904,95	12,00	167.888,85	100,00	107,93	99,75	12,00	167.889	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12	100.800,00	100.800,00	4,40	27.630,00	12,00	90.270,00	100,00	89,55	89,55	12,00	90.270	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	1.330.355,85	1.483.355,85	3,00	588.014,10	12,00	1.193.211,50	100,00	89,69	80,44	12,00	1.193.212	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12	455.936,00	466.000,00	4,02	196.153,11	12,00	431.750,84	100,00	94,70	92,65	12,00	431.751	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**100 %100**	**1.514.723,82**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3	1.090.427,00	1.090.427,00	0,05	-	3,00	1.081.303,50	100,00	99,16	99,16	3,00	1.081.304	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					12	60.500,00	74.100,00	12,00	74.100,00	12,00	74.100,00	100,00	122,48	100,00	12,00	74.100	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					12	102.409,000	102.409,00	0,08	-	12,00	101.757,50	100,00	99,36	99,36	12,00	101.758	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12	127.610,823	211.591,67	0,00	117.179,30	12,00	211.591,67	100,00	165,81	100,00	12,00	211.592	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12	133.777,00	181.041,10	0,01	47.035,00	12,00	179.378,50	100,00	134,09	99,08	12,00	179.379	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**100 %100**	**2.209.756,00**											0,00	0,00	Setda

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	872.022,46	831.942,38	4,96	203.453,90	12,00	714.997,05	100,00	81,99	85,94	12,00	714.997	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12	50.000,00	60.000,00	4,75	10.000,00	12,00	40.200,00	100,00	80,40	67,00	12,00	40.200	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	1.287.733,54	1.287.733,54	4,25	350.179,20	12,00	1.181.687,60	100,00	91,76	91,76	12,00	1.181.688	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**100 %100**	**1.059.799,95**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					12	294.370,00	302.370,00	6,02	82.884,50	12,00	229.359,87	100,00	77,92	75,85	12,00	229.360	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					24	345.200,00	375.200,00	11,79	138.179,96	24,00	313.664,46	100,00	90,86	83,60	24,00	313.664	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	310.500,00	310.500,00	0,03	8.880,00	1,00	307.835,10	100,00	99,14	99,14	1,00	307.835	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	109.729,95	109.729,95	1,12	9.684,00	2,00	57.640,20	100,00	52,53	52,53	2,00	57.640	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**100 %100**	**894.875,64**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2	174.875,641	174.875,64	0,48	36.593,47	2,00	169.750,38	100,00	97,07	97,07	2,00	169.750	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang					2	120.000,000	120.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						*2*	600.000,000	600.000,00	0,50	110.000,00	2,00	560.000,00	100,00	93,33	93,33	2,00	560.000	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan**	**%**					**100 %100**	**1.317.129,35**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					100	724.650,50	724.650,50	25,00	243.117,10	100,00	712.708,48	100,00	98,35	98,35	100,00	712.708	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket					70	592.478,850	512.478,85	17,50	108.976,60	70,00	491.717,01	100,00	82,99	95,95	70,00	491.717	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah**	**%**					**100 %100**	**182.199,80**											0,00	0,00	Setda

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen					1	39.422,05	39.422,05	0,61	22.829,08	1,00	38.103,49	100,00	96,66	96,66	1,00	38.103	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan					*1*	35.412,500	35.412,50	0,44	15.569,39	1,00	35.376,69	100,00	99,90	99,90	1,00	35.377	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen					1	24.703,00	24.703,00	0,47	11.274,16	1,00	24.225,33	100,00	98,07	98,07	1,00	24.225	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen					1	35.985,20	35.984,90	0,00	21.932,83	0,38	35.422,83	38,00	98,44	98,44	0,38	35.423	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen					*1*	46.677,05	46.677,05	0,17	8.113,13	1,00	46.672,81	100,00	99,99	99,99	1,00	46.673	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Meningkatnya komunikasi pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan informasi publik.**	**%**					**100 %100**	**1.760.999,11**											0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan					1	154.018,25	121.668,25	0,18	36.064,16	1,00	120.887,29	100,00	78,49	99,36	1,00	120.887	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan					1	1.458.673,86	1.345.453,34	0,18	373.900,09	0,70	920.482,93	70,00	63,10	68,41	0,70	920.483	0,00	0,00	Setda
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan					*1*	148.307,000	118.487,00	1,75	47.192,82	2,50	118.025,82	250,00	79,58	99,61	2,50	118.026	0,00	0,00	Setda
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**96,26**	**91,40**	**88,14**	**11,04**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	4,01,02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase lembaga keagamaan dan peningkatan kesadaran toleransi beragama, Persentase Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi, Ketersediaan dokumen LKPJ dan**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase penyelesaian Tapal Batas wilayah administrasi antar daerah, Penyediaan dokumen LKPJ, Penyusunan Dokumen LPPD, terpahaminya PATEN bagi aparatur Kecamatan.**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen					1	34.000,000	34.000,00	0,36	12.403,80	0,99	33.674,50	99,04	99,04	99,04	0,99	33.675	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen					1	112.000,00	122.010,20	0,31	42.693,93	1,00	119.693,25	100,00	106,87	98,10	1,00	119.693	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen					*1*	144.280,40	144.280,15	0,22	30.394,58	1,00	142.424,36	100,00	98,71	98,71	1,00	142.424	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Meningkatnya guru kontrak TKA/TPA sebagai penerima gaji, terlaksananya kegiatan STQ dan Pembinaan Mental Spiritual serta Pengajian Rutin.**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen					1	2.091.764,03	2.091.764,03	0,23	293.485,43	1,00	1.890.014,66	100,00	90,36	90,36	1,00	1.890.015	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1	147.380,00	147.380,00	0,16	22.460,00	0,84	122.380,00	84,00	83,04	83,04	0,84	122.380	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan	Dokumen					1	382.120,00	382.120,00	0,01	4.040,00	1,00	382.120,00	100,00	100,00	100,00	1,00	382.120	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya bantuan hukum penanganan kasus, tersedianya dokumen LHP, terlaksananaya penyuluhan hukum terpadu dan**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus					1	71.600,000	93.600,00	0,49	54.700,00	1,00	91.100,00	100,00	127,23	97,33	1,00	91.100	0,00	0,00	Setda
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen					1	199.999,750	199.999,75	0,34	65.880,60	1,00	197.079,63	100,00	98,54	98,54	1,00	197.080	0,00	0,00	Setda
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**97,88**	**100,47**	**95,64**	**0,98**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	4,01,03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Peningkatan jumlah lembaga Ekonomi Kab/Kota yang berdaya saing, Persentase Jumlah Laporan DAK dan APBD dari OPD tepat waktu**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen					1	137.119,80	137.119,80	0,39	60.877,70	0,80	117.700,97	80,00	85,84	85,84	0,80	117.701	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan					*1*	153.224,350	174.988,30	0,33	65.658,90	1,00	168.131,40	100,00	109,73	96,08	1,00	168.131	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen					1	142.553,75	211.422,80	0,70	138.859,30	0,90	161.698,60	90,00	113,43	76,48	0,90	161.699	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya dokumen penyusunan perencanan sekertariat Daerah,Jumlah dokumen Data laporan Tepra secara berkala dan laporan Capaian Fisik serta data laporan hasil Monitoin evaluasinya**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					1	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**terlaksananya pelatihan Aplikasi Sirup dan Aplikasi SPSE dan Asosiasi/penyedia Barang Jasa.**																		0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen					1	14.999,85	14.999,85	0,50	8.077,85	1,00	14.921,60	100,00	99,48	99,48	1,00	14.922	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen					*1*	69.074,70	69.074,70	0,41	28.730,45	1,00	68.806,45	100,00	99,61	99,61	1,00	68.806	0,00	0,00	Setda
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Setda
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**94,00**	**101,62**	**91,50**	**0,94**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**26.524.668,489**	**26.630.228,526**		**6.924.766,526**		**24.626.976,319**								
RUSAN																**96,05**	**97,83**	**91,76**	**4,32**		**0,00**	**0,00**	
RUSAN																**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		SEKRETARIAT DPRD KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**																			0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Sekretariat DPRD)**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					5,00	29.210,750	35.530,30	2,34	21.698,00	5,00	35.525,20	100,00	121,62	99,99	5,00	35.525	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					10,00	22.849,750	22.849,75	6,03	13.751,60	10,00	22.839,40	100,00	99,95	99,95	10,00	22.839	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Sekretariat DPRD Pengelolaan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pengeloaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						44,00	3.254.807,332	3.249.578,32	14,98	736.274,95	43,98	3.142.050,41	99,95	96,54	96,69	43,98	3.142.050	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					10,00	136.182,150	136.182,15	4,39	55.512,75	9,99	131.600,00	99,90	96,64	96,64	9,99	131.600	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					11,00	21.444,650	31.244,65	1,28	16.132,15	10,99	30.732,65	99,91	143,31	98,36	10,99	30.733	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	5.000,000	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	5.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					2,00	4.786,900	4.786,90	0,00	-	2,00	4.786,90	100,00	100,00	100,00	2,00	4.787	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya**							**11.160,000**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	11.160,000	11.160,00	1,19	6.068,00	2,00	10.576,00	99,95	94,77	94,77	2,00	10.576	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					1,00	874.099,130	874.099,13	0,44	579.068,93	1,00	872.018,93	100,00	99,76	99,76	1,00	872.019	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					85,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					44,00	13.698,000	13.698,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	18.473,70	18.473,70	0,35	6.396,00	1,00	18.467,60	100,00	99,97	99,97	1,00	18.468	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					*1*	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	482.450,580	482.451,28	0,39	189.087,10	1,00	465.472,95	99,99	96,48	96,48	1,00	465.473	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					40	15.000,000	15.000,00	39,99	14.900,00	39,99	14.900,00	99,98	99,33	99,33	39,99	14.900	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					44	497.230,150	497.230,15	9,00	258.193,65	44,00	496.849,02	100,00	99,92	99,92	44,00	496.849	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**131.792,000**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7	29.050,000	35.050,00	0,00	25.700,00	7,00	35.050,00	100,00	120,65	100,00	7,00	35.050	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					*10*	102.742,000	102.742,00	0,10	4.300,00	10,00	102.430,00	99,99	99,70	99,70	10,00	102.430	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah**							**1.811.150,090**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					10	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					*12*	423.239,040	423.239,04	1,00	125.598,70	10,00	333.353,73	83,33	78,76	78,76	10,00	333.354	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					19	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					*12*	1.387.911,050	1.387.911,05	2,01	411.625,30	11,01	1.273.414,45	91,75	91,75	91,75	11,01	1.273.414	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**192.876,000**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					4	12.500,000	17.500,00	1,07	6.330,00	4,00	15.503,00	99,99	124,02	88,59	4,00	15.503	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					16	31.100,000	53.100,00	4,83	30.172,00	15,12	50.186,83	94,51	161,37	94,51	15,12	50.187	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					10	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					2	836,000	150.996,00	0,00	50.147,67	1,96	50.967,67	98,00	6096,61	33,75	1,96	50.968	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					*10*	17.850,000	17.850,00	0,98	7.100,00	9,01	16.085,00	90,08	90,11	90,11	9,01	16.085	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					10	130.590,000	140.960,00	3,26	74.340,00	9,84	138.645,00	98,36	106,17	98,36	9,84	138.645	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						*40*	19.328.957,000	19.328.957,00	9,98	4.819.599,96	39,43	19.052.443,95	98,57	98,57	98,57	39,43	19.052.444	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang					40	100.000,000	100.000,00	9,81	24.512,80	17,93	44.834,05	44,83	44,83	44,83	17,93	44.834	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Layanan Administrasi DPRD**							**150.969,200**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan					*4*	150.969,200	150.969,20	1,90	71.611,40	3,34	126.066,50	83,50	83,50	83,50	3,34	126.067	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**95,30**	**341,77**	**91,37**	**12,42**	**563612,75**	**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	4,02,02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase PROLEGDA yang Terealisir, "Persentase Jumlah program kerja DPRD yang terintegrasi dengan program RPJMD dan RKPD, Persentase Jumlah Ranperda yang difasilitasi pembahasannya**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi pembahasannya**							**849.437,450**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen					20	207.338,050	197.350,05	3,96	66.176,15	17,52	172.881,15	87,60	83,38	87,60	17,52	172.881	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen					*4*	478.452,800	498.444,80	3,32	417.387,80	3,97	494.684,30	99,25	103,39	99,25	3,97	494.684	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen					20	63.646,600	73.396,60	13,52	71.669,00	13,52	71.669,00	67,60	112,60	97,65	13,52	71.669	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen					4	100.000,000	100.000,00	3,98	99.543,69	3,98	99.543,69	99,50	99,54	99,54	3,98	99.544	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Cakupan Anggota DPRD yang Kompeten dibidangnya**							**2.115.120,350**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen					40	379.026,000	379.025,85	0,00	363.294,03	0,00	363.294,03	0,00	95,85	95,85	0,00	363.294	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						*200*	1.145.174,350	437.177,35	84,40	263.274,17	99,32	434.169,84	49,66	37,91	99,31	99,32	434.170	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang					*5*	28.000,000	28.000,00	2,29	7.000,00	4,38	24.500,00	87,50	87,50	87,50	4,38	24.500	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang					*8*	336.000,000	336.000,00	1,17	49.000,00	6,50	273.000,00	81,25	81,25	81,25	6,50	273.000	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen					40	226.920,000	250.880,00	15,54	109.995,00	39,98	248.610,00	99,95	109,56	99,10	39,98	248.610	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terfasilitasinya Kegiatan Reses dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**																		0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan					*40*	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen					40	35.263,300	35.053,30	23,34	20.110,70	36,00	30.420,35	90,00	86,27	86,78	36,00	30.420	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						120	958.661,700	958.661,70	49,39	474.360,95	119,00	942.952,25	99,17	98,36	98,36	119,00	942.952	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD serta Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**							**3.968.631,850**											0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen					200	6.109.859,900	7.914.692,90	0,00	2.092.252,23	200,00	7.914.237,38	100,00	129,53	99,99	200,00	7.914.237	0,00	0,00	SEKRETARIAT DPRD
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**80,12**	**93,76**	**94,35**	**45,35**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**37.170.480,082**	**38.515.241,172**		**11.587.184,673**		**37.559.761,221**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						**87,71**	**217,77**	**92,86**	**28,89**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BULUKUMBA																		-	0,00	0,00	Bapperida
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01	**PERENCANAAN**																		-	0,00	0,00	Bapperida
	37012	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Bappelitbangda)**	**%**					**100,00**											-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persenntase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**%**					**100,00**											-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					11,00	111.331,050	111.331,05	0,49	37.295,05	11,00	111.236,45	100,00	99,92	99,92	11,00	111.236	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					2,00	14.156,300	14.156,30	0,03	-	2,00	13.964,30	100,00	98,64	98,64	2,00	13.964	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2,00	7.836,400	7.836,40	0,03	3.767,50	2,00	7.751,00	100,00	98,91	98,91	2,00	7.751	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					14,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					27,00	17.893,400	17.893,40	5,00	-	27,00	17.611,30	100,00	98,42	98,42	27,00	17.611	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persenntase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						47,00	4.988.084,299	4.879.180,75	11,75	1.087.991,36	47,00	4.569.430,84	100,00	91,61	93,65	47,00	4.569.431	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	95.042,400	95.042,40	4,00	24.811,95	12,00	89.861,40	100,00	94,55	94,55	12,00	89.861	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					1,00	11.222,550	11.222,55	0,01	6.294,45	1,00	11.222,45	100,00	100,00	100,00	1,00	11.222	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**pemenuhan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					100,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan adminstrasi umum kantor**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	12.975,600	12.975,60	0,01	5.163,05	1,00	12.956,20	100,00	99,85	99,85	1,00	12.956	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	88.498,600	88.498,60	0,00	7.468,00	1,00	88.358,53	100,00	99,84	99,84	1,00	88.359	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	9.992,550	9.992,55	0,13	3.779,55	1,00	9.992,55	100,00	100,00	100,00	1,00	9.993	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	13.764,550	13.764,55	1,50	7.246,45	12,00	13.764,55	100,00	100,00	100,00	12,00	13.765	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100,00	143.738,000	143.738,00	2,00	55.611,02	100,00	143.684,30	100,00	99,96	99,96	100,00	143.684	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					50,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	75.706,950	75.706,95	0,00	-	1,00	72.010,00	100,00	95,12	95,12	1,00	72.010	0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					12,00	190.902,251	190.902,25	0,00	-	12,00	188.666,74	100,00	98,83	98,83	12,00	188.667	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	23.028,290	23.028,29	6,00	3.003,81	12,00	22.263,94	100,00	96,68	96,68	12,00	22.264	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	510.915,000	510.915,00	3,00	165.249,00	12,00	496.043,99	100,00	97,09	97,09	12,00	496.044	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	12.000,000	12.000,00	0,88	9.754,00	1,00	11.239,00	100,00	93,66	93,66	1,00	11.239	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					9,00	27.800,000	27.800,00	2,50	5.199,50	9,00	24.233,50	100,00	87,17	87,17	9,00	24.234	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5,00	39.200,000	39.200,00	0,80	10.530,00	5,00	39.010,00	100,00	99,52	99,52	5,00	39.010	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	1.220,000	1.220,00	0,46	-	1,00	995,00	100,00	81,56	81,56	1,00	995	0,00	0,00	Bapperida
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**100,00**	**96,57**	**96,67**	**13,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,01,02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen					2,00	225.722,900	225.722,90	0,85	89.283,24	2,00	204.678,14	100,00	90,68	90,68	2,00	204.678	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Acara					4,00	9.423,500	9.423,50	1,55	-	4,00	9.413,50	100,00	99,89	99,89	4,00	9.414	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Acara					3,00	70.061,000	63.656,00	0,60	8.583,00	3,00	47.600,75	100,00	67,94	74,78	3,00	47.601	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Acara					1,00	27.712,750	27.712,75	0,20	-	1,00	27.512,75	100,00	99,28	99,28	1,00	27.513	0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan					10,00	24.534,000	30.939,00	1,00	-	10,00	30.930,00	100,00	126,07	99,97	10,00	30.930	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen					4,00	322.578,500	322.578,50	0,50	55.703,06	4,00	269.402,29	100,00	83,52	83,52	4,00	269.402	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**pemenuhan terhadap analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidan perencanaan pembangunan daerah**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang					5,00	168.504,800	168.504,80	0,30	33.263,24	5,00	162.366,24	100,00	96,36	96,36	5,00	162.366	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku					1,00	56.495,000	56.495,00	0,30	41.455,50	1,00	50.950,00	100,00	90,18	90,18	1,00	50.950	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pemenuhan terhadap pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan					3,00	115.292,200	115.292,20	1,08	57.503,10	3,00	106.465,80	100,00	92,34	92,34	3,00	106.466	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							**100,00**	**94,03**	**91,89**	**3,67**		**0,00**	**0,00**	
									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,01,03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, Serta Infrastruktur Dan Kewilayahan**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembanguan manusia**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					4,00	61.000,000	61.000,00	2,00	30.814,00	4,00	60.317,98	100,00	98,88	98,88	4,00	60.318	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					2,00	65.458,650	65.458,65	0,32	17.550,70	2,00	64.909,05	100,00	99,16	99,16	2,00	64.909	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					2,00	36.000,000	36.000,00	0,90	16.478,43	2,00	35.470,73	100,00	98,53	98,53	2,00	35.471	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan					24,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**pemenuhan terhadap dokumen pertencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					21,00	61.725,000	61.725,00	11,00	30.526,63	21,00	59.774,71	100,00	96,84	96,84	21,00	59.775	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan					28,00	49.610,000	49.610,00	13,50	22.657,38	28,00	48.126,65	100,00	97,01	97,01	28,00	48.127	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan					28,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					12,00	43.060,000	43.060,00	3,00	12.813,85	12,00	41.978,00	100,00	97,49	97,49	12,00	41.978	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan					16,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan					16,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Pemenuhan terhadap dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3,00	142.113,450	142.113,45	1,10	69.298,38	3,00	140.047,23	100,00	98,55	98,55	3,00	140.047	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan					30,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3,00	122.329,650	122.329,65	1,00	59.699,06	3,00	121.705,22	100,00	99,49	99,49	3,00	121.705	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan					31,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
										7.996.929,590	**7.888.026,038**	**Capaian Kinerja (%)**			**7.425.945,046**	**100,00**	**98,24**	**98,24**	**9,38**		**0,00**	**0,00**	
												Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																			0,00	0,00	Bapperida
	5,05,02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan,, Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah, Persentase**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**"Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan"**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	asi					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Sosial dan Kependudukan**																		0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen					1,00	72.087,300	72.087,30	0,46	50.260,00	1,00	69.769,55	100,00	96,78	96,78	1,00	69.770	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen					1,00	700.000,000	700.000,00	0,10	617.300,87	1,00	693.605,80	100,00	99,09	99,09	1,00	693.606	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembanhan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen					1,00	111.183,600	111.183,60	0,26	29.181,00	1,00	111.064,70	100,00	99,89	99,89	1,00	111.065	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral								-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen					1,00	700.000,000	700.000,00	0,20	620.215,70	1,00	674.380,12	100,00	96,34	96,34	1,00	674.380	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen					1,00	890.620,000	890.620,00	1,00	890.620,00	1,00	890.620,00	100,00	100,00	100,00	1,00	890.620	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi**																		0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan					1,00	50.000,000	50.000,00	0,47	21.857,10	1,00	48.564,90	100,00	97,13	97,13	1,00	48.565	0,00	0,00	Bapperida

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bapperida
										2.523.890,900	**2.523.890,900**	**Capaian Kinerja (%)**			**2.488.005,071**	**100,00**	**98,21**	**98,21**	**1,00**		**0,00**	**0,00**	
												Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**10.520.820,490**	**10.411.916,938**		**4.208.228,914**		**9.913.950,117**								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				**100,00**	**96,76**	**96,25**	**6,89**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BULUKUMBA																					BKAD
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																					BKAD
	5.02	**KEUANGAN**																					BKAD
	5,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BPKPD)**	**%**																			BKAD
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar**	**%**																			BKAD
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					12,00	62.581,650	64.537,45	1,80	26.302,51	12,00	64.371,28	100,00	102,86	99,74	12,00	64.371	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					12,00	8.345,800	8.345,80	6,00	4.354,80	12,00	8.345,55	100,00	100,00	100,00	12,00	8.346	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					12,00	6.345,600	6.345,60	4,20	2.409,40	12,00	6.345,60	100,00	100,00	100,00	12,00	6.346	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					100,00	6.068,800	6.068,80	8,33	455,80	100,00	5.886,80	91,67	97,00	97,00	100,00	5.887	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12,00	63.589,600	66.889,60	1,99	26.316,45	11,57	63.253,75	96,43	99,47	94,56	11,57	63.254	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**	**%**					**12,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	5.417.938,886	5.092.284,63	2,97	968.178,84	11,37	4.825.687,04	94,76	89,07	94,76	11,37	4.825.687	0,00	0,00	BKAD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12,00	83.263,000	83.263,00	3,00	32.656,25	12,00	83.010,50	100,00	99,70	99,70	12,00	83.011	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	311.524,500	315.524,50	3,00	103.534,00	12,00	315.515,95	100,00	101,28	100,00	12,00	315.516	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					12,00	3.773,100	3.773,10	0,00	-	12,00	3.773,00	99,99	100,00	100,00	12,00	3.773	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					1,00	1.999,900	1.999,90	0,00	-	1,00	1.998,85	99,99	99,95	99,95	1,00	1.999	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1,00	1.999,800	1.999,80	0,00	-	1,00	1.999,55	99,98	99,99	99,99	1,00	2.000	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar**	**%**					**4,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					2,00	5.500,250	5.500,25	0,00	-	1,96	5.386,15	97,96	97,93	97,93	1,96	5.386	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					2,00	3.000,200	3.000,20	0,12	-	1,60	2.232,50	80,00	74,41	74,41	1,60	2.233	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					8,00	8.290,000	8.290,00	0,00	-	8,00	8.147,50	100,00	98,28	98,28	8,00	8.148	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**					**7,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					100,00	6.372,300	6.360,90	19,90	1.709,70	99,90	6.354,40	99,90	99,72	99,90	99,90	6.354	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					14,00	3.876,750	36.818,75	13,30	35.963,00	13,30	35.963,00	95,00	927,66	97,68	13,30	35.963	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					12,00	6.272,500	6.272,50	1,79	1.091,65	11,39	5.951,65	94,89	94,88	94,88	11,39	5.952	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					6,00	77.951,570	90.576,62	0,00	12.625,05	6,00	90.576,62	100,00	116,20	100,00	6,00	90.577	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					10,00	18.658,250	18.658,25	3,20	7.965,00	9,60	17.909,90	95,99	95,99	95,99	9,60	17.910	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					12,00	2.000,000	2.000,00	1,00	180,00	10,00	900,00	83,33	45,00	45,00	10,00	900	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	39.490,630	39.490,63	1,80	6.205,67	11,40	37.905,86	95,00	95,99	95,99	11,40	37.906	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	134.568,000	134.568,00	0,00	64.808,43	12,00	134.416,43	100,00	99,89	99,89	12,00	134.416	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana kantor / barang miilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**					**3,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	80.611,050	80.611,05	0,00	8.000,00	3,00	80.611,05	100,00	100,00	100,00	3,00	80.611	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					100,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa administrasi perkantoran**	**%**					**12,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	63.896	63.896,10	0,15	10.396,46	0,95	60.970,54	95,00	95,42	95,42	0,95	60.971	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	731.880	731.880,00	0,18	184.520,00	0,98	718.970,00	98,24	98,24	98,24	0,98	718.970	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**					**12**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					52	12.000,000	12.000,00	9,43	4.140,73	51,03	11.777,28	98,14	98,14	98,14	51,03	11.777	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2	49.500,000	49.500,00	0,58	18.447,84	1,73	44.500,12	86,54	89,90	89,90	1,73	44.500	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					5,00	1.501,500	1.501,50	0,00	-	5,00	1.501,50	100,00	100,00	100,00	5,00	1.502	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	7.000,000	7.000,00	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	7.000	0,00	0,00	BKAD
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					12,00	28.930,000	28.930,00	0,00	14.205,00	11,50	27.805,00	95,83	96,11	96,11	11,50	27.805	0,00	0,00	BKAD
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												**64,41**	**82,51**	**63,63**	**10,16**		**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja												**R**	**T**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,02,02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Total Dana Bagi Hasil kab/Kota dan Desa, Penetapan APBD (Tepat Waktu), Persentase SILPA terhadap APBD. Persentase**						**95,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun**	**%**					**95,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen					2,00	61.305,000	61.305,00	0,76	25.099,75	1,96	60.170,70	98,15	98,15	98,15	1,96	60.171	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen					2,00	63.713,000	63.713,00	0,00	-	1,80	56.613,90	90,00	88,86	88,86	1,80	56.614	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen					37,00	25.490,000	25.490,00	23,72	20.167,87	32,26	24.878,59	87,18	97,60	97,60	32,26	24.879	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen					37,00	17.150,000	17.150,00	0,00	-	32,26	14.875,00	87,18	86,73	86,73	32,26	14.875	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen					37,00	16.020,000	16.020,00	7,59	-	37,00	15.930,00	100,00	99,44	99,44	37,00	15.930	0,00	0,00	BKAD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen					37,00	18.700,000	18.700,00	0,00	-	31,78	15.540,00	85,90	83,10	83,10	31,78	15.540	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen					2,00	169.864,750	169.864,75	0,46	68.674,22	1,99	168.899,00	99,43	99,43	99,43	1,99	168.899	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen					2,00	123.894,500	124.137,00	0,73	65.710,39	1,93	123.890,86	96,67	100,00	99,80	1,93	123.891	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen					2,00	24.398,700	24.398,70	0,10	4.647,51	0,70	11.310,21	35,00	46,36	46,36	0,70	11.310	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen					1,00	538.319,000	538.319,00	0,20	158.619,90	0,95	516.752,72	95,00	95,99	95,99	0,95	516.753	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen					1,00	23.812,000	30.086,00	0,18	6.538,00	1,00	30.010,40	99,75	126,03	99,75	1,00	30.010	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					37,00	48.644,150	48.644,15	18,50	34.204,90	29,60	45.536,05	80,00	93,61	93,61	29,60	45.536	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah**	**%**					**95,00**						-					-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen					1,00	11.249,750	11.249,75	0,04	923,50	1,00	11.238,83	100,00	99,90	99,90	1,00	11.239	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen					37,00	35.200,000	35.200,00	0,00	9.890,00	37,00	35.160,00	100,00	99,89	99,89	37,00	35.160	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen					4,00	152.651	152.651,25	0,34	42.064,80	3,90	152.429,25	97,50	99,85	99,85	3,90	152.429	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen					37,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						3,00	10.526,550	10.526,55	0,00	-	2,50	10.305,05	83,33	97,90	97,90	2,50	10.305	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen					2		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen					1,00	84.208,450	84.208,45	0,16	31.773,85	0,89	74.857,25	88,89	88,90	88,90	0,89	74.857	0,00	0,00	BKAD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen					1,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					37,00	43.828,500	43.828,50	0,00	-	28,00	43.172,46	75,68	98,50	98,50	28,00	43.172	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)**	**%**					**95,00**						-				0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan					12,00	82.734,000	80.592,00	3,00	41.230,40	12,00	80.095,90	100,00	96,81	99,38	12,00	80.096	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen					2,00	47.200,000	47.200,00	0,00	2.186,25	1,95	47.152,25	97,30	99,90	99,90	1,95	47.152	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan					3,00	23.402,000	23.402,00	0,23	13.406,50	2,31	21.289,30	76,92	90,97	90,97	2,31	21.289	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan					2,00	82.285,250	82.285,25	0,09	1.321,50	1,99	81.668,70	99,50	99,25	99,25	1,99	81.669	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Dokumen					55,00	90.523,000	93.873,00	3,00	16.087,00	54,00	91.842,65	98,18	101,46	97,84	54,00	91.843	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen					1,00	3.150,000	3.150,00	0,90	3.143,25	0,90	3.143,25	0,00	99,79	99,79	0,90	3.143	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen					1,00	15.510,000	15.510,00	0,17	3.883,75	0,90	15.153,45	90,00	97,70	97,70	0,90	15.153	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen					2,00	60.426,000	60.426,00	0,41	35.815,00	2,00	60.079,10	100,00	99,43	99,43	2,00	60.079	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen					1,00	15.300,000	15.300,00	0,16	1.775,00	0,70	12.029,00	70,00	78,62	78,62	0,70	12.029	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					37,00	137.900,000	136.692,00	2,00	120.864,87	25,00	131.481,77	67,57	95,35	96,19	25,00	131.482	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga					1	22.871,000	22.871,00	0,41	10.691,00	0,91	21.569,50	90,91	94,31	94,31	0,91	21.570	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**%**					**95,00**						-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan					109,00	176.625.312,601	179.395.202,60	25,18	43.567.988,95	109,00	179.395.202,40	100,00	101,57	100,00	109,00	179.395.202	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan					1,00	827.941,742	1.055.941,02	0,00	-	0,50	288.012,63	50,00	34,79	27,28	0,50	288.013	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan					109,00	9.489.033,446	9.489.033,45	80,00	5.209.730,65	80,00	5.209.730,65	73,39	0,00	54,90	0,00	5.209.731	0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD**	**%**					**95,00**					0,00	-	0,00						0,00	0,00	BKAD
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen					4,00	103.120,000	103.120,00	0,27	19.596,00	3,67	94.720,00	91,85	91,85	91,85	3,67	94.720	0,00	0,00	BKAD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					37,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
																59,69	**63,45**	**63,85**	**9,84**		**0,00**	**0,00**	
																R	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,02,03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Manajemen Aset**												-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik**												-						0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen					1,00	20.950,000	20.950,00	0,08	2.100,00	0,98	20.557,60	98,13	98,13	98,13	0,98	20.558	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					1,00	14.050,100	14.050,10	0,64	11.559,40	0,84	13.822,90	84,00	98,38	98,38	0,84	13.823	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen					2,00	7.690,000	7.690,00	0,95	3.640,00	2,00	7.690,00	100,00	100,00	100,00	2,00	7.690	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan					3,00	53.812,000	103.904,00	0,60	85.770,10	3,00	103.901,10	100,00	193,08	100,00	3,00	103.901	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						3,00	15.016,000	14.923,95	2,60	12.234,60	3,00	14.040,60	100,00	93,50	94,08	3,00	14.041	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan					1,00	26.300,000	26.300,00	0,59	15.400,00	0,99	26.152,00	99,43	99,44	99,44	0,99	26.152	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen					3,00	74.879,600	79.855,25	0,60	16.281,00	3,00	79.224,95	100,00	105,80	99,21	3,00	79.225	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan					4,00	17.340,600	17.340,60	1,60	7.350,00	4,00	17.339,90	100,00	100,00	100,00	4,00	17.340	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan					1,00	76.225,600	76.225,60	0,10	22.670,10	1,00	74.651,05	100,00	97,93	97,93	1,00	74.651	0,00	0,00	BKAD
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang					521	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD
																73,46	**82,19**	**73,93**	**1,57**		**0,00**	**0,00**	
																S	**T**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**196.650.678,271**	**199.439.216,840**		**51.234.506,565**		**194.001.188,269**								
																65,85	**76,05**	**67,14**	**7,19**		**0,00**	**0,00**	
																R	**T**	**S**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,02,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah buku Standar Harga yang disusun**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Pendapatan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen					1,00	1.059,950	1.059,95	1,00	1.059,95	1,00	1.059,95	100,00	100,00	100,00	1,00	1.060	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen					1,00	48.575,250	48.575,25	0,46	8.753,05	1,00	47.745,88	100,00	98,29	98,29	1,00	47.746	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan					12,00	30.472,500	30.472,50	7,67	18.205,00	10,80	26.162,85	90,00	85,86	85,86	10,80	26.163	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit					1,00	145.322,500	242.822,00	0,00	97.000,00	1,00	242.145,00	100,00	166,63	99,72	1,00	242.145	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					1,00	152.050,000	152.050,00	0,25	122.596,50	1,00	147.868,10	100,00	97,25	97,25	1,00	147.868	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan					1,00	88.860,000	88.860,00	0,25	1.100,00	1,00	88.850,00	100,00	99,99	99,99	1,00	88.850	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Pajak					10000,00	42.100,000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen					1,00	9.541,950	9.641,70	0,25	2.846,00	1,00	9.496,95	100,00	99,53	98,50	1,00	9.497	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					12,00	78.543,000	83.308,10	3,00	44.426,95	12,00	82.143,37	100,00	104,58	98,60	12,00	82.143	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen					1,00	27.469,750	27.469,75	0,25	15.175,05	1,00	25.588,05	100,00	93,15	93,15	1,00	25.588	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen					1,00	75.641,150	79.201,15	0,25	23.477,35	1,00	77.825,95	100,00	102,89	98,26	1,00	77.826	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen					1,00	199.543,500	199.543,50	0,25	77.279,50	1,00	190.950,40	100,00	95,69	95,69	1,00	190.950	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	Laporan					1,00	26.217,000	26.217,00	0,25	11.996,00	1,00	25.285,40	100,00	96,45	96,45	1,00	25.285	0,00	0,00	Pendapatan
																91,54	**95,41**	**89,37**	**2,52**		**0,00**	**0,00**	
																ST	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5.02.04.2.01.0014	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Laporan**					**1,00**	**-**											0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**											0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Laporan					1,00	23.303,800	23.303,80	0,40	3.119,85	1,00	16.660,80	100,00	71,49	71,49	1,00	16.661	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Laporan					1,00	4.049,750	4.049,75	0,00	-	1,00	4.049,75	100,00	100,00	100,00	1,00	4.050	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Laporan					1,00	3.096,900	3.817,55	0,00	720,65	1,00	3.817,30	100,00	123,26	99,99	1,00	3.817	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Laporan					1,00	2.292,200	8.496,05	0,53	7.426,05	1,00	8.496,05	100,00	370,65	100,00	1,00	8.496	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Laporan					1,00	32.632,950	32.632,95	0,21	9.834,60	1,00	32.186,95	100,00	98,63	98,63	1,00	32.187	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Laporan					1,00	6.331.002,233	6.324.765,27	0,65	2.244.437,86	1,00	5.102.205,50	100,00	80,59	80,67	1,00	5.102.205	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Laporan					1,00	24.920,100	24.920,10	0,25	-	1,00	10.936,75	100,00	43,89	43,89	1,00	10.937	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Laporan					1,00	90.279,800	88.299,80	0,25	31.705,80	1,00	85.739,80	100,00	94,97	97,10	1,00	85.740	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Laporan					1,00	3.149,750	3.149,75	1,00	3.149,75	1,00	3.149,75	100,00	100,00	100,00	1,00	3.150	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Laporan					1,00	1.999,900	1.999,90	0,00	-	1,00	1.999,90	100,00	100,00	100,00	1,00	2.000	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Laporan					1,00	1.999,700	1.999,70	0,00	-	1,00	1.999,45	100,00	99,99	99,99	1,00	1.999	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Laporan					1,00	2.509,850	2.509,85	0,02	-	0,52	1.249,50	52,04	49,78	49,78	0,52	1.250	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Laporan					1,00	2.999,850	2.999,85	0,50	689,85	0,50	689,85	50,00	23,00	23,00	0,50	690	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Laporan					1,00	1.989,850	1.989,85	0,00	-	1,00	1.989,85	100,00	100,00	100,00	1,00	1.990	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Laporan					1,00	2.440,500	2.440,50	1,00	2.440,50	1,00	2.440,50	100,00	100,00	100,00	1,00	2.441	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Laporan					1,00	42.259,390	42.259,39	0,53	21.173,50	1,00	41.250,30	100,00	97,61	97,61	1,00	41.250	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Laporan					1,00	177.999,800	177.999,80	0,28	35.640,00	1,00	164.901,00	100,00	92,64	92,64	1,00	164.901	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Laporan					1,00	1.200,000	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Laporan					1,00	15.559,656	15.559,66	0,33	5.160,00	1,00	15.550,61	100,00	99,94	99,94	1,00	15.551	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Laporan					1,00	64.857,000	72.337,00	0,07	12.208,25	1,00	72.335,40	100,00	111,53	100,00	1,00	72.335	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Mebel	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Laporan					1,00	123.038,400	134.161,74	0,35	46.497,06	1,00	125.881,58	100,00	102,31	93,83	1,00	125.882	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Laporan					1,00	831.160,000	852.640,00	0,00	404.980,00	0,52	848.900,00	52,28	102,13	99,56	0,52	848.900	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**Laporan**					**1,00**	**-**						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Laporan					1,00	3.500,000	3.500,00	0,07	-	0,40	1.158,22	40,00	33,09	33,09	0,40	1.158	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Laporan					1,00	8.100,000	8.100,00	0,10	794,65	0,71	5.730,15	70,74	70,74	70,74	0,71	5.730	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pemeliharaan Mebel	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
	5.02.04.2.01.0014	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Pendapatan
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**86,04**	**94,43**	**81,33**	**0,86**		**0,00**	**0,00**	
													Predikat Kinerja			**T**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**8.721.737,929**	**8.823.153,151**		**3.253.893,712**		**7.518.440,845**								
										205.372.416,200	**208.262.369,991**	**TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S**			**201.519.629,114**	**88,79**	**94,92**	**85,35**	**1,69**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**ST**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	BKPSDM
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																			0,00	0,00	BKPSDM
	5.03	**KEPEGAWAIAN**																			0,00	0,00	BKPSDM
	5,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Penyusunan perencanaan,keuangan dan administrasi umum urusan pemerintahan daerah**																		0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																			0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					6,00	17.670,300	15.130,10	0,10	3.041,45	6,00	15.115,30	100,00	85,54	99,90	6,00	15.115	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**					**100,00**						-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						39,00	3.461.093,782	3.401.669,82	8,99	627.791,93	38,99	3.226.992,97	99,97	93,24	94,86	38,99	3.226.993	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	78.360,000	78.360,00	3,00	24.840,00	12,00	77.080,00	100,00	98,37	98,37	12,00	77.080	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**					**100,00**						-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					39,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					38,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang					39,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase terlaksananya administrasi umum perangkat Daerah**	**%**					**100,00**						-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	77.541,250	77.541,25	2,18	32.341,30	12,00	77.284,10	100,00	99,67	99,67	12,00	77.284	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					97,00	127.333,000	127.333,00	0,17	58.643,72	96,95	124.452,57	99,95	97,74	97,74	96,95	124.453	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	86.584,000	86.584,00	3,00	12.631,77	12,00	51.993,54	100,00	60,05	60,05	12,00	51.994	0,00	0,00	BKPSDM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	146.040,000	150.040,00	3,00	52.680,00	12,00	150.040,00	100,00	102,74	100,00	12,00	150.040	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara dengan Baik**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	25.500,000	25.500,00	0,00	8.603,31	1,00	22.668,81	100,00	88,90	88,90	1,00	22.669	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					11,00	29.500,000	29.500,00	1,99	11.655,00	10,99	21.860,70	99,91	74,10	74,10	10,99	21.861	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					24,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					25,00	4.260,000	4.260,00	0,08	2.660,00	25,00	4.260,00	100,00	100,00	100,00	25,00	4.260	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
erja (%)																**62,49**	**56,27**	**57,10**	**14,18**		**0,00**	**0,00**	
Kinerja																**R**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	5,03,02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Peningkatan Pelayanan administrasi kepegawaian, Pengadaan Pegawai yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi**	**%**					**55,00**												0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase terlaksananya Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						397,00	529.396,000	199.395,80	45,02	166.099,55	395,02	184.768,74	99,50	34,90	92,66	395,02	184.769	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						250,00	21.404,500	21.404,50	30,00	13.331,27	250,00	21.113,77	100,00	98,64	98,64	250,00	21.114	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						5853,00	30.010,000	30.009,85	294,99	17.424,25	5850,07	29.983,38	99,95	99,91	99,91	5850,07	29.983	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						868,00	105.459,900	105.459,90	81,94	21.517,15	858,97	103.100,72	98,96	97,76	97,76	858,97	103.101	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen					2,00	85.170,000	85.170,00	0,63	44.559,41	1,97	81.988,64	98,33	96,26	96,26	1,97	81.989	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang					200,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang					12,00	2.870,000	2.870,00	0,00	1.820,00	4,39	2.870,00	36,58	100,00	100,00	4,39	2.870	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Presentase Penilain dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						5853,00	78.719,800	90.320,15	2929,43	30.602,15	5000,22	59.495,65	85,43	75,58	65,87	5000,22	59.496	0,00	0,00	BKPSDM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang					700,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan					50,00	78.974,100	78.974,10	19,00	50.729,00	49,00	68.081,90	98,00	86,21	86,21	49,00	68.082	0,00	0,00	BKPSDM
										4.985.886,632	**4.609.522,465**	**Capaian Kinerja (%)**			**4.323.150,801**	**79,64**	**76,59**	**81,93**	**1772,81**		**0,00**	**0,00**	
												Predikat Kinerja				**T**	**T**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																			0,00	0,00	BKPSDM
	5,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural,fungsional serta pelatihan teknis lainnya**																		0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**PresentaseAparatur sipil Negara Yang Mengikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis/Fungsional**																		0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang					50,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Presentase Aparatur sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Struktural**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang					200,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKPSDM
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan					200,00	1.052.254,750	1.039.194,75	36,00	208.482,06	196,00	975.669,20	98,00	92,72	93,89	196,00	975.669	0,00	0,00	BKPSDM
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				**98,00**	**92,72**	**93,89**	**196,00**		**0,00**	**0,00**	
												Predikat Kinerja				**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**6.038.141,382**	**5.648.717,215**		**1.389.453,316**		**5.298.819,996**								
										1.052.254,750	**1.039.194,750**	**TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S**			**975.669,195**	**80,04**	**75,19**	**77,64**	**661,00**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**T**	**S**	**T**	**ST**		**SR**	**SR**	
		INSPEKTORAT DAERAH KAB. BULUKUMBA																			0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																			0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																			0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Inspektorat Daerah)**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					6,00	16.121,550	16.121,55	3,40	12.539,00	6,00	15.822,00	100,00	98,14	98,14	6,00	15.822	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan**	**%**					**100,00**	**4.745.492,451**					-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						40,00	4.576.972,651	4.576.972,70	11,47	1.234.975,37	40,00	4.461.411,33	100,00	97,48	97,48	40,00	4.461.411	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	161.072,050	148.412,05	3,00	41.000,00	12,00	148.320,00	100,00	92,08	99,94	12,00	148.320	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	3.063,050	3.063,05	0,05	96,00	1,00	2.904,00	100,00	94,81	94,81	1,00	2.904	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					17,00	4.384,700	4.384,70	0,20	-	17,00	4.282,00	100,00	97,66	97,66	17,00	4.282	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					60,00	566.469,000	546.569,00	23,00	163.505,68	60,00	484.958,51	100,00	85,61	88,73	60,00	484.959	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	183,150	463,90	1,00	279,75	1,00	279,75	100,00	152,74	60,30	1,00	280	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					2,00	140.189,978	140.189,98	0,50	91.900,20	2,00	137.055,30	100,00	97,76	97,76	2,00	137.055	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4,00	49.328,150	49.312,35	2,00	28.984,60	4,00	49.303,50	100,00	99,95	99,98	4,00	49.304	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					102,00	290.246,000	295.016,00	32,00	130.125,35	102,00	294.168,12	100,00	101,35	99,71	102,00	294.168	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					3,00	51.451,300	51.451,30	0,08	-	3,00	51.120,00	100,00	99,36	99,36	3,00	51.120	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					11,00	223.782,050	268.877,05	0,00	123.990,00	11,00	260.995,00	100,00	116,63	97,07	11,00	260.995	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor**	**%**					**100,00**	**779.704,100**					-				0,00	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	597.008,600	597.008,60	3,00	234.751,19	12,00	553.205,35	100,00	92,66	92,66	12,00	553.205	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	182.695,500	182.695,50	3,00	77.398,00	12,00	174.482,00	100,00	95,50	95,50	12,00	174.482	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	12.000,000	12.000,00	0,85	8.966,09	1,00	11.565,59	100,00	96,38	96,38	1,00	11.566	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					13,00	79.400,000	82.460,00	4,15	18.227,75	12,00	63.681,29	92,31	80,20	77,23	12,00	63.681	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					18,00	110.195,000	110.195,00	9,00	68.234,40	18,00	103.846,60	100,00	94,24	94,24	18,00	103.847	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**89,07**	**89,08**	**83,52**	**16,53**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	6,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Jumlah Temuan BPK dan Persentase Pelanggaran Pegawai**	**%**					**57,00**	**-**											0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**	**%**					**100 %100**												0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan					14,00	282.300,000	282.300,00	5,00	48.900,00	14,00	250.800,00	100,00	88,84	88,84	14,00	250.800	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					12,00	1.141.560,000	1.141.560,00	6,00	713.020,00	12,00	1.141.560,00	100,00	100,00	100,00	12,00	1.141.560	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan					8,00	255.600,000	255.600,00	2,00	54.300,00	8,00	231.300,00	100,00	90,49	90,49	8,00	231.300	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan					25,00	440.030,000	440.030,00	9,00	129.900,00	24,00	392.561,30	96,00	89,21	89,21	24,00	392.561	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan					8,00	299.700,000	289.500,00	0,41	-	8,00	289.500,00	100,00	96,60	100,00	8,00	289.500	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen					4,00	594.441,000	610.381,00	1,00	184.908,06	4,00	486.704,85	100,00	81,88	79,74	4,00	486.705	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,33**	**91,17**	**91,38**	**11,67**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**								**-**											0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu**							**-**											0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		%					100,00	332.100,000	339.640,00	15,00	185.460,00	95,00	318.270,00	95,00	95,84	93,71	95,00	318.270	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**95,00**	**95,84**	**93,71**	**95,00**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	6,01,03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persenatse Tindak Lanjut Temuan**	**%**					**60,00**												0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	asi					2,00	230.120,000	212.330,00	1,01	52.262,40	2,00	200.531,00	100,00	87,14	94,44	2,00	200.531	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase cakupan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah**	**%**					**100,00**						-						0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	daerah					36,00	1.102.044,000	219.330,00	4,00	53.700,00	35,00	182.572,00	97,22	16,57	83,24	35,00	182.572	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	daerah					12,00	-	125.100,00	1,00	720,00	12,00	124.140,00	100,00	0,00	99,23	12,00	124.140	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					3,00	-	708.494,00	2,00	381.403,75	3,00	633.376,52	100,00	0,00	89,40	3,00	633.377	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	daerah					36,00	-	33.000,00	0,00	-	36,00	33.000,00	100,00	0,00	100,00	36,00	33.000	0,00	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,44	20,74	93,26	17,60		0,00	0,00	
															Predikat Kinerja	ST	SR	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									11.742.457,729	11.742.457,729		4.039.548		11.101.716,008								
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	95,71	74,21	90,47	35,20		0,00	0,00	
															PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	ST	S	T	SR		SR	SR	
	7	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU																				0,00	0,00	Ujung Bulu
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																				0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01	KECAMATAN																				0,00	0,00	Ujung Bulu
	7,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNGBULU)																			0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu Terlaksanaya administrasi keuangan perangkat																			0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan					12,00	7.010.473,863	6.943.529,20	2,84	1.194.102,02	12,00	6.725.792,16	100,00	95,94	96,86	12,00	6.725.792	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	340.950,000	340.950,00	3,00	104.092,50	12,00	340.950,00	100,00	100,00	100,00	12,00	340.950	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kepergawaian perangkat daerah terlaksanya Administrasi kepegawaian perangkat daerah												-						0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					4,00	73.215,000	73.215,00	0,00	-	4,00	73.215,00	100,00	100,00	100,00	4,00	73.215	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum kantor terlaksanaya administrasi umum perangkat daerah												-						0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					12,00	9.468,900	9.468,90	0,00	3.302,80	12,00	9.468,40	100,00	99,99	99,99	12,00	9.468	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	34.642,500	34.642,50	0,00	-	12,00	34.642,50	100,00	100,00	100,00	12,00	34.643	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12,00	21.715,750	21.903,00	6,07	11.263,60	12,00	21.902,55	100,00	100,86	100,00	12,00	21.903	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	82.830,000	82.830,00	3,03	22.728,00	12,00	82.786,00	100,00	99,95	99,95	12,00	82.786	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	234.837,000	242.737,00	3,03	71.583,90	12,00	242.720,64	100,00	103,36	99,99	12,00	242.721	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlakasanaya pengadaan barang milik daerah												-						0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					12,00	47.885,000	47.885,00	6,69	17.100,00	12,00	46.950,00	100,00	98,05	98,05	12,00	46.950	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					12,00	196.541,760	211.354,51	2,76	57.782,00	12,00	210.711,85	100,00	107,21	99,70	12,00	210.712	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksanaya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah												-						0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1,00	4.860,000	4.860,00	0,29	1.400,00	1,00	4.860,00	100,00	100,00	100,00	1,00	4.860	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	123.252,150	123.252,15	3,90	40.265,91	12,00	122.816,34	100,00	99,65	99,65	12,00	122.816	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	252.120,000	254.220,00	3,80	81.900,00	12,00	254.220,00	100,00	100,83	100,00	12,00	254.220	0,00	0,00	Ujung Bulu

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)								
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)			K	Rp (000)		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**												-							0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					12,00	17.707,500	17.707,50	3,70	3.727,50	12,00	15.979,00	100,00	90,24	90,24	12,00	15.979	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					12,00	47.830,000	47.830,00	3,00	15.430,00	12,00	47.830,00	100,00	100,00	100,00	12,00	47.830	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					12,00	21.546,500	21.546,50	0,00	-	12,00	21.546,50	100,00	100,00	100,00	12,00	21.547	0,00	0,00	Ujung Bulu
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**99,75**	**99,03**	**10,81**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNGBULU)**																			0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan**																			0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					1,00	142.500,000	142.500,00	0,06	8.000,00	1,00	142.500,00	100,00	100,00	100,00	1,00	142.500	0,00	0,00	Ujung Bulu
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					12,00	2.531.727,830	2.531.727,83	4,69	992.308,33	12,00	2.531.640,13	100,00	100,00	100,00	12,00	2.531.640	0,00	0,00	Ujung Bulu
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**6,50**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja					**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**11.194.103,753**	**11.152.159,085**		**2.624.986,561**		**10.930.531,070**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**98,57**	**91,32**	**96,50**	**17,50**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE																			0,00	0,00	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	Ujung Loe
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (UJUNG LOE)**																		0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah**																		0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	1.982.939,838	2.017.653,25	3,00	498.254,94	12,00	2.007.409,24	100,00	101,23	99,49	12,00	2.007.409	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					12,00	22.375,000	31.325,00	0,00	8.950,00	12,00	31.325,00	100,00	140,00	100,00	12,00	31.325	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**												-						0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	1.115,800	1.115,80	0,00	-	1,00	1.115,80	100,00	100,00	100,00	1,00	1.116	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					12,00	22.198,250	22.269,25	3,00	7.380,28	12,00	22.269,25	100,00	100,32	100,00	12,00	22.269	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12,00	3.078,650	3.078,65	3,00	763,70	12,00	3.078,65	100,00	100,00	100,00	12,00	3.079	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	22.367,850	22.367,85	3,00	2.310,00	12,00	22.326,30	100,00	99,81	99,81	12,00	22.326	0,00	0,00	Ujung Loe

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	29.461,000	30.440,00	3,00	15.954,98	12,00	29.362,28	100,00	99,66	96,46	12,00	29.362	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara**												-						0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					8,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**												-						0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	22.132,380	22.132,38	3,00	5.445,54	12,00	22.061,73	100,00	99,68	99,68	12,00	22.062	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					5,00	6.820,000	6.820,00	1,05	1.420,00	5,00	6.820,00	100,00	100,00	100,00	5,00	6.820	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	115.680,000	115.680,00	3,00	39.380,00	12,00	109.560,00	100,00	94,71	94,71	12,00	109.560	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												-						0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1,00	4.405,880	4.405,88	0,00	-	0,96	4.257,88	96,00	96,64	96,64	0,96	4.258	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					3,00	2.600,000	2.600,00	0,00	-	3,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	3,00	2.600	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5,00	3.370,000	3.370,00	0,00	0,00	5,00	3.370,00	100,00	100,00	100,00	5,00	3.370	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	25.125,00	1,00	25.125,00	1,00	25.125,00	100,00	0,00	100,00	1,00	25.125	0,00	0,00	Ujung Loe
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**82,12**	**78,36**	**81,58**	**6,59**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (UJUNG LOE)**																		0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan**																		0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Ormas					1,00	16.812,300	16.812,30	0,08	225,00	1,00	16.812,30	100,00	100,00	100,00	1,00	16.812	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					8,00	129.822,000	129.822,00	8,00	129.822,00	8,00	129.822,00	100,00	100,00	100,00	8,00	129.822	0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					1,00	270.178,000	245.053,00	0,39	111.074,80	0,99	234.946,22	99,00	86,96	95,88	0,99	234.946	0,00	0,00	Ujung Loe
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						**99,67**	**95,65**	**98,63**	**3,33**		**0,00**	**0,00**	
											Predikat Kinerja						**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (UJUNG LOE)**																		0,00	0,00	Ujung Loe
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase jumlah desa yang melakukan koordinasi dan asistensi APBDesa di kecamatan Persentase pemenuhan asistensi APBDesa**																		0,00	0,00	Ujung Loe

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ujung Loe
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
															Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.655.356,948	2.700.070,361		846.106		2.672.261,651								
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	60,59	58,00	60,07	3,31		0,00	0,00	
															PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	R	R	R	SR		SR	SR	
		KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA																			0,00	0,00	Bulukumpa
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	Bulukumpa
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BULUKUMPA)**																		0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																		0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**												-						0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						37,00	3.094.257,473	2.686.753,47	6,72	644.229,54	36,72	2.666.619,21	99,24	86,18	99,25	36,72	2.666.619	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					12,00	58.817,500	62.667,50	0,31	5.390,00	12,00	62.667,50	100,00	106,55	100,00	12,00	62.668	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**												-						0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					12,00	8.065,760	10.695,76	3,00	4.619,15	12,00	10.695,76	100,00	132,61	100,00	12,00	10.696	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**												-						0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	2.303,250	2.303,25	0,00	467,00	3,19	2.301,25	79,64	99,91	99,91	3,19	2.301	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					4,00	2.540,050	2.540,05	0,00	830,00	3,00	2.540,05	75,00	100,00	100,00	3,00	2.540	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					4,00	12.809,500	16.485,67	0,80	6.283,84	4,00	16.485,67	100,00	128,70	100,00	4,00	16.486	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4,00	2.254,450	2.255,15	0,50	451,80	4,00	2.255,15	100,00	100,03	100,00	4,00	2.255	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	32.438,500	32.438,50	1,20	6.965,24	11,70	31.841,34	97,50	98,16	98,16	11,70	31.841	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					325,00	30.171,000	30.014,00	81,25	10.097,70	325,00	29.072,40	100,00	96,36	96,86	325,00	29.072	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												-						0,00	0,00	Bulukumpa

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**												-						0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	39.243,608	39.243,61	3,00	7.325,77	12,00	28.076,40	100,00	71,54	71,54	12,00	28.076	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	218.880,000	218.880,00	3,00	72.600,00	12,00	218.400,00	100,00	99,78	99,78	12,00	218.400	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**												-						0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					3,00	1.500,000	1.500,00	1,30	135,82	3,00	987,82	100,00	65,85	65,85	3,00	988	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bulukumpa
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**57,57**	**59,28**	**56,57**	**21,93**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**R**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BULUKUMPA)**																		0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**																		0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					15,00	506.062,279	506.062,28	3,84	129.099,83	15,00	506.062,28	100,00	100,00	100,00	15,00	506.062	0,00	0,00	Bulukumpa
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					19,00	693.937,420	693.937,42	9,03	330.134,11	18,91	690.799,92	99,53	99,55	99,55	18,91	690.800	0,00	0,00	Bulukumpa
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,77**	**99,77**	**99,77**	**16,96**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**4.703.280,790**	**4.305.776,656**		**1.218.630**		**4.268.804,753**								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																**78,67**	**79,53**	**78,17**	**19,44**		**0,00**	**0,00**	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN																**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		KANTOR KECAMATAN RILAU ALE																			0,00	0,00	Rilau Ale
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	Rilau Ale
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (RILAU ALE)**																		0,00	0,00	Rilau Ale

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia**																		0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						39,00	2.817.281,749	2.791.159,60	7,00	555.221,59	37,00	2.602.977,06	94,87	92,39	93,26	37,00	2.602.977	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	73.950,000	79.235,00	3,00	26.710,00	12,00	79.235,00	100,00	107,15	100,00	12,00	79.235	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan**												-						0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Menunjang Administrasi umum perangkat Daerah**												-						0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					18,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					15,00	30.820,840	30.827,84	3,18	5.306,80	14,43	29.666,24	96,23	96,25	96,23	14,43	29.666	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					10,00	30.240,000	30.240,00	2,20	900,00	9,70	29.340,00	97,00	97,02	97,02	9,70	29.340	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					341,00	54.271,000	56.709,00	64,65	26.361,16	320,40	53.283,06	93,96	98,18	93,96	320,40	53.283	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang milik daerah**												-						0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	24.458,500	24.458,50	0,98	23.870,00	0,98	23.870,00	97,59	97,59	97,59	0,98	23.870	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terciptanya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**												-						0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	15.817,659	15.817,66	3,00	2.850,85	12,00	11.783,83	100,00	74,50	74,50	12,00	11.784	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	44.320,000	44.320,00	3,00	17.420,00	12,00	44.320,00	100,00	100,00	100,00	12,00	44.320	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharannya Barang Milik Daerah**												-						0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2,00	8.998,500	11.268,50	0,52	4.550,00	1,92	10.819,32	96,02	120,23	96,01	1,92	10.819	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)				K	Rp (000)			
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)			K	Rp (000)		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
																58,38	**58,89**	**56,57**	**28,03**		**0,00**	**0,00**	
																R	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (RILAU ALE))**																		0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana**																		0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Rilau Ale
																0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
																SR	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (RILAU ALE)**																		0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan**																		0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					5,00	174.402,000	174.402,00	1,24	74.607,00	4,99	174.102,00	99,80	99,83	99,83	4,99	174.102	0,00	0,00	Rilau Ale
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					6,00	225.598,000	225.598,00	1,50	107.100,00	6,00	225.598,00	100,00	100,00	100,00	6,00	225.598	0,00	0,00	Rilau Ale
																99,90	**99,91**	**99,91**	**5,50**		**0,00**	**0,00**	
																ST	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**3.500.158,248**	**3.484.036,096**		**844.897,399**		**3.284.994,508**								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				**52,76**	**52,93**	**52,16**	**11,17**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**R**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
		KANTOR KECAMATAN GANTARANG																			0,00	0,00	gantarang
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	gantarang
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	gantarang
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (Gantarang)**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						12,00	3.522.083,785	3.523.803,25	3,00	635.157,32	12,00	3.480.849,57	100,00	98,83	98,78	12,00	3.480.850	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	49.437,500	69.212,50	6,00	19.775,00	12,00	69.212,50	100,00	140,00	100,00	12,00	69.213	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**												-						0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**												-						0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					26,00	62.302,200	62.302,20	11,00	29.061,56	26,00	62.302,20	100,00	100,00	100,00	26,00	62.302	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					15,00	6.629,500	6.629,50	8,55	3.672,00	15,00	6.629,50	100,00	100,00	100,00	15,00	6.630	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					349,00	23.130,000	25.380,00	255,71	18.595,00	255,71	18.595,00	73,27	80,39	73,27	255,71	18.595	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										-								0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					7,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang**										-								0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	37.207,824	37.207,82	6,00	17.311,62	12,00	35.036,96	100,00	94,17	94,17	12,00	35.037	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	124.440,000	112.373,33	5,25	42.320,00	12,00	112.320,00	100,00	90,26	99,95	12,00	112.320	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**										-								0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2,00	11.200,000	11.200,00	1,28	7.134,41	1,96	10.958,50	98,00	97,84	97,84	1,96	10.959	0,00	0,00	gantarang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					6,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**55,09**	**57,25**	**54,57**	**24,76**		**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**R**	**R**	**R**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana (Ujung Loe) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terlaksana**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	gantarang
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Gantarang)**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**																		0,00	0,00	gantarang
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					20,00	641.400,800	641.400,80	13,64	437.526,30	20,00	641.400,80	100,00	100,00	100,00	20,00	641.401	0,00	0,00	gantarang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					12,00	558.600,000	558.600,00	3,84	178.700,00	12,00	558.600,00	100,00	100,00	100,00	12,00	558.600	0,00	0,00	gantarang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00	100,00	100,00	16,00		0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									5.036.431,609	5.048.109,402		1.389.253		4.995.905,034								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN																51,70	52,42	51,52	13,59		0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN																R	R	R	SR		SR	SR	
		KANTOR KECAMATAN KINDANG																			0,00	0,00	Kindang
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			0,00	0,00	Kindang
	7.01	KECAMATAN																			0,00	0,00	Kindang
	7,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)																		0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	meningkatnya pengatministrasian aparatur pemerintah																		0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						19,00	1.770.338,880	1.698.133,20	4,18	434.695,12	18,98	1.646.790,73	99,89	93,02	96,98	18,98	1.646.791	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					20,00	35.820,000	51.120,00	5,00	24.255,00	20,00	51.120,00	100,00	142,71	100,00	20,00	51.120	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran,sarana dan Prasarana aparatur, kapasitas sumber daya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan												-						0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					20,00	26.745,400	32.836,90	4,98	12.765,80	19,98	32.660,40	99,90	122,12	99,46	19,98	32.660	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					20,00	1.495,000	1.496,60	3,97	304,10	19,97	1.495,00	99,85	100,00	99,89	19,97	1.495	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100,00	51.683,000	35.623,00	47,00	5.891,90	96,00	30.979,60	96,00	59,94	86,97	96,00	30.980	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan aparat												-						0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	8.850,00	4,95	8.500,00	4,95	8.500,00	99,00	0,00	96,05	4,95	8.500	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang di kindang												-						0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					24,00	6.600,000	8.938,50	7,64	3.350,00	22,00	7.300,00	91,67	110,61	81,67	22,00	7.300	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					24,00	84.540,000	84.540,00	6,98	25.500,00	23,98	84.000,00	99,92	99,36	99,36	23,98	84.000	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah												-						0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					7,00	21.386,600	19.865,00	1,64	4.585,75	6,64	18.862,85	94,86	88,20	94,96	6,64	18.863	0,00	0,00	Kindang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kindang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																97,90	90,66	95,04	25,83		0,00	0,00	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
Predikat Kinerja																ST	T	ST	SR		SR	SR	
	7,01,03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (KINDANG)																		0,00	0,00	Kindang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	diberdayakannya masyarakat di kelurahan																		0,00	0,00	Kindang
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					6,00	230.000,000	230.000,00	0,00	-	6,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00	6,00	230.000	0,00	0,00	Kindang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					5,00	170.000,000	170.000,00	1,92	72.400,95	4,92	167.394,00	98,47	98,47	98,47	4,92	167.394	0,00	0,00	Kindang
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																99,24	99,23	99,23	5,46		0,00	0,00	
Predikat Kinerja																ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									2.398.608,880	2.341.403,196		592.248,620		2.279.102,578								
RUSAN																98,57	94,95	97,13	15,65		0,00	0,00	
RUSAN																ST	ST	ST	SR		SR	SR	
		KANTOR KECAMATAN HERLANG																			0,00	0,00	Herlang
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			0,00	0,00	Herlang
	7.01	KECAMATAN																			0,00	0,00	Herlang
	4,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (HERLANG)																		0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan perangkat Daerah																		0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						23,00	1.995.360,556	1.845.341,80	5,00	723.336,05	23,00	1.784.904,99	100,00	89,45	96,72	23,00	1.784.905	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	53.455,000	73.935,00	3,00	20.480,00	12,00	73.935,00	100,00	138,31	100,00	12,00	73.935	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah												-						0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					100,00	30.615,460	33.715,46	25,00	7.055,92	100,00	33.715,46	100,00	110,13	100,00	100,00	33.715	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					100,00	2.100,000	2.484,65	25,00	734,65	100,00	2.484,65	100,00	118,32	100,00	100,00	2.485	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100,00	47.121,000	47.121,00	25,00	22.558,00	100,00	47.002,08	100,00	99,75	99,75	100,00	47.002	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												-						0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					3,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-						0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	14.213,406	14.213,41	3,00	3.510,25	12,00	13.971,22	100,00	98,30	98,30	12,00	13.971	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	97.800,000	97.800,00	2,85	30.200,00	11,85	96.600,00	98,78	98,77	98,77	11,85	96.600	0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												-						0,00	0,00	Herlang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					4,00	5.368,580	6.403,58	3,05	1.035,00	6,79	6.066,12	169,73	112,99	94,73	6,79	6.066	0,00	0,00	Herlang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	3.290,000	3.290,00	0,67	730,00	3,00	3.290,00	100,00	100,00	100,00	3,00	3.290	0,00	0,00	Herlang
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					96,85	96,60	88,83	36,86		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	T	SR		SR	SR	
	7,01,03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (HERLANG)	%					100,00												0,00	0,00	Herlang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%					100,00												0,00	0,00	Herlang
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					6,00	322.895,015	322.895,02	3,00	170.514,06	6,00	322.895,02	100,00	100,00	100,00	6,00	322.895	0,00	0,00	Herlang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					12,00	477.104,800	462.104,80	3,00	138.108,55	12,00	459.547,80	100,00	96,32	99,45	12,00	459.548	0,00	0,00	Herlang
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)					100,00	98,16	99,72	9,00		0,00	0,00	
											Predikat Kinerja					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									3.049.323,817	2.909.304,708		1.118.262		2.844.412,331								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					98,43	97,38	94,28	22,93		0,00	0,00	
											PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN					ST	ST	ST	SR		SR	SR	
		KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO																			0,00	0,00	Bonto Tiro
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01	KECAMATAN																			0,00	0,00	Bonto Tiro
	7,01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO TIRO)																		0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan																		0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						35,00	2.371.215,600	2.005.355,37	8,75	484.642,62	35,00	1.947.211,13	100,00	82,12	97,10	35,00	1.947.211	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					50,00	44.040,000	44.040,00	16,00	14.255,00	50,00	44.040,00	100,00	100,00	100,00	50,00	44.040	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN												-						0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah												-						0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					50,00	17.177,000	17.183,00	25,00	12.154,50	50,00	16.374,00	100,00	95,33	95,29	50,00	16.374	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					25,00	1.751,400	1.751,40	25,00	1.533,00	25,00	1.533,00	100,00	87,53	87,53	25,00	1.533	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					25,00	25.320,000	25.320,00	2,00	1.110,00	25,00	25.320,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25.320	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					75,00	41.815,000	41.815,00	26,00	18.722,50	58,00	32.277,50	77,33	77,19	77,19	58,00	32.278	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												-						0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					5,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	-	6.136,40	3,00	6.136,40	3,00	6.136,40	100,00	0,00	100,00	3,00	6.136	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang												-						0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36,00	26.161,388	26.161,39	12,00	6.333,82	36,00	18.441,77	100,00	70,49	70,49	36,00	18.442	0,00	0,00	Bonto Tiro

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					24,00	154.080,000	154.080,00	0,00	79.880,00	15,00	153.500,00	62,50	99,62	99,62	15,00	153.500	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**												-						0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					7,00	24.216,600	28.074,10	2,50	8.009,80	7,00	23.720,38	100,00	97,95	84,49	7,00	23.720	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Tiro
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**85,44**	**73,66**	**82,88**	**27,64**		**0,00**	**0,00**	
													Predikat Kinerja			**T**	**S**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO TIRO)**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					1,00	103.414,500	103.414,50	0,61	61.824,56	1,00	102.394,50	100,00	99,01	99,01	1,00	102.395	0,00	0,00	Bonto Tiro
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					4,00	296.585,500	296.585,50	2,00	160.848,00	4,00	287.149,00	100,00	96,82	96,82	4,00	287.149	0,00	0,00	Bonto Tiro
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**100,00**	**97,92**	**97,92**	**2,50**		**0,00**	**0,00**	
													Predikat Kinerja			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**3.105.776,988**	**2.749.916,662**		**855.450,191**		**2.658.097,678**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**92,72**	**85,79**	**90,40**	**15,07**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
		KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI																			0,00	0,00	Bonto Bahari
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	Bonto Bahari
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BONTO BAHARI)**																		0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan dan 43 ASN Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan**																		0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						43,00	3.726.005,480	3.672.140,36	3,00	978.551,74	42,00	3.555.076,70	97,67	95,41	96,81	42,00	3.555.077	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					43,00	129.150,000	129.150,00	2,00	69.990,00	42,00	129.150,00	97,67	100,00	100,00	42,00	129.150	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kecamatan bonto bahari**												-						0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**27 Paket dan 36 Laporan Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat**												-						0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					600	106.948,540	106.948,54	144,24	55.455,13	594,24	105.923,78	99,04	99,04	99,04	594,24	105.924	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					20000,00	10.167,500	10.167,50	9950,00	5.394,00	19950,00	10.142,50	99,75	99,75	99,75	19950,00	10.143	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					400,00	72.811,000	72.811,00	136,08	24.781,15	258,00	46.973,88	64,50	64,51	64,51	258,00	46.974	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10 Unit Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler**												-						0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					8,00	-	9.992,75	8,00	9.992,75	8,00	9.992,75	100,00	0,00	100,00	8,00	9.993	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor**												-						0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					72,00	32.301,312	32.301,31	23,17	10.391,91	64,30	28.847,28	89,31	89,31	89,31	64,30	28.847	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	162.170,000	162.170,00	2,81	66.000,00	11,81	159.650,00	98,42	98,45	98,45	11,81	159.650	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau**												-						0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					5,00	16.193,100	16.193,10	0,27	10.658,78	4,27	13.840,06	85,47	85,47	85,47	4,27	13.840	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1,00	12.260,000	12.260,00	0,40	4.950,00	1,00	12.220,00	99,67	99,67	99,67	1,00	12.220	0,00	0,00	Bonto Bahari
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**103,50**	**92,40**	**103,67**	**2330,62**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (BONTO BAHARI) Meningkatnya Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan**						**100 %100**												0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**2021 Unit dan 2021 Pokmas / Ormas Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Persen**					**100 Persen 100**												0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					41,00	800.000,000	800.000,00	6,43	125.280,00	41,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00	41,00	800.000	0,00	0,00	Bonto Bahari
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					200,00	707.000,000	707.000,00	59,98	212.000,00	200,00	707.000,00	100,00	100,00	100,00	200,00	707.000	0,00	0,00	Bonto Bahari
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**120,50**		**0,00**	**0,00**	
															Predikat Kinerja	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**5.775.006,932**	**5.731.134,563**		**1.573.445,459**		**5.578.816,950**								
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**101,75**	**96,20**	**101,83**	**1225,56**		**0,00**	**0,00**	
															PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
		KANTOR KECAMATAN KAJANG																			0,00	0,00	Kajang
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																			0,00	0,00	Kajang
	7.01	**KECAMATAN**																			0,00	0,00	Kajang
	7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (KAJANG)**																		0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terbayarnya gajidan tunjangan ASN dan terbayarnya Honorarium PNS**																		0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						36,00	2.671.945,322	2.654.073,97	7,00	289.764,03	34,00	2.451.847,90	94,44	91,76	92,38	34,00	2.451.848	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1,00	154.080,000	154.080,00	0,42	63.360,00	1,00	154.080,00	100,00	100,00	100,00	1,00	154.080	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**meningkatnya sumber daya aparatur kecmatan kajang**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					3,00	36.768,000	36.768,00	0,00	(30.396,78)	3,00	32.188,22	100,00	87,54	87,54	3,00	32.188	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Logistik Kantor, Tersedianya Makanan dan minuman serta terlaksananya Rapat Konsultasi dan Koordinasi**												-						0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					3,00	24.432,800	25.552,80	0,01	5.410,30	3,00	25.551,10	100,00	104,58	99,99	3,00	25.551	0,00	0,00	Kajang

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)						K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3,00	2.454,900	2.454,90	0,00	682,02	3,00	2.432,02	100,00	99,07	99,07	3,00	2.432	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					3,00	44.376,000	30.276,00	0,00	17.670,00	3,00	30.270,00	100,00	68,21	99,98	3,00	30.270	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1,00	53.610,000	53.610,00	0,50	31.413,00	0,96	51.978,80	96,00	96,96	96,96	0,96	51.979	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Mebeler Kantor dan Peralatan dan Mesin Lainnya**												-						0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					20,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					20,00	27.160,000	36.040,00	8,00	22.460,00	19,93	36.010,00	99,67	132,58	99,92	19,93	36.010	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					20,00	4.250,000	4.250,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran,terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta terbayarnya jasa pelayanan umum kantor**												-						0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	12.561,843	12.561,84	1,62	3.719,38	7,62	7.984,66	63,50	63,56	63,56	7,62	7.985	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa pemeliharaan biaya , pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas serta tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**												-						0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					14,00	13.027,760	13.027,76	3,99	5.147,91	13,77	12.819,67	98,36	98,40	98,40	13,77	12.820	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kajang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	14.613,750	14.613,75	0,00	10.160,55	3,00	14.613,25	100,00	100,00	100,00	3,00	14.613	0,00	0,00	Kajang
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**87,66**	**86,89**	**86,48**	**7,69**		**0,00**	**0,00**	
													Predikat Kinerja			**T**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (KAJANG)**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Kajang
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Kajang
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit					2,00	331.511,080	331.511,08	0,43	71.048,42	2,00	331.000,00	99,80	99,85	99,85	2,00	331.000	0,00	0,00	Kajang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas					2,00	312.815,650	326.915,65	0,53	71.458,82	1,91	311.410,40	95,25	99,55	95,26	1,91	311.410	0,00	0,00	Kajang
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)			**97,53**	**99,70**	**97,55**	**1,95**		**0,00**	**0,00**	
													Predikat Kinerja			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									**3.703.607,105**	**3.695.735,757**		**561.897,642**		**3.462.186,016**								
										45.121.655,070	**44.117.646,486**	**TAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S**			**42.975.112,569**	**92,59**	**93,29**	**92,02**	**4,82**		**0,00**	**0,00**	
													PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN			**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			0,00	0,00	Kesbangpol
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		**Bulan**					**12,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**Bulan**					**12,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8,01,01,2,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik (BADAN KESBANGPOL)**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keterpenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu**	**Persen**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					12,00	77.453,600	77.453,600	324,00	13.997,60	333,00	42.620,10	2775,00	55,03	55,03	333,00	42.620	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1,00	8.590,000	8.590,00	0,56	4.820,00	0,56	4.820,00	56,00	56,11	56,11	0,56	4.820	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1,00	6.115,000	6.115,00	0,35	391,00	0,85	2.585,00	85,00	42,27	42,27	0,85	2.585	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1,00	3.285,000	3.285,00	0,00	-	1,00	3.285,00	100,00	100,00	100,00	1,00	3.285	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1,00	2.585,000	2.585,00	1,00	2.585,00	1,00	2.585,00	100,00	100,00	100,00	1,00	2.585	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase keterpoenuhan dokumen laporan administrasi dan keuangan perangkat daerah**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						14,00	1.787.245,874	1.766.608,66	4,38	492.581,79	13,98	1.695.986,79	99,86	94,89	96,00	13,98	1.695.987	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					12,00	70.830,000	70.830,00	323,74	16.435,00	332,74	68.810,00	2772,82	97,15	97,15	332,74	68.810	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	10.455,000	10.455,00	0,00	1.035,00	0,75	5.104,50	75,00	48,82	48,82	0,75	5.105	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					18,00	10.845,000	10.845,00	4,00	2.918,00	10,00	5.495,00	55,56	50,67	50,67	10,00	5.495	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					12,00	11.880,000	11.880,00	3,00	3.430,50	12,00	11.880,00	100,00	100,00	100,00	12,00	11.880	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**meningkatnya administrasi kepegawaian badan kesatuan bangsa dan politik**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					2,00	-	-	0,00	-	0,17	-	8,50	0,00	0,00	0,17	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	2.497,500	2.497,50	0,25	1.865,50	1,00	2.497,50	100,00	100,00	100,00	1,00	2.498	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					1,00	3.039,200	3.039,20	0,25	763,60	1,00	3.037,30	100,00	99,94	99,94	1,00	3.037	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	17.507,850	17.507,85	0,25	8.170,60	1,00	17.418,75	100,00	99,49	99,49	1,00	17.419	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1,00	7.497,150	7.497,15	0,25	1.876,00	1,00	7.497,00	100,00	100,00	100,00	1,00	7.497	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12,00	21.771,691	21.771,69	3,00	7.085,80	12,00	21.770,93	100,00	100,00	100,00	12,00	21.771	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					12,00	98.588,000	98.588,00	0,00	41.098,79	10,00	77.577,29	83,33	78,69	78,69	10,00	77.577	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					2,00	28.302,400	28.302,40	2,00	26.130,00	2,00	26.130,00	99,90	92,32	92,32	2,00	26.130	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					6,00	23.990,000	23.990,00	6,00	23.990,00	6,00	23.990,00	100,00	100,00	100,00	6,00	23.990	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	64.644,300	64.644,30	0,02	49.400,00	1,97	63.550,00	98,30	98,31	98,31	1,97	63.550	0,00	0,00	Kesbangpol

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					2,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah persentase terpenuhinya unsur penunjang gedung kantor**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12,00	19.182,500	8.967,80	3,00	1.469,37	12,00	5.110,35	100,00	26,64	56,99	12,00	5.110	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12,00	109.200,000	109.200,00	3,00	27.900,00	12,00	108.000,00	100,00	98,90	98,90	12,00	108.000	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik**	**Persen**					**100,00**						-						0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					4,00	22.000,000	22.000,00	1,22	9.500,00	3,38	18.584,74	84,50	84,48	84,48	3,38	18.585	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					3,00	1.800,000	1.800,00	1,70	1.252,00	2,40	1.435,00	80,00	79,72	79,72	2,40	1.435	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					25,00	5.890,000	5.890,00	0,00	710,00	10,06	2.840,00	40,22	48,22	48,22	10,06	2.840	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					25,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**300,56**	**78,07**	**79,32**	**31,27**		**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**ST**	**T**	**T**	**SR**		**SR**	**SR**	
	8,01,02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kegiatan Penyuluhan, Seminar Dan Sosialisasi**	**%**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kegiatan Penyuluhan Seminar dan Sosialisasi**	**Persen**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	%					100,00	1.172.168,820	931.502,82	27,50	84.521,00	90,00	815.741,96	90,00	69,59	87,57	90,00	815.742	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**90,00**	**69,59**	**87,57**	**90,00**		**0,00**	**0,00**	
														Predikat Kinerja		**T**	**S**	**T**	**T**		**SR**	**SR**	
	8,01,03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat**	**%**					**75,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat**	**Persen**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang					150,00	27.912.903,188	27.912.903,19	2,75	351.910,16	149,75	27.864.844,21	99,83	99,83	99,83	149,75	27.864.844	0,00	0,00	Kesbangpol

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)				Rp (000)	Rp (000)					
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
Capaian Kinerja (%)																**99,83**	**99,83**	**99,83**	**149,75**		**0,00**	**0,00**	
Predikat Kinerja																**ST**	**ST**	**ST**	**ST**		**SR**	**SR**	
	8,01,04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI**	**Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi**																		0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan di awasi**																		0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang					50,00	55.500,000	55.500,00	0,00	-	50,00	55.500,00	100,00	100,00	100,00	50,00	55.500	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**		**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja												**ST**	**ST**	**ST**	**SR**		**SR**	**SR**	
	8,01,05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama Dan Kasus Intoleransi Yang Terjadi**	**%**					**75,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Indeks Kerukunan umat beragama dan kasus intoleransi yang terjadi**	**Persen**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang					100,00	124.010,000	124.010,00	-14,90	5.480,00	85,10	105.480,00	85,10	85,06	85,06	85,10	105.480	0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												**85,10**	**85,06**	**85,06**	**85,10**		**0,00**	**0,00**	
				Predikat Kinerja												**T**	**T**	**T**	**T**		**SR**	**SR**	
	8,01,06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Di Daerah**	**%**					**15,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik di daerah**	**Persen**					**100,00**												0,00	0,00	Kesbangpol
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang					50,00	629.944,500	629.944,50	9,00	275.153,06	34,00	426.468,05	68,00	67,70	67,70	34,00	426.468	0,00	0,00	Kesbangpol

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	RKPD	APBD	2024		K	Rp (000)	K	RKPD	APBD	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)		Rp (000)	Rp (000)	K	Rp (000)										
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen					12,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kesbangpol
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				68,00	67,70	67,70	34,00		0,00	0,00	
												Predikat Kinerja				S	S	S	SR		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN									32.309.721,573	32.038.203,651		1.456.469,761		31.490.644,474								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN				128,73	80,08	83,93	58,07		0,00	0,00	
												PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN				ST	T	T	R		SR	SR	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PER OPD									1.728.145.715,484	1.749.031.105,830		427.327.760,228		1.621.238.070,911								

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang direncanakan dalam RKPD mencapai Rp 1.728.145.715.484, sedangkan alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp 1.749.031.105.830. Terdapat selisih sebesar Rp 20.885.390.346, yang menunjukkan adanya penyesuaian antara perencanaan kebutuhan ideal berdasarkan RKPD dengan kemampuan fiskal riil daerah yang dituangkan dalam APBD. Struktur RKPD dirancang untuk menggambarkan estimasi kebutuhan anggaran guna mencapai target-target kinerja tahunan, sementara penganggaran dalam APBD mempertimbangkan keterbatasan pendapatan daerah dan prioritas belanja wajib yang harus dipenuhi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara nilai perencanaan dan nilai penganggaran.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun, rata-rata capaian kinerja dari seluruh program per urusan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 mencapai 92,70 persen, yang dikategorikan sebagai Sangat Tinggi (ST). Sementara itu, capaian realisasi anggaran menunjukkan nilai 80,08 persen untuk RKPD dan 83,93 persen untuk APBD, yang masing-masing berada dalam kategori Tinggi (T). Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berhasil memenuhi bahkan melampaui target output yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan telah berjalan dengan baik, walaupun tetap diperlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan guna menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum termanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi baik yang dipengaruhi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan yang belum optimal.
3. Tingginya angka kemiskinan serta rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Belum optimalnya produktivitas ekonomi berbasis teknologi, inovasi, dan transformasi digital.
5. Rendahnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
6. Integrasi ekonomi domestik dan global yang belum optimal.
7. Kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
8. Rendahnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif serta partisipasi perempuan dalam politik.
9. Ketidakstabilan ekonomi makro daerah dan rendahnya daya saing daerah.

10. Belum optimalnya pelestarian budaya, termasuk registrasi cagar dan situs budaya.
11. Rendahnya kualitas ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.
12. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan air.
13. Lemahnya upaya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
14. Pendapatan per kapita yang masih rendah dan tidak merata.

Untuk itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 cakupan permasalahan, yaitu identifikasi permasalahan pembangunan yang berdampak pada sasaran pembangunan daerah untuk penentuan prioritas daerah dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaran urusan pemerintah daerah untuk penentuan prioritas masing-masing urusan.

2.3.2 Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Daerah (Permasalahan Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunanyang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiapPerangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadimasalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yangditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah haruskonsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkatdaerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisifasi dalam Pendidikan (SPM)
b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik
e. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, belum efektifnya sistem pendataan dan *tracking* anak usia sekolah yang tidak bersekolah juga menjadi kendala.

2. Kesehatan

a. Masih tingginya presenatse balita gizi buruk .
b. Masih tingginya prevalensi angka stunting.
c. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
d. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
e. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh.
f. Masih rendahnya cakupan penanganan prevalensi HIV AIDS
g. Kurangnya kesadaran gizi pada ibu hamil dan balita, rendahnya akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan dasar, serta belum maksimalnya integrasi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat desa dan keluarga sasaran

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Masih rendahnya proporsi jaringan jalan dengan kondisi baik (PUTR)
b. Masih rendahnya persentase jalan yang memiliki talud/drainase saluran pembuangan air (PUTR)
c. Belum tersedianya data base talud/drainase (PUTR)
d. Masih rendahnya progres revisi RTRW Kabupaten Bulukumba serta masih terbatasnya rencana rinci tata ruang dengan rencana pembangunan daerah (PUTR)
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilaksakan setelah masa panen (PSDA)

f. Peningkatan maupun penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik sangant dipengaruhi oleh tingkta kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan (PSDA)
g. Persentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi (PSDA)
h. Pelaksaaan kegiatan dalam rangka penigkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat ditunjang oleh ketersediaan anggaran (PSDA)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Masih rendahnya kawasan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dan keterbatasan akses pembiayaan.
c. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman
d. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Cakupan petugas perlindaungan masyarakat masih kurang
b. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum
c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terkait sarana prasarana masih belum memadai
d. Perlu penambahan armada mobil pemadam kebakaran untuk memaksimalkan pelayanan waktu tanggap (response time rate)
e. Masih minimnya petugas penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan fasilitas pendukiung lainnya.

6. Sosial

a. Masih rendahnya sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang dikelolah pemerintah Daerah
b. Masih rendahnya program mitigasi bencana bagi masyarakat
c. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
d. Jumlah jenis PMKS yang tidak didukung dengan data yang valid dan akurat serta masih terbatasnya jumlah pekerja sosial professional dalam penanganan disabilitas dan lansia.

2.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Lapangan pekerjaan semakin terbatas
b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
c. Rendahnya tingkat pendidikan
d. Terbatasnya alokasi anggaran program dan kegiatan
e. Rendahnya kompetensi pencari kerja
f. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
b. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
c. masih rendahnya cakupan layanan kesehatan korban kekerasan anak dan perempuan.
d. Kurangnya tenaga psikiater yang menangani trauma korban kekerasan anak dan perempuan.
e. Tidak adanya kontribusi yang diberikan perempuan dalam pekerjaan non pertanian.
f. masih tingginya angka perkawinan anak yang dipicu oleh faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya edukasi mengenai hak-hak anak. Koordinasi lintas sektor dan mekanisme pencegahan serta perlindungan belum berjalan optimal, khususnya dalam hal sosialisasi dan pendampingan.

3. Pangan

a. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat / Kelompok Tani dan pemenuhan kebutuhan dari budidaya pangan lokal.
b. Kelembagaan usaha pangan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal
c. Rendahnya peran serta masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
d. Kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan serta infrastruktur pendukung kemandirian pangaan

4. Pertanahan

a. Masih minimnya penyelesaian kasus negara
b. Belum optimalnya proses pengadaan tanah karena masih rendahnya dukungan perencanaan pembangunan infastruktur yang membutuhkan pengadaan lahan

5. Lingkungan Hidup

a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ,Sarana -Prasarana PPLHD dan PPNS belnm ada dikabupaten/Kota sehingga Pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan tidak terlaksana dengan baik
b. Kurangnya Tenaga Polisi kehutanan untuk pengamana Tahura Bontobahari sehingga Lokasi Tahura Bonto Bahari banyak diklain oleh Masyarakat Bonto Bahari.
c. Permasalahan dal am mengurangi dan menangani persampahan :
   - SDM Pengelola belum memenuhi Standar
   - Armada Pengangkutan Persampahan sudah banyak yang tidak layak pakai
   - Prilaku dan Paitisipasi Masyarakat Masih rendah
d. Tidak adanya alat berat (*Buldozer*) untuk memadatkan sampah pada cell landfill
e. Lahan untuk penempatan TPS/container yang tidak ada sehingga selama ini hanya memakai lahan kosong/milik masyarakat
f. Tidak ada container yang tetap di TPST untuk dipakai setelah memilah sampah
g. Kurangnya alat dan prasarana alah pengolahan sampah di TPST
h. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium yang mendukung kineija dal am rangka pemantauan kualitas air sungai dan air limbah di Kabupaten Bulukumba. Sarana dan prasarana utama yang seharusnya tersedia adalah Atomic Absorbtion Spektrofotometer (AAS), Ultra-Violet Visible (UV-Vis), peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan sampling, termasuk peralatan kualitas udara ambien dan emisi
i. Belum tersedianya sarana Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
j. Instalasi ruang asam tidak berfungsi dengan baik
k. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) personil UPT Laboratorium

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kualitas jaringan perekaman biometrik KTP-el yang tidak stabil
b. Ketersediaan blangko KTP-el juga tidak memadai
c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengurus KTP-el masih rendah.
d. Belum seluruhnya masyarakat memiliki adminduk

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Masih rendahnya cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa.
b. Belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat guna menunjang program pemerintah desa.
c. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa.

8. Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana

a. Rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) yang menggunakan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
b. Masih rendahnya SDM kader dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tribina di tingkat desa.
d. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan ketahanan keluarga balita, remaja, lansia dan peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

a. Alat kir sudah tidak beroperasi karena mengalami kerusakan dan diberlakukannya KIR electronik
b. Menurunnya arus penumpang karena banyaknya kendaraan umum yang rusak
c. Masih kurangnya rambu-rambu di kabupaten Bulukumba
d. Masih kurangnya pengawasan sehingga izin trayek semakin berkurang dari tahun ketahun

10. Komunikasi dan Informatika

a. Perjanjian kerja sama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di kabupaten Bulukumba
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral
c. Perlunya peningkatan optimalisasi peran keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi
d. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data penguatan pengelolaan data statistik sektoral
e. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi berdasarka hasil assessment.

11. Koperasi dan UKM

a. Para pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) belum profesional dan akuntabel dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha;
b. Kemampuan dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran masih sangat rendah
c. Fungsi kelembagaan dan infrastruktur Koperasi dan UMKM belum optimal terutama pembiayaan dan pemasaran;
d. Para pengelola KUKM baik laki-laki dan perempuan belum mampu untuk berinovasi dalam pengembangan produk

12. Penanaman Modal

a. Potensi penanaman Modal di Kabupaten Bulukumba masih rendah.

13. Kepemudaan danOlahraga

a. Belum optimalnya pembinaan sumber daya kepemudaan.
b. Masih rendahnya peningkatan pelatihan kewirausahan Muda untuk menunjang pembangunan Daerah
c. Belum optimalnya prestasi atlet termasuk atlet usia Dini dan pelajar
d. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan

14. Statistik

a. Belum adanya data sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah
b. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral.
c. Perlunya pengelolaan data secara optimal menuju program satu data

15. Persandian

a. Masih rendahnya SDM dan sistem persandian modern yang masih menggunakan sarana dan prasarana manual.
b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi berdasarkan hasil

assesment.

16. Kebudayaan

a. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah
b. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
c. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

17. Perpustakaan

a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
b. Belum optimlanya jumlah buku dan pengadaan buku setiap tahunnya pada perpustakaan
c. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan
d. Masih kurangnya jumlah perpustakaan yang ada di Desa dan Kecamatan
e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SDM umtuk mendukung gerakan literasi masyarakat

18. Kearsipan

a. Belum mencukupinya arsip arsip didaerah
b. sarana dan prasarana arsip belum memadai
c. belum adanya landasan hukum untuk arsip Jadwal retensi arsip (JRA)
d. Terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta SDM pengelola arsip digital dalam mendukung reformasi birokrasi.
e. Belum optimalnya Penerapan Sistem Kearsipan Daerah Terintegrasi" untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional yaitu Penerapan e-arsip terintegrasi.

2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Menjangkitnya penyakit udang dan rumput laut
b. Pencapaian peningkatan produksi terganggu karena kewenangan kelautan diambil alih provinsi sehingga program perlidungan dan pengawasan ekosistem kelautan tidak bisa dilaksanakan
c. Banyaknya negara pesaing yang juga merupakan penghasil udang dan rumput laut.
d. Kurangnya penerapan teknik budidaya yg sesuai dengan standar budidaya oleh masyarakat
e. Metode penangkapan ikan yang masih cenderung tradisional
f. Terjadinya fluktuasi harga produk-produk perikanan
g. Usaha dibidang kelautan dan perikanan belum *Bankable* sehingga pihak perbankan sulit untuk menyalurkan kredit.
h. Adanya pencemaran tambak intensif secara masif sehingga menganggu budidaya rumput laut
i. Lemahnya kelembagaan nelayan,pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya.
j. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang belum memenuhi persyaratan mutu
k. Nelayan masih tergolong miskin

2. Pariwisata

a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata
b. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata
c. Rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur
d. Rendahnya peran aktif dan sadar wisata dari pelaku pariwisata

3. Pertanian

a. Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian
b. Masih rendahnya daya saing produk pertanian
c. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh
d. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan keuangan,aset,kepegawaian, perencanaan dan pelaporan
e. Masih rendahnya pemahaman para pelaku utama pembangunan

pertanian melakukan registrasi produk sebagai syarat mendapatkan sertifikat Prima

f. Pertumbuhan populasi ternak rendah (Kesehatan Hewan)
g. Sarana prasarana peternakan dan daya saing produk hewan yang belum optimal (Kesehatan Hewan)
h. Skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan Jejaring pemasaran produk hewan belum optimal (Kesehatan Hewan)
i. Keterlibatan keluarga miskin dalam kegiatan usaha peternakan masih kurang (Kesehatan Hewan)
j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan petani peternak serta akses untuk memperoleh informasi, teknologi dan sarana Prasarana (Kesehatan Hewan)
k. Ancaman Penyakit Hewan menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), gangguan reproduksi ternak dan Pemotongan ternak ruminansia betina produktif belum terkendali (Kesehatan Hewan)
l. Belum optimalnya produksi ternak (Kesehatan Hewan)

4. Kehutanan

a. Perlunya dibuatkan rekonstruksi palbatas karena sejak Tahun 1991 sampai sekarang belum pernah dilaksanakan rekonstrruksi palbatas,seharusnya sekali dalam 5 tahun dilaksanakan Rekonstruksi.
b. Perlunya penambahan tenaga polisi kehutanan karna luas kawasan TAHURA 3.475 Ha tidak sebanding dengan polisi kehutanan yang hanya berjumlah 2 orang saat ini, perbandingan untuk 1 tenaga polisi kehutanan dengan luasan sekitar 50 – 75 Ha /orang polisi hutan, sehingga untuk luas TAHURA 3.475 Ha membutuhkan 47 orang polisi hutan.
c. Perlunya pengganti tanaman penghijauan pada turus jalan yang sudah tua yang sering roboh pada saat hujan dan angin kencang yang dapat membahayakan masyarakat dan memperbanyak Ruang-ruang terbuka Hijau , untuk taman kota tidak adanya lahan pemerintah untuk dijadikan penambahan lahan luasan RTH pembangunan taman, penataan dan pemeliharaan taman , yang sampai saat ini seluas 13,88 persen sesuai Perda Nomor 22 tahun 2012 harus mencapai 20 persen , sesuai perbup untuk pemenuhan porsi RTH dikota kab Bulukumba maka pemerintah harus menyiapkan lahan RTH karena tanaman pelindung sudah mengkawatirkan sudah mengganggu ketenteraman pengguna jalan yang berbatasan perlunya dipikirkan penambahan lokasi pekuburan umum

5. Perdagangan

a. Rendahnya daya saing pasar tradisional dibandingkan dengan retail moderen karena belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal karena rendahnya anggaran pelaksanaan kegiatan serta terbatasnya jumlah sdm kemetrologian (Penera, Pengamat dan PPNS).
c. Terbatasnya sarana metrologi legal.

6. Perindustrian

a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah.
b. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang.
c. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat promosi

2.3.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna

penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan.
b. Ketersediaan data terkini yang belum akurat
c. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal
d. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal
e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan
a. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan pelaku usaha Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat
a. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS;
b. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;

4. Penelitian danPengembangan
a. Pemanfaaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
b. Belum optimalnya upaya fasiitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah

5. Pengawasan
a. belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasi pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
b. Masih perlunya peningkatan internal para ASN dalam pelaksanaan kegiatan di OPD untuk mengurangi potensi pelanggaran.
c. Opini atas laporan Keuangan BPK-RI menjadi sebagai salah satu indikator dalam penatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan tata kelola keuangan secara akuntabel.

6. Sekretariat DPRD
a. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT).

7. Sekretariat Daerah
a. Peranan Forum kerukunan umat beragama belum berfungsi secara optimal.
b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pengembangan SDM syiar Al Quran.
c. Kurangnya data akurat terkait pembinaan dan pengembangan SDM keagamaan.
d. Tingkat dukungan pemerintah akan pengembangan keagamaan masih rendah.

2.4 Isu Strategis

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan

datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas Pembangunan pemerintah pusat.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. Maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025-2029, dapat dilihat sebagai berikut:

2.4.1 Isu Strategis Global

2.4.1.1 Pemenuhan Ekonomi Global

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang masih dipenuhi ketidakpastian hingga tahun 2025, lima isu strategis global yang telah disoroti sejak Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi nasional menuju tahun 2026. Isu-isu tersebut berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi dunia saat ini, termasuk pemulihan kesehatan dan ketahanan pangan, efektivitas bauran kebijakan makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, perkembangan inovasi digital di sektor keuangan, serta transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon.

Kondisi geopolitik global yang belum stabil, disertai dampak jangka panjang dari konflik di Ukraina serta ketegangan baru di berbagai kawasan dunia, telah memperpanjang gangguan rantai pasok global dan mendorong kenaikan harga komoditas strategis. Situasi ini mendorong tekanan inflasi yang masih tinggi dan pemulihan ekonomi yang tidak merata antar negara. Di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter di negara maju turut memicu tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global terus meningkat, sementara ruang kebijakan nasional semakin terbatas di tengah kebutuhan akan pembiayaan pembangunan yang lebih besar.

Dalam merespons situasi tersebut, Indonesia memperkuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan yang selaras dengan konsensus internasional serta tetap memperhatikan kepentingan nasional. Upaya memperkuat ketahanan pangan dan sistem kesehatan dilakukan melalui penguatan kerja sama global dan regional, termasuk dukungan terhadap pembentukan mekanisme pembiayaan yang responsif dan berkelanjutan dalam menghadapi potensi krisis kesehatan di masa mendatang. Indonesia juga terus mendukung

keterjangkauan dan keterjaminan akses pangan melalui stabilisasi rantai pasok dan penguatan data strategis sektor pertanian.

Di bidang kebijakan makroekonomi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung, terukur, dan komunikatif. Fokus diarahkan pada penguatan sektor riil, pengendalian inflasi, serta reformasi struktural yang mendorong daya saing dan ketahanan ekonomi jangka menengah. Dalam pelaksanaannya, bauran kebijakan diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan stimulus ekonomi, serta memastikan efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan tekanan eksternal.

Stabilitas sistem keuangan menjadi agenda penting dalam mendukung pemulihan yang berkelanjutan. Pendekatan moneter yang pre-emptive dan forward-looking tetap dijalankan oleh Bank Indonesia, dengan memperhatikan stabilitas harga dan ekspektasi pasar. Instrumen suku bunga, pengelolaan nilai tukar, serta manajemen arus modal digunakan secara fleksibel sesuai dinamika pasar. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial diperkuat untuk memitigasi risiko sistemik, khususnya pada sektor korporasi dan rumah tangga. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter terus diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan reformasi struktural dan penguatan kerangka kerja kebijakan makro-finansial nasional.

Seiring berkembangnya inovasi digital di sektor keuangan, Indonesia juga menyiapkan langkah strategis dalam merancang *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang aman, interoperabel, dan mendukung efisiensi sistem pembayaran lintas batas. Inisiatif ini dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi meningkatnya adopsi aset kripto, pemerintah dan otoritas pengawas memperkuat kerangka regulasi dengan prinsip kesetaraan perlakuan berdasarkan tingkat risiko. Pengawasan terhadap stablecoin dan aset digital lainnya diperkuat guna menghindari potensi instabilitas tanpa menghambat inovasi dan inklusi keuangan. Edukasi publik mengenai risiko aset kripto juga menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan konsumen dan stabilitas sistemik.

Komitmen Indonesia dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih semakin diperkuat melalui kebijakan pembiayaan hijau dan pengembangan pasar keuangan berkelanjutan. Pemerintah mendorong kredibilitas lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan transisi serta meningkatkan inovasi instrumen keuangan hijau. Kerangka pendanaan untuk proyek-proyek energi bersih dan efisiensi sumber daya diperkuat melalui penerbitan green bond dan instrumen pembiayaan berkelanjutan lainnya. Pertukaran pengalaman antar negara dan sinergi lintas sektor menjadi bagian dari strategi untuk mendorong investasi yang selaras dengan agenda keberlanjutan global.

Presidensi G20 Indonesia telah memberikan fondasi penting bagi penguatan kerja sama internasional dalam membangun ketahanan ekonomi global pasca pandemi. Komitmen kolektif untuk memastikan transisi yang adil, tertib, dan terjangkau telah menjadi rujukan bagi negara-negara anggota dalam merancang strategi keluar dari kebijakan luar biasa pasca krisis. Bagi Indonesia, kelima isu strategis global tersebut menjadi acuan dalam mengintegrasikan kebijakan sektoral ke dalam perencanaan pembangunan

nasional dan daerah tahun 2026, guna mempercepat transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

2.4.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's)

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca tahun 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi. Serta pembangunan yang lebih berpihak kepada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ditahun 2016-2030 antara lain:

a) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana mana;
b) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
c) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua;
d) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
f) Memastikan ketersediaan daan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
g) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
h) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Inklusif dan ekonomi berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
i) Membangun infrastuktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Dan mendorong inovasi;
j) Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
k) Membuat kota kota dan pemukiman manusia inklusif. Aman. Tangguh dan berkelanjutan;
l) Pastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
m) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
n) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
o) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menggantikan dan mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
p) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan; dan
q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.4.1.3 Perubahan Iklim

Secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan pengunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor yang menyebabkan perubahan iklim diantaranya:

a. Efek gas rumah kaca
b. Pemanasan Global
c. Kerusakan lapisan ozon
d. Kerusakan fungsi hutan
e. Penggunaan *Cloro Flour Carbon* (CFC) yang tidak terkontrol
f. Gas buang industri

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi kondisi alam antara lain:

a. Curah hujan tinggi
b. Musim kemarau yang berkepanjangan
c. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub
d. Terjadinya bencana alam angina putting beliung

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan BangsaBangsaMengenai Perubahan Iklim), Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution) menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacapada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam komitmen Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunanrencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada aspek adaptasi dilakukan penguatan kapasitas masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalammenghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah daerah yang rentan.

Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukansemata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secaraaktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitrapembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing - masing

2.4.1.4 Revolusi Industri 4.0

Secara ringkas, terdapat 6 fase dalam sejarah revolusi industri, yaitu Revolusi Industri 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada mechanisation; Revolusi Industri 2.0 pada 1870 fokus pada electrification;

Revolusi Industri 3.0 pada tahun 1970 untuk automation; Revolusi Industri 3.5 pada 1980 tentang globalisation; Revolusi Industri 4.0 yang sedang terjadi sekarang yaitu digitalisation; serta Revolusi Industri 5.0 di masa depan yang akan fokus pada personalisation.

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya, sehingga memiliki efek disruption industri disetiap negara pada keseluruhan sistem serta meluas mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, pendidikan dan hubungan sosial kemasyarakatan. Pada bidang ekonomi ditandai dengan munculnya bidang pekerjaan baru (data miner. Analis big data. Ilmuwan kecerdasan buatan) dan hilangnya beberapa pekerjaan lama; pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan mesin atau robot yang mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang pekerjaan tersebut. Bidang organisasi dan institusi publik yang menghendaki pengambilan keputusan dilakukan secara cepat. Sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisis big data dan kecerdasan buatan, sedangkan pada bidang sosial kemasyarakatan, revolusi industri 4,0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif pada perubahan perilaku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Bila disikapi dengan positif. Era revolusi industri 4.0 membawa peluang secara ekonomi makro berupa proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, dunia akan segera memasuki Era Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 yang disebut Revolusi Personalisation menjadi fokus utama terhadap pengalaman konsumen yang hendak dicapai. Kustomisasi yang tinggi menjadi salah satu karakteristiknya. Selain itu, Era 5.0 menuntut untuk pasokan yang responsif dan terdistribusi, pengalaman interaktif produk, serta kembalinya sistem ke tenaga kerja.

Untuk bisa menghadapi Era 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi dasar yaitu:

a) *Technical competency*, yaitu berhubungan dengan hard skills yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru, contohnya kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya.
b) *Critical competency*, sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan tugas, contohnya kreativitas, entrepreneurship, dan analisis.
c) *Personal competency*, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif, contohnya kegesitan, kemauan untuk terus belajar, dan daya tahan mental yang kuat.
d) *Social competency*, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka dan peka untuk bekerja bersama, contohnya kecerdasan emosional, teamwork and cooperation, serta kemampuan interkultural.

Agar bisa memiliki semua kemampuan, ada beberapa hal yang saling berkaitan dan membawa efek domino kepada satu sama lain. Misalnya, kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur terkadang tidak merata karena adanya

ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut kemudian akan berhubungan dengan otonomi daerah yang juga berimbas pada kebijakan industri.

2.4.2 Isu Straegis Nasional

2.4.2.1 Transformasi Ekonomi

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 yaitu menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa, maka perlu disusun strategi-strategi nasional.

Transformasi ekonomi harus kita lakukan. Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 6 (enam) Strategi besar Transformasi Ekonomi sebagai "Game Changer" dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 adalah:

Strategi 1 Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, dengan memperhatikan: (1) Sistem Kesehatan; (2) Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter; (3) Perlindungan Sosial; (4) Riset dan Inovasi.

Strategi 2 Produktivitas Sektor Ekonomi, dengan memperhatikan: (1) Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Modernisasi Pertanian; (3) Industrialisasi; (4) Promosi UMKM; (5) Modernisasi Sektor Jasa.

Strategi 3 Ekonomi Hijau, dengan memperhatikan: (1) Bauran Kebijakan Energi; (2) Transfortasi Bersih; (3) Pengelolaan Sampah; (4) Blue Economy; (5) Transisi Energi.

Strategi 4 Transformasi Digital, dengan memperhatikan: (1) Sumber Daya Manusia; (2) Infrastruktur Digital; (3) Digitalisasi; (4) Pemanfaatan Digital.

Strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, dengan memperhatikan: (1) Infrastruktur Konektivitas (superhubungan, Hubungan Laut, Hubungan Udara); (2) Koridor Ekonomi/Wilayah Pembangunan; (3) Domestic Value Chain.

Strategi 6 Pemindahan Ibukota Negara (IKN), dengan memperhatikan: (1) Sumber Pertumbuhan Baru; (2) Menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Keenam strategi di atas juga disertai perbaikan enabling environment yaitu reformasi birokrasi, reformasi fiskal, dan reformasi sektor keuangan.

2.4.2.2 Pengembangan Wilayah

Dalam mencapai sasaran Prioritas Nasional 2 di tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis dalam pengembangan wilayah yaitu:

a) Pengembangan Kawasan Strategis (Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)) dengan meningkatkan peran badan pengelola kawasan dalam memanfaatkan peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM Kawasan.
b) Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
c) Penguatan pengaturan kawasan perotaan yang lebih holistik dan trans – sektor.

d) Penyelesaian Rencana Tata Ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
e) Pengembangan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, perdesaan, dan perbatasan negara melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
f) Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efesien untuk penyediaan pelayanan dasar.

2.4.2.3 Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
6. Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II.

2.4.2.4 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja

berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang berusia 15- 65 tahun sebesar 69,22 persen. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2.4.3 Isu Strategis Daerah

2.4.3.1 Isu Strategis Sulawesi Selatan

a) Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*sustanable*). Artinya semua jenis pelayanankesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya di masyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkanpelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia,belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena merekatidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya,faktor jarak dan transportasi.

Rumah sakit regional telah dibangun pada masa RPJMD 2018-2023 agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberipelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya masih dibutuhkan operasional dan pengembangan rumahsakit regional tersebut dengan dukungan SDM yang memadai, dan layanan yangramah anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas.

b) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidakdimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalamberinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi pra syarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya.

Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktorpendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman

(perlindungan)bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

c) Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas kurang lebih 45.500 km persegi dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkonektivitas antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang baik. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Strategis. Namun karena kualitas yang kurang baik dikabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimanaIndeks layanan infrastruktur tahun 2021 sebesar 79,44 jaringan jalan dalam mantap pada tahun 2021 baru mencapai 70,01% dari panjang jalan 2.009,35km. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak berat yang berakibat capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi.

Di Sulawesi Selatan persentase jalan provinsi dalam kondisi baik adalah 38,98% dikarenakan masih banyaknya jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan terhadap jalan yang rusak berat agardapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

d) Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah.

e) Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SulawesiSelatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada padausia produktif. Revitalisasi Paradigma Pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Sumberdaya alam yang terkandung di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yangdapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan dayadukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdayaalam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat sumberdaya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dankebutuhan yang berbeda.

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalampertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu:

a) Hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.
b) Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri.
c) Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur.
d) Percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*debottlenecking*).
e) Meningkatkan integrasi pasar domestik.

Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektorpertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan,perkebunan dan kehutanan. Dengan hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

f) Sulawesi Selatan sebagai Poros Maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km2 diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar.Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahariyang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti *shortsea shipping* untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan.

Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara,Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistempelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai diSelayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan danmemodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan aksesdi seluruh pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akanmenguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusatkonektivitas kawasan timur Indonesia.Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan

kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai-nilaipositif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman.

Disamping itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapakegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan. Kawasan pesisir Sulawesi Selatan memiliki potensi pengembangan yangsangat tinggi dan merupakan usaha padat karya. Tercatat lebih kurang 33.576 pengelola rumput laut atau 102.873 anggota rumah tangga di Sulawesi Selatan atau 39 persen dari seluruh anggota rumah tangga di Indonesia yang mengusahakan rumput laut. Potensi ini perlu didukung pemerintah dengan memperpanjang rantai nilai rumput laut untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.

2.4.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bulukumba

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis. Maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025—2029.

Isu strategis Kabupaten Bulukumba merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi berdasarkan dinamika isu-isu strategis internasional, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Isu Strategis Kabupaten Bulukumba dalam RPJMD Tahun 2025—2029 sebagai berikut:

2.1.5.5 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan masih menjadi tantangan strategis di Kabupaten Bulukumba, meskipun tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 5 (lima)) tahun terakhir (2020-2024) mengalami penurunan, dimana kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat masih sangat rentan terhadap guncangan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan berbagai upaya melalui program/kegiatan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba berada pada urutan terendah ke 6 dari 24 kab/kota di provinsi Sulawesi Selatan dan terendah dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Selayar, akan tetapi dari segi jumlah Kabupaten Bulukumba berada pada posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebesar 28.600 jiwa.

Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba disebabkan oleh rendahnya pendapatan pada sektor informal. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat jumlah tenaga kerja formal sebanyak 91.650 jiwa dan informal sebanyak 159.582 jiwa. Pekerja sektor informal di dominasi oleh buruh tani dan nelayan dengan pendapatan dibawah garis kemiskinan.

Ketimpangan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih terasa nyata. Data menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan cenderung lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di perkotaan. Di sisi lain, garis kemiskinan yang terus meningkat dari Rp351.180 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp422.111

pada 2024 mengindikasikan naiknya biaya hidup, yang turut menambah beban bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba tidak hanya berkaitan dengan rendahnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja yang layak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang fokus pada peningkatan pendapatan, perlindungan sosial, pemerataan kesempatan kerja, dan penanggulangan kemiskinan yang lebih adaptif, berbasis pemberdayaan, dan mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2.1.5.6 Bonus Demografi dan *Aging population*

Bonus demografi di Kabupaten Bulukumba, akan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2030, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2030. Dalam periode ini, diperkirakan jumlah penduduk usia produktif akan mencapai 77 persen dari total populasi, yang memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, bonus demografi juga membawa tantangan yang signifikan.

Di tengah tekanan global akibat urbanisasi, transformasi digital, serta perubahan struktur penduduk dunia yang menua *(aging population)*, Kabupaten Bulukumba menghadapi tantangan daya saing tenaga kerja yang masih rendah. Sektor-sektor unggulan daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal karena keterbatasan kompetensi dan keterampilan. Ketidaksiapan talenta digital di tengah percepatan transformasi teknologi global menambah kompleksitas persoalan ini. Sementara itu, sistem pendidikan vokasional belum mampu menjawab kebutuhan pasar kerja, terutama pada sektor-sektor berbasis industri dan teknologi. Olehnya itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui sektor unggulan daerah agar sumber daya manusia yang melimpah dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian.

Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

2.1.5.7 Pertanian Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh sektor pertanian, diketahui sektor yang berkonstribusi paling banyak terhadap PDRB adalah sektor pertanian sebesar 38,00 persen di tahun 2024. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diwajibkan untuk dapat menjaga kesehatan tanah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan dampak lingkungan dengan menerapkan ekonomi hijau guna mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian terdapat tantangan utama yang harus menjadi perhatian dimana penurunan kualitas tanah, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian, yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan emisi GRK.

Untuk mengatasi isu-isu ini, penting untuk menerapkan metode pertanian yang ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air yang efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan tentang teknik pertanian berkelanjutan dan akses ke teknologi inovatif dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

2.1.5.8 Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kualitas limgkungan hidup di kabupaten Bulukumba sangat dipengaruhi oleh beberapa aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan penambangan dapat berdampak negatif terhadap kualitas udara, air, dan tanah. Pencemaran dari limbah aktivitas ekonomi tersebut serta deforestasi, dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ketat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, dan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi.

Perubahan iklim membawa dampak global yang juga dirasakan di Kabupaten Bulukumba, termasuk perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan perubahan iklim mikro yang mempengaruhi pertanian, sumber daya air, dan ekosistem lokal. Pembukaan lahan pertanian dan penebangan pohon menambah keparahan terhadap bencana longsor dan banjir. Perubahan iklim dan kebencanaan berdampak pada produksi pertanian, ketersediaan air bersih, dan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan, penting untuk menerapkan strategi adaptasi seperti peningkatan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem alami. Strategi mitigasi dan adaptasi harus dikembangkan, termasuk perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan sistem peringatan dini yang efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana.

2.1.5.9 Hilirisasi Sumber Daya Alam

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) merupakan proses penting dalam meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dari eksplorasi dan eksploitasi SDA. Di Indonesia, hilirisasi menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi, terutama di sektor pertambangan dan pertanian. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi, hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri lokal.

Implementasi hilirisasi SDA di Kabupaten Bulukumba menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan dan pelabuhan, sering kali menjadi penghambat dalam distribusi produk olahan ke pasar. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam industri pengolahan dengan penerapan teknologi dan inovasi juga menjadi kendala. Sebagian besar masih bergantung pada metode pengolahan konvensional, sehingga sulit untuk bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dan penerapan teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk mendukung hilirisasi yang efektif.

Hilirisasi SDA di Kabupaten Bulukumba sudah dimulai, ditandai dengan lahirnya beberapa produk lokal seperti Kopi Kahayya. Hilirisasi SDA perlu menjadi fokus pemerintah karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat identitas produk lokal dengan daya saing di pasar global. Untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan

2.1.5.10 Daya Saing dan Kerjasama Daerah

Indeks Daya Saing Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 sebesar 3,47 menunjukkan posisi daya saing ekonomi daerah kategori cukup bersaing atau sedang, menandakan adanya kekuatan dalam sektor-sektor utama seperti infrastruktur, akses pasar, keamanan, dan stabilitas ekonomi. Namun, untuk meningkatkan daya saing secara signifikan, Kabupaten Bulukumba perlu fokus pada pengembangan lebih lanjut dan mengatasi tantangan yang ada.

Salah satu strategi yang krusial adalah memperkuat kerjasama daerah, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah lain, untuk mengoptimalkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan menciptakan sinergi dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi. Kerjasama ini bisa mencakup integrasi infrastruktur, kolaborasi dalam pelatihan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi yang lebih luas, guna meningkatkan efektivitas dan daya tarik investasi ke daerah.

2.1.5.11 Pelestarian Kearifan Lokal dan Warisan Budaya

Pelestarian kearifan lokal dan warisan budaya, seperti pembuatan perahu pinisi dan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, merupakan isu strategis yang mendalam dan kompleks. Pembuatan perahu pinisi, yang merupakan simbol penting dari keterampilan maritim masyarakat Bugis-Makassar, menghadapi tantangan dalam menjaga teknik tradisional di tengah modernisasi dan perkembangan industri. Keberadaan perahu pinisi sebagai warisan budaya tidak hanya melibatkan teknik pembuatan yang rumit, tetapi juga memerlukan pengetahuan mendalam mengenai sumber daya alam yang digunakan. Oleh karena itu, pelestarian teknik ini memerlukan upaya keberlanjutan dalam pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, serta dukungan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan pasar yang layak. Selain itu perlu adanya upaya untuk mengedukasi generasi muda tentang nilai-nilai budaya maritim melalui kurikulum sekolah atau ekstrakulikuler, serta mendorong kecintaan generasi muda terhadap budaya bahari dan juga partisipasi komunitas dalam kegiatan budaya dan festival yang berkaitan dengan bahari.

Di sisi lain, adat Ammatoa Kajang yang merupakan inti dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kajang juga menghadapi tantangan signifikan. Adat Ammatoa Kajang melibatkan aturan dan ritual yang mendalam, yang menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Kajang. Dalam konteks pembangunan dan perubahan sosial yang cepat, terdapat risiko bahwa praktik adat ini bisa terabaikan atau tergerus oleh perubahan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan adat Ammatoa Kajang dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa program-program pembangunan tidak mengancam keberadaan adat tersebut dan memberikan perlindungan serta pengakuan hukum yang memadai bagi hak-hak komunitas adat.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan strategi pelestarian kearifan lokal dan warisan budaya di Kabupaten Bulukumba melalui pendekatan holistik dan kolaboratif. Ini termasuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat luas dan pengambil keputusan, serta membangun kemitraan antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta. Dukungan finansial dan teknis untuk program pelestarian budaya harus disertai dengan kebijakan yang melindungi hak-hak komunitas adat dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya, seperti teknik pembuatan perahu pinisi dan adat Ammatoa Kajang, dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

2.1.5.12 Loncatan Teknologi dan Transformasi Digital

Loncatan teknologi merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk melompati tahap-tahap perkembangan teknologi yang sebelumnya, secara langsung mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di Kabupaten Bulukumba, loncatan teknologi bisa menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Namun, tantangan utama termasuk kurangnya infrastruktur teknologi dasar, seperti akses internet yang terbatas, serta kekurangan dalam kapasitas teknis dan pelatihan. Untuk memanfaatkan loncatan teknologi, perlu adanya investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis masyarakat. Inisiatif seperti penyediaan akses ke teknologi terbaru dalam sektor pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat mempercepat kemajuan dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor.

Transformasi digital mencakup perubahan mendalam dalam cara lembaga, perusahaan, dan masyarakat beroperasi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan dan bisnis. Di Kabupaten Bulukumba, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memperbaiki layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan utama dalam proses ini termasuk resistensi terhadap perubahan, kekurangan keterampilan digital di kalangan tenaga kerja, dan kebutuhan untuk memperbarui kebijakan dan regulasi. Strategi untuk transformasi digital melibatkan pengembangan platform layanan publik berbasis digital, implementasi sistem manajemen berbasis teknologi di sektor pemerintahan dan bisnis, serta penyediaan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Upaya untuk mendigitalisasi proses administratif, termasuk pendaftaran layanan dan transaksi, dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan publik.

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Berbagai aspek kehidupan manusia seakan-akan tercerabut dari akarnya akibat loncatan-loncatan teknologi. Loncatan teknologi tersebut terutama dengan berkembangnya teknologi digital, mulai dari massifnya penggunaan internet (*internet of things*/IoT) hingga *Artificial Intelligence* (AI). Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan 20 tahun kedepan. Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi presisi berbasis drone dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi mobile untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Disrupsi teknologi merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya.

2.1.5.13 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Daerah

Pemerintahan yang efektif dan tata kelola fiskal yang andal merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, responsif, dan berdaya saing. Perubahan struktural di tingkat nasional dan global seperti digitalisasi layanan publik, tuntutan efisiensi fiskal, dan penguatan good governance menjadikan isu penting untuk segera ditangani. Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang **akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil ditandai dengan Nilai SAKIP** dengan peringkat B (Baik), Indeks Pelayanan publik berkategori baik, maturitas SPIP level 3 terdefinisi. Akan tetapi, terdapat Nilai *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) skor rendah, sehingga upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan Indeks SPBE berkategori cukup, menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi (TIK)** untuk memberikan layanan publik yang berkinerja tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.** Dari beberapa capaian optimis, efektivitas birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan struktural.Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sementarakontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya potensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rendahnya efisiensi pengelolaan aset daerah, serta terbatasnya inovasi pembiayaan alternatif. Belanja daerah juga belum cukup produktif dalam mendorong

transformasi struktural ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan porsi belanja pegawai yang masih mendominasi dibandingkan belanja pembangunan. Tekanan global dan nasional terhadap reformasi fiskal dan digitalisasi pemerintahan menuntut kelembagaan pemerintah daerah yang adaptif, tangkas, dan terbuka
terhadap perubahan. Tantangan lain juga datang dari ketidakstabilan ekonomi makro, krisis lapangan pekerjaan, inflasi, serta ketertinggalan dalam transformasi digital hampir di seluruh sektor. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kemandirian fiskal melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah, serta mendorong efektivitas belanja publik yang berbasis kinerja. Isu ini menuntut pendekatan integratif yang menghubungkan reformasi kelembagaan, digitalisasi pemerintahan, kemandirian fiskal, serta pelibatan masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pembangunan, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mendorong efisiensi pembangunan, serta memastikan pembangunan yang adil dan inklusif.

2.1.5.14 Pusat-Pusat Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan

Tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat mencakup upaya Pusat-pusat ekonomi perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bulukumba mencakup upaya meningkatkan kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi dengan memperkuat sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini tercermin dari Indeks Layanan Infrastruktur yang masih memerlukan peningkatan signifikan untuk mendukung mobilitas ekonomi. Sementara itu, persentase desa mandiri yang masih rendah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembangunan ekonomi perdesaan, termasuk penguatan kapasitas lokal dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan investasi infrastruktur dasar dan perumahan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dampaknya akan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi antara kota dan desa, serta perbaikan daya saing daerah di tingkat provinsi.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pembukaan akses jalan baru, misalnya, dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang bagi investasi properti, pengembangan bisnis lokal, pariwisata, dan pertanian. Selain itu, penyediaan fasilitas penunjang perekonomian seperti pasar, lembaga perbankan, dan pusat perdagangan juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat baru ini. Namun, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang terampil, dan sumber energi listrik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di pusat-pusat pertumbuhan baru ini. Dengan strategi yang tepat, pusat pertumbuhan ekonomi baru diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan di Indonesia.

2.5 Inovasi Daerah

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi,

dan daya saing yang tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki "penyakit-penyakit" di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Adapun rincian jumlah Inovasi Kabupaten Bulukumba bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel II-140
Daftar Inovasi Kabupaten Bulukumba

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
1	Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Online (SANRO) Puskesmas Salassae	OPD	Inovasi pelayanan publik	Kesehatan	
2	WUJUDKAN MINAT BACA DAN BICARA (WICARA)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
3	LAKMUS (LEMPAR KE JARING DAN KUMPULKAN SAMPAHMU)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
4	Menjadikan Desa Batukaropa sebagai Wisata Buah Jambu Air	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
5	SEHAT JA'	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
6	PLASENTA (Pemanfaatan Lahan Sekitar Untuk Ketahanan Pangan)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
7	S2R (Sehat SegaRR)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
8	Pemutakhiran Data Anak Stunting (PEDAS). Bulukumba	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
9	APPTi (Aplikasi Pemeriksaan Pemantauan dan Tindak Lanjut)	ASN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Perencanaan	
10	IMPLEMENTASI DDT SERABUT (Duha, Duhur, dan Tadarrus pada hari Senin, Rabu, dan Jumat)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
11	OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA	OPD	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Lingkungan Hidup	
12	KRIPIK SEHAT TALAS (KRISTAL 37)	OPD	Inovasi pelayanan publik	Kesehatan	
13	OPTIMALISASI LAYANAN PRIORITAS TUNTAS BERKUALITAS PADA CALON SEKOLAH ADIWIYATA (IYANA PALE' ADIWIYATA)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
14	CEK DAN EVALUASI RUTIN UNTUK MEMASTIKAN AKURASI TERPADU (CERMAT)	ASN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Kesehatan	
15	PENGEMBANGAN PUSAT PANGAN KELUARGA BERAGAM BERGIZI	ASN	Inovasi pelayanan publik	Pangan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
	SIMBANG DAN AMAN (PUSPAGA BERIMAN)				
16	Gerakan Masyarakat Terintegrasi untuk Sehat Bugar (GEMAR SEGAR)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kesehatan	
17	Imunisasi	ASN	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
18	"SIDATA ATS APS" OPTIMALISASI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK PUTUS SEKOLAH MELALUI PELIBATAN KELUARGA DAN PROGRAM LINGKAR REMAJA	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
19	KANCIL(Komunitas Anak Cinta Literasi)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
20	POSIL (Pustaka Obat Sahabat Kecil)	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
21	RUMAH KACA	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
22	Selingan (Kelola sampah dan limbah lingkungan pun indah)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
23	MABEL (Membaca Al Qur'an Sebelum Belajar)	ASN	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Pendidikan	
24	AKSI (Asah Kosakata Siap Interaksi)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
25	TASBARA (KreatifiTAS BAhan RAjutan) SMPN 40 BULUKUMBA	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	
26	JAGOA (JARINGAN GENERASI TOLAK NARKOBA)	Masyarakat	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
27	GERCEP (GERAKAN CERITA PENDEK)	Masyarakat	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Pendidikan	
28	ZAKRAL (Zikir Di Akhir Pelajaran)	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
29	GERAK (Gerakan Kreatifitas Pelajar Aktif)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
30	ONE STUDENT ONE RUBBISH	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Lingkungan Hidup	
31	PEMBERANI(Pembiasaan Menulis Pagi Terstruktur dan Terarah bagi peserta didik yang terkendala dalam menulis)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
32	TABE (Terapkan Adab Berbicara)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
33	BAKWAN (Berbakti Dan Menawan)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
34	GERCEP (Gerakan Cepat Pintar)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
35	" HILAL " Hafalan Literasi Al'Qur'an	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
36	" GERTAK" Gerakan Tanam Kangkung	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
37	"MENANG BANYAK" (MENYELAMATKAN LINGKUNGAN DENGAN DAUR	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Lingkungan Hidup	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
	ULANG LIMBAH MINYAK				
38	Suca (Sudut Baca)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
39	PIRING (PROGRAM INSPIRASI MAKAN BARENG SEKOLAH) SDN 32 BARABBA	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
40	STUNTING SDN 205 BONTOSUNGGU	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
41	Tanaman Jangka Pendek 328	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
42	SD 30 kebun mini	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
43	Stunting SDN 33 Barabba	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
44	KOLABORASI SISWA DAN PERPUSTAKAAN	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
45	SDN 329 Palambarae Petani Cilik	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
46	SDN 34 Bialo Stunting	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
47	KETAWA LUCU (Kegiatan Tahfidz Waktu Luang, Literasi Unggul Cinta Alquran)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
48	SMS (Senang Memungut Sampah)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
49	SDN 330 RAOE	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
50	SDN 229 Gattareng	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
51	PELANGI EKSIS (Perencanaan Pembelajaran Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kolaborasi Guru dan Efektifitas Pembelajaran Siswa)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
52	Kebun Sekolah SDN 185 Bialo	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
53	Pojok Baca SD NEGERI 31 BONTOMACINNA	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
54	KELOMJAS (KEBUN LOMBOK ,JAHE DAN SAYUR) SD.NEGERI 232 DAMPANG	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
55	Penanaman Adab Pada Siswa	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
56	HALSE CETING (HALaman SEkolah CEgah StunTING) SDN 44 Dampang	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pertanian	
57	Memanfaatkan Lingkunga Sekolah Menanam Sayuran SDN 207 Dampang	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
58	SDN 231 BONTONYELENG	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
59	MAMA TAJAN (Makan Bersama Tanpa Jajan)	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
60	HARAPAN 29	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
61	SD Negeri 40 Bontonyeleng	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
62	38 Menuju Lingkungan Belajar yang Hijau dan Produktif	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
63	DUDEL GEMAS (Dua Delapan Gemar Menanam Sayur)SDN 28 Bontomacinna	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
64	Gazebo Literasi SD Negeri 300 Bontotanae	ASN	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
65	SIHAS (Sekolah Hijau Asri dan Sehat) SDN 266 Toroliya	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
66	Memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam sayuran di SDN 206 Bontonyeleng	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
67	kebun sehat sekolah	Kepala Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
68	SDN 274 BONTOSUNGGU	Kepala Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
69	PROKSI GAYS(PROYEK KEBUN SEKOLAH GAYA SEKOLAHKU) SDN 230 PALAMBARAE	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
70	RUMAH CERDAS ((Ruang Sinergi Rumah, Sekolah, dan Masyarakat bantu Cerdaskan Siswa)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
71	Toserba	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
72	(TAHTAKU 42) Tiada Hari Tanpa Buku SDN 42 Gattareng.	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
73	pemanfaatan lahan sekolah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi	Kepala Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
74	GEMAR BACA (Gerakan Mengaktifkan dan Mengembangkan Minat Baca)	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
75	GCKS (Gerakan Cinta Kebersihan Sekolah)	Masyarakat	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan	
76	Parenting Literasi (PALIT)	OPD	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
77	BIOSKOP LITERASI UNTUK PENINGKATAN RAPOR PENDIDIKAN di SDN 204 GATTARENG	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
78	SEKOLAH SEHAT TANPA JAJAN	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
79	GREN 37 (Gurih Renyah Enak Nikmat)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
80	SDN 36 BONTOSUNGGU	Kepala Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
81	M5M (Mimbar Lima Menit)	ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
82	Satu Bulan Dua Surat (Sabu Darat)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
83	bekal sehatku	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
84	bekal sehatku	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
85	Empat Satu Sekolah Bersih, Generasi Sehat: Inovasi Menuju Lingkungan Belajar yang Nyaman	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
86	Satu Bulan Hapal Dua Surat (SALANHADURAT)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

No	Judul Inovasi	Inisiator	Bentuk Inovasi	Urusan Utama	Ket.
87	CERDIK MENGELOLAH SAMPAH PLASTIK (VAS BUNGA DARI BOTOL AQUA)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
88	cerdik mengelola sampah mengjadi barang siap pakai	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
89	Cerdik Mengolah Sampah Plastik (Galon Air)	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
90	Dua Kosong Lima membangkitkan Keanekaragaman tumbuhan hayati dengan sistem barkode	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
91	ASD	Kepala Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
92	Membuat kaligrafi surah Al- Ikhlas dari daun kering	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
93	Sekolah Terpuji Bersinar (Sekolah Terintegrasi Peduli Kesehatan Jiwa dan Bebas Narkoba)	OPD	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	
94	GERBANG MAS (Gerakan Bersama Peduli Lingkungan Melalui Pemilihan Sampah)	OPD	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Pendidikan	

Sumber : https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/dashboard/lomba-inovasi-daerah, 2025

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mendorong pencapaian program prioritas dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2026 disusun dengan mengacu pada kebijakan ekonomi yang termuat dalam dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2045.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2026 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar penduduk serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2026 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
4. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.

3.1.1 Prospek Dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Bulukumba menunjukkan pemulihan yang semakin solid dengan tren pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pemulihan tersebut ditopang oleh

membaiknya mobilitas masyarakat, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta tumbuhnya kembali aktivitas investasi, khususnya di sektor-sektor berbasis sumber daya lokal. Letak strategis Kabupaten Bulukumba sebagai simpul penting dalam konektivitas kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tetap menjadi keunggulan utama yang memperkuat stabilitas ekonomi daerah ini di tengah ketidakpastian global dan nasional. Kondisi ini menjadi peluang bagi Bulukumba untuk mempercepat transformasi ekonominya menuju peran sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Selatan. Memasuki tahun perencanaan 2026, fokus pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan kualitas investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Arah kebijakan akan memacu produktivitas ekonomi melalui pengelolaan sumber daya lokal yang mencakup ketahanan pangan, pertanian terpadu, kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, serta pelestarian kawasan hutan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dorongan terhadap akselerasi peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri agrofishery, kemaritiman, energi, industri pengolahan, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital akan menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, hilirisasi sumber daya alam menjadi kunci strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Dalam jangka pendek, hilirisasi bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Produk hasil sumber daya alam yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini diarahkan untuk diproses lebih lanjut di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperbesar kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Dalam jangka menengah, hilirisasi akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang membuka ruang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong terbentuknya ekosistem industri lokal yang kuat. Strategi ini juga sejalan dengan upaya penguatan rantai pasok industri daerah dan perluasan basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis sumber daya lokal.

Sementara dalam jangka panjang, hilirisasi akan membawa Kabupaten Bulukumba tumbuh sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam unggulan, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hingga energi terbarukan. Transformasi ini akan didukung oleh inovasi teknologi tepat guna serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lokal. Inovasi di bidang pertanian dan perikanan menjadi semakin penting, mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk lokal dan keberlanjutan lingkungan pasca pandemi. Dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, hilirisasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang dapat diperbarui akan mendukung agenda pembangunan ekonomi hijau serta mewujudkan kemandirian ekonomi Kabupaten Bulukumba secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Global

Pada tahun 2023-2024, tantangan perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian yang tinggi. Pemulihan ekonomi pascapandemi masih berlangsung, namun dunia menghadapi tekanan baru akibat ketegangan geopolitik, kebijakan moneter ketat, serta disrupsi rantai pasok global. Inflasi yang tinggi menjadi tantangan utama di berbagai negara, terutama akibat lonjakan harga energi dan pangan yang belum sepenuhnya terkendali. Kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan oleh bank-bank sentral di berbagai belahan dunia, termasuk The Fed dan Bank Sentral Eropa, telah memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Langkah agresif ini bertujuan meredam inflasi, tetapi di sisi lain juga menghambat konsumsi dan investasi, sehingga meningkatkan risiko resesi di beberapa negara utama.

Konflik geopolitik yang berkepanjangan, terutama di Eropa Timur dan Timur Tengah, semakin memperburuk ketidakstabilan ekonomi global. Ketidakpastian dalam suplai energi terus mendorong volatilitas harga, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan ketahanan sektor industri. Di Eropa, tekanan inflasi yang masih tinggi memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus menaikkan suku bunga acuannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Sementara itu, di Amerika Serikat, kebijakan moneter ketat yang diterapkan The Fed mulai memberikan dampak nyata terhadap perlambatan ekonomi, dengan angka pengangguran yang diperkirakan meningkat pada 2024. Resesi teknis yang sempat terjadi di AS pada 2023 berpotensi berlanjut, terutama jika tekanan inflasi masih sulit dikendalikan dalam jangka pendek.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi masih relatif stabil, meskipun tetap menghadapi risiko eksternal. Ketahanan ekonomi domestik, terutama melalui konsumsi rumah tangga dan investasi, menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan. Namun, dampak dari perlambatan ekonomi global tidak dapat dihindari sepenuhnya, terutama bagi sektor yang bergantung pada ekspor. Ketidakpastian global juga mendorong pemerintah di berbagai negara untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, tahun 2024 diproyeksikan menjadi periode transisi bagi pemulihan ekonomi global. Meski risiko resesi masih membayangi beberapa negara maju, negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan positif dengan memanfaatkan permintaan domestik yang kuat dan mengoptimalkan sektor-sektor potensial seperti industri hijau, digitalisasi ekonomi, serta diversifikasi sumber pertumbuhan. Ke depan, ketahanan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara dalam menavigasi dinamika global dan menjaga keseimbangan antara kebijakan pertumbuhan dan stabilitas.

3.1.1.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 5,03% secara keseluruhan tahun (c-to-c). Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan mencapai 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Dari sisi produksi, sektor Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36%, sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh signifikan sebesar 12,48%.

Memasuki tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global yang kompleks. Ketidakpastian global, termasuk volatilitas harga komoditas, peningkatan suku bunga, kendala rantai pasok, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, diproyeksikan akan mempengaruhi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya mencapai kisaran 3,2% pada tahun 2024 dan 2025, yang dapat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.

Selain itu, kebijakan moneter global, terutama oleh bank sentral utama seperti Federal Reserve AS, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Kenaikan suku bunga atau pengurangan stimulus moneter dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar Rupiah, yang pada gilirannya berdampak pada daya saing ekspor, inflasi, dan stabilitas ekonomi domestik.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang prudent, reformasi struktural, dan upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun,

diperlukan kewaspadaan dan respons kebijakan yang adaptif untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah..

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2026 yaitu ***"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"*** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2026, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 5,80-6,30 persen; (2). Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 37,14 %; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,44-4,96 persen; (4). Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5 persen, (5). Gini Ratio sebesar 0,377 – 0,380 nilai; dan (6). Indeks Modal Manusia 0,57 nilai.

3.1.1.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2024 hingga 2025, perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 mencapai 5,08% year-on-year, melampaui rata-rata nasional sebesar 4,95%, tantangan signifikan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah sektor pertanian, yang rentan terhadap fenomena cuaca ekstrem seperti *El Niño* dan *La Niña*. Kejadian ini dapat mengganggu produksi pertanian, terutama pada komoditas pangan utama. Selain itu, distribusi pupuk subsidi yang tidak merata menambah kompleksitas masalah di sektor ini.

Di sektor investasi, kendala seperti pasokan listrik yang belum optimal, infrastruktur dasar yang perlu ditingkatkan, dan konektivitas yang belum memadai menjadi hambatan bagi iklim investasi di Sulawesi Selatan. Selain itu, faktor politik, seperti menunggu hasil pemilihan kepala daerah, membuat investor bersikap wait and see, yang dapat menunda realisasi investasi.

Dari sisi ekspor, melemahnya permintaan global akibat situasi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini diperparah dengan daya saing provinsi yang masih perlu ditingkatkan dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan perlunya peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, prevalensi stunting yang masih tinggi di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius, karena dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Krisis air bersih yang berpotensi terjadi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, risiko bencana geologi dan hidrometeorologi menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 mengusung tema **"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif"**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 6,12 persen, (2). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,64-4,03 persen; (3). Tingkat Kemiskinan 7,44 persen, (4). Gini Ratio sebesar 0,358; dan (5). Indeks Modal Manusia 0,53

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2026 maka ditetapkanlah 5 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yaitu:

1. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis kompetensi, akhlak, dan kearifan lokal
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, demokrasi substansial, sosial kemasyarakatan, dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal

3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur yang berbasis investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
8. Peningkatan kesiapan dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi

3.1.1.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Tantangan perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor global, nasional, dan lokal yang saling berinteraksi. Ketidakpastian ekonomi global akibat volatilitas harga komoditas, peningkatan suku bunga, kendala rantai pasok, serta dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan energi berpotensi memengaruhi sektor unggulan daerah, terutama pertanian, perikanan, dan pariwisata. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan hanya mencapai kisaran 3,2 persen pada tahun 2025 dapat berdampak pada kinerja ekspor komoditas Bulukumba, termasuk hasil perkebunan dan perikanan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, kebijakan moneter global yang ketat, terutama suku bunga tinggi oleh Federal Reserve AS, dapat berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah dan arus investasi di daerah.

Dari sisi domestik, tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tekanan inflasi, terutama pada harga bahan pokok dan energi, bisa mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah di perdesaan. Selain itu, ketergantungan pada sektor primer masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Bulukumba dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan. Sektor industri pengolahan yang masih berkembang secara terbatas juga menjadi hambatan dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Disisi investasi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Bulukumba sebagai destinasi investasi. Namun, stabilitas sosial politik serta kepastian regulasi daerah menjadi faktor kunci dalam menarik lebih banyak investor, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis ekonomi biru yang telah menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Selain itu, pengaruh Pemilu 2024 terhadap realokasi anggaran dan arah kebijakan ekonomi juga perlu diperhatikan, karena dapat berimbas pada belanja daerah dan pelaksanaan program strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan inovatif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bulukumba, baik melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, optimalisasi anggaran daerah, maupun penguatan daya saing pelaku usaha lokal agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi ke depan.

Selanjutnya, tantangan perekonomian Kabupaten Bulukumba tahun 2025 secara spesifik mencerminkan sejumlah isu struktural yang perlu segera direspons. Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 telah berada di angka 74,43 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif rendah di angka 2,23 Persen, namun tantangan tetap ada pada peningkatan kualitas SDM dan penyediaan lapangan kerja produktif. Tingkat kemiskinan

yang masih berada pada 6,71 Persen menandakan perlunya upaya penguatan ekonomi kerakyatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi 4,60 Persen belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan kesejahteraan, terlebih jika tidak diiringi dengan hilirisasi sektor unggulan dan perluasan akses usaha. Selain itu, PDRB per kapita yang mencapai Rp.44,48 juta serta Gini Ratio 0,329 menunjukkan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan struktur ekonomi yang masih dominan pada sektor primer, tantangan utama ke depan adalah mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor industri pengolahan serta pariwisata yang berdaya saing tinggi.

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 mengusung **"Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Daerah yang Berdaya Saing"** dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2026, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 persen; (2). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,00-2,28 persen; (3). Tingkat Kemiskinan sebesar 5,73-4,83 persen (4). Gini Ratio sebesar 0,316 dan (5). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,43 tahun, (6). PDRB Per Kapita 49,19 Juta Rupiah.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2026, maka ditetapkanlah 6 Prioritas Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 6 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan serta pendidikan, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter
2. Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah
3. Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
4. Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam desa serta meningkatkan peran BUMDes dalam upaya pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan
5. Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
6. Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi serta Berketahanan Iklim Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

3.1.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Adapun Laju pertumbuhan dan struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1
Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.237.166,80	3.355.167,97	3.375.515,89	3.411.726,86	3.562.906,86
B. Pertambangan dan Penggalian	187.423,10	193.158,23	188.696,28	202.225,80	204.047,15
C. Industri Pengolahan	572.546,10	605.310,82	656.241,40	689.667,41	714.572,36

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16.300,80	17.753,75	19.995,24	22.108,80	23.487,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.498,00	3.498,33	3.844,24	3.922,67	4.131,93
F. Konstruksi	798.966,40	839.873,51	899.642,11	996.533,56	1.009.491,95
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.426.383,90	1.519.221,25	1.600.788,14	1.668.811,81	1.769.394,85
H. Transportasi dan Pergudangan	170.370,30	180.507,08	198.870,50	209.953,11	221.139,65
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.658,90	61.047,78	73.245,09	78.859,95	85.091,66
J. Informasi dan Komunikasi	381.979,70	398.863,18	425.945,99	447.967,39	473.453,30
K. Jasa Keuangan	331.596,40	356.591,23	384.408,09	414.720,98	446.241,68
L. Real Estate	397.735,00	410.780,74	436.208,06	457.931,23	482.061,28
M,N. Jasa Perusahaan	1.720,50	1.838,51	1.781,34	1.927,23	2.040,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	558.607,30	582.952,26	580.574,39	593.591,95	607.774,68
P. Jasa Pendidikan	286.880,40	298.699,83	298.132,30	308.686,19	325.992,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.145,90	109.736,94	120.787,46	129.580,78	139.927,65
R,S,T,U. Jasa Lainnya	72.220,40	78.583,05	92.429,39	103.188,17	118.065,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**8.604.200,90**	**9.013.584,47**	**9.357.105,91**	**9.741.403,88**	**10.189.820,82**

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Kab. Bulukumba, 2025

Sedangkan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba atas dasar harga konstan menunjukkan tren pertumbuhan positif secara umum pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020, sebagian besar sektor mengalami kontraksi akibat dampak pandemi, seperti sektor A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) yang terkontraksi sebesar minus 1,12 persen, serta sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 11,94 persen. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi secara bertahap menunjukkan pemulihan yang kuat.

Sektor yang konsisten tumbuh tinggi antara lain sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial, yang tumbuh signifikan mencapai 10,97 persen pada 2022 dan tetap tinggi hingga 2024. Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan juga menunjukkan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bulukumba secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh sebesar 4,40 persen, menunjukkan perbaikan ekonomi yang lebih merata antar sektor. Pemulihan ini didukung oleh perbaikan konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi lintas sektor yang kembali normal pascapandemi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III-2
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

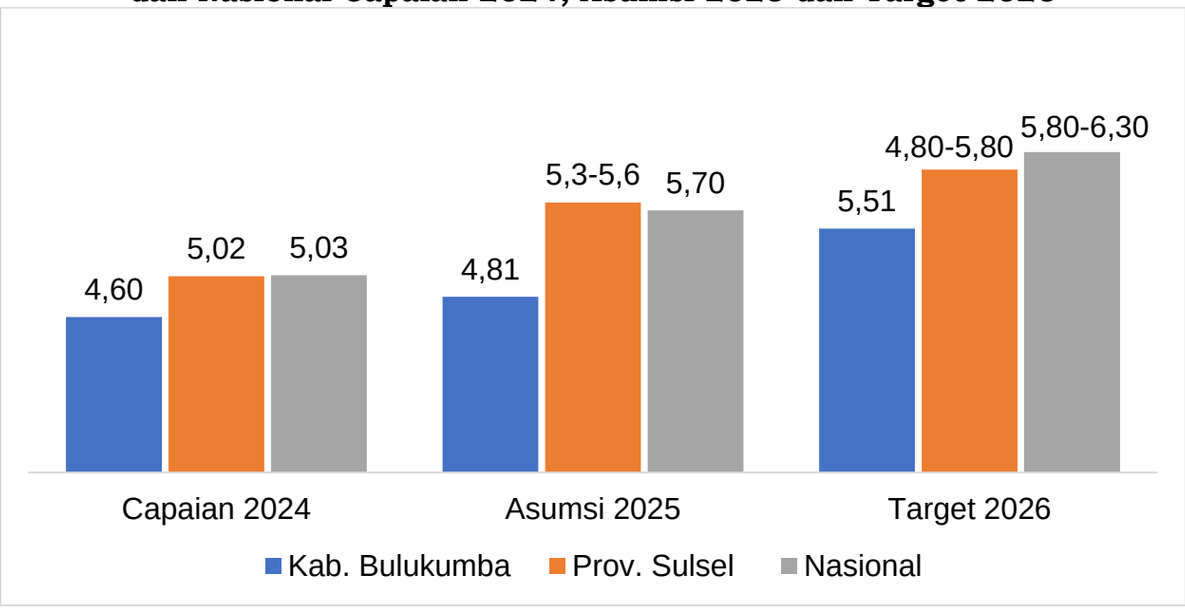
Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,12	3,65	0,61	1,07	4,43
B. Pertambangan dan Penggalian	2,09	3,06	-2,31	7,17	0,9
C. Industri Pengolahan	-3,6	5,72	8,41	5,09	3,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,77	8,91	12,63	10,57	6,23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	0,01	9,89	2,04	5,33

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
F. Konstruksi	5,11	5,12	7,12	10,77	1,3
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,25	6,51	5,37	4,25	6,03
H. Transportasi dan Pergudangan	-14,41	5,95	10,17	5,57	5,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-1,99	5,88	19,98	7,67	7,9
J. Informasi dan Komunikasi	11,92	4,42	6,79	5,17	5,69
K. Jasa Keuangan	9	7,54	7,8	7,89	7,6
L. Real Estate	1,03	3,28	6,19	4,98	5,27
M,N. Jasa Perusahaan	-4,26	6,8	-3,11	8,19	5,87
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,43	4,36	-0,41	2,24	2,39
P. Jasa Pendidikan	9,27	4,12	-0,19	3,54	5,61
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,31	6,39	10,07	7,28	7,98
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-1,21	8,81	17,62	11,64	14,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**0,43**	**4,76**	**3,81**	**4,11**	**4,60**

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, BPS Kab. Bulukumba, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional untuk capaian tahun 2024, asumsi tahun 2025, dan target tahun 2026. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bulukumba sebesar 4,60 persen, sedangkan provinsi mencapai 5,02 persen dan nasional 5,03 persen. Tahun 2025 diasumsikan meningkat menjadi 4,81 persen, dengan asumsi provinsi sebesar 5,3–5,6 persen dan nasional 5,70 persen. Proyeksi tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba ditargetkan sebesar 5,51 persen, selaras dengan arah peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi yang ditargetkan 4,80-5,80 persen dan nasional 5,80-6,30 persen. Capaian ini mencerminkan optimisme terhadap penguatan ekonomi daerah yang terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan produktivitas, serta pemanfaatan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan

Grafik III-1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026



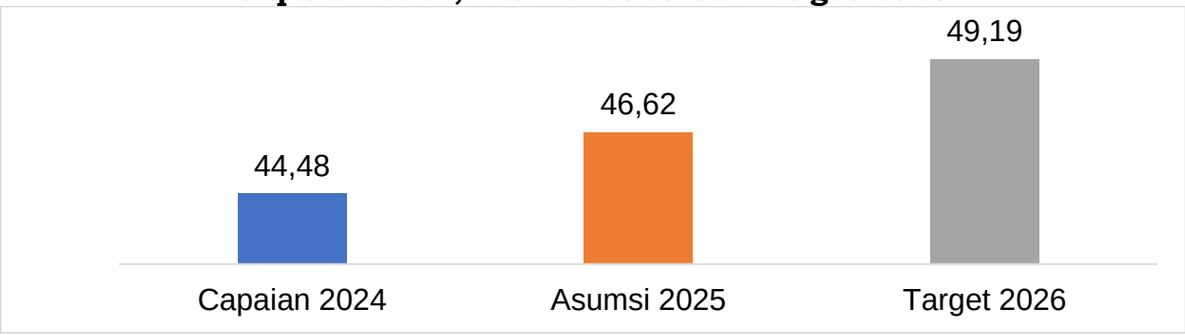
Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025

3.1.1.5.2 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. Tren peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Bulukumba dari tahun 2024 hingga target tahun 2026. Pada tahun 2024, capaian PDRB per kapita berada pada angka Rp.44,48 juta, kemudian diasumsikan mengalami kenaikan menjadi Rp.46,62 juta pada tahun 2025. Target yang ditetapkan untuk tahun 2026 menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp.49,19 juta.

Kenaikan target PDRB per kapita ini mencerminkan harapan akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang didorong oleh program-program strategis seperti penguatan sektor unggulan daerah, pengembangan infrastruktur ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar. Namun, agar target ini dapat tercapai, dibutuhkan sinergi antar sektor dan peningkatan investasi baik dari pemerintah maupun swasta.

Grafik III-2
PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba
Capaian 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026



Sumber : BPS, Rankhir RPJMD Prov. Sulawesi Selatan 2025-2029, diolah

3.1.1.5.3 Inflasi

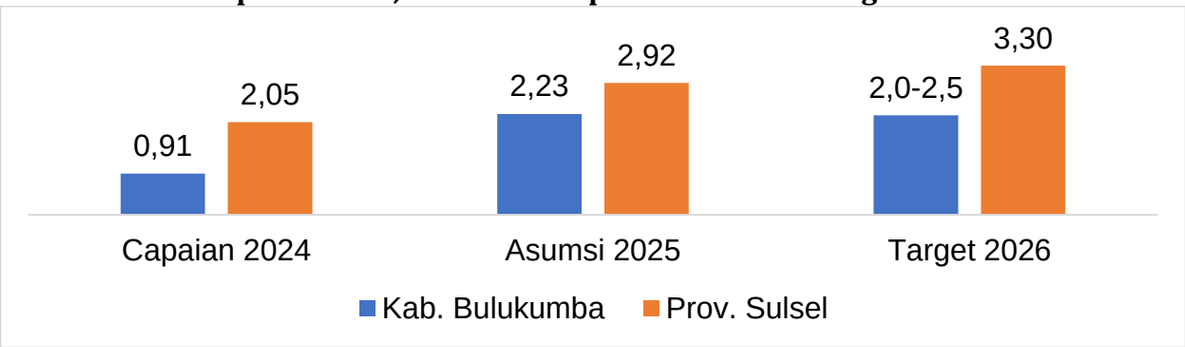
Pada Desember 2024 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) Bulukumba sebesar 0,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,63. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,18 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,92 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,41 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Bulukumba bulan Desember 2024 masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,91 persen.

Dengan target inflasi tahun 2026 berada pada kisaran 2,0 hingga 2,5 persen, Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar untuk mempertahankan kestabilan harga. Potensi tersebut didukung oleh kuatnya sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber utama pasokan kebutuhan pokok, serta distribusi barang yang relatif lancar antar wilayah. Penguatan ketahanan pangan lokal,

efisiensi rantai pasok, dan pengendalian ekspektasi harga menjadi faktor penting dalam menjaga laju inflasi yang terkendali secara berkelanjutan

Grafik III-3
Inflasi Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan
Capaian 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2025, diolah

3.1.1.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

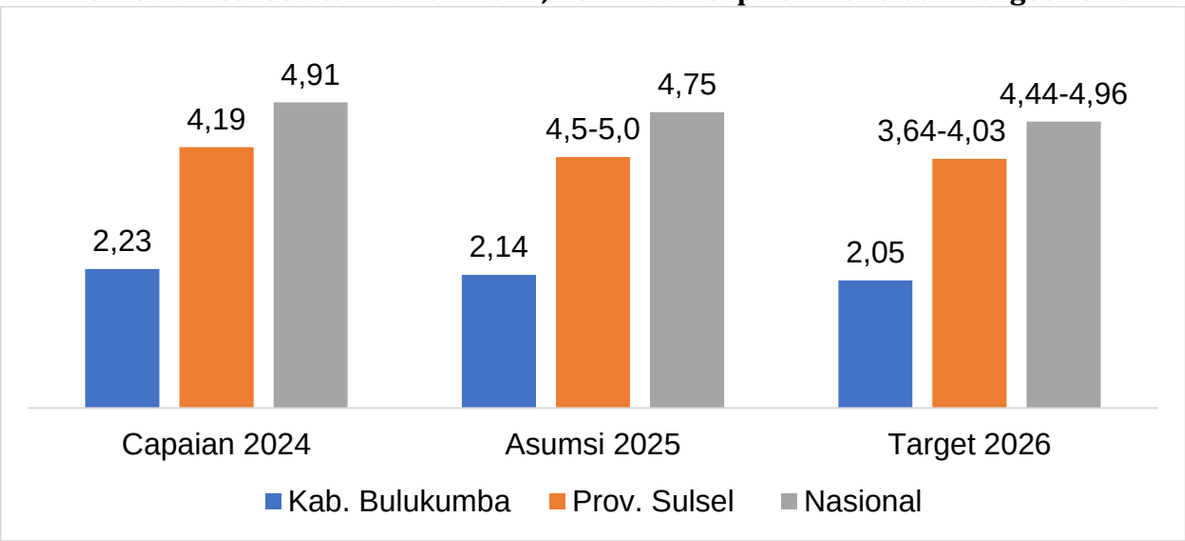
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 256.948 orang, naik 8.743 orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,61 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,23 persen, naik 0,92 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 dengan uraian Penduduk yang bekerja sebanyak 251.230 orang, naik sebanyak 6.275 orang dari Agustus 2023. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 102.364 orang atau sebesar 40,75 persen dari total pekerja serta sebanyak 159.582 orang (63,52 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 6 persen poin dibanding Agustus 2023.

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2023 sebanyak 248.205 jiwa, dimana 244.955 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2023 adalah sebesar 1,31. Dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian daerah cukup mampu menyerap angkatan kerja, terutama pada sektor-sektor produktif yang berbasis potensi lokal.

Dengan target penurunan pengangguran hingga 2,05 persen pada tahun 2026, Kabupaten Bulukumba memiliki peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Potensi tersebut didukung oleh sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil-menengah yang terus berkembang. Penguatan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan ekonomi kreatif dan digital menjadi strategi penting dalam menjaga tren positif ini secara berkelanjutan.

Grafik III-4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bulukumba dan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025

3.1.1.5.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika dalam jumlah penduduk miskin dan persentasenya terhadap total populasi. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kebijakan sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan di daerah ini. Selain itu, kenaikan garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat hidup layak. Berikut adalah data mengenai garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba dalam periode 2020–2024:

Tabel III-3
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2020- 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43
2022	390.040	31,29	7,39
2023	406.882	30,65	7,22
2024	422.111	28,60	6,71

Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba mengalami tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data, persentase penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat sebesar 7,10 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30 ribu jiwa. Angka ini sempat meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 7,43 persen dan 7,39 persen, dengan jumlah penduduk miskin masing-masing 31,31 ribu dan 31,29 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 7,22 persen dengan jumlah penduduk miskin 30,65 ribu jiwa. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana jumlah penduduk miskin menurun menjadi 28,60 ribu jiwa atau 6,71persen dari total penduduk. Sementara itu, garis kemiskinan terus meningkat dari Rp.351.180 pada tahun 2020 menjadi Rp.422.111 pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya kenaikan biaya hidup dan kebutuhan dasar.

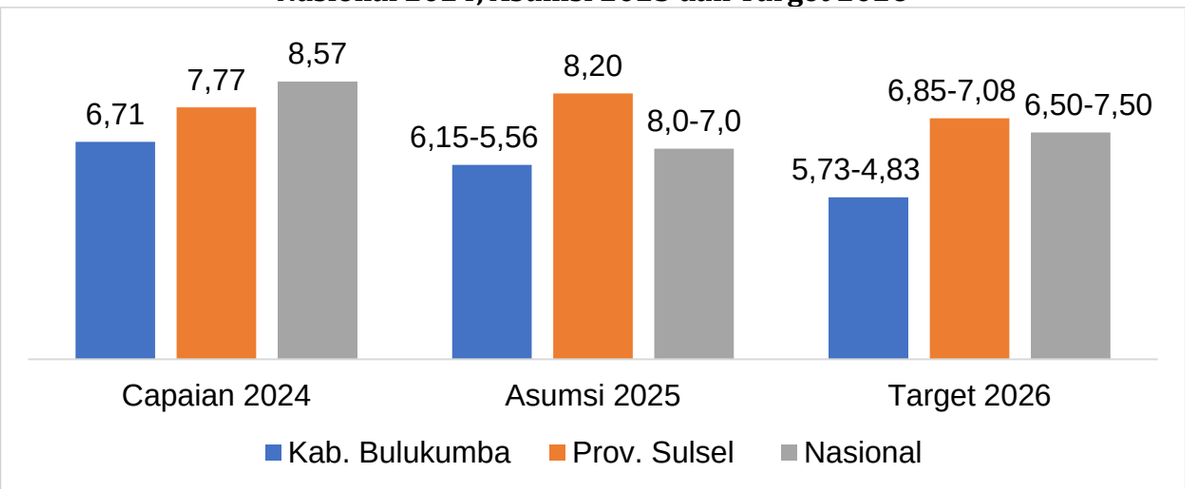
Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan bahwa standar minimum kebutuhan dasar masyarakat mengalami kenaikan seiring dengan inflasi dan perubahan harga barang pokok. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam dua tahun terakhir berdasarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, masih adanya angka kemiskinan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya peluang kerja bagi kelompok rentan masih menjadi tantangan utama. Faktor eksternal berupa ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian, dan dampak pandemi dalam beberapa tahun terakhir juga turut berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di Bulukumba.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan menuju tahun 2026, perlu dilakukan optimalisasi program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Penguatan sektor pertanian dengan modernisasi teknologi, peningkatan akses pasar bagi UMKM, serta diversifikasi industri berbasis sumber daya alam dapat menjadi strategi utama. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja harus menjadi prioritas guna menciptakan angkatan kerja yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemerintah juga perlu memperluas perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran agar bantuan kepada masyarakat miskin dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui sinergi kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dapat terus menurun secara berkelanjutan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba berada pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta mulai meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar.

Dengan target tahun 2026 sebesar 5,73-4,83 persen, terdapat optimisme yang kuat bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki potensi besar untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Hal ini didukung oleh kekuatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta geliat pariwisata yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat akar rumput. Upaya konsisten dalam pemberdayaan masyarakat, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat mendorong pencapaian target secara berkelanjutan.

Grafik III-5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 2024, Asumsi 2025 dan Target 2026



Sumber : RKP 2026 dan Rankhir RPJMD Pro. Sulsel 2025-2029, Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025

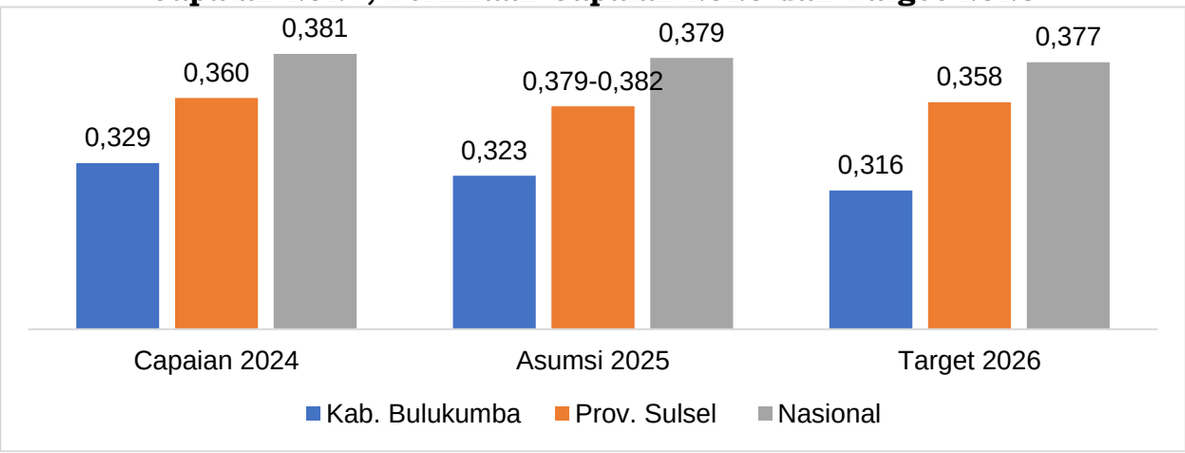
3.1.1.5.6 Gini Ratio

Koefisien Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang m enunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.

Gini rasio menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Bulukumba lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Hal ini mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat yang relatif lebih merata dan menjadi indikator positif bagi pencapaian pembangunan yang inklusif.

Dengan target gini rasio sebesar 0,316 pada tahun 2026, Bulukumba memiliki peluang untuk mempertahankan bahkan memperkuat kualitas pemerataan kesejahteraan. Potensi ini didukung oleh kuatnya ekonomi berbasis kerakyatan, seperti sektor pertanian, perikanan, dan UMKM yang tersebar di wilayah pedesaan. Selain itu, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan dapat menjadi kunci utama dalam menjaga tingkat ketimpangan tetap rendah secara berkelanjutan.

Grafik III-6
Gini Rasio Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian 2024, Perkiraan Capaian 2025 dan Target 2026



Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025

3.1.2 Arah Kebijakan Nasional Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan pada kisaran 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu mendorong Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia ke angka US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan didorong melalui kebijakan transformatif dari sisi pengeluaran dan produksi, serta peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Dari sisi pengeluaran, peningkatan konsumsi masyarakat menjadi kunci utama. Pengendalian inflasi sesuai target Bank Indonesia tetap diperlukan, namun lebih jauh lagi, strategi peningkatan pendapatan masyarakat menjadi penting, termasuk penciptaan lapangan kerja yang luas dan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat

menurunkan rata-rata pendapatan serta meningkatkan risiko pengangguran dan kemiskinan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mengurangi beban konsumsi harian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membelanjakan pendapatannya pada barang atau jasa lainnya. Selain itu, konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat sebagai bagian dari strategi mendorong daya beli masyarakat dan pembiayaan infrastruktur.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi ditargetkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan diarahkan untuk memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global, dengan target nilai investasi mencapai Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Peningkatan investasi berorientasi ekspor juga menjadi fokus, dengan target realisasi PMA mencapai Rp194,30–205,31 triliun dan PMDN sebesar Rp68,04–71,90 triliun. Di samping itu, kontribusi investasi luar Jawa ditargetkan mencapai 52,14–52,37 persen terhadap total investasi nasional. Efisiensi investasi juga akan terus ditingkatkan, dengan menurunkan rasio *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) ke kisaran 6,30–6,00.

Untuk mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis dalam mengatasi kendala utama seperti ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengurangi daya tarik investasi karena investor lebih memilih negara dengan iklim usaha yang stabil, efisien, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, peningkatan investasi akan difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar kementerian/lembaga, penyelesaian hambatan regulasi dan kelembagaan, serta pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan sektor dan wilayah.

Sementara itu, perdagangan luar negeri akan diarahkan untuk mendorong ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi dengan strategi ekspansi pasar, peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global, serta pemanfaatan peluang di tengah dinamika geopolitik global. Upaya ini mencakup penyelarasan kebijakan perdagangan tarif dan non-tarif, penguatan promosi produk Indonesia melalui misi dagang dan business matching, serta optimalisasi market intelligence. Diplomasi ekonomi juga akan ditingkatkan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mengimplementasikan perjanjian dagang secara efektif seperti FTA dan CEPA. Selain itu, kapasitas eksportir terus didorong melalui pelatihan ekspor, digitalisasi, pendampingan perdagangan hijau berkelanjutan, serta penyediaan data dan informasi pasar ekspor secara real-time. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan dan daya saing perdagangan Indonesia dalam skala global.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis sebelumnya diuraikan sebagai berikut.

Kapasitasfiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam kesempatan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Keberadaan UU HKPD juga menyederhanakan sistem perpajakan, yang meliputi penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Selain itu, PP ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, PP ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda, Perda, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalian potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi sumber-

sumber pendapatan". Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 difokuskan pada:

a) Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dalam upaya pencapaian khususnya Pendapatan Asli Daerah.
b) Peningkatan pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskal daerah dan Meningkatkan kemandirian Fisikal untuk Kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah
c) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi akan didorong untuk lebih akuntabel sekaligus mendekatkan jangkauan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
d) selain PAD, peningkatan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi perhatian
e) Struktur Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya berupa bagi hasil pajak, dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat serta Pendapatan lainnya.

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah KabupatenBulukumba Tahun 2023-2027

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan daerah sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Taransfer/Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Berkaitan dengan pencapaian target penerimaan daerah dari komponen Pendapatan Daerah , maka beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

a. Melakukan pembenahan manajemen pemungutan, dengan menggunakan sistem informasi yang kredibel dan akuntabel, sehingga ketersediaan data obyek pajak dan retribusi terintegrasi secara menyeluruh dan dapat diketahui masyarakat.
b. Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan.
c. Melakukan penyesuaian tarif baru sesuai ketentuan yang berlaku, yang didahului dengan sosialisasi
d. Memperbaiki pelayanan kepada masyarakatdalam hal pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Adapun realiasi, asumsi dan target Pendapatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III-4
Realisasi, Asumsi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2027

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Target 2027
4	**PENDAPATAN**	**1.501.289.216.749,93**	**1.594.839.210.226,41**	**1.641.174.080.179,08**	**1.640.704.706.957,00**	**1.681.722.324.631**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	187.567.739.401,15	213.347.469.083,43	**293.640.993.468,00**	**295.844.178.252,00**	**303.240.282.708**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.115.871.619,00	45.309.043.954,00	107.000.000.000,00	107.000.000.000,00	109.675.000.000
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.291.183.373,89	13.471.905.503,00	23.452.742.175,00	178.586.801.653,00	183.051.471.694
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.693.669.916,00	3.725.333.723,00	0,00	3.957.376.599,00	4.056.311.014
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.467.014.492,26	150.841.185.903,43	163.188.251.293,00	6.300.000.000,00	6.457.500.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.313.259.477.348,78**	**1.380.929.865.410,98**	**1.347.245.086.711,08**	**1.344.572.528.705,00**	**1.378.186.841.923**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.263.166.125.848,00	1.269.503.196.582,00	1.292.890.578.000,00	1.325.212.842.450
4.2.2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	107.420.620.143,78	117.763.739.562,98	77.741.890.129,08	51.681.950.705,00	52.973.999.473
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**462.000.000,00**	**561.875.732,00**	**288.000.000,00**	**288.000.000,00**	**295.200.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	462.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	291.875.732,00	288.000.000,00	288.000.000,00	295.200.000

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2026, RanKhir RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2029

3.2.3.Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjaannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.2.2.4. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2026, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2026 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2025-2045 periode ke 1 (Satu) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada *"pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional"*. Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2026, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Tabel III-5
Realisasi, Asumsi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023-2027

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Target 2027
5	**BELANJA**	**1.543.903.837.466,51**	**1.624.642.982.979,30**	**1.652.495.728.545**	**1.640.704.706.957,00**	**1.681.722.324.631**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.012.987.899.391,86**	**1.094.190.271.904,30**	**1.211.418.929.670**	**1.176.411.288.855,13**	**1.205.821.571.077**
5.1.1	Belanja Pegawai	616.860.242.592,00	687.796.250.859,80	753.350.339.107	750.205.238.264,30	768.960.369.221
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	366.162.982.994,86	364.404.850.260,50	437.169.030.063	421.128.108.190,83	431.656.310.896
5.1.5	Belanja Hibah	28.610.389.839,00	41.276.846.622,00	19.619.429.500	4.456.862.500,00	4.568.284.063
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.354.283.966,00	712.324.162,00	1.280.131.000	621.079.900,00	636.606.898
5.2	**BELANJA MODAL**	**353.682.271.435,65**	**345.569.494.894,00**	**243.075.741.707**	**251.605.918.290,71**	**257.896.066.248**
5.2.1	Belanja Tanah	3.439.865.700,00	2.266.737.200,00	3.704.317.000	450.000.000,00	461.250.000
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	63.586.099.794,00	46.443.065.309,16	34.317.384.565	58.924.487.279,90	60.397.599.462
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	142.113.539.674,84	158.839.710.459,84	185.986.260.804	112.564.663.593,00	115.378.780.183
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.842.685.088,00	135.200.856.525,00	18.819.143.538	78.791.767.417,81	80.761.561.603
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.618.145.178,81	2.755.125.400,00	248.635.800	200.000.000,00	205.000.000
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	81.936.000,00	64.000.000,00	0	675.000.000,00	691.875.000
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**66.830.500,00**	**288.012.631,00**	**2.290.358.903**	**13.248.488.720,16**	**13.579.700.938**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	66.830.500,00	288.012.631,00	2.290.358.903	13.248.488.720,16	13.579.700.938
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**177.166.836.139,00**	**184.595.203.550,00**	**195.710.698.265**	**199.439.011.091,00**	**204.424.986.368**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	6.182.644.939,00	5.209.730.650,00	13.986.118.674	12.924.764.890,00	13.247.884.012
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	170.984.191.200,00	179.385.472.900,00	181.724.579.591	186.514.246.201,00	191.177.102.356

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2026, RanKhir RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2029

3.2.4.Arah Kebijakan Pembiayan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2026 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada "*efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat*". Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Tabel III-6
Realisasi, Asumsi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Target 2027
6	**PEMBIAYAAN**	**89.170.928.271,23**	**46.556.307.554,65**	**7.364.271.767**	**0,00**	**0,00**
6.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**89.170.928.271,23**	**46.556.307.554,65**	**7.364.271.767**	0,00	0,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	89.170.928.271,23	46.556.307.554,65	7.364.271.767	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD, SIPD RI Perencanaan Tahun 2026, RanKhir RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2029

3.2.5.Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber–sumber penerimaan dan besarnyakebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan mendorongPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencari alternatifpendanaan dalam membangun. Sumber- sumber pendanaan pembangunan nonAPBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1)APBN; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan BinaLingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3)Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan UtangDaerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Bulukumba selain bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Adapun alokasi pendanaan yang melalui dana dekonsestrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-7
Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2024

No	Kementerian / SKPD	Pagu (Ribu Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Kementerian Pertanian :** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	4.358.413	2.220.436	341.421	103.160
2	**Kementerian Perdagangan** Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	2.897.481	-
3	**Kementerian PU** Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.085.000	-	-	-	-
Jumlah Total		**2.085.000**	**4.358.413**	**2.220.436**	**3.238.903**	**103.160**

Sumber: Bapperida Kab. Bulukumba, 2025

3.2.5.2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untukmelakukan kerjasama dengan badan usaha.Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintahdaerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorongpembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu,teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publiksehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapatberkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun

pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dankerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalanyang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidangbidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yangjuga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunaninfrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.5.3. Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yangmengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yangbernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajibanuntuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupapengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana KerjaPemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimalpembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2045, visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024, prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan sektor unggulan di setiap kecamatan. Rumusan tersebut merupakan acuan bagi OPD dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Bab ini berisi prioritas dan sasaran pembangunan daerah Bulukumba Tahun 2026 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, capaian target pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah,serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah kabupaten Bulukumba dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerahmenjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telahditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2025 menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel IV-1
Tujuan dan sasaran serta target Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
T1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Indeks Pembangunan Manusia	74,43	74,88	75,43
	S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2 Indeks Kesehatan	83,35	83,92	84,56
	S2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	3 Indeks Pendidikan	65,76	66,37	67,10
	S3 Menguatkan penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan sebagai Fondasi Kehidupan Sosial	4 Indeks Kerukunan Umat Beragama		75,78	79,62
		5 Indeks zakat nasional	0,76	0,77	0,78
		6 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	26,74	31,75	35,51
		7 Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan	34,78	37,30	41,01
	S4 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Generasi muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	8 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,85	62,35	62,85
		9 Indeks Ketimpangan Gender	0,356	0,236	0,228
		10 Indeks Pembangunan Pemuda		56,90	56,92
T2 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Inklusif		11 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6	4,81	5,51
		12 Rasio Gini	0,329	0,323	0,316
	S5 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	13 PDRB PerKapita	44,48	46,62	49,19
		14 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,19	3,25	3,32
		15 Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	7,14	7,17	7,19
		16 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,03	6,06	6,08
		17 Persentase Wisatawan Mancanegara	0,505	0,594	0,714
		18 Persentase Koperasi Sehat	19,8	20,67	21,53
		19 Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,54	6,61	6,64
		20 Pertumbuhan Investasi Daerah	118,22	1,748	1,902
	S6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	21 Indeks Ketahanan Pangan	83,73	91,21	92,55
	S7 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	22 Tingkat Kemiskinan	6,71	6,15-5,56	5,73-4,83
		23 Tingkat Pengangguran Terbuka	2,23	2,14	2,05
	S8 Meningkatnya Stabilitas Fiskal	24 Indeks Kemandirian Fiskal	13,38	17,60	17,59
		25 Indeks Akses Keuangan Daerah	4,43	4,48	4,50
	S9 Meningkatnya Pembangunan Desa Mendukung Perekonomian Daerah	26 Persentase Desa Mandiri	54,13	57,43	60,09
T3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		27 Indeks Reformasi Birokrasi	71,04	73,01	74,89
	S10 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	28 Nilai SAKIP	61,89	62,05	62,41

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
yang Bersih dan Melayani	S11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital dan Inovasi Daerah	29 Indeks Pelayanan Publik	3,36	3,96	4,06
		30 Indeks SPBE	2,56	2,57	2,73
		31 Indeks Inovasi Daerah	47,23	47,94	48,24
T4 Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Daerah terhadap Layanan Infrastruktur yang Berkualitas		32 Indeks Daya Saing Daerah	3,47	3,64	3,67
	S12 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi	33 Indeks Layanan Infrastruktur	3,61	3,67	3,74
T5 Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim		34 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,53	70,29	70,46
	S13 Menurunnya Intensitas Emisi GRK	35 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	24,93	35,68	38,06
	S14 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Resiko Bencana	36 Indeks Risiko Bencana	145,58	137,48	128,67

Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2045 untuk Periode *RPJMD Tahap Kedua Tahun 2025-2029* maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba berlandaskan Penguatan Fondasi Transformasi penguatan Fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai penguatan keamanan, ketertiban, demokrasi berkeadilan dan stabilitas ekonomi daerah, karakter religius, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Periode penguatan landasan transformasi ini didukung dengan implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta daya saing daerah untuk kesinambungan pembanguna sehingga diperlukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi di berbagai sektor. Hal ini mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta penguatan aspek keamanan, ketertiban, demokrasi berkeadilan, stabilitas ekonomi daerah, karakter religius, ketahanan sosial budaya, dan ekologi. Periode penguatan landasan transformasi ini didukung dengan implementasi pembangunan kewilayahan yang merata melalui pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan daya saing daerah untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan capaian indikator kinerja makro Kabupaten Bulukumba tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai angka 74,43. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan oleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Namun, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 6,71 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28.600 orang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 berada di angka 2,23 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 2.468 orang. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lain, namun tetap memerlukan perhatian lebih dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Upaya peningkatan investasi daerah serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi utama dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba menunjukkan perkembangan positif dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp 44,48 juta. Hal ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin berkembang, namun tantangan yang dihadapi adalah memastikan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi agar tidak menimbulkan kesenjangan yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan angka Gini Ratio yang masih perlu mendapatkan perhatian, meskipun tidak ditampilkan secara eksplisit dalam tabel. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah perlu terus ditingkatkan.

Di sisi lingkungan, Kabupaten Bulukumba menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan capaian persentase penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 24,93 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan energi fosil, peningkatan ruang hijau, serta

optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah. Ke depan, upaya ini perlu diperkuat dengan pemanfaatan energi terbarukan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap praktik ramah lingkungan agar target pengurangan emisi dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, capaian indikator makro Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif, namun masih terdapat tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesejahteraan sosial yang merata, serta keberlanjutan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Untuk RKPD Tahun 2026, fokus utama adalah memperkuat fondasi transformasi sosial dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Program prioritas meliputi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pengembangan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, penguatan karakter religius dan ketahanan sosial budaya akan menjadi dasar dalam membentuk masyarakat yang berintegritas dan harmonis.

Dalam aspek transformasi ekonomi, strategi difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk lokal, pengembangan infrastruktur pendukung, serta promosi investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola yang berintegritas dan adaptif juga menjadi prioritas, dengan meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas serta pengembangan wilayah yang terencana dan berkelanjutan akan memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba.

Transformasi ekologi melalui pembangunan yang lestari dan ramah lingkungan menjadi komponen penting dalam RKPD 2026. Langkah-langkah strategis meliputi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengembangan program-program yang mendukung kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan Kabupaten Bulukumba dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2026 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2026 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan Tahapan Awal untuk Indonesia Emas 2045, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan tahun 2026, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2026 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 mengakibatkan meningkatnya angka

pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2025, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan Perkuatan Fondasi Transformasi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif"."** Kedudukan RKP Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2026 menjadi sangat strategis. Tema tersebut dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran pertama RPJMN Tahun 2025-2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2026.

Tema ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan sekolah unggulan, percepatan pembangunan rumah sakit daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal yang adaptif.

Selain itu, upaya swasembada pangan dan energi akan didukung melalui pelaksanaan program lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah juga berfokus pada akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan tiga juta rumah serta digitalisasi bantuan sosial.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2026 juga menitik beratkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Gambar IV-1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Dalam rangka memastikan keselarasan dan sinergi arah kebijakan pembangunan antar level pemerintahan, diperlukan penyandingan antara sasaran pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten

Bulukumba. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi perencanaan serta mendorong tercapainya prioritas pembangunan secara berkelanjutan. Penyelarasan ini juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun sasaran pembangunan nasional mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provini Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dibandingkan dengan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba dalam matriks berikut.

Tabel IV-2
Target Sasaran pembangunan Nasioanl, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Target 2026		
		Nasional	Provinsi	Kabupaten
Pertumbuhan tinggi berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	5,80 – 6,30	4,8 – 5,8	5,51
	Pendapatan Nasional Bruto/ PDRB perkapita	5.870 (US$)	86,9 – 89,5 Juta	49,19 Juta
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	37,14	33,46	38,06
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67	77,82	
Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,5- 7,5	6,85-7,08	5,73-4,83
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44- 4,96	3,64- 4,03	2,05
	Gini Rasio	0,377- 0,380	0,358	0,316
	Kemiskinan Ekstrem	0,0 – 0,5	-	-
Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia/IPM	0,57	0,53	-
	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	75,43

Sumber : RKP 2026 dan RKPD 2026 Pro. Sulsel Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025

4.2.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tema tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional adapun sasaran pembangunan tahun 2026 adalah: (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi,(b) tingkat pengangguran terbuka, (c) Gini Ratio, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Tabel Keselarasan Prioritas RKPD dan Nasional Tahun 2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV-3
Keselarasan Prioritas Nasional dan
Prioritas Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		4 Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kebudayaan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Penataan Bangunan Gedung
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)
			Program Pengembangan Umkm
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	5 Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Program Kawasan Permukiman
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
	Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Perlindungan Perempuan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Penataan Bangunan Gedung
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)
			Program Pengembangan Umkm
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3 Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan	Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4 Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah
			Program Penyelengggaraan Pengawasan
			Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Riset dan Inovasi Daerah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengelolaan Arsip
			Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	Memperkuat Penyelarasaan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antara Umat Beragama untuk Mencapai	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
	Masyarakat yang Adil dan Makmur	Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pengembangan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perlindungan Khusus Anak
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Program Perlindungan Perempuan

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Program Pemasaran Pariwisata
			Program Penataan Bangunan Gedung
		6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan

Sumber : RKP 2026 dan RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba diolah oleh Bapperida Bulukumba 2025-2029

Adapun Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional pada Kabupaten Bulukumba dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel IV-4
Highlight Indikasi Intervensi berdasarkan Prioritas Nasional berdasarkan RKP Nasional Tahun 2026

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan *output*: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan *output* pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pemanfaatan *Platform* Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan *output Platform* Digital Pendidikan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan *output*: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan *output*: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan danSDM

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		koperasi.
		Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan *output*; (1) Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; (2) Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; (3) Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (4) Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); (5) Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; (6) Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; (7) Kartu Prakerja; (8) Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; (9) Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; (10) Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; (11) Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; (12) Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; (13) Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; (14) Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN).
	Provinsi Sulawesi Selatan	Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan *output*; c. Bantuan PBI JKN; d. Kartu Indonesia Pintar; e. Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; f. Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; g. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; h. Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan;
		(1) Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		Petani Sasaran; (2) Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; (3) Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; (4) Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; (5) Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9	Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya • C1: Kabupaten Luwu Timur • C2: Kabupaten Luwu • C3: Kabupaten Luwu Utara • C4: Kabupaten Wajo • C5: Kabupaten Bone • C6: Kabupaten Sinjai • **C7: Kabupaten Bulukumba** • C8: Kabupaten Sidenreng Rappang • C9: Kabupaten Pinrang	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di KawasanTeluk Bone dan sekitarnya, dengan *output*:
		• Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura; • Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan;
		• Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan;
		• Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan);
		• pengembangan koperasi sektor produksi; • peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; • pengembangan kewirausahaan;
D6	Kawasan TelukBone	Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bonedan Sekitarnya, dengan *output*:

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14	dan sekitarnya • D6: Kabupaten Luwu Timur • D7: Kabupaten Luwu • D8: Kabupaten Luwu Utara • D9: Kabupaten Wajo • D10: Kabupaten Bone • D11: Kabupaten Sinjai • **D12: Kabupaten Bulukumba** • D13: Kabupaten Enrekang • D14: Kota Palopo	• Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD) • Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat • Pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM • pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di **Kabupaten Bulukumba,** • penyediaan perumahan • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota • Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia • Pengembangan bioetanol, • PLTMH, • PLTS, • PLTM, • Volume biofuel untuk domestik, • Sertifikasi kompetensi tenaga listrik sektor ketenagalistrikan dan EBTKE
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan,dan Darat, dengan *output*:
		• Pengembangan pelabuhan laut, • Layanan angkutan perintis laut dan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara; • Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan,dan wilayah 3T, dengan *output*:
		• Bantuan PSU bidang perumahan
		• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)
		• Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh
		• Pemenuhan akses air minum aman, • Pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Terpusat • Pembangunan TPS3R • SPAM berbasis masyarakat
		• Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM dan PLTA), • Perluasan DAK Bidang Infrastruktrur Energi Terbarukan

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Percepatan konversi BBM ke BBG • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU)
		• Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, • Pengembangan SDM TIK • digitalisasi masyarakat, • Perluasan layanan penyiaran digital
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, dengan *output*: • Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dankesehatan ibu anak • Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit • Pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, • Vaksin imunisasi program, • BMHP untuk Skrining Kesehatan, • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan sosialisasi programpemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik • Penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan • Transformasi digital (TK),

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Implementasi layanan *telemedicine*, • Lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan *Stunting* dan kematian ibu dan anak, dengan *output*: • Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, • Purwarupa alat deteksi penyakit, • Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, • Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6), • Layanan informasi dan edukasi TBC • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Menanggulangi TB di tempat kerja • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakitTBC • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS • Layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular • Obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria • Layanan informasi dan edukasi malaria • Layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia • Daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah • Kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis • Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock, • Tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		ditingkatkan kapasitasnya, • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, • Penyediaan makanan tambahan (PMT)bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, • Layanan imunisasi pendukung pencapaian *Stunting*, • Kegiatan surveilans gizi dan KIA, • Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, • Kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan *Stunting* • Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, • Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan • Lingkungan yang Responsif Gender (*Stunting*/AKI, perubahan iklim, kespro)
		• Melakukan pemenuhan standar sistemtata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasipemenuhan gizi nasional • Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan • Memberdayakan komunitas masyarakatdan pelaku usaha • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sekto
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan *output*:
		• bantuan sarana dan prasarana pertanian • Optimasi Lahan, • Cetak Sawah, • SID Cetak Sawah, • Kawasan Padi, • Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, • Pembangunan Embung Pertanian • Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Revitalisasi tambak budi daya ikan air payau • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan pangan akuatik • Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura • Sarana pascapanen tanaman perkebunan • Prasarana pengolahan tanaman perkebunan • Sarana pengolahan tanaman perkebunan • Sertifikasi produk • Bantuan Hijauan Pakan Ternak • Benih ternak unggul • Bibit ternak unggul • Sertifikasi benih/bibit ternak • Sertifikasi benih/bibit ternak upt • Bantuan ternak ruminansia perah • Bantuan ternak ruminansia potong
		• Bantuan ternak unggas • Bantuan ternak lainnya • Layanan kesehatan hewan
		• Koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan
		• Pengembangan industri dan UMKM halal, • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, • Penguatan ekosistem halal, • Penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah
	Provinsi Sulawesi Selatan	Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikansektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan *output*: • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, • Peningkatan kapasitas

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		pendidik/instruktur vokasi, • Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihanvokasi, • SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, • Pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, • Sertifikasi profesi bidang pertanian, • Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, • Pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, • Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, • Kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, • Penyediaan dan peningkatan layanan pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA). • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuanPAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD
		• Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP
	Provinsi Sulawesi Selatan	Penguatan ekosistem budaya berbasis *urban heritage*, *rural heritage* dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (**Kabupaten Bulukumba**), dengan *output*: • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan • Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan • Desa pemajuan kebudayaan • Data dan informasi warisan budaya • Koleksi, cagar budaya nasional, danbenda budaya yang dikelola, • Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst, • Pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		Pinisi
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan • Penguatan kapasitas dan kemandirian,serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses Pembangunan • Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korbanperkawinan anak melalui penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
	Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*:
	Provinsi Sulawesi Selatan	• Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, • Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut • Prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda • Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi • Pengembangan ruang terbuka hijau dan • Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, • Koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana • Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana • Kawasan konservasi perairan yang operasional, • Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, • Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, • Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air • Penyelamatan mata air yang berperan krusial

Kode	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		• Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi • Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati • Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan, • Pengembangan produk melaluiagroforestri, • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan, • Penguatan kelompok perhutanan sosial, • Perlindungan serta pengamanan hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan secaravegetatif di das yang dipulihkan, • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), • Inventarisasi dan verifikasi usahadan/atau kegiatan terbangun di KawasanSuaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) • Sarana SAR *rafting boat*, prasarana *search and rescue* (SAR),
		• Pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional
	Provinsi Sulawesi Selatan	Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan *output*: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuanpemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Sumber : Permen PPN/Bappenas RI No. 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP Tahun 2026

4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045 dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RKP Tahun 2026. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **"Peningkatan Kualitas SDM Yang Berahlak dan Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Pertumbuhan**

Ekonomi Yang Inklusif", dengan 8 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2026,yaitu:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital"
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka keterkaitan pembangunan daerah RKPD Prov. Sulawesi Selatan 2026, RKPD Kab. Bulukumba 2026 difokuskan pada sasaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel IV-5
Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Kabupaten Bulukumba
1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Pengelolaan Arsip
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru	Program Pengolahan Dan, Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan, Perikanan Budidaya

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Kabupaten Bulukumba
		Program Penataan Bangunan Gedung
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	3. Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	4. Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima	Program Penyelengggaraan pengawasan
		Program Perumusan Kebijakan Dan Asistensi
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba	Program Prioritas Kabupaten Bulukumba
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Riset dan Inovasi Daerah
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	5. Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaa Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan, Jalan (LLAJ)
		Program Peyelengaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Peyelengaraan Jalan
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sumber : RanKhir RPJMD Prov. Sulsel 2025-2029 dan RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba Diolah oleh Bapperida Bulukumba, 2025-2029

Untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menyelaraskan program pembangunan tahun 2026 dengan 96 program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan. Sinkronisasi ini dilakukan agar pelaksanaan program di kabupaten dapat mendukung capaian target pembangunan provinsi secara efektif. Rincian dukungan program kabupaten terhadap program prioritas provinsi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV-6
Dukungan Program Kabupaten Bulukumba terhadap Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	100 %
5	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %
6	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	-
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	100 %
8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100 %
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %
13	Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	100 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
14	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	100 %
15	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 %
16	Program Pemenuhan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	630 Nilai
17	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	75 %
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10,2
19	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	100 %
20	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5,85 %
21	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100 %
22	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %
23	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	100 %
24	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100 %
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 %
26	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100 %
27	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3,338
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	99,26
29	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	60,3
30	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13 %
31	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	64 %
32	Program Penyuluh Pertanian	Program Penyuluh Pertanian	100 %
33	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	60,3
34	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
35	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	21,40 %
36	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	60,150,49 Ton
37	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100 %
38	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100 %
39	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	56,23 Kg/Kapita /Tahun
40	Progam Pengembangan Ekspor	Progam Pengembangan Ekspor	-
41	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100 %
42	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	100 %
43	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100 %
44	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 %
45	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %
46	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100 %
47	Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	100 %
48	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %
49	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	50 %
50	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %
51	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	95 %
52	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	100 %
53	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	95 %
54	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	95 %
55	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 %
56	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	100 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,73 %
58	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %
59	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %
60	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
61	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100 %
62	Program Penataan Organisasi	Program Penataan Organisasi	100 %
63	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	95 %
64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %
65	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %
66	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %
67	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %
68	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %
69	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,73 %
70	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %
71	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	100 %
72	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	50 %
73	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	100 %
74	Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	100 %
75	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %
76	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	100 %
77	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100 %
78	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	100 %

No	Program Prioritas Provinsi	Program Kabupaten	Target Tahun 2026
79	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	-
80	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16 Unit
81	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	-
82	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	100 %
83	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	100 %
84	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100 %
85	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	99 %
86	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	100 %
87	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	100 %
88	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	87,68 %
89	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
90	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100 %
91	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	100 %
92	Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	100 %
93	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 %
94	Program Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	100 %
95	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %
96	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	100 %

Sumber : SIPD 2025

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Perencanaan pembangunan pada tahun 2026 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, mengusung tema pembangunan. Dengan mengusung tema **"Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Daerah yang Berdaya Saing"**, RKPD Tahun 2026 menitikberatkan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi strategis sebagai daerah dengan sektor unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, serta pariwisata bahari. Posisi geografis yang menguntungkan dengan akses ke laut dan kawasan strategis lainnya menjadikan Bulukumba sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, daya saing SDM yang masih perlu ditingkatkan, serta ketahanan ekonomi yang masih rentan terhadap dinamika global.

Berdasarkan potensi dan tantangan tersebut, pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

1. Ketahanan Sosial dan Peningkatan Kualitas SDM
    - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan sebagai upaya menciptakan SDM unggul.
    - Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    - Revitalisasi nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat yang harmonis.
2. Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
    - Mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan hilirisasi komoditas unggulan.
    - Pengembangan ekonomi biru dan hijau sebagai strategi dalam meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
    - Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi.
3. Ketahanan Tata Kelola dan Stabilitas Daerah
    - Reformasi birokrasi dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna meningkatkan pelayanan publik.
    - Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan guna menciptakan tata kelola yang lebih inklusif.
    - Stabilitas ekonomi daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan penguatan peran sektor keuangan.
4. Pembangunan Kewilayahan yang Berkelanjutan
    - Pemerataan pembangunan antarwilayah dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas.
    - Peningkatan ketahanan lingkungan dengan pengelolaan sumber daya air, energi, dan pangan yang berkelanjutan.
    - Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penerapan kebijakan yang ramah lingkungan.

Dengan 6 prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan Misi Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tahun 2026, sebagai berikut:

Tabel IV-7
Keselarasan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak dan Berbudaya Maju	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
2 Membangun Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
	3 Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan
3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	4 Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Pengembangan Wilayah yang Terencana dan Berketahanan Iklim	5 Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi
	6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba Diolah oleh Bapperida Bulukumba 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2026, disusun sasaran pembangunan yang selaras dengan tujuan dan misi daerah, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan ini dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi daerah, sekaligus mengarahkan kinerja perangkat daerah agar lebih terfokus dan terukur. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara visi/misi, tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja, program perangkat daerah, serta prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2026:

Tabel IV-8
Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
VISI : Kabupaten Bulukumba Religius, Maju, dan Mandiri berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan						
M1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak dan Berbudaya Maju	T1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1 Indeks Pembangunan Manusia		
		S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		2 Indeks Kesehatan		Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyakarat	Persentase capaian upaya kesehatan masyarakat yang memenuhi target	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
		S2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan		3 Indeks Pendidikan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SD, SMP, PAUD dan PNF	Program Pengelolaan Pendidikan	
			Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Pengelolaan Arsip	
				Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
				Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
		S3 Menguatnya Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan sebagai Fondasi Kehidupan Sosial		4 Indeks Kerukunan Umat Beragama		
				5 Persentase Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas		
				6 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi		
				7 Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan	Indeks kematangan organisasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat	Efektifitas Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
		S4 Meningkatnya Kualitas Keluarga, Generasi muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		8 Indeks Pembangunan Keluarga		
				9 Indeks Ketimpangan Gender		
				10 Indeks Pembangunan Pemuda		
			Terlaksananya Sistem perlindungan anak yang efektif	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Perlindungan Khusus Anak	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				yang menapatkan layanan komprehensif		
				Persentase Anggaran Resposif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
				Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Meningkatkan Pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Meningkatnya Daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
M2 Membangun Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan	T2 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah yang Inklusif			11 Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				12 Rasio Gini		
		S5 Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah		13 PDRB PerKapita		Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
				14 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian		
				15 Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan		
				16 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan		
				17 Persentase Wisatawan Mancanegara		
				18 Persentase Koperasi Sehat		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				19 Rasio PDRB Industri Pengolahan		
				20 Pertumbuhan Investasi Daerah		
			Meningkatnya Nilai Jual dan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Jual Produk Perikanan (Rp)	Program Pengolahan Dan, Pemasaran Hasil Perikanan	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Peningkatan volume produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Peningkatan volume produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengelolaan, Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
				Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	
			Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya legalitas koperasi	Jumlah koperasi merah putih yang memiliki legalitas	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		S6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		21 Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya presentase lumbung aktif	Persentase Lumbung Pangan Aktif	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
		S7 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran		22 Tingkat Kemiskinan		Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan
				23 Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang berafiliasi dengan inkubator bisnis	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatnya Sarana Prasarana dan Meningkatnya SDM Pencari Kerja	Tersedianya Sarana Prasarana	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Persentase Tenaga Kerja Yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komptensi		
			Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial dan Jumlah Pekerja Rentan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	
				Data Pekerja rentan Yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan		
		S8 Meningkatnya Stabilitas Fiskal		24 Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya Kualitas pengawasan dan intensifikasi pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
				Persentase kebijakan perekonian yang di fasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	
		S9 Meningkatnya Pembangunan Desa Mendukung Perekonomian Daerah		25 Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Persentase fasilitasi tata kelola desa		
			Meningkatnya Kegiatan ekonomi lokal, pendapatan, dan kesempatan kerja melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan	Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi (indeks desa)		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			teknologi dalam mendorong usaha desa dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan			
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lemaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lemaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif dan partisipatif dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
M3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	T3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani			26 Indeks Reformasi Birokrasi		
		S10 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah		27 Nilai SAKIP		Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
			Menurunkan penyelewengan atau penyimpangan,baik yang bersifat angggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Internal (APIP)	Program Penyelengggaraan pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan Dan Asistensi	
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pembangunan daerah		Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan	Indeks kematangan organisasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase dokumen pelaporan barang milik daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian;	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.	Program Kepegawaian Daerah	
		S11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital dan Inovasi Daerah		28 Indeks Pelayanan Publik		
				29 Indeks SPBE		
				30 Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi	Persentase Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Administrasi Kependudukan	pencatatan sipil yang dilaksanakan		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap aksesdan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasl Pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
M4 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Pengembangan Wilayah yang Terencana dan Berketahanan Iklim	T4 Meningkatnya Produktivitas dan Efisiensi Daerah terhadap Layanan Infrastruktur yang Berkualitas			31 Indeks Daya Saing Daerah		
		S12 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi		32 Indeks Layanan Infrastruktur		Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaa Air Minum	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang tertangani	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan, Jalan (Llaj)	
				Konektifitas darat		
			Meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan dengan kondisi baik (kewenangan kabupaten)	Program Peyelengaraan Jalan	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
	T5 Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim			33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		S13 Menurunnya Intensitas Emisi GRK		34 Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
			Meningkatnya dan keberlanjutan keaneragaman hayati	Persentase luas area kawasan TAHURA yang lindungi dan diamankan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
			Menigkatnya kualitas pengelolaan KEHATI	Persentase RTH yang ditingkatkan tata kelolanya	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya baku Mutu	Persentase Titik Pantau Penilaian Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Terwujudnya sistem pengeloaan sampah dari hulu ke hilir yang rama lingkungan dan efesien	Persentase Sampah yang terkelola	Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan Meningkatnya kapasitas masyarakat dibidang lingkungan hidup	Persentase cakupan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyrakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		S14 Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Resiko Bencana		35 Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pascabencana		
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan	Cakupan layanan penyelamatan dan	Program Pencegahan, Penanggulangan,	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			evakuasi korban kebakaran	evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bulukumba

Pedoman Penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian 5 dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, "Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD" Pada pasal 178 ayat 1,2,3 dan 4. Disebutkan ayat 1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Ayat 3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan Ayat 4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan 6 pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah, dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Bulukunba.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Berdasarkan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Kabupaten Bulukumba, maka secara umum permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, antara lain:

1. Sejumlah permasalahan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Bulukumba terkait pembangunan infrastruktur khususnya di pedesaan adalah sarana dan prasarana jalan yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan infrastruktur pertanian dan perikanan, penyediaan air bersih serta fasilitas sarana pendidikan dan layanan kesehatan serta kesejahteran hidup.
2. Permasalahan pemberdayaan kelompok tani maupun kelompok nelayan yang masih belum optimal sehingga masih dibutuhkan pendampingan penyuluhan maupun pemberian bantuan sarana dan prasarana. .
3. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Sektor pendapatan daerah, masih belum optimalnya hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah hal ini antara lain disebabkan: kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran masyarakat, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di awal tahun ini, diharapkan dapat

mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagi aparat pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
6. Adanya dampak perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bulukumba antara lain menurunnya produksi pertanian, degradasi lingkungan, kurangnya air bersih, pendangkalan sungai sehingga perlu menyusun perencanaan program dan kegiatan sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Sebagaimana tertuang dalam Bab III tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar **Rp.1.640.704.706.957,00** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp.295.844.178.252,00** dan pendapatan transfer sebesar **Rp.1.344.572.528.705,00** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 288.000.000,00.** Berdasarkan target Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2026, dengan jumlah belanja **Rp. 1.640.704.706.957,00**.

Belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow* program priority, memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026.

Tabel V-1
Rincian Rencana Pendanaan Tahun 2026

Kode	Uraian	Target 2026
4	**PENDAPATAN**	**1.640.704.706.957,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**295.844.178.252,00**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	107.000.000.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	178.586.801.653,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.957.376.599,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.300.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.344.572.528.705,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.292.890.578.000,00
4.2.2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	51.681.950.705,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**288.000.000,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	288.000.000,00
5	**BELANJA**	**1.640.704.706.957,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.176.411.288.855,13**
5.1.1	Belanja Pegawai	750.205.238.264,30
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.128.108.190,83
5.1.5	Belanja Hibah	4.456.862.500,00

Kode	Uraian	Target 2026
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	621.079.900,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**251.605.918.290,71**
5.2.1	Belanja Tanah	450.000.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	58.924.487.279,90
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	112.564.663.593,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.791.767.417,81
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	675.000.000,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**13.248.488.720,16**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	13.248.488.720,16
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**199.439.011.091,00**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	12.924.764.890,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186.514.246.201,00
6	**PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.1	**PENERIMAAN DAERAH**	0,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**0,00**
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	0,00

Sumber : SIPD RI Perencanaan Tahun 2025, BKAD Kab. Bulukumba, 2025

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2026, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 6 (Enam) prioritas pembangunan.

Tabel V-2
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyakarat	Jumlah Kematian Ibu Persentase capaian upaya kesehatan masyarakat yang memenuhi target	100%	119.045.065.690,00	Dinas Kesehatan
						48.884.311.000,00	RSUD H.A.Sultan Dg Raja
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100%	578.415.600,00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Keluarga Ber PHBS	100%	168.811.200,00	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	61.6 Angka	3.975.065.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Persentase keluarga yang mengikuti	100%	2.735.230.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
			dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100%	648.170.000,00	Dinas sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SD, SMP, PAUD dan PNF	100%	96.177.171.860,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	648.170.000,00	Dinas Sosial
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik.	100%	565.130.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Kurikulkum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	275.707.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	meningkatnya Peran Serta Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	100%	16.454.739.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
			dalam Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan			
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	100%	101.006.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	100%	7.413.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	100%	2.875.238.338,00	Sekretariat Daerah
		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menapatkan layanan komprehensif (%)	100%	326.220.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,27%	256.050.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	60%	94.176.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	100%	2.735.230.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional	100%	6.248.082.250,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya saing kepemudaan	Persentase Wirausaha Muda	10,02%	1.081.472.800,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi pariwisata	Persentase kegiatan promosi wisata yang dilakukan	30%	498.506.200,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	100%	7.413.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Hilirisasi Pertanian dan Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Hijau dan Biru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan wisatawan domestik Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara	2,50%	2.367.760.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya promosi pariwisata	Persentase kegiatan promosi wisata yang dilakukan	30%	498.506.200,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100%	16.454.739.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Peningkatan prestasi olahraga tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional	100%	6.248.082.250,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase Luas Areal yang Terfasilitasi Sarana Pertanian	60,03%	894.913.800,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persentase luas areal yang terdampak pembangunan prasarana pertaniana	13%	1.419.808.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Derajat Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	21,40 Persen	449.287.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya	1.59 %	2.732.849.900,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	35 %		
				Rasio Ketersediaan Energi	8.00 %		
				Rasio Ketersediaan Protein	9.00 %		
				Skor Pola Pangan Harapan	90.19 %		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	60.150,49 Ton	11.417.104.216,00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Angka Konsumsi Ikan	56,23 Kg/ Kapita/ Tahun	219.950.000,00	Dinas Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	100%	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang berafiliasi dengan inkubator bisnis	100%	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	21.051.605.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	100%	7.413.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100%	500.000.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Persentase Luas Areal yang Terfasilitasi Sarana Pertanian	60,03%	894.913.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persentase luas areal yang terdampak pembangunan prasarana pertanian	13%	1.419.808.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio luas serangan OPT yang dikendallikan	64%	179.155.250,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	240,643.28 Ton	34.979.400,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	60.150,49 Ton	11.417.104.216,00	Dinas Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Angka Konsumsi Ikan	56,23 Kg/ Kapita/ Tahun	219.950.000,00	Dinas Perikanan
3	Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran Koperasi Merah Putih dan BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	100%	7.413.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terkelolanya Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Pemenuhan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Meningkatnya kapasitas UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	100%	30.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelayanan dan PerlindunganTenaga Kerja CPMI/PMI	Persentase Penempatan tenaga Kerja	100%	45.869.600,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Menurunnya jumlah perselisihan Hubungan Industrial, Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Data Pekerja Yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	100 % 1400 %	459.130.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial	95 %	648.170.000,00	Dinas Sosial
		Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya luas kawasan Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Yang Tertangani	100%	683.963.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	21.051.605.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	100%	2.894.282.700,00	Badan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	95 %	216.135.639.711,16	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.	50 Persen	1.316.363.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	menurunkan penyelewengan atau penyimpangan,baik yang bersifat angggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat	77.00 %	6.419.820.000,00	Inspektorat Daerah
				Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil	90.30 %		

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
				pengawasan Internal (APIP)			
				Persentase Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	95 %		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	50 %	877.399.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan	Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan	100%	2.248.905.544,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	20 %	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Akuntabel, Adaptif, Inovatif, Transparan, dan Pelayanan yang Prima	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	555.785.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	95 %	216.135.639.711,16	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan barang milik daerah	Persentase dokumen pelaporan barang milik daerah	95 %	727.341.400,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan	50%	1.316.363.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
			manajerial, fungsional dan teknis.	kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.			
		Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.	100%	339.581.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	100%	2.875.238.338,00	Sekretariat Daerah
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	95 %	216.135.639.711,16	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan Persentase OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	100%	43.380.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	100%	429.998.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.	100%	1.316.363.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100%	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan	Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan	100%	2.248.905.544,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasl Pembangunan	100%	494.679.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibiitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase jalan dengan kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)	100%	56.748.340.099,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya drainase dengan kondisi baik	Persentase Drainase dalam Kondisi baik	100%	831.901.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Meningkatnya	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	100%	10.242.380.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
			perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	87.68 %	2.080.593.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbaj	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	84,46 %	1.137.884.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya luas kawasan Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Yang Tertangani	100%	683.963.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik	100%	7.413.458.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Negara Kewenangan Kabupaten Yang Di Fasilitasi	100%	70.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Konektivitas Darat (%)	100%	14.687.797.400,00	Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Perangkat Daerah	Outcome	Indikator	Target	Pagu 2026	Perangkat Daerah
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman hayati	100%	960.878.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	100%	2.191.904.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	100%	3.131.677.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluhan lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	100%	460.925.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%	3.508.647.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1.089.807.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	100%	3.131.677.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5.3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-3
Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bulukumba

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	524.065.448.116,36
2	Dinas Kesehatan	224.224.576.321,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja	169.165.854.882,00
4	Puskesmas Caile	4.031.845.859,00
5	Puskesmas Ujung Loe	3.858.006.314,00
6	Puskesmas Ponre	2.982.108.288,00
7	Puskesmas Bonto Bangun	4.630.098.924,00
8	Puskesmas Tanete	3.580.480.655,00
9	Puskesmas Bonto Bahari	3.978.296.320,00
10	Puskesmas Gattareng	2.522.763.149,00
11	Puskesmas Bontonyeleng	2.862.013.925,00
12	Puskesmas Borong Rappoa	2.331.943.092,00
13	Puskesmas Manyampa	760.420.248,00
14	Puskesmas Palangisang	1.743.248.727,00
15	Puskesmas Balibo	2.043.897.870,00
16	Puskesmas Salassae	2.229.179.750,00
17	Puskesmas Lembanna	2.269.310.372,00
18	Puskesmas Herlang	2.553.586.260,00
19	Puskesmas Bonto Tiro	2.276.793.897,00
20	Puskesmas Karassing	1.568.898.940,00
21	Puskesmas Batang	2.003.349.000,00
22	Puskesmas Tanah Toa	1.757.749.372,00
23	Puskesmas Kajang	2.690.449.283,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	90.234.614.693,45
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.979.595.593,44
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.277.079.399,08
27	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.456.292.537,57
28	Dinas Sosial	6.268.942.071,20
29	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.187.915.992,61
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.902.330.648,44
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.378.651.108,53
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.406.017.867,22
33	Dinas Perhubungan	22.504.995.149,16
34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5.857.285.123,47
35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja	6.022.470.854,68
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.639.920.586,00
37	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	3.176.021.667,74

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2026
38	Dinas Perikanan	16.921.915.146,50
39	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	16.859.674.080,12
40	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.995.759.751,20
41	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	27.569.448.814,47
42	Sekretariat Daerah	25.760.787.368,00
43	Sekretariat DPRD	32.579.290.548,04
44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	9.118.862.232,66
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	224.890.860.320,16
46	Badan Pendapatan Daerah	13.689.592.022,34
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.166.103.398,98
48	Inspektorat Daerah	18.439.422.087,00
49	Kantor Kecamatan Ujungbulu	13.803.653.889,44
50	Kantor Kecamatan Ujung Loe	2.912.879.488,64
51	Kantor Kecamatan Bulukumpa	4.773.913.577,10
52	Kantor Kecamatan Rilau Ale	3.294.536.610,00
53	Kantor Kecamatan Gantarang	5.739.263.655,08
54	Kantor Kecamatan Kindang	2.586.695.837,30
55	Kantor Kecamatan Herlang	2.940.174.236,52
56	Kantor Kecamatan Bonto Tiro	2.837.741.807,00
57	Kantor Kecamatan Bonto Bahari	5.684.199.538,62
58	Kantor Kecamatan Kajang	4.045.685.385,00
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.671.794.305,88
	Grand Total	**1.640.704.706.957,00**

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/, 2025

Perumusan Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun ke pertama periode Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di daerah. Perincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025-2029 yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2026 yang disertai dengan indikator dan terget kinerja tahun 2026, serta target tahun 2026, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel V-4
Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BULUKUMBA			**524.000.660.837,36**					**579.759.456.251,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**507.200.468.437,36**					**578.964.789.851,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**507.200.468.437,36**					**578.964.789.851,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			410.015.954.577,36					498.637.669.734,00	
	Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)**	**100%**	410.015.954.577,36	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	498.637.669.734,00	-
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam sistem informasi*	100 %	20.924.200,00			OPD	100 %	352.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Laporan	7.379.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	16 Laporan	165.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.588.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.956.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	77.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan*	100 %	407.669.839.552,36			OPD	100 %	495.066.348.552,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3511 Orang	407.638.204.752,36	Kab. Bulukumba	DAU, DAK	OPD	3511 Orang	493.050.378.552,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	1.652.970.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	10 Laporan	33.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	31.634.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 %	62.178.000,00			OPD	100 %	119.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	53.678.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	2 Laporan	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	9.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM*	100 %	62.585.000,00			OPD	100 %	137.687.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	62.585.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	OPD	5 Orang	137.687.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran*	100 %	211.213.300,00			OPD	100 %	429.664.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.998.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Paket	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.999.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	5 Paket	27.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 0	16.353.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	20 0	16.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.990.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	12 Laporan	27.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	124.871.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	OPD	30 Laporan	138.164.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Cakupan Barang Milik Daerah yang Diadakan*	100 %	258.543.900,00			OPD	100 %	674.256.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	162.960.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	OPD	1 Unit	179.256.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	300 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	300 Unit	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	95.583.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Unit	165.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Disediakan*	100 %	1.635.420.625,00			OPD	100 %	1.652.663.782,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	238.630.625,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	OPD	12 Laporan	262.494.782,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.396.790.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	OPD	12 Laporan	1.390.169.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dalam Kondisi Baik*	100 %	95.250.000,00			OPD	100 %	205.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	2 Unit	57.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.750.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	50 Unit	38.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Unit	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			96.177.171.860,00					79.094.359.735,00	
	[Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah]	**Tingkat Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang SD, SMP, PAUD dan PNF**	**100%**	96.177.171.860,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	79.094.359.735,00	-
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan*	100 %	53.726.883.960,00			Satuan Pendidikan	100 %	45.241.648.605,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.032.018.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	5 Unit	212.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	344.975.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	344.999.150,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	199.920.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	4 Paket	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Siswa	557.747.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	180 Siswa	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60 Orang	510.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	60 Orang	22.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	128 Orang	578.560.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	128 Orang	497.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	350 Satuan Pendidikan	38.013.220.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOS REGULER	Satuan Pendidikan	350 Satuan Pendidikan	35.591.498.195,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	350 Satuan Pendidikan	840.640.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	350 Satuan Pendidikan	901.519.850,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211 Orang	480.174.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	211 Orang	33.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	7.255.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Konten Digital	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	5 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	155.833.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	2 Dokumen	134.749.670,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	118.562.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Komunitas	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	147.923.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	5 Kegiatan	127.896.890,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	400 Buku	50.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	400 Buku	12.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6584 Paket	3.950.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	6584 Paket	3.181.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	574.980.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	5 Ruang	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Unit	1.492.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAKD	Satuan Pendidikan	16 Unit	1.256.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	85.760.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	15 Orang	11.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	836.865.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	3.031.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK	Satuan Pendidikan	15 Ruang	1.773.134.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	125.148.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	100 Peserta Didik	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	248.000.010,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	30 Paket	2.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan*	100 %	28.938.718.300,00			Satuan Pendidikan	100 %	23.640.477.290,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah									
		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	3.005.556.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Unit	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Unit	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	59 Ruang	1.800.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	59 Ruang	1.980.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	153.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	153.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	153.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	8 Unit	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	20 Paket	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	139.518.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	100 Peserta Didik	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12000 Peserta Didik	1.168.658.300,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	12000 Peserta Didik	1.027.159.210,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25 Orang	212.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	25 Orang	22.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	79 Orang	357.080.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	79 Orang	343.068.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	69 Satuan Pendidikan	15.144.280.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK	Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	14.884.589.610,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	69 Satuan Pendidikan	211.138.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	253.332.750,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	69 Orang	165.739.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	69 Orang	40.015.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	3.404.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Konten Digital	11.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	99.599.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	2 Dokumen	96.244.280,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	25.112.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Komunitas	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	94.812.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	94.019.640,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	318.094.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.530.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	10 Ruang	280.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	24.025.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	25 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1560 Buku	150.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1560 Buku	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4373 Paket	2.623.800.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	4373 Paket	2.460.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	153.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	1 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	253.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	20 Paket	279.048.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	9.277.874.800,00			Satuan Pendidikan	-	9.016.318.050,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	367.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	7 Unit	403.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	20.710.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	100 Peserta Didik	22.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	15 Orang	127.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Satuan Pendidikan	15 Orang	22.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	44 Orang	198.880.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	44 Orang	248.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	429 Satuan Pendidikan	6.636.800.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK	Satuan Pendidikan	429 Satuan Pendidikan	21.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	429 Satuan Pendidikan	99.263.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	429 Satuan Pendidikan	238.746.750,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Konten Digital	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	5 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	121.217.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	2 Dokumen	92.271.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	67.527.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	4 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Komunitas	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	177.380.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Ruang	58.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	91.643.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Kegiatan	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	86.070.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	0 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	225.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	4 Unit	220.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	500.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK	Satuan Pendidikan	10 Paket	6.920.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	183.881.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	375.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	5 Ruang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan*	100 %	4.233.694.800,00			Satuan Pendidikan	100 %	1.195.915.790,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	94.816.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	100 Peserta Didik	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	20 Orang	27.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang	49.720.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	11 Orang	54.692.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan	3.393.300.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAKN	Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 Satuan Pendidikan	63.539.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	70.601.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	16.032.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Orang	17.541.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Orang	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	120.429.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	29.135.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Komunitas	27.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	300.000.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Polewali	DAU	Satuan Pendidikan	1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	20 Orang	22.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	10489 Peserta Didik	166.722.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10489 Peserta Didik	236.080.790,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			275.707.000,00					415.000.000,00	
	[Meningkatnya Kualitas Kurikulkum Pendidikan]	**Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal**	**100%**	275.707.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	415.000.000,00	-
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal*	100 %	219.307.000,00			Satuan Pendidikan	100 %	265.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	76.552.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	350 Orang	118.885.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	350 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	23.870.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal*	100 %	56.400.000,00			Satuan Pendidikan	100 %	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	56.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			565.130.200,00					617.642.850,00	
	[Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan]	**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik.**	**100%**	565.130.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	617.642.850,00	-
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Guru Memiliki Sertifikat Pendidik*	100 %	565.130.200,00			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 %	617.642.850,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	550.226.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	606.642.850,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	14.904.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Laporan	11.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			166.504.800,00					200.117.532,00	
	[Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan]	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan atau diperbaharui**	**100%**	166.504.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	200.117.532,00	-
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Lembaga Pendidikan Dasar Yang Memiliki Izin Operasional*	2 Dokumen	0,00			Satuan Pendidikan	2 Dokumen	45.055.961,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	45.055.961,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Lembaga Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal Yang Memiliki Izin Operasional*	2 Dokumen	166.504.800,00			Satuan Pendidikan	2 Dokumen	155.061.571,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	63.944.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satuan Pendidikan	10 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	102.560.200,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Satuan Pendidikan	1 Dokumen	45.061.571,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**16.800.192.400,00**					**794.666.400,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**16.800.192.400,00**					**794.666.400,00**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			16.454.739.600,00					440.000.000,00	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan]	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**	**100%**	16.454.739.600,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	440.000.000,00	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Karya Budaya Direvitalisasi dan diinventarisasi*	1 Objek	16.454.739.600,00			OPD	1 Objek	440.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	16.454.739.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	2 Objek	440.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			244.446.800,00					248.600.000,00	
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	**Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan Dikembangkan**	**100%**	244.446.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	248.600.000,00	-
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Kesenian Tradisional*	20 Orang	244.446.800,00			Sanggar Kesenian	20 Orang	248.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	387 Orang	244.446.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kesenian	387 Orang	248.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			101.006.000,00					106.066.400,00	
	[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	**Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan** **Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan**	**100%**	101.006.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	106.066.400,00	-
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Terlestarikannya Cagar Budaya*	5 Objek	101.006.000,00			OPD	5 Objek	106.066.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8 Objek	101.006.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	8 Objek	106.066.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)			**64.787.279,00**					**74.317.736,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**64.787.279,00**					**74.317.736,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**64.787.279,00**					**74.317.736,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			64.787.279,00					74.317.736,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran*	100 %	9.225.700,00			Sanggar Kegiatan Belajar	100 %	13.200.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.985.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kegiatan Belajar	5 Paket	2.200.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kegiatan Belajar	2 Paket	1.100.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	6.240.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kegiatan Belajar	10 Laporan	9.900.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Disediakan*	100 %	55.561.579,00			Sanggar Kegiatan Belajar	100 %	61.117.736,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.561.579,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Laporan	21.517.736,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sanggar Kegiatan Belajar	1 Laporan	39.600.000,00	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
	DINAS KESEHATAN KAB. BULUKUMBA			**224.224.576.321,00**					**326.449.628.208,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**224.224.576.321,00**					**326.449.628.208,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**224.224.576.321,00**					**326.449.628.208,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			104.086.711.031,00					240.627.539.100,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**72.50%**	104.086.711.031,00	Kab. Bulukumba	-	-	**72.50%**	240.627.539.100,00	-
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai standar* *% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*	100 % 100 %	157.584.800,00			Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Inspektorat), Masyarakat	100 % 100 %	105.290.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.176.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Inspektorat), Masyarakat	2 Dokumen	64.706.800,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.758.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Inspektorat), Masyarakat	2 Dokumen	53.052.770,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.515.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Inspektorat), Masyarakat	1 Laporan	9.515.200,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	31.134.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah (Bappeda, BPKAD, Inspektorat), Masyarakat	1 Laporan	31.068.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen keuangan sesuai regulasi* *Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik (dinas kesehatan)*	100 % 100 %	99.852.915.381,00			ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	100 % 100 %	99.764.506.500,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1337 Orang/bulan	96.141.456.181,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	1337 Orang/bulan	96.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	3.584.850.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	12 Laporan	3.306.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	54.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	6 Laporan	72.360.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	26.388.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	4 Dokumen	26.388.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	22.440.400,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	18 Laporan	22.440.400,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	23.580.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN Perangkat Daerah (OPD) - Aparatur pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, Bendahara) - Pimpinan Daerah - Masyarakat penerima manfaat tata kelola keuangan daerah	12 Dokumen	37.318.100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*terlaksananya pengelolaan administrasi retribusi yankes di puskesmas dan jaringannya*	100 %	265.248.000,00			OPD Dinas Kesehatan, UPT BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit	100 %	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	265.248.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	OPD Dinas Kesehatan, UPT BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit	2 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu.*	100 %	39.358.000,00			Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.	100 %	39.100.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1337 Laporan	8.350.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.	1337 Laporan	8.200.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.676.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.	1 Dokumen	11.700.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	19.332.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah.	Laporan	19.200.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kelancaran pelayanan administrasi internal perangkat daerah*	100 %	778.014.900,00			Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	100 %	139.073.625.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.354.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	2 Paket	24.607.200,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	273.720.300,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	0 Paket	73.137.400,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	24.437.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	0 Paket	33.541.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Unit	101.288.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	Unit	138.601.720.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	1 Paket	36.621.400,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	19.361.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	Laporan	37.374.400,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	304.653.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup perangkat daerah.	0 Laporan	266.623.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang berhasil diadakan*	1 Unit	343.920.000,00			BMD. Aparatur pemerintah daerah yang membutuhkan sarana/prasarana kerja. Masyarakat	1 Unit	352.518.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	343.920.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	BMD. Aparatur pemerintah daerah yang membutuhkan sarana/prasarana kerja. Masyarakat	3 Unit	352.518.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	1 laporan	1.997.342.350,00			-	1 laporan	2.047.275.908,75	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.037.342.350,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	3 Laporan	1.063.275.908,75	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	960.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	1 Laporan	984.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan hasil pemeliharaan BMD*	1 laporan	156.510.000,00			BMD	1 laporan	160.422.750,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	19.646.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD	0 Unit	20.137.150,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	136.864.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD	17 Unit	140.285.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan BLUD*	100 %	495.817.600,00			Pasien dan masyarakat pengguna layanan. Tenaga kesehatan dan tenaga non-medis di BLUD. Pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas	100 %	508.213.040,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	495.817.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Pasien dan masyarakat pengguna layanan. Tenaga kesehatan dan tenaga non-medis di BLUD. Pemerintah daerah sebagai pembina dan pengawas	21 Unit Kerja	508.213.040,00	Dinas Kesehatan
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			119.045.065.690,00					122.021.192.332,25	
	[Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyakarat]	**Jumlah Kematian Ibu Persentase capaian upaya kesehatan masyarakat yang memenuhi target**	**100%**	119.045.065.690,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	122.021.192.332,25	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi*	100 %	47.393.102.340,00			Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	100 %	48.577.929.898,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	525.744.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DBH CHT, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	1 Unit	538.887.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas									
		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	323.082.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	0 Unit	331.159.050,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0 Unit	4.624.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAU	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	0 Unit	4.739.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	630.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	1 Unit	645.750.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas									
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	21 Unit	295.718.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	21 Unit	303.111.360,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	5.270.573.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	2 Unit	5.402.337.530,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	210.744.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	2 Unit	216.012.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	19.520.485.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	4 Unit	20.008.497.740,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	3.170.929.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	0 Unit	3.250.202.225,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	7.620.542.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	10 Unit	7.811.056.267,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	10 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	10 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	715 Unit	697.287.040,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	715 Unit	714.719.216,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	4.624.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU, DAK , DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	2 Unit	4.739.600,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	8.866.133.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	5 Paket	9.087.786.325,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	10000 Keluarga	55.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	10000 Keluarga	56.375.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	21 Paket	197.615.400,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah	21 Paket	202.555.785,00	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Cakupan UHC* *Menurunnya angka kematian anak* *Menurunnya insiden Tuberklosis* *Menurunnya Prevalensi Hipertensi* *Menurunnya Prevalensi Stunting*	98 Persen 40 Jiwa 143 per 100000 penduduk 30,72 Persen 20.72 Persen	71.422.216.750,00			Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	98 Persen 40 Jiwa 143 per 100000 penduduk 30,72 Persen 20.72 Persen	73.207.772.168,75	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6275 Orang	102.449.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	6275 Orang	105.011.045,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5990 Orang	175.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	5990 Orang	179.375.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5990 Orang	85.539.800,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	5990 Orang	87.678.295,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20116 Orang	50.040.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	20116 Orang	51.291.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	55.000.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Orang	56.375.205,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144875 Orang	29.120.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	144875 Orang	29.848.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	59.244.500,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Orang	60.725.612,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41152 Orang	43.461.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota."	41152 Orang	44.547.730,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8820 Orang	42.736.800,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota."	8820 Orang	43.805.220,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1011 Orang	35.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota."	1011 Orang	35.875.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11159 Orang	59.600.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota."	11159 Orang	61.090.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9451 Orang	276.041.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	9451 Orang	282.942.025,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	31.614.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	2 Dokumen	32.404.350,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	38.736.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	39.704.605,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	2.258.500.150,00	Kab. Bulukumba	DAU, DBH CHT, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Dokumen	2.314.962.653,75	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	33.395.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	34.230.695,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	207.219.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	6 Dokumen	212.399.577,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	55.227.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	56.608.085,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen	47.992.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Dokumen	49.191.800,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	100.608.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Dokumen	103.123.815,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82244 Orang	44.184.800,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	82244 Orang	45.289.420,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	82244 Orang	54.999.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	82244 Orang	56.374.590,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	36.769.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	37.688.840,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	347.695.500,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	7 Dokumen	356.387.887,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	61.337.514.100,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	6 Dokumen	62.870.951.952,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	80000 Orang	54.499.500,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	80000 Orang	55.861.987,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	32.321.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Paket	33.129.640,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	78.494.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	80.456.350,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	2 Unit	102.500.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	520.632.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	533.648.620,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	3.774.823.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	3.869.194.190,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	102.049.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	21 Unit	104.601.045,00	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Laporan	35.928.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Laporan	36.826.200,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	42.399.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	43.459.180,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Unit	647.315.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	5 Unit	663.497.875,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1208 Orang	24.924.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1208 Orang	25.547.920,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71 Orang	74.955.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	71 Orang	76.829.695,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1608 Orang	35.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1608 Orang	35.875.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	3 Tatanan	25.499.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Tatanan	26.137.295,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	0,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	48.686.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	49.903.662,50	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	2 Dokumen	107.625.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	3 Dokumen	66.996.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	3 Dokumen	68.671.310,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji									
		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	44.999.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/pasien rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.”	1 Dokumen	46.124.795,00	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah fasilitas kesehatan dan unit kerja yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan*	100 Persen	53.008.000,00			Fasilitas pelayanan kesehatan, unit kerja Dinas Kesehatan, petugas pencatat/pelapor, serta pemangku kepentingan daerah dan pusat dalam pemanfaatan data kesehatan yang terintegrasi	100 Persen	54.333.200,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	53.008.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Fasilitas pelayanan kesehatan, unit kerja Dinas Kesehatan, petugas pencatat/pelapor, serta pemangku kepentingan daerah dan pusat dalam pemanfaatan data kesehatan yang terintegrasi	1 Dokumen	54.333.200,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin operasional rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan daerah yang diterbitkan.*	100 Persen	176.738.600,00			Rumah sakit kelas C dan D, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terstandar	100 Persen	181.157.065,00	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	48.573.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Rumah sakit kelas C dan D, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terstandar	2 Unit	49.788.145,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	11.124.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Rumah sakit kelas C dan D, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terstandar	2 Unit	11.402.920,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	35.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Rumah sakit kelas C dan D, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terstandar	21 Unit	35.875.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	82.040.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Rumah sakit kelas C dan D, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terstandar	1 Dokumen	84.091.000,00	Dinas Kesehatan
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			578.415.600,00					592.875.990,00	
	[Meningkatnya pemenuhan dan kompetensi sumberdaya manusia kesehatan]	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan**	**100%**	578.415.600,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	592.875.990,00	-
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar undefined*	100 % undefined undefined	115.715.700,00			SDM Kesehatan dan Fasilitas Pelayananan Kesehatan	100 % undefined undefined	118.608.592,50	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	32.972.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	SDM Kesehatan dan Fasilitas Pelayananan Kesehatan	1 Dokumen	33.796.300,00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	46.389.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	SDM Kesehatan dan Fasilitas Pelayananan Kesehatan	50 Orang	47.549.545,00	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	36.353.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	SDM Kesehatan dan Fasilitas Pelayananan Kesehatan	1 Dokumen	37.262.747,50	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi tenaga kesehatan yg telah ditingkatkan kompetensinya*	95 %	462.699.900,00			Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan pada fasilitas pelayanan serta SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat tidak langsung	95 %	474.267.397,50	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	462.699.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKB-KB	Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan pada fasilitas pelayanan serta SDM kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat tidak langsung	1 Orang	474.267.397,50	Dinas Kesehatan
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			345.572.800,00					354.212.120,00	
	[Meningkatnya Kualitas dan Distribusi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman]	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Makanan Minuman**	**100%**	345.572.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	354.212.120,00	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, dan UMOT yang diterbitkan*	100 Persen	108.597.000,00			Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), tenaga kefarmasian, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terjamin mutunya	100 Persen	111.311.925,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	108.597.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), tenaga kefarmasian, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kesehatan yang legal dan terjamin mutunya	1 Dokumen	111.311.925,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT kelas I tertentu yang diterbitkan. Persentasi PKRT yg duawasi dan bersertifikat laik*	70 Persen 70 %	31.486.800,00			Perusahaan rumah tangga produsen alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I tertentu, tenaga kerja yang terlibat dalam produksi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat produk yang aman, bermutu, dan legal	70 Persen 70 %	32.273.970,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	31.486.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perusahaan rumah tangga produsen alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I tertentu, tenaga kerja yang terlibat dalam produksi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat produk yang aman, bermutu, dan legal	1 Dokumen	32.273.970,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) dan Nomor P-IRT yang diterbitkan*	100 Persen	34.032.000,00			Pelaku industri rumah tangga pangan, pekerja IRT pangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki izin resmi	100 Persen	34.882.800,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	34.032.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Pelaku industri rumah tangga pangan, pekerja IRT pangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki izin resmi	1 Dokumen	34.882.800,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi TPM (jasa boga, rumah makan, restoran, DAM) yang diterbitkan.*	70 Persen	27.310.500,00			Pelaku usaha jasa boga/catering. Rumah makan/restoran. Depot air minum isi ulang (DAM). Tenaga pengelola makanan/minuman dan Masyarakat/konsumen	70 Persen	27.993.262,50	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	27.310.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Pelaku usaha jasa boga/catering. Rumah makan/restoran. Depot air minum isi ulang (DAM). Tenaga pengelola makanan/minuman dan Masyarakat/konsumen	1 Dokumen	27.993.262,50	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah stiker pembinaan yang diterbitkan untuk pedagang/sentra makanan jajanan*	100 Persen	24.999.800,00			Pedagang makanan jajanan, Sentra makanan jajanan, Konsumen/pembeli jajanan, Dinas Keseh atan/Pemerintah Daerah	100 Persen	25.624.795,00	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	24.999.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Pedagang makanan jajanan, Sentra makanan jajanan, Konsumen/pembeli jajanan, Dinas Keseh atan/Pemerintah Daerah	1 Dokumen	25.624.795,00	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah sarana produksi IRT pangan dan produk yang diperiksa serta rekomendasi tindak lanjut yang diterbitkan. Persentasi pengawasan post market pd produksi dan produk makanan minunan IRT*	70 % 65 %	119.146.700,00			Pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRT Pangan). Produk makanan dan minuman IRT yang beredar di masyarakat. Tenaga kerja/pekerja IRT pangan yang terlibat dalam proses produksi. Konsumen /masyarakat sebagai penerima manfaat perlindungan pangan yang aman dan bermutu	70 % 65 %	122.125.367,50	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	119.146.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRT Pangan). Produk makanan dan minuman IRT yang beredar di masyarakat. Tenaga kerja/pekerja IRT pangan yang terlibat dalam proses produksi. Konsumen /masyarakat sebagai penerima manfaat perlindungan pangan yang aman dan bermutu	1 Unit	122.125.367,50	Dinas Kesehatan
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			168.811.200,00					173.031.480,00	
	[Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**	**100%**	168.811.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	173.031.480,00	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan pelibatan lintas sektor/masyarakat dalam pembangunan kesehatan persentasi kelompok masyarakat di desa/kelurahan yg berpartisipasi dlm pembangunan kesehatan*	50 % 25 %	58.109.600,00			Masyarakat, Lintas sektor, Organisasi profesi/mitra kerja kesehatan, Lembaga swasta/CSR/LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat	50 % 25 %	59.562.340,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	19.999.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat, Lintas sektor, Organisasi profesi/mitra kerja kesehatan, Lembaga swasta/CSR/LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat	1 Dokumen	20.499.590,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman									
		Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	5 Unit	38.110.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat, Lintas sektor, Organisasi profesi/mitra kerja kesehatan, Lembaga swasta/CSR/LSM, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat	5 Unit	39.062.750,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan dan sasaran pelaksanaan hidup sehat dalam rangka promotif preventif di tingkat daerah persentasi masyarakat ditempat kerja dan tempat umum yg ber PHBS*	100 % 53 %	35.001.600,00			Masyarakat umum, Kelompok rentan, Lembaga pendidikan, Tempat kerja/instansi /perusahaan, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan	100 % 53 %	35.876.640,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	35.001.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Lembaga pendidikan, Tempat kerja/instansi /perusahaan, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan	1 Dokumen	35.876.640,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	1 Keluarga	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Masyarakat umum, Kelompok rentan, Lembaga pendidikan, Tempat kerja/instansi /perusahaan, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan	1 Keluarga	0,00	Dinas Kesehatan
	[Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan]	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**	**100%**	168.811.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	173.031.480,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah UKBM yang difasilitasi, kader kesehatan yang dilatih, dan kegiatan pembinaan yang dilakukan.*	60 %	75.700.000,00			Kader kesehatan/posyandu, Posbindu PTM, Poskesdes, Polindes, Desa/Kelurahan Siaga Aktif, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor	60 %	77.592.500,00	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	75.700.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Kader kesehatan/posyandu, Posbindu PTM, Poskesdes, Polindes, Desa/Kelurahan Siaga Aktif, Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor	1 Dokumen	77.592.500,00	Dinas Kesehatan
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.A.SULTAN DG RAJA KAB. BULUKUMBA			**169.165.854.882,00**					**173.395.001.254,05**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**169.165.854.882,00**					**173.395.001.254,05**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**169.165.854.882,00**					**173.395.001.254,05**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			120.281.543.882,00					123.288.582.479,05	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0,00			-	-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	0 Orang/bulan	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Meningkatnya Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rumah Sakit*	100 %	120.281.543.882,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	100 %	123.288.582.479,05	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	120.281.543.882,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	BLUD	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit Kerja	123.288.582.479,05	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			48.884.311.000,00					50.106.418.775,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi*	100 %	48.884.311.000,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	100 %	50.106.418.775,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	5.125.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	17.526.686.718,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Unit	17.964.853.885,95	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	20 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	20 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	26.357.624.282,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	27.016.564.889,05	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Te3rsedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00			-	-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	100 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	100 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	100 Orang	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	1 Unit	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	0,00			-	-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAK	-	1 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
	PUSKESMAS CAILE KAB. BULUKUMBA			**4.031.845.859,00**					**4.132.642.005,48**	
X	**NON URUSAN**			**4.031.845.859,00**					**4.132.642.005,48**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**4.031.845.859,00**					**4.132.642.005,48**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.031.845.859,00					4.132.642.005,48	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 PKM	4.031.845.859,00			PKM Caile	1 PKM	4.132.642.005,48	Puskesmas Caile
X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.031.845.859,00	Loka, Ela Ela, Tanah Kongkong, Bentengnge, Terang Terang, Kalumeme, Bintarore, Kasimpureng, Caile	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM Caile	1 Unit Kerja	4.132.642.005,48	Puskesmas Caile
	PUSKESMAS UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA			**3.858.006.314,00**					**3.954.456.471,85**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.858.006.314,00**					**3.954.456.471,85**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.858.006.314,00**					**3.954.456.471,85**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.858.006.314,00					3.954.456.471,85	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	3.858.006.314,00			PKM UJUNG LOE	1 PKM	3.954.456.471,85	Puskesmas Ujung Loe
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 TAHUN Unit Kerja	3.858.006.314,00	Bijawang, Salemba, Lonrong, Manjalling, Padang Loang, Seppang, Garanta, Dannuang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM UJUNG LOE	1 TAHUN Unit Kerja	3.954.456.471,85	Puskesmas Ujung Loe
	PUSKESMAS PONRE KAB. BULUKUMBA			**2.982.108.288,00**					**3.056.660.995,20**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.982.108.288,00**					**3.056.660.995,20**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.982.108.288,00**					**3.056.660.995,20**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.982.108.288,00					3.056.660.995,20	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.982.108.288,00			PKM PONRE	1 PKM	3.056.660.995,20	Puskesmas Ponre
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 TAHUN Unit Kerja	2.982.108.288,00	Barombong, Paenre Lampoe, Bonto Sunggu, Bialo, Mario Rennu, Jalanjang, Matekko	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM PONRE	1 TAHUN Unit Kerja	3.056.660.995,20	Puskesmas Ponre
	PUSKESMAS BONTO BANGUN KAB. BULUKUMBA			**4.630.098.924,00**					**4.745.851.397,10**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.630.098.924,00**					**4.745.851.397,10**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**4.630.098.924,00**					**4.745.851.397,10**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.630.098.924,00					4.745.851.397,10	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	4.630.098.924,00			PKM BONTO BANGUN	1 PKM	4.745.851.397,10	Puskesmas Bonto Bangun
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 TAHUN Unit Kerja	4.630.098.924,00	Bonto Lohe, Topanda, Baji Minasa, Karama, Bonto Bangun, Bonto Manai, Palampang, Bonto Matene, Tanah Harapan, Batu Karoppa, Bonto Haru, Swatani, Bulo Lohe, Anrang, Pangalloang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM BONTO BANGUN	1 TAHUN Unit Kerja	4.745.851.397,10	Puskesmas Bonto Bangun
	PUSKESMAS TANETE KAB. BULUKUMBA			**3.580.480.655,00**					**3.669.992.671,38**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.580.480.655,00**					**3.669.992.671,38**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.580.480.655,00**					**3.669.992.671,38**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.580.480.655,00					3.669.992.671,38	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	3.580.480.655,00			PKM Tanete	1 PKM	3.669.992.671,38	Puskesmas Tanete
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Puskesmas	3.580.480.655,00	Tanete, Jawijawi, Balla Saraja, Bonto Minasa, Barugae, Tibona, Balang Pesoang, Batulohe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM Tanete	1 Puskesmas	3.669.992.671,38	Puskesmas Tanete
	PUSKESMAS BONTO BAHARI KAB. BULUKUMBA			**3.978.296.320,00**					**4.077.753.728,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.978.296.320,00**					**4.077.753.728,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**3.978.296.320,00**					**4.077.753.728,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.978.296.320,00					4.077.753.728,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	3.978.296.320,00			Puskesmas Bontobahari	1 PKM	4.077.753.728,00	Puskesmas Bonto Bahari

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.978.296.320,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Puskesmas Bontobahari	1 Unit Kerja	4.077.753.728,00	Puskesmas Bonto Bahari
	PUSKESMAS GATTARENG KAB. BULUKUMBA			**2.522.763.149,00**					**2.585.832.227,73**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.522.763.149,00**					**2.585.832.227,73**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.522.763.149,00**					**2.585.832.227,73**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.522.763.149,00					2.585.832.227,73	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.522.763.149,00			PKM Gattareng	1 PKM	2.585.832.227,73	Puskesmas Gattareng
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.522.763.149,00	Bonto Masila, Benteng Gattareng, Bonto Raja, Padang, Benteng Melawang, Gattareng, Bonto Macinna	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM Gattareng	1 Unit Kerja	2.585.832.227,73	Puskesmas Gattareng
	PUSKESMAS BONTONYELENG KAB. BULUKUMBA			**2.862.013.925,00**					**2.933.564.273,13**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.862.013.925,00**					**2.933.564.273,13**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.862.013.925,00**					**2.933.564.273,13**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.862.013.925,00					2.933.564.273,13	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 PKM	2.862.013.925,00			PKM BONTONYELENG	1 PKM	2.933.564.273,13	Puskesmas Bontonyeleng
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.862.013.925,00	Taccorong, Bukit Tinggi, Polewali, Bukit Harapan, Bonto Nyeleng, Dampang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM BONTONYELENG	1 Unit Kerja	2.933.564.273,13	Puskesmas Bontonyeleng
	PUSKESMAS BORONG RAPPOA KAB. BULUKUMBA			**2.331.943.092,00**					**2.390.241.669,30**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.331.943.092,00**					**2.390.241.669,30**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.331.943.092,00**					**2.390.241.669,30**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.331.943.092,00					2.390.241.669,30	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.331.943.092,00			PKM BORONG RAPPOA	1 PKM	2.390.241.669,30	Puskesmas Borong Rappoa
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.331.943.092,00	Borong Rappoa, Kindang, Tamaona, Garuntungan, Oro Gading, Kahayya	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM BORONG RAPPOA	1 Unit Kerja	2.390.241.669,30	Puskesmas Borong Rappoa
	PUSKESMAS MANYAMPA KAB. BULUKUMBA			**760.420.248,00**					**779.430.754,20**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**760.420.248,00**					**779.430.754,20**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**760.420.248,00**					**779.430.754,20**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			760.420.248,00					779.430.754,20	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	760.420.248,00			Puskesmas Manyampa	1 PKM	779.430.754,20	Puskesmas Manyampa
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Puskesmas	760.420.248,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Paccar amengang Kab. Bulukumba, Ujungloe, Manyampa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Puskesmas Manyampa	1 Puskesmas	779.430.754,20	Puskesmas Manyampa
	PUSKESMAS PALANGISANG KAB. BULUKUMBA			**1.743.248.727,00**					**1.786.829.945,18**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.743.248.727,00**					**1.786.829.945,18**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.743.248.727,00**					**1.786.829.945,18**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			1.743.248.727,00					1.786.829.945,18	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 PKM	1.743.248.727,00			PUSKESMAS PALANGISANG	1 PKM	1.786.829.945,18	Puskesmas Palangisang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Puskesmas	1.743.248.727,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Tammatto Kab. Bulukumba, Ujungloe, Balong Kab. Bulukumba, Ujungloe, Balle Angin	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	PUSKESMAS PALANGISANG	1 Puskesmas	1.786.829.945,18	Puskesmas Palangisang
	PUSKESMAS BALIBO KAB. BULUKUMBA			**2.043.897.870,00**					**2.094.995.316,75**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.043.897.870,00**					**2.094.995.316,75**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.043.897.870,00**					**2.094.995.316,75**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.043.897.870,00					2.094.995.316,75	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.043.897.870,00			PKM BALIBO	1 PKM	2.094.995.316,75	Puskesmas Balibo
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Puskesmas	2.043.897.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM BALIBO	1 Puskesmas	2.094.995.316,75	Puskesmas Balibo
	PUSKESMAS SALASSAE KAB. BULUKUMBA			**2.229.179.750,00**					**2.284.909.243,75**	
X	**NON URUSAN**			**2.229.179.750,00**					**2.284.909.243,75**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**2.229.179.750,00**					**2.284.909.243,75**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.229.179.750,00					2.284.909.243,75	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.229.179.750,00			PKM SALASSAE	1 PKM	2.284.909.243,75	Puskesmas Salassae
X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.229.179.750,00	Bulo-Bulo, Salassae, Jojjolo, Bonto Mangiring	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM SALASSAE	1 Unit Kerja	2.284.909.243,75	Puskesmas Salassae
	PUSKESMAS LEMBANNA KAB. BULUKUMBA			**2.269.310.372,00**					**2.326.043.131,30**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.269.310.372,00**					**2.326.043.131,30**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.269.310.372,00**					**2.326.043.131,30**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.269.310.372,00					2.326.043.131,30	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.269.310.372,00			PKM LEMBANNA	1 PKM	2.326.043.131,30	Puskesmas Lembanna

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 TAHUN Unit Kerja	2.269.310.372,00	Bonto Rannu, Bonto Baji, Sangkala, Tambangan, Lembanna, Bonto Biraeng	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM LEMBANNA	1 TAHUN Unit Kerja	2.326.043.131,30	Puskesmas Lembanna
	PUSKESMAS HERLANG KAB. BULUKUMBA			**2.553.586.260,00**					**2.617.425.916,50**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.553.586.260,00**					**2.617.425.916,50**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.553.586.260,00**					**2.617.425.916,50**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.553.586.260,00					2.617.425.916,50	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.553.586.260,00			PKM HERLANG	1 PKM	2.617.425.916,50	Puskesmas Herlang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.553.586.260,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Pataro Kab. Bulukumba, Herlang, Gunturu Kab. Bulukumba, Herlang, Singa Kab. Bulukumba, Herlang, Bonto Kamase Kab. Bulukumba, Herlang, Tanuntung	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM HERLANG	1 Unit Kerja	2.617.425.916,50	Puskesmas Herlang
	PUSKESMAS BONTO TIRO KAB. BULUKUMBA			**2.276.793.897,00**					**2.333.713.744,43**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.276.793.897,00**					**2.333.713.744,43**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.276.793.897,00**					**2.333.713.744,43**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.276.793.897,00					2.333.713.744,43	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumalah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 PKM	2.276.793.897,00			Puskesmas Bontotiro	1 PKM	2.333.713.744,43	Puskesmas Bonto Tiro
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.276.793.897,00	Tri Tiro, Caramming, Dwi Tiro, Eka Tiro, Lamanda, Buhung Bundang, Paku Balaho	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Puskesmas Bontotiro	1 Unit Kerja	2.333.713.744,43	Puskesmas Bonto Tiro
	PUSKESMAS KARASSING KAB. BULUKUMBA			**1.568.898.940,00**					**1.608.121.413,50**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.568.898.940,00**					**1.608.121.413,50**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.568.898.940,00**					**1.608.121.413,50**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			1.568.898.940,00					1.608.121.413,50	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	1.568.898.940,00			-	1 PKM	1.608.121.413,50	Puskesmas Karassing
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.568.898.940,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Tugondeng Kab. Bulukumba, Herlang, Borong Kab. Bulukumba, Herlang, Karassing	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	-	1 Unit Kerja	1.608.121.413,50	Puskesmas Karassing
	PUSKESMAS BATANG KAB. BULUKUMBA			**2.003.349.000,00**					**2.053.432.725,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.003.349.000,00**					**2.053.432.725,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.003.349.000,00**					**2.053.432.725,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.003.349.000,00					2.053.432.725,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	2.003.349.000,00			PKM BATANG	1 PKM	2.053.432.725,00	Puskesmas Batang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 TAHUN Unit Kerja	2.003.349.000,00	Bonto Tangnga, Batang, Bonto Bulaeng, Bonto Marannu, Bonto Barua, Tamalanrea	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM BATANG	1 TAHUN Unit Kerja	2.053.432.725,00	Puskesmas Batang
	PUSKESMAS TANAH TOA KAB. BULUKUMBA			**1.757.749.372,00**					**1.801.693.106,30**	
X	**NON URUSAN**			**1.757.749.372,00**					**1.801.693.106,30**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**1.757.749.372,00**					**1.801.693.106,30**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			1.757.749.372,00					1.801.693.106,30	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 PKM	1.757.749.372,00			PKM TANAH TOA	1 PKM	1.801.693.106,30	Puskesmas Tanah Toa
X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.757.749.372,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Malleleng Kab. Bulukumba, Kajang, Tanah Toa Kab. Bulukumba, Kajang, Batu Nilamung Kab. Bulukumba, Kajang, Sapanang Kab. Bulukumba, Kajang, Pattiroang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	PKM TANAH TOA	1 Unit Kerja	1.801.693.106,30	Puskesmas Tanah Toa
	PUSKESMAS KAJANG KAB. BULUKUMBA			**2.690.449.283,00**					**2.757.710.515,08**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.690.449.283,00**					**2.757.710.515,08**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**2.690.449.283,00**					**2.757.710.515,08**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.690.449.283,00					2.757.710.515,08	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan*	1 PKM	2.690.449.283,00			Puskesmas Kajang	1 PKM	2.757.710.515,08	Puskesmas Kajang
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.690.449.283,00	Mattoanging, Pantama, Lolisang, Lembang Lohe, Tanah Jaya, Laikang, Possi Tanah, Lembang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DAK NON FISIK-BOK KB-BOK	Puskesmas Kajang	1 Unit Kerja	2.757.710.515,08	Puskesmas Kajang
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. BULUKUMBA			**90.234.614.693,45**					**92.490.480.060,79**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**90.234.614.693,45**					**92.490.480.060,79**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**90.234.614.693,45**					**92.490.480.060,79**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			11.491.601.793,94					11.778.891.838,79	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	11.491.601.793,94	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.778.891.838,79	-
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusun dokumen perencanaan dan pelaporan*	100 %	61.282.000,00			Masyarakat Bulukumba	100 %	62.814.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	55.553.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat Bulukumba	50 Dokumen	56.941.825,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	5.729.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat Bulukumba	13 Laporan	5.872.225,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan administrasi pemenuhan keuangan perangkat daerah*	100 persen	8.418.107.293,94			Kab. bulukumba	100 persen	8.628.559.976,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang	8.400.628.293,94	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	88 Orang	8.610.644.001,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	12.461.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	100 Dokumen	12.772.525,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	11.491.601.793,94	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.778.891.838,79	-
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	5.018.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kab. bulukumba	4 Dokumen	5.143.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 orang 5 orang	11.590.000,00			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan bimtek	3 orang 5 orang	11.879.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	11.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan dan bimtek	1 Orang	11.879.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum*	100 PERSEN	145.202.500,00			Kab. bulukumba	100 PERSEN	148.832.562,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	3.723.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	50 Paket	3.816.280,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.869.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	4 Paket	62.391.032,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	80.610.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	120 Laporan	82.625.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD	100 %	68.400.000,00			Kab. bulukumba	100 %	70.110.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar									
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	2 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	34.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	50 Unit	35.055.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	3 Unit	35.055.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	2.456.490.000,00			Kab. bulukumba	100 %	2.517.902.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.040.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	12 Laporan	119.966.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.339.450.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	12 Laporan	2.397.936.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD dengan kondisi baik*	99 %	330.530.000,00			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	99 %	338.793.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 Unit	27.675.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 0	176.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5 0	180.912.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	40.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5 Unit	41.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	72.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4 Unit	73.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	15.030.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7 Unit	15.405.750,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			10.242.380.200,00					10.498.439.705,00	
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] [Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio luas irigasi dengan kindisi baik*	87,8 persen	9.560.533.900,00			Masyarakat Bulukumba	87,8 persen	9.799.547.247,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir									
		Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM	137.933.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Masyarakat Bulukumba	5 KM	141.381.427,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater									
		Panjang Breakwater yang Dibangun	1 KM	9.405.636.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	1 KM	9.640.777.310,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] [Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.01.0111	Pembangunan Bendungan									
		Jumlah Bendungan yang Dibangun	1 Bendungan	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Kahayya	DAU, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Masyarakat Bulukumba	1 Bendungan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] **[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]**	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	16.964.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	12 Dokumen	17.388.510,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] **[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]**	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik*	65 %	681.846.300,00			Masyarakat Bulukumba	65 %	698.892.457,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	5 KM	180.279.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU, DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Masyarakat Bulukumba	5 KM	184.785.975,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] **[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]**	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	208.385.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU, DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	Masyarakat Bulukumba	10 KM	213.594.625,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi] **[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]**	Persentase luas Daerah Irigasi dengan kondisi baik	**100%**	10.242.380.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.498.439.705,00	-
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 KM	293.182.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat Bulukumba	85 KM	300.511.857,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			2.080.593.000,00					2.132.607.825,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum*	87,68 %	2.080.593.000,00			Masyarakat Bulukumba	87,68 %	2.132.607.825,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2,5 Liter/Detik	2.080.593.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU, DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	Masyarakat Bulukumba	2,5 Liter/Detik	2.132.607.825,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota**	**100%**	2.080.593.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.132.607.825,00	-
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	2 Liter/Detik	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			1.137.884.000,00					1.166.331.100,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	1.137.884.000,00			Kab. bulukumba	100 %	1.166.331.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan									
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	10 Unit	137.868.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Kab. bulukumba	10 Unit	141.314.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan									
		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M³/Hari	998.384.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU, DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Kab. bulukumba	2 M³/Hari	1.023.343.600,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi]	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**	**100%**	1.137.884.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.166.331.100,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja									
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	500 Rumah Tangga	1.632.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kab. bulukumba	500 Rumah Tangga	1.672.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			831.901.500,00					852.699.037,50	
	[Meningkatnya drainase dengan kondisi baik]	**Persentase Drainase dalam Kondisi baik**	**100%**	831.901.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	852.699.037,50	-
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase darinase dengan kondisi baik*	80 persen	831.901.500,00			Masyarakat Bulukumba	80 persen	852.699.037,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
		Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4000 M	331.901.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	4000 M	340.199.037,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan									
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat Bulukumba	1 Dokumen	512.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			7.413.458.000,00					7.598.794.450,00	
	[Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung]	**Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik**	**100%**	7.413.458.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	7.598.794.450,00	-
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*persentase bangunan gedung yang berkesesuaian dengan baik*	99 persen	7.413.458.000,00			Kab. bulukumba	99 persen	7.598.794.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	3 Bangunan Gedung	7.173.029.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Bijawang	PAD,DBH DAU	Kab. bulukumba	3 Bangunan Gedung	7.352.354.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kab. bulukumba	5 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	[Meningkatnya kualitas bangunan bangunan gedung]	**Persentase bangunan gedung yang berkesuaian dengan kondisi baik**	**100%**	7.413.458.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	7.598.794.450,00	-
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	400 Dokumen	240.429.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kab. bulukumba	400 Dokumen	246.439.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			56.748.340.099,51					58.167.048.602,00	
	[Meningkatnya aksesibiitas masyarakat yang aman dan nyaman]	**Persentase jalan dengan kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)**	**100%**	56.748.340.099,51	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	58.167.048.602,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	56.748.340.099,51			Masyarakat Bulukumba	-	58.167.048.602,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1169,076 KM	152.378.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Masyarakat Bulukumba	1169,076 KM	156.187.450,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan									
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	50 KM	267.410.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	50 KM	274.095.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan									
		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	3 KM	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	3 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan									
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	25 KM	5.526.057.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU, DAK	Masyarakat Bulukumba	25 KM	5.664.208.425,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan									
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	35 KM	43.839.095.099,51	Kab. Bulukumba	PAD, DAU, DBH, DAK	Masyarakat Bulukumba	35 KM	44.935.072.477,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan									
		Panjang jembatan yang dibangun	20 Meter	6.963.400.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU, DAK	Masyarakat Bulukumba	20 Meter	7.137.485.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			87.257.100,00					89.438.527,50	
	[Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat]	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi**	**100%**	87.257.100,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	89.438.527,50	-
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga kerja bersertifikat Kompetensi*	100 %	67.535.100,00			Masyarakat Bulukumba	100 %	69.223.477,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang	67.535.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat Bulukumba	50 Orang	69.223.477,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persntase tenaga kerja konstrksi bersertifikat kompetensi*	100 persen	19.722.000,00			Kab. bulukumba	100 persen	20.215.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	7 Dokumen	19.722.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	7 Dokumen	20.215.050,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			201.199.000,00					206.228.975,00	
	[Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran yang ditangani]	**Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di dalam Kabupaten / Kota**	**100%**	201.199.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	206.228.975,00	-
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*persetase dokumen penataan ruang yang dihasilkan*	100 persen	101.130.000,00			Masyarakat Bulukumba	100 persen	103.658.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	101.130.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Bulukumba	3 Dokumen	103.658.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen penatan ruang yang dihasilkan*	100 persen	65.669.000,00			Kab. bulukumba	100 persen	67.310.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	65.669.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kab. bulukumba	2 Dokumen	67.310.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen rencana tata ruang yang terpadu dan selaras anar berbagai sektor terkait*	100 persen	34.400.000,00			Kab. bulukumba	100 persen	35.260.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	12 Dokumen	34.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kab. bulukumba	12 Dokumen	35.260.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULUKUMBA			**6.979.595.593,44**					**7.154.085.483,28**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.299.595.593,44**					**6.457.085.483,28**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**6.299.595.593,44**					**6.457.085.483,28**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.368.885.593,44					4.478.107.733,28	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan)**	**100%**	4.368.885.593,44	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.478.107.733,28	-
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD*	30 Dokumen	42.882.800,00			Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	30 Dokumen	43.954.870,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen Dokumen	20.392.800,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	30 Dokumen Dokumen	20.902.620,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Dokumen	22.490.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	18 Dokumen	23.052.250,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun*	12 Bulan	3.279.725.803,44			Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,	12 Bulan	3.361.718.948,53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.255.301.903,44	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,	32 Orang/bulan	3.336.684.451,03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.001.100,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,	1 Dokumen	2.051.127,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.962.800,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,	12 Dokumen	11.236.870,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.460.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,	1 Laporan	11.746.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis*	2 Orang	40.548.000,00			Mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian	2 Orang	41.561.700,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35.169.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian	Orang	36.048.225,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	5.379.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian	2 Orang	5.513.475,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum*	12 Bulan	403.496.500,00			Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	413.583.912,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6.378.300,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Paket	6.537.757,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	106.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	7 Paket	108.650.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.876.300,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	17.298.207,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	140.456.500,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	3 Paket	143.967.912,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.875.400,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	1 Paket	14.222.285,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	119.910.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan tata kelola administrasi umum perangkat daerah	12 Laporan	122.907.750,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	1 Unit	0,00			Mewujudkan pengelolaan dan pengadaan barang milik daerah	1 Unit	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Mewujudkan pengelolaan dan pengadaan barang milik daerah	1 Unit	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum*	12 Bulan	529.152.490,00			Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	542.381.302,25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.997.490,00	Kab. Bulukumba	DAU	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	92.247.427,25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	439.155.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan jasa penunjang	12 Laporan	450.133.875,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum*	12 Bulan	73.080.000,00			Meningkatkan kualitas pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	74.907.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	50.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Meningkatkan kualitas pemeliharaan barang milik daerah	26 Unit	51.762.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22.580.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Meningkatkan kualitas pemeliharaan barang milik daerah	2 Unit	23.144.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			258.107.000,00					264.559.675,00	
	[Terpenuhinya Jumlah Rumah Layak Huni]	**Persentase Rumah Korban Bencana Skala Kabupaten Yang Tertangani**	**100%**	258.107.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	264.559.675,00	-
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi*	100 %	258.107.000,00			Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	100 %	264.559.675,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Rumah	154.107.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	15 Rumah	157.959.675,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	70.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	3 Unit Rumah	71.750.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	3 Rumah Tangga	20.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	3 Rumah Tangga	20.500.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	3 Rumah Tangga	14.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	3 Rumah Tangga	14.350.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Unit Rumah	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Warga Yang terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Unit Rumah	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	0,00			-	-	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota									
		Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	-	5 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			683.963.000,00					701.062.075,00	
	[Berkurangnya luas kawasan Kumuh]	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Yang Tertangani**	**100%**	683.963.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	701.062.075,00	-
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	1 Dokumen	0,00			Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	1 Dokumen	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	1 Dokumen	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh*	100 %	683.963.000,00			Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	100 %	701.062.075,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	337.963.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	25 Unit Rumah	346.412.075,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh									
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	1 Dokumen	102.500.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh									
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	246.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Masyarakat yang berada didalam kawasan kumuh	1 Ha	252.150.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			146.785.000,00					150.454.625,00	
	[Meningkatnya Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh]	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh Yang Tertangani**	**6.77**	146.785.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**6.77**	150.454.625,00	-
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	146.785.000,00			MBR yang tinggal dikawasan kumuh dan kelompok masyarakat dikawasan kumuh	100 %	150.454.625,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	146.785.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	MBR yang tinggal dikawasan kumuh dan kelompok masyarakat dikawasan kumuh	5 Unit Rumah	150.454.625,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			841.755.000,00					862.798.875,00	
	[Meningkatnya jumlah permukiman yang tertata]	**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**100%**	841.755.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	862.798.875,00	-
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terpenuhinya PSU Perumahan*	100 %	841.755.000,00			Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	100 %	862.798.875,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	363.989.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD,DBH DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	2 Dokumen	373.088.725,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU									
		Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	100.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	1 Kelompok	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	100.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	1 Lokasi	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	100.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	1 Laporan	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	[Meningkatnya jumlah permukiman yang tertata]	**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**100%**	841.755.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	862.798.875,00	-
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									
		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	3 Lokasi	477.366.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	3 Lokasi	489.300.150,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	2 Lokasi	100.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Penghuni Perumahan (MBR) , Masyarakat Umum dikawasan Perumahan, serta kelompok rentan yang membutuhkan akses PSU	2 Lokasi	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			100.000,00					102.500,00	
	[Meningkatnya jumlah pengembang perumahan tingkat kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi]	**Persentase Pengembangang Perumahan Dengan Tingkat Kualifikasi Kecil Yang Tersertifikasi Dan Teregistrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**100%**	100.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	102.500,00	-
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Keci*	100 %	100.000,00			Perorangan (arsitek/tenaga teknis), badan usaha jasa konsultansi kecil, koperasi/UMKM jasa konstruksi, developer kecil	100 %	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	100.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perorangan (arsitek/tenaga teknis), badan usaha jasa konsultansi kecil, koperasi/UMKM jasa konstruksi, developer kecil	1 Laporan	102.500,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**680.000.000,00**					**697.000.000,00**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**680.000.000,00**					**697.000.000,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**			70.000.000,00					71.750.000,00	
	[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Negara Kewenangan Kabupaten Yang Di Fasilitasi**	**100%**	70.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	71.750.000,00	-
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*penyelesaian sengketa tanah garapan*	4 Dokumen	70.000.000,00			-	4 Dokumen	71.750.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota									
		Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	70.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	-	1 Berita Acara	71.750.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			458.855.000,00					470.326.375,00	
	[Terfasilitasinya Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Dan Sarana Bagi Kepentingan Umum]	**Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**100%**	458.855.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	470.326.375,00	-
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya ganti rugi dan santunan tanah untuk pembengunan program pemerintah*	12 Bulan	458.855.000,00			Mewujudkan penyelesaian ganti kerugian dan pemberian santunan tanah	12 Bulan	470.326.375,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	458.855.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Mewujudkan penyelesaian ganti kerugian dan pemberian santunan tanah	2 Dokumen	470.326.375,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			40.000.000,00					41.000.000,00	
	[Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penataan Aset Dan Akses Di Daerah]	**Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Pemerataan Penguasaan Tanah Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penataan Akses**	**2500%**	40.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**2500%**	41.000.000,00	-
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Data tanah yang teridentifikasi sebagai tanah kelebihan maksimun dan tanah absentee*	1 Dokumen	40.000.000,00			Mewujudkan penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penetapan	1 Dokumen	41.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Mewujudkan penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penetapan	1 Dokumen	20.500.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	1 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Mewujudkan penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penetapan	1 Berita Acara	20.500.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**			111.145.000,00					113.923.625,00	
	[Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah]	**Persentase Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat**	**100%**	111.145.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	113.923.625,00	-
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Terpenuhinya dokumen sertifikat hask atas tanah asset pemerintah*	50 Dokumen	111.145.000,00			Mewujudkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	50 Dokumen	113.923.625,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah									
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	111.145.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Mewujudkan Penerbitan Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	113.923.625,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BULUKUMBA			**3.277.079.399,08**					**3.359.006.384,06**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.277.079.399,08**					**3.359.006.384,06**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**3.277.079.399,08**					**3.359.006.384,06**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.187.271.899,08					2.241.953.696,56	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**	**100%**	2.187.271.899,08	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.241.953.696,56	-
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	100 Persen	26.925.500,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	27.598.637,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	17.413.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4 Dokumen	17.848.837,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.512.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	9.749.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan kualitas administrasi keuangan*	100 Persen	1.802.505.154,08			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	1.847.567.782,93	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.791.814.654,08	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD,DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Orang/bulan	1.836.610.020,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.690.500,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Dokumen	10.957.762,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN dan Non ASN BPBD	4 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	100 Persen	0,00			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 Persen	3.158.000,00			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	3.236.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	3.158.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	ASN dan Non ASN BPBD	2 Dokumen	3.236.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum*	100 Persen	126.417.700,00			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	129.578.142,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Paket	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.755.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Paket	36.649.592,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.662.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	92.928.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen	37.496.200,00			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	38.433.605,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	32.252.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	ASN dan Non ASN BPBD	12 Unit	33.058.505,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.244.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	ASN dan Non ASN BPBD	1 Unit	5.375.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	109.988.945,00			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	112.738.668,63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.999.645,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Laporan	30.749.636,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.989.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Laporan	81.989.032,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 Persen	80.780.400,00			ASN dan Non ASN BPBD	100 Persen	82.799.910,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	76.720.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	ASN dan Non ASN BPBD	12 Unit	78.638.410,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	ASN dan Non ASN BPBD	12 Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4.060.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	ASN dan Non ASN BPBD	12 Unit	4.161.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			1.089.807.500,00					1.117.052.687,50	
	[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	1.089.807.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.117.052.687,50	-
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*	100 Persen	26.769.700,00			Masyarakat	100 Persen	27.438.942,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang	26.769.700,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	300 Orang	27.438.942,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan*	100 Persen	437.667.100,00			Masyarakat	100 Persen	448.608.777,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit	200.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	10 Unit	205.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	45.442.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	2 Kawasan	46.578.050,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	28.892.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	Masyarakat	100 Orang	29.614.300,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	58.803.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	Masyarakat	1 Dokumen	60.273.075,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	32.846.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD	Masyarakat	12 laporan	33.667.252,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	71.684.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	4 Kawasan	73.476.100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	100 Persen	567.107.900,00			Masyarakat	100 Persen	581.285.597,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	567.107.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD,DAU	Masyarakat	12 Dokumen	581.285.597,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	20 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	50 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana*	100 Persen	58.262.800,00			Masyarakat	100 Persen	59.719.370,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	12 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	8.109.600,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Masyarakat	1 Laporan	8.312.340,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	50 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	50.153.200,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Masyarakat	2 Kegiatan	51.407.030,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota									
		Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	2 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota									
		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BULUKUMBA			**12.456.292.537,57**					**12.767.699.851,01**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.456.292.537,57**					**12.767.699.851,01**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**12.456.292.537,57**					**12.767.699.851,01**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			6.193.294.537,57					6.348.126.901,01	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)**	**100%**	6.193.294.537,57	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	6.348.126.901,01	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Satpol PP dan Damkar*	100 Persen	73.615.860,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	75.456.256,50	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	73.615.860,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,PAJAK ROKOK, DBH DAU, DBH CHT	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	75.456.256,50	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0,00	Kab. Bulukumba	-	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	4 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	5.638.406.577,57			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	5.779.366.742,01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.617.791.577,57	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Orang/bulan	5.758.236.367,01	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.585.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Laporan	8.799.625,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12.030.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Laporan	12.330.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*	100 Persen	0,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	2 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	0,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	466 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	466 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	7 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	20 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	7 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar*	100 Persen	78.097.300,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	80.049.732,50	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.898.500,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	2 Paket	41.920.962,50	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.898.800,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Paket	8.096.270,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	4 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.300.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Laporan	30.032.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Pengadaan Barang Kantor Satpol PP dan Damkar*	100 Persen	37.129.200,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	38.057.430,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	9 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	37.129.200,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	4 Unit	38.057.430,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	4 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya jasa penunjang Pelayanan Kantor Satpol PP dan Damkar*	100 Persen	33.600.000,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	34.440.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.600.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Laporan	34.440.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	12 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Kantor Satpol PP dan Damkar*	100 Persen	332.445.600,00			Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	100 Persen	340.756.740,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	10.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	308.895.600,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	18 Unit	316.617.990,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	13.550.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	8 Unit	13.888.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	15 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			2.754.351.000,00					2.823.209.775,00	
	[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningktnya kapasitas SDM PPNS]	**Persentase Cakupan Perliundungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas Persentase Perda dan Pekada yang Ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100%**	2.754.351.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.823.209.775,00	-
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terciptanya Situasi yang aman dan tentram serta kondusif dalam wilayah Kabupaten Bulukumba*	100 Persen	2.598.130.000,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	2.663.083.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									
		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningktnya kapasitas SDM PPNS]	**Persentase Cakupan Perliundungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibuntranmas Persentase Perda dan Pekada yang Ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**100%**	2.754.351.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.823.209.775,00	-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2.598.130.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,PAJAK ROKOK, DBH DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	2.663.083.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba*	100 Persen	62.153.000,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	63.706.825,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	44.900.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DBH CHT	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	10 Laporan	46.022.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	17.253.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DBH CHT	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	17.684.325,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Terciptanya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	12 Laporan	94.068.000,00			PNS	12 Laporan	96.419.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	94.068.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	PNS	12 Laporan	96.419.700,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			3.508.647.000,00					3.596.363.175,00	
	[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran, Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	**Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**100%**	3.508.647.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.596.363.175,00	-
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terciptanya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Bulukumba*	100 Persen	3.508.647.000,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	3.596.363.175,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.975.940.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	3.050.338.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 Unit	532.707.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Unit	546.024.675,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Terpenuhinya Peralatan pencegahan kebakaran*	100 Persen	0,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	14 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	14 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran*	100 Persen	0,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	100 Persen	0,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Desa/Kelurahan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana									
		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	100 Persen	0,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	DINAS SOSIAL KAB. BULUKUMBA			**6.268.942.071,20**					**6.425.665.622,98**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.268.942.071,20**					**6.425.665.622,98**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**6.268.942.071,20**					**6.425.665.622,98**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.337.155.271,20					3.420.584.152,98	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Sosial)**	**100%**	3.337.155.271,20	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.420.584.152,98	-
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	67.952.700,00			Dinas Sosial	100 %	69.651.517,50	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34.482.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Dinas Sosial	4 Dokumen	35.344.050,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.867.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas Sosial	2 Laporan	2.939.187,50	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.603.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH	Dinas Sosial	2 Laporan	31.368.280,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	2.574.724.627,20			Dinas Sosial	100 %	2.639.092.742,88	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.559.163.827,20	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Dinas Sosial	22 Orang/bulan	2.623.142.922,88	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8.160.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Sosial	1 Dokumen	8.364.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.400.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH	Dinas Sosial	1 Laporan	7.585.820,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	0,00			Dinas Sosial	100 %	0,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Sosial	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	236.106.900,00			Dinas sosial	100 %	242.009.572,50	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas sosial	1 Paket	1.937.967,50	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	72.295.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Dinas sosial	5 Paket	74.102.580,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.694.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas sosial	1 Paket	1.736.555,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.548.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH	Dinas sosial	1 Paket	24.137.315,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.055.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas sosial	1 Paket	6.207.297,50	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.190.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas sosial	1 Laporan	18.645.057,50	Dinas Sosial
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	112.432.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH	Dinas sosial	41 Laporan	115.242.800,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	16.666.800,00			Dinas Sosial	100 %	17.083.470,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	16.666.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas Sosial	4 Unit	17.083.470,00	Dinas Sosial
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Sosial)**	**100%**	3.337.155.271,20	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.420.584.152,98	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	411.314.244,00			Dinas Sosial	100 %	421.597.100,10	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		-	-	0,00	Kab. Bulukumba	-	Dinas Sosial	-	0,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	32.714.244,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Sosial	0 Laporan	33.532.100,10	Dinas Sosial
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	378.600.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Dinas Sosial	1 Laporan	388.065.000,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi*	100 %	30.390.000,00			Dinas Sosial	100 %	31.149.750,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	23.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Sosial	11 Unit	23.575.000,00	Dinas Sosial
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Sosial)**	**100%**	3.337.155.271,20	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.420.584.152,98	-
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7.390.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas Sosial	2 Unit	7.574.750,00	Dinas Sosial
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Sosial	1 Unit	0,00	Dinas Sosial
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			746.745.000,00					765.413.625,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Keluarga pada KAT*	95 %	0,00			Komunitas Adat Terpencil	95 %	0,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT									
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Komunitas Adat Terpencil	10 Keluarga	0,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.01.0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Komunitas Adat Terpencil	10 Keluarga	0,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	95 %	0,00			LKSA	95 %	0,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	LKSA	1 Dokumen	0,00	Dinas Sosial
	[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**"Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial "**	**100%**	746.745.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	765.413.625,00	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*	95 %	746.745.000,00			PSKS	95 %	765.413.625,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Keluarga	636.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	PSKS	53 Keluarga	651.900.000,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lembaga	50.745.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	PSKS	3 Lembaga	52.013.625,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PSKS	6 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	60.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	PSKS	10 Orang	61.500.000,00	Dinas Sosial
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			403.734.200,00					413.827.555,00	
	[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100%**	403.734.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	413.827.555,00	-
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Meningkatnya Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	95 %	340.230.900,00			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	95 %	348.736.672,50	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	137.300.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	50 Orang	140.732.500,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang									
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	8.913.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	50 Orang	9.135.825,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	34.982.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	15 Orang	35.856.550,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.609.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	20 Orang	4.724.225,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.280.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	20 Orang	10.537.000,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	53.563.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	30 Orang	54.902.485,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	70.707.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	10 Orang	72.475.187,50	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	4.125.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	15 Orang	4.228.125,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.759.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	10 Orang	5.902.975,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.081.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	10 Orang	5.208.025,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan									
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.911.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	20 Orang	5.033.775,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*	95 %	63.503.300,00			PMKS	95 %	65.090.882,50	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	15 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang									
		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.300.300,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	20 Orang	61.807.807,50	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA									
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	25 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									
		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	3.203.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	PMKS	10 Orang	3.283.075,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan									
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	25 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	PMKS	3 Dokumen	0,00	Dinas Sosial
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			648.170.000,00					664.374.250,00	
	[Meningkatnya Perlindungann dan Jaminan Sosial]	**Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin** **Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi** **Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100%**	648.170.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	664.374.250,00	-
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Tertangani*	20 Orang	0,00			Anak-Anak Terlantar	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Anak-Anak Terlantar	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar									
		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Anak-Anak Terlantar	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									
		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Anak-Anak Terlantar	10 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pemberdayaan Sosial*	95 %	648.170.000,00			Fakir Miskin	95 %	664.374.250,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Fakir Miskin	20 Orang	0,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	133.170.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Fakir Miskin	13 Orang	136.499.250,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	455.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DBH CHT	Fakir Miskin	200 Orang	466.375.000,00	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	136 Usulan	60.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Fakir Miskin	136 Usulan	61.500.000,00	Dinas Sosial
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			1.069.622.500,00					1.096.363.062,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100%**	1.069.622.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.096.363.062,50	-
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Meningkatya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial*	95 %	330.422.500,00			Korban bencana Alam	95 %	338.683.062,50	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	133.369.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Korban bencana Alam	50 Orang	136.703.225,00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	62.646.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Korban bencana Alam	50 Orang	64.212.150,00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	19.955.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Korban bencana Alam	50 Orang	20.453.875,00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	36.515.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Korban bencana Alam	50 Orang	37.427.875,00	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	77.937.500,00	Kab. Bulukumba	PAD	Korban bencana Alam	50 Orang	79.885.937,50	Dinas Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Mitigasi Bencana*	95 %	739.200.000,00			Taruna Siaga Bencana	95 %	757.680.000,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	0,00	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	739.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Taruna Siaga Bencana	60 Orang	757.680.000,00	Dinas Sosial
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			63.515.100,00					65.102.977,50	
	[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**100%**	63.515.100,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	65.102.977,50	-
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan*	95 %	63.515.100,00			Makam	95 %	65.102.977,50	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong Kab. Bulukumba, Gantorang, Matekko	DAU	Makam	1 Dokumen	0,00	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	63.515.100,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong Kab. Bulukumba, Gantorang, Matekko	PAD	Makam	2 Makam	65.102.977,50	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong Kab. Bulukumba, Gantorang, Matekko	DAU	Makam	2 Laporan	0,00	Dinas Sosial
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. BULUKUMBA			**13.187.915.992,61**					**13.517.613.892,43**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.227.037.492,61**					**12.532.713.429,93**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**12.227.037.492,61**					**12.532.713.429,93**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.937.198.942,61					6.085.628.916,18	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**	**100%**	5.937.198.942,61	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	6.085.628.916,18	-
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Dokumen	57.160.000,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Dokumen	58.589.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.572.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Dokumen	32.361.710,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	11.957.200,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	4 Dokumen	12.256.130,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**	**100%**	5.937.198.942,61	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	6.085.628.916,18	-
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	6.310.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	4 Dokumen	6.468.160,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**	**100%**	5.937.198.942,61	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	6.085.628.916,18	-
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.320.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Laporan	7.503.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**	**100%**	5.937.198.942,61	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	6.085.628.916,18	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	53 Orang	5.164.428.806,61			ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	53 Orang	5.293.539.526,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	5.144.219.606,61	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	53 Orang/bulan	5.272.825.096,78	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 0	10.724.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	5 0	10.992.100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	5 0	9.485.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	5 0	9.722.330,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Laporan	117.750.000,00			-	1 Laporan	120.693.750,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									
		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	117.750.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Tanah Kongkong	PAD,DAU	-	1 Dokumen	120.693.750,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	2 Orang	17.000.000,00			ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	2 Orang	17.425.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	17.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	4 Orang	17.425.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum yang dilaksanakan&*	100 %	131.801.200,00			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	135.096.230,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.038.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	1.063.950,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.722.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DBH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	2.790.870,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.010.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	63.560.455,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.867.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Paket	13.188.880,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.163.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	54.492.075,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	18.787.800,00			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	19.257.495,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	18.787.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5 Unit	19.257.495,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah*	1 Laporan	389.431.136,00			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	399.166.914,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	153.031.136,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	156.856.914,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	236.400.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27 Laporan	242.310.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	1 Unit	40.840.000,00			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	41.861.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	29.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40 Unit	29.725.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	75 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	11.840.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32 Unit	12.136.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			0,00						
	[Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup]	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup*	1 Dokumen	0,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			428.210.550,00					438.915.813,75	
	[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara**	**20%**	428.210.550,00	Kab. Bulukumba	-	-	**20%**	438.915.813,75	-
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*jumlah lokasi yang telah melaksanakan upaya pencegahan peencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup* *Jumlah Titik Pantau Penilaian Kualitas Air*	5 Lokasi 5 Lokasi	428.210.550,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	5 Lokasi 5 Lokasi	438.915.813,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	145.023.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	148.648.575,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	5 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	5 Lokasi	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota									
		Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan									
		Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	**1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara**	**20%**	428.210.550,00	Kab. Bulukumba	-	-	**20%**	438.915.813,75	-
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	283.187.550,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	290.267.238,75	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota*	1 Laporan	0,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			2.191.904.000,00					2.246.701.600,00	
	[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	**Persentase RTH**	**100%**	2.191.904.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.246.701.600,00	-
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelolah	75 ha	2.191.904.000,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	75 ha	2.246.701.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Ha	2.191.904.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	75 Ha	2.246.701.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			77.122.000,00					79.050.050,00	
	[Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**	**100%**	77.122.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	79.050.050,00	-
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah pelaku usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3*	60 Pelaku / Usaha	77.122.000,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	60 Pelaku / Usaha	79.050.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)									
		Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	77.122.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	79.050.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3									
		Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	50 Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	50 Usaha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			0,00						
	[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	20 Badan Usaha	0,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	20 Badan Usaha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup									
		Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	30 Badan Usaha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			0,00						
	[Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH]	**Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	1 Dokumen	0,00			Masyarakat Sekitar Hukum Adat Ammatoa Kajang	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
		Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Sekitar Hukum Adat Ammatoa Kajang	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			460.925.000,00					472.448.125,00	
	[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	**Persentase penyuluhan lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya**	**100%**	460.925.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	472.448.125,00	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Lingkungan dan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup*	600 Orang 30 Lembaga	460.925.000,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	600 Orang 30 Lembaga	472.448.125,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup									
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	550 Orang	283.122.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	550 Orang	290.200.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	177.803.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	30 Lembaga	182.248.075,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			0,00						
	[Meningkatnya penyelesaian sengketa kasus tindak pidana]	**Persentase penyelesaian sengketa kasus tindak pidana**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola*	20 Pengaduan	0,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	20 Pengaduan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	20 Pengaduan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	20 Pengaduan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			3.131.677.000,00					3.209.968.925,00	
	[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**100%**	3.131.677.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.209.968.925,00	-
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasaran persampahan*	16 Unit	3.131.677.000,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	16 Unit	3.209.968.925,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	10 Kelompok	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	10 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	15 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	15 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan									
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	20.000 Ton	1.803.224.500,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	20.000 Ton	1.848.305.112,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2000 Ton	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	2000 Ton	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	[Meningkatnya tata kelola persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**100%**	3.131.677.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.209.968.925,00	-
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	20.000 Ton	1.328.452.500,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	20.000 Ton	1.361.663.812,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	16 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	SE KABUPATEN BULUKUMBA	16 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**960.878.500,00**					**984.900.462,50**	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**960.878.500,00**					**984.900.462,50**	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			960.878.500,00					984.900.462,50	
	[Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya]	**Indeks Keanekaragaman hayati**	**100%**	960.878.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	984.900.462,50	-
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota yang dilaksankan*	750 Ha	960.878.500,00			Kecamatan Bontobahari	750 Ha	984.900.462,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota									
		Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	8 Desa	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Bontobahari	8 Desa	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA									
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Bontobahari	1 Dokumen	307.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota									
		Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	3475 Ha	660.878.500,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Kecamatan Bontobahari	3475 Ha	677.400.462,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota									
		Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	3475 Ha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kecamatan Bontobahari	3475 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BULUKUMBA			**4.902.330.648,44**					**5.024.888.914,65**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.902.330.648,44**					**5.024.888.914,65**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**4.902.330.648,44**					**5.024.888.914,65**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.726.495.148,44					3.819.657.527,15	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)**	**100%**	3.726.495.148,44	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.819.657.527,15	-
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu*	100 persen	20.973.300,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	21.497.632,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12.680.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	10 Dokumen	12.997.820,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.779.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	4.898.680,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1.860.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	1.906.705,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.653.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	4 Laporan	1.694.427,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	-	Kabupaten Bulukumba	Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 persen	2.735.311.238,44			Kabupaten Bulukumba	100 persen	2.803.694.019,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.731.555.238,44	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Kabupaten Bulukumba	28 Orang/bulan	2.799.844.119,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.756.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	3.849.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	4 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Pesentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*	100 persen	0,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 persen	0,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	3 Orang	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	6 Orang	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	646.555.750,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	662.719.643,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.973.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	2.022.837,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	518.553.250,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Kabupaten Bulukumba	4 Paket	531.517.081,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.453.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	8.664.325,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	117.576.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	120.515.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah*	100 persen	12.134.200,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	12.437.555,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	12.134.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bulukumba	33 Unit	12.437.555,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bulukumba	4 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pesentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	252.660.660,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	258.977.176,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.300.660,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	71.033.176,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.360.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	187.944.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara*	100 persen	58.860.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	60.331.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5.700.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	4 Unit	5.842.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	21.650.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	7 Unit	22.191.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	31.510.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	20 Unit	32.297.750,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			656.072.800,00					672.474.620,00	
	[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk]	**Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan**	**100%**	656.072.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	672.474.620,00	-
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk*	100 %	650.386.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 %	666.645.650,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	10.326.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	10.584.150,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	150 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	150 Orang	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	640.060.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	656.061.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk									
		Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	100 persen	5.686.800,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	5.828.970,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan	5.686.800,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	5.828.970,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	100 persen	0,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			476.382.700,00					488.292.267,50	
	[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil]	Cakupan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	**100%**	476.382.700,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	488.292.267,50	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil*	100 persen	270.018.700,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	276.769.167,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	257.760.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DBH DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Layanan	264.204.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	12 Dokumen	12.258.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	12.565.167,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan									
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase kegiatan penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	100 persen	6.364.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	6.523.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	6.364.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	6.523.100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	100 persen	200.000.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	205.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil									
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	205.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			43.380.000,00					44.464.500,00	
	[Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan]	**Persentase Kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan** **Persentase OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan**	**100%**	43.380.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	44.464.500,00	-
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan*	100 persen	17.112.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	17.539.800,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 Dokumen	6.770.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	10 Dokumen	6.939.250,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	10.342.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	10.600.550,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	5 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	5 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	100 persen	0,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Pesentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan*	100 persen	26.268.000,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	26.924.700,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	19.158.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	4 Laporan	19.636.950,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	7.110.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	7.287.750,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			0,00						
	[Tersedianya Profil Kependudukan]	**Persentase tersedianya buku agregat dan Profil kependudukan yang diterbitkan per tahun**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase ketersediaan Profil Kependudukan skala kabupaten*	100 persen	0,00			Kabupaten Bulukumba	100 persen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BULUKUMBA			**7.378.651.108,53**					**7.563.117.386,24**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.378.651.108,53**					**7.563.117.386,24**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**7.378.651.108,53**					**7.563.117.386,24**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.193.735.264,53					4.298.578.646,14	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)]	**-**	**100%**	4.193.735.264,53	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.298.578.646,14	-
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja*	2 Berita Acara 6 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan	49.848.000,00			DPMD Bulukumba	2 Berita Acara 6 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan	51.094.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	35.817.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	6 Dokumen	36.712.425,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.431.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	12 Laporan	4.541.775,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	9.600.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	2 Berita Acara	9.840.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan 40 Orang/bulan	3.375.385.364,53			DPMD Bulukumba	12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan 40 Orang/bulan	3.459.769.998,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	3.359.620.964,53	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	DPMD Bulukumba	34 Orang	3.443.611.488,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12.514.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Dokumen	12.826.850,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.250.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Laporan	3.331.660,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	DPMD Bulukumba	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang tersedia* *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan	1.101.200,00			DPMD Bulukumba	2 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan	1.128.730,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)]	**-**	**100%**	4.193.735.264,53	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.298.578.646,14	-
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.101.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	2 Laporan	1.128.730,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	40 Orang 2 Orang 40 Paket	0,00			DPMD Bulukumba	40 Orang 2 Orang 40 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	DPMD Bulukumba	0 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Laporan 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	152.527.400,00			DPMD Bulukumba	12 Laporan 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	156.340.585,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Paket	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.768.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Paket	1.812.302,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.755.300,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Paket	49.974.182,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Dokumen	2.050.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)]	**-**	**100%**	4.193.735.264,53	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.298.578.646,14	-
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	100.004.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	DPMD Bulukumba	31 Laporan	102.504.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit 0 Unit 11 Unit 12 Unit	269.222.100,00			DPMD Bulukumba	3 Unit 0 Unit 11 Unit 12 Unit	275.952.652,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Unit	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	67.418.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	3 Unit	69.104.065,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	66.458.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	11 Unit	68.119.450,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	135.345.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	12 Unit	138.729.137,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	303.521.200,00			DPMD Bulukumba	12 Laporan	311.109.230,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.521.200,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	DPMD Bulukumba	12 Laporan	311.109.230,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah mebel yang Dipelihara* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	9 Unit 0 Unit 4 Unit 10 Unit	42.130.000,00			DPMD Bulukumba	9 Unit 0 Unit 4 Unit 10 Unit	43.183.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	0 Unit	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	22.800.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	6 Unit	23.370.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	7.200.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	1 Unit	7.380.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	12.130.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DPMD Bulukumba	5 Unit	12.433.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			48.611.000,00					49.826.275,00	
	[Persentase fasilitasi penataan desa]	**-**	**100%**	48.611.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	49.826.275,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya* *Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat* *Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang Terfasilitasi*	109 Desa 30 Desa 1 Laporan 5 Unit	48.611.000,00			Desa	109 Desa 30 Desa 1 Laporan 5 Unit	49.826.275,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa									
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	0 Desa	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Desa	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa									
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	109 Desa	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	109 Desa	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	48.611.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	5 Unit	49.826.275,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			10.000.000,00					10.250.000,00	
	[Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa]	**-**	**100%**	10.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.250.000,00	-
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota*	2 Dokumen 22 Dokumen 21 Dokumen	10.000.000,00			Desa	2 Dokumen 22 Dokumen 21 Dokumen	10.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Desa	1 Dokumen	10.250.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			2.248.905.544,00					2.305.128.182,60	
	[Presentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan]	**-**	**100%**	2.248.905.544,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.305.128.182,60	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil*	0 Orang 327 Orang 109 Desa 109 Dokumen 2 Dokumen 109 Dokumen 12 Dokumen 109 Dokumen 10 Dokumen 109 Dokumen 109 Dokumen 1 Laporan 109 Laporan 109 Laporan 5 Laporan 65 Dokumen	2.248.905.544,00			Desa	0 Orang 327 Orang 109 Desa 109 Dokumen 2 Dokumen 109 Dokumen 12 Dokumen 109 Dokumen 10 Dokumen 109 Dokumen 109 Dokumen 1 Laporan 109 Laporan 109 Laporan 5 Laporan 65 Dokumen	2.305.128.182,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	3 Dokumen	102.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Dokumen	1.955.209.544,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	12 Dokumen	2.004.089.782,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	109 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	109 Dokumen	123.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	1 Laporan	5.125.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	109 Dokumen	38.696.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	109 Dokumen	39.663.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	1 Dokumen	30.750.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Orang	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	0 Desa	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Desa	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	109 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	109 Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Desa	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			877.399.300,00					899.334.282,50	
	[Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	**-**	**100%**	877.399.300,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	899.334.282,50	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing* *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat*	3 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 109 Dokumen 109 Keluarga 30 Laporan 545 Lembaga	877.399.300,00			Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen 1 Dokumen 109 Dokumen 109 Keluarga 30 Laporan 545 Lembaga	899.334.282,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	24.399.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	25.009.795,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	436 Lembaga	299.999.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	436 Lembaga	307.499.692,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	22 Laporan	80.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	22 Laporan	82.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0 Dokumen	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	472.999.800,00	Kab. Bulukumba	DBH	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	484.824.795,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	0 Keluarga	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BULUKUMBA			**14.406.017.867,22**					**14.766.168.313,90**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.406.017.867,22**					**14.766.168.313,90**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**876.445.800,00**					**898.356.945,00**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			256.050.000,00					262.451.250,00	
	[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD**	**5.85**	256.050.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**5.85**	262.451.250,00	-
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Persen	60.000.000,00			OPD	100 Persen	61.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 laporan 0	30.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 laporan 0	30.750.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota									
		jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Laporan	30.750.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota*	100 Persen	180.000.000,00			OPD	100 Persen	184.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota									
		jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	1 Lembaga	180.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD	1 Lembaga	184.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Persen	16.050.000,00			Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	100 Persen	16.451.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota									
		jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	16.050.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 Lembaga	16.451.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			94.176.000,00					96.530.400,00	
	[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**60%**	94.176.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60%**	96.530.400,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Persen	65.926.000,00			Perempuan Korban Kekerasan	100 Persen	67.574.150,00	DPPKB, PPPA
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	65.926.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Perempuan Korban Kekerasan	10 orang	67.574.150,00	DPPKB, PPPA
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*	100 Persen	28.250.000,00			perempuan	100 Persen	28.956.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	28.250.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	perempuan	1 Dokumen	28.956.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			100.000.000,00					102.500.000,00	
	[Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak]	**Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau penyusunan kebijakan (%)**	**100%**	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	102.500.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen	100.000.000,00			OPD	100 Persen	102.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak									
		Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	5 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	OPD	5 Lembaga	102.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			99.999.800,00					102.499.795,00	
	[&Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif&]	**Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (Angka)**	**100%**	99.999.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	102.499.795,00	-
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha*	100 Persen	99.999.800,00			Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	100 Persen	102.499.795,00	DPPKB, PPPA
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
		jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	99.999.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	5 Lembaga	102.499.795,00	DPPKB, PPPA
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			326.220.000,00					334.375.500,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[&Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak&]	**Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang menapatkan layanan komprehensif (%)**	**100%**	326.220.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	334.375.500,00	-
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak*	100 Persen	73.250.000,00			Anak	100 Persen	75.081.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota									
		jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	73.250.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGA N PEREMPUAN DAN ANAK	Anak	2 Dokumen	75.081.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi*	100 Persen	200.000.000,00			Anak	100 Persen	205.000.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNG AN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Anak	10 Orang	102.500.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Anak	10 Orang	102.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*	100 Persen	52.970.000,00			Anak	100 Persen	54.294.250,00	DPPKB, PPPA
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai									
		jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	10 Orang	52.970.000,00	Kab. Bulukumba	DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Anak	10 Orang	54.294.250,00	DPPKB, PPPA
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**13.529.572.067,22**					**13.867.811.368,90**	
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.591.677.567,22					5.731.469.506,40	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)**	**100%**	5.591.677.567,22	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.731.469.506,40	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentasae Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	111.153.200,00			DP2KBP3A	100 Persen	113.932.030,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.153.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	4 Dokumen	52.432.030,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	1 Laporan	10.250.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	1 Laporan	51.250.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	4.834.340.489,22			DP2KBP3A	100 Persen	4.955.199.001,45	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	4.814.025.489,22	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	12 Orang/bulan	4.934.376.126,45	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	13.315.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	1 Dokumen	13.647.875,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	1 Laporan	7.175.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 Persen	12.300.000,00			DP2KBP3A	100 Persen	12.607.500,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.300.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	2 Dokumen	12.607.500,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	175.803.900,00			DP2KBP3A	100 Persen	180.198.997,50	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	49.650.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	7 Paket	50.891.250,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	49.999.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	20 Paket	51.249.897,50	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.468.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	3 Paket	6.629.700,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	69.686.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	4 Laporan	71.428.150,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	361.399.978,00			DP2KBP3A	100 Persen	370.434.977,45	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	69.999.978,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	4 Laporan	71.749.977,45	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	291.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	4 Laporan	298.685.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	96.680.000,00			DP2KBP3A	100 Persen	99.097.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	1 Unit	12.300.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	44.900.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	19 Unit	46.022.500,00	DPPKB, PPPA
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	39.780.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	DP2KBP3A	25 Unit	40.774.500,00	DPPKB, PPPA
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			1.227.599.500,00					1.258.289.487,50	
	[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%) Angka kelahiran / Total Fertility Rate (TFR) (%)**	**100%**	1.227.599.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.258.289.487,50	-
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	100 Persen	250.000.000,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	256.250.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Penduduk Bulukumba	10 Satuan Pendidikan	256.250.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen	977.599.500,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	1.002.039.487,50	DPPKB, PPPA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	697.600.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	1 Laporan	715.040.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	179.999.500,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	1 Dokumen	184.499.487,50	DPPKB, PPPA
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana									
		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Penduduk Bulukumba	1 Laporan	102.500.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			3.975.065.000,00					4.074.441.625,00	
	[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) (%)** **Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi Unmeet Need (%)**	**100%**	3.975.065.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.074.441.625,00	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*	100 Persen	1.004.999.800,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	1.030.124.795,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	480.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	10 Laporan	492.000.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	2 Laporan	205.000.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	124.999.800,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	2 Dokumen	128.124.795,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	3 Organisasi	205.000.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	100 Persen	1.088.000.000,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	1.115.200.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 Orang	1.088.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	100 Orang	1.115.200.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah*	100 Persen	876.465.400,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	898.377.035,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	26.100.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	12 Laporan	26.752.500,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 Orang	823.815.400,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	100 Orang	844.410.785,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	26.550.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	1 Laporan	27.213.750,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	100 Persen	1.005.599.800,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	1.030.739.795,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas									
		Jumlah DASHAT di Kampung KB	10 Unit	747.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	10 Unit	766.699.795,00	DPPKB, PPPA
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	257.600.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	10 Kampung	264.040.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			2.735.230.000,00					2.803.610.750,00	
	[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	**Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)**	**100%**	2.735.230.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.803.610.750,00	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	100 Persen	411.030.000,00			Masyarakat	100 Persen	421.305.750,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									
		Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	10 Laporan / Dokumen	38.400.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Masyarakat	10 Laporan / Dokumen	39.360.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Laporan	153.750.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Masyarakat	10 Unit	133.250.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 Orang	92.630.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Masyarakat	100 Orang	94.945.750,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	100 Persen	2.324.200.000,00			Penduduk Bulukumba	100 Persen	2.382.305.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1.011.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	1 laporan	1.036.275.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)									
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1.213.200.000,00	Kab. Bulukumba	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Penduduk Bulukumba	1 laporan	1.243.530.000,00	DPPKB, PPPA
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga									
		Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Penduduk Bulukumba	1 Laporan	102.500.000,00	DPPKB, PPPA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BULUKUMBA			**22.504.995.149,16**					**23.067.620.027,89**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**22.504.995.149,16**					**23.067.620.027,89**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**22.504.995.149,16**					**23.067.620.027,89**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			7.817.197.749,16					8.012.627.692,89	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)]	**Persentase realisasi kinerja program dan kegiatan OPD**	**100%**	7.817.197.749,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.012.627.692,89	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan*	100 Persen	4.194.756.261,16			Dinas Perhubungan	100 Persen	4.299.625.167,69	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.060.593.861,16	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Dinas Perhubungan	40 Orang/bulan	4.162.108.707,69	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	134.162.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	137.516.460,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pengadministrasian Umum Dinas Perhubungan*	100 Persen	156.286.100,00			-	100 Persen	160.193.252,50	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.720.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	4 Paket	62.238.205,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	27.500.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	12 Paket	28.188.217,50	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	68.065.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	34 Laporan	69.766.830,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Pengadaan Barang Dinas Perhubungan*	100 Persen	1.800.350.000,00			-	100 Persen	1.845.358.750,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.749.050.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	1 Unit	1.792.776.250,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	51.300.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	-	5 Unit	52.582.500,00	Dinas Perhubungan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)]	**Persentase realisasi kinerja program dan kegiatan OPD**	**100%**	7.817.197.749,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.012.627.692,89	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Dinas Perhubungan*	100 Persen	1.573.974.288,00			Dinas Perhubungan	100 Persen	1.613.323.645,20	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.782.788,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	12 Laporan	27.452.357,70	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12.140.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PENDAPATAN BAGI HASIL	Dinas Perhubungan	3 Laporan	12.443.500,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.535.051.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	12 Laporan	1.573.427.787,50	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dinas Perhubungan*	100 Persen	91.831.100,00			Dinas Perhubungan	100 Persen	94.126.877,50	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	40.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	17 Unit	41.000.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	39.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	16 Unit	39.975.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.831.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	2 Unit	13.151.877,50	Dinas Perhubungan
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			14.687.797.400,00					15.054.992.335,00	
	[Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan]	**Konektivitas Darat (%)**	**100%**	14.687.797.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	15.054.992.335,00	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya perlengkapan jalan di kabupaten/kota*	16 Unit	14.613.425.000,00			Bulukumba	16 Unit	14.978.760.625,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	120 Unit	93.828.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Bulukumba	120 Unit	96.173.700,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16 Unit	14.519.597.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Bulukumba	16 Unit	14.882.586.925,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Meningkatnya Pelayanan dan Keberfungsian Terminal Tipe C*	100 Persen	7.320.000,00			Dinas Perhubungan	100 Persen	7.503.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C									
		Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	91 Orang	7.320.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Perhubungan	91 Orang	7.503.000,00	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Kear*	100 Persen	10.558.000,00			Bulukumba	100 Persen	10.821.950,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	10.558.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Bulukumba	7 Unit	10.821.950,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pengawasan dan Penertiban Angkutan Umum dan Pengaturan Lalu Lintas Jalan*	100 Persen	56.494.400,00			Bulukumba	100 Persen	57.906.760,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	14.800.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Bulukumba	12 Laporan	15.170.000,00	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	41.694.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Bulukumba	7 Unit	42.736.760,00	Dinas Perhubungan
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BULUKUMBA			**5.857.285.123,47**					**6.003.717.251,56**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.857.285.123,47**					**6.003.717.251,56**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**5.481.051.123,47**					**5.618.077.401,56**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.529.052.823,47					3.617.279.144,06	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian)**	**100%**	3.529.052.823,47	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.617.279.144,06	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan*	100 Persen	2.895.773.713,47			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 Persen	2.968.168.056,31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	2.656.067.613,47	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	32 Orang/bulan	2.722.469.303,81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	239.706.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Dokumen	245.698.752,50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	164.870.900,00			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	168.992.672,50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	1.046.700,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Unit	1.072.867,50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.086.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1 Paket	44.163.150,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	47.220.200,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3 Paket	48.400.705,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	75.355.950,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2 Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaaan BMD*	100 Persen	400,00			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 Persen	410,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1 Unit	410,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah*	100 Persen	432.907.810,00			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 Persen	443.730.505,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.067.810,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	75.919.505,25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.840.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2 Laporan	2.911.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	356.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	12 Laporan	364.900.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpeliharanya BMD*	100 Persen	35.500.000,00			Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100 Persen	36.387.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1 Unit	15.375.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2 Unit	15.375.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	9 Unit	5.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	9 Unit	5.637.500,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	1 Unit	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			429.998.500,00					440.748.462,50	
	[Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**100%**	429.998.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	440.748.462,50	-
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jenis Layanan Informasi Publik*	2 Layanan	429.998.500,00			Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Layanan	440.748.462,50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	200.520.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	205.533.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	10.043.500,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	4 Komunitas	10.294.587,50	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	187.200.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	12 Laporan	191.880.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik									
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan	14.425.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	4 Permohonan	14.785.625,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomend asi	0,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	4 Rekomend asi	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	17.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 Persentase	18.255.250,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	0,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Media	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten									
		Jumlah Konten Informasi Publik	2 Konten	0,00	Kab. Bulukumba	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU	Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Konten	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			1.521.999.800,00					1.560.049.795,00	
	[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Indeks SPBE**	**2.73**	1.521.999.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**2.73**	1.560.049.795,00	-
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah subdomain resmi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan subdomain domain utama*	30 Domain	25.095.000,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	30 Domain	25.722.375,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa									
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	109 Dokumen	25.095.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	109 Dokumen	25.722.375,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Aplikasi Yang Memanfaatkan Sub Domain*	1 Aplikasi	1.496.904.800,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Aplikasi	1.534.327.420,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	28 Perangkat Daerah	6.480.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	28 Perangkat Daerah	6.642.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi									
		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Layanan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE									
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	1 Aplikasi	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Aplikasi	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan									
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	30 Aplikasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	30 Aplikasi	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet									
		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	28 Perangkat Daerah	1.490.424.800,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	28 Perangkat Daerah	1.527.685.420,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**273.249.200,00**					**280.080.430,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			273.249.200,00					280.080.430,00	
	[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**	**100%**	273.249.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	280.080.430,00	-
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Tersedia*	2 Data	273.249.200,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	2 Data	280.080.430,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia									
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80 %	208.849.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	80 %	214.070.635,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	64.399.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	100 %	66.009.795,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**102.984.800,00**					**105.559.420,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			102.984.800,00					105.559.420,00	
	[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	102.984.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	105.559.420,00	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota*	6 Area	102.984.800,00			Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	6 Area	105.559.420,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	38 Perangkat Daerah	47.153.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	38 Perangkat Daerah	48.332.645,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	55.831.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	57.226.775,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN TENAGA KERJA KAB. BULUKUMBA			**6.022.470.854,68**					**6.173.032.626,05**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.022.470.854,68**					**6.173.032.626,05**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**904.999.600,00**					**927.624.590,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			0,00						
	[Terkelolanya Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)]	**Pemenuhan Dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) Kab. BLK umlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja (RTK) Kab. BLK*	5 Dokumen 6 Dokumen	0,00			Dokumen Rencana Tenaga Kerja	5 Dokumen 6 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Perusahaan	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			400.000.000,00					410.000.000,00	
	[Tersedianya Sarana Prasarana dan Meningkatnya SDM Pencari Kerja]	**Persentase Pencari Kerja Yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komptensi Tersedianya Sarana Prasarana Tenaga Kerja**	**100%**	400.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	410.000.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Peserta Pelatihan Bersertifikasi yang telah dilatih dan jumlah ketersediaan sarpras Balai Latihan Kerja*	120 Orang	400.000.000,00			Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan sarana Prasarana Pelatihan Kerja, Vokasi dan Produktivitas	120 Orang	410.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	400.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan sarana Prasarana Pelatihan Kerja, Vokasi dan Produktivitas	32 Orang	410.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan sarana Prasarana Pelatihan Kerja, Vokasi dan Produktivitas	2 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.07.03.2.01.0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas									
		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan sarana Prasarana Pelatihan Kerja, Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Peserta Pelatihan Bersertifikasi yang telah dilatih dan jumlah ketersediaan sarpras Balai Latihan Kerja*	1 Lembaga	0,00			Pencari Kerja Yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komptensi dan Tersedianya Sarana Prasarana Tenaga Kerja	1 Lembaga	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pencari Kerja Yang mengikuti Pelatihan Berbasis Komptensi dan Tersedianya Sarana Prasarana Tenaga Kerja	2 Lembaga	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			45.869.600,00					47.016.340,00	
	[Meningkatnya Pelayanan dan PerlindunganTenaga Kerja CPMI/PMI]	**Persentase Penempatan tenaga Kerja**	**100%**	45.869.600,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	47.016.340,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal*	8 Orang	0,00			Kegiatan Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal	8 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal	2 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal*	11 Orang	0,00			Kegiatan Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal	11 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pelayanan antar kerja, Job Fair/Bursa Kerja dan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal dan informal	100 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan dan jumlah PMI yang dipulangkan*	60 Orang	45.869.600,00			Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan dan jumlah PMI yang dipulangkan	60 Orang	47.016.340,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	45.869.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan dan jumlah PMI yang dipulangkan	20 Orang	47.016.340,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			459.130.000,00					470.608.250,00	
	[Menurunnya jumlah perselisihan Hubungan Industrial, Meningkatnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan]	**Data Pekerja Yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial**	100 % 1400	459.130.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	100 % 1400	470.608.250,00	-
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama, Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online dan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*	5 Perusahaan	159.130.000,00			Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial dan Data Pekerja Yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	5 Perusahaan	163.108.250,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	159.130.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DBH	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial dan Data Pekerja Yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	1 Laporan	163.108.250,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* *Jumlah Perselisihan yang Dicegah Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	5 Laporan/Dokumen 5 Laporan/Dokumen 1400 Orang	300.000.000,00			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan/Dokumen 5 Laporan/Dokumen 1400 Orang	307.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Kasus	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Kasus	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Perkara	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1400 Orang	300.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1400 Orang	307.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**5.117.471.254,68**					**5.245.408.036,05**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.017.471.254,68					5.142.908.036,05	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja)**	**100%**	5.017.471.254,68	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.142.908.036,05	-
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	38 Laporan/dokumen	95.692.600,00			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan/dokumen	98.084.915,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	63.999.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	65.599.795,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.939.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.087.475,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.999.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.149.795,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.620.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.885.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.134.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	9.362.350,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	146 Laporan	4.284.761.168,01			Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	146 Laporan	4.391.880.197,21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.277.037.068,01	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	40 Orang/bulan	4.383.962.994,71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.360.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.394.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.279.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.310.975,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	16 Laporan	5.085.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Laporan	5.212.227,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksannya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	40 Orang	0,00			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	36 Laporan/ Dokumen	86.002.100,00			Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan/ Dokumen	88.152.152,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.644.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	3.735.407,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.481.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	45.593.845,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 0	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 0	37.876.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Kegiatan Tersediany a/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 0	38.822.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	18 Laporan	43.032.700,00			Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	18 Laporan	44.108.517,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 0	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 0	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	0 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	43.032.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	5 Unit	44.108.517,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 0	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 Laporan	443.114.187,00			Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	6 Laporan	454.192.041,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.734.187,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	12 Laporan	67.377.541,68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	377.380.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	12 Laporan	386.814.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	30 Unit	64.868.499,67			Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	30 Unit	66.490.212,16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	37.300.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	10 Unit	38.232.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	8.940.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	20 Unit	9.163.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.628.499,67	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1 Unit	19.094.212,16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	1 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			0,00						
	[Meningkatnya Kualitas Pelayanan Koperasi]	**Persentase Jumlah koperasi yang terlayani ijin usaha simpan pinjam**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan*	1 Koperasi	0,00			Kegiatan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	1 Koperasi	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	267 0	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	267 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			5.408.000,00					5.543.200,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	50 Koperasi	5.408.000,00			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pada Koperasi	50 Koperasi	5.543.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pada Koperasi	100 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
	[Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi]	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**100%**	5.408.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.543.200,00	-
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	136 Unit Usaha	5.408.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pada Koperasi	136 Unit Usaha	5.543.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			7.282.000,00					7.464.050,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah koperasi aktif yang dinilai*	20 KOPERASI	7.282.000,00			Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	20 KOPERASI	7.464.050,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
		-	-	0,00	Kab. Bulukumba	-	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan									
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	7.282.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	20 Unit Usaha	7.464.050,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			37.310.000,00					38.242.750,00	
	[Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi]	**Persentase Koperasi yang telah difasilitasi pelatihan**	**100%**	37.310.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	38.242.750,00	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Pengelola Koperasi yang telah dilatih Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	20 Orang 20 Orang	37.310.000,00			Kegiatan Koperasi yang telah difasilitasi pelatihan	20 Orang 20 Orang	38.242.750,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	136 Orang	37.310.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Kegiatan Koperasi yang telah difasilitasi pelatihan	136 Orang	38.242.750,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			0,00						
	[Meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	160 Koperasi	0,00			-	160 Koperasi	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	-	100 Keluarga	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
		Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	5 Kelompok Masyarakat	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	75 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	-	75 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			30.000.000,00					30.750.000,00	
	[Meningkatnya kapasitas UMKM]	**Persentase pertumbuhan UMKM**	**100%**	30.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	30.750.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Meningkatnya jumlah UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak*	300 Perusahaan	30.000.000,00			UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	300 Perusahaan	30.750.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	40 Unit Usaha	10.250.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	20 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	20 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	30 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	30 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	10 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil									
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	20 Unit Usaha	20.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik									
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	10 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	500 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	500 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	UMKM yang terfaliitasi baik terkait pendataan, kemitraan administrasi perizinana dan kolaborasi dengan berbagai pihak	20 Orang	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			20.000.000,00					20.500.000,00	
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	**Persentase UMKM yang berafiliasi dengan inkubator bisnis**	**100%**	20.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	20.500.000,00	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah usaha mikro menjadi wirausaha*	90 Perusahaan	20.000.000,00			Pelaku usaha mikro menjadi wirausaha	90 Perusahaan	20.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro									
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Pelaku usaha mikro menjadi wirausaha	20 Unit Usaha	20.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan									
		Jumlah yang Difasilitasi	0 0	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pelaku usaha mikro menjadi wirausaha	0 0	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
2.17.08.2.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	1 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Pelaku usaha mikro menjadi wirausaha	1 Lembaga	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BULUKUMBA			**3.639.920.586,00**					**3.730.918.600,65**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.539.920.586,00**					**3.628.418.600,65**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**3.539.920.586,00**					**3.628.418.600,65**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.054.643.786,00					3.131.009.880,65	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**	**100%**	3.054.643.786,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.131.009.880,65	-
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*	2 Dokumen 20 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	23.316.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2 Dokumen 20 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	23.898.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.140.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	5 Dokumen	11.419.115,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.836.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2 Dokumen	5.982.515,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.782.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2 Dokumen	4.901.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.556.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Laporan	1.595.310,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1 Laporan 12 Bulan	2.232.780.378,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Laporan 12 Bulan	2.288.599.887,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/bulan	2.228.437.978,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Bulan Orang/bulan	2.284.148.927,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	4.342.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	3 Laporan	4.450.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan*	1 Orang	0,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Orang	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Orang	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**	**100%**	3.054.643.786,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.131.009.880,65	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	113.583.200,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	116.422.780,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.061.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket	10.312.730,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.898.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket	44.995.962,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.017.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket	8.217.425,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.076.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Laporan	8.278.412,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.530.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Laporan	44.618.250,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Paket 5 Unit 1 Paket	175.067.400,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket 5 Unit 1 Paket	179.444.085,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	175.067.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2 Unit	179.444.085,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 paket Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan 12 Laporan	453.452.508,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Laporan 12 Laporan	464.788.820,70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	288.943.008,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Laporan	296.166.583,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	164.509.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	12 Laporan	168.622.237,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	1 Paket 8 Unit 1 Paket	56.444.300,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Paket 8 Unit 1 Paket	57.855.407,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	41.894.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	9 Unit	42.941.657,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	14.550.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	10 Unit	14.913.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			350.000.000,00					358.750.000,00	
	[Meningkatnya Kemudahan Berinvertasi]	**Realisasi Total Terhadap Terget Invertasi**	**100%**	350.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	358.750.000,00	-
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	1 Dokumen	0,00			Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Peraturan	350.000.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Peraturan	358.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD,DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Dokumen	205.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)									
		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	150.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	PAD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Daerah	153.750.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			0,00						
	[Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvertasi	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* *Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota*	1 Dokumen 1 Dokumen	0,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Dokumen 1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			115.276.800,00					118.158.720,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	**Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan**	**100%**	115.276.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	118.158.720,00	-
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	1 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha	115.276.800,00			Masyarakat	1 Kegiatan Usaha 12 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha	118.158.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Kegiatan Pelaku Usaha	112.918.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Masyarakat	12 Kegiatan Pelaku Usaha	115.741.770,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	2.358.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH DAU	Masyarakat	1 Kegiatan Usaha	2.416.950,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			20.000.000,00					20.500.000,00	
	[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam membuka usaha**	**100%**	20.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	20.500.000,00	-
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya*	100 Pelaku Usaha 5 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha	20.000.000,00			Masyarakat	100 Pelaku Usaha 5 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha	20.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat	5 Kegiatan Usaha.	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	100 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat	100 Kegiatan Usaha	20.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			0,00						
	[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	**Persentase Permanfaatan Data dan Informasi Penanaman modal**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	1 Dokumen	0,00			Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	**NON URUSAN**			**100.000.000,00**					**102.500.000,00**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**100.000.000,00**					**102.500.000,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			100.000.000,00					102.500.000,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	1 Paket 8 Unit 1 Paket	100.000.000,00			-	1 Paket 8 Unit 1 Paket	102.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket Unit	100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Caile	DBH	-	1 paket Unit	102.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BULUKUMBA			**3.176.021.667,74**					**3.255.422.209,43**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.176.021.667,74**					**3.255.422.209,43**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**600.000.000,00**					**615.000.000,00**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			550.000.000,00					563.750.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan]	**Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase layanan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk perpustakaan kab/kota Pesentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk**	**100%**	550.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	563.750.000,00	-
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota*	100 Persen	380.000.000,00			Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan, Akademisi, pegiat Literasi, Pelajar, mahasiswa, masyarakat, Perpustakaan dan Koleksi Buku Kab. Bulukumba	100 Persen	389.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustaka an	284.519.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan, Akademisi, pegiat Literasi, Pelajar, mahasiswa, masyarakat, Perpustakaan dan Koleksi Buku Kab. Bulukumba	1 Perpustaka an	291.632.487,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	20.480.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan, Akademisi, pegiat Literasi, Pelajar, mahasiswa, masyarakat, Perpustakaan dan Koleksi Buku Kab. Bulukumba	30 Orang	20.992.512,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustaka an	75.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pustakawan/ Pengelola Perpustakaan, Akademisi, pegiat Literasi, Pelajar, mahasiswa, masyarakat, Perpustakaan dan Koleksi Buku Kab. Bulukumba	1 Perpustaka an	76.875.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab/kota*	100 Persen	170.000.000,00			Kendaraan Perpustakaan Keliling, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Daerah dan Orang Tua Siswa Kab. Bulukumba	100 Persen	174.250.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	15 Perpustakaan	90.097.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kendaraan Perpustakaan Keliling, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Daerah dan Orang Tua Siswa Kab. Bulukumba	15 Perpustakaan	92.349.425,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	27 Lokus	79.903.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kendaraan Perpustakaan Keliling, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Daerah dan Orang Tua Siswa Kab. Bulukumba	27 Lokus	81.900.575,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			50.000.000,00					51.250.000,00	
	[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)** **Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi/terdaftar yang ada diwilayahnya** **Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialihbahasa**	**100%**	50.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	51.250.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya dan Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa*	1 Orang	50.000.000,00			: Masyarakat umum dan Perpustakaan Daerah Kab. Bulukumba	1 Orang	51.250.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno									
		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang	50.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	: Masyarakat umum dan Perpustakaan Daerah Kab. Bulukumba	1 Orang	51.250.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**2.576.021.667,74**					**2.640.422.209,43**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.396.021.667,74					2.455.922.209,43	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah*	100 Persen	48.750.800,00			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	100 Persen	49.969.570,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.970.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	6 Dokumen	25.594.250,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.528.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	2 Dokumen	9.766.200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	9.528.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	2 Dokumen	9.766.200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4.724.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	16 Laporan	4.842.920,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	2.003.380.271,74			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	100 Persen	2.053.464.778,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.991.732.271,74	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	PAD,DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	20 Orang/bulan	2.041.525.578,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.648.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	12 Dokumen	9.889.200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	1 Laporan	2.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen	71.438.900,00			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	100 Persen	73.224.872,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.150.500,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	4 Paket	1.179.262,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	3.333.300,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	9 Paket	3.416.632,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.514.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	4 Paket	31.276.952,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	1 Paket	1.230.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	35.241.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	14 Laporan	36.122.025,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	5 Unit	20.442.000,00			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	5 Unit	20.953.050,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.622.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	1 Unit	2.687.550,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	17.820.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	4 Unit	18.265.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	181 Laporan	236.409.696,00			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	181 Laporan	242.319.938,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.489.696,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	12 Laporan	46.626.938,40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan	190.920.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	168 Laporan	195.693.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	8 Unit	15.600.000,00			Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	8 Unit	15.990.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	1 Unit	9.225.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6.600.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah	7 Unit	6.765.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			180.000.000,00					184.500.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip** **Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip** **Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**100%**	180.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	184.500.000,00	-
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah kab/kota*	100 Persen	159.992.400,00			OPD,Kecamatan, Desa dan Sekolah Sekabupaten Bulukumba	100 Persen	163.992.210,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	26.876.800,00	Kab. Bulukumba	DBH	OPD,Kecamatan, Desa dan Sekolah Sekabupaten Bulukumba	37 Laporan	27.548.720,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis									
		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD,Kecamatan, Desa dan Sekolah Sekabupaten Bulukumba	1 Unit	102.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	40 Instansi	33.115.600,00	Kab. Bulukumba	DBH	OPD,Kecamatan, Desa dan Sekolah Sekabupaten Bulukumba	40 Instansi	33.943.490,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen	20.007.600,00			OPD sekabupaten Bulukumba Kab. Bulukumba	100 Persen	20.507.790,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 Arsip	20.007.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	OPD sekabupaten Bulukumba Kab. Bulukumba	2 Arsip	20.507.790,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	DINAS PERIKANAN KAB. BULUKUMBA			**16.921.915.146,50**					**17.344.963.025,16**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**16.921.915.146,50**					**17.344.963.025,16**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**16.921.915.146,50**					**17.344.963.025,16**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.249.881.530,50					5.381.128.568,76	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perikanan)**	**100%**	5.249.881.530,50	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.381.128.568,76	-
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen rencana kerja, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel, terukur, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik*	1 Dokumen	11.368.000,00			Dinas Perikanan	1 Dokumen	11.652.200,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Laporan	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	11.368.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perikanan	1 Dokumen	11.652.200,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Data	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah secara efektif dan sesuai regulasi melalui dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan*	100 Persen	4.763.446.759,52			ASN Dinas Perikanan	100 Persen	4.882.532.928,51	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.763.446.759,52	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	ASN Dinas Perikanan	45 Orang/bulan	4.882.532.928,51	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Dinas Perikanan	0 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perikanan)**	**100%**	5.249.881.530,50	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.381.128.568,76	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian yang mendukung tata kelola sumber daya manusia perangkat daerah*	2 Orang	40.460.000,00			ASN Dinas Perikanan	2 Orang	41.471.500,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	40.460.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	ASN Dinas Perikanan	2 Orang	41.471.500,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah yang tertib dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi*	100 Persen	151.170.700,00			Dinas Perikanan	100 Persen	154.949.967,50	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.336.100,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perikanan	1 Paket	4.444.502,50	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Paket	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.478.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	2 Paket	20.990.667,50	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.597.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	1 Paket	22.137.847,50	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.758.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perikanan	12 Laporan	107.376.950,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah yang dibutuhkan untuk mendukung urusan pemerintahan daerah sesuai prosedur pengadaan yang berlaku*	2 Unit	23.436.000,00			BMD Dinas Perikanan	2 Unit	24.021.900,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23.436.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	2 Unit	24.021.900,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah guna mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik*	24 Laporan	212.200.070,98			Dinas Perikanan	24 Laporan	217.505.072,75	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.964.470,98	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	12 Laporan	76.838.582,75	Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perikanan	0 Laporan	0,00	Dinas Perikanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perikanan)**	**100%**	5.249.881.530,50	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.381.128.568,76	-
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.235.600,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Perikanan	12 Laporan	140.666.490,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara berkala dan tepat waktu untuk memastikan fungsionalitas dan umur pakai aset daerah.*	47 Unit	47.800.000,00			BMD Dinas Perikanan	47 Unit	48.995.000,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perikanan)**	**100%**	5.249.881.530,50	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.381.128.568,76	-
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	39.310.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	34 Unit	40.292.750,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perikanan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perikanan)**	**100%**	5.249.881.530,50	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.381.128.568,76	-
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.220.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	6 Unit	4.325.500,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4.270.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	7 Unit	4.376.750,00	Dinas Perikanan
3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	BMD Dinas Perikanan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			11.417.104.216,00					11.702.531.821,40	
	[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**60150.49**	11.417.104.216,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60150.49**	11.702.531.821,40	-
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	100 Persen	10.167.104.216,00			Nelayan	100 Persen	10.421.281.821,40	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	10.167.104.216,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Nelayan	1 Unit	10.421.281.821,40	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan kecil melalui pelatihan, bantuan sarana prasarana, dan fasilitasi akses permodalan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan*	100 Persen	1.250.000.000,00			Nelayan	100 Persen	1.281.250.000,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Orang	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 Kelompok	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	92 Unit	1.250.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	92 Unit	1.281.250.000,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Terselenggaranya layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tertib, higienis, dan transparan, serta mendukung pemasaran hasil tangkap nelayan lokal*	6 Unit	0,00			Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Nelayan	6 Unit	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
		Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)									
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Nelayan	0 Layanan	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0 Dokumen	0,00			Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**60150.49**	11.417.104.216,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60150.49**	11.702.531.821,40	-
3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									
		Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)									
		Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.04.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap									
		Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	Rekomendasi	0,00			Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT									
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**60150.49**	11.417.104.216,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60150.49**	11.702.531.821,40	-
3.25.03.2.05.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)									
		Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran GT tertentu yang beroperasi di perairan darat.*	Rekomendasi	0,00			Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.03.2.06.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT									
		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**60150.49**	11.417.104.216,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60150.49**	11.702.531.821,40	-
3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)									
		Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			34.979.400,00					35.853.885,00	
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**240,643.28 Ton**	34.979.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**240643.28**	35.853.885,00	-
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0 Rekomendasi	0,00			Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing									
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.01.0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	0 rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan akses usaha untuk meningkatkan hasil produksi*	5 Kelompok	14.997.400,00			Pembudidaya Ikan	5 Kelompok	15.372.335,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									
		Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0 Kelompok	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Kelompok	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**240643.28**	34.979.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**240643.28**	35.853.885,00	-
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	14.997.400,00	Kab. Bulukumba	DBH	Pembudidaya Ikan	5 Kelompok	15.372.335,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Rekomendasi	0,00			Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**240643.28**	34.979.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**240643.28**	35.853.885,00	-
3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.04.2.03.0003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota									
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**240643.28**	34.979.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**240643.28**	35.853.885,00	-
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Terlaksananya pengelolaan kegiatan budidaya ikan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, dan keberlanjutan usaha pembudidayaan di tingkat daerah*	100 %	19.982.000,00			Pembudidaya Ikan	100 %	20.481.550,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	19.982.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Pembudidaya Ikan	1 Unit	20.481.550,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat									
		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pembudidaya Ikan	0 Unit	0,00	Dinas Perikanan
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			0,00						
	[Terwujudnya Pelaku Usaha yang Tertib dan Patuh Regulasi]	**Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-undangan**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan darat yang mendukung upaya pelestarian dan pencegahan praktik ilegal*	0 Pelaku Usaha	0,00			Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar	0 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perikanan
3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar	0 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perikanan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar	0 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perikanan
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar	0 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			219.950.000,00					225.448.750,00	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	0 Dokumen	0,00			Unit Pengolahan Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.01.0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri									
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Unit Pengolahan Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.01.0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Unit Pengolahan Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.01.0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko									
		Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Unit Pengolahan Ikan	Rekomendasi	0,00	Dinas Perikanan
	[Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat]	**Angka Konsumsi Ikan**	**56.23 %**	219.950.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**56.23 %**	225.448.750,00	-
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Unit Pengolahan Ikan	0 Dokumen	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil melalui pelatihan, sertifikasi, dan monitoring*	0 Unit Usaha	0,00			Unit Pengolahan Ikan	0 Unit Usaha	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Unit Pengolahan Ikan	0 Unit Usaha	0,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan secara tepat sasaran untuk mendukung kontinuitas produksi dan nilai tambah hasil perikanan*	1 Pelaku Usaha	219.950.000,00			Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	1 Pelaku Usaha	225.448.750,00	Dinas Perikanan
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	219.950.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH	Pemasar dan Pengolah Hasil Perikanan	1 Pelaku Usaha	225.448.750,00	Dinas Perikanan
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. BULUKUMBA			**16.859.674.080,12**					**17.281.165.932,12**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**13.891.914.080,12**					**14.239.211.932,12**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**13.891.914.080,12**					**14.239.211.932,12**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			6.412.359.030,12					6.572.668.005,87	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah*	50 Dokumen	87.641.000,00			Kabupaten Bukukumba	50 Dokumen	89.832.025,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	87.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	Kabupaten Bukukumba	20 Dokumen	89.832.025,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah*	73 Orang/Dokumen	5.087.115.002,12			Kabupaten Bukukumba	73 Orang/Dokumen	5.214.292.877,17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	5.073.715.002,12	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Kabupaten Bukukumba	52 Orang/bulan	5.200.557.877,17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	13.400.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	13.735.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik*	2 Unit	2.500.000,00			Kabupaten Bukukumba	2 Unit	2.562.500,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Dokumen	2.562.500,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	100 persen	336.167.388,00			Kabupaten Bukukumba	100 persen	344.571.572,70	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Dokumen	336.167.388,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	344.571.572,70	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Adminstrasi Disparpora Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen 57 Laporan/Paket	108.750.800,00			Kabupaten Bukukumba	100 Persen 57 Laporan/Paket	111.469.570,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	47 Paket	0,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Kabupaten Bukukumba	47 Paket	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bukukumba	4 Paket	41.000.205,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.880.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Kabupaten Bukukumba	1 Paket	3.977.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.219.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH	Kabupaten Bukukumba	2 Laporan	9.450.090,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	55.651.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Kabupaten Bukukumba	40 Laporan	57.042.275,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 persen 0 Persentase	0,00			-	100 persen 0 Persentase	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	3 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	5 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	3 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah*	32 Laporan	717.341.640,00			Kabupaten Bukukumba	32 Laporan	735.275.181,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119.951.640,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	12 Laporan	122.950.431,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	597.390.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Laporan	612.324.750,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan*	28 Unit	72.843.200,00			-	28 Unit	74.664.280,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	66.433.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	19 Unit	68.094.030,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.410.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	9 Unit	6.570.250,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			1.081.472.800,00					1.108.509.620,00	
	[Meningkatnya Daya saing kepemudaan]	**Persentase Wirausaha Muda**	**10.2 %**	1.081.472.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**10.2 %**	1.108.509.620,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Terlaksananya, dukungan sarana dan prasarana, pemberdayaan, kepeloporan, kepemimpinan*	477 PERSE NTASE	1.081.472.800,00			Kabupaten Bukukumba	477 PERSE NTASE	1.108.509.620,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	2 Dokumen	274.860.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Dokumen	281.732.012,50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	150 Orang	60.961.800,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	150 Orang	62.485.845,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	258 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	258 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	2 Kegiatan	665.415.200,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Kegiatan	682.050.580,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	80.235.300,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	5 Orang	82.241.182,50	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	4 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya organisasi kepemudaan yang aktif, mandiri, dan berperan dalam pembangunan daerah.*	2 Organisasi	0,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Organisasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 Organisasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Organisasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	100 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	100 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			6.248.082.250,00					6.404.284.306,25	
	[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	**Peningkatan prestasi olahraga tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional**	**16 %**	6.248.082.250,00	Kab. Bulukumba	-	-	**16 %**	6.404.284.306,25	-
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan* *Terlaksananya program pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan*	4 paket 4 Paket	4.429.367.450,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	4 paket 4 Paket	4.540.101.636,25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	5 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	5 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	4.429.367.450,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	1 Unit	4.540.101.636,25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah secara rutin dan terorganisir*	104 Kegiatan /Orang	1.818.714.800,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	104 Kegiatan /Orang	1.864.182.670,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	700.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	3 Kegiatan	717.500.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota									
		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	100 Kegiatan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	100 Kegiatan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	1.118.714.800,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	100 Orang	1.146.682.670,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya pembinaan berkelanjutan terhadap atlet berprestasi*	170 Orang	0,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	170 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	80 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	80 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									
		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	20 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)									
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	20 Pelatda	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	20 Pelatda	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	25 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	25 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota									
		Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Terselenggaranya event/kegiatan olahraga rekreasi tingkat daerah*	3 persentase	0,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	3 persentase	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	100 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	100 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	100 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Lembaga	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			150.000.000,00					153.750.000,00	
	[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	**Persentase cakupan anggota pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya**	**1.32**	150.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**1.32**	153.750.000,00	-
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan terhadap organisasi kepramukaan secara berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, perkemahan, dan pembinaan kader.*	1 Organisasi/ Orang	150.000.000,00			Kabupaten Bukukumba	1 Organisasi/ Orang	153.750.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah									
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Kabupaten Bukukumba	1 Organisasi	153.750.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan									
		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	2 Organisasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Organisasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.967.760.000,00**					**3.041.954.000,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**2.967.760.000,00**					**3.041.954.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			2.367.760.000,00					2.426.954.000,00	
	[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	**Persentase pertumbuhan wisatawan domestik** **Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara**	**2.5**	2.367.760.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**2.5**	2.426.954.000,00	-
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata*	0 Lokasi	0,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	0 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	7 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	7 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	7 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	7 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Pengelolaan infrastruktur dan layanan di kawasan strategis pariwisata daerah.*	1 objek/lokasi	0,00			Kabupaten Bukukumba	1 objek/lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	7 Unit	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	7 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*jumlah destinasi yang dikelola Peningkatan manajemen destinasi wisata berbasis digital dan kolaboratif.*	4 Lokasi 104 Persentase	2.367.760.000,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	4 Lokasi 104 Persentase	2.426.954.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	7 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	7 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 Lokasi	448.800.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	4 Lokasi	460.020.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	1.918.960.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	4 Unit	1.966.934.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	7 Lokasi	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya kepatuhan dan legalitas usaha pariwisata dalam mendukung tertib administrasi dan pengembangan sektor pariwisata daerah.*	0 Sertifikat	0,00			Kabupaten Bukukumba	0 Sertifikat	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.02.2.04.0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota									
		Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	10 Usaha Pariwisata	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Usaha Pariwisata	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota									
		Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	20 Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Usaha	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota									
		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)									
		Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	20 Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Usaha	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota									
		Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota									
		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)									
		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	20 Unit Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Unit Usaha	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko									
		Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	20 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.02.2.04.0016	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah									
		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	20 Badan Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Badan Usaha	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			498.506.200,00					510.968.855,00	
	[Meningkatnya promosi pariwisata]	**Persentase kegiatan promosi wisata yang dilakukan**	**30%**	498.506.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**30%**	510.968.855,00	-
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meningkatnya promosi pariwisata yang dipublikasikan (media sosial, cetak, video, dll).*	12 Persentase	498.506.200,00			Kabupaten Bukukumba	12 Persentase	510.968.855,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	356.564.200,00	Kab. Bulukumba	PAD	Kabupaten Bukukumba	1 Kegiatan	365.478.305,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	141.942.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Kabupaten Bukukumba	4 Promosi	145.490.550,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			101.493.800,00					104.031.145,00	
	[Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	**Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**40%**	101.493.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**40%**	104.031.145,00	-
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Pelatihan dasar untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.*	80 Orang	101.493.800,00			Kabupaten Bukukumba	80 Orang	104.031.145,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	5 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI									
		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	101.493.800,00	Kab. Bulukumba	PAD	Kabupaten Bukukumba	80 Orang	104.031.145,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	20 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif									
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Kabupaten Bukukumba	10 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Pelatihan tematik ekonomi kreatif (branding, packaging, pemasaran digital, dll).*	0 Orang/Lembaga	0,00			Masyarakat Kab. Bulukumba	0 Orang/Lembaga	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	20 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha									
		Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	2 Laporan	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif									
		Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	5 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	5 Lembaga	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif									
		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif									
		Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BULUKUMBA			**24.995.759.751,20**					**25.620.653.744,98**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**428.665.900,00**					**439.382.547,50**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**428.665.900,00**					**439.382.547,50**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			0,00						
	[Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan pendukung kedaulatan dan kemandirian pangan]	**Indeks Kesetaraan** **Persentase peningkatan sarana dan prasarana ketersediaan pangan**	**1.51** **1.57**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**1.51** **1.57**		-
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananaya Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan*	100 Persen	0,00			Masyarakat	100 Persen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik									
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			279.300.100,00					286.282.602,50	
	[Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat]	**Ketersediaan Energi** **Ketersediaan Protein**	**3.338** **503**	279.300.100,00	Kab. Bulukumba	-	-	**3.338** **503**	286.282.602,50	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	186.647.600,00			Masyarakat	-	191.313.790,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	77.076.400,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat	100 Keluarga	79.003.310,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota									
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5 laporan	69.101.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	5 laporan	70.828.525,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									
		Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota									
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Laporan	30.750.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	10.470.200,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat	2 Dokumen	10.731.955,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tingkat kesesuaian stok cadangan pangan dengan kebutuhan*	100 Persen	84.061.000,00			Masyarakat	100 Persen	86.162.525,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	65.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	15 Ton	66.625.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	5 Ton	8.184.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	5 Ton	8.388.600,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)									
		Jumlah LPM yang terfasilitasi	15 kelompok	10.877.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	15 kelompok	11.148.925,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase pencapaian konsumsi energi/protein*	100 Persen	8.591.500,00			Masyarakat	100 Persen	8.806.287,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	8.591.500,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat	1 Dokumen	8.806.287,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun									
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	1 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			61.239.400,00					62.770.385,00	
	[Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan provinsi]	**Persentase wilayah tahan pangan sesuai kewenangan Daerah**	**99.26 %**	61.239.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**99.26 %**	62.770.385,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*	100 Persen	12.367.000,00			Masyarakat	100 Persen	12.676.175,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	12.367.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	1 Dokumen	12.676.175,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Persen	48.872.400,00			Masyarakat	100 Persen	50.094.210,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	15.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	1 Laporan	15.685.575,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	26.398.400,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	1 Dokumen	27.058.360,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.171.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat	1 Dokumen	7.350.275,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			88.126.400,00					90.329.560,00	
	[Meningkatnya Persentase produk pangan segar asal tumbuhan]	**-**	**-**	88.126.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**-**	90.329.560,00	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	12 Bulan	88.126.400,00			Masyarakat	12 Bulan	90.329.560,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									
		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	10 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat	10 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	73.978.400,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	1 Dokumen	75.827.860,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0 Laporan	14.148.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	0 Laporan	14.501.700,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**24.412.650.251,20**					**25.022.966.507,48**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**24.412.650.251,20**					**25.022.966.507,48**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			18.730.661.801,20					19.198.928.346,23	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**	**74%**	18.730.661.801,20	Kab. Bulukumba	-	-	**74%**	19.198.928.346,23	-
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang selesai tepat waktu*	100 Dokumen	68.178.300,00			ASN Lingkup Dinas	100 Dokumen	69.882.757,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas	2 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.958.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas	1 Dokumen	20.456.950,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.718.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas	1 Dokumen	3.811.462,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**	**74%**	18.730.661.801,20	Kab. Bulukumba	-	-	**74%**	19.198.928.346,23	-
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.079.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas	1 Dokumen	2.131.795,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	17.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas	1 Laporan	17.857.550,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas	3 Data	25.625.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah*	100 Persen	18.069.623.401,20			ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100 Persen	18.521.363.986,23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 0	18.055.023.401,20	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 0	18.506.398.986,23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	14.965.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola dengan baik*	100 Persen	2.541.000,00			ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100 Persen	2.604.525,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.541.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	2.604.525,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan pelayanan kepegawaian perangkat daerah*	100 Persen	76.182.000,00			ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100 Persen	78.086.550,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	76.182.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20 Orang	78.086.550,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	303.742.100,00			ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	311.335.652,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	1.385.800,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.374.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	4.483.965,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.971.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	80.945.992,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.595.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Paket	10.860.080,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	20.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.451.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	5.587.890,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	182.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN LIngkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	187.571.925,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	56.865.000,00			-	100 Persen	58.286.625,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	4 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.710.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	2 Unit	1.752.750,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.155.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	5 Unit	56.533.875,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah*	100 Persen	62.760.000,00			ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100 Persen	64.329.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	62.760.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	64.329.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	100 Persen	90.770.000,00			ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100 Persen	93.039.250,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Unit	27.162.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	362 Unit	44.700.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	362 Unit	45.817.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)**	**74%**	18.730.661.801,20	Kab. Bulukumba	-	-	**74%**	19.198.928.346,23	-
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	19.570.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35 Unit	20.059.250,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			894.913.800,00					917.286.645,00	
	[Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian]	**Persentase Luas Areal yang Terfasilitasi Sarana Pertanian**	**60.3%**	894.913.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**60.3%**	917.286.645,00	-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian*	100 Persen	316.709.600,00			Masyarakat Petani	100 Persen	324.627.340,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 0	211.546.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DBH CHT	Masyarakat Petani	0 0	216.834.650,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 0	105.163.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Petani	0 0	107.792.690,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0 Ton	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Petani	0 Ton	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang									
		Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0 Batang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Petani	0 Batang	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									
		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0 Batang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Petani	0 Batang	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan									
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat Petani	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG Hewan dan Tanaman*	4,93 Persen	0,00			Masyarakat	4,93 Persen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan									
		-	-	0,00	Kab. Bulukumba	-	Masyarakat	-	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Mutu Benih/Bibit yang memenuhi standar kualitas*	4,93 Persen	7.489.200,00			-	4,93 Persen	7.676.430,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 Laporan	7.489.200,00	Kab. Bulukumba	PAD	-	0 Laporan	7.676.430,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengendalian, pengawasan, penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan hijauan Pakan Ternak*	100 Persen	43.045.000,00			Masyarakat, Kelompok Ternak	100 Persen	44.121.125,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak									
		Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat, Kelompok Ternak	0 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat, Kelompok Ternak	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	2 Laporan	43.045.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat, Kelompok Ternak	2 Laporan	44.121.125,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Tingkat pemenuhan kebutuhan benih/bibit dan hijauan pakan ternak*	100 Persen	527.670.000,00			Masyarakat/Kelompo k Ternak	100 Persen	540.861.750,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2 Ton	57.870.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Ternak	2 Ton	59.316.750,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	45 Ekor	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Ternak	45 Ekor	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	9000 Dosis	469.800.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Ternak	9000 Dosis	481.545.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			1.419.808.000,00					1.455.303.200,00	
	[Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian]	**Persentase luas areal yang terdampak pembangunan prasarana pertaniana**	**13%**	1.419.808.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**13%**	1.455.303.200,00	-
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pertanian*	100 Persen	1.365.824.000,00			Masyarakat/Kelompo k Tani	100 Persen	1.399.969.600,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian									
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	1.362.456.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	200 Ha	1.396.517.400,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota									
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	3.368.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	1 Dokumen	3.452.200,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian									
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	1 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian*	100 Persen	53.984.000,00			Masyarakat/Kelompo k Tani	100 Persen	55.333.600,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	3 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	3 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit	53.984.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat/Kelompo k Tani	10 Unit	55.333.600,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak									
		Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan									
		Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			449.287.500,00					460.519.687,50	
	[Meningkatnya Derajat Kesehatan Hewan]	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**21.40%**	449.287.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**21.40%**	460.519.687,50	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ternak yang ditangani atau mendapatkan layanan penjaminan kesehatan hewan di wilayah kabupaten/kota.*	18,27 Persen	342.287.500,00			Masyarakat/Peternak	18,27 Persen	350.844.687,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	342.287.500,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Peternak	5 Laporan	350.844.687,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan*	100 Persen	18.000.000,00			Masyarakat/Peternak	100 Persen	18.450.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)									
		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	2 laporan	18.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Peternak	2 laporan	18.450.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM									
		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Peternak	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*	100 Persen	0,00			-	100 Persen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium									
		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	[Meningkatnya Derajat Kesehatan Hewan]	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**21.40%**	449.287.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**21.40%**	460.519.687,50	-
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	100 Persen	89.000.000,00			Masyarakat	100 Persen	91.225.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Taccorong	DAU	Masyarakat	0 Laporan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner									
		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	0 Dokumen	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	89.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat	0 Unit Usaha	91.225.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			179.155.250,00					183.634.131,25	
	[Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)]	**Rasio luas serangan OPT yang dikendallikan**	**64%**	179.155.250,00	Kab. Bulukumba	-	-	**64%**	183.634.131,25	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota*	100 Persen	179.155.250,00			Masyarakat/Kelompo k Tani	100 Persen	183.634.131,25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000 Ha	159.756.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat/Kelompo k Tani	2000 Ha	163.749.900,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	0 Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	19.399.250,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Kelompo k Tani	100 Ha	19.884.231,25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			5.974.000,00					6.123.350,00	
	[Meningkatnya jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha]	**Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi izin usaha**	**85%**	5.974.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**85%**	6.123.350,00	-
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi penerapannya*	36 Unit usaha	5.974.000,00			Masyarakat	36 Unit usaha	6.123.350,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10 Dokumen	5.974.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat	10 Dokumen	6.123.350,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			2.732.849.900,00					2.801.171.147,50	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian]	**Persentase petani yang menerapkan teknologi dan meningkat produksi usaha taninya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Rasio Ketersediaan Energi Rasio Ketersediaan Protein Skor Pola Pangan Harapan**	**1.59 35 8.00 9.00 90.19**	2.732.849.900,00	Kab. Bulukumba	-	-	**1.59 35 8.00 9.00 90.19**	2.801.171.147,50	-
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya Penyuluhan Pertanian*	100 Persen	2.732.849.900,00			Masyarakat/Petani	100 Persen	2.801.171.147,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	2.141.554.000,00	Kab. Bulukumba	DAU, DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Masyarakat/Petani	10 Unit	2.195.092.850,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	156.424.300,00	Kab. Bulukumba	DAU, DBH CHT	Masyarakat/Petani	10 Unit	160.334.907,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Petani	6 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	15 Unit	178.451.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat/Petani	15 Unit	182.912.890,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	256.420.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Masyarakat/Petani	100 Orang	262.830.500,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
X	**NON URUSAN**			**154.443.600,00**					**158.304.690,00**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**154.443.600,00**					**158.304.690,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			154.443.600,00					158.304.690,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah*	100 Persen	154.443.600,00			-	100 Persen	158.304.690,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	154.443.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	-	1 Laporan	158.304.690,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB. BULUKUMBA			**27.569.448.814,47**					**28.258.685.034,83**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**27.569.448.814,47**					**28.258.685.034,83**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**27.036.273.514,47**					**27.712.180.352,33**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			5.783.047.114,47					5.927.623.292,33	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)**	**100%**	5.783.047.114,47	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.927.623.292,33	-
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 Persen	33.342.200,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	34.175.755,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.466.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4 Dokumen	29.177.855,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.876.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Laporan	4.997.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	3.788.876.014,47			ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	3.883.597.914,83	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	3.788.876.014,47	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	38 Orang/bulan	3.883.597.914,83	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Laporan	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	13.620.000,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	13.960.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	13.620.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang	13.960.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya/terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	128.408.100,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	131.618.302,50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.846.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Paket	2.917.150,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.952.100,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Paket	25.575.902,50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.975.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Paket	5.099.375,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	95.635.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25 Laporan	98.025.875,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 Persen	11.979.000,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	12.278.475,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 Unit	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6 Unit	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	11.979.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Unit	12.278.475,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	1.760.967.200,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	1.804.991.380,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	172.893.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12 Laporan	177.215.325,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 Laporan	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.588.074.200,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12 Laporan	1.627.776.055,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	45.854.600,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	47.000.965,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	33.000.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	34 Unit	33.825.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.860.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6 Unit	3.956.500,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.994.600,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Unit	9.219.465,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			21.051.605.000,00					21.577.895.125,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**100%**	21.051.605.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	21.577.895.125,00	-
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di Bangun dan di Rehabilitasi*	100 Persen	20.175.288.000,00			Sarana Distribusi Perdagangan	100 Persen	20.679.670.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	20.175.288.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	20.679.670.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	100 Persen	876.317.000,00			Pegelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 Persen	898.224.925,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	876.317.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DBH DAU	Pegelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	898.224.925,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			60.705.000,00					62.222.625,00	
	[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**100%**	60.705.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	62.222.625,00	-
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Peningkatan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok*	100 Persen	60.705.000,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	62.222.625,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	60.705.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Laporan	62.222.625,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			0,00						
	[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	**Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0,00			Pelaku Usaha	-	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			140.916.400,00					144.439.310,00	
	[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**Persentase penanganan pengaduan konsumen**	**100%**	140.916.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	144.439.310,00	-
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera, Tera Ulang*	100 Persen	140.916.400,00			Konsumen	100 Persen	144.439.310,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2966 Unit	78.448.200,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Konsumen	2966 Unit	80.409.405,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	62.468.200,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Konsumen	100 Orang	64.029.905,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**533.175.300,00**					**546.504.682,50**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			500.000.000,00					512.500.000,00	
	[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**100%**	500.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	512.500.000,00	-
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	100 Persen	500.000.000,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	512.500.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Dokumen	512.500.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Dokumen	0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			5.033.900,00					5.159.747,50	
	[Meningkatnya Kualitas Perizinan berusaha sektor perindustrian]	**Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk mendapatkan perizinan berusaha Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan**	**100%**	5.033.900,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.159.747,50	-
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Izin Usaha Industri yang diterbitkan*	100 Persen	5.033.900,00			Pelaku Usaha Industri	100 Persen	5.159.747,50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	5.033.900,00	Kab. Bulukumba	DAU	Pelaku Usaha Industri	1 Dokumen	5.159.747,50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			28.141.400,00					28.844.935,00	
	[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	**Tersedianya informasi industri secara lengkap akurat, dan terkini**	**100%**	28.141.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	28.844.935,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS*	100 Persen	28.141.400,00			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100 Persen	28.844.935,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	28.141.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Dokumen	28.844.935,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BULUKUMBA			**25.760.787.368,00**					**26.404.807.052,20**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**24.877.284.768,00**					**25.499.216.887,20**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**24.877.284.768,00**					**25.499.216.887,20**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			21.644.456.830,00					22.185.568.250,75	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat Daerah)**	**100%**	21.644.456.830,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	22.185.568.250,75	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Masyarakat*	100 Persen	89.887.900,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	92.135.097,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	89.887.900,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	92.135.097,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	13.005.391.425,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	13.330.526.210,63	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan	13.005.391.425,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	121 Orang/bulan	13.330.526.210,63	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan.*	100 Persen	31.511.200,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	32.298.980,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan Dokumen	31.511.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	32.298.980,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 Persen	152.146.800,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	155.950.470,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Persen Paket	152.146.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Paket	155.950.470,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat Daerah	2 Orang	0,00	Sekretariat Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat Daerah)**	**100%**	21.644.456.830,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	22.185.568.250,75	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	1.437.216.900,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	1.473.147.322,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.445.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	3 Paket	71.181.535,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	49.229.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Paket	50.460.545,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	23.791.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Paket	24.386.492,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan Dokumen	127.320.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	130.503.000,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat Daerah)**	**100%**	21.644.456.830,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	22.185.568.250,75	-
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan Laporan	900.710.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	923.227.750,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	266.720.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	273.388.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan*	100 Persen	1.171.864.600,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	1.201.161.215,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1 Unit	1.127.500.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	2 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 jenis Unit	25.650.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	5 jenis Unit	26.291.250,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	2 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 jenis Unit	46.214.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	5 jenis Unit	47.369.965,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	2.414.232.001,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	2.474.587.801,03	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen Laporan	760.138.460,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Laporan	779.141.921,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	0,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	1.654.093.541,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	1.695.445.879,53	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	549.419.600,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	563.155.090,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	228.538.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	35 Unit	234.251.450,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	36.800.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	95 Unit	37.720.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	5 jenis Unit	0,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	187.250.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	4 Unit	191.931.250,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	96.831.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	10 Unit	99.252.390,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Pesentase Laporan Keuangan dan Opresional Kepla daerah dan Wakil Kepla daerah Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	834.875.641,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	855.747.532,03	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	234.875.641,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	240.747.532,03	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	615.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Presentase Kebutuhan Rumah Tangga di Sekretariat Daerah*	100 Persen	520.000.000,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	533.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	520.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1 Paket	533.000.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*'Persentase penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien*	100 Persen	205.999.400,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	211.149.385,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Persen Dokumen	35.030.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Dokumen	35.905.955,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1Dokumen Laporan	26.997.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1Dokumen Laporan	27.671.925,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	15.888.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	16.285.917,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 Persen Dokumen	27.169.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Dokumen	27.849.147,50	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.913.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	103.436.440,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Presentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik di sekretariat Daerah*	100 Persen	1.231.911.363,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	1.262.709.147,08	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 0	105.650.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat Daerah	0 0	108.291.865,00	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Bulan Laporan	1.025.695.763,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	1.051.338.157,08	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Bulan Laporan	100.565.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	103.079.125,00	Sekretariat Daerah
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			2.875.238.338,00					2.947.119.296,45	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Efektivitas Pelaksanan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat**	**100%**	2.875.238.338,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.947.119.296,45	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan*	100 Persen	222.695.400,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	228.262.785,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	9.230.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	3 Dokumen	9.460.750,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12 Dokumen	131.131.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	134.409.890,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	82.333.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	4 Dokumen	84.392.145,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Efektivitas Pelaksanan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat*	100 Persen	2.328.575.938,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	2.386.790.336,45	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Bulan Dokumen	1.595.801.138,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	1.635.696.166,45	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Bulan Dokumen	289.164.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	296.393.920,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	443.610.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	454.700.250,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Produk Hukum yang disusun*	100 Persen	308.862.000,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	316.583.550,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 Persen Dokumen	28.770.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Dokumen	29.489.250,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	19 Kasus	130.092.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	19 Kasus	133.344.300,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	0 Dokumen	153.750.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri*	100 Persen	15.105.000,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	15.482.625,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Bulan Dokumen	15.105.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	15.482.625,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	12 Bulan Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Bulan Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	0,00	Sekretariat Daerah
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			357.589.600,00					366.529.340,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Persentase Pelaksanan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan**	**100%**	357.589.600,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	366.529.340,00	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Pelaksanan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*	100 Persen	216.395.700,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	221.805.592,50	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	5.125.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	85.243.200,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat Daerah	12 Laporan	87.374.280,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	126.152.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	129.306.312,50	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	100 Persen	15.000.000,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	15.375.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100 Persen Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	100 Persen Dokumen	5.125.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Bulan Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	5.125.000,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Bulan Laporan	5.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Laporan	5.125.000,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	100 Persen	126.193.900,00			Sekretariat Daerah	100 Persen	129.348.747,50	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Dokumen	16.066.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	16.467.650,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan Dokumen	77.363.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	12 Bulan Dokumen	79.297.075,00	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	59 OPD Orang	32.764.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Sekretariat Daerah	59 OPD Orang	33.584.022,50	Sekretariat Daerah
X	**NON URUSAN**			**883.502.600,00**					**905.590.165,00**	
X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**883.502.600,00**					**905.590.165,00**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			883.502.600,00					905.590.165,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	73.044.600,00			-	100 Persen	74.870.715,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan Dokumen	40.765.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	12 Bulan Dokumen	41.784.330,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Bulan Laporan	32.279.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	12 Bulan Laporan	33.086.385,00	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan*	100 Persen	87.958.000,00			-	100 Persen	90.156.950,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	47.298.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	2 Unit	48.480.450,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	40.660.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	20 Unit	41.676.500,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Pesentase Laporan Keuangan dan Opresional Kepla daerah dan Wakil Kepla daerah Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	122.500.000,00			-	100 Persen	125.562.500,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	122.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	4 Orang	125.562.500,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Presentase Kebutuhan Rumah Tangga di Sekretariat Daerah*	100 Persen	600.000.000,00			-	100 Persen	615.000.000,00	Sekretariat Daerah
X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	-	1 Paket	615.000.000,00	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD KAB. BULUKUMBA			**32.579.290.548,04**					**33.393.772.811,74**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**32.579.290.548,04**					**33.393.772.811,74**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**32.579.290.548,04**					**33.393.772.811,74**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			28.171.955.648,04					28.876.254.539,24	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat DPRD)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat DPRD)**	**100%**	28.171.955.648,04	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	28.876.254.539,24	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran dan Pelaporan Tepat waktu Persentase Pemenuhan Dokumen, Penganggaran, dan Pelaporan Tepat Waktu*	100 % 100 %	63.766.600,00			Sekretariat DPRD	100 % 100 %	65.360.765,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26.419.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	27.079.680,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.387.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	1 Laporan	14.747.085,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	22.960.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	10 Laporan	23.534.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Sekretariat DPRD, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan*	100 %	3.824.486.134,00			Sekretariat DPRD	100 %	3.920.098.287,35	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	3.722.689.134,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	PAD,DAU	Sekretariat DPRD	40 Orang/bulan	3.815.756.362,35	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	31.506.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	10 Dokumen	32.293.650,00	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	55.969.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	57.368.840,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.841.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	1 Laporan	2.912.845,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.479.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	11.766.590,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penatausahaannya*	100 %	12.597.000,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	12.911.925,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.597.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Laporan	12.911.925,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %	355.548.000,00			Sekretariat DPRD	100 %	364.436.700,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	302.820.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD	1 Paket	310.390.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat DPRD	40 Orang	0,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 0	52.728.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat DPRD	0 0	54.046.200,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	533.942.400,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	547.290.960,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.001.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	15.376.845,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 0	11.482.600,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	0 0	11.769.665,00	Sekretariat DPRD
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat DPRD)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat DPRD)**	**100%**	28.171.955.648,04	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	28.876.254.539,24	-
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	417.813.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	428.258.632,50	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	4.986.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	65 Dokumen	5.111.367,50	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	84.658.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Laporan	86.774.450,00	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 %	40.535.800,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	41.549.195,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Unit	0,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	11.250.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Unit	11.531.250,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.295.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Unit	25.928.195,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	3.990.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	9 Unit	4.089.750,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintan Daerah*	100 %	1.582.208.715,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	1.621.763.932,88	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	290.397.315,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	297.657.247,88	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Sekretariat DPRD)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Sekretariat DPRD)**	**100%**	28.171.955.648,04	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	28.876.254.539,24	-
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.291.811.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1.324.106.685,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 % 100 %	138.762.000,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 % 100 %	142.231.050,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Unit	17.937.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	35.972.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Unit	36.871.300,00	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Unit	4.305.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.090.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Unit	2.142.250,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	4.260.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Unit	4.366.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	74.740.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Unit	76.608.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	100 %	21.490.676.999,04			Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	22.027.943.924,02	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	21.390.676.999,04	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang/Bulan	21.925.443.924,02	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	102.500.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD*	100 %	129.432.000,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	132.667.800,00	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	129.432.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Laporan	132.667.800,00	Sekretariat DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			4.407.334.900,00					4.517.518.272,50	
	[Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat Dewan]	**Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**	**100%**	4.407.334.900,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.517.518.272,50	-
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Tersedianya Peraturan daerah dan Peraturan DPRD*	100 %	588.648.000,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	603.364.200,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	16 Dokumen	140.368.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Dokumen	143.877.200,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	323.580.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	331.669.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	16 Dokumen	24.700.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Dokumen	25.317.500,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	102.500.000,00	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*	100 %	439.658.800,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	450.650.270,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40 Dokumen	9.658.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Dokumen	9.900.270,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	126.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang	129.150.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	294.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Orang	301.350.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	40 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Dokumen	10.250.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	100 %	335.399.700,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	343.784.692,50	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	10 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	0,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	33.825.000,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen	302.399.700,00	Kab. Bulukumba	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	120 Dokumen	309.959.692,50	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD*	100 %	3.043.628.400,00			Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %	3.119.719.110,00	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40 Dokumen	3.043.628.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DAU	Sekretariat DPRD,Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Dokumen	3.119.719.110,00	Sekretariat DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BULUKUMBA			**9.118.862.232,66**					**9.346.833.788,48**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.118.862.232,66**					**9.346.833.788,48**	
5.01	**PERENCANAAN**			**8.624.182.332,66**					**8.839.786.890,98**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			7.250.790.632,66					7.432.060.398,48	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah)**	**100%**	7.250.790.632,66	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	7.432.060.398,48	-
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun*	40 Dokumen	177.984.900,00			Bapperida	40 Dokumen	182.434.522,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	83.498.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	13 Dokumen	85.585.655,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	16.593.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	2 Dokumen	17.008.030,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	11.316.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	2 Dokumen	11.599.720,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	52.346.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	21 Laporan	53.655.572,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.609.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Dokumen	4.724.942,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.620.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Berita Acara	9.860.602,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah*	43 Laporan	5.262.536.132,66			Bapperida	43 Laporan	5.394.099.535,98	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5.230.067.332,66	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Bapperida	46 Orang/bulan	5.360.819.015,98	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.962.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	12 Dokumen	16.361.050,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.017.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Laporan	5.142.425,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	11.489.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Bapperida	18 Laporan	11.777.045,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	5.114.400,00			Bapperida	2 Laporan	5.242.260,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.114.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	2 Laporan	5.242.260,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi*	46 Orang	78.062.000,00			Bapperida	46 Orang	80.013.550,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	78.062.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	46 Orang	80.013.550,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum yang Tersusun*	12 Laporan	275.801.800,00			Bapperida	12 Laporan	282.696.845,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	32.412.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Paket	33.222.915,00	BAPPERIDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.634.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Paket	63.175.772,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.776.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Bapperida	1 Paket	12.070.912,50	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.101.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	12 Laporan	15.479.345,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113 Laporan	154.876.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	113 Laporan	158.747.900,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*	24 Unit	577.746.400,00			Bapperida	24 Unit	592.190.060,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	30.780.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Bapperida	6 Unit	31.549.500,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	1 Unit	102.500.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	304.826.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	16 Unit	312.447.060,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	142.140.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Bapperida	1 Unit	145.693.500,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah*	24 Laporan	829.065.000,00			Bapperida	24 Laporan	849.791.625,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.900.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	12 Laporan	10.147.500,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	819.165.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Bapperida	12 Laporan	839.644.125,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	39 Unit	44.480.000,00			Bapperida	39 Unit	45.592.000,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	28.900.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	17 Unit	29.622.500,00	BAPPERIDA
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	15.580.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Bapperida	22 Unit	15.969.500,00	BAPPERIDA
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			555.785.700,00					569.680.342,50	
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100%**	555.785.700,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	569.680.342,50	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Tersusun*	2 Dokumen	317.269.000,00			Bapperida	2 Dokumen	325.200.725,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	106.595.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	2 Dokumen	109.259.875,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	10.700.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	1 Berita Acara	10.967.500,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	16.750.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	1 Berita Acara	17.168.750,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	25.540.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	2 Berita Acara	26.178.500,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	50 Usulan	28.885.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	50 Usulan	29.607.125,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	128.799.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bintarore	DBH	Bapperida	2 Dokumen	132.018.975,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data Dan Informasi Pembangunan Daerah*	1 Dokumen	93.159.000,00			Bapperida	1 Dokumen	95.487.975,00	BAPPERIDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	14 Orang	59.491.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	14 Orang	60.978.275,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	33.668.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	1 Buku	34.509.700,00	BAPPERIDA
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi yang Tersusun*	17 Laporan	145.357.700,00			SE KABUPATEN BULUKUMBA	17 Laporan	148.991.642,50	BAPPERIDA
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	53.689.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	SE KABUPATEN BULUKUMBA	5 Laporan	55.031.737,50	BAPPERIDA
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	91.668.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	SE KABUPATEN BULUKUMBA	12 Laporan	93.959.905,00	BAPPERIDA
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			817.606.000,00					838.046.150,00	
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang perekonomian**	**100%**	817.606.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	838.046.150,00	-
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	100 %	229.706.800,00			Bapperida	100 %	235.449.470,00	BAPPERIDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	68.360.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	9 Dokumen	70.069.820,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	33.074.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	9 Laporan	33.901.670,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	18.463.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	9 Laporan	18.924.575,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	39.289.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	6 Dokumen	40.271.225,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	51.371.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	6 Laporan	52.655.480,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	19.148.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	6 Laporan	19.626.700,00	BAPPERIDA
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang perekonomian**	**100%**	817.606.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	838.046.150,00	-
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	100 %	227.400.000,00			Bapperida	100 %	233.085.000,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	62.473.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	10 Dokumen	64.034.825,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	28.506.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	10 Laporan	29.218.650,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	30.041.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	10 Laporan	30.792.025,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	49.365.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	3 Dokumen	50.599.125,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	27.086.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	3 Laporan	27.763.150,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	29.929.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	3 Laporan	30.677.225,00	BAPPERIDA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang perekonomian**	**100%**	817.606.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	838.046.150,00	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	100 %	360.499.200,00			Bapperida	100 %	369.511.680,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	110.890.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Dokumen	113.662.250,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	24.722.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Laporan	25.340.255,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	11 Laporan	43.281.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Laporan	44.363.025,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	105.727.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Dokumen	108.370.175,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	19.250.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Laporan	19.731.250,00	BAPPERIDA
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	11 Laporan	56.629.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK	Bapperida	11 Laporan	58.044.725,00	BAPPERIDA
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**494.679.900,00**					**507.046.897,50**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			494.679.900,00					507.046.897,50	
	[Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	**Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**100%**	494.679.900,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	507.046.897,50	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	2 Dokumen	275.264.000,00			Bapperida	2 Dokumen	282.145.600,00	BAPPERIDA
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	155.264.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Bapperida	1 Dokumen	159.145.600,00	BAPPERIDA
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH	Bapperida	1 Dokumen	123.000.000,00	BAPPERIDA
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	6 Dokumen	219.415.900,00			Bapperida	6 Dokumen	224.901.297,50	BAPPERIDA
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6 Laporan	219.415.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAJAK ROKOK, DBH DAU	Bapperida	6 Laporan	224.901.297,50	BAPPERIDA
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BULUKUMBA			**224.890.860.320,16**					**230.513.131.828,16**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**224.890.860.320,16**					**230.513.131.828,16**	
5.02	**KEUANGAN**			**224.890.860.320,16**					**230.513.131.828,16**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			8.027.879.209,00					8.228.576.189,23	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai standar*	100 %	200.319.400,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	205.327.385,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	87.100.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5 Dokumen	89.277.807,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	8.712.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.556.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2 Dokumen	8.769.900,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	6.915.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7 Laporan	7.087.977,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	75.248.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	77.129.200,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	7.175.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Data	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	7.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Berita Acara	7.175.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu									
		Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Substansi	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Berita Acara	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*	100 %	5.865.294.559,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	6.011.926.922,98	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	5.569.320.059,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	742 Orang/bulan	5.708.553.060,48	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	71.474.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	73.261.260,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	211.000.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Dokumen	216.275.307,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.499.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	5.637.295,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	4.100.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	4.100.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar*	100 %	48.641.000,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	49.857.025,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.286.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	6.443.150,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun									
		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Orang	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.355.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2 Orang	43.413.875,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	14 Orang	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5 Orang	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	416.652.050,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	427.068.351,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.577.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	3.667.245,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	160.130.050,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	164.133.301,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.586.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	21.100.650,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	42.595.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	43.660.080,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	189.763.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	194.507.075,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase sarana dan prasarana kantor / barang miilik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	256.712.200,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %	263.130.005,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	23.589.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3 Unit	24.178.725,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	25 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	233.123.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30 Unit	238.951.280,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa administrasi perkantoran*	95 %	1.120.240.000,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	95 %	1.148.246.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kuangan dan Aset Daerah)**	**100%**	8.027.879.209,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	8.228.576.189,23	-
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.120.240.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 Laporan	1.148.246.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	95 %	120.020.000,00			Badan Keuangan dan Aset Daerah	95 %	123.020.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	28.187.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	67.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	32 Unit	69.187.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	15.375.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	10.020.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30 Unit	10.270.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Unit	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1 Ha	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			216.135.639.711,16					221.539.030.703,94	
	[Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu]	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	**100%**	216.135.639.711,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	221.539.030.703,94	-
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun*	95 %	1.847.061.400,00			Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	95 %	1.893.237.935,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	247.550.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	253.738.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	217.577.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK, DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	223.016.425,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	48.990.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	50.214.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	27.700.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	28.392.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	35.875.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	25.700.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	26.342.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	360.097.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	3 Dokumen	369.099.425,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	320.313.000,00	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	3 Dokumen	328.320.825,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	32.836.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	33.656.900,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	295.943.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	303.341.575,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	22.219.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	22.774.475,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	213.136.400,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	90 Orang	218.464.810,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase realisasi pengeluaran kas terhadap realisasi penerimaan kas daerah*	95 %	727.768.900,00			Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	95 %	745.963.122,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	31.139.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	31.917.680,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	0 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	20.611.600,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	4 Dokumen	21.126.890,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	0 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	321.224.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	4 Dokumen	329.254.600,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	41.699.200,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	42.741.680,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	33.735.600,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	34.578.990,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	15.205.200,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	15.585.330,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	126.526.900,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	12 Dokumen	129.690.072,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	42.397.200,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	43.457.130,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	95.230.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	72 Orang	97.610.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase dokumen akuntansi pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP)*	95 %	739.072.600,00			Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	95 %	757.549.415,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	163.016.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Laporan	167.091.400,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	85.764.400,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	87.908.510,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	23.830.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	18 Laporan	24.425.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	148.829.200,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	7 Laporan	152.549.930,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	90.751.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	93.019.775,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	12.502.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	12.814.550,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	3 Dokumen	87.125.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	61.966.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	90 Orang	63.515.150,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	21 Lembaga	67.414.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	21 Lembaga	69.099.350,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	95 %	212.687.499.811,16			Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	95 %	218.004.687.306,44	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu]	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	**100%**	216.135.639.711,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	221.539.030.703,94	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi									
		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu]	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	**100%**	216.135.639.711,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	221.539.030.703,94	-
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	109 Laporan	186.514.246.201,00	Kab. Bulukumba	DAU, DANA DESA	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	109 Laporan	191.177.102.356,03	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	13.248.488.720,16	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	13.579.700.938,16	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	109 Laporan	12.924.764.890,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan Desa di Kabupaten Bulukumba	109 Laporan	13.247.884.012,25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase pengguna system aplikasi terhadap jumlah OPD*	95 %	134.237.000,00			Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	95 %	137.592.925,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	[Tersedianya Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu]	Persentase Dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat waktu	**100%**	216.135.639.711,16	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	221.539.030.703,94	-
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	67.110.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	4 Dokumen	68.787.750,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	59 Orang	67.127.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD di Kabupaten Bulukumba	59 Orang	68.805.175,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			727.341.400,00					745.524.935,00	
	[Tersedianya dokumen pelaporan barang milik daerah]	**Persentase dokumen pelaporan barang milik daerah**	**100%**	727.341.400,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	745.524.935,00	-
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik*	95 %	727.341.400,00			Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	95 %	745.524.935,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	44.293.500,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	1 Dokumen	45.400.837,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	1 Dokumen	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	28.099.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	5 Dokumen	28.801.475,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	13.787.400,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	2 Dokumen	14.132.085,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	120.236.500,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	2 Laporan	123.242.412,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	47.476.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	3 Laporan	48.662.900,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	79.029.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	1 Laporan	81.004.725,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	74.599.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	2 Laporan	76.463.975,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	34.956.000,00	Kab. Bulukumba	DBH	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	1 Laporan	35.829.900,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	104.011.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	3 Dokumen	106.611.275,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	21.707.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	4 Laporan	22.249.675,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	94.687.000,00	Kab. Bulukumba	PAJAK ROKOK	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	4 Laporan	97.054.175,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	521 Orang	64.460.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Seluruh OPD dan UPT di Bidang Pendidikan (TK, SD dan SMP), Kesehatan(Puskesmas), Kelurahan Serta Pemerintah Desa	521 Orang	66.071.500,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULUKUMBA			**13.689.592.022,34**					**14.031.831.822,90**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**13.689.592.022,34**					**14.031.831.822,90**	
5.02	**KEUANGAN**			**13.689.592.022,34**					**14.031.831.822,90**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			10.795.309.322,34					11.065.192.055,40	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Pendapatan Daerah)**	**100%**	10.795.309.322,34	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.065.192.055,40	-
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai standar*	4 Dokumen	128.640.000,00			-	4 Dokumen	131.856.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60.295.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	2 Dokumen	61.802.580,00	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.860.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Dokumen	11.131.500,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.960.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Dokumen	10.209.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.270.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	7 Laporan	15.651.750,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	32.254.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	12 Laporan	33.061.170,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan adminstrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP)*	100 %	8.399.367.912,44			Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	100 %	8.609.352.110,25	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	8.330.788.712,44	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	39 Orang/bulan	8.539.058.430,25	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	22.235.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	12 Dokumen	22.791.080,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.830.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	12 Dokumen	29.550.750,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Laporan	6.150.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.214.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Laporan	4.319.350,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.300.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Dokumen	7.482.500,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang berstandar*	100 %	35.549.600,00			Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	100 %	36.438.340,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	34.549.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	12 Dokumen	35.413.340,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	5 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Pendapatan Daerah)**	**100%**	10.795.309.322,34	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.065.192.055,40	-
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	1.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	5 Orang	1.025.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	5 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Pendapatan Daerah)**	**100%**	10.795.309.322,34	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.065.192.055,40	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	448.529.600,00			-	100 %	459.742.840,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.563.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Paket	2.627.075,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Paket	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Pendapatan Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Pendapatan Daerah)**	**100%**	10.795.309.322,34	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.065.192.055,40	-
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.725.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Paket	2.793.945,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	105.477.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Paket	108.114.130,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	229.469.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	1 Paket	235.206.340,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	12 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.132.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	12 Laporan	27.810.300,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.162.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	-	12 Laporan	83.191.050,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase sarana dan prasarana kantor / barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	513.236.609,90			Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	100 %	526.067.525,15	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	180.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	184.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	4 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	18.240.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	10 Unit	18.696.000,00	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	310.927.509,90	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	5 Unit	318.700.697,65	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	4.069.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	9 Unit	4.170.827,50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	5 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase jasa administrasi perkantoran*	100 %	1.147.520.000,00			Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	100 %	1.176.208.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147.280.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	12 Laporan	150.962.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.240.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	12 Laporan	1.025.246.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya sarana dan prasarana kantor / pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	53 unit	122.465.600,00			Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	53 unit	125.527.240,00	Badan Pendapatan Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.555.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	43.619.490,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	54.700.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	52 Unit	56.067.500,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	3 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	25.210.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba	14 Unit	25.840.250,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			2.894.282.700,00					2.966.639.767,50	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**100%**	2.894.282.700,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.966.639.767,50	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase pengelolaan pendapatan daerah*	100 %	2.894.282.700,00			Kabupaten Bulukumba	100 %	2.966.639.767,50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	8.095.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	8.297.990,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	130.221.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	133.477.345,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	34 Laporan	150.665.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	34 Laporan	154.431.625,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	34 Unit	323.487.300,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	34 Unit	331.574.482,50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	34 Laporan	230.907.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	34 Laporan	236.679.675,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	34 Laporan	155.490.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	34 Laporan	159.377.660,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak	807.288.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Obyek Pajak	827.470.200,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	41.152.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Dokumen	42.181.620,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	254.820.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	2 Layanan	261.190.500,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	224.080.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	229.682.512,50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	123.183.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	126.263.497,50	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**100%**	2.894.282.700,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.966.639.767,50	-
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	392.890.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Dokumen	402.712.660,00	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	52.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH	Kabupaten Bulukumba	1 Laporan	53.300.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BULUKUMBA			**6.166.103.398,98**					**6.320.255.983,95**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**6.166.103.398,98**					**6.320.255.983,95**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**			**4.849.740.398,98**					**4.970.983.908,95**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.510.158.898,98					4.622.912.871,45	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**	**100%**	4.510.158.898,98	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.622.912.871,45	-
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu*	100 Persen	29.729.000,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	100 Persen	30.472.225,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.329.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	4 Dokumen	16.737.225,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	16 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	13.400.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Berita Acara	13.735.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	3.942.939.598,98			BKPSDM Kab. Bulukumba	100 Persen	4.041.513.088,95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.942.939.598,98	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	41 Orang/bulan	4.041.513.088,95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	-	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	41 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	150 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**	**100%**	4.510.158.898,98	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.622.912.871,45	-
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	221.909.400,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	100 Persen	227.457.135,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.177.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	3 Paket	94.481.835,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	5 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**	**100%**	4.510.158.898,98	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.622.912.871,45	-
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.732.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Laporan	132.975.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan.*	80 Persen	40.374.900,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	80 Persen	41.384.272,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	2 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	40.374.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	10 Unit	41.384.272,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	222.840.000,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	100 Persen	228.411.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	12 Laporan	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**	**100%**	4.510.158.898,98	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.622.912.871,45	-
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.400.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	12 Laporan	23.985.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	199.440.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	12 Laporan	204.426.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	80 Persen	52.366.000,00			BKPSDM Kab. Bulukumba	80 Persen	53.675.150,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.206.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Unit	20.711.150,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	28.630.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	11 Unit	29.345.750,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	24 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.530.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	10 Unit	3.618.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	BKPSDM Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			339.581.500,00					348.071.037,50	
	[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.**	**100%**	339.581.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	348.071.037,50	-
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Presentase hasil pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	100 Persen	51.684.000,00			ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	100 Persen	52.976.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	28.020.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	2 Dokumen	28.720.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	3 Dokumen	10.517.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	3 Dokumen	10.779.925,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	1 Lembaga	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	13.147.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN dan PPPK Lingkup Kab. Bulukumba	2 Laporan	13.475.675,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Presentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi Jabatan*	100 %	171.691.000,00			ASN Lingkup Kab. bulukumba.	100 %	175.983.275,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen	101.191.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. bulukumba.	5 Dokumen	103.720.775,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	59.940.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. bulukumba.	6 Dokumen	61.438.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	10.560.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. bulukumba.	4 Dokumen	10.824.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis*	50 %	0,00			ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	50 %	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	0 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.**	**100%**	339.581.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	348.071.037,50	-
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	1 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	5 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	0 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi.**	**100%**	339.581.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	348.071.037,50	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	100 Persen	116.206.500,00			ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	100 Persen	119.111.662,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	76.229.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	5 Dokumen	78.134.725,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	70 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	70 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	21.556.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	3 Laporan	22.095.412,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	7.980.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	1 Dokumen	8.179.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	10.441.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba.	1 Laporan	10.702.025,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**1.316.363.000,00**					**1.349.272.075,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			1.316.363.000,00					1.349.272.075,00	
	[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.]	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.**	**100%**	1.316.363.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.349.272.075,00	-
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase Aparatur sipil Negara Yang Mengikuti Diklat Pengembangan Komptensi Teknis / Fungsional.*	50 Persen	75.820.000,00			ASN Lingkup Kab. Bulukumba	50 Persen	77.715.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	75.820.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba	150 Orang	77.715.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Presentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi Manajerial.*	50 Persen	1.240.543.000,00			ASN Lingkup Kab. Bulukumba	50 Persen	1.271.556.575,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota									
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba	50 Orang	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.]	**Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis.**	**100%**	1.316.363.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.349.272.075,00	-
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	1.240.543.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	PAD,DBH DAU	ASN Lingkup Kab. Bulukumba	3 Laporan	1.271.556.575,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	INSPEKTORAT DAERAH KAB. BULUKUMBA			**18.439.422.087,00**					**18.900.407.639,18**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**18.439.422.087,00**					**18.900.407.639,18**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**18.439.422.087,00**					**18.900.407.639,18**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			9.840.667.087,00					10.086.683.764,18	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Inspektorat Daerah)**	**100%**	9.840.667.087,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	10.086.683.764,18	-
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan*	100 Persen	14.606.200,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	14.971.355,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	14.606.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	5 Dokumen	14.971.355,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	4 Laporan	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan perangkat daerah terkait ketersediaan gaji dan tunjangan*	100 Persen	6.139.430.992,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	6.292.916.766,80	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	6.122.886.792,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	63 Orang/bulan	6.275.958.961,80	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	2 Dokumen	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.746.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Laporan	5.890.265,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	17 Laporan	10.797.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	17 Laporan	11.067.540,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pengawasan*	100 Persen	578.994.000,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	593.468.850,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	578.994.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	54 Orang	593.468.850,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah*	100 Persen	549.090.100,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	562.817.352,50	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	380.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Paket	389.500,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Paket	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.751.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Paket	149.395.697,50	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.069.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Paket	61.570.930,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97 Laporan	342.889.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	97 Laporan	351.461.225,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya*	100 Persen	412.060.000,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	422.361.500,00	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	5 Unit	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	412.060.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	38 Unit	422.361.500,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	7 Unit	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penunjang dalam hal penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor*	100 Persen	1.705.527.400,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	1.748.165.585,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	867.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	12 Laporan	888.675.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	838.527.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	12 Laporan	859.490.585,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah dalam hal persentase penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan*	100 Persen	440.958.395,00			Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	451.982.354,88	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	15.375.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	85.000.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	15 Unit	87.125.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	340.958.395,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	18 Unit	349.482.354,88	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Inspektorat Daerah Kab. Bulukumba	1 Unit	0,00	Inspektorat Daerah
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			6.419.820.000,00					6.580.315.500,00	
	[menurunkan penyelewengan atau penyimpangan,baik yang bersifat angggaran ataupun proses dan kewenangan]	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan Internal (APIP) Persentase Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1**	**77.00 90.30 95**	6.419.820.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**77.00 90.30 95**	6.580.315.500,00	-
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase laporan pengawasan internal*	100 Persen	5.829.420.000,00			Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	5.975.155.500,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Laporan	1.284.600.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	31 Laporan	1.316.715.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	1.197.900.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	16 Laporan	1.227.847.500,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	26 Laporan	456.600.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	26 Laporan	468.015.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	699.880.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	19 Laporan	717.377.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	499.500.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	12 Laporan	511.987.500,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	189.294.000,00	Kab. Bulukumba	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	1 Kesepakatan	194.026.350,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30 Dokumen	1.501.646.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	30 Dokumen	1.539.187.150,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	100 Persen	590.400.000,00			Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	100 Persen	605.160.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	590.400.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	15 Laporan	605.160.000,00	Inspektorat Daerah
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			2.178.935.000,00					2.233.408.375,00	
	[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**	**0.95**	2.178.935.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**0.95**	2.233.408.375,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	2 Rekomend asi	153.710.000,00			Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	2 Rekomend asi	157.552.750,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomend asi	153.710.000,00	Kab. Bulukumba Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	2 Rekomend asi	157.552.750,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan*	100 persen	2.025.225.000,00			Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	100 persen	2.075.855.625,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 perangkat daerah	1.112.650.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	39 perangkat daerah	1.140.466.250,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 perangkat daerah	181.726.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	29 perangkat daerah	186.269.150,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	550.425.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DBH DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	3 Kegiatan	564.185.625,00	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 perangkat daerah	180.424.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Loka	DAU	Perangkat Daerah Kab. Bulukumba	39 perangkat daerah	184.934.600,00	Inspektorat Daerah
	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU			**13.803.653.889,44**					**14.148.745.236,68**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**13.803.653.889,44**					**14.148.745.236,68**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01	**KECAMATAN**			**13.803.653.889,44**					**14.148.745.236,68**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			11.611.823.889,44					11.902.119.486,68	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	11.611.823.889,44	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.902.119.486,68	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 Persen	7.565.673.589,44			-	100 Persen	7.754.815.429,18	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	7.565.673.589,44	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	-	12 Orang/bulan	7.754.815.429,18	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	-	12 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	11.611.823.889,44	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.902.119.486,68	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	484.881.900,00			Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	100 Persen	497.003.947,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	17.581.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Paket	18.021.447,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	111.368.400,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Paket	114.152.610,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.137.600,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Paket	48.316.040,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	92.900.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Laporan	95.222.500,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.894.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Laporan	221.291.350,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan.*	100 Persen	141.044.700,00			Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	100 Persen	144.570.817,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	29.412.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	30.147.300,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	111.632.700,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	114.423.517,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Persen	2.705.318.000,00			Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	100 Persen	2.772.950.950,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.450.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Laporan	7.636.250,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142.883.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Laporan	146.455.075,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.554.985.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Laporan	2.618.859.625,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	714.905.700,00			Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	100 Persen	732.778.342,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	572.770.900,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	587.090.172,50	Kantor Kecamatan Ujungbulu
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	11.611.823.889,44	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	11.902.119.486,68	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	64.030.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	65.630.750,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	78.104.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	80.057.420,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			2.191.830.000,00					2.246.625.750,00	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	2.191.830.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.246.625.750,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 persen	2.191.830.000,00			Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	100 persen	2.246.625.750,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	40.380.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Unit	41.389.500,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.151.450.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan Ujung Bulu dan Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.205.236.250,00	Kantor Kecamatan Ujungbulu
	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE			**2.912.879.488,64**					**2.985.701.475,86**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.912.879.488,64**					**2.985.701.475,86**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.912.879.488,64**					**2.985.701.475,86**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.663.306.288,64					2.729.888.945,86	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.663.306.288,64	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.729.888.945,86	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	2.289.507.172,64			Ujung Loe	100 Persen	2.346.744.851,96	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.289.507.172,64	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	PAD,DAU	Ujung Loe	12 Orang/bulan	2.346.744.851,96	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	134.314.500,00			Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	100 persen	137.672.362,50	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 unit Paket	32.538.700,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	6 unit Paket	33.352.167,50	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.912.900,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	1 Paket	6.060.722,50	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan Paket	23.621.300,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	12 bulan Paket	24.211.832,50	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.298.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	1 Paket	4.405.450,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan Laporan	24.683.600,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	12 bulan Laporan	25.300.690,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	43.260.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	12 bulan Laporan	44.341.500,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan.*	100 persen	11.742.000,00			Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	100 persen	12.035.550,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	11.742.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	8 Unit	12.035.550,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 persen	185.912.616,00			Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	100 persen	190.560.431,40	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.917.616,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	12 Laporan	28.615.556,40	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	5 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.663.306.288,64	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.729.888.945,86	-
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.995.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	12 Laporan	161.944.875,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 persen	41.830.000,00			Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	100 persen	42.875.750,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	1 Unit	17.425.000,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	6.600.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	5 Unit	6.765.000,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	18.230.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	10 Unit	18.685.750,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			0,00						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase laporan terkait urusan yang tidak terlaksana dan tercapainya urusan pemerintahan yang harusnya dilaksanakan.*	100 persen	0,00			Ujung Loe	100 persen	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta									
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Ujung Loe	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			249.573.200,00					255.812.530,00	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	249.573.200,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	255.812.530,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 persen	249.573.200,00			Ujung Loe	100 persen	255.812.530,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga K emasyarakat an	20.373.200,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DBH DAU	Ujung Loe	1 Lembaga K emasyarakat an	20.882.530,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU, DAU	Ujung Loe	13 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	229.200.000,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	PAD,DAU	Ujung Loe	1 Pokmas / Ormas	234.930.000,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			0,00						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah desa yang melakukan koordinasi dan asisensi APBDesa di Kecamatan*	100 persen	0,00			Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	100 persen	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa									
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Ujungloe, Dannuang	DAU	Kecamatan Ujung Loe dan Kelurahan	2 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Ujung Loe
	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA			**4.773.913.577,10**					**4.893.261.416,53**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.773.913.577,10**					**4.893.261.416,53**	
7.01	**KECAMATAN**			**4.773.913.577,10**					**4.893.261.416,53**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.093.038.777,10					4.195.364.746,53	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	4.093.038.777,10	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.195.364.746,53	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 %	3.205.715.297,10			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	3.285.858.179,53	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 0	3.205.715.297,10	Kab. Bulukumba	PAD,DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	0 0	3.285.858.179,53	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	12 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 %	0,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	0,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	2 Orang	0,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	109.996.800,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	112.746.720,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.832.800,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Paket	3.928.620,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.505.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Paket	4.617.625,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.460.100,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Paket	3.546.602,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.480.100,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Paket	33.292.102,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.387.600,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Paket	4.497.290,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.861.200,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	12 Laporan	36.757.730,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	25.470.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	300 Laporan	26.106.750,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan.*	100 %	39.214.500,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	40.194.862,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	14.820.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	19 Unit	15.190.500,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	24.394.500,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Unit	25.004.362,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	697.127.180,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	714.555.359,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.272.180,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	12 Laporan	33.078.984,50	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	2 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	664.855.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	12 Laporan	681.476.375,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 %	40.985.000,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	42.009.625,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	16.565.400,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	2 Unit	16.979.535,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.360.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	12 Unit	8.569.000,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	16.059.600,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	4 Unit	16.461.090,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			680.874.800,00					697.896.670,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	680.874.800,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	697.896.670,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 %	680.874.800,00			Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	100 %	697.896.670,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	480.375.000,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	6 Unit	492.384.375,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	200.499.800,00	Kab. Bulukumba, Bulukumpa, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Bulukumpa dan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	205.512.295,00	Kantor Kecamatan Bulukumpa
	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE			**3.294.536.610,00**					**3.376.900.025,25**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.294.536.610,00**					**3.376.900.025,25**	
7.01	**KECAMATAN**			**3.294.536.610,00**					**3.376.900.025,25**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.013.936.610,00					3.089.285.025,25	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	3.013.936.610,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	3.089.285.025,25	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 %	2.683.038.846,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	2.750.114.817,15	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	2.681.013.846,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	29 Orang/bulan	2.748.039.192,15	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	12 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.025.000,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	1 Laporan	2.075.625,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 %	30.261.000,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	31.017.525,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 0	30.261.000,00	Kab. Bulukumba	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	0 0	31.017.525,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	83.550.600,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	85.639.365,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	2.876.600,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	18 Paket	2.948.515,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	20.966.800,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	15 Paket	21.490.970,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.970.200,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	2 Paket	2.019.455,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	24.900.000,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	10 Laporan	25.522.500,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341 Laporan	32.837.000,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	341 Laporan	33.657.925,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan*	100 %	8.621.900,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	8.837.447,50	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	3 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	3 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.621.900,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	2 Unit	8.837.447,50	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	190.630.864,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	195.396.635,60	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.815.864,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	12 Laporan	15.186.260,60	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	12 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	175.815.000,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	12 Laporan	180.210.375,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 %	17.833.400,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	18.279.235,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.773.400,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	2 Unit	14.117.735,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.060.000,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	10 Unit	4.161.500,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			0,00						
	[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik]	**Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar Prosedur**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan yang dilimpahkan Kepada camat*	2 Laporan	0,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	2 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	2 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			280.600.000,00					287.615.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	280.600.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	287.615.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 %	280.600.000,00			Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	100 %	287.615.000,00	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	112.082.700,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU, DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	5 Unit	114.884.767,50	Kantor Kecamatan Rilau Ale
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	168.517.300,00	Kab. Bulukumba, Rilauale, Semua Kel/Desa	DAU, DAU	Kantor Kecamatan Kab.Bulukumba	6 Pokmas / Ormas	172.730.232,50	Kantor Kecamatan Rilau Ale
	KANTOR KECAMATAN GANTARANG			**5.739.263.655,08**					**5.882.745.246,46**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**5.739.263.655,08**					**5.882.745.246,46**	
7.01	**KECAMATAN**			**5.739.263.655,08**					**5.882.745.246,46**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.646.663.655,08					4.762.830.246,46	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	4.646.663.655,08	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.762.830.246,46	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu*	100 Persen	4.043.448.231,08			-	100 Persen	4.144.534.436,86	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	4.041.593.231,08	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	50 Orang/bulan	4.142.633.061,86	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.855.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	12 Dokumen	1.901.375,00	Kantor Kecamatan Gantarang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	1 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	4.646.663.655,08	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.762.830.246,46	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN*	100 Persen	0,00			-	100 Persen	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	1 Orang	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pesentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor*	100 Persen	152.956.600,00			-	100 Persen	156.780.515,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	8.771.900,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	22 Paket	8.991.197,50	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket	98.555.100,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	27 Paket	101.018.977,50	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	12.639.600,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	17 Paket	12.955.590,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	32.990.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	70 Laporan	33.814.750,00	Kantor Kecamatan Gantarang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Persen	12.540.000,00			-	100 Persen	12.853.500,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	4.646.663.655,08	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.762.830.246,46	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8.550.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	8 Unit	8.763.750,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.990.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	5 Unit	4.089.750,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	3 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*% Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang*	100 Persen	300.007.824,00			-	100 Persen	307.508.019,60	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.007.824,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	12 Laporan	39.983.019,60	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	261.000.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	12 Laporan	267.525.000,00	Kantor Kecamatan Gantarang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik*	100 Persen	137.711.000,00			-	100 Persen	141.153.775,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	136.981.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	2 Unit	140.405.525,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	730.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	6 Unit	748.250,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			0,00						
	[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik]	**Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai dengan standar Prosedur**	**100%**	0,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**		-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*% Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 Persen	0,00			-	100 Persen	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	2 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			1.092.600.000,00					1.119.915.000,00	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	1.092.600.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.119.915.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 Persen	1.092.600.000,00			-	100 Persen	1.119.915.000,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	600.000.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	21 Unit	615.000.000,00	Kantor Kecamatan Gantarang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	492.600.000,00	Kab. Bulukumba, Gantorang, Semua Kel/Desa	DAU	-	8 Pokmas / Ormas	504.915.000,00	Kantor Kecamatan Gantarang
	KANTOR KECAMATAN KINDANG			**2.586.695.837,30**					**2.651.363.233,23**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.586.695.837,30**					**2.651.363.233,23**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.586.695.837,30**					**2.651.363.233,23**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.256.729.535,00					2.313.147.773,38	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.256.729.535,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.313.147.773,38	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.036.710.843,00			-	-	2.087.628.614,08	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.036.710.843,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	20 Orang/bulan	2.087.628.614,08	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	60 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	5 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Laporan 12 Paket 12 Paket	78.561.492,00			BULUKUMBA	1 Laporan 12 Paket 12 Paket	80.525.529,30	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	12 Paket	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.256.729.535,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.313.147.773,38	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.494.272,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	12 Paket	64.056.628,80	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.592.220,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	12 Paket	2.657.025,50	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	60 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.256.729.535,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.313.147.773,38	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	13.475.000,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	60 Laporan	13.811.875,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00			-	-	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	1 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	4 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	12 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	-	2 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan 12 Laporan	105.776.000,00			BULUKUMBA	12 Laporan 12 Laporan	108.420.400,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.380.000,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	12 Laporan	16.789.500,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	89.396.000,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	12 Laporan	91.630.900,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	6 Unit	35.681.200,00			BULUKUMBA	6 Unit	36.573.230,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	35.681.200,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	8 Unit	36.573.230,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	BULUKUMBA	10 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			329.966.302,30					338.215.459,86	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	329.966.302,30	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	338.215.459,86	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	12 Pokmas/ Ormas 2 Paket	329.966.302,30			KELURAHAN	12 Pokmas/ Ormas 2 Paket	338.215.459,86	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	200.000.002,30	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	KELURAHAN	2 Unit	205.000.002,36	Kantor Kecamatan Kindang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	129.966.300,00	Kab. Bulukumba, Kindang, Semua Kel/Desa	PAD	KELURAHAN	12 Pokmas / Ormas	133.215.457,50	Kantor Kecamatan Kindang
	KANTOR KECAMATAN HERLANG			**2.940.174.236,52**					**3.013.678.592,43**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.940.174.236,52**					**3.013.678.592,43**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.940.174.236,52**					**3.013.678.592,43**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.242.777.336,52					2.298.846.769,93	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	2.242.777.336,52	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.298.846.769,93	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah*	100 %	1.989.176.886,52			KANTOR KECAMATAN HERLANG	100 %	2.038.906.308,68	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	1.989.176.886,52	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	PAD	KANTOR KECAMATAN HERLANG	24 Orang/bulan	2.038.906.308,68	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KANTOR KECAMATAN HERLANG	12 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %	0,00			KECAMATAN HERLANG	100 %	0,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	2 Orang	0,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	110.881.600,00			KECAMATAN HERLANG	100 %	113.653.640,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	50.783.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	100 Paket	52.052.575,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	2.547.600,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	100 Paket	2.611.290,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.551.000,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	12 Laporan	58.989.775,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	3.420.000,00			-	100 %	3.505.500,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	3.420.000,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	-	4 Unit	3.505.500,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah*	100 %	113.088.750,00			KANTOR KECAMATAN HERLANG	100 %	115.915.968,75	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.488.750,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KANTOR KECAMATAN HERLANG	12 Laporan	16.900.968,75	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KANTOR KECAMATAN HERLANG	12 Laporan	0,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	96.600.000,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KANTOR KECAMATAN HERLANG	0 Laporan	99.015.000,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan*	100 %	26.210.100,00			KECAMATAN HERLANG	100 %	26.865.352,50	Kantor Kecamatan Herlang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16.060.100,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	3 Unit	16.461.602,50	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.150.000,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	3 Unit	10.403.750,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			697.396.900,00					714.831.822,50	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	697.396.900,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	714.831.822,50	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 %	697.396.900,00			KECAMATAN HERLANG	100 %	714.831.822,50	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	238.000.000,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	4 Unit	243.950.000,00	Kantor Kecamatan Herlang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	459.396.900,00	Kab. Bulukumba, Herlang, Semua Kel/Desa	DAU	KECAMATAN HERLANG	120 Pokmas / Ormas	470.881.822,50	Kantor Kecamatan Herlang
	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO			**2.837.741.807,00**					**2.908.685.352,18**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.837.741.807,00**					**2.908.685.352,18**	
7.01	**KECAMATAN**			**2.837.741.807,00**					**2.908.685.352,18**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.413.389.307,00					2.473.724.039,68	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**100%**	2.413.389.307,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.473.724.039,68	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	2.014.525.472,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	2.064.888.608,80	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.014.525.472,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	25 Orang/bulan	2.064.888.608,80	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	12 Dokumen	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %	0,00			-	100 %	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	-	1 Orang	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	128.532.800,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	131.746.120,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	24.198.300,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD,DBH	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	25 Paket	24.803.257,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	4.272.500,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	25 Paket	4.379.312,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	50.000.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	25 Laporan	51.250.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	50.062.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	150 Laporan	51.313.550,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	44.958.000,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	46.081.950,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	15 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	44.958.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 Unit	46.081.950,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	5 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah*	100 %	166.024.535,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	170.175.148,38	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.024.535,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	36 Laporan	22.575.148,38	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	144.000.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	PAD,DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	50 Laporan	147.600.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah untuk mendukung urusan pemerintahan*	100 %	59.348.500,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	60.832.212,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.064.200,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	7 Unit	46.190.805,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.210.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	10 Unit	3.290.250,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.074.300,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Semua Kel/Desa	DBH	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	2 Unit	11.351.157,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			424.352.500,00					434.961.312,50	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	424.352.500,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	434.961.312,50	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %	424.352.500,00			Kantor Kecamatan dan Kelurahan	100 %	434.961.312,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	103.990.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	PAD,DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Unit	106.589.750,00	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	320.362.500,00	Kab. Bulukumba, Bonto Tiro, Eka Tiro	PAD,DAU, DAU	Kantor Kecamatan dan Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	328.371.562,50	Kantor Kecamatan Bonto Tiro
	KANTOR KECAMATAN BONTO BAHARI			**5.684.199.538,62**					**5.826.304.527,09**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**5.684.199.538,62**					**5.826.304.527,09**	
7.01	**KECAMATAN**			**5.684.199.538,62**					**5.826.304.527,09**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			4.560.319.538,62					4.674.327.527,09	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	4.560.319.538,62	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	4.674.327.527,09	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*12 Bulan dan 43 ASN Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu* *Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium PNS Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun*	12 Bulan 100 Persen 100 Persen	4.117.996.330,62			ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	12 Bulan 100 Persen 100 Persen	4.220.946.238,89	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.117.996.330,62	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	41 Orang/bulan	4.220.946.238,89	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kecamatan bonto bahari Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 % 100 Persen	0,00			ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	100 % 100 Persen	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	2 Orang	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Rapat Rapat Konsultasi dan Koordinasi*	100 persen	133.440.000,00			ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	100 persen	136.776.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	76.807.600,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	600 Paket	78.727.790,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16071 Paket	9.632.400,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	16071 Paket	9.873.210,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	47.000.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	300 Laporan	48.175.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*10 Unit* *Persentase Barang Milik Negara yang disediakan. Persentase Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebeler Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100 Persen 100 Persen 100 Persen	0,00			ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	100 Persen 100 Persen 100 Persen	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	3 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	3 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*12 Laporan Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terbayarnya Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor*	12 Bulan 100 persen 12 Bulan	286.874.808,00			ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	12 Bulan 100 persen 12 Bulan	294.046.678,20	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50584952 Laporan	49.754.808,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	50584952 Laporan	50.998.678,20	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 0	237.120.000,00	Kab. Bulukumba	PAD	ASN Kantor Kecamatan Bontobahari	0 0	243.048.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	100 Persen	22.008.400,00			ASN KANTOR KECAMATAN BONTOBAHARI	100 Persen 100 Persen 100 Persen	22.558.610,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.428.400,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN KANTOR KECAMATAN BONTOBAHARI	5 Unit	15.814.110,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN KANTOR KECAMATAN BONTOBAHARI	5 Unit	0,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	6.580.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	ASN KANTOR KECAMATAN BONTOBAHARI	26 Unit	6.744.500,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			1.123.880.000,00					1.151.977.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	1.123.880.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.151.977.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Bertambahnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	100 Persen 100 Persen	1.123.880.000,00			Masyarakat Kelurahann	100 Persen 100 Persen	1.151.977.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	652.880.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Kelurahann	6 Unit	669.202.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	129 Pokmas / Ormas	471.000.000,00	Kab. Bulukumba, Bonto Bahari, Semua Kel/Desa	PAD	Masyarakat Kelurahann	129 Pokmas / Ormas	482.775.000,00	Kantor Kecamatan Bonto Bahari
	KANTOR KECAMATAN KAJANG			**4.045.685.385,00**					**6.971.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**4.045.685.385,00**					**6.971.000.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**4.045.685.385,00**					**6.971.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			3.295.668.085,00					5.271.000.000,00	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	3.295.668.085,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.271.000.000,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pesentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu*	100 %	3.144.600.985,00			-	100 %	4.200.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.066.600.985,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	14 Orang/bulan	3.600.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	3 Dokumen	600.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 %	0,00			Pegawai Kantor Camat Kajang	100 %	75.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Pegawai Kantor Camat Kajang	0 Orang	75.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %	108.020.000,00			Kecamatan dan Kelurahan	100 %	396.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan dan Kelurahan	1 Paket	35.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.285.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan dan Kelurahan	3 Paket	110.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan dan Kelurahan	3 Paket	11.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	42.450.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	110.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	45.285.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	130.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Negara yang disediakan*	100 %	7.231.000,00			-	100 %	380.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	3 Unit	110.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	3.295.668.085,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.271.000.000,00	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	7.231.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	20 Unit	110.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	10 Unit	160.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	3.295.668.085,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	5.271.000.000,00	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 %	13.116.000,00			-	100 %	35.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13.116.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	3 Laporan	35.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	1 Tahun	22.700.100,00			-	1 Tahun	185.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	22.700.100,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	13 Unit	55.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	20 Unit	55.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	-	3 Unit	75.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			750.017.300,00					1.700.000.000,00	
	[Meningkatnya Peran Serta Masyarakat]	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	750.017.300,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.700.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana*	1 Tahun	750.017.300,00			Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1.700.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	400.000.000,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Kelurahan	10 Unit	900.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	70 Pokmas / Ormas	350.017.300,00	Kab. Bulukumba, Kajang, Semua Kel/Desa	DAU	Masyarakat Kelurahan	70 Pokmas / Ormas	800.000.000,00	Kantor Kecamatan Kajang
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**4.671.794.305,88**					**4.545.841.526,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**4.671.794.305,88**					**4.545.841.526,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**4.671.794.305,88**					**4.545.841.526,00**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			2.063.758.205,88					2.532.291.526,00	
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kesatuan Bangsa dan politik)**	**100%**	2.063.758.205,88	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.532.291.526,00	-
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*	1 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	30.412.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	46.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20.777.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Dokumen	33.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.545.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.545.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.272.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.272.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1 Dokumen 18 Laporan 17 Orang/bulan	1.810.067.805,88			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen 18 Laporan 17 Orang/bulan	2.213.698.526,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 0	1.804.788.505,88	Kab. Bulukumba	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 0	2.207.098.526,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.612.100,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.667.200,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18 Laporan	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.840.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Laporan	11.693.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.840.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	11.693.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1 Orang	0,00			ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Orang	18.480.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Orang	18.480.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	[Tersedianya Layanan Perangkat Daerah untuk Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)]	**Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi (Badan Kesatuan Bangsa dan politik)**	**100%**	2.063.758.205,88	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	2.532.291.526,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah*	12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	87.616.600,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	95.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	465.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	1.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	199.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	1.650.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.012.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	13.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.618.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	5.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.849.500,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	18.700.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.471.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	3 Unit	0,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Unit	14.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	11.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	3.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	88.080.000,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	97.020.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	88.080.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	97.020.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	9 Unit 1 Unit 1 Unit	45.741.800,00			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9 Unit 1 Unit 1 Unit	35.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.591.800,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	16.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8 Unit	16.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.150.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10 Unit	2.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			760.147.100,00					577.500.000,00	
	[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan]	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	760.147.100,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	577.500.000,00	-
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila*	50 Orang 72 Orang 100 Orang	760.147.100,00			Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	50 Orang 72 Orang 100 Orang	577.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	10.150.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	50 Orang	27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka									
		Jumlah Paskibraka	72 0	749.997.100,00	Kab. Bulukumba	DAU	Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	72 0	550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			1.206.250.000,00					1.100.000.000,00	
	[Meningkatnya etika dan Budaya Politik]	**persentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula**	**100%**	1.206.250.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	1.100.000.000,00	-
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	100 Orang	1.206.250.000,00			Partai Politik, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	100 Orang	1.100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	1.206.250.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Partai Politik, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	100 Orang	1.100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			150.415.000,00					61.050.000,00	
	[Meningkatnya Ketertiban Organisasi kemasyarakatan]	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**100%**	150.415.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	61.050.000,00	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	100 Orang	150.415.000,00			Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Yayasan	100 Orang	61.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	150.415.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Yayasan	50 Orang	61.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			305.000.000,00					110.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	[Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya masyarakat]	**Persentase kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat kepercayaan di daerah yang di laksanakan**	**100%**	305.000.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	110.000.000,00	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	100 Orang	305.000.000,00			Tokoh Agama, Stakeholder, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	100 Orang	110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	305.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Tokoh Agama, Stakeholder, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar	100 Orang	110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			186.224.000,00					165.000.000,00	
	[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	**Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan**	**100%**	186.224.000,00	Kab. Bulukumba	-	-	**100%**	165.000.000,00	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	100 Orang	186.224.000,00			Forkopimda, Stakeholder dan Masyarakat	100 Orang	165.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	36.224.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Forkopimda, Stakeholder dan Masyarakat	100 Orang	55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Bulukumba, Ujung Bulu, Bentengnge	DAU	Forkopimda, Stakeholder dan Masyarakat	1 Dokumen	110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
J U M L A H				**1.640.704.706.957,00**					**1.681.722.324.631,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), SPM dan TPB.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja daerah dituangkan dalambentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuanuntuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembanguan merupakan Indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan.

Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. PDRB Perkapita ADHB
6. Rasio Gini
7. Penurunan Emisi GRK

Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel VI-1
Target Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2024	Asumsi 2025	Target RKPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,43	74,88	75,43
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,71	6,15-5,56	5,73-4,83
	Jumlah Orang Miskin		28.600	26.213	24.423

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian 2024	Asumsi 2025	Target RKPD 2026
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,23	2,14	2,05
	Jumlah Pengangguran		5.718	5.487	5.256
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,60	4,81	5,51
5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	44,48	46,62	49,19
6	Gini Ratio	Angka	0,329	0,323	0,316
7	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	24,93	35,86	38,13
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,53	70,29	70,46
9	Kontribusi PDRB terhadap provinsi	Persen	2,90	2,91	2,94

Sumber : BPS, RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba Tahun 2025-2029, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bulukumba Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,43	74,88	75,43
2	Indeks Kesehatan	83,35	83,92	84,56
3	Indeks Pendidikan	65,76	66,37	67,10
4	Indeks Kerukunan Umat Beragama		75,78	79,62
5	Indeks zakat nasional	0,76	0,77	0,78
6	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	26,74	31,75	35,51
7	Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan	34,78	37,30	41,01
8	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,85	62,35	62,85
9	Indeks Ketimpangan Gender	0,356	0,236	0,228
10	Indeks Pembangunan Pemuda		56,90	56,92
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6	4,81	5,51
12	Rasio Gini	0,329	0,323	0,316
13	PDRB PerKapita	44,48	46,62	49,19
14	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3,19	3,25	3,32
15	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	7,14	7,17	7,19
16	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	6,03	6,06	6,08
17	Persentase Wisatawan Mancanegara	0,505	0,594	0,714
18	Persentase Koperasi Sehat	19,8	20,67	21,53
19	Rasio PDRB Industri Pengolahan	6,54	6,61	6,64
20	Pertumbuhan Investasi Daerah	118,22	1,748	1,902
21	Indeks Ketahanan Pangan	83,73	91,21	92,55
22	Tingkat Kemiskinan	6,71	6,15-5,56	5,73-4,83
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,23	2,14	2,05
24	Indeks Kemandirian Fiskal	13,38	17,60	17,59

No.	Indikator	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
25	Indeks Akses Keuangan Daerah	4,43	4,48	4,50
26	Persentase Desa Mandiri	54,13	57,43	60,09
27	Indeks Reformasi Birokrasi	71,04	73,01	74,89
28	Nilai SAKIP	61,89	62,05	62,41
29	Indeks Pelayanan Publik	3,36	3,96	4,06
30	Indeks SPBE	2,56	2,57	2,73
31	Indeks Inovasi Daerah	47,23	47,94	48,24
32	Indeks Daya Saing Daerah	3,47	3,64	3,67
33	Indeks Layanan Infrastruktur	3,61	3,67	3,74
34	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,53	70,29	70,46
35	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	24,93	35,68	38,06
36	Indeks Risiko Bencana	145,58	137,48	128,67

Sumber : BPS, RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba Tahun 2025-2029, diolah

6.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masajabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
I.a	**Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**					
◦	Indeks Ketahanan pangan	Angka	83,73	84,15	84,5	
◦	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU)	Persen	9,6	9,3	9	
◦	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	89,92	89,67	90,19	
◦	Konsumsi Listrik Per Kapita	KWh/kapita	458,98	694,06	807,53	
◦	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,0225	0,0248	0,0248	
◦	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	Persen	1	15,57	16,04	
I.b	**Lingkungan Hidup Berkualitas**					
◦	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	63,53	70,29	70,46	
◦	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati	Persen	0,45	1,98	2,02	
◦	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Angka	99,99	99,9	99,89	
◦	Proporsi Sawah Irigasi	Persen	99,23	97,83	99,41	
◦	Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak	Ton	5.791,64	5.821,80	5.916,82	
◦	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/thn	54,05	55,13	56,23	
◦	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,93	3,13	3,84	
◦	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	14,46	28,12	30,16	
◦	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	2,25	11,93	21,64	
I.c	**Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**					
◦	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	24,93	35,68	38,06	
◦	Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan	Persen	1,08	1,14	1,19	
◦	Indeks Risiko Bencana	Angka	145,58	137,48	128,67	
I.d	**Demografi**					
◦	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,17	1,97	1,77	
◦	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	Persen	95,6	95,68	95,68	
◦	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	409	406	408	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
II.a	**Kesejahteraan Ekonomi**					
◦	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,6	4,81	5,51	
◦	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,71	6,15-5,56	5,73-4,83	
◦	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	44,48	46,62	49,19	
◦	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	Persen	3,19	3,25	3,32	
◦	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	Persen	7,14	3,6	3,8	
◦	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	6,03	6,06	6,08	
◦	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,23	2,14	2,05	
◦	Rasio Gini	Angka	0,329	0,323	0,316	
◦	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,43	74,88	75,43	
II.b	**Kesehatan untuk Semua**					
◦	Indeks Kesehatan	Angka	83,35	83,92	84,56	
◦	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,56	74,85	
◦	Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	70,62	79,39	80,12	
◦	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	5	8	8	
◦	Prevalensi Stunting	Persen	25,2	22,96	20,72	
◦	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	45	56,93	60,93	
◦	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	60,12	89,12	89,93	
◦	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	97,09	97,59	98	
II.c	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**					
◦	Indeks Pendidikan	Angka	65,76	66,37	67,1	
◦	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52	8,59	8,79	
◦	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45	13,81	14,01	
◦	Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa					
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Literasi	Persen	60,12	68,92	77,52	
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Numerasi	Persen	55,21	68,16	82,15	
◦	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
	SD	%	57,16			
	SMP	%	63,08			
◦	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan Numerasi					
	SD	%	52,6			
	SMP	%	57,81			
◦	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	13,03	13,46	14,67	
◦	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Persen	67,66	68,63	70,22	
◦	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	88,32	87,26	87,52	
II.d	**Perlindungan Sosial Adaptif**					
◦	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	13,61	14,49	17,08	
◦	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,12	0,15	0,16	
II.e	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**					
◦	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	75,78	79,62	
◦	Indeks zakat nasional	Angka	0,76	0,77	0,78	
◦	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	Persen	31,62	37,34	39,48	
◦	Jumlah Penerima Manfaat Penyaluran Dana Baznas	Orang	11.399	12.399	13.399	
◦	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	26,74	31,75	35,51	
◦	Persentase Komunitas/Pelaku Budaya yang Berpartisipasi Aktif pada Festival Kebudayaan	Persen	34,78	37,3	41,01	
II.f	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**					
◦	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	61,85	62,35	62,85	
◦	Indeks Perlindungan Anak	Angka	Belum rilis	61,82	63,17	
◦	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Belum rilis	56,9	56,92	
◦	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,356	0,236	0,228	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
III.a	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**					
◦	Angka Ketergantungan	Persen	44,56	45,1	45,15	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
III.b	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**					
◦	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	6,54	6,61	6,64	
◦	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,83	0,87	0,92	
◦	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Jiwa	566.886	669.027	737.829	
◦	Persentase Wisatawan Mancanegara	Persen	0,505	0,594	0,714	
◦	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Industri	1.169	1908	1925	
◦	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	Persen	169	283	337	
◦	Persentase Koperasi Sehat	Persen	19,8	20,67	21,53	
◦	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	5,28	5,87	6,46	
◦	Produktivitas Pertanian					
	Padi	Ton/Ha	6,4	6,41	6,43	
	Jagung	Ton/Ha	5,66	5,67	5,68	
◦	Produktivitas Perkebunan	Ton	10.239	10.495	10.789	
◦	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	13.474,24	13.743,73	14.018,60	
◦	Jumlah Produksi Daging	Ton	2.853,01	3.007,56	3.172,19	
◦	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	281.453,53	290.942,71	300.793,77	
◦	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,39	72,51	73,86	
◦	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	60,79	60,31	62,14	
◦	Indeks Inovasi Daerah	Angka	47,23	47,94	48,24	
◦	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Angka	2,31	2,54	2,6	
◦	Proporsi Anggaran Riset pada APBD	Persen	0,092	0,106	0,13	
III.c	**Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**					
◦	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	0	17,63	17,93	
◦	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Angka		84,13	93,14	
III.d	**Transformasi Digital**					
◦	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Angka	100	100	100	
III.e	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**					
◦	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	Persen	1,43	1,06	0,66	
◦	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	27,75	28,65	28,87	
◦	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-4,63	-2,12	-1,76	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
◦	Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi	Persen	2,9	2,89	2,89	
III.f	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**					
◦	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	0	70,09	71,31	
◦	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	3,61	3,67	3,74	
◦	Persentase Desa Mandiri	Persen	54,13	57,43	60,09	
III.g	**Stabilitas Ekonomi Makro**					
◦	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,22	0,61	0,76	
◦	Rasio Pajak dan Retribusi terhadap APBD	Persen	3,62	3,64	3,51	
◦	Laju Inflasi	Persen	0,91	1,97	1,75	
◦	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	118,22	1,748	1,902	
◦	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	Belum rilis	90,63	98,81	
◦	Indeks Kemandirian Fiskal	Angka	13,38	17,6	17,59	
◦	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	4,43	4,48	4,5	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
IV.a	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**					
◦	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71,04	73,01	74,89	
◦	Nilai SAKIP	Angka	61,89	62,05	62,41	
◦	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,22	97,42	97,62	
◦	Indeks SPBE	Angka	2,56	2,57	2,73	
◦	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,36	3,5	3,7	
◦	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Angka	87,07	87,95	88,47	
◦	Indeks Survey Penilaian Integritas	Angka	69,97	71,25	71,45	
◦	Nilai MCP KPK	Angka	68	68	70	
◦	Indeks Maturitas SPIP	Angka	3,011	3,236	3,285	
IV.b	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**					
◦	Persentase Penegakan Hukum Perda	Persen	100	100	100	
◦	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	Persen	#DIV/0!	88,92	89,86	
◦	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	Persen	22,5	22,5	22,5	
◦	Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif DPRD	Perda	3	3	3	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
◦	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	Persen	14,45	30	30	
IV.c	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**					
◦	Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota	Kerja Sama	7 Kerja sama	13	13	
◦	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,47	3,64	3,67	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
A	***Pendidikan***					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	98,77	99,02	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,69	99,5	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	98,64	98,89	99,13	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	81,97	90,87	91,1	
B	***Kesehatan***					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	1,27	1,27	1,28	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	90,82	98,41	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,43	90,66	90,88	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang	%	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	51,76	90,58	90,8	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	
C	***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	15,6	16,2	17	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	13,3	29,01	29,08	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	87,14	87,36	87,58	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86,01	86,04	86,12	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	83,82	83,9	84	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	49,2	53	55	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	87,72	87,94	88,16	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	
D	***Perumahan Rakyat***					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	14,81	14,85	14,88	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,81	7,15	7,17	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	
E	***Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persen	12,11	12,14	12,17	
F	***Sosial***					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
A	***Tenaga Kerja***					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	2,78	54,12	54,25	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	39,65	43,34	43,45	

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100	100	100	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	15,8	60	60,15	
B	***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***					
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	1,68	5,83	5,85	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,22	2,55	2,56	
C	***Pangan***					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	187,28	100	100	
D	***Pertanahan***					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	101,93	100	100	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	99,35	99,6	100	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	100	100	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	
E	***Lingkungan Hidup***					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	63,53	65,63	65,8	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	68,27	81,18	81,38	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	31,25	35,9	35,99	
F	***Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
1	Perekaman KTP elektronik	%	97,17	100	100	
2	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	%	45,65	50	50	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	94,13	100	100	
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	15,38	5,13	5,13	
G	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***					
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	76,47	76,66	76,85	
H	***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	0,75	2,09	2,1	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,21	68,22	68,39	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,32	10,6	10,1	
4	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-16	%	45,7	61	61,6	
5	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%		9,75	9,45	
6	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka		64,2	64,7	
I	***Perhubungan***					
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	100	100	100	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,19	0,17	0,17	
J	***Komunikasi dan Informatika***					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	
K	***Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah***					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	20,3	40,9	41	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	16,06	68,03	68,2	
L	***Penanaman Modal***					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	118,22	100	100	
M	***Kepemudaan dan Olahraga***					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3,33	4,32	4,33	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	18,74	62,89	63,05	
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	21	21,05	21,11	
N	***Statistik***					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	
O	***Persandian***					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50,85	50,98	51,1	
P	***Kebudayaan***					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	
Q	***Perpustakaan***					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	69,62	69,81	69,84	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	88,32	88,34	88,36	
R	***Kearsipan***					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	9,98	10,23	10,41	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	1	45,83	50	
	Urusan Pilihan					
A	***Kelautan dan Perikanan***					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	281.453,50	290.942,71	300.793,77	
B	***Pariwisata***					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,31	2,53	2,54	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,03	0,18	0,18	
3	Tingkat hunian akomodasi	%	46,17	71,45	71,63	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,83	0,83	0,83	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,3	21,38	21,43	
C	***Pertanian***					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6,76	6,78	6,79	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22,49	22,15	21,4	
F	***Perdagangan***					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	90	97,86	98,1	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91,99	100	100	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	29,88	29,06	29,14	
G	***Perindustrian***					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	-37,55	33,36	33,44	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	22,77	52,66	52,79	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	61	23,26	23,32	
7	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**					
A	***Perencanaan dan Keuangan***					

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026	Ket.
1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,84	8,86	8,88	
2	Rasio PAD	%	13,38	25,61	25,67	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3	3,01	3,02	
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3	3,01	3,02	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	14,34	49,36	49,48	
6	Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP	
B	***Pengadaan***					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,05	0,06	0,06	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	69,94	70,11	70,29	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	32,46	39,6	39,7	
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		13	13,03	13,07	
C	***Kepegawaian***					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	72,54	76,23	76,42	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,52	35,24	35,33	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,83	29,09	29,16	
D	***Manajemen Keuangan***					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,11	14,6	14,63	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,79	17,19	17,23	
3	Manajemen Aset	%	4	4,01	4,02	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,05	3,19	3,19	
E	***Transparansi dan Partisipasi Publik***					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	92,75	99,38	100	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	

Sumber : BPS, RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba Tahun 2025-2029, diolah

6.2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yangberhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i)pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii)penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv)pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiriatas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-4
Capaian dan Penetapan Target Indikator SPM
Kabupaten Bulukumba 2026-2030

No	Uraian	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
1	**PENDIDIKAN**				
1.1	**Pendidikan Dasar**				
1	persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	98,51	100	100
1.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen	54,88	68,54	100
1.2	**Pendidikan Kesetaraan**				
2	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	persen	96,25	100	100
2.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen	60,45	68,54	100
1.3	**Pendidikan anak usia dini**				
3	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	98,37	100	100
3.a	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa bedasarkan hasil asesmen nasional	persen		100	100
2	**KESEHATAN**				
2.1	**Pelayanan Kesehatan ibu hamil jumlah**				
4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	persen	100	100	100
2.2	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**				
5	Persentas ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	persen	100	100	100
2.3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**				

No	Uraian	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
6	Persentas bayi baru lahir umur 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.4	**Pelayanan kesehatan balita**				
7	Persentas Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	90,82	100	100
2.5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**				
8	Persentas anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**				
9	Persentas orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**				
10	Persentas orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.8	**Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi**				
11	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.9	**Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus**				
12	Persentas orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**				
13	Persentas orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
2.11	**Pelayanan kesehatan orang terduga tubercolosis**				
14	Persentas orang orang terduga Tuberkulosis (TBC)yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	51,76	100	100
2.12	**Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefic ieny Virus)**				
15	Persentas orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	persen	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**				
3.1	**Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**				
16	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	86,01	100	100
3.2	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic**				
17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	persen	83,82	100	100
4	**PERUMAHAN DA PEMUKIMAN**				
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/k ota;**				

No	Uraian	Satuan	Baseline 2024	Asumsi 2025	Target 2026
18	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	persen	100	100	100
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**				
18	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	persen	0	100	100
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
5.1	**Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum**				
20	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	persen	100	100	100
5.2	**Pelayanan informasi rawan bencana**				
21	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**				
22	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	100
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**				
23	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100
5.5	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				
24	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100
6	**SOSIAL**				
6.1	**Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantardiluar panti**				
25	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	100
6.2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**				
26	persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	100
6.3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**				
27	Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	100
6.4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**				
28	persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	100	100
6.5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota**				
29	persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	persen	100	100	100

6.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif danterlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten.

Penetapan target tahun 2026 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI-5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bulukumba Tahun 2026

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
TUJUAN 1. Tanpa Kemiskinan					
1.1.1*	Tingkat kemiskinan Ekstrim	Persen			Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,15	5,83	Dinas Sosial
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persen	8,59	8,04	Dinas Sosial
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persen	0,186	0,18	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen			Dinas kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen			BPJS Ketenagakerjaan
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	Persen			Dinas kesehatan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Persen			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	PM	PM	BPBD
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.	RP	53.982.591.835	55.062.243.671	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen	1	1	BPBD
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Persen	20	20	BPBD
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Persen	25,5	26	Dinas Sosial
1.b.1*	Proporsi pengeluaran anggaran yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin (pendidikan, kesehatan dan tranfer langsung) terhadap pengeluaran pemerintah	Persen	25,5	26	Dinas Sosial
TUJUAN 2. Tanpa Kelaparan					
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Persen	9,3	9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
2.2.1 *	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	18,8	17,5	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persen	8	7,5	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Persen	89,67	90,19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Persen	10	9	Dinas Kesehatan
2.4.1.[a]	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Persen	42,2	42,26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	Persen			Badan Pusat Statistik
TUJUAN 3. Kehidupan Yang Sehat dan Sejahtera					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka	5	5	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan; (b) di fasilitas kesehatan.	Persen	85	87	Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka	5	4	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Angka	50	40	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.	Angka	71	81	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Angka	163	143	Dinas Kesehatan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Persen	<1/1000 penduduk	<1/1000 penduduk	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Persen	2.5/100000 penduduk	2.5/100000 penduduk	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Orang	0	0	Dinas Kesehatan
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	Orang	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.[a]	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Persen	10	9	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	32,9	30,72	Dinas Kesehatan
3.4.1. (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	Persen	28,7	26,7	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Kematian akibat bunuh diri (incidence rate)	Angka	PM	PM	Satpol PP
3.5.1*	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	Angka	15	20	Dinas Kesehatan
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Angka	0,35	0,34	Dinas Kesehatan
3.6.1*	Kematian akibat kecelakaan lalu lintas	Angka	PM	PM	Satpol PP
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Persen	61	61,6	DPPKB, PPPA
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Persen	27,3	26,3	DPPKB, PPPA

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate* (TFR).	TFR	2,09	2,1	DPPKB, PPPA
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	96,8	98	Dinas Kesehatan
3.9.1.(a)	Angka kematian akibat polusi rumah tangga dan polusi udara ambien (luar ruangan).	Persen			BPJS Kesehatan
3.9.2.(a)	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	Persen			BPJS Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Persen	PM	PM	Satpol PP
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Persen	6,66	6,36	Dinas Kesehatan
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Persen	80	82	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Angka	2,77	2,85	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4. Pendidikan berkualitas					
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persen			Dinas Pendidikan
	(i) membaca				
	SD		59,66	62,16	
	SMP		64,18	65,28	
	(ii) matematika				
	SD		55,50	58,40	
	SMP		59,31	60,81	
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Angka	90,35	90,85	Dinas Pendidikan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Angka	20,05	19,55	Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Angka	95,50	96,00	Dinas Pendidikan
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Angka	46,50	47,00	Dinas Pendidikan
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen			DKUMKM, Naker
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Persen			Dinas Pendidikan
	(a). SD/MI Sederajat		106,00	106,50	
	(b). SMP/MTs Sederajat		107,00	107,50	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	91,87	92,32	Dinas Pendidikan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f)	Persen			Dinas Pendidikan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
	fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				
	(a) Listrik		98,15	98,65	
	(b) Internet untuk tujuan pengajaran		63,35	63,85	
	(c) Komputer untuk tujuan pengajaran		30,56	31,06	
	(e) Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin		40,00	40,50	
	(f) Fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)		90,00	90,50	
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	20,89	20,39	Dinas Pendidikan
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Persen	89,59	90,09	Dinas Pendidikan
TUJUAN 5.Kesetaraan Gender					
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Kebijakan	1	1	DPPKB, PPPA
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0,007	0,007	DPPKB, PPPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0,0017	0,0017	DPPKB, PPPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama	Persen	0,11	0,11	DPPKB, PPPA

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
	sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.				
5.3.2.(a)	Proporsi anak perempuan dari perempuan umur 15-49 tahun yang tinggal bersama dan menjalankan praktik sunat perempuan.	Persen			DPPKB, PPPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	Persen	22,50	22,50	DPPKB, PPPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen			DPPKB, PPPA
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Persen			DPPKB, PPPA
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Persen	12,36	22,66	DPPKB, PPPA
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Persen			DPPKB, PPPA
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.				DPPKB, PPPA
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.				Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
TUJUAN 6. Air bersih dan sanitasi layak					
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Persen			DPUTR
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persen			DPUTR
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	Persen			DLHK
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks			DLHK
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persen			DPUTR
TUJUAN 7. Energi bersih dan terjangkau					
7.1.1.[a]	Konsumsi Listrik per Kapita	Angka	694,06	807,53	PLN
TUJUAN 8. Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi					
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	4,81	5,51	Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta	46,62	49,19	Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Persen			DKUMKM, Naker

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen			DKUMKM, Naker
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Persen			DKUMKM, Naker
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Persen			DKUMKM, Naker
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp			DKUMKM, Naker
8.5.2*	Tingkat pengangguran	Persen	2,14	2,05	DKUMKM, Naker
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Angka			DKUMKM, Naker
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Persen			DKUMKM, Naker
8.7.1.[a]	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Persen			BPJS Ketenagakerjaan
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Angka			BPJS Ketenagakerjaan
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	0,86	0,9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	orang	4.455	6.740	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	575.196	432.379	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.10.1.(b)	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	Persen			DKUMKM, Naker

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur					
9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Dermaga	2	2	Dinas Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Persen	6,56	6,58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	5,8	5,89	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Persen	37	37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Angka			DKUMKM, Naker
9.5.2.[a]	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)	Persen			DKUMKM, Naker
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
TUJUAN 10 Berkurangnya Kesenjangan					
10.1.1.(a)	Koefisien Gini.	Koefisien	0,323	0,314	Dinas Sosial
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6,15	5,83	Dinas Sosial
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	0	0	Dinas Pemberdayaan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
					Masyarakat dan Desa
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	66	68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persen	23,49	22,89	Dinas Sosial
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	1,8	1,7	Dinas Sosial
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Angka			Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Angka			Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Produk Hukum	0	0	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen			BPJS Ketenagakerjaan
TUJUAN 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan					
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen	35	40	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen	35	40	Dinas Perhubungan

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Persen			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	PM	PM	BPBD
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	RP	53.982.591.835	55.062.243.671	BPBD
11.5.3*	(a) Kerusakan pada infrastruktur vital dan (b) jumlah gangguan pada layanan dasar, akibat bencana				
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persen	100	100	DLHK
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen			Satpol PP
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persen	20	20	BPBD
TUJUAN 12. Konsumsi dan Produksi yang bertanggunjawab					
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Persen	25	24	DLHK
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Persen	100 % (bidang Kesehatan)	100 % (bidang Kesehatan)	DLHK
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis	KG	a. 0.058 kg (bidang kesehatan) b. 75% (bidang kesehatan)	a. 0.057 kg (bidang kesehatan) b. 76% (bidang kesehatan)	DLHK
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	6797	7477	DLHK

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Angka	62	62	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	0	1	DLHK
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen			DLHK
12.7.1.(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dokumen			DLHK
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Angka	17	19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim					
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	Angka	PM	PM	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.1.(b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persen	2,12	2,25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persen	20	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.3.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Angka	105	125	DLHK
TUJUAN 14. Ekosistem Lautan					

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut	Persen	0	0	Dinas Perikanan
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan	Persen	0	0	Dinas Perikanan
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	59.554,94	60.150,49	Dinas Perikanan
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut	Angka	0	0	Dinas Perikanan
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persen	100	100	Dinas Perikanan
14.7.1*	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Persen	12,3	12,5	Dinas Perikanan
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Persen	0	0	Dinas Perikanan
TUJUAN 15.Ekosistem Daratan					
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Persen	0,0831	0,0831	DLHK
15.1.2*	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Angka			DLHK
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persen			DLHK
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Angka			DLHK
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	PM	PM	Satpol PP
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Angka	PM	PM	Kesatuan bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kasus			Satpol PP

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Persen			Satpol PP
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persen			DPPKB, PPPA
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Persen			DPPKB, PPPA
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Angka			DPPKB, PPPA
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur	Persen			DPPKB, PPPA
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Persen			Satpol PP
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Persen			Pengadilan Negeri
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Persen			Pengadilan Negeri
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Persen			Pengadilan Negeri
16.3.3.(a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)	Persen			Pengadilan Negeri
16.5.1*	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta	Persen			Pengadilan Negeri

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
	untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.				
16.5.1.[a]	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Persen	2,91	2,95	Inspektorat
16.5.2*	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.	Persen	0	0	Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persen	93,35	93,82	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persen	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Persen	92,46	92,5	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Persen	71,1	71,25	Inspektorat
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Angka			Sekda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	22,50	22,50	DPPKB, PPPA
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persen	19,44	19,44	DPPKB, PPPA

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Persen			Badan Pusat Statistik
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Persen			Badan Pusat Statistik
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesetaraan	Persen			Badan Pusat Statistik
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persen	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.[a]	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persen	PM	PM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Angka			DPPKB, PPPA
16.10.2.[a]	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Angka	38	38	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Angka	0	0	Sekda, Bagian Hukum dan HAM
TUJUAN 17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan					
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	Angka	49.498.298.794	52.694.914.860	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Persen	49,5	52,69	Badan Pendapatan Daerah

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Persen	10,7	10,7	Badan Pendapatan Daerah
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Angka			Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani	Angka			Badan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Persen			Badan Pusat statistik
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.	Persen			Badan Pusat statistik

Kode/ Tujuan	Nama Indikator SDGs Indikator	Satuan	Asumsi 2025	Target 2026	Sumber Data
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.				Badan Pusat statistik
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	-	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Kepmen PPN/Kepala Bappenas No.Kep 87/M.PPN/HK/0/2024 tentang Penetapan Metadata Indikator TPB/SDG's, Rankhir RPJMD Kab. Bulukumba 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran yang berpedoman pada RPJPD 2025-2045, RPJMD Kabupaten Bulukumba 2025-2029, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, dan RKP Tahun 2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai landasan,pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2026 ini sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2026. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD Tahun 2026 yang mana untuk memastikan APBD Tahun 2026 telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan - penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencanayang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah.

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas, akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dankonsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat,kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan danpenyelenggara Pemerintah Daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD agardipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dankegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja,akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 yang nantinya menjadi harapan untuk pelaksanaanya, diantaranya sebagai berikut :

a. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026.
b. OPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2026 dengan sebaik baiknya.
c. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
d. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
e. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJPD dan RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

7.2 Kesimpulan

a. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunanlainnya.
b. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2026.
c. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2026 yaitu : “***Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Daerah yang Berdaya Saing”*** sehingga program kegiatan di masing-masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus

dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

d. RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2026, diharapkan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.
e. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah,sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Dr. Soetomo No. 1 Bulukumba

Email : bappelitbangdabulukumba@gmail.com